BUPATI MAMUJU TENGAH
PROVINSI SULAWESI BARAT

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
NOMOR...TAHUN...

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peratiran Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5397);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH

DAN

BUPATI MAMUJU TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mamuju Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
7. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
8. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
9. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
10. Ekuitas adalah selisih antara total aset dengan total kewajiban.
11. Saldo Anggaran Lebih selanjutnya disingkat SAL adalah akumulasi sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA)/Sisa

kurang pembiayaan anggaran tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup, ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan.

12. Perubahan APBD adalah upaya Pemerintah Daerah untuk menyesuaikan rencana keuangan dengan perkembangan yang terjadi.

Pasal 2

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 tertuang dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah tahun anggaran 2025 sebagaimana yang ditetapkan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

(1) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :
   a. laporan realisasi APBD tahun anggaran 2025;
   b. laporan perubahan SAL tahun anggaran 2025;
   c. neraca Pemerintah Daerah per 31 Desember 2025;
   d. laporan operasional tahun anggaran 2025;
   e. laporan arus kas tahun anggaran 2025;
   f. laporan perubahan Ekuitas tahun anggaran 2025;
   g. catatan atas laporan keuangan.

(2) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan keuangan yang disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

Pasal 4

Laporan realisasi APBD tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

a. realisasi pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp645.179.353.993,73 (Enam Ratus empat puluh lima miliar seratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah tujuh puluh tiga sen) yang berarti 101,74% (Seratus satu koma tujuh puluh empat Persen) dari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp634.152.870.136,48 (Enam ratus tiga puluh empat miliar seratus lima puluh dua

juta delapan ratus tujuh puluh ribu seratus tiga puluh enam rupiah empat puluh delapan sen);

b. realisasi belanja dan transfer Daerah tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp 622.607.889.371,46 (Enam ratus dua puluh dua miliar enam ratus tujuh juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah empat puluh enam sen) yang berarti 96,67% (Sembilan puluh enam koma enam puluh tujuh Persen) dari perubahan APBD tahun anggaran 2025 sebesar Rp644.027.253.010,48 (Enam ratus empat puluh empat miliar dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh tiga ribu sepuluh rupiah empat puluh delapan sen);

c. berdasarkan realisasi pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan realisasi belanja daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdapat surplus anggaran tahun anggaran 2025 sebesar Rp22.571.464.622,27 (Dua puluh dua miliar lima ratus tujuh puluh satu juta empat ratus enam puluh empat ribu enam ratus dua puluh dua rupiah dua puluh tujuh sen) yang berarti (-228,59%) (Minus dua ratus dua puluh delapan koma lima puluh Sembilan Persen) dari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar -Rp9.874.382.874,00 (Minus sembilan miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah);

d. pembiayaan untuk menutupi Defisit anggaran tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada huruf c, adalah sebesar Rp9.874.382.874,43 (Sembilan miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah empat puluh tiga sen); dan

e. berdasarkan Defisit anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf c, dan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf d, terdapat SiLPA sebesar Rp32.445.847.496,70 (Tiga puluh dua miliar empat ratus empat puluh lima juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah tujuh puluh sen).

Pasal 5

Laporan perubahan SAL tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, memberikan informasi keuangan sebagai berikut :

a. SAL awal tahun anggaran 2025 sebesar Rp13.874.382.874,43 (Tiga belas miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah empat puluh tiga sen);

b. berdasarkan SAL awal sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdapat Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp13.874.382.874,43 (Tiga belas miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta tiga

ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah empat puluh tiga sen);

c. SiLPA tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, sebesar Rp32.445.847.496,70 (Tiga puluh dua miliar empat ratus empat puluh lima juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah tujuh puluh sen) ; dan

d. terdapat SAL akhir tahun anggaran 2025 sebesar Rp32.445.847.496,70 (Tiga puluh dua miliar empat ratus empat puluh lima juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah tujuh puluh sen).

Pasal 6

Neraca Pemerintah Daerah per 31 Desember 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, memberikan informasi keuangan sebagai berikut :

a. jumlah aset sebesar Rp1.194.443.438.959,02 (Satu triliun seratus sembilan puluh empat miliar empat ratus empat puluh tiga juta empat ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah dua sen);

b. jumlah kewajiban sebesar Rp4.607.636.404,93 (Empat miliar enam ratus tujuh juta enam ratus tiga puluh enam ribu empat ratus empat rupiah sembilan puluh tiga sen); dan

c. jumlah Ekuitas sebesar Rp 1.189.835.802.554,09 (Satu triliun seratus delapan puluh sembilan miliar delapan ratus tiga puluh lima juta delapan ratus dua ribu lima ratus lima puluh empat rupiah sembilan sen).

Pasal 7

Laporan operasional Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

a. pendapatan operasional Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp637.644.205.608,25 (Enam ratus tiga puluh tujuh miliar enam ratus empat puluh empat juta dua ratus lima ribu enam ratus delapan rupiah dua puluh lima sen);

b. beban operasional Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp807.127.308.813,17 (Delapan ratus tujuh miliar seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus delapan ribu delapan ratus tiga belas rupiah tujuh belas sen);

c. berdasarkan pendapatan operasional sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan Beban Operasional sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdapat Defisit dari

kegiatan Non Operasional sebesar Rp0,01(Nol koma nol satu);

d. beban luar biasa sebesar Rp696.208.433,00 (Enam ratus sembilan puluh enam juta dua ratus delapan ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah); dan

e. berdasarkan defisit dari kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, beban luar biasa sebagaimana dimaksud pada huruf d, terdapat surplus/defisit Laporan Operasional Tahun Anggaran 2025 sebesar - Rp170.179.311.637,92 (Minus seratus tujuh puluh miliar seratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus sebelas ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah sembilan puluh dua sen).

Pasal 8

Laporan arus kas Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, memberikan informasi keuangan sebagai berikut :

a. jumlah arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp106.049.204.032,27 (Seratus enam miliar empat puluh sembilan juta dua ratus empat ribu tiga puluh dua rupiah dua puluh tujuh sen);

b. jumlah arus kas bersih dari aktivitas investasi sebesar - Rp87.477.739.410,00 (Minus delapan puluh tujuh miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus sepuluh rupiah).;

c. jumlah Arus Kas Bersih dari aktivitas Pembiayaan sebesar Rp0,00(Nol koma nol rupiah);

d. jumlah arus kas bersih dari aktivitas transitoris sebesar - Rp144.550.923,00 (Minus seratus empat puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah);

e. saldo awal kas di BUD Rp14.083.589.293,43 (Empat belas miliar delapan puluh tiga juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah empat puluh tiga sen); dan

f. saldo akhir kas di BUD Rp32.510.502.992,70 (Tiga puluh dua miliar lima ratus sepuluh juta lima ratus dua ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah tujuh puluh sen).

Pasal 9

Laporan perubahan Ekuitas Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, memberikan informasi keuangan sebagai berikut :

a. Ekuitas awal Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.370.861.712.546,60 (Satu triliun tiga ratus tujuh puluh miliar delapan ratus enam puluh satu juta tujuh ratus dua belas ribu lima ratus empat puluh enam rupiah enam puluh sen);

b. tidak terdapat penyesuaian Ekuitas awal Tahun Anggaran 2025;

c. berdasarkan Ekuitas awal Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan penyesuaian Ekuitas awal tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdapat Ekuitas awal Tahun Anggaran 2025 setelah Penyesuaian sebesar Rp1.370.861.712.546,60 (Satu triliun tiga ratus tujuh puluh miliar delapan ratus enam puluh satu juta tujuh ratus dua belas ribu lima ratus empat puluh enam rupiah enam puluh sen);

d. surplus/defisit laporan operasional Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, sebesar -Rp170.179.311.637,92 (Minus seratus tujuh puluh miliar seratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus sebelas ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah sembilan puluh dua sen);

e. koreksi yang langsung menambah atau mengurangi Ekuitas sebesar -Rp10.846.598.354,59 (Minus sepuluh miliar delapan ratus empat puluh enam juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah lima puluh sembilan sen); dan

f. berdasarkan Ekuitas awal Tahun Anggaran 2025 setelah penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf c, surplus Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada huruf d, Koreksi yang langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas sebagaimana dimaksud pada huruf e, terdapat ekuitas akhir Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.189.835.802.554,09 (Satu triliun seratus delapan puluh sembilan miliar delapan ratus tiga puluh lima juta delapan ratus dua ribu lima ratus lima puluh empat rupiah sembilan sen).

Pasal 10

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi APBD, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas.

Pasal 11

Selain laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah juga dilampiri dengan ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik daerah.

Pasal 12

(1) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

(2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh opini wajar tanpa pengecualian.

Pasal 13

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

Lampiran I	:	Laporan realisasi anggaran (LRA) terdiri atas:
Lampiran I.1	:	Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
Lampiran I.2	:	Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
Lampiran I.3	:	Rincian APBD menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegaiatan, sub kegaiatan, kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
Lampiran I.4	:	Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan subkegaiatan;
Lampiran II	:	Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
Lampiran III	:	Laporan operasional;
Lampiran IV	:	Laporan perubahan Ekuitas;
Lampiran V	:	Neraca;
Lampiran VI	:	Laporan arus kas;
Lampiran VII	:	Catatan atas laporan keuangan;
Lampiran VIII	:	Daftar rekapitulasi piutang daerah;
Lampiran IX	:	Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
Lampiran X	:	Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;

Lampiran XI	:	Daftar menyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
Lampiran XII	:	Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
Lampiran XIII	:	Daftar rekapitulasi aset tetap;
Lampiran XIV	:	Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
Lampiran XV	:	Daftar rekapitulasi aset lainnya;
Lampiran XVI	:	Daftar dana cadangan daerah;
Lampiran XVII	:	Daftar kewajiban jangka pendek;
Lampiran XVIII	:	Daftar kewajiban jangka panjang;
Lampiran XIX	:	Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2025 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
Lampiran XX	:	Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah terdiri atas :
Lampiran XX.1	:	lkhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
Lampiran XX.2	:	lkhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

Ditetapkan di Tobadak
pada tanggal...
BUPATI MAMUJU TENGAH,

ARSAL ARAS

Diundangkan di Tobadak
pada tanggal...
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH,

LITHA FEBRIANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2026
NOMOR...

DAFTAR ISI

Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi 1

Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan belanja dan pembiayaan 12

Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan 27

Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, kegiatan dan sub kegiatan 191

Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 220

Lampiran III : Laporan Operasional 221

Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas 223

Lampiran V : Neraca 224

Lampiran VI : Laporan Arus Kas 227

Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan 229

Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah 376

Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih 377

Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir 378

Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 379

Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah 380

Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap Daerah 381

Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan 392

Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya 393

Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah 394

Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek 395

Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang 397

Lampiran XIX : Daftar Sub Kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun 2024 dan dianggarkan Kembali dalam tahun anggaran berikutnya 398

Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah Terdiri atas:

Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah 425

Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah 426

Lampiran I.1: Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah
Nomor :
Tanggal : 2026

KABUPATEN MAMUJU TENGAH

RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGRAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

TAHUN ANGGARAN 2025

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
		4	**Pendapatan**	**634.152.870.136,48**	**645.179.353.993,73**	**11.026.483.857,25**	**101,73**
1			**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**44.611.304.098,00**	**47.128.956.924,00**	**2.517.652.826,00**	**105,64**
1.02			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**36.086.815.848,00**	**40.755.100.720,00**	**4.668.284.872,00**	**112,93**
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0000**		**DINAS KESEHATAN**	**14.586.815.848,00**	**0,00**	**(14.586.815.848,00)**	**0,00**
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	14.586.815.848,00	0,00	(14.586.815.848,00)	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.247.632.937,00	0,00	(6.247.632.937,00)	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	6.247.632.937,00	0,00	(6.247.632.937,00)	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	8.339.182.911,00	0,00	(8.339.182.911,00)	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	8.339.182.911,00	0,00	(8.339.182.911,00)	0,00
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0001**		**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**	**21.500.000.000,00**	**25.304.134.624,00**	**3.804.134.624,00**	**117,69**
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	4	PENDAPATAN DAERAH	21.500.000.000,00	25.304.134.624,00	3.804.134.624,00	117,69
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	21.500.000.000,00	25.304.134.624,00	3.804.134.624,00	117,69
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	4.1.02	Retribusi Daerah	21.500.000.000,00	25.304.134.624,00	3.804.134.624,00	117,69
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0002**		**PUSKESMAS PANGALE**	**0,00**	**1.394.682.624,00**	**1.394.682.624,00**	**0,00**
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	1.394.682.624,00	1.394.682.624,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	786.900.055,00	786.900.055,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	4.1.02	Retribusi Daerah	0,00	786.900.055,00	786.900.055,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	607.782.569,00	607.782.569,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	607.782.569,00	607.782.569,00	0,00
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0003**		**PUSKESMAS POLO CAMBA**	**0,00**	**538.927.506,00**	**538.927.506,00**	**0,00**
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	538.927.506,00	538.927.506,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	163.001.134,00	163.001.134,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	4.1.02	Retribusi Daerah	0,00	163.001.134,00	163.001.134,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	375.926.372,00	375.926.372,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	375.926.372,00	375.926.372,00	0,00
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0004**		**PUSKESMAS SALUGATTA**	**0,00**	**1.897.224.129,00**	**1.897.224.129,00**	**0,00**
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	1.897.224.129,00	1.897.224.129,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	948.292.420,00	948.292.420,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	4.1.02	Retribusi Daerah	0,00	948.292.420,00	948.292.420,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	948.931.709,00	948.931.709,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	948.931.709,00	948.931.709,00	0,00
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0005**		**PUSKESMAS BABANA**	**0,00**	**1.454.306.230,00**	**1.454.306.230,00**	**0,00**
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	1.454.306.230,00	1.454.306.230,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	726.417.950,00	726.417.950,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	4.1.02	Retribusi Daerah	0,00	726.417.950,00	726.417.950,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	727.888.280,00	727.888.280,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	727.888.280,00	727.888.280,00	0,00
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0006**		**PUSKESMAS TOBADAK**	**0,00**	**1.941.793.791,00**	**1.941.793.791,00**	**0,00**
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	1.941.793.791,00	1.941.793.791,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	900.113.825,00	900.113.825,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	4.1.02	Retribusi Daerah	0,00	900.113.825,00	900.113.825,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	1.041.679.966,00	1.041.679.966,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	1.041.679.966,00	1.041.679.966,00	0,00
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0007**		**PUSKESMAS SALUADAK**	**0,00**	**356.587.819,00**	**356.587.819,00**	**0,00**
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	356.587.819,00	356.587.819,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	115.830.550,00	115.830.550,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	4.1.02	Retribusi Daerah	0,00	115.830.550,00	115.830.550,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	240.757.269,00	240.757.269,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	240.757.269,00	240.757.269,00	0,00
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0008**		**PUSKESMAS BATUPARIGI**	**0,00**	**476.603.971,00**	**476.603.971,00**	**0,00**
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	476.603.971,00	476.603.971,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	127.654.850,00	127.654.850,00	0,00

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	4.1.02	Retribusi Daerah	0,00	127.654.850,00	127.654.850,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	348.949.121,00	348.949.121,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	348.949.121,00	348.949.121,00	0,00
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0009**		**PUSKESMAS TOPOYO**	**0,00**	**3.032.415.350,00**	**3.032.415.350,00**	**0,00**
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	3.032.415.350,00	3.032.415.350,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	1.263.021.788,00	1.263.021.788,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	4.1.02	Retribusi Daerah	0,00	1.263.021.788,00	1.263.021.788,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	1.769.393.562,00	1.769.393.562,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	1.769.393.562,00	1.769.393.562,00	0,00
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0010**		**PUSKESMAS SALUPANGKANG**	**0,00**	**1.228.940.277,00**	**1.228.940.277,00**	**0,00**
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	1.228.940.277,00	1.228.940.277,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	535.863.100,00	535.863.100,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	4.1.02	Retribusi Daerah	0,00	535.863.100,00	535.863.100,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	693.077.177,00	693.077.177,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	693.077.177,00	693.077.177,00	0,00
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0011**		**PUSKESMAS LABA**	**0,00**	**1.584.332.937,00**	**1.584.332.937,00**	**0,00**
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	1.584.332.937,00	1.584.332.937,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	825.909.325,00	825.909.325,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	4.1.02	Retribusi Daerah	0,00	825.909.325,00	825.909.325,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	758.423.612,00	758.423.612,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	758.423.612,00	758.423.612,00	0,00
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0012**		**PUSKESMAS DURIKUMBA**	**0,00**	**1.545.151.462,00**	**1.545.151.462,00**	**0,00**
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	1.545.151.462,00	1.545.151.462,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	772.513.500,00	772.513.500,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	4.1.02	Retribusi Daerah	0,00	772.513.500,00	772.513.500,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	772.637.962,00	772.637.962,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	772.637.962,00	772.637.962,00	0,00
1.03			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**8.524.488.250,00**	**6.373.856.204,00**	**(2.150.632.046,00)**	**74,77**
1.03	**1.03.0.00.0.00.01.0000**		**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**8.524.488.250,00**	**6.373.856.204,00**	**(2.150.632.046,00)**	**74,77**
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	8.524.488.250,00	6.373.856.204,00	(2.150.632.046,00)	74,77
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.524.488.250,00	6.373.856.204,00	(2.150.632.046,00)	74,77
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	8.524.488.250,00	6.370.856.204,00	(2.153.632.046,00)	74,73
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
2			**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**626.800.000,00**	**444.115.000,00**	**(182.685.000,00)**	**70,85**
2.17			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**	**160.000.000,00**	**142.000.000,00**	**(18.000.000,00)**	**88,75**
2.17	**2.17.3.30.3.31.01.0000**		**DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**	**160.000.000,00**	**142.000.000,00**	**(18.000.000,00)**	**88,75**
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	160.000.000,00	142.000.000,00	(18.000.000,00)	88,75
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	160.000.000,00	142.000.000,00	(18.000.000,00)	88,75
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	160.000.000,00	142.000.000,00	(18.000.000,00)	88,75
2.19			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**	**20.000.000,00**	**0,00**	**(20.000.000,00)**	**0,00**
2.19	**2.19.3.26.0.00.02.0000**		**DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA**	**20.000.000,00**	**0,00**	**(20.000.000,00)**	**0,00**
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	0,00
2.11			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**	**256.800.000,00**	**202.115.000,00**	**(54.685.000,00)**	**78,70**
2.11	**2.11.0.00.0.00.01.0000**		**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**	**256.800.000,00**	**202.115.000,00**	**(54.685.000,00)**	**78,70**
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	256.800.000,00	202.115.000,00	(54.685.000,00)	78,70
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	256.800.000,00	202.115.000,00	(54.685.000,00)	78,70
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	256.800.000,00	202.115.000,00	(54.685.000,00)	78,70
2.15			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**	**190.000.000,00**	**100.000.000,00**	**(90.000.000,00)**	**52,63**
2.15	**2.15.0.00.0.00.01.0000**		**DINAS PERHUBUNGAN**	**190.000.000,00**	**100.000.000,00**	**(90.000.000,00)**	**52,63**
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	190.000.000,00	100.000.000,00	(90.000.000,00)	52,63
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	190.000.000,00	100.000.000,00	(90.000.000,00)	52,63
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	190.000.000,00	100.000.000,00	(90.000.000,00)	52,63
3			**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**100.000.000,00**	**75.060.000,00**	**(24.940.000,00)**	**75,06**
3.25			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**100.000.000,00**	**75.060.000,00**	**(24.940.000,00)**	**75,06**
3.25	**3.25.0.00.0.00.01.0000**		**DINAS PERIKANAN**	**100.000.000,00**	**75.060.000,00**	**(24.940.000,00)**	**75,06**
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	100.000.000,00	75.060.000,00	(24.940.000,00)	75,06
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100.000.000,00	75.060.000,00	(24.940.000,00)	75,06

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	0,00	75.060.000,00	75.060.000,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	0,00
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	0,00	24.865.000,00	24.865.000,00	0,00
4.01			SEKRETARIAT DAERAH	0,00	24.865.000,00	24.865.000,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007		BAGIAN UMUM	0,00	24.865.000,00	24.865.000,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	24.865.000,00	24.865.000,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	24.865.000,00	24.865.000,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	24.865.000,00	24.865.000,00	0,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	588.814.766.038,48	597.506.357.069,73	8.691.591.031,25	101,47
5.02			KEUANGAN	588.814.766.038,48	597.506.357.069,73	8.691.591.031,25	101,47
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	588.814.766.038,48	597.506.357.069,73	8.691.591.031,25	101,47
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	588.814.766.038,48	597.506.357.069,73	8.691.591.031,25	101,47
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	28.243.015.433,00	33.703.037.723,73	5.460.022.290,73	119,33
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	4.1.01	Pajak Daerah	23.965.016.835,00	26.153.179.463,00	2.188.162.628,00	109,13
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.980.000.000,00	1.162.498.116,00	(817.501.884,00)	58,71
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	2.297.998.598,00	6.387.360.144,73	4.089.361.546,73	277,95
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	4.2	PENDAPATAN TRANSFER	560.571.750.605,48	563.803.319.346,00	3.231.568.740,52	100,57
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	543.307.790.000,00	544.840.203.904,00	1.532.413.904,00	100,28
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	17.263.960.605,48	18.963.115.442,00	1.699.154.836,52	109,84
		5	Belanja	644.027.253.010,48	622.607.889.371,46	(21.419.363.639,02)	96,67
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	393.266.357.231,16	384.324.142.820,46	(8.942.214.410,70)	97,72
1.01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	188.793.621.071,15	191.742.869.188,00	2.949.248.116,85	101,56
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	188.793.621.071,15	191.742.869.188,00	2.949.248.116,85	101,56
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	5	BELANJA DAERAH	188.793.621.071,15	191.742.869.188,00	2.949.248.116,85	101,56
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	5.1	BELANJA OPERASI	178.772.628.187,15	181.758.850.972,00	2.986.222.784,85	101,67
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	148.357.425.707,11	151.865.107.038,00	3.507.681.330,89	102,36
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.660.799.174,04	23.147.705.866,00	(513.093.308,04)	97,83
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	5.1.05	Belanja Hibah	6.754.403.306,00	6.746.038.068,00	(8.365.238,00)	99,87
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	5.2	BELANJA MODAL	10.020.992.884,00	9.984.018.216,00	(36.974.668,00)	99,63
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	5.2.01	Belanja Modal Tanah	528.058.390,00	523.741.297,00	(4.317.093,00)	99,18
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.759.861.858,00	3.762.777.149,00	2.915.291,00	100,07
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.281.728.646,00	4.263.900.863,00	(17.827.783,00)	99,58
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	11.076.000,00	11.076.000,00	0,00	100,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.440.267.990,00	1.422.522.907,00	(17.745.083,00)	98,76
1.02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	152.149.582.897,13	146.819.881.756,46	(5.329.701.140,67)	96,49
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000		DINAS KESEHATAN	89.913.725.289,42	86.256.353.412,00	(3.657.371.877,42)	95,93
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	89.913.725.289,42	86.256.353.412,00	(3.657.371.877,42)	95,93
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	67.431.838.642,89	63.896.134.773,00	(3.535.703.869,89)	94,75
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	33.611.775.633,00	32.515.349.357,00	(1.096.426.276,00)	96,73
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.820.063.009,89	31.380.785.416,00	(2.439.277.593,89)	92,78
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	22.481.886.646,53	22.360.218.639,00	(121.668.007,53)	99,45
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.265.372.030,00	3.158.712.068,00	(106.659.962,00)	96,73
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	19.215.264.616,53	19.200.256.571,00	(15.008.045,53)	99,92
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	40.115.644.517,71	40.550.794.618,00	435.150.100,29	101,08
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	5	BELANJA DAERAH	40.115.644.517,71	40.550.794.618,00	435.150.100,29	101,08
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	38.524.968.193,71	39.006.502.373,00	481.534.179,29	101,24
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	12.267.960.042,71	11.940.526.822,00	(327.433.220,71)	97,33
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.257.008.151,00	27.065.975.551,00	808.967.400,00	103,08
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	5.2	BELANJA MODAL	1.590.676.324,00	1.544.292.245,00	(46.384.079,00)	97,08
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.062.875.227,00	1.044.813.650,00	(18.061.577,00)	98,30
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	327.850.000,00	299.850.000,00	(28.000.000,00)	91,45
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	199.951.097,00	199.628.595,00	(322.502,00)	99,83
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002		PUSKESMAS PANGALE	1.913.252.303,00	1.750.477.532,00	(162.774.771,00)	91,49
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	5	BELANJA DAERAH	1.913.252.303,00	1.750.477.532,00	(162.774.771,00)	91,49
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.817.240.805,00	1.675.360.325,00	(141.880.480,00)	92,19
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	65.880.000,00	65.507.322,00	(372.678,00)	99,43
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.751.360.805,00	1.609.853.003,00	(141.507.802,00)	91,92
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	5.2	BELANJA MODAL	96.011.498,00	75.117.207,00	(20.894.291,00)	78,23
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	96.011.498,00	75.117.207,00	(20.894.291,00)	78,23

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0003**		**PUSKESMAS POLO CAMBA**	**1.041.772.284,00**	**952.134.394,00**	**(89.637.890,00)**	**91,39**
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	5	BELANJA DAERAH	1.041.772.284,00	952.134.394,00	(89.637.890,00)	91,39
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	965.153.284,00	888.334.394,00	(76.818.890,00)	92,04
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	5.1.01	Belanja Pegawai	33.476.196,00	32.575.277,00	(900.919,00)	97,30
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	931.677.088,00	855.759.117,00	(75.917.971,00)	91,85
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	5.2	BELANJA MODAL	76.619.000,00	63.800.000,00	(12.819.000,00)	83,26
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	76.619.000,00	63.800.000,00	(12.819.000,00)	83,26
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0004**		**PUSKESMAS SALUGATTA**	**2.646.140.770,00**	**2.329.977.524,00**	**(316.163.246,00)**	**88,05**
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	5	BELANJA DAERAH	2.646.140.770,00	2.329.977.524,00	(316.163.246,00)	88,05
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	2.549.334.670,00	2.270.822.524,00	(278.512.146,00)	89,07
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	93.068.475,00	66.429.787,00	(26.638.688,00)	71,37
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.456.266.195,00	2.204.392.737,00	(251.873.458,00)	89,74
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	5.2	BELANJA MODAL	96.806.100,00	59.155.000,00	(37.651.100,00)	61,10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.900.000,00	0,00	(26.900.000,00)	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	69.906.100,00	59.155.000,00	(10.751.100,00)	84,62
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0005**		**PUSKESMAS BABANA**	**2.001.851.318,00**	**1.844.825.341,00**	**(157.025.977,00)**	**92,15**
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	5	BELANJA DAERAH	2.001.851.318,00	1.844.825.341,00	(157.025.977,00)	92,15
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.872.325.318,00	1.731.065.341,00	(141.259.977,00)	92,45
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	5.1.01	Belanja Pegawai	58.223.549,00	58.219.106,00	(4.443,00)	99,99
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.814.101.769,00	1.672.846.235,00	(141.255.534,00)	92,21
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	5.2	BELANJA MODAL	129.526.000,00	113.760.000,00	(15.766.000,00)	87,82
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	129.526.000,00	113.760.000,00	(15.766.000,00)	87,82
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0006**		**PUSKESMAS TOBADAK**	**2.629.133.532,00**	**2.412.763.867,00**	**(216.369.665,00)**	**91,77**
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	5	BELANJA DAERAH	2.629.133.532,00	2.412.763.867,00	(216.369.665,00)	91,77
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	2.507.713.932,00	2.318.191.247,00	(189.522.685,00)	92,44
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	5.1.01	Belanja Pegawai	83.681.650,00	82.687.501,00	(994.149,00)	98,81
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.424.032.282,00	2.235.503.746,00	(188.528.536,00)	92,22
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	5.2	BELANJA MODAL	121.419.600,00	94.572.620,00	(26.846.980,00)	77,88
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	121.419.600,00	94.572.620,00	(26.846.980,00)	77,88
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0007**		**PUSKESMAS SALUADAK**	**834.866.864,00**	**659.295.072,00**	**(175.571.792,00)**	**78,97**
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	5	BELANJA DAERAH	834.866.864,00	659.295.072,00	(175.571.792,00)	78,97
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	804.916.864,00	638.095.072,00	(166.821.792,00)	79,27
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	5.1.01	Belanja Pegawai	39.848.705,00	42.242.228,00	2.393.523,00	106,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	765.068.159,00	595.852.844,00	(169.215.315,00)	77,88
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	5.2	BELANJA MODAL	29.950.000,00	21.200.000,00	(8.750.000,00)	70,78
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	29.950.000,00	21.200.000,00	(8.750.000,00)	70,78
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0008**		**PUSKESMAS BATUPARIGI**	**903.989.386,00**	**803.766.715,00**	**(100.222.671,00)**	**88,91**
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	5	BELANJA DAERAH	903.989.386,00	803.766.715,00	(100.222.671,00)	88,91
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	870.274.981,00	770.606.715,00	(99.668.266,00)	88,54
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	5.1.01	Belanja Pegawai	47.818.446,00	47.818.446,00	0,00	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	822.456.535,00	722.788.269,00	(99.668.266,00)	87,88
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	5.2	BELANJA MODAL	33.714.405,00	33.160.000,00	(554.405,00)	98,35
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	33.714.405,00	33.160.000,00	(554.405,00)	98,35
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0009**		**PUSKESMAS TOPOYO**	**3.849.697.052,00**	**3.652.211.643,00**	**(197.485.409,00)**	**94,87**
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	5	BELANJA DAERAH	3.849.697.052,00	3.652.211.643,00	(197.485.409,00)	94,87
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	3.499.896.552,00	3.309.484.143,00	(190.412.409,00)	94,55
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	5.1.01	Belanja Pegawai	86.620.000,00	86.620.000,00	0,00	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.413.276.552,00	3.222.864.143,00	(190.412.409,00)	94,42
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	5.2	BELANJA MODAL	349.800.500,00	342.727.500,00	(7.073.000,00)	97,97
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	349.800.500,00	342.727.500,00	(7.073.000,00)	97,97
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0010**		**PUSKESMAS SALUPANGKANG**	**1.819.698.915,00**	**1.662.425.747,82**	**(157.273.167,18)**	**91,35**
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	5	BELANJA DAERAH	1.819.698.915,00	1.662.425.747,82	(157.273.167,18)	91,35
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	1.731.441.615,00	1.586.483.747,82	(144.957.867,18)	91,62
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	5.1.01	Belanja Pegawai	71.727.500,00	71.726.816,00	(684,00)	99,99
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.659.714.115,00	1.514.756.931,82	(144.957.183,18)	91,26
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	5.2	BELANJA MODAL	88.257.300,00	75.942.000,00	(12.315.300,00)	86,04
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	88.257.300,00	75.942.000,00	(12.315.300,00)	86,04
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0011**		**PUSKESMAS LARA**	**2.320.344.005,00**	**2.022.940.575,82**	**(297.403.429,18)**	**87,18**
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	5	BELANJA DAERAH	2.320.344.005,00	2.022.940.575,82	(297.403.429,18)	87,18

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	5.1	BELANJA OPERASI	2.114.024.905,00	1.927.574.325,82	(186.450.579,18)	91,18
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	5.1.01	Belanja Pegawai	71.312.004,00	70.532.461,00	(779.543,00)	98,90
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.042.712.901,00	1.857.041.864,82	(185.671.036,18)	90,91
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	5.2	BELANJA MODAL	206.319.100,00	95.366.250,00	(110.952.850,00)	46,22
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	183.779.100,00	87.366.250,00	(96.412.850,00)	47,53
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	22.540.000,00	8.000.000,00	(14.540.000,00)	35,49
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0012**		**PUSKESMAS DURIKUMBA**	**2.159.466.661,00**	**1.921.915.314,82**	**(237.551.346,18)**	**88,99**
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	5	BELANJA DAERAH	2.159.466.661,00	1.921.915.314,82	(237.551.346,18)	88,99
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	5.1	BELANJA OPERASI	2.053.299.161,00	1.815.747.814,82	(237.551.346,18)	88,43
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	5.1.01	Belanja Pegawai	57.433.330,00	57.428.685,00	(4.645,00)	99,99
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.995.865.831,00	1.758.319.129,82	(237.546.701,18)	88,09
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	5.2	BELANJA MODAL	106.167.500,00	106.167.500,00	0,00	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	106.167.500,00	106.167.500,00	0,00	100,00
1.03			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**35.723.748.449,22**	**30.610.490.618,00**	**(5.113.257.831,22)**	**85,68**
1.03	**1.03.0.00.0.00.01.0000**		**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**35.723.748.449,22**	**30.610.490.618,00**	**(5.113.257.831,22)**	**85,68**
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	35.723.748.449,22	30.610.490.618,00	(5.113.257.831,22)	85,68
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	11.935.480.232,74	11.171.591.770,00	(763.888.462,74)	93,59
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.176.093.731,74	2.742.670.003,00	(433.423.728,74)	86,35
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.739.609.808,00	8.415.348.767,00	(324.261.041,00)	96,28
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	19.776.693,00	13.573.000,00	(6.203.693,00)	68,63
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	23.788.268.216,48	19.438.898.848,00	(4.349.369.368,48)	81,71
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	132.386.500,00	128.371.500,00	(4.015.000,00)	96,96
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.491.918.388,35	960.351.000,00	(531.567.388,35)	64,37
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	22.163.963.328,13	18.350.176.348,00	(3.813.786.980,13)	82,79
1.04			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**2.289.670.703,50**	**2.200.670.557,00**	**(89.000.146,50)**	**96,11**
1.04	**1.04.2.10.0.00.02.0000**		**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN**	**2.289.670.703,50**	**2.200.670.557,00**	**(89.000.146,50)**	**96,11**
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	5	BELANJA DAERAH	2.289.670.703,50	2.200.670.557,00	(89.000.146,50)	96,11
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	5.1	BELANJA OPERASI	2.253.943.203,50	2.165.345.557,00	(88.597.646,50)	96,06
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.430.252.141,50	1.363.584.114,00	(66.668.027,50)	95,33
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	823.691.062,00	801.761.443,00	(21.929.619,00)	97,33
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	5.2	BELANJA MODAL	35.727.500,00	35.325.000,00	(402.500,00)	98,87
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.727.500,00	35.325.000,00	(402.500,00)	98,87
1.05			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**	**11.931.387.185,10**	**10.640.892.411,00**	**(1.290.494.774,10)**	**89,18**
1.05	**1.05.0.00.0.00.03.0000**		**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN**	**7.463.070.344,10**	**6.893.594.519,00**	**(569.475.825,10)**	**92,36**
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	5	BELANJA DAERAH	7.463.070.344,10	6.893.594.519,00	(569.475.825,10)	92,36
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	5.1	BELANJA OPERASI	7.454.070.344,10	6.884.594.519,00	(569.475.825,10)	92,36
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.649.136.445,10	2.485.335.069,00	(163.801.376,10)	93,81
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.804.933.899,00	4.399.259.450,00	(405.674.449,00)	91,55
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	5.2	BELANJA MODAL	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00
1.05	**1.05.0.00.0.00.04.0000**		**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**	**4.468.316.841,00**	**3.747.297.892,00**	**(721.018.949,00)**	**83,86**
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	5	BELANJA DAERAH	4.468.316.841,00	3.747.297.892,00	(721.018.949,00)	83,86
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	5.1	BELANJA OPERASI	3.098.663.336,00	3.001.235.017,00	(97.428.319,00)	96,85
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.327.646.697,00	1.270.988.566,00	(56.658.131,00)	95,73
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.771.016.639,00	1.730.246.451,00	(40.770.188,00)	97,69
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	5.2	BELANJA MODAL	1.369.653.505,00	746.062.875,00	(623.590.630,00)	54,47
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.393.505,00	24.393.505,00	0,00	100,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.345.260.000,00	721.669.370,00	(623.590.630,00)	53,64
1.06			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**	**2.378.346.925,06**	**2.309.338.290,00**	**(69.008.635,06)**	**97,09**
1.06	**1.06.0.00.0.00.01.0000**		**DINAS SOSIAL**	**2.378.346.925,06**	**2.309.338.290,00**	**(69.008.635,06)**	**97,09**
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	2.378.346.925,06	2.309.338.290,00	(69.008.635,06)	97,09
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	2.359.346.925,06	2.290.338.290,00	(69.008.635,06)	97,07
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	968.173.529,06	929.769.396,00	(38.404.133,06)	96,03
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.365.173.396,00	1.338.568.894,00	(26.604.502,00)	98,05
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	26.000.000,00	22.000.000,00	(4.000.000,00)	84,61
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	100,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	100,00
2			**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**58.609.458.468,14**	**54.894.760.368,00**	**(3.714.698.100,14)**	**93,66**
2.07			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**	**1.665.839.039,00**	**1.665.793.039,00**	**(46.000,00)**	**99,99**
2.07	**2.07.3.32.0.00.01.0000**		**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**	**1.665.839.039,00**	**1.665.793.039,00**	**(46.000,00)**	**99,99**

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	1.665.839.039,00	1.665.793.039,00	(46.000,00)	99,99
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.665.839.039,00	1.665.793.039,00	(46.000,00)	99,99
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.665.839.039,00	1.665.793.039,00	(46.000,00)	99,99
2.08			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	**3.214.394.794,98**	**3.108.554.251,00**	**(105.840.543,98)**	**96,70**
2.08	**2.08.2.14.0.00.02.0000**		**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**	**3.214.394.794,98**	**3.108.554.251,00**	**(105.840.543,98)**	**96,70**
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	5	BELANJA DAERAH	3.214.394.794,98	3.108.554.251,00	(105.840.543,98)	96,70
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	5.1	BELANJA OPERASI	3.207.810.294,98	3.101.969.751,00	(105.840.543,98)	96,70
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.171.314.064,00	2.077.420.006,00	(93.894.058,00)	95,67
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.036.496.230,98	1.024.549.745,00	(11.946.485,98)	98,84
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	5.2	BELANJA MODAL	6.584.500,00	6.584.500,00	0,00	100,00
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.584.500,00	6.584.500,00	0,00	100,00
2.09			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**	**286.235.193,00**	**285.979.300,00**	**(255.893,00)**	**99,91**
2.09	**2.09.3.27.0.00.01.0000**		**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN**	**286.235.193,00**	**285.979.300,00**	**(255.893,00)**	**99,91**
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	286.235.193,00	285.979.300,00	(255.893,00)	99,91
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	281.235.193,00	280.979.300,00	(255.893,00)	99,90
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	281.235.193,00	280.979.300,00	(255.893,00)	99,90
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
2.10			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**	**9.076.634.801,00**	**6.545.769.870,00**	**(2.530.864.931,00)**	**72,11**
2.10	**1.04.2.10.0.00.02.0000**		**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN**	**9.076.634.801,00**	**6.545.769.870,00**	**(2.530.864.931,00)**	**72,11**
2.10	1.04.2.10.0.00.02.0000	5	BELANJA DAERAH	9.076.634.801,00	6.545.769.870,00	(2.530.864.931,00)	72,11
2.10	1.04.2.10.0.00.02.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.308.665.000,00	704.763.400,00	(603.901.600,00)	53,85
2.10	1.04.2.10.0.00.02.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.308.665.000,00	704.763.400,00	(603.901.600,00)	53,85
2.10	1.04.2.10.0.00.02.0000	5.2	BELANJA MODAL	7.767.969.801,00	5.841.006.470,00	(1.926.963.331,00)	75,19
2.10	1.04.2.10.0.00.02.0000	5.2.01	Belanja Modal Tanah	7.767.969.801,00	5.841.006.470,00	(1.926.963.331,00)	75,19
2.11			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**	**6.676.407.116,15**	**6.534.531.683,00**	**(141.875.433,15)**	**97,87**
2.11	**2.11.0.00.0.00.01.0000**		**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**	**6.676.407.116,15**	**6.534.531.683,00**	**(141.875.433,15)**	**97,87**
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	6.676.407.116,15	6.534.531.683,00	(141.875.433,15)	97,87
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	4.350.846.116,15	4.282.903.078,00	(67.943.038,15)	98,43
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.113.317.380,15	1.081.979.537,00	(31.337.843,15)	97,18
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.237.528.736,00	3.200.923.541,00	(36.605.195,00)	98,86
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	2.325.561.000,00	2.251.628.605,00	(73.932.395,00)	96,82
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.938.023.500,00	1.877.637.890,00	(60.385.610,00)	96,88
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	12.890.000,00	0,00	(12.890.000,00)	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	374.647.500,00	373.990.715,00	(656.785,00)	99,82
2.12			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	**2.826.791.534,87**	**2.775.223.285,00**	**(51.568.249,87)**	**98,17**
2.12	**2.12.0.00.0.00.01.0000**		**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	**2.826.791.534,87**	**2.775.223.285,00**	**(51.568.249,87)**	**98,17**
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	2.826.791.534,87	2.775.223.285,00	(51.568.249,87)	98,17
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	2.789.609.534,87	2.738.041.285,00	(51.568.249,87)	98,15
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.218.966.620,87	1.188.697.236,00	(30.269.384,87)	97,51
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.570.642.914,00	1.549.344.049,00	(21.298.865,00)	98,64
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	37.182.000,00	37.182.000,00	0,00	100,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37.182.000,00	37.182.000,00	0,00	100,00
2.13			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**	**3.156.682.581,88**	**3.015.051.663,00**	**(141.630.918,88)**	**95,51**
2.13	**2.13.0.00.0.00.01.0000**		**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**	**3.156.682.581,88**	**3.015.051.663,00**	**(141.630.918,88)**	**95,51**
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	3.156.682.581,88	3.015.051.663,00	(141.630.918,88)	95,51
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	3.141.557.452,03	2.999.926.534,00	(141.630.918,03)	95,49
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	986.749.893,00	924.976.401,00	(61.773.492,00)	93,73
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.154.807.559,03	2.074.950.133,00	(79.857.426,03)	96,29
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	15.125.129,85	15.125.129,00	(0,85)	99,99
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.125.129,85	15.125.129,00	(0,85)	99,99
2.14			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**	**2.875.609.189,00**	**2.834.352.500,00**	**(41.256.689,00)**	**98,56**
2.14	**2.08.2.14.0.00.02.0000**		**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**	**2.875.609.189,00**	**2.834.352.500,00**	**(41.256.689,00)**	**98,56**
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	5	BELANJA DAERAH	2.875.609.189,00	2.834.352.500,00	(41.256.689,00)	98,56
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	5.1	BELANJA OPERASI	2.875.609.189,00	2.834.352.500,00	(41.256.689,00)	98,56
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.875.609.189,00	2.834.352.500,00	(41.256.689,00)	98,56
2.15			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**	**2.551.301.381,00**	**2.439.057.256,00**	**(112.244.125,00)**	**95,60**
2.15	**2.15.0.00.0.00.01.0000**		**DINAS PERHUBUNGAN**	**2.551.301.381,00**	**2.439.057.256,00**	**(112.244.125,00)**	**95,60**
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	2.551.301.381,00	2.439.057.256,00	(112.244.125,00)	95,60
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	2.498.361.381,00	2.391.107.256,00	(107.254.125,00)	95,70

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.024.462.422,20	991.153.523,00	(33.308.899,20)	96,74
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.473.898.958,80	1.399.953.733,00	(73.945.225,80)	94,98
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	52.940.000,00	47.950.000,00	(4.990.000,00)	90,57
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.500.000,00	47.950.000,00	(550.000,00)	98,86
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.440.000,00	0,00	(4.440.000,00)	0,00
2.16			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	**3.721.169.552,64**	**3.513.978.680,00**	**(207.190.872,64)**	**94,43**
2.16	**2.16.2.20.2.21.04.0000**		**DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN**	**3.721.169.552,64**	**3.513.978.680,00**	**(207.190.872,64)**	**94,43**
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	5	BELANJA DAERAH	3.721.169.552,64	3.513.978.680,00	(207.190.872,64)	94,43
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	5.1	BELANJA OPERASI	3.141.540.812,64	2.941.115.680,00	(200.425.132,64)	93,62
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.137.958.087,34	1.106.104.916,00	(31.853.171,34)	97,20
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.003.582.725,30	1.835.010.764,00	(168.571.961,30)	91,58
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	5.2	BELANJA MODAL	579.628.740,00	572.863.000,00	(6.765.740,00)	98,83
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	487.116.900,00	480.511.000,00	(6.605.900,00)	98,64
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	92.511.840,00	92.352.000,00	(159.840,00)	99,82
2.17			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**	**2.536.659.755,46**	**2.452.240.910,00**	**(84.418.845,46)**	**96,67**
2.17	**2.17.3.30.3.31.01.0000**		**DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**	**2.536.659.755,46**	**2.452.240.910,00**	**(84.418.845,46)**	**96,67**
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	5	BELANJA DAERAH	2.536.659.755,46	2.452.240.910,00	(84.418.845,46)	96,67
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	2.511.005.024,46	2.427.772.910,00	(83.232.114,46)	96,68
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.131.609.282,46	2.070.751.136,00	(60.858.146,46)	97,14
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	260.040.762,00	238.287.794,00	(21.752.968,00)	91,63
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	119.354.980,00	118.733.980,00	(621.000,00)	99,47
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	25.654.731,00	24.468.000,00	(1.186.731,00)	95,37
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.654.731,00	24.468.000,00	(1.186.731,00)	95,37
2.18			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**	**1.940.594.175,30**	**1.778.034.297,00**	**(162.559.878,30)**	**91,62**
2.18	**2.18.0.00.0.00.01.0000**		**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**	**1.940.594.175,30**	**1.778.034.297,00**	**(162.559.878,30)**	**91,62**
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	1.940.594.175,30	1.778.034.297,00	(162.559.878,30)	91,62
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.875.776.125,30	1.713.244.297,00	(162.531.828,30)	91,33
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.092.011.058,00	1.060.461.218,00	(31.549.840,00)	97,11
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	783.765.067,30	652.783.079,00	(130.981.988,30)	83,28
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	64.818.050,00	64.790.000,00	(28.050,00)	99,95
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	64.818.050,00	64.790.000,00	(28.050,00)	99,95
2.19			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**	**15.298.832.024,66**	**15.210.150.019,00**	**(88.682.005,66)**	**99,42**
2.19	**2.19.3.26.0.00.02.0000**		**DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA**	**15.298.832.024,66**	**15.210.150.019,00**	**(88.682.005,66)**	**99,42**
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	5	BELANJA DAERAH	15.298.832.024,66	15.210.150.019,00	(88.682.005,66)	99,42
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	5.1	BELANJA OPERASI	3.625.215.612,66	3.546.821.034,00	(78.394.578,66)	97,83
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	925.687.354,66	875.969.243,00	(49.718.111,66)	94,62
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	574.528.258,00	545.851.791,00	(28.676.467,00)	95,00
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	5.1.05	Belanja Hibah	2.125.000.000,00	2.125.000.000,00	0,00	100,00
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	5.2	BELANJA MODAL	11.673.616.412,00	11.663.328.985,00	(10.287.427,00)	99,91
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	153.326.363,00	143.650.000,00	(9.676.363,00)	93,68
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	11.520.290.049,00	11.519.678.985,00	(611.064,00)	99,99
2.20			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**	**62.660.207,00**	**58.939.300,00**	**(3.720.907,00)**	**94,06**
2.20	**2.16.2.20.2.21.04.0000**		**DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN**	**62.660.207,00**	**58.939.300,00**	**(3.720.907,00)**	**94,06**
2.20	2.16.2.20.2.21.04.0000	5	BELANJA DAERAH	62.660.207,00	58.939.300,00	(3.720.907,00)	94,06
2.20	2.16.2.20.2.21.04.0000	5.1	BELANJA OPERASI	62.660.207,00	58.939.300,00	(3.720.907,00)	94,06
2.20	2.16.2.20.2.21.04.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.660.207,00	58.939.300,00	(3.720.907,00)	94,06
2.21			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**	**129.183.830,00**	**126.733.217,00**	**(2.450.613,00)**	**98,10**
2.21	**2.16.2.20.2.21.04.0000**		**DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN**	**129.183.830,00**	**126.733.217,00**	**(2.450.613,00)**	**98,10**
2.21	2.16.2.20.2.21.04.0000	5	BELANJA DAERAH	129.183.830,00	126.733.217,00	(2.450.613,00)	98,10
2.21	2.16.2.20.2.21.04.0000	5.1	BELANJA OPERASI	129.183.830,00	126.733.217,00	(2.450.613,00)	98,10
2.21	2.16.2.20.2.21.04.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	129.183.830,00	126.733.217,00	(2.450.613,00)	98,10
2.22			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**	**247.527.923,00**	**247.493.000,00**	**(34.923,00)**	**99,98**
2.22	**1.01.2.22.0.00.02.0000**		**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**	**247.527.923,00**	**247.493.000,00**	**(34.923,00)**	**99,98**
2.22	1.01.2.22.0.00.02.0000	5	BELANJA DAERAH	247.527.923,00	247.493.000,00	(34.923,00)	99,98
2.22	1.01.2.22.0.00.02.0000	5.1	BELANJA OPERASI	234.381.923,00	234.347.000,00	(34.923,00)	99,98
2.22	1.01.2.22.0.00.02.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	234.381.923,00	234.347.000,00	(34.923,00)	99,98
2.22	1.01.2.22.0.00.02.0000	5.2	BELANJA MODAL	13.146.000,00	13.146.000,00	0,00	100,00
2.22	1.01.2.22.0.00.02.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	13.146.000,00	13.146.000,00	0,00	100,00
2.23			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**	**2.304.323.019,20**	**2.264.379.548,00**	**(39.943.471,20)**	**98,26**
2.23	**2.23.2.24.0.00.02.0000**		**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**	**2.304.323.019,20**	**2.264.379.548,00**	**(39.943.471,20)**	**98,26**
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	5	BELANJA DAERAH	2.304.323.019,20	2.264.379.548,00	(39.943.471,20)	98,26

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.411.426.371,20	1.374.095.548,00	(37.330.823,20)	97,35
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	708.283.034,20	681.923.346,00	(26.359.688,20)	96,27
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	703.143.337,00	692.172.202,00	(10.971.135,00)	98,43
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	5.2	BELANJA MODAL	892.896.648,00	890.284.000,00	(2.612.648,00)	99,70
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	892.896.648,00	890.284.000,00	(2.612.648,00)	99,70
2.24			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**	**38.612.350,00**	**38.498.550,00**	**(113.800,00)**	**99,70**
2.24	**2.23.2.24.0.00.02.0000**		**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**	**38.612.350,00**	**38.498.550,00**	**(113.800,00)**	**99,70**
2.24	2.23.2.24.0.00.02.0000	5	BELANJA DAERAH	38.612.350,00	38.498.550,00	(113.800,00)	99,70
2.24	2.23.2.24.0.00.02.0000	5.1	BELANJA OPERASI	38.612.350,00	38.498.550,00	(113.800,00)	99,70
2.24	2.23.2.24.0.00.02.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.612.350,00	38.498.550,00	(113.800,00)	99,70
3			**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**14.090.484.436,77**	**13.246.230.902,00**	**(844.253.534,77)**	**94,00**
3.25			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**3.708.119.769,17**	**3.645.142.309,00**	**(62.977.460,17)**	**98,30**
3.25	**3.25.0.00.0.00.01.0000**		**DINAS PERIKANAN**	**3.708.119.769,17**	**3.645.142.309,00**	**(62.977.460,17)**	**98,30**
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	3.708.119.769,17	3.645.142.309,00	(62.977.460,17)	98,30
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	3.644.974.269,17	3.581.997.309,00	(62.976.960,17)	98,27
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.722.355.735,17	1.676.811.382,00	(45.544.353,17)	97,35
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	899.124.734,00	884.831.843,00	(14.292.891,00)	98,41
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	1.023.493.800,00	1.020.354.084,00	(3.139.716,00)	99,69
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	63.145.500,00	63.145.000,00	(500,00)	99,99
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	63.145.500,00	63.145.000,00	(500,00)	99,99
3.26			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**	**330.304.685,00**	**325.769.500,00**	**(4.535.185,00)**	**98,62**
3.26	**2.19.3.26.0.00.02.0000**		**DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA**	**330.304.685,00**	**325.769.500,00**	**(4.535.185,00)**	**98,62**
3.26	2.19.3.26.0.00.02.0000	5	BELANJA DAERAH	330.304.685,00	325.769.500,00	(4.535.185,00)	98,62
3.26	2.19.3.26.0.00.02.0000	5.1	BELANJA OPERASI	330.304.685,00	325.769.500,00	(4.535.185,00)	98,62
3.26	2.19.3.26.0.00.02.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	330.304.685,00	325.769.500,00	(4.535.185,00)	98,62
3.27			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**7.300.672.059,50**	**6.650.662.753,00**	**(650.009.306,50)**	**91,09**
3.27	**2.09.3.27.0.00.01.0000**		**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN**	**7.300.672.059,50**	**6.650.662.753,00**	**(650.009.306,50)**	**91,09**
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	7.300.672.059,50	6.650.662.753,00	(650.009.306,50)	91,09
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	7.158.946.336,00	6.595.256.753,00	(563.689.583,00)	92,12
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	5.066.722.288,00	4.759.129.622,00	(307.592.666,00)	93,92
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.092.224.048,00	1.836.127.131,00	(256.096.917,00)	87,75
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	141.725.723,50	55.406.000,00	(86.319.723,50)	39,09
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	90.515.723,50	55.406.000,00	(35.109.723,50)	61,21
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	51.210.000,00	0,00	(51.210.000,00)	0,00
3.30			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**	**785.777.814,00**	**740.945.273,00**	**(44.832.541,00)**	**94,29**
3.30	**2.17.3.30.3.31.01.0000**		**DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**	**785.777.814,00**	**740.945.273,00**	**(44.832.541,00)**	**94,29**
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	5	BELANJA DAERAH	785.777.814,00	740.945.273,00	(44.832.541,00)	94,29
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	377.623.956,00	348.848.273,00	(28.775.683,00)	92,37
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	377.623.956,00	348.848.273,00	(28.775.683,00)	92,37
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	408.153.858,00	392.097.000,00	(16.056.858,00)	96,06
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	408.153.858,00	392.097.000,00	(16.056.858,00)	96,06
3.31			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**	**60.251.154,00**	**53.036.154,00**	**(7.215.000,00)**	**88,02**
3.31	**2.17.3.30.3.31.01.0000**		**DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**	**60.251.154,00**	**53.036.154,00**	**(7.215.000,00)**	**88,02**
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	5	BELANJA DAERAH	60.251.154,00	53.036.154,00	(7.215.000,00)	88,02
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	60.251.154,00	53.036.154,00	(7.215.000,00)	88,02
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.251.154,00	53.036.154,00	(7.215.000,00)	88,02
3.32			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**	**1.905.358.955,10**	**1.830.674.913,00**	**(74.684.042,10)**	**96,08**
3.32	**2.07.3.32.0.00.01.0000**		**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**	**1.905.358.955,10**	**1.830.674.913,00**	**(74.684.042,10)**	**96,08**
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	1.905.358.955,10	1.830.674.913,00	(74.684.042,10)	96,08
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.805.963.855,10	1.731.662.913,00	(74.300.942,10)	95,88
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.228.360.773,10	1.173.051.715,00	(55.309.058,10)	95,49
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	577.603.082,00	558.611.198,00	(18.991.884,00)	96,71
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	99.395.100,00	99.012.000,00	(383.100,00)	99,61
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	99.395.100,00	99.012.000,00	(383.100,00)	99,61
4			***UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN***	**50.480.071.482,60**	**49.242.401.591,00**	**(1.237.669.891,60)**	**97,54**
4.01			**SEKRETARIAT DAERAH**	**32.265.210.946,60**	**31.364.811.860,00**	**(900.399.086,60)**	**97,20**
4.01	**4.01.0.00.0.00.01.0001**		**BAGIAN PEMERINTAHAN**	**496.864.567,00**	**490.195.517,00**	**(6.669.050,00)**	**98,65**
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	5	BELANJA DAERAH	496.864.567,00	490.195.517,00	(6.669.050,00)	98,65
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	496.864.567,00	490.195.517,00	(6.669.050,00)	98,65
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	496.864.567,00	490.195.517,00	(6.669.050,00)	98,65
4.01	**4.01.0.00.0.00.01.0002**		**BAGIAN HUKUM DAN HAM**	**313.231.979,00**	**290.633.800,00**	**(22.598.179,00)**	**92,78**
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	5	BELANJA DAERAH	313.231.979,00	290.633.800,00	(22.598.179,00)	92,78
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	313.231.979,00	290.633.800,00	(22.598.179,00)	92,78

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	313.231.979,00	290.633.800,00	(22.598.179,00)	92,78
4.01	**4.01.0.00.0.00.01.0003**		**BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**2.979.902.616,00**	**2.341.419.105,00**	**(638.483.511,00)**	**78,57**
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	5	BELANJA DAERAH	2.979.902.616,00	2.341.419.105,00	(638.483.511,00)	78,57
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	2.979.902.616,00	2.341.419.105,00	(638.483.511,00)	78,57
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.326.902.616,00	1.015.919.105,00	(310.983.511,00)	76,56
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	5.1.05	Belanja Hibah	1.653.000.000,00	1.325.500.000,00	(327.500.000,00)	80,18
4.01	**4.01.0.00.0.00.01.0004**		**BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM**	**350.062.766,00**	**343.245.940,00**	**(6.816.826,00)**	**98,05**
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	5	BELANJA DAERAH	350.062.766,00	343.245.940,00	(6.816.826,00)	98,05
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	333.312.766,00	326.495.940,00	(6.816.826,00)	97,95
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	333.312.766,00	326.495.940,00	(6.816.826,00)	97,95
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	5.2	BELANJA MODAL	16.750.000,00	16.750.000,00	0,00	100,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.750.000,00	16.750.000,00	0,00	100,00
4.01	**4.01.0.00.0.00.01.0005**		**BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**	**255.049.354,00**	**254.174.007,00**	**(875.347,00)**	**99,65**
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	5	BELANJA DAERAH	255.049.354,00	254.174.007,00	(875.347,00)	99,65
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	240.049.354,00	239.174.007,00	(875.347,00)	99,63
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	240.049.354,00	239.174.007,00	(875.347,00)	99,63
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	5.2	BELANJA MODAL	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
4.01	**4.01.0.00.0.00.01.0006**		**BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**	**815.415.580,00**	**791.375.887,00**	**(24.039.693,00)**	**97,05**
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	5	BELANJA DAERAH	815.415.580,00	791.375.887,00	(24.039.693,00)	97,05
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	770.415.580,00	746.375.887,00	(24.039.693,00)	96,87
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	770.415.580,00	746.375.887,00	(24.039.693,00)	96,87
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	5.2	BELANJA MODAL	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	100,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	100,00
4.01	**4.01.0.00.0.00.01.0007**		**BAGIAN UMUM**	**25.638.216.119,60**	**25.448.208.712,00**	**(190.007.407,60)**	**99,25**
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	5	BELANJA DAERAH	25.638.216.119,60	25.448.208.712,00	(190.007.407,60)	99,25
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	23.079.958.769,60	22.903.577.062,00	(176.381.707,60)	99,23
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	5.1.01	Belanja Pegawai	5.163.650.493,60	5.074.631.956,00	(89.018.537,60)	98,27
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.916.308.276,00	17.828.945.106,00	(87.363.170,00)	99,51
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	5.2	BELANJA MODAL	2.558.257.350,00	2.544.631.650,00	(13.625.700,00)	99,46
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.558.257.350,00	2.544.631.650,00	(13.625.700,00)	99,46
4.01	**4.01.0.00.0.00.01.0008**		**BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA**	**982.584.884,00**	**976.898.696,00**	**(5.686.188,00)**	**99,42**
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	5	BELANJA DAERAH	982.584.884,00	976.898.696,00	(5.686.188,00)	99,42
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	832.584.884,00	827.048.696,00	(5.536.188,00)	99,33
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	832.584.884,00	827.048.696,00	(5.536.188,00)	99,33
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	5.2	BELANJA MODAL	150.000.000,00	149.850.000,00	(150.000,00)	99,90
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	150.000.000,00	149.850.000,00	(150.000,00)	99,90
4.01	**4.01.0.00.0.00.01.0009**		**BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN**	**433.883.081,00**	**428.660.196,00**	**(5.222.885,00)**	**98,79**
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	5	BELANJA DAERAH	433.883.081,00	428.660.196,00	(5.222.885,00)	98,79
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	433.883.081,00	428.660.196,00	(5.222.885,00)	98,79
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	433.883.081,00	428.660.196,00	(5.222.885,00)	98,79
4.02			**SEKRETARIAT DPRD**	**18.214.860.536,00**	**17.877.589.731,00**	**(337.270.805,00)**	**98,14**
4.02	**4.02.0.00.0.00.01.0000**		**SEKRETARIAT DPRD**	**18.214.860.536,00**	**17.877.589.731,00**	**(337.270.805,00)**	**98,14**
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	18.214.860.536,00	17.877.589.731,00	(337.270.805,00)	98,14
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	17.332.504.546,00	17.049.229.730,00	(283.274.816,00)	98,36
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	9.590.941.038,68	9.348.336.304,00	(242.604.734,68)	97,47
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.741.563.507,32	7.700.893.426,00	(40.670.081,32)	99,47
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	882.355.990,00	828.360.001,00	(53.995.989,00)	93,88
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	827.150.000,00	773.210.001,00	(53.939.999,00)	93,47
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	55.205.990,00	55.150.000,00	(55.990,00)	99,89
5			**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**108.665.682.093,86**	**102.506.308.437,00**	**(6.159.373.656,86)**	**94,33**
5.01			**PERENCANAAN**	**3.322.681.209,00**	**3.074.247.915,00**	**(248.433.294,00)**	**92,52**
5.01	**5.01.5.05.0.00.02.0000**		***BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH***	**3.322.681.209,00**	**3.074.247.915,00**	**(248.433.294,00)**	**92,52**
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5	BELANJA DAERAH	3.322.681.209,00	3.074.247.915,00	(248.433.294,00)	92,52
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.1	BELANJA OPERASI	3.206.681.209,00	2.958.322.915,00	(248.358.294,00)	92,25
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.634.504.612,00	1.522.812.702,00	(111.691.910,00)	93,16
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.572.176.597,00	1.435.510.213,00	(136.666.384,00)	91,30
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.2	BELANJA MODAL	116.000.000,00	115.925.000,00	(75.000,00)	99,93
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	41.000.000,00	41.000.000,00	0,00	100,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	75.000.000,00	74.925.000,00	(75.000,00)	99,90
5.02			**KEUANGAN**	**99.644.786.094,80**	**94.472.688.831,00**	**(5.172.097.263,80)**	**94,80**

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	99.644.786.094,80	94.472.688.831,00	(5.172.097.263,80)	94,80
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5	BELANJA DAERAH	99.644.786.094,80	94.472.688.831,00	(5.172.097.263,80)	94,80
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.1	BELANJA OPERASI	10.766.856.294,80	8.621.905.978,00	(2.144.950.316,80)	80,07
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	4.335.530.527,80	2.753.478.580,00	(1.582.051.947,80)	63,50
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.431.325.767,00	5.868.427.398,00	(562.898.369,00)	91,24
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.2	BELANJA MODAL	366.141.000,00	364.309.000,00	(1.832.000,00)	99,49
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	316.141.000,00	314.309.000,00	(1.832.000,00)	99,42
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	895.000.000,00	696.208.433,00	(198.791.567,00)	77,78
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.3.01	Belanja Tidak Terduga	895.000.000,00	696.208.433,00	(198.791.567,00)	77,78
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.4	BELANJA TRANSFER	87.616.788.800,00	84.790.265.420,00	(2.826.523.380,00)	96,77
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	87.616.788.800,00	84.790.265.420,00	(2.826.523.380,00)	96,77
5.03			KEPEGAWAIAN	4.567.136.407,06	3.984.788.391,00	(582.348.016,06)	87,24
5.03	5.03.0.00.0.00.02.0000		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	4.567.136.407,06	3.984.788.391,00	(582.348.016,06)	87,24
5.03	5.03.0.00.0.00.02.0000	5	BELANJA DAERAH	4.567.136.407,06	3.984.788.391,00	(582.348.016,06)	87,24
5.03	5.03.0.00.0.00.02.0000	5.1	BELANJA OPERASI	4.542.136.407,06	3.960.342.141,00	(581.794.266,06)	87,19
5.03	5.03.0.00.0.00.02.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.799.232.441,06	1.665.279.354,00	(133.953.087,06)	92,55
5.03	5.03.0.00.0.00.02.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.742.903.966,00	2.295.062.787,00	(447.841.179,00)	83,67
5.03	5.03.0.00.0.00.02.0000	5.2	BELANJA MODAL	25.000.000,00	24.446.250,00	(553.750,00)	97,78
5.03	5.03.0.00.0.00.02.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.000.000,00	24.446.250,00	(553.750,00)	97,78
5.05			PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.131.078.383,00	974.583.300,00	(156.495.083,00)	86,16
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	1.131.078.383,00	974.583.300,00	(156.495.083,00)	86,16
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5	BELANJA DAERAH	1.131.078.383,00	974.583.300,00	(156.495.083,00)	86,16
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.131.078.383,00	974.583.300,00	(156.495.083,00)	86,16
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.131.078.383,00	974.583.300,00	(156.495.083,00)	86,16
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	9.344.822.976,00	9.242.119.177,00	(102.703.799,00)	98,90
6.01			INSPEKTORAT DAERAH	9.344.822.976,00	9.242.119.177,00	(102.703.799,00)	98,90
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000		INSPEKTORAT	9.344.822.976,00	9.242.119.177,00	(102.703.799,00)	98,90
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	9.344.822.976,00	9.242.119.177,00	(102.703.799,00)	98,90
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	6.461.795.217,00	6.361.342.257,00	(100.452.960,00)	98,44
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.690.706.788,00	2.609.184.168,00	(81.522.620,00)	96,97
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.771.088.429,00	3.752.158.089,00	(18.930.340,00)	99,49
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	2.883.027.759,00	2.880.776.920,00	(2.250.839,00)	99,92
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	604.022.320,00	603.453.220,00	(569.100,00)	99,90
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.279.005.439,00	2.277.323.700,00	(1.681.739,00)	99,92
7			UNSUR KEWILAYAHAN	7.072.557.568,03	6.760.261.820,00	(312.295.748,03)	95,58
7.01			KECAMATAN	7.072.557.568,03	6.760.261.820,00	(312.295.748,03)	95,58
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000		KECAMATAN PANGALE	1.471.286.170,92	1.412.478.128,00	(58.808.042,92)	96,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	5	BELANJA DAERAH	1.471.286.170,92	1.412.478.128,00	(58.808.042,92)	96,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.463.786.170,92	1.404.978.128,00	(58.808.042,92)	95,98
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.102.892.351,92	1.062.570.259,00	(40.322.092,92)	96,34
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	360.893.819,00	342.407.869,00	(18.485.950,00)	94,87
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	5.2	BELANJA MODAL	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000		KECAMATAN TOPOYO	1.488.679.573,19	1.396.646.051,00	(92.033.522,19)	93,81
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	1.488.679.573,19	1.396.646.051,00	(92.033.522,19)	93,81
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.463.879.573,19	1.371.846.051,00	(92.033.522,19)	93,71
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.037.337.087,19	956.274.803,00	(81.062.284,19)	92,18
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	426.542.486,00	415.571.248,00	(10.971.238,00)	97,42
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	24.800.000,00	24.800.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.800.000,00	24.800.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000		KECAMATAN TOBADAK	1.305.060.840,00	1.248.980.211,00	(56.080.629,00)	95,70
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	5	BELANJA DAERAH	1.305.060.840,00	1.248.980.211,00	(56.080.629,00)	95,70
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.295.060.840,00	1.238.980.211,00	(56.080.629,00)	95,66
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	940.670.312,00	897.607.287,00	(43.063.025,00)	95,42
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	354.390.528,00	341.372.924,00	(13.017.604,00)	96,32
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	5.2	BELANJA MODAL	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000		KECAMATAN KAROSSA	1.590.506.993,00	1.529.565.508,00	(60.941.485,00)	96,16
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	5	BELANJA DAERAH	1.590.506.993,00	1.529.565.508,00	(60.941.485,00)	96,16
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.590.506.993,00	1.529.565.508,00	(60.941.485,00)	96,16
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.246.097.934,00	1.211.222.732,00	(34.875.202,00)	97,20

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	344.409.059,00	318.342.776,00	(26.066.283,00)	92,43
7.01	**7.01.0.00.0.00.05.0000**		**KECAMATAN BUDONG-BUDONG**	**1.217.023.990,92**	**1.172.591.922,00**	**(44.432.068,92)**	**96,34**
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	5	BELANJA DAERAH	1.217.023.990,92	1.172.591.922,00	(44.432.068,92)	96,34
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.209.523.990,92	1.165.091.922,00	(44.432.068,92)	96,32
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	866.175.089,92	834.890.118,00	(31.284.971,92)	96,38
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	343.348.901,00	330.201.804,00	(13.147.097,00)	96,17
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	5.2	BELANJA MODAL	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00
8			**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**	**2.497.818.753,92**	**2.391.664.256,00**	**(106.154.497,92)**	**95,75**
8.01			**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	**2.497.818.753,92**	**2.391.664.256,00**	**(106.154.497,92)**	**95,75**
8.01	**8.01.0.00.0.00.01.0000**		**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	**2.497.818.753,92**	**2.391.664.256,00**	**(106.154.497,92)**	**95,75**
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	2.497.818.753,92	2.391.664.256,00	(106.154.497,92)	95,75
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	2.496.318.753,92	2.390.164.256,00	(106.154.497,92)	95,74
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	889.812.390,92	838.219.994,00	(51.592.396,92)	94,20
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.183.436.363,00	1.128.874.262,00	(54.562.101,00)	95,38
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	423.070.000,00	423.070.000,00	0,00	100,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
			Jumlah	(9.874.382.874,00)	22.571.464.622,27	32.445.847.496,27	(228,58)

MAMUJU TENGAH, 2026
BUPATI KAB. MAMUJU TENGAH

H. ARSAL ARAS

Lampiran I.2 : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah
Nomor :
Tanggal : 2026

PEMERINTAHAN KAB. MAMUJU TENGAH

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**634.152.870.136,48**	**645.179.353.993,73**	**101,73**	**669.951.188.922,24**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**65.241.936.620,00**	**73.090.587.048,73**	**112,03**	**52.073.310.252,24**
4.1.01	Pajak Daerah	23.965.016.835,00	26.153.179.463,00	109,13	12.064.921.118,00
4.1.01.06	Pajak Hotel	148.500.000,00	27.143.500,00	18,27	32.673.000,00
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	148.500.000,00	27.143.500,00	18,27	32.673.000,00
4.1.01.06.01.0001	*Pajak Hotel*	148.500.000,00	27.143.500,00	18,27	32.673.000,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	1.100.000.000,00	1.030.761.567,00	93,70	1.006.742.551,00
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	1.100.000.000,00	1.030.761.567,00	93,70	1.006.742.551,00
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	1.100.000.000,00	1.030.761.567,00	93,70	1.006.742.551,00
4.1.01.08	Pajak Hiburan	0,00	2.200.000,00	0,00	500.000,00
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	0,00	2.200.000,00	0,00	500.000,00
4.1.01.08.05.0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	0,00	2.200.000,00	0,00	500.000,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	500.000.000,00	503.133.986,00	100,62	302.845.126,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	500.000.000,00	503.133.986,00	100,62	302.845.126,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	500.000.000,00	503.133.986,00	100,62	302.845.126,00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00	0,00	6.225.662.570,00
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	0,00	0,00	0,00	6.225.662.570,00
4.1.01.10.01.0001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	0,00	0,00	0,00	6.225.662.570,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	3.000.000,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	3.000.000,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	3.000.000,00
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	0,00	200.000,00	0,00	0,00
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	0,00	200.000,00	0,00	0,00
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	0,00	200.000,00	0,00	0,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	700.000.000,00	658.011.971,00	94,00	658.879.733,00
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	700.000.000,00	658.011.971,00	94,00	658.879.733,00
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	700.000.000,00	658.011.971,00	94,00	658.879.733,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	4.697.000.000,00	3.434.749.355,00	73,12	3.175.091.213,00
4.1.01.15.01	PBBP2	4.697.000.000,00	3.434.749.355,00	73,12	3.175.091.213,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	4.697.000.000,00	3.434.749.355,00	73,12	3.175.091.213,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.064.831.898,00	214.761.375,00	20,16	659.526.925,00
4.1.01.16.01	*BPHTB-Pemindahan Hak*	1.064.831.898,00	214.761.375,00	20,16	*0,00*
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	1.064.831.898,00	214.761.375,00	20,16	0,00
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	0,00	0,00	0,00	659.526.925,00
4.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	0,00	0,00	0,00	659.526.925,00
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	5.200.000.000,00	6.202.638.409,00	119,28	0,00
4.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik	5.200.000.000,00	6.202.638.409,00	119,28	0,00
4.1.01.19.02.0001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	5.200.000.000,00	6.202.638.409,00	119,28	0,00
4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	5.269.399.019,00	6.343.939.900,00	120,39	0,00
4.1.01.20.01	Opsen PKB	5.269.399.019,00	6.343.939.900,00	120,39	0,00
4.1.01.20.01.0001	Opsen PKB	5.269.399.019,00	6.343.939.900,00	120,39	0,00
4.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	5.282.285.918,00	7.732.639.400,00	146,38	0,00
4.1.01.21.01	Opsen BBNKB	5.282.285.918,00	7.732.639.400,00	146,38	0,00
4.1.01.21.01.0001	Opsen BBNKB	5.282.285.918,00	7.732.639.400,00	146,38	0,00
4.1.02	Retribusi Daerah	36.898.921.187,00	39.359.684.325,00	106,66	14.041.286.339,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	28.194.432.937,00	32.771.768.121,00	116,23	7.711.576.069,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	27.747.632.937,00	32.469.653.121,00	117,01	7.169.986.069,00
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	6.247.632.937,00	7.165.518.497,00	114,69	5.143.267.855,00
4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	21.500.000.000,00	25.304.134.624,00	117,69	2.026.718.214,00
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	0,00	0,00	0,00	221.640.000,00
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	0,00	0,00	0,00	221.640.000,00

4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	190.000.000,00	100.000.000,00	52,63	187.700.000,00
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	190.000.000,00	100.000.000,00	52,63	187.700.000,00
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	0,00	0,00	0,00	132.250.000,00
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	0,00	0,00	0,00	132.250.000,00
4.1.02.01.14	Retribusi Pelayanan Kebersihan	256.800.000,00	202.115.000,00	78,70	0,00
4.1.02.01.14.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan	256.800.000,00	202.115.000,00	78,70	0,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	7.704.488.250,00	6.244.748.000,00	81,05	5.859.896.000,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	7.524.488.250,00	6.027.688.000,00	80,10	5.818.791.000,00
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	7.524.488.250,00	6.027.688.000,00	80,10	5.818.791.000,00
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	160.000.000,00	142.000.000,00	88,75	0,00
4.1.02.02.02.0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	160.000.000,00	142.000.000,00	88,75	0,00
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	0,00	75.060.000,00	0,00	41.105.000,00
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	0,00	75.060.000,00	0,00	41.105.000,00
4.1.02.02.17	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.02.17.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	1.000.000.000,00	343.168.204,00	34,31	469.814.270,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.000.000.000,00	343.168.204,00	34,31	469.814.270,00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.000.000.000,00	343.168.204,00	34,31	469.814.270,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.980.000.000,00	1.162.498.116,00	58,71	729.061.014,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	1.980.000.000,00	1.162.498.116,00	58,71	729.061.014,00
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	1.980.000.000,00	1.162.498.116,00	58,71	729.061.014,00
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	1.980.000.000,00	1.162.498.116,00	58,71	729.061.014,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	2.397.998.598,00	6.415.225.144,73	267,52	25.238.041.781,24
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	350.000.000,00	819.410.000,00	234,11	230.337.498,00
4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	350.000.000,00	819.410.000,00	234,11	230.337.498,00
4.1.04.01.02.0054	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	350.000.000,00	819.410.000,00	234,11	230.337.498,00
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	173.000.000,00	44.865.000,00	25,93	57.025.000,00
4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD	0,00	24.865.000,00	0,00	57.025.000,00
4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD	0,00	24.865.000,00	0,00	57.025.000,00
4.1.04.03.02	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	173.000.000,00	20.000.000,00	11,56	0,00
4.1.04.03.02.0001	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	173.000.000,00	20.000.000,00	11,56	0,00
4.1.04.05	Jasa Giro	700.000.000,00	1.124.482.266,00	160,64	1.197.050.360,00
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	700.000.000,00	1.124.482.266,00	160,64	1.197.050.360,00
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	700.000.000,00	1.124.482.266,00	160,64	1.197.050.360,00
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	0,00	221.797.197,00	0,00	6.798.593,00
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	0,00	221.797.197,00	0,00	6.798.593,00
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	0,00	221.797.197,00	0,00	6.798.593,00
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	409.398.100,00	3.193.667.113,45	780,08	2.340.745.761,96
4.1.04.09.01	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	409.398.100,00	3.193.667.113,45	780,08	2.340.745.761,96
4.1.04.09.01.0001	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	409.398.100,00	3.193.667.113,45	780,08	2.340.745.761,96
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	59.529.871,00	0,00	0,00
4.1.04.12.09	Pendapatan Denda Pajak Reklame	0,00	413.072,00	0,00	0,00
4.1.04.12.09.0001	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron	0,00	413.072,00	0,00	0,00
4.1.04.12.19	Pendapatan Denda Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	0,00	258.134,00	0,00	0,00
4.1.04.12.19.0001	Pendapatan Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Restoran	0,00	247.952,00	0,00	0,00
4.1.04.12.19.0005	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Hotel	0,00	10.182,00	0,00	0,00
4.1.04.12.20	Pendapatan Denda Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0,00	56.933.718,00	0,00	0,00
4.1.04.12.20.0001	Pendapatan Denda Opsen PKB	0,00	56.933.718,00	0,00	0,00
4.1.04.12.21	Pendapatan Denda Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	0,00	1.924.947,00	0,00	0,00
4.1.04.12.21.0001	Pendapatan Denda Opsen BBNKB	0,00	1.924.947,00	0,00	0,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	0,00	0,00	0,00	20.027.748.456,86
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	0,00	0,00	0,00	20.013.832.347,00
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	0,00	0,00	0,00	20.013.832.347,00
4.1.04.16.06	Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	0,00	0,00	0,00	13.916.109,86
4.1.04.16.06.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Giro	0,00	0,00	0,00	340.109,86
4.1.04.16.06.0004	Pendapatan BLUD dari Komisi, Potongan ataupun Bentuk Lain sebagai Akibat dari Penjualan dan/atau Pengadaan Barang dan/atau Jasa oleh BLUD	0,00	0,00	0,00	13.576.000,00

4.1.04.21	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	765.600.498,00	951.473.697,28	124,27	1.378.336.111,42
4.1.04.21.01	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	765.600.498,00	951.473.697,28	124,27	1.378.336.111,42
4.1.04.21.01.0001	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	765.600.498,00	951.473.697,28	124,27	1.378.336.111,42
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	**65.241.936.620,00**	**73.090.587.048,73**	**112,03**	**52.073.310.252,24**
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**560.571.750.605,48**	**563.803.319.346,00**	**100,57**	**610.185.349.767,00**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	543.307.790.000,00	544.840.203.904,00	100,28	583.771.260.129,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	0,00	0,00	0,00	532.310.045.129,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	0,00	0,00	0,00	12.479.058.000,00
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	1.864.235.436,00
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	0,00	0,00	0,00	1.293.737.000,00
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	0,00	0,00	0,00	24.049.000,00
4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	0,00	0,00	0,00	84.000,00
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	0,00	0,00	0,00	257.596.564,00
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	0,00	0,00	0,00	1.519.879.000,00
4.2.01.01.01.0014	DBH Sawit	0,00	0,00	0,00	7.519.477.000,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	0,00	0,00	0,00	369.183.892.749,00
4.2.01.01.02.0001	DAU	0,00	0,00	0,00	282.562.180.000,00
4.2.01.01.02.0004	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	0,00	0,00	0,00	7.553.730.749,00
4.2.01.01.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	0,00	0,00	0,00	44.235.636.000,00
4.2.01.01.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	0,00	0,00	0,00	21.832.361.000,00
4.2.01.01.02.0007	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	0,00	0,00	0,00	12.999.985.000,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	0,00	0,00	0,00	82.048.913.591,00
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	0,00	0,00	0,00	418.504.000,00
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	0,00	0,00	0,00	7.749.568.982,00
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	0,00	0,00	0,00	4.382.712.628,00
4.2.01.01.03.0017	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	0,00	0,00	0,00	3.118.571.200,00
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	0,00	0,00	0,00	9.738.033.800,00
4.2.01.01.03.0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	0,00	0,00	0,00	10.943.717.000,00
4.2.01.01.03.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	0,00	0,00	0,00	5.394.173.000,00
4.2.01.01.03.0055	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	758.891.636,00
4.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	0,00	0,00	0,00	39.544.741.345,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	0,00	0,00	0,00	68.598.180.789,00
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	0,00	0,00	0,00	18.385.482.700,00
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	0,00	0,00	0,00	1.040.000.000,00
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	0,00	0,00	0,00	29.578.776.000,00
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	0,00	0,00	0,00	1.678.350.000,00
4.2.01.01.04.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	0,00	0,00	0,00	1.635.428.000,00
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	0,00	0,00	0,00	1.964.836.264,00
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	0,00	0,00	0,00	398.597.500,00
4.2.01.01.04.0021	DAK Non Fisik-BOKB-KB	0,00	0,00	0,00	2.325.032.000,00
4.2.01.01.04.0023	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	0,00	0,00	0,00	643.622.400,00
4.2.01.01.04.0028	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	0,00	0,00	0,00	2.557.800.000,00
4.2.01.01.04.0029	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
4.2.01.01.04.0030	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	0,00	0,00	0,00	2.371.100.000,00
4.2.01.01.04.0031	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00
4.2.01.01.04.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	0,00	0,00	0,00	5.899.155.925,00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.604.575.000,00	7.575.226.600,00	99,61	0,00
4.2.01.07.01	DBH Pajak	3.889.864.000,00	3.688.077.600,00	94,81	0,00
4.2.01.07.01.0001	DBH PBB	1.788.633.000,00	1.696.515.700,00	94,84	0,00
4.2.01.07.01.0002	DBH PPh Pasal 21	2.101.231.000,00	1.943.564.100,00	92,49	0,00
4.2.01.07.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	0,00	47.997.800,00	0,00	0,00
4.2.01.07.02	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	1.382.130.000,00	1.554.568.000,00	112,47	0,00
4.2.01.07.02.0004	DBH SDA Mineral dan Batubara- Landrent	155.624.000,00	328.061.000,00	210,80	0,00
4.2.01.07.02.0006	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	95.504.000,00	95.505.000,00	100,00	0,00
4.2.01.07.02.0009	DBH SDA Perikanan	1.131.002.000,00	1.131.002.000,00	100,00	0,00
4.2.01.07.03	DBH Lainnya	2.332.581.000,00	2.332.581.000,00	100,00	0,00
4.2.01.07.03.0001	DBH Sawit	2.332.581.000,00	2.332.581.000,00	100,00	0,00

4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	361.774.134.000,00	368.877.743.984,00	101,96	0,00
4.2.01.08.01	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	299.616.375.000,00	307.875.671.000,00	102,75	0,00
4.2.01.08.01.0001	DAU	299.616.375.000,00	307.875.671.000,00	102,75	0,00
4.2.01.08.02	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	62.157.759.000,00	61.002.072.984,00	98,14	0,00
4.2.01.08.02.0003	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	5.227.060.000,00	4.071.373.984,00	77,89	0,00
4.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	33.833.611.000,00	33.833.611.000,00	100,00	0,00
4.2.01.08.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	23.097.088.000,00	23.097.088.000,00	100,00	0,00
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	123.121.902.000,00	120.406.487.700,00	97,79	0,00
4.2.01.09.01	DAK Fisik	32.185.425.000,00	32.134.009.341,00	99,84	0,00
4.2.01.09.01.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	349.970.000,00	349.758.336,00	99,93	0,00
4.2.01.09.01.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	241.716.000,00	238.845.825,00	98,81	0,00
4.2.01.09.01.0039	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	5.273.805.000,00	5.256.556.300,00	99,67	0,00
4.2.01.09.01.0042	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	3.578.375.000,00	3.578.375.000,00	100,00	0,00
4.2.01.09.01.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	22.741.559.000,00	22.710.473.880,00	99,86	0,00
4.2.01.09.02	DAK Non Fisik	90.936.477.000,00	88.272.478.359,00	97,07	0,00
4.2.01.09.02.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	18.578.465.000,00	18.565.799.600,00	99,93	0,00
4.2.01.09.02.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.112.250.000,00	1.112.250.000,00	100,00	0,00
4.2.01.09.02.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	2.985.100.000,00	2.985.100.000,00	100,00	0,00
4.2.01.09.02.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	8.247.714.000,00	7.927.725.538,00	96,12	0,00
4.2.01.09.02.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	193.185.000,00	193.185.000,00	100,00	0,00
4.2.01.09.02.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	2.549.000.000,00	2.522.130.600,00	98,94	0,00
4.2.01.09.02.0023	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	149.112.000,00	149.112.000,00	100,00	0,00
4.2.01.09.02.0028	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	2.704.420.000,00	2.704.420.000,00	100,00	0,00
4.2.01.09.02.0029	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00
4.2.01.09.02.0031	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	90.000.000,00	90.000.000,00	100,00	0,00
4.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	7.534.697.000,00	6.067.514.821,00	80,52	0,00
4.2.01.09.02.0036	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Profesi Guru	44.141.591.000,00	43.721.462.000,00	99,04	0,00
4.2.01.09.02.0037	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tambahan Penghasilan Guru	927.750.000,00	358.000.000,00	38,58	0,00
4.2.01.09.02.0038	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Khusus Guru	1.708.193.000,00	1.860.778.800,00	108,93	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	**492.500.611.000,00**	**496.859.458.284,00**	**100,88**	**532.310.045.129,00**
4.2.01.05	Dana Desa	50.807.179.000,00	47.980.745.620,00	94,43	51.461.215.000,00
4.2.01.05.01	Dana Desa	50.807.179.000,00	47.980.745.620,00	94,43	51.461.215.000,00
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	50.807.179.000,00	47.980.745.620,00	94,43	51.461.215.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	**50.807.179.000,00**	**47.980.745.620,00**	**94,43**	**51.461.215.000,00**
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	17.263.960.605,48	18.963.115.442,00	109,84	26.414.089.638,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	17.263.960.605,48	18.963.115.442,00	109,84	26.414.089.638,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	17.263.960.605,48	18.963.115.442,00	109,84	26.414.089.638,00
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	0,00	1.773.607.256,00	0,00	3.754.610.082,00
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	0,00	1.629.713.687,00	0,00	5.352.561.968,00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	7.947.292.207,33	6.460.148.495,00	81,28	8.357.499.019,00
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	24.287.702,15	18.084.393,00	74,45	17.334.878,00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	9.292.380.696,00	9.081.561.611,00	97,73	8.932.083.691,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	**17.263.960.605,48**	**18.963.115.442,00**	**109,84**	**26.414.089.638,00**
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	**560.571.750.605,48**	**563.803.319.346,00**	**100,57**	**610.185.349.767,00**
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**8.339.182.911,00**	**8.285.447.599,00**	**99,35**	**7.692.528.903,00**
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	8.339.182.911,00	8.285.447.599,00	99,35	7.692.528.903,00
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	8.339.182.911,00	8.285.447.599,00	99,35	7.692.528.903,00
4.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	8.339.182.911,00	8.285.447.599,00	99,35	7.692.528.903,00
4.3.03.02.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	8.339.182.911,00	8.285.447.599,00	99,35	7.692.528.903,00
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**8.339.182.911,00**	**8.285.447.599,00**	**99,35**	**7.692.528.903,00**
	JUMLAH PENDAPATAN	**634.152.870.136,48**	**645.179.353.993,73**	**101,73**	**669.951.188.922,24**

5	**BELANJA DAERAH**	**644.027.253.010,48**	**622.607.889.371,46**	**96,67**	**697.458.559.499,91**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**463.584.292.839,12**	**452.824.266.108,46**	**97,67**	**469.025.200.983,91**
5.1.01	Belanja Pegawai	256.322.902.842,46	254.238.055.532,00	99,18	224.098.755.376,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	187.231.253.981,80	178.742.031.009,00	95,46	169.720.699.136,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	140.728.056.317,53	134.837.845.832,00	95,81	127.384.346.942,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	92.498.503.281,53	89.162.463.332,00	96,39	89.158.940.354,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	48.229.553.036,00	45.675.382.500,00	94,70	38.225.406.588,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	13.707.135.419,27	12.868.419.566,00	93,88	12.414.423.458,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	9.318.930.037,47	8.772.856.694,00	94,14	8.992.500.310,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	4.388.205.381,80	4.095.562.872,00	93,33	3.421.923.148,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	3.510.389.500,00	3.392.229.550,00	96,63	3.605.984.900,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	3.510.389.500,00	3.392.229.550,00	96,63	3.605.984.900,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	7.463.927.320,00	7.249.443.000,00	97,12	7.323.360.500,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	7.463.927.320,00	7.249.443.000,00	97,12	7.323.360.500,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	3.370.847.900,00	3.257.340.000,00	96,63	2.741.255.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	630.167.900,00	595.815.000,00	94,54	494.605.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	2.740.680.000,00	2.661.525.000,00	97,11	2.246.650.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	8.061.394.767,60	7.831.860.735,00	97,15	7.543.556.760,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	5.134.351.885,60	4.987.710.075,00	97,14	5.147.106.540,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	2.927.042.882,00	2.844.150.660,00	97,16	2.396.450.220,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	282.928.712,17	274.899.923,00	97,16	217.441.882,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	282.928.712,17	274.899.923,00	97,16	217.441.882,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	2.339.580,51	1.946.259,00	83,18	2.107.265,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.398.095,15	1.152.361,00	82,42	1.308.650,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	941.485,36	793.898,00	84,32	798.615,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	8.877.395.070,34	7.912.710.109,00	89,13	7.131.137.172,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	6.896.367.035,59	5.964.441.667,00	86,48	5.615.808.556,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1.981.028.034,75	1.948.268.442,00	98,34	1.515.328.616,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	305.520.701,65	278.835.420,00	91,26	569.750.999,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	207.336.115,85	183.737.816,00	88,61	490.569.213,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	98.184.585,80	95.097.604,00	96,85	79.181.786,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	921.318.692,73	836.500.615,00	90,79	787.334.258,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	622.674.454,42	551.216.261,00	88,52	549.795.436,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	298.644.238,31	285.284.354,00	95,52	237.538.822,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	60.617.707.553,66	67.146.806.977,00	110,77	5.165.910.130,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	9.569.646.774,46	8.903.595.397,00	93,03	4.966.273.610,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	9.569.646.774,46	8.903.595.397,00	93,03	4.966.273.610,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	277.256.713,00	254.362.832,00	91,74	176.759.253,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	277.256.713,00	254.362.832,00	91,74	176.759.253,00
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	44.322.425,00	44.322.425,00	100,00	22.877.267,00
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	44.322.425,00	44.322.425,00	100,00	22.877.267,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	11.874.854,00	11.753.374,00	98,97	0,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	11.874.854,00	11.753.374,00	98,97	0,00
5.1.01.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	50.714.606.787,20	57.932.772.949,00	114,23	0,00
5.1.01.02.06.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Restoran	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	0,00
5.1.01.02.06.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Penerangan Jalan	258.586.945,20	258.586.945,00	99,99	0,00
5.1.01.02.06.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah	145.425,00	145.425,00	100,00	0,00
5.1.01.02.06.0022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	13.180.000,00	13.180.000,00	100,00	0,00
5.1.01.02.06.0025	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	7.379.650,00	7.379.650,00	100,00	0,00
5.1.01.02.06.0064	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	44.639.796.712,00	52.216.437.300,00	116,97	0,00
5.1.01.02.06.0065	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	1.814.328.200,00	2.001.256.000,00	110,30	0,00
5.1.01.02.06.0066	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	3.222.100.000,00	2.704.000.000,00	83,92	0,00
5.1.01.02.06.0067	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	709.089.855,00	681.787.629,00	96,14	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	40.775.046.744,00
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	1.143.345.169,00
5.1.01.03.01.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	1.143.345.169,00
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	0,00	0,00	0,00	33.788.229.500,00
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	0,00	0,00	0,00	33.788.229.500,00

5.1.01.03.04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	0,00	0,00	0,00	1.529.292.800,00
5.1.01.03.04.0001	Belanja TKG PNSD	0,00	0,00	0,00	1.529.292.800,00
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	0,00	0,00	0,00	1.498.000.000,00
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	0,00	0,00	0,00	1.498.000.000,00
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0,00	0,00	0,00	694.104.827,00
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0,00	0,00	0,00	694.104.827,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	0,00	0,00	0,00	1.183.154.448,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0,00	0,00	0,00	1.155.854.448,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	0,00	0,00	17.550.000,00
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	0,00	0,00	0,00	9.750.000,00
5.1.01.03.09	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK	0,00	0,00	0,00	730.420.000,00
5.1.01.03.09.0001	Belanja TPG PPPK	0,00	0,00	0,00	730.420.000,00
5.1.01.03.11	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK	0,00	0,00	0,00	208.500.000,00
5.1.01.03.11.0001	Belanja Tamsil Guru PPPK	0,00	0,00	0,00	208.500.000,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	7.743.087.993,00	7.631.654.372,00	98,56	7.843.288.208,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	561.540.000,00	561.540.000,00	100,00	561.435.000,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	561.540.000,00	561.540.000,00	100,00	561.435.000,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	72.884.064,00	72.000.600,00	98,78	69.195.264,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	72.884.064,00	72.000.600,00	98,78	69.195.264,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	75.816.000,00	74.520.000,00	98,29	74.115.000,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	75.816.000,00	74.520.000,00	98,29	74.115.000,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	48.132.000,00	48.132.000,00	100,00	48.121.500,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	48.132.000,00	48.132.000,00	100,00	48.121.500,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	814.233.000,00	814.233.000,00	100,00	814.080.750,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	814.233.000,00	814.233.000,00	100,00	814.080.750,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	90.609.500,00	90.436.500,00	99,80	74.450.250,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	90.609.500,00	90.436.500,00	99,80	74.450.250,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.890.000.000,00	1.890.000.000,00	100,00	1.890.000.000,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.890.000.000,00	1.890.000.000,00	100,00	1.890.000.000,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	472.500.000,00	472.500.000,00	100,00	472.500.000,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	472.500.000,00	472.500.000,00	100,00	472.500.000,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	50.263.344,00	50.263.344,00	100,00	50.263.344,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	50.263.344,00	50.263.344,00	100,00	50.263.344,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	1.233.110.085,00	1.230.028.928,00	99,75	1.226.192.100,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	49.304.586,00	47.408.256,00	96,15	47.571.428,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	1.201.375,00	1.155.168,00	96,15	1.155.168,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	3.604.124,00	3.465.504,00	96,15	3.465.504,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	1.179.000.000,00	1.178.000.000,00	99,91	1.174.000.000,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	2.334.000.000,00	2.328.000.000,00	99,74	2.327.000.000,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	2.334.000.000,00	2.328.000.000,00	99,74	2.327.000.000,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	100.000.000,00	0,00	0,00	235.935.000,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	100.000.000,00	0,00	0,00	235.935.000,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	219.973.314,00	207.083.174,00	94,14	172.171.158,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	101.400.000,00	97.500.000,00	96,15	54.600.000,00
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	101.400.000,00	97.500.000,00	96,15	54.600.000,00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	6.636.000,00	6.162.000,00	92,85	6.636.000,00
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	6.636.000,00	6.162.000,00	92,85	6.636.000,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00	91.260.000,00	92,85	98.280.000,00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00	91.260.000,00	92,85	98.280.000,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.083.280,00	5.648.760,00	92,85	6.083.280,00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.083.280,00	5.648.760,00	92,85	6.083.280,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	651.684,00	592.254,00	90,88	651.638,00
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	651.684,00	592.254,00	90,88	651.638,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	3.950,00	1.760,00	44,55	1.840,00
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	3.950,00	1.760,00	44,55	1.840,00
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.369.120,00	5.469.120,00	85,86	5.469.120,00
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.369.120,00	5.469.120,00	85,86	5.469.120,00
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	112.320,00	112.320,00	100,00	112.320,00
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	112.320,00	112.320,00	100,00	112.320,00

5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	436.960,00	336.960,00	77,11	336.960,00
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	436.960,00	336.960,00	77,11	336.960,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	510.880.000,00	510.480.000,00	99,92	421.640.000,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000,00	110.880.000,00	100,00	101.640.000,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000,00	110.880.000,00	100,00	101.640.000,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00	399.600.000,00	99,90	320.000.000,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00	399.600.000,00	99,90	320.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	195.117.291.217,66	186.791.941.444,46	95,73	203.336.294.992,91
5.1.02.01	Belanja Barang	37.321.499.746,55	35.427.129.761,00	94,92	41.479.567.467,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	36.812.314.746,55	34.920.906.762,00	94,86	41.031.863.967,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	100.580.992,00	97.719.155,00	97,15	119.229.311,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	517.129.600,00	517.121.000,00	99,99	571.658.166,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.143.453.393,93	1.117.307.115,00	97,71	1.536.835.099,00
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	1.309.563,00	1.305.000,00	99,65	0,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	80.000.000,00	78.747.750,00	98,43	0,00
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	0,00	0,00	0,00	47.600.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	4.536.952.930,00	4.349.904.631,00	95,87	3.459.063.211,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	245.776.700,00	236.433.351,00	96,19	676.424.324,00
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	15.245.000,00	15.200.000,00	99,70	14.200.000,00
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	0,00	0,00	0,00	2.210.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.844.225.640,12	1.824.320.553,00	98,92	2.550.213.947,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4.750.000,00	4.750.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.995.079.675,50	1.964.228.278,00	98,45	2.280.800.354,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	95.190.000,00	92.516.000,00	97,19	131.437.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	231.855.342,00	223.680.440,00	96,47	192.305.734,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	434.444.649,00	433.302.533,00	99,73	324.961.489,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	292.626.507,00	287.501.401,00	98,24	248.510.549,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	0,00	0,00	0,00	13.352.000,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	0,00	0,00	0,00	1.210.000,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	369.407.080,00	368.782.080,00	99,83	212.340.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	289.776.174,00	289.126.438,00	99,77	392.608.589,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	2.708.511.600,00	1.976.288.592,00	72,96	3.538.544.960,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	5.423.770.900,00	4.939.425.924,00	91,06	6.880.671.300,00
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	82.855.000,00	82.849.000,00	99,99	77.500.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.986.321.000,00	5.814.455.640,00	97,12	5.719.055.074,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	5.643.165.000,00	5.623.150.631,00	99,64	6.412.178.100,00
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	0,00	0,00	0,00	2.935.000,00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	15.900.000,00	15.900.000,00	100,00	60.465.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	3.864.331.000,00	3.681.441.000,00	95,26	4.244.740.000,00
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	225.000.000,00	222.000.000,00	98,66	546.900.000,00
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	38.870.000,00	38.739.000,00	99,66	38.870.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	143.500.000,00	142.661.000,00	99,41	152.560.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	150.035.000,00	149.911.250,00	99,91	103.055.000,00
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	27.500.000,00	27.417.000,00	99,69	27.500.000,00
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	84.700.000,00	84.670.000,00	99,96	2.220.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	14.000.000,00	14.000.000,00	100,00	12.000.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	92.610.000,00	92.610.000,00	100,00	295.591.000,00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	113.442.000,00	113.442.000,00	100,00	140.918.760,00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	149.986.500,00
5.1.02.01.02.0013	Belanja Pipa-Pipa Lainnya	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	149.986.500,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	359.185.000,00	356.222.999,00	99,17	297.717.000,00
5.1.02.01.04.0035	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	20.000.000,00	19.986.999,00	99,93	19.957.000,00
5.1.02.01.04.0040	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.04.0121	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	0,00	0,00	0,00	7.565.000,00
5.1.02.01.04.0123	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya {(),Home Use},	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.04.0134	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar	900.000,00	900.000,00	100,00	0,00

5.1.02.01.04.0310	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar	0,00	0,00	0,00	256.550.000,00
5.1.02.01.04.0404	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00
5.1.02.01.04.0411	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	500.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.04.0463	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan	0,00	0,00	0,00	2.645.000,00
5.1.02.01.04.0510	Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.04.0521	Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	13.260.000,00	13.260.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.04.0710	Belanja Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustaknan Tercetak-Buku Umum	300.025.000,00	297.576.000,00	99,18	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	80.237.690.436,07	75.757.549.306,00	94,41	92.064.191.277,91
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	42.767.122.826,58	39.672.248.726,00	92,76	53.513.849.511,91
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.211.354.400,00	2.941.170.000,00	91,58	2.572.975.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.310.270.000,00	1.197.751.458,00	91,41	1.050.628.000,00
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	48.000.000,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	301.571.000,00	300.918.000,00	99,78	39.790.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	347.750.000,00	44.500.000,00	12,79	31.150.000,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	0,00	0,00	0,00	59.825.000,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	192.100.000,00	185.700.000,00	96,66	126.000.000,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	403.900.000,00	348.900.000,00	86,38	465.000.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	7.952.819.177,00	7.417.927.225,00	93,27	20.879.668.397,91
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	18.000.000,00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	1.349.400.000,00	1.264.150.000,00	93,68	1.349.400.000,00
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	769.800.000,00	673.730.000,00	87,52	769.800.000,00
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	516.000.000,00	504.000.000,00	97,67	588.000.000,00
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	156.500.000,00	123.425.000,00	78,86	57.000.000,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	15.850.000,00	15.850.000,00	100,00	70.750.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	8.849.600.000,00	8.298.182.000,00	93,76	8.447.230.200,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	2.907.250.000,00	2.826.005.594,00	97,20	3.145.360.366,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	424.250.000,00	422.000.000,00	99,46	380.400.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.661.745.220,00	1.661.054.210,00	99,95	1.947.140.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.484.200.000,00	1.484.200.000,00	100,00	1.628.500.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	312.200.000,00	312.200.000,00	100,00	309.980.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	1.252.900.000,00	1.251.600.000,00	99,89	1.162.800.000,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	385.255.500,00	384.983.550,00	99,92	192.000.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	91.700.000,00	91.700.000,00	100,00	113.000.000,00
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	10.700.000,00	10.700.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	0,00	0,00	0,00	29.994.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	137.843.300,00	132.480.630,00	96,10	29.266.000,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	76.600.000,00	76.040.000,00	99,26	300.000,00
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	18.100.000,00	9.083.390,00	50,18	6.083.920,00
5.1.02.02.01.0054	Belanja Jasa Jalan/Tol	7.530.000,00	7.516.500,00	99,82	7.379.500,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	716.800.000,00	713.080.000,00	99,48	778.147.575,00
5.1.02.02.01.0057	Belanja Jasa Operator Kapal	0,00	0,00	0,00	51.600.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	30.800.000,00	21.286.147,00	69,11	32.700.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	197.696.366,80	157.761.104,00	79,79	162.370.386,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	2.501.002.177,78	2.381.620.595,00	95,22	3.240.586.890,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	59.500.000,00	59.500.000,00	100,00	264.875.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	699.900.892,00	605.107.091,00	86,45	1.343.153.477,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	59.175.000,00	17.903.670,00	30,25	33.671.465,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	565.075.818,00	195.795.350,00	34,64	181.083.598,00
5.1.02.02.01.0068	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum	662.568.741,00	634.019.215,00	95,69	0,00
5.1.02.02.01.0069	Belanja Pengolahan Air Limbah	77.737.230,00	77.000.000,00	99,05	0,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	746.410.000,00	738.168.000,00	98,89	1.483.255.000,00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	130.000.000,00	129.984.500,00	99,98	279.985.737,00

5.1.02.02.01.0077	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	377.558.004,00	229.139.953,00	60,69	0,00
5.1.02.02.01.0078	Belanja Sewa Jasa Internet	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.686.710.000,00	1.617.805.544,00	95,91	0,00
5.1.02.02.01.0082	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	30.000.000,00	29.310.000,00	97,70	0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	20.512.843.668,00	20.074.377.139,00	97,86	24.300.868.789,00
5.1.02.02.02.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.367.679.134,00	1.329.614.655,00	97,21	1.244.705.000,00
5.1.02.02.02.0002	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	16.671.779.974,00	16.671.779.974,00	100,00	20.667.831.800,00
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	400.000.000,00	0,00	0,00	1.706.534.250,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	352.137.600,00	351.751.200,00	99,89	312.753.848,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	457.298.960,00	457.283.310,00	99,99	369.043.891,00
5.1.02.02.02.0012	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan	1.263.948.000,00	1.263.948.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	4.404.733.127,00	4.337.477.207,00	98,47	2.988.682.170,00
5.1.02.02.04.0010	Belanja Sewa Alat Pengangkat	6.660.000,00	6.610.050,00	99,25	0,00
5.1.02.02.04.0012	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	76.656.000,00	46.556.100,00	60,73	0,00
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.137.630.140,00	3.117.352.200,00	99,35	2.499.122.690,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	89.584.480,00
5.1.02.02.04.0040	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	246.316.000,00	240.166.000,00	97,50	265.900.000,00
5.1.02.02.04.0044	Belanja Sewa Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
5.1.02.02.04.0089	Belanja Sewa Alat Ukur/Pembanding	28.170.000,00	27.820.000,00	98,75	0,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	50.820.000,00	43.210.000,00	85,02	109.100.000,00
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	1.750.000,00	1.750.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.04.0133	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	2.700.000,00	2.700.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.04.0147	Belanja Sewa Alat Komunikasi Satelit	675.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.04.0202	Belanja Sewa Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
5.1.02.02.04.0405	Belanja Sewa Personal Computer	1.136.250,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.04.0410	Belanja Sewa Peralatan Jaringan	789.841.010,00	789.615.880,00	99,97	0,00
5.1.02.02.04.0411	Belanja Sewa Peralatan Komputer Lainnya	32.378.727,00	31.696.977,00	97,89	0,00
5.1.02.02.04.0509	Belanja Sewa Peralatan Olahraga Lainnya	0,00	0,00	0,00	12.025.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	5.085.837.791,60	4.777.396.780,00	93,93	4.717.973.516,00
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	1.656.759.308,60	1.437.977.654,00	86,79	1.372.173.337,00
5.1.02.02.05.0002	Belanja Sewa Bangunan Gudang	446.732.340,00	426.430.983,00	95,45	420.970.936,00
5.1.02.02.05.0006	Belanja Sewa Bangunan Kesehatan	48.000.000,00	48.000.000,00	100,00	24.000.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	707.975.000,00	679.790.000,00	96,01	623.880.400,00
5.1.02.02.05.0011	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00
5.1.02.02.05.0025	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	98.636.000,00	95.071.000,00	96,38	111.907.000,00
5.1.02.02.05.0041	Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	333.000.000,00	333.000.000,00	100,00	300.000.000,00
5.1.02.02.05.0042	Belanja Sewa Asrama	520.368.000,00	520.368.000,00	100,00	468.800.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	620.610.000,00	583.002.000,00	93,94	490.634.700,00
5.1.02.02.05.0049	Belanja Sewa Rumah Tidak Bersusun	35.407.143,00	35.407.143,00	100,00	70.107.143,00
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	618.350.000,00	618.350.000,00	100,00	825.000.000,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
5.1.02.02.07.0035	Belanja Sewa Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	1.569.166.247,89	1.417.890.900,00	90,35	1.698.247.350,00
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	309.567.181,55	309.023.500,00	99,82	271.711.350,00
5.1.02.02.08.0003	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	99.800.000,00	0,00	0,00	49.950.000,00
5.1.02.02.08.0006	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik	0,00	0,00	0,00	49.894.000,00
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	544.231.000,00	542.531.000,00	99,68	629.225.900,00
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	119.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	473.949.066,34	441.058.000,00	93,06	655.466.100,00
5.1.02.02.08.0028	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	42.000.000,00	26.000.000,00	61,90	42.000.000,00
5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	99.500.000,00	99.278.400,00	99,77	0,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	995.000.000,00	845.000.000,00	84,92	1.271.435.900,00
5.1.02.02.09.0001	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00
5.1.02.02.09.0004	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	0,00

5.1.02.02.09.0006	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan	350.000.000,00	350.000.000,00	100,00	150.000.000,00
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	212.594.000,00
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	450.000.000,00	300.000.000,00	66,66	290.000.000,00
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	0,00	0,00	0,00	468.841.900,00
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	201.000.000,00	56.075.000,00	27,89	193.500.000,00
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	201.000.000,00	56.075.000,00	27,89	193.500.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.526.649.375,00	4.403.740.554,00	97,28	3.327.968.041,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	238.930.000,00	238.780.000,00	99,93	1.083.265.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	2.042.500.000,00	2.029.100.000,00	99,34	555.080.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	2.053.859.375,00	1.952.095.554,00	95,04	1.672.623.041,00
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	191.360.000,00	183.765.000,00	96,03	17.000.000,00
5.1.02.02.15	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	175.337.400,00	173.343.000,00	98,86	50.616.000,00
5.1.02.02.15.0005	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software	175.337.400,00	173.343.000,00	98,86	50.616.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	4.943.524.150,00	4.785.059.272,00	96,79	2.964.644.154,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.150.708.000,00	3.091.619.375,00	98,12	2.506.040.154,00
5.1.02.03.02.0002	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Grader	55.000.000,00	47.170.000,00	85,76	0,00
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	149.873.310,00
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	13.800.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.960.160.000,00	1.958.510.875,00	99,91	1.383.076.459,00
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	42.000.000,00	41.820.000,00	99,57	0,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	13.500.000,00	13.100.000,00	97,03	46.741.000,00
5.1.02.03.02.0043	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	19.500.000,00	0,00	0,00	27.520.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	917.075.500,00	901.336.000,00	98,28	502.988.000,00
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	68.660.000,00	65.120.000,00	94,84	231.125.000,00
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	12.312.500,00	2.062.500,00	16,75	0,00
5.1.02.03.02.0141	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio VHF	0,00	0,00	0,00	8.050.000,00
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	79.999.385,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	12.500.000,00	12.500.000,00	100,00	62.867.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.726.616.150,00	1.627.239.897,00	94,24	458.604.000,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	110.720.150,00	110.481.897,00	99,78	36.560.000,00
5.1.02.03.03.0002	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	0,00	0,00	0,00	2.040.000,00
5.1.02.03.03.0037	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.465.608.000,00	1.366.536.000,00	93,24	420.004.000,00
5.1.02.03.03.0052	Belanja Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu	150.288.000,00	150.222.000,00	99,95	0,00
5.1.02.03.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	66.200.000,00	66.200.000,00	100,00	0,00
5.1.02.03.06.0005	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	66.200.000,00	66.200.000,00	100,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	12.995.304.320,00	12.709.039.401,00	97,79	25.692.786.208,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	12.995.304.320,00	12.709.039.401,00	97,79	25.692.786.208,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9.050.807.520,00	8.939.215.351,00	98,76	18.665.119.273,00
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	411.821.250,00	409.386.800,00	99,40	747.292.125,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.251.296.550,00	3.103.957.250,00	95,46	5.607.549.810,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	269.239.000,00	244.340.000,00	90,75	375.635.000,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	12.140.000,00	12.140.000,00	100,00	297.190.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.851.853.920,00	1.248.957.450,00	67,44	978.527.650,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.636.353.920,00	1.033.508.000,00	63,15	845.427.500,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	287.250.000,00	287.240.000,00	99,99	154.700.000,00
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	116.750.000,00	116.750.000,00	100,00	131.400.000,00
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	513.250.000,00
5.1.02.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	1.082.353.920,00	479.518.000,00	44,30	46.077.500,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	215.500.000,00	215.449.450,00	99,97	133.100.150,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	215.500.000,00	215.449.450,00	99,97	133.100.150,00
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00	16.712.447.138,00
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00	16.712.447.138,00
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00	16.712.447.138,00

5.1.02.89	Belanja Barang dan Jasa BOSP	16.385.461.266,04	16.350.479.242,00	99,78	0,00
5.1.02.89.01	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	16.318.965.266,04	16.283.683.242,00	99,78	0,00
5.1.02.89.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	15.473.287.964,04	15.452.892.140,00	99,86	0,00
5.1.02.89.01.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja	845.677.302,00	830.791.102,00	98,23	0,00
5.1.02.89.02	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD	39.996.000,00	39.996.000,00	100,00	0,00
5.1.02.89.02.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Kinerja	39.996.000,00	39.996.000,00	100,00	0,00
5.1.02.89.03	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan	26.500.000,00	26.800.000,00	101,13	0,00
5.1.02.89.03.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	26.500.000,00	26.800.000,00	101,13	0,00
5.1.02.90	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	6.446.753.685,00	5.854.801.070,00	90,81	5.879.182.437,00
5.1.02.90.01	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	6.446.753.685,00	5.854.801.070,00	90,81	5.879.182.437,00
5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	6.446.753.685,00	5.854.801.070,00	90,81	5.879.182.437,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	34.935.203.694,00	34.658.925.942,46	99,20	17.564.948.661,00
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	34.935.203.694,00	34.658.925.942,46	99,20	17.564.948.661,00
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	34.935.203.694,00	34.658.925.942,46	99,20	17.564.948.661,00
5.1.05	Belanja Hibah	12.118.098.779,00	11.772.269.132,00	97,14	41.571.650.615,00
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	255.462.000,00
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	251.000.000,00
5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	251.000.000,00
5.1.05.01.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	4.462.000,00
5.1.05.01.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	4.462.000,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	6.188.588.779,00	5.843.508.532,00	94,42	36.025.116.615,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.950.000.000,00	1.950.000.000,00	100,00	27.302.930.000,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.950.000.000,00	1.950.000.000,00	100,00	27.302.930.000,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	3.276.500.869,00	2.934.560.338,00	89,56	5.017.576.986,00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	2.092.124.890,00	1.764.624.890,00	84,34	1.086.000.000,00
5.1.05.05.02.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.184.375.979,00	1.169.935.448,00	98,78	3.931.576.986,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	962.087.910,00	958.948.194,00	99,67	3.704.609.629,00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00	600.000.000,00
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	862.234.110,00	859.367.306,00	99,66	2.464.370.905,00
5.1.05.05.03.0003	Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	99.853.800,00	99.580.888,00	99,72	640.238.724,00
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	274.920.000,00	274.470.600,00	99,83	0,00
5.1.05.06.01	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	274.920.000,00	274.470.600,00	99,83	0,00
5.1.05.06.01.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	274.920.000,00	274.470.600,00	99,83	0,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	373.070.000,00	373.070.000,00	100,00	308.495.000,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	373.070.000,00	373.070.000,00	100,00	308.495.000,00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	373.070.000,00	373.070.000,00	100,00	308.495.000,00
5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSP	5.281.520.000,00	5.281.220.000,00	99,99	4.982.577.000,00
5.1.05.08.01	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	0,00	0,00	0,00	346.977.000,00
5.1.05.08.01.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	0,00	0,00	0,00	346.977.000,00
5.1.05.08.02	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	2.239.420.000,00	2.239.420.000,00	100,00	2.235.900.000,00
5.1.05.08.02.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	2.239.420.000,00	2.239.420.000,00	100,00	2.235.900.000,00
5.1.05.08.03	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	3.042.100.000,00	3.041.800.000,00	99,99	2.399.700.000,00
5.1.05.08.03.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	3.042.100.000,00	3.041.800.000,00	99,99	2.399.700.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	26.000.000,00	22.000.000,00	84,61	18.500.000,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	26.000.000,00	22.000.000,00	84,61	6.000.000,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	26.000.000,00	22.000.000,00	84,61	6.000.000,00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	26.000.000,00	22.000.000,00	84,61	6.000.000,00
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00
5.1.06.03.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00
5.1.06.03.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	**463.584.292.839,12**	**452.824.266.108,46**	**97,67**	**469.025.200.983,91**
5.2	**BELANJA MODAL**	**91.931.171.371,36**	**84.297.149.410,00**	**91,69**	**139.134.589.716,00**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	8.296.028.191,00	6.364.747.767,00	76,72	2.055.173.000,00

5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	8.296.028.191,00	6.364.747.767,00	76,72	2.055.173.000,00
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	8.296.028.191,00	6.364.747.767,00	76,72	1.856.384.000,00
5.2.01.01.01.0002	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	0,00	0,00	0,00	363.960.000,00
5.2.01.01.01.0004	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	7.767.969.801,00	5.841.006.470,00	75,19	1.492.424.000,00
5.2.01.01.01.0007	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	528.058.390,00	523.741.297,00	99,18	0,00
5.2.01.01.03	Belanja Modal Lapangan	0,00	0,00	0,00	198.789.000,00
5.2.01.01.03.0019	Belanja Modal Lapangan Lainnya	0,00	0,00	0,00	198.789.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.710.129.687,35	15.372.942.512,00	97,85	35.957.625.906,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	606.094.500,00	606.063.000,00	99,99	1.553.580.000,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	606.094.500,00	606.063.000,00	99,99	1.553.580.000,00
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	0,00	0,00	0,00	1.367.000.000,00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	0,00	0,00	0,00	185.980.000,00
5.2.02.01.03.0008	Belanja Modal Alat Pengolahan Air Kotor	600.000.000,00	600.000.000,00	100,00	0,00
5.2.02.01.03.0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	6.094.500,00	6.063.000,00	99,48	600.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	3.779.248.500,00	3.664.365.290,00	96,96	9.320.448.611,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	3.744.248.500,00	3.629.365.290,00	96,93	9.320.448.611,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.649.585.000,00	1.596.125.000,00	96,75	19.548.611,00
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1.847.663.500,00	1.787.277.890,00	96,73	0,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	247.000.000,00	245.962.400,00	99,57	262.000.000,00
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	0,00	0,00	0,00	9.038.900.000,00
5.2.02.02.03	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00	0,00
5.2.02.02.03.0005	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00	0,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	56.610.000,00	56.610.000,00	100,00	0,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	56.610.000,00	56.610.000,00	100,00	0,00
5.2.02.03.03.0008	Belanja Modal Alat Ukur/Pembanding	56.610.000,00	56.610.000,00	100,00	0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.209.199.110,00	3.145.859.045,00	98,02	3.800.926.451,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	468.013.900,00	463.919.808,00	99,12	219.367.000,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	468.013.900,00	463.919.808,00	99,12	219.367.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	2.527.295.483,00	2.468.779.550,00	97,68	3.335.550.662,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	1.423.834.483,00	1.411.788.778,00	99,15	2.903.252.273,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	3.108.000,00	3.108.000,00	100,00	1.800.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	406.372.000,00	393.498.950,00	96,83	300.861.500,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	681.981.000,00	648.385.162,00	95,07	123.636.889,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	12.000.000,00	11.998.660,00	99,98	6.000.000,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	213.889.727,00	213.159.687,00	99,65	246.008.789,00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	51.000.000,00	50.698.748,00	99,40	43.509.636,00
5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	10.000.000,00	9.999.995,00	99,99	10.000.000,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	61.139.727,00	60.832.747,00	99,49	73.961.153,00
5.2.02.05.03.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	12.250.000,00	12.249.490,00	99,99	22.400.000,00
5.2.02.05.03.0005	Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	40.000.000,00	39.879.402,00	99,69	44.000.000,00
5.2.02.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	5.000.000,00	4.999.995,00	99,99	5.000.000,00
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	34.500.000,00	34.499.310,00	99,99	47.138.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	93.600.000,00	93.600.000,00	100,00	1.436.954.200,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	63.000.000,00	63.000.000,00	100,00	1.433.974.200,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	37.500.000,00	37.500.000,00	100,00	1.301.335.200,00
5.2.02.06.01.0003	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	10.500.000,00	10.500.000,00	100,00	54.257.000,00
5.2.02.06.01.0004	Belanja Modal Peralatan Cetak	0,00	0,00	0,00	30.182.000,00
5.2.02.06.01.0005	Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	0,00	0,00	0,00	39.700.000,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	30.600.000,00	30.600.000,00	100,00	2.980.000,00
5.2.02.06.02.0003	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio HF/FM	600.000,00	600.000,00	100,00	0,00
5.2.02.06.02.0004	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio VHF	0,00	0,00	0,00	2.980.000,00
5.2.02.06.02.0010	Belanja Modal Alat Komunikasi Satelit	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	0,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	1.052.686.911,00	988.668.900,00	93,91	15.601.150.752,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	531.652.536,00	509.715.000,00	95,87	12.993.525.752,00
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	14.052.536,00	0,00	0,00	12.027.251.752,00
5.2.02.07.01.0002	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	2.000.000,00
5.2.02.07.01.0004	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	329.900.000,00	324.850.000,00	98,46	0,00

5.2.02.07.01.0010	Belanja Modal Alat Kedokteran Anak	137.700.000,00	134.865.000,00	97,94	0,00
5.2.02.07.01.0017	Belanja Modal Alat Kedokteran Transfusi Darah	0,00	0,00	0,00	964.274.000,00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	521.034.375,00	478.953.900,00	91,92	2.607.625.000,00
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	521.034.375,00	478.953.900,00	91,92	2.607.625.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	2.419.667.708,35	2.327.103.051,00	96,17	1.605.962.182,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	2.167.475.493,35	2.084.198.722,00	96,15	1.323.441.462,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	722.873.748,35	661.888.115,00	91,56	880.585.500,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	1.444.601.745,00	1.422.310.607,00	98,45	442.855.962,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	252.192.215,00	242.904.329,00	96,31	282.520.720,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	153.615.706,00	144.463.325,00	94,04	77.106.000,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	13.495.999,00	13.495.999,00	100,00	8.658.000,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	85.080.510,00	84.945.005,00	99,84	196.756.720,00
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	885.000.000,00	885.000.000,00	100,00	0,00
5.2.02.13.03	Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian	885.000.000,00	885.000.000,00	100,00	0,00
5.2.02.13.03.0002	Belanja Modal Alat Pengolahan Air	885.000.000,00	885.000.000,00	100,00	0,00
5.2.02.14	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	569.500.000,00	565.000.000,00	99,20	0,00
5.2.02.14.01	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	569.500.000,00	565.000.000,00	99,20	0,00
5.2.02.14.01.0002	Belanja Modal Elektrik	569.500.000,00	565.000.000,00	99,20	0,00
5.2.02.17	Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi	0,00	0,00	0,00	108.180.600,00
5.2.02.17.01	Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi	0,00	0,00	0,00	108.180.600,00
5.2.02.17.01.0026	Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya	0,00	0,00	0,00	108.180.600,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	21.500.000,00	21.500.000,00	100,00	99.161.850,00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	21.500.000,00	21.500.000,00	100,00	99.161.850,00
5.2.02.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	21.500.000,00	21.500.000,00	100,00	0,00
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	0,00	0,00	0,00	99.161.850,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	249.978.570,00	249.766.908,00	99,91	64.065.000,00
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	249.978.570,00	249.766.908,00	99,91	64.065.000,00
5.2.02.19.01.0002	Belanja Modal Peralatan Permainan	249.978.570,00	249.766.908,00	99,91	62.365.000,00
5.2.02.19.01.0006	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00	0,00	2.008.320.260,00
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00	0,00	2.008.320.260,00
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00	0,00	2.008.320.260,00
5.2.02.89	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	2.227.652.668,00	2.234.307.668,00	100,29	0,00
5.2.02.89.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	2.176.108.668,00	2.182.763.668,00	100,30	0,00
5.2.02.89.01.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler	2.011.580.710,00	2.018.235.710,00	100,33	0,00
5.2.02.89.01.0002	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Kinerja	164.527.958,00	164.527.958,00	100,00	0,00
5.2.02.89.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD	51.544.000,00	51.544.000,00	100,00	0,00
5.2.02.89.02.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD Reguler	46.540.000,00	46.540.000,00	100,00	0,00
5.2.02.89.02.0002	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD Kinerja	5.004.000,00	5.004.000,00	100,00	0,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	539.391.720,00	535.098.650,00	99,20	358.876.000,00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	539.391.720,00	535.098.650,00	99,20	358.876.000,00
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	539.391.720,00	535.098.650,00	99,20	358.876.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	40.498.349.634,88	39.872.038.119,00	98,45	41.278.328.853,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	39.649.746.791,88	39.028.487.475,00	98,43	37.209.398.557,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	38.984.533.644,36	38.672.960.205,00	99,20	37.209.398.557,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	2.342.667.339,00	2.290.469.700,00	97,77	1.167.562.842,00
5.2.03.01.01.0004	Belanja Modal Bangunan Gedung Instalasi	299.850.000,00	299.850.000,00	100,00	749.447.200,00
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	19.215.264.616,53	19.200.256.571,00	99,92	13.419.343.140,00
5.2.03.01.01.0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	99.999.048,00	0,00	0,00	0,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.131.644.350,00	1.125.016.350,00	99,41	10.143.079.859,00
5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	11.520.290.049,00	11.519.678.985,00	99,99	6.899.758.500,00
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	418.980.858,00	402.924.000,00	96,16	190.290.000,00
5.2.03.01.01.0016	Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan	892.896.648,00	890.284.000,00	99,70	276.836.952,00
5.2.03.01.01.0018	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	99.980.524,55	9.651.500,00	9,65	0,00
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	2.800.070.988,16	2.793.184.099,00	99,75	3.345.227.600,00
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	0,00	0,00	0,00	37.802.964,00
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	162.889.223,12	141.645.000,00	86,95	980.049.500,00
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	665.213.147,52	355.527.270,00	53,44	0,00
5.2.03.01.02.0001	Belanja Modal Rumah Negara Golongan I	430.007.430,52	122.759.000,00	28,54	0,00

5.2.03.01.02.0002	Belanja Modal Rumah Negara Golongan II	55.205.990,00	55.150.000,00	99,89	0,00
5.2.03.01.02.0012	Belanja Modal Rumah Tidak Bersusun	179.999.727,00	177.618.270,00	98,67	0,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	848.602.843,00	843.550.644,00	99,40	4.068.930.296,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	848.602.843,00	843.550.644,00	99,40	4.068.930.296,00
5.2.03.04.01.0001	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Administrasi	0,00	0,00	0,00	922.633.933,00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	848.602.843,00	843.550.644,00	99,40	3.146.296.363,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	24.343.704.865,13	19.849.155.028,00	81,53	57.979.234.714,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	11.523.120.734,97	9.712.432.468,00	84,28	39.925.812.750,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	9.428.260.860,70	8.382.054.998,00	88,90	34.177.145.950,00
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	9.428.260.860,70	8.382.054.998,00	88,90	34.177.145.950,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	2.094.859.874,27	1.330.377.470,00	63,50	5.748.666.800,00
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	1.642.359.874,27	1.037.373.000,00	63,16	5.748.666.800,00
5.2.04.01.02.0005	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa	452.500.000,00	293.004.470,00	64,75	0,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	10.392.239.381,16	8.996.284.400,00	86,56	4.872.146.276,00
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	101.558.000,00	93.234.000,00	91,80	4.418.000,00
5.2.04.02.01.0008	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	101.558.000,00	93.234.000,00	91,80	4.418.000,00
5.2.04.02.02	Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut	3.460.176.888,70	3.119.590.100,00	90,15	3.114.612.800,00
5.2.04.02.02.0004	Belanja Modal Saluran Pembuang Pasang Surut	3.460.176.888,70	3.119.590.100,00	90,15	3.114.612.800,00
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	1.217.783.738,46	714.511.100,00	58,67	60.068.000,00
5.2.04.02.04.0001	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	1.217.783.738,46	714.511.100,00	58,67	60.068.000,00
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	5.531.792.640,00	5.068.949.200,00	91,63	412.721.000,00
5.2.04.02.06.0006	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	5.531.792.640,00	5.068.949.200,00	91,63	412.721.000,00
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	80.928.114,00	0,00	0,00	1.280.326.476,00
5.2.04.02.07.0001	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	74.351.059,00	0,00	0,00	0,00
5.2.04.02.07.0002	Belanja Modal Bangunan Waduk Air Kotor	6.577.055,00	0,00	0,00	1.270.154.476,00
5.2.04.02.07.0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	0,00	0,00	0,00	10.172.000,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	2.327.747.909,00	1.048.086.160,00	45,02	13.181.275.688,00
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	1.753.149.312,00	474.466.850,00	27,06	10.781.275.688,00
5.2.04.03.01.0005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	1.753.149.312,00	474.466.850,00	27,06	10.781.275.688,00
5.2.04.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	574.598.597,00	573.619.310,00	99,82	0,00
5.2.04.03.03.0003	Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah	574.598.597,00	573.619.310,00	99,82	0,00
5.2.04.03.05	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	0,00	0,00	0,00	2.400.000.000,00
5.2.04.03.05.0009	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	0,00	0,00	0,00	2.400.000.000,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	100.596.840,00	92.352.000,00	91,80	0,00
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	3.645.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.04.04.01.0005	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	3.645.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	96.951.840,00	92.352.000,00	95,25	0,00
5.2.04.04.02.0001	Belanja Modal Jaringan Transmisi	92.511.840,00	92.352.000,00	99,82	0,00
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	4.440.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.624.047.090,00	1.509.889.157,00	92,97	1.267.128.002,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	83.656.000,00	83.480.017,00	99,78	545.138.000,00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	83.656.000,00	83.480.017,00	99,78	535.138.000,00
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	83.656.000,00	83.480.017,00	99,78	535.138.000,00
5.2.05.01.02	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
5.2.05.01.02.0001	Belanja Modal Audio Visual	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	0,00	0,00	721.990.002,00
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	0,00	0,00	721.990.002,00
5.2.05.88.88.8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	0,00	0,00	721.990.002,00
5.2.05.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	1.356.611.990,00	1.339.042.890,00	98,70	0,00
5.2.05.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS	1.356.611.990,00	1.339.042.890,00	98,70	0,00
5.2.05.89.01.0001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler	1.254.567.250,00	1.238.104.150,00	98,68	0,00
5.2.05.89.01.0002	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Kinerja	102.044.740,00	100.938.740,00	98,91	0,00
5.2.05.99	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	183.779.100,00	87.366.250,00	47,53	0,00
5.2.05.99.99	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	183.779.100,00	87.366.250,00	47,53	0,00
5.2.05.99.99.9999	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	183.779.100,00	87.366.250,00	47,53	0,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.458.911.903,00	1.328.376.827,00	91,05	597.099.241,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	335.000.000,00	334.775.000,00	99,93	597.099.241,00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	335.000.000,00	334.775.000,00	99,93	597.099.241,00
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	335.000.000,00	334.775.000,00	99,93	597.099.241,00

5.2.06.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	1.123.911.903,00	993.601.827,00	88,40	0,00
5.2.06.99.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	1.123.911.903,00	993.601.827,00	88,40	0,00
5.2.06.99.99.9999	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	1.123.911.903,00	993.601.827,00	88,40	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	**91.931.171.371,36**	**84.297.149.410,00**	**91,69**	**139.134.589.716,00**
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**895.000.000,00**	**696.208.433,00**	**77,78**	**475.105.500,00**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	895.000.000,00	696.208.433,00	77,78	475.105.500,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	895.000.000,00	696.208.433,00	77,78	475.105.500,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	895.000.000,00	696.208.433,00	77,78	475.105.500,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	895.000.000,00	696.208.433,00	77,78	475.105.500,00
	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	**895.000.000,00**	**696.208.433,00**	**77,78**	**475.105.500,00**
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**87.616.788.800,00**	**84.790.265.420,00**	**96,77**	**88.823.663.300,00**
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	87.616.788.800,00	84.790.265.420,00	96,77	88.823.663.300,00
5.4.02.04	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	105.000.000,00	105.000.000,00	100,00	0,00
5.4.02.04.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi	105.000.000,00	105.000.000,00	100,00	0,00
5.4.02.04.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi	105.000.000,00	105.000.000,00	100,00	0,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	87.511.788.800,00	84.685.265.420,00	96,77	88.823.663.300,00
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	87.511.788.800,00	84.685.265.420,00	96,77	88.388.663.300,00
5.4.02.05.01.0003	Belanja Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa	87.511.788.800,00	84.685.265.420,00	96,77	88.388.663.300,00
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	0,00	0,00	0,00	435.000.000,00
5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	0,00	0,00	0,00	435.000.000,00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	**87.616.788.800,00**	**84.790.265.420,00**	**96,77**	**88.823.663.300,00**
	JUMLAH BELANJA	**644.027.253.010,48**	**622.607.889.371,46**	**96,67**	**697.458.559.499,91**
	SURPLUS/DEFISIT	**(9.874.382.874,00)**	**22.571.464.622,27**	**(228,58)**	**(27.507.370.577,67)**
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**9.874.382.874,00**	**9.874.382.874,43**	**100,00**	**41.381.753.452,10**
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**13.874.382.874,00**	**13.874.382.874,43**	**100,00**	**41.381.753.452,10**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	13.874.382.874,00	13.874.382.874,43	100,00	41.381.753.452,10
6.1.01.05	Penghematan Belanja	13.874.382.874,00	13.874.382.874,43	100,00	41.381.753.452,10
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	13.874.382.874,00	13.874.382.874,43	100,00	41.381.753.452,10
6.1.01.05.01.0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	13.874.382.874,00	13.874.382.874,43	100,00	41.381.753.452,10
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**13.874.382.874,00**	**13.874.382.874,43**	**100,00**	**41.381.753.452,10**
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**4.000.000.000,00**	**4.000.000.000,00**	**100,00**	**0,00**
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100,00	0,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100,00	0,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100,00	0,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100,00	0,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**4.000.000.000,00**	**4.000.000.000,00**	**100,00**	**0,00**
	PEMBIAYAAN NETTO	**9.874.382.874,00**	**9.874.382.874,43**	**100,00**	**41.381.753.452,10**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**0,00**	**32.445.847.496,70**	**0,00**	**13.874.382.874,43**

MAMUJU TENGAH, 2026
BUPATI KAB. MAMUJU TENGAH

H. ARSAL ARAS

Lampiran I.3 : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah
Nomor : -
Tanggal : 2026

PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Organisasi : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000		5	BELANJA DAERAH	188.793.621.071,15	191.742.869.188,00	2.949.248.116,85	101,56	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	148.500.709.202,11	151.992.076.065,00	3.491.366.862,89	102,35	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	94.804.039,00	92.478.129,00	(2.325.910,00)	97,54	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	37.381.963,00	35.863.718,00	(1.518.245,00)	95,93	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	37.381.963,00	35.863.718,00	(1.518.245,00)	95,93	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.381.963,00	35.863.718,00	(1.518.245,00)	95,93	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	12.235.126,00	12.235.126,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	12.235.126,00	12.235.126,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.235.126,00	12.235.126,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.01.0003		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	9.188.527,00	9.188.527,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	9.188.527,00	9.188.527,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.188.527,00	9.188.527,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.01.0004		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	10.234.352,00	10.234.352,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	10.234.352,00	10.234.352,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.234.352,00	10.234.352,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.01.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	8.278.527,00	8.278.527,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	8.278.527,00	8.278.527,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.278.527,00	8.278.527,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	17.485.544,00	16.677.879,00	(807.665,00)	95,38	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	17.485.544,00	16.677.879,00	(807.665,00)	95,38	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.485.544,00	16.677.879,00	(807.665,00)	95,38	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	147.445.474.275,11	150.951.873.326,00	3.506.399.050,89	102,37	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	147.425.815.707,11	150.932.408.758,00	3.506.593.050,89	102,37	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	147.425.815.707,11	150.932.408.758,00	3.506.593.050,89	102,37	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	147.357.425.707,11	150.866.107.038,00	3.508.681.330,89	102,38	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.390.000,00	66.301.720,00	(2.088.280,00)	96,94	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	8.062.260,00	7.992.260,00	(70.000,00)	99,13	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	8.062.260,00	7.992.260,00	(70.000,00)	99,13	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.062.260,00	7.992.260,00	(70.000,00)	99,13	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	11.596.308,00	11.472.308,00	(124.000,00)	98,93	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	11.596.308,00	11.472.308,00	(124.000,00)	98,93	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.596.308,00	11.472.308,00	(124.000,00)	98,93	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.03		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	50.817.530,00	50.817.530,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.03.0005		REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	27.276.208,00	27.276.208,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.03.0005	5.1	BELANJA OPERASI	27.276.208,00	27.276.208,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.03.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.276.208,00	27.276.208,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.03.0006		PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	23.541.322,00	23.541.322,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.03.0006	5.1	BELANJA OPERASI	23.541.322,00	23.541.322,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.03.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.541.322,00	23.541.322,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	140.458.082,00	139.490.931,00	(967.151,00)	99,31	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.05.0003		PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	68.174.912,00	68.174.912,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.05.0003	5.1	BELANJA OPERASI	68.174.912,00	68.174.912,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.05.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.174.912,00	68.174.912,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.05.0005		MONITORING, EVALUASI, DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI	23.197.818,00	23.179.000,00	(18.818,00)	99,91	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.05.0005	5.1	BELANJA OPERASI	23.197.818,00	23.179.000,00	(18.818,00)	99,91	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.05.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.197.818,00	23.179.000,00	(18.818,00)	99,91	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.05.0010		SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	22.017.352,00	21.967.352,00	(50.000,00)	99,77	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.05.0010	5.1	BELANJA OPERASI	22.017.352,00	21.967.352,00	(50.000,00)	99,77	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.05.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.017.352,00	21.967.352,00	(50.000,00)	99,77	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.05.0011		BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	27.068.000,00	26.169.667,00	(898.333,00)	96,68	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.05.0011	5.1	BELANJA OPERASI	27.068.000,00	26.169.667,00	(898.333,00)	96,68	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.05.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.068.000,00	26.169.667,00	(898.333,00)	96,68	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	228.540.376,00	225.863.202,00	(2.677.174,00)	98,82	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	2.045.000,00	445.000,00	(1.600.000,00)	21,76	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.045.000,00	445.000,00	(1.600.000,00)	21,76	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.045.000,00	445.000,00	(1.600.000,00)	21,76	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	28.090.626,00	28.089.000,00	(1.626,00)	99,99	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	28.090.626,00	28.089.000,00	(1.626,00)	99,99	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.090.626,00	28.089.000,00	(1.626,00)	99,99	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	23.085.000,00	23.048.920,00	(36.080,00)	99,84	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	23.085.000,00	23.048.920,00	(36.080,00)	99,84	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.085.000,00	23.048.920,00	(36.080,00)	99,84	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	133.319.750,00	132.280.282,00	(1.039.468,00)	99,22	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	133.319.750,00	132.280.282,00	(1.039.468,00)	99,22	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	133.319.750,00	132.280.282,00	(1.039.468,00)	99,22	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.06.0011		DUKUNGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA SKPD	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.06.0011	5.1	BELANJA OPERASI	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.06.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	348.325.500,00	347.965.000,00	(360.500,00)	99,89	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.07.0002		PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.07.0002	5.1	BELANJA OPERASI	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.07.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	46.350.000,00	45.990.000,00	(360.000,00)	99,22	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	46.350.000,00	45.990.000,00	(360.000,00)	99,22	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46.350.000,00	45.990.000,00	(360.000,00)	99,22	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	71.545.500,00	71.545.000,00	(500,00)	99,99	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	71.545.500,00	71.545.000,00	(500,00)	99,99	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	71.545.500,00	71.545.000,00	(500,00)	99,99	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.07.0009		PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	134.430.000,00	134.430.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.07.0009	5.1	BELANJA OPERASI	134.430.000,00	134.430.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.07.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	134.430.000,00	134.430.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	126.823.847,00	125.325.647,00	(1.498.200,00)	98,81	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	34.330.956,00	32.850.647,00	(1.480.309,00)	95,68	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	34.330.956,00	32.850.647,00	(1.480.309,00)	95,68	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.330.956,00	32.850.647,00	(1.480.309,00)	95,68	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	58.892.891,00	58.875.000,00	(17.891,00)	99,96	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	58.892.891,00	58.875.000,00	(17.891,00)	99,96	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.892.891,00	58.875.000,00	(17.891,00)	99,96	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	65.465.553,00	58.262.300,00	(7.203.253,00)	88,99	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	41.371.048,00	34.787.300,00	(6.583.748,00)	84,08	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	41.371.048,00	34.787.300,00	(6.583.748,00)	84,08	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.371.048,00	34.787.300,00	(6.583.748,00)	84,08	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	8.698.750,00	8.080.000,00	(618.750,00)	92,88	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	8.698.750,00	8.080.000,00	(618.750,00)	92,88	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.698.750,00	8.080.000,00	(618.750,00)	92,88	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	15.395.755,00	15.395.000,00	(755,00)	99,99	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	15.395.755,00	15.395.000,00	(755,00)	99,99	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.395.755,00	15.395.000,00	(755,00)	99,99	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	40.020.136.447,04	39.478.043.915,00	(542.092.532,04)	98,64	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01		PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	21.403.799.150,04	21.250.415.549,00	(153.383.601,04)	99,28	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0003		PEMBANGUNAN RUANG GURU/KEPALA SEKOLAH/TU	126.256.900,00	126.256.900,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	11.024.000,00	11.024.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0003	5.1.05	Belanja Hibah	11.024.000,00	11.024.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0003	5.2	BELANJA MODAL	115.232.900,00	115.232.900,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0003	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	115.232.900,00	115.232.900,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0004		PEMBANGUNAN RUANG UNIT KESEHATAN SEKOLAH	65.917.650,00	65.917.650,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0004	5.2	BELANJA MODAL	65.917.650,00	65.917.650,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0004	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	65.917.650,00	65.917.650,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0006		PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH	324.369.682,00	320.269.414,00	(4.100.268,00)	98,73	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	71.034.414,00	71.034.414,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.034.414,00	71.034.414,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0006	5.2	BELANJA MODAL	253.335.268,00	249.235.000,00	(4.100.268,00)	98,38	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0006	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	242.259.268,00	238.159.000,00	(4.100.268,00)	98,30	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0006	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	11.076.000,00	11.076.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0007		PEMBANGUNAN RUMAH DINAS KEPALA SEKOLAH/GURU/PENJAGA SEKOLAH	179.999.727,00	177.618.270,00	(2.381.457,00)	98,67	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0007	5.2	BELANJA MODAL	179.999.727,00	177.618.270,00	(2.381.457,00)	98,67	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0007	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	179.999.727,00	177.618.270,00	(2.381.457,00)	98,67	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0011		REHABILITASI SEDANG/BERAT PERPUSTAKAAN SEKOLAH	70.162.650,00	70.162.650,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0011	5.2	BELANJA MODAL	70.162.650,00	70.162.650,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0011	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	70.162.650,00	70.162.650,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0014		PENGADAAN MEBEL SEKOLAH	781.190.103,00	780.909.416,00	(280.687,00)	99,96	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0014	5.2	BELANJA MODAL	781.190.103,00	780.909.416,00	(280.687,00)	99,96	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0014	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	781.190.103,00	780.909.416,00	(280.687,00)	99,96	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0025		PEMBINAAN MINAT, BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA	417.768.620,00	414.095.500,00	(3.673.120,00)	99,12	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0025	5.1	BELANJA OPERASI	417.768.620,00	414.095.500,00	(3.673.120,00)	99,12	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	417.768.620,00	414.095.500,00	(3.673.120,00)	99,12	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0026		PENYEDIAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	1.042.000.000,00	1.037.400.000,00	(4.600.000,00)	99,55	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0026	5.1	BELANJA OPERASI	1.042.000.000,00	1.037.400.000,00	(4.600.000,00)	99,55	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0026	5.1.01	Belanja Pegawai	1.000.000.000,00	999.000.000,00	(1.000.000,00)	99,90	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0026	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.000.000,00	38.400.000,00	(3.600.000,00)	91,42	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0027		PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	117.716.265,00	117.704.000,00	(12.265,00)	99,98	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0027	5.1	BELANJA OPERASI	117.716.265,00	117.704.000,00	(12.265,00)	99,98	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0027	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	117.716.265,00	117.704.000,00	(12.265,00)	99,98	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0028		PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN SEKOLAH	135.524.038,00	135.514.500,00	(9.538,00)	99,99	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0028	5.1	BELANJA OPERASI	135.524.038,00	135.514.500,00	(9.538,00)	99,99	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0028	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.524.038,00	85.514.500,00	(9.538,00)	99,98	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0028	5.1.05	Belanja Hibah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0029		PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH DASAR	13.929.199.924,04	13.888.998.300,00	(40.201.624,04)	99,71	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0029	5.1	BELANJA OPERASI	11.445.458.116,04	11.416.105.092,00	(29.353.024,04)	99,74	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0029	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.445.458.116,04	11.416.105.092,00	(29.353.024,04)	99,74	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0029	5.2	BELANJA MODAL	2.483.741.808,00	2.472.893.208,00	(10 848.600,00)	99,56	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0029	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.642.480.708,00	1.645.075.708,00	2.595.000,00	100,15	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0029	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	841.261.100,00	827.817.500,00	(13.443.600,00)	98,40	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0030		PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH DASAR	185.014.210,00	185.010.500,00	(3.710,00)	99,99	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0030	5.1	BELANJA OPERASI	185.014.210,00	185.010.500,00	(3.710,00)	99,99	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0030	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	185.014.210,00	185.010.500,00	(3.710,00)	99,99	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0031		PEMBANGUNAN LABORATORIUM SEKOLAH DASAR	115.360.250,00	115.360.250,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0031	5.2	BELANJA MODAL	115.360.250,00	115.360.250,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0031	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	115.360.250,00	115.360.250,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0035		PEMBINAAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) UNTUK PENDIDIKAN	150.604.449,00	150.604.449,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0035	5.1	BELANJA OPERASI	150.604.449,00	150.604.449,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0035	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.604.449,00	150.604.449,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0036		PENGEMBANGAN KONTEN DIGITAL UNTUK PENDIDIKAN	145.043.198,00	140.593.198,00	(4.450.000,00)	96,93	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0036	5.1	BELANJA OPERASI	145.043.198,00	140.593.198,00	(4.450.000,00)	96,93	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0036	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	145.043.198,00	140.593.198,00	(4.450.000,00)	96,93	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0037		PELATIHAN PENGGUNAAN APLIKASI BIDANG PENDIDIKAN	96.004.195,00	94.803.000,00	(1.201.195,00)	98,74	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0037	5.1	BELANJA OPERASI	96.004.195,00	94.803.000,00	(1.201.195,00)	98,74	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0037	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	96.004.195,00	94.803.000,00	(1.201.195,00)	98,74	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0038		KOORDINASI, PERENCANAAN, SUPERVISI DAN EVALUASI LAYANAN DI BIDANG PENDIDIKAN	32.407.000,00	32.342.553,00	(64.447,00)	99,80	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0038	5.1	BELANJA OPERASI	32.407.000,00	32.342.553,00	(64.447,00)	99,80	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0038	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.407.000,00	32.342.553,00	(64.447,00)	99,80	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0039		SOSIALISASI DAN ADVOKASI KEBIJAKAN BIDANG PENDIDIKAN	100.015.203,00	100.002.000,00	(13.203,00)	99,98	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0039	5.1	BELANJA OPERASI	100.015.203,00	100.002.000,00	(13.203,00)	99,98	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0039	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.015.203,00	100.002.000,00	(13.203,00)	99,98	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0041		FASILITASI KOMUNITAS BELAJAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0041	5.1	BELANJA OPERASI	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0041	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0043		PEMBERIAN LAYANAN PENDAMPINGAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN UNTUK PENCEGAHAN PERUNDUNGAN, KEKERASAN, DAN INTOLERANSI	23.579.081,00	22.489.081,00	(1.090.000,00)	95,37	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0043	5.1	BELANJA OPERASI	23.579.081,00	22.489.081,00	(1.090.000,00)	95,37	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0043	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.579.081,00	22.489.081,00	(1.090.000,00)	95,37	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0045		PERLENGKAPAN DASAR BUKU TEKS DAN NON TEKS PESERTA DIDIK	208.656.000,00	207.470.017,00	(1.185.983,00)	99,43	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0045	5.1	BELANJA OPERASI	125.000.000,00	123.990.000,00	(1.010.000,00)	99,19	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0045	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.000.000,00	123.990.000,00	(1.010.000,00)	99,19	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0045	5.2	BELANJA MODAL	83.656.000,00	83.480.017,00	(175.983,00)	99,78	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0045	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	83.656.000,00	83.480.017,00	(175.983,00)	99,78	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0046		PENGADAAN PERLENGKAPAN PESERTA DIDIK	191.621.329,00	113.926.253,00	(77.695.076,00)	59,45	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0046	5.1	BELANJA OPERASI	191.621.329,00	113.926.253,00	(77.695.076,00)	59,45	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	191.621.329,00	113.926.253,00	(77.695.076,00)	59,45	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0047		PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU	1.532.110.130,00	1.530.190.144,00	(1.919.986,00)	99,87	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0047	5.1	BELANJA OPERASI	135.050.000,00	135.050.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0047	5.1.05	Belanja Hibah	135.050.000,00	135.050.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0047	5.2	BELANJA MODAL	1.397.060.130,00	1.395.140.144,00	(1.919.986,00)	99,86	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0047	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.397.060.130,00	1.395.140.144,00	(1.919.986,00)	99,86	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0049		BIMBINGAN TEKNIS, PELATIHAN, DAN/ATAU MAGANG/PKL UNTUK PENINGKATAN KAPASITAS BIDANG PENDIDIKAN	64.413.350,00	62.120.000,00	(2.293.350,00)	96,43	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0049	5.1	BELANJA OPERASI	64.413.350,00	62.120.000,00	(2.293.350,00)	96,43	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0049	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.413.350,00	62.120.000,00	(2.293.350,00)	96,43	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0050		PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR BAGI PESERTA DIDIK	146.828.515,00	142.680.015,00	(4.148.500,00)	97,17	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0050	5.1	BELANJA OPERASI	146.828.515,00	142.680.015,00	(4.148.500,00)	97,17	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0050	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	146.828.515,00	142.680.015,00	(4.148.500,00)	97,17	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0051		REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SEKOLAH	647.560.900,00	647.560.900,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0051	5.1	BELANJA OPERASI	11.076.000,00	11.076.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0051	5.1.05	Belanja Hibah	11.076.000,00	11.076.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0051	5.2	BELANJA MODAL	636.484.900,00	636.484.900,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0051	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	636.484.900,00	636.484.900,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0054		PENYEDIAAN BIAYA PERSONIL PESERTA DIDIK SEKOLAH DASAR	320.870.281,00	320.710.281,00	(160.000,00)	99,95	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0054	5.1	BELANJA OPERASI	320.870.281,00	320.710.281,00	(160.000,00)	99,95	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0054	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	320.870.281,00	320.710.281,00	(160.000,00)	99,95	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0055		PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA PESERTA DIDIK	244.605.500,00	240.706.308,00	(3.899.192,00)	98,40	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0055	5.1	BELANJA OPERASI	1.560.000,00	0,00	(1.560.000,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0055	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.560.000,00	0,00	(1.560.000,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0055	5.2	BELANJA MODAL	243.045.500,00	240.706.308,00	(2.339.192,00)	99,03	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0055	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	243.045.500,00	240.706.308,00	(2.339.192,00)	99,03	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02		PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	9.940.590.626,00	9.689.158.253,00	(251.432.373,00)	97,47	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0012		PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH	1.125.242.493,00	1.094.688.877,00	(30.553.616,00)	97,28	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0012	5.1	BELANJA OPERASI	117.330.620,00	98.050.040,00	(19.280.580,00)	83,56	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.603.762,00	3.162.500,00	(12.441.262,00)	20,26	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0012	5.1.05	Belanja Hibah	101.726.858,00	94.887.540,00	(6.839.318,00)	93,27	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0012	5.2	BELANJA MODAL	1.007.911.873,00	996.638.837,00	(11.273.036,00)	98,88	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0012	5.2.01	Belanja Modal Tanah	528.058.390,00	523.741.297,00	(4.317.093,00)	99,18	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0012	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	479.853.483,00	472.897.540,00	(6.955.943,00)	98,55	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0019		REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG SERBA GUNA/AULA	149.512.158,00	149.199.705,00	(312.453,00)	99,79	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0019	5.2	BELANJA MODAL	149.512.158,00	149.199.705,00	(312.453,00)	99,79	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0019	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	149.512.158,00	149.199.705,00	(312.453,00)	99,79	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0025		PENGADAAN MEBEL SEKOLAH	89.008.517,00	88.460.849,00	(547.668,00)	99,38	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0025	5.2	BELANJA MODAL	89.008.517,00	88.460.849,00	(547.668,00)	99,38	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0025	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	89.008.517,00	88.460.849,00	(547.668,00)	99,38	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0032		PENYEDIAAN BIAYA PERSONIL PESERTA DIDIK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	320.970.281,00	320.503.781,00	(466.500,00)	99,85	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0032	5.1	BELANJA OPERASI	320.970.281,00	320.503.781,00	(466.500,00)	99,85	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0032	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	320.970.281,00	320.503.781,00	(466.500,00)	99,85	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0038		PEMBINAAN MINAT, BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA	139.390.905,00	139.385.000,00	(5.905,00)	99,99	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0038	5.1	BELANJA OPERASI	139.390.905,00	139.385.000,00	(5.905,00)	99,99	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0038	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	139.390.905,00	139.385.000,00	(5.905,00)	99,99	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0039		PENYEDIAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	67.588.000,00	65.880.000,00	(1.708.000,00)	97,47	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0039	5.1	BELANJA OPERASI	67.588.000,00	65.880.000,00	(1.708.000,00)	97,47	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0039	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.588.000,00	65.880.000,00	(1.708.000,00)	97,47	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0040		PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	200.112.493,00	200.112.493,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0040	5.1	BELANJA OPERASI	200.112.493,00	200.112.493,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0040	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.112.493,00	200.112.493,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0041		PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN SEKOLAH	123.162.015,00	122.462.015,00	(700.000,00)	99,43	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0041	5.1	BELANJA OPERASI	123.162.015,00	122.462.015,00	(700.000,00)	99,43	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0041	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	123.162.015,00	122.462.015,00	(700.000,00)	99,43	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0042		PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	5.772.446.000,00	5.766.002.100,00	(6.443.900,00)	99,88	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0042	5.1	BELANJA OPERASI	4.723.467.150,00	4.717.088.750,00	(6.378.400,00)	99,86	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0042	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.448.547.150,00	4.442.618.150,00	(5.929.000,00)	99,86	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0042	5.1.05	Belanja Hibah	274.920.000,00	274.470.600,00	(449.400,00)	99,83	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0042	5.2	BELANJA MODAL	1.048.978.850,00	1.048.913.350,00	(65.500,00)	99,99	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0042	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	533.627.960,00	537.687.960,00	4.060.000,00	100,76	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0042	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	515.350.890,00	511.225.390,00	(4.125.500,00)	99,19	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0043		PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	165.000.893,00	164.986.000,00	(14.893,00)	99,99	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0043	5.1	BELANJA OPERASI	165.000.893,00	164.986.000,00	(14.893,00)	99,99	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0043	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	165.000.893,00	164.986.000,00	(14.893,00)	99,99	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0049		PENGEMBANGAN KONTEN DIGITAL UNTUK PENDIDIKAN	109.467.150,00	92.077.650,00	(17.389.500,00)	84,11	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0049	5.1	BELANJA OPERASI	109.467.150,00	92.077.650,00	(17.389.500,00)	84,11	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0049	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	109.467.150,00	92.077.650,00	(17.389.500,00)	84,11	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0050		PELATIHAN PENGGUNAAN APLIKASI BIDANG PENDIDIKAN	107.479.607,00	107.379.607,00	(100.000,00)	99,90	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0050	5.1	BELANJA OPERASI	107.479.607,00	107.379.607,00	(100.000,00)	99,90	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0050	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	107.479.607,00	107.379.607,00	(100.000,00)	99,90	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0051		KOORDINASI, PERENCANAAN, SUPERVISI DAN EVALUASI LAYANAN DI BIDANG PENDIDIKAN	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0051	5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0051	5.1.05	Belanja Hibah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0052		SOSIALISASI DAN ADVOKASI KEBIJAKAN BIDANG PENDIDIKAN	79.278.262,00	79.278.262,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0052	5.1	BELANJA OPERASI	79.278.262,00	79.278.262,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0052	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.278.262,00	79.278.262,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0054		FASILITASI KOMUNITAS BELAJAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	5.655.000,00	5.655.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0054	5.1	BELANJA OPERASI	5.655.000,00	5.655.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0054	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.655.000,00	5.655.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0058		PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR BAGI PESERTA DIDIK	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0058	5.2	BELANJA MODAL	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0058	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0059		PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU	901.635.838,00	899.884.900,00	(1.750.938,00)	99,80	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0059	5.1	BELANJA OPERASI	324.852.050,00	324.634.800,00	(217.250,00)	99,93	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0059	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.111.638,00	3.110.000,00	(1.638,00)	99,94	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0059	5.1.05	Belanja Hibah	321.740.412,00	321.524.800,00	(215.612,00)	99,93	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0059	5.2	BELANJA MODAL	576.783.788,00	575.250.100,00	(1.533.688,00)	99,73	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0059	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	576.783.788,00	575.250.100,00	(1.533.688,00)	99,73	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0060		BIMBINGAN TEKNIS, PELATIHAN, DAN/ATAU MAGANG/PKL UNTUK PENINGKATAN KAPASITAS BIDANG PENDIDIKAN	67.955.819,00	67.955.819,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0060	5.1	BELANJA OPERASI	67.955.819,00	67.955.819,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0060	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.955.819,00	67.955.819,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0061		PERLENGKAPAN DASAR BUKU TEKS DAN NON TEKS PESERTA DIDIK	175.025.000,00	173.586.000,00	(1.439.000,00)	99,17	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0061	5.1	BELANJA OPERASI	175.025.000,00	173.586.000,00	(1.439.000,00)	99,17	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0061	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	175.025.000,00	173.586.000,00	(1.439.000,00)	99,17	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0062		PENGADAAN PERLENGKAPAN PESERTA DIDIK	190.000.000,00	0,00	(190.000.000,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0062	5.1	BELANJA OPERASI	190.000.000,00	0,00	(190.000.000,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0062	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	190.000.000,00	0,00	(190.000.000,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0067		PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA PESERTA DIDIK	16.660.195,00	16.660.195,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0067	5.1	BELANJA OPERASI	569.195,00	569.195,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0067	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	569.195,00	569.195,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0067	5.2	BELANJA MODAL	16.091.000,00	16.091.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0067	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.091.000,00	16.091.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03		PENGELOLAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)	4.852.891.519,00	4.851.334.961,00	(1.556.558,00)	99,96	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03.0002		PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS PAUD	280.758.742,00	280.134.754,00	(623.988,00)	99,77	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	27.657.000,00	27.657.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03.0002	5.1.05	Belanja Hibah	26.377.000,00	26.377.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03.0002	5.2	BELANJA MODAL	253.101.742,00	252.477.754,00	(623.988,00)	99,75	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03.0002	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	253.101.742,00	252.477.754,00	(623.988,00)	99,75	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03.0009		PENGADAAN PERLENGKAPAN PAUD	349.969.998,00	349.758.336,00	(211.662,00)	99,93	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03.0009	5.1	BELANJA OPERASI	99.991.428,00	99.991.428,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03.0009	5.1.05	Belanja Hibah	99.991.428,00	99.991.428,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03.0009	5.2	BELANJA MODAL	249.978.570,00	249.766.908,00	(211.662,00)	99,91	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03.0009	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	249.978.570,00	249.766.908,00	(211.662,00)	99,91	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03.0016		PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN PAUD	234.068.984,00	234.068.984,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03.0016	5.1	BELANJA OPERASI	234.068.984,00	234.068.984,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	234.068.984,00	234.068.984,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03.0017		PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN PAUD	237.654.101,00	237.654.101,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03.0017	5.1	BELANJA OPERASI	237.654.101,00	237.654.101,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	237.654.101,00	237.654.101,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03.0018		PENGELOLAAN DANA BOP PAUD	2.749.420.000,00	2.749.420.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03.0018	5.1	BELANJA OPERASI	2.704.376.000,00	2.704.376.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	464.956.000,00	464.956.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03.0018	5.1.05	Belanja Hibah	2.239.420.000,00	2.239.420.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03.0018	5.2	BELANJA MODAL	45.044.000,00	45.044.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03.0018	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.044.000,00	45.044.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03.0019		PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN DANA BOP PAUD	69.751.153,00	69.751.153,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03.0019	5.1	BELANJA OPERASI	69.751.153,00	69.751.153,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03.0019	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.751.153,00	69.751.153,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03.0024		PELATIHAN PENGGUNAAN APLIKASI BIDANG PENDIDIKAN	80.698.324,00	80.698.324,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03.0024	5.1	BELANJA OPERASI	80.698.324,00	80.698.324,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03.0024	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.698.324,00	80.698.324,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03 0025		KOORDINASI, PERENCANAAN, SUPERVISI DAN EVALUASI LAYANAN DI BIDANG PENDIDIKAN	149.999.154,00	149.999.154,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03.0025	5.1	BELANJA OPERASI	149.999.154,00	149.999.154,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.999.154,00	149.999.154,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03.0026		SOSIALISASI DAN ADVOKASI KEBIJAKAN BIDANG PENDIDIKAN	149.997.789,00	149.997.789,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03.0026	5.1	BELANJA OPERASI	149.997.789,00	149.997.789,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03.0026	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.997.789,00	149.997.789,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03.0030		PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU	345.173.770,00	344.452.862,00	(720.908,00)	99,79	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03.0030	5.1	BELANJA OPERASI	345.173.770,00	344.452.862,00	(720.908,00)	99,79	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03.0030	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.596.162,00	9.436.162,00	(160.000,00)	98,33	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03.0030	5.1.05	Belanja Hibah	335.577.608,00	335.016.700,00	(560.908,00)	99,83	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03.0037		PEMBERIAN LAYANAN PENDAMPINGAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN UNTUK PENCEGAHAN PERUNDUNGAN, KEKERASAN, DAN INTOLERANSI	100.000.002,00	100.000.002,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03.0037	5.1	BELANJA OPERASI	100.000.002,00	100.000.002,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03.0037	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.002,00	100.000.002,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03.0039		BIMBINGAN TEKNIS, PELATIHAN, DAN/ATAU MAGANG/PKL UNTUK PENINGKATAN KAPASITAS BIDANG PENDIDIKAN	99.999.502,00	99.999.502,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03.0039	5.1	BELANJA OPERASI	99.999.502,00	99.999.502,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03.0039	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.999.502,00	99.999.502,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03.0051		REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SEKOLAH	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03.0051	5.1	BELANJA OPERASI	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03.0051	5.1.05	Belanja Hibah	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.04		PENGELOLAAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN	3.822.855.152,00	3.687.135.152,00	(135.720.000,00)	96,44	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.04.0010		PENYEDIAAN BIAYA PERSONIL PESERTA DIDIK NONFORMAL/KESETARAAN	265.722.086,00	135.163.086,00	(130.559.000,00)	50,86	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.04.0010	5.1	BELANJA OPERASI	265.722.086,00	135.163.086,00	(130.559.000,00)	50,86	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.04.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	265.722.086,00	135.163.086,00	(130.559.000,00)	50,86	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.04.0016		PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN SEKOLAH NONFORMAL/KESETARAAN	82.162.825,00	82.162.825,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.04.0016	5.1	BELANJA OPERASI	82.162.825,00	82.162.825,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.04.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.162.825,00	82.162.825,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.04.0017		PENGELOLAAN DANA BOP SEKOLAH NONFORMAL/KESETARAAN	3.075.100.000,00	3.075.100.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.04.0017	5.1	BELANJA OPERASI	3.068.600.000,00	3.068.600.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.04.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.500.000,00	26.800.000,00	300.000,00	101,13	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.04.0017	5.1.05	Belanja Hibah	3.042.100.000,00	3.041.800.000,00	(300.000,00)	99,99	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.04.0017	5.2	BELANJA MODAL	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.04.0017	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.04.0026		PELATIHAN PENGGUNAAN APLIKASI BIDANG PENDIDIKAN	162.949.710,00	162.949.710,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.04.0026	5.1	BELANJA OPERASI	162.949.710,00	162.949.710,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.04.0026	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	162.949.710,00	162.949.710,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.04.0027		KOORDINASI, PERENCANAAN, SUPERVISI DAN EVALUASI LAYANAN DI BIDANG PENDIDIKAN	60.670.081,00	55.509.081,00	(5.161.000,00)	91,49	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.04.0027	5.1	BELANJA OPERASI	60.670.081,00	55.509.081,00	(5.161.000,00)	91,49	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.04.0027	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.670.081,00	55.509.081,00	(5.161.000,00)	91,49	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.04.0028		SOSIALISASI DAN ADVOKASI KEBIJAKAN BIDANG PENDIDIKAN	149.250.450,00	149.250.450,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.04.0028	5.1	BELANJA OPERASI	149.250.450,00	149.250.450,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.04.0028	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.250.450,00	149.250.450,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.04.0042		BIMBINGAN TEKNIS, PELATIHAN, DAN/ATAU MAGANG/PKL UNTUK PENINGKATAN KAPASITAS BIDANG PENDIDIKAN	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.04.0042	5.1	BELANJA OPERASI	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.04.0042	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.03		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	197.032.146,00	197.021.932,00	(10.214,00)	99,99	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.03.2.01		PENETAPAN KURIKULUM MUATAN LOKAL PENDIDIKAN DASAR	197.032.146,00	197.021.932,00	(10.214,00)	99,99	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.03.2.01.0004		PELATIHAN PENYUSUNAN KURIKULUM MUATAN LOKAL PENDIDIKAN DASAR	108.718.714,00	108.708.500,00	(10.214,00)	99,99	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.03.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	108.718.714,00	108.708.500,00	(10.214,00)	99,99	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.03.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.718.714,00	108.708.500,00	(10.214,00)	99,99	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.03.2.01.0007		PENYUSUNAN KOMPETENSI DASAR/CAPAIAN PEMBELAJARAN MUATAN LOKAL PENDIDIKAN DASAR	88.313.432,00	88.313.432,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.03.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	88.313.432,00	88.313.432,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.03.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.313.432,00	88.313.432,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.04		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	75.743.276,00	75.727.276,00	(16.000,00)	99,97	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.04.2.01		PEMERATAAN KUANTITAS DAN KUALITAS PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN DASAR, PAUD, DAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN	75.743.276,00	75.727.276,00	(16.000,00)	99,97	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.04.2.01.0001		PERHITUNGAN DAN PEMETAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR, PAUD, DAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN	43.200.000,00	43.200.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	43.200.000,00	43.200.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.200.000,00	43.200.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.04.2.01.0002		PENATAAN PENDISTRIBUSIAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN DASAR, PAUD, DAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN	32.543.276,00	32.527.276,00	(16.000,00)	99,95	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.04.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	32.543.276,00	32.527.276,00	(16.000,00)	99,95	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.04.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.543.276,00	32.527.276,00	(16.000,00)	99,95	
				JUMLAH BELANJA	188.793.621.071,15	191.742.869.188,00	2.949.248.116,85	101,56	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(188.793.621.071,15)	(191.742.869.188,00)	(2.949.248.116,85)	101,56	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(188.793.621.071,15)	(191.742.869.188,00)	(2.949.248.116,85)	101,56	

MAMUJU TENGAH, 2026
BUPATI KAB. MAMUJU TENGAH

H. ARSAL ARAS

Lampiran I.3 : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah
Nomor : -
Tanggal : 2026

PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
Organisasi : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.22	1.01.2.22.0.00.02.0000		5	BELANJA DAERAH	247.527.923,00	247.493.000,00	(34.923,00)	99,98	
2.22	1.01.2.22.0.00.02.0000	2.22.02		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	143.526.669,00	143.500.000,00	(26.669,00)	99,98	
2.22	1.01.2.22.0.00.02.0000	2.22.02.2.01		PENGELOLAAN KEBUDAYAAN YANG MASYARAKAT PELAKUNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	130.380.669,00	130.354.000,00	(26.669,00)	99,97	
2.22	1.01.2.22.0.00.02.0000	2.22.02.2.01.0002		PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA, LEMBAGA, DAN PRANATA KEBUDAYAAN	130.380.669,00	130.354.000,00	(26.669,00)	99,97	
2.22	1.01.2.22.0.00.02.0000	2.22.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	130.380.669,00	130.354.000,00	(26.669,00)	99,97	
2.22	1.01.2.22.0.00.02.0000	2.22.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	130.380.669,00	130.354.000,00	(26.669,00)	99,97	
2.22	1.01.2.22.0.00.02.0000	2.22.02.2.03		PEMBINAAN LEMBAGA ADAT YANG PENGANUTNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.146.000,00	13.146.000,00	0,00	100,00	
2.22	1.01.2.22.0.00.02.0000	2.22.02.2.03.0003		PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PEMBINAAN LEMBAGA ADAT	13.146.000,00	13.146.000,00	0,00	100,00	
2.22	1.01.2.22.0.00.02.0000	2.22.02.2.03.0003	5.2	BELANJA MODAL	13.146.000,00	13.146.000,00	0,00	100,00	
2.22	1.01.2.22.0.00.02.0000	2.22.02.2.03.0003	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	13.146.000,00	13.146.000,00	0,00	100,00	
2.22	1.01.2.22.0.00.02.0000	2.22.03		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	104.001.254,00	103.993.000,00	(8.254,00)	99,99	
2.22	1.01.2.22.0.00.02.0000	2.22.03.2.01		PEMBINAAN KESENIAN YANG MASYARAKAT PELAKUNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	104.001.254,00	103.993.000,00	(8.254,00)	99,99	
2.22	1.01.2.22.0.00.02.0000	2.22.03.2.01.0001		PENINGKATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESENIAN TRADISIONAL	104.001.254,00	103.993.000,00	(8.254,00)	99,99	
2.22	1.01.2.22.0.00.02.0000	2.22.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	104.001.254,00	103.993.000,00	(8.254,00)	99,99	
2.22	1.01.2.22.0.00.02.0000	2.22.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.001.254,00	103.993.000,00	(8.254,00)	99,99	
				JUMLAH BELANJA	247.527.923,00	247.493.000,00	(34.923,00)	99,98	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(247.527.923,00)	(247.493.000,00)	34.923,00	99,98	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(247.527.923,00)	(247.493.000,00)	34.923,00	99,98	

MAMUJU TENGAH, 2026
BUPATI KAB. MAMUJU TENGAH

H. ARSAL ARAS

Lampiran I.3 : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah
Nomor : -
Tanggal : 2026

PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : DINAS KESEHATAN

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.02.0.00.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	14.586.815.848,00	0,00	(14.586.815.848,00)	0,00	
	1.02.0.00.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.247.632.937,00	0,00	(6.247.632.937,00)	0,00	
	1.02.0.00.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	6.247.632.937,00	0,00	(6.247.632.937,00)	0,00	
	1.02.0.00.0.00.01.0000		4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	8.339.182.911,00	0,00	(8.339.182.911,00)	0,00	
	1.02.0.00.0.00.01.0000		4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	8.339.182.911,00	0,00	(8.339.182.911,00)	0,00	
				JUMLAH PENDAPATAN	14.586.815.848,00	0,00	(14.586.815.848,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	89.913.725.289,42	86.256.353.412,00	(3.657.371.877,42)	95,93	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	35.208.684.891,00	33.990.184.975,00	(1.218.499.916,00)	96,53	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	164.916.365,00	149.534.500,00	(15.381.865,00)	90,67	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	66.037.498,00	64.226.000,00	(1.811.498,00)	97,25	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	66.037.498,00	64.226.000,00	(1.811.498,00)	97,25	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.037.498,00	64.226.000,00	(1.811.498,00)	97,25	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	7.699.119,00	5.492.000,00	(2.207.119,00)	71,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	7.699.119,00	5.492.000,00	(2.207.119,00)	71,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.699.119,00	5.492.000,00	(2.207.119,00)	71,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.01.0003		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	11.340.936,00	10.416.500,00	(924.436,00)	91,84	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	11.340.936,00	10.416.500,00	(924.436,00)	91,84	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.340.936,00	10.416.500,00	(924.436,00)	91,84	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	79.838.812,00	69.400.000,00	(10.438.812,00)	86,92	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	79.838.812,00	69.400.000,00	(10.438.812,00)	86,92	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.838.812,00	69.400.000,00	(10.438.812,00)	86,92	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	33.502.351.634,00	32.403.441.145,00	(1.098.910.489,00)	96,71	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	33.422.260.197,00	32.324.206.145,00	(1.098.054.052,00)	96,71	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	33.422.260.197,00	32.324.206.145,00	(1.098.054.052,00)	96,71	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	33.357.420.197,00	32.260.993.921,00	(1.096.426.276,00)	96,71	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.840.000,00	63.212.224,00	(1.627.776,00)	97,48	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	10.707.205,00	10.140.000,00	(567.205,00)	94,70	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	10.707.205,00	10.140.000,00	(567.205,00)	94,70	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.707.205,00	10.140.000,00	(567.205,00)	94,70	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	69.384.232,00	69.095.000,00	(289.232,00)	99,58	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	69.384.232,00	69.095.000,00	(289.232,00)	99,58	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.384.232,00	69.095.000,00	(289.232,00)	99,58	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.03		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	15.044.998,00	15.023.000,00	(21.998,00)	99,85	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.03.0006		PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	15.044.998,00	15.023.000,00	(21.998,00)	99,85	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.03.0006	5.1	BELANJA OPERASI	15.044.998,00	15.023.000,00	(21.998,00)	99,85	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.03.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.044.998,00	15.023.000,00	(21.998,00)	99,85	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	106.342.662,00	89.654.000,00	(16.688.662,00)	84,30	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.05.0003		PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	62.800.000,00	62.800.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.05.0003	5.1	BELANJA OPERASI	62.800.000,00	62.800.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.05.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.800.000,00	62.800.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.05.0004		KOORDINASI DAN PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.05.0004	5.1	BELANJA OPERASI	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.05.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.05.0005		MONITORING, EVALUASI, DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI	6.742.662,00	5.954.000,00	(788.662,00)	88,30	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.05.0005	5.1	BELANJA OPERASI	6.742.662,00	5.954.000,00	(788.662,00)	88,30	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.05.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.742.662,00	5.954.000,00	(788.662,00)	88,30	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	27.800.000,00	11.900.000,00	(15.900.000,00)	42,80	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	27.800.000,00	11.900.000,00	(15.900.000,00)	42,80	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.800.000,00	11.900.000,00	(15.900.000,00)	42,80	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	555.214.070,00	546.322.701,00	(8.891.369,00)	98,39	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	332.096.570,00	328.477.601,00	(3.618.969,00)	98,91	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	33.188.943,00	31.469.730,00	(1.719.213,00)	94,81	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.188.943,00	31.469.730,00	(1.719.213,00)	94,81	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	298.907.627,00	297.007.871,00	(1.899.756,00)	99,36	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	298.907.627,00	297.007.871,00	(1.899.756,00)	99,36	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	13.337.400,00	12.969.500,00	(367.900,00)	97,24	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	13.337.400,00	12.969.500,00	(367.900,00)	97,24	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.337.400,00	12.969.500,00	(367.900,00)	97,24	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	16.580.000,00	16.580.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	16.580.000,00	16.580.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.580.000,00	16.580.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	33.900.000,00	30.300.000,00	(3.600.000,00)	89,38	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	33.900.000,00	30.300.000,00	(3.600.000,00)	89,38	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.900.000,00	30.300.000,00	(3.600.000,00)	89,38	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	159.300.100,00	157.995.600,00	(1.304.500,00)	99,18	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	159.300.100,00	157.995.600,00	(1.304.500,00)	99,18	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	159.300.100,00	157.995.600,00	(1.304.500,00)	99,18	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	215.229.450,00	204.873.765,00	(10.355.685,00)	95,18	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	164.829.450,00	154.473.765,00	(10.355.685,00)	93,71	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	164.829.450,00	154.473.765,00	(10.355.685,00)	93,71	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	164.829.450,00	154.473.765,00	(10.355.685,00)	93,71	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	50.400.000,00	50.400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	50.400.000,00	50.400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.400.000,00	50.400.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	609.113.800,00	542.999.864,00	(66.113.936,00)	89,14	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	512.668.200,00	460.259.990,00	(52.408.210,00)	89,77	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	512.668.200,00	460.259.990,00	(52.408.210,00)	89,77	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	512.668.200,00	460.259.990,00	(52.408.210,00)	89,77	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	66.755.600,00	61.160.874,00	(5.594.726,00)	91,61	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	66.755.600,00	61.160.874,00	(5.594.726,00)	91,61	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.755.600,00	61.160.874,00	(5.594.726,00)	91,61	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	29.690.000,00	21.579.000,00	(8.111.000,00)	72,68	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	29.690.000,00	21.579.000,00	(8.111.000,00)	72,68	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.690.000,00	21.579.000,00	(8.111.000,00)	72,68	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.10		PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	40.471.912,00	38.336.000,00	(2.135.912,00)	94,72	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.10.0001		PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD	40.471.912,00	38.336.000,00	(2.135.912,00)	94,72	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.10.0001	5.1	BELANJA OPERASI	40.471.912,00	38.336.000,00	(2.135.912,00)	94,72	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.10.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.471.912,00	38.336.000,00	(2.135.912,00)	94,72	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	53.609.226.970,42	51.278.111.737,00	(2.331.115.233,42)	95,65	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01		PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	30.395.575.225,42	29.242.389.384,00	(1.153.185.841,42)	96,20	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0003		PEMBANGUNAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA	19.389.705.162,67	19.302.223.895,00	(87.481.267,67)	99,54	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	830.486.357,89	822.480.270,00	(8.006.087,89)	99,03	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	830.486.357,89	822.480.270,00	(8.006.087,89)	99,03	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0003	5.2	BELANJA MODAL	18.559.218.804,78	18.479.743.625,00	(79.475.179,78)	99,57	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.555.319.375,00	2.488.554.298,00	(66.765.077,00)	97,38	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0003	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	16.003.899.429,78	15.991.189.327,00	(12.710.102,78)	99,92	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0006		PENGEMBANGAN PUSKESMAS	1.990.293.736,75	1.983.686.980,00	(6.606.756,75)	99,66	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	79.375.200,00	79.136.400,00	(238.800,00)	99,69	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.375.200,00	79.136.400,00	(238.800,00)	99,69	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0006	5.2	BELANJA MODAL	1.910.918.536,75	1.904.550.580,00	(6.367.956,75)	99,66	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	360.000.000,00	353.673.900,00	(6.326.100,00)	98,24	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0006	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.550.918.536,75	1.550.876.680,00	(41.856,75)	99,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0009		REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PUSKESMAS	91.136.000,00	0,00	(91.136.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	91.136.000,00	0,00	(91.136.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.136.000,00	0,00	(91.136.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0010		REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA	1.733.141.304,00	1.698.480.664,00	(34.660.640,00)	98,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	72.694.654,00	40.290.100,00	(32.404.554,00)	55,42	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.694.654,00	40.290.100,00	(32.404.554,00)	55,42	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0010	5.2	BELANJA MODAL	1.660.446.650,00	1.658.190.564,00	(2.256.086,00)	99,86	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0010	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.660.446.650,00	1.658.190.564,00	(2.256.086,00)	99,86	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0014		PENGADAAN ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN	3.669.029,00	0,00	(3.669.029,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0014	5.2	BELANJA MODAL	3.669.029,00	0,00	(3.669.029,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0014	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.669.029,00	0,00	(3.669.029,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0020		PEMELIHARAAN RUTIN DAN BERKALA ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN	182.991.300,00	174.310.630,00	(8.680.670,00)	95,25	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0020	5.1	BELANJA OPERASI	182.991.300,00	174.310.630,00	(8.680.670,00)	95,25	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	182.991.300,00	174.310.630,00	(8.680.670,00)	95,25	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0023		PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI,, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN	7.004.638.693,00	6.083.687.215,00	(920.951.478,00)	86,85	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0023	5.1	BELANJA OPERASI	7.004.638.693,00	6.083.687.215,00	(920.951.478,00)	86,85	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0023	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.004.638.693,00	6.083.687.215,00	(920.951.478,00)	86,85	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02		PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	23.196.639.236,00	22.020.630.115,00	(1.176.009.121,00)	94,93	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0002		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	107.911.250,00	98.000.000,00	(9.911.250,00)	90,81	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	107.911.250,00	98.000.000,00	(9.911.250,00)	90,81	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	107.911.250,00	98.000.000,00	(9.911.250,00)	90,81	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0003		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR	70.210.000,00	47.545.530,00	(22.664.470,00)	67,71	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	70.210.000,00	47.545.530,00	(22.664.470,00)	67,71	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.210.000,00	47.545.530,00	(22.664.470,00)	67,71	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0004		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BALITA	64.008.094,00	63.370.400,00	(637.694,00)	99,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	64.008.094,00	63.370.400,00	(637.694,00)	99,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.008.094,00	63.370.400,00	(637.694,00)	99,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0005		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	99.999.791,00	95.658.000,00	(4.341.791,00)	95,65	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	99.999.791,00	95.658.000,00	(4.341.791,00)	95,65	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.999.791,00	95.658.000,00	(4.341.791,00)	95,65	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0006		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF	7.040.000,00	7.040.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0006	5.1	BELANJA OPERASI	7.040.000,00	7.040.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.040.000,00	7.040.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0007		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT	14.080.000,00	13.760.000,00	(320.000,00)	97,72	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	14.080.000,00	13.760.000,00	(320.000,00)	97,72	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.080.000,00	13.760.000,00	(320.000,00)	97,72	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0008		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI	3.874.990,00	3.840.000,00	(34.990,00)	99,09	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0008	5.1	BELANJA OPERASI	3.874.990,00	3.840.000,00	(34.990,00)	99,09	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.874.990,00	3.840.000,00	(34.990,00)	99,09	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0009		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS	3.874.990,00	3.874.990,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0009	5.1	BELANJA OPERASI	3.874.990,00	3.874.990,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.874.990,00	3.874.990,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0010		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT	3.520.000,00	3.520.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0010	5.1	BELANJA OPERASI	3.520.000,00	3.520.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.520.000,00	3.520.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0011		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	154.960.703,00	154.850.000,00	(110.703,00)	99,92	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0011	5.1	BELANJA OPERASI	154.960.703,00	154.850.000,00	(110.703,00)	99,92	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	154.960.703,00	154.850.000,00	(110.703,00)	99,92	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0012		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV	10.249.980,00	10.180.000,00	(69.980,00)	99,31	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0012	5.1	BELANJA OPERASI	10.249.980,00	10.180.000,00	(69.980,00)	99,31	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.249.980,00	10.180.000,00	(69.980,00)	99,31	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0014		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK TERDAMPAK KRISIS KESEHATAN AKIBAT BENCANA DAN/ATAU BERPOTENSI BENCANA	146.103.935,00	115.072.932,00	(31.031.003,00)	78,76	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0014	5.1	BELANJA OPERASI	108.583.935,00	105.452.932,00	(3.131.003,00)	97,11	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.583.935,00	105.452.932,00	(3.131.003,00)	97,11	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0014	5.2	BELANJA MODAL	37.520.000,00	9.620.000,00	(27.900.000,00)	25,63	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0014	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.270.000,00	8.370.000,00	(27.900.000,00)	23,07	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0014	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0016		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA	24.500.000,00	21.550.000,00	(2.950.000,00)	87,95	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0016	5.1	BELANJA OPERASI	24.500.000,00	21.550.000,00	(2.950.000,00)	87,95	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.500.000,00	21.550.000,00	(2.950.000,00)	87,95	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0017		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN	54.959.130,00	54.869.450,00	(89.680,00)	99,83	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0017	5.1	BELANJA OPERASI	54.959.130,00	54.869.450,00	(89.680,00)	99,83	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.959.130,00	54.869.450,00	(89.680,00)	99,83	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0018		PENGELOLAAN PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN	357.524.000,00	329.255.000,00	(28.269.000,00)	92,09	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0018	5.1	BELANJA OPERASI	357.524.000,00	329.255.000,00	(28.269.000,00)	92,09	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	357.524.000,00	329.255.000,00	(28.269.000,00)	92,09	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0020		PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN	284.645.193,00	190.040.000,00	(94.605.193,00)	66,76	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0020	5.1	BELANJA OPERASI	284.645.193,00	190.040.000,00	(94.605.193,00)	66,76	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	284.645.193,00	190.040.000,00	(94.605.193,00)	66,76	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0024		PENGELOLAAN UPAYA PENGURANGAN RISIKO KRISIS KESEHATAN DAN PASCA KRISIS KESEHATAN	42.613.757,00	42.275.370,00	(338.387,00)	99,20	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0024	5.1	BELANJA OPERASI	37.013.757,00	36.775.370,00	(238.387,00)	99,35	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0024	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.013.757,00	36.775.370,00	(238.387,00)	99,35	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0024	5.2	BELANJA MODAL	5.600.000,00	5.500.000,00	(100.000,00)	98,21	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0024	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.600.000,00	5.500.000,00	(100.000,00)	98,21	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0025		PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR	244.580.543,00	244.238.665,00	(341.878,00)	99,86	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0025	5.1	BELANJA OPERASI	244.580.543,00	244.238.665,00	(341.878,00)	99,86	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	244.580.543,00	244.238.665,00	(341.878,00)	99,86	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0026		PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT	17.613.127.315,00	16.954.592.910,00	(658.534.405,00)	96,26	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0026	5.1	BELANJA OPERASI	17.613.127.315,00	16.954.592.910,00	(658.534.405,00)	96,26	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0026	5.1.01	Belanja Pegawai	254.355.436,00	254.355.436,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0026	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.358.771.879,00	16.700.237.474,00	(658.534.405,00)	96,20	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0028		PENGAMBILAN DAN PENGIRIMAN SPESIMEN PENYAKIT POTENSIAL KLB KE LABORATORIUM RUJUKAN/NASIONAL	105.271.000,00	9.250.000,00	(96.021.000,00)	8,78	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0028	5.1	BELANJA OPERASI	105.271.000,00	9.250.000,00	(96.021.000,00)	8,78	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0028	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.271.000,00	9.250.000,00	(96.021.000,00)	8,78	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0029		PENYELENGGARAAN KABUPATEN/KOTA SEHAT	8.249.990,00	8.200.000,00	(49.990,00)	99,39	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0029	5.1	BELANJA OPERASI	8.249.990,00	8.200.000,00	(49.990,00)	99,39	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0029	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.249.990,00	8.200.000,00	(49.990,00)	99,39	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0033		OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS	539.481.977,00	536.548.960,00	(2.933.017,00)	99,45	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0033	5.1	BELANJA OPERASI	539.481.977,00	536.548.960,00	(2.933.017,00)	99,45	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	539.481.977,00	536.548.960,00	(2.933.017,00)	99,45	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0034		OPERASIONAL PELAYANAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA	3.057.442.161,00	2.850.722.908,00	(206.719.253,00)	93,23	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0034	5.1	BELANJA OPERASI	3.057.442.161,00	2.850.722.908,00	(206.719.253,00)	93,23	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0034	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.057.442.161,00	2.850.722.908,00	(206.719.253,00)	93,23	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0040		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS	5.094.990,00	5.060.000,00	(34.990,00)	99,31	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0040	5.1	BELANJA OPERASI	5.094.990,00	5.060.000,00	(34.990,00)	99,31	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0040	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.094.990,00	5.060.000,00	(34.990,00)	99,31	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0041		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV)	10.295.457,00	10.165.000,00	(130.457,00)	98,73	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0041	5.1	BELANJA OPERASI	10.295.457,00	10.165.000,00	(130.457,00)	98,73	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0041	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.295.457,00	10.165.000,00	(130.457,00)	98,73	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0042		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN MALARIA	3.874.990,00	3.840.000,00	(34.990,00)	99,09	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0042	5.1	BELANJA OPERASI	3.874.990,00	3.840.000,00	(34.990,00)	99,09	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0042	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.874.990,00	3.840.000,00	(34.990,00)	99,09	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0046		PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK	159.145.000,00	143.310.000,00	(15.835.000,00)	90,04	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0046	5.1	BELANJA OPERASI	159.145.000,00	143.310.000,00	(15.835.000,00)	90,04	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	159.145.000,00	143.310.000,00	(15.835.000,00)	90,04	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.03		PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI	17.012.509,00	15.092.238,00	(1.920.271,00)	88,71	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.03.0002		PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN	17.012.509,00	15.092.238,00	(1.920.271,00)	88,71	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	11.406.510,00	9.486.239,00	(1.920.271,00)	83,16	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.406.510,00	9.486.239,00	(1.920.271,00)	83,16	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.03.0002	5.2	BELANJA MODAL	5.605.999,00	5.605.999,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.03.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.605.999,00	5.605.999,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	857.488.438,00	771.340.700,00	(86.147.738,00)	89,95	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.01		PEMBERIAN IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN DI WILAYAH KABUPATEN/KOTA	4.327.735,00	4.255.000,00	(72.735,00)	98,31	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.01.0002		PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TENAGA KESEHATAN SERTA TINDAK LANJUT PERIZINAN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN	4.327.735,00	4.255.000,00	(72.735,00)	98,31	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	4.327.735,00	4.255.000,00	(72.735,00)	98,31	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.327.735,00	4.255.000,00	(72.735,00)	98,31	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.02		PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN UNTUK UKP DAN UKM DI WILAYAH KABUPATEN/KOTA	6.320.933,00	4.895.000,00	(1.425.933,00)	77,44	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.02.0003		PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	6.320.933,00	4.895.000,00	(1.425.933,00)	77,44	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	6.320.933,00	4.895.000,00	(1.425.933,00)	77,44	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.320.933,00	4.895.000,00	(1.425.933,00)	77,44	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.03		PENGEMBANGAN MUTU DAN PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	846.839.770,00	762.190.700,00	(84.649.070,00)	90,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.03.0001		PENGEMBANGAN MUTU DAN PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	846.839.770,00	762.190.700,00	(84.649.070,00)	90,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	846.839.770,00	762.190.700,00	(84.649.070,00)	90,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	846.839.770,00	762.190.700,00	(84.649.070,00)	90,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	197.059.990,00	183.106.000,00	(13.953.990,00)	92,91	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.01		PEMBERIAN IZIN APOTEK, TOKO OBAT, TOKO ALAT KESEHATAN DAN OPTIKAL, USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL (UMOT)	48.845.000,00	47.524.000,00	(1.321.000,00)	97,29	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.01.0001		PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN PERIZINAN APOTEK, TOKO OBAT, TOKO ALAT KESEHATAN, DAN OPTIKAL, USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL (UMOT)	48.845.000,00	47.524.000,00	(1.321.000,00)	97,29	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	48.845.000,00	47.524.000,00	(1.321.000,00)	97.29	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.845.000,00	47.524.000,00	(1.321.000,00)	97,29	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.03		PENERBITAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DAN NOMOR P-IRT SEBAGAI IZIN PRODUKSI, UNTUK PRODUK MAKANAN MINUMAN TERTENTU YANG DAPAT DIPRODUKSI OLEH INDUSTRI RUMAH TANGGA	92.740.000,00	80.588.000,00	(12.152.000,00)	86,89	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.03.0001		PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DAN NOMOR P-IRT SEBAGAI IZIN PRODUKSI, UNTUK PRODUK MAKANAN MINUMAN TERTENTU YANG DAPAT DIPRODUKSI OLEH INDUSTRI RUMAH TANGGA	92.740.000,00	80.588.000,00	(12.152.000,00)	86,89	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	92.740.000,00	80.588.000,00	(12.152.000,00)	86,89	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.740.000,00	80.588.000,00	(12.152.000,00)	86,89	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.04		PENERBITAN SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI TEMPAT PENGELOLAAN MAKANAN (TPM) ANTARA LAIN JASA BOGA, RUMAH MAKAN/RESTORAN DAN DEPOT AIR MINUM (DAM)	3.874.990,00	3.840.000,00	(34.990,00)	99,09	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.04.0001		PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN PENERBITAN SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI TEMPAT PENGELOLAAN MAKANAN (TPM) ANTARA LAIN JASA BOGA, RUMAH MAKAN/RESTORAN DAN DEPOT AIR MINUM (DAM)	3.874.990,00	3.840.000,00	(34.990,00)	99,09	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.874.990,00	3.840.000,00	(34.990,00)	99,09	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.874.990,00	3.840.000,00	(34.990,00)	99,09	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.06		PEMERIKSAAN DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN POST MARKET PADA PRODUKSI DAN PRODUK MAKANAN MINUMAN INDUSTRI RUMAH TANGGA	51.600.000,00	51.154.000,00	(446.000,00)	99,13	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.06.0001		PEMERIKSAAN POST MARKET PADA PRODUK MAKANAN-MINUMAN INDUSTRI RUMAH TANGGA YANG BEREDAR DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN	51.600.000,00	51.154.000,00	(446.000,00)	99,13	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	51.600.000,00	51.154.000,00	(446.000,00)	99,13	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.600.000,00	51.154.000,00	(446.000,00)	99,13	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	41.265.000,00	33.610.000,00	(7.655.000,00)	81,44	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.01		ADVOKASI, PEMBERDAYAAN, KEMITRAAN, PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN LINTAS SEKTOR TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.040.000,00	17.040.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.01.0001		PENINGKATAN UPAYA PROMOSI KESEHATAN, ADVOKASI, KEMITRAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	17.040.000,00	17.040.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	17.040.000,00	17.040.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.040.000,00	17.040.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.03		PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.225.000,00	16.570.000,00	(7.655.000,00)	68,40	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.03.0001		BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)	24.225.000,00	16.570.000,00	(7.655.000,00)	68,40	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	24.225.000,00	16.570.000,00	(7.655.000,00)	68,40	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.225.000,00	16.570.000,00	(7.655.000,00)	68,40	
				JUMLAH BELANJA	89.913.725.289,42	86.256.353.412,00	(3.657.371.877,42)	95,93	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(75.326.909.441,42)	(86.256.353.412,00)	(10.929.443.970,58)	114,50	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(75.326.909.441,42)	(86.256.353.412,00)	(10.929.443.970,58)	114,50	

MAMUJU TENGAH, 2026
BUPATI KAB. MAMUJU TENGAH

H. ARSAL ARAS

Lampiran I.3 : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah
Nomor : -
Tanggal : 2026

PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.02.0.00.0.00.01.0001		4	PENDAPATAN DAERAH	21.500.000.000,00	25.304.134.624,00	3.804.134.624,00	117,69	
	1.02.0.00.0.00.01.0001		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	21.500.000.000,00	25.304.134.624,00	3.804.134.624,00	117,69	
	1.02.0.00.0.00.01.0001		4.1.02	Retribusi Daerah	21.500.000.000,00	25.304.134.624,00	3.804.134.624,00	117,69	
				JUMLAH PENDAPATAN	21.500.000.000,00	25.304.134.624,00	3.804.134.624,00	117,69	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001		5	BELANJA DAERAH	40.115.644.517,71	40.550.794.618,00	435.150.100,29	101,08	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	34.490.334.913,71	34.968.514.417,00	478.179.503,29	101,38	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	12.267.960.042,71	11.940.526.822,00	(327.433.220,71)	97,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	12.267.960.042,71	11.940.526.822,00	(327.433.220,71)	97,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	12.267.960.042,71	11.940.526.822,00	(327.433.220,71)	97,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	12.267.960.042,71	11.940.526.822,00	(327.433.220,71)	97,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.10		PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	22.222.374.871,00	23.027.987.595,00	805.612.724,00	103,62	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.10.0001		PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD	22.222.374.871,00	23.027.987.595,00	805.612.724,00	103,62	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.10.0001	5.1	BELANJA OPERASI	21.682.983.151,00	22.492.888.945,00	809.905.794,00	103,73	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.10.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.682.983.151,00	22.492.888.945,00	809.905.794,00	103,73	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.10.0001	5.2	BELANJA MODAL	539.391.720,00	535.098.650,00	(4.293.070,00)	99,20	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.10.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	539.391.720,00	535.098.650,00	(4.293.070,00)	99,20	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	5.625.309.604,00	5.582.280.201,00	(43.029.403,00)	99,23	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.01		PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.209.684.604,00	1.167.461.569,00	(42.223.035,00)	96,50	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.01.0022		PENGEMBANGAN RUMAH SAKIT	1.209.684.604,00	1.167.461.569,00	(42.223.035,00)	96,50	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.01.0022	5.1	BELANJA OPERASI	158.400.000,00	158.267.974,00	(132.026,00)	99,91	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.01.0022	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	158.400.000,00	158.267.974,00	(132.026,00)	99,91	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.01.0022	5.2	BELANJA MODAL	1.051.284.604,00	1.009.193.595,00	(42.091.009,00)	95,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.01.0022	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	523.483.507,00	509.715.000,00	(13.768.507,00)	97,36	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.01.0022	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	327.850.000,00	299.850.000,00	(28.000.000,00)	91,45	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.01.0022	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	199.951.097,00	199.628.595,00	(322.502,00)	99,83	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.02		PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.415.625.000,00	4.414.818.632,00	(806.368,00)	99,98	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.02.0032		OPERASIONAL PELAYANAN RUMAH SAKIT	4.415.625.000,00	4.414.818.632,00	(806.368,00)	99,98	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.02.0032	5.1	BELANJA OPERASI	4.415.625.000,00	4.414.818.632,00	(806.368,00)	99,98	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.02.0032	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.415.625.000,00	4.414.818.632,00	(806.368,00)	99,98	
				JUMLAH BELANJA	40.115.644.517,71	40.550.794.618,00	435.150.100,29	101,08	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(18.615.644.517,71)	(15.246.659.994,00)	3.368.984.523,71	81,90	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(18.615.644.517,71)	(15.246.659.994,00)	3.368.984.523,71	81,90	

MAMUJU TENGAH, 2026
BUPATI KAB. MAMUJU TENGAH

H. ARSAL ARAS

Lampiran I.3 : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah
Nomor : -
Tanggal : 2026

PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : PUSKESMAS PANGALE

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.02.0.00.0.00.01.0002		4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	1.394.682.624,00	1.394.682.624,00	0,00	
	1.02.0.00.0.00.01.0002		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	786.900.055,00	786.900.055,00	0,00	
	1.02.0.00.0.00.01.0002		4.1.02	Retribusi Daerah	0,00	786.900.055,00	786.900.055,00	0,00	
	1.02.0.00.0.00.01.0002		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.02.0.00.0.00.01.0002		4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	607.782.569,00	607.782.569,00	0,00	
	1.02.0.00.0.00.01.0002		4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	607.782.569,00	607.782.569,00	0,00	
				JUMLAH PENDAPATAN	0,00	1.394.682.624,00	1.394.682.624,00	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002		5	BELANJA DAERAH	1.913.252.303,00	1.750.477.532,00	(162.774.771,00)	91,49	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.913.252.303,00	1.750.477.532,00	(162.774.771,00)	91,49	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01.2.10		PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	1.913.252.303,00	1.750.477.532,00	(162.774.771,00)	91,49	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01.2.10.0001		PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD	1.913.252.303,00	1.750.477.532,00	(162.774.771,00)	91,49	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01.2.10.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.817.240.805,00	1.675.360.325,00	(141.880.480,00)	92,19	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01.2.10.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	65.880.000,00	65.507.322,00	(372.678,00)	99,43	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01.2.10.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.751.360.805,00	1.609.853.003,00	(141.507.802,00)	91,92	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01.2.10.0001	5.2	BELANJA MODAL	96.011.498,00	75.117.207,00	(20.894.291,00)	78,23	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01.2.10.0001	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	96.011.498,00	75.117.207,00	(20.894.291,00)	78,23	
				JUMLAH BELANJA	1.913.252.303,00	1.750.477.532,00	(162.774.771,00)	91,49	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(1.913.252.303,00)	(355.794.908,00)	1.557.457.395,00	18,59	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(1.913.252.303,00)	(355.794.908,00)	1.557.457.395,00	18,59	

MAMUJU TENGAH, 2026
BUPATI KAB. MAMUJU TENGAH

H. ARSAL ARAS

Lampiran I.3 : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah
Nomor : -
Tanggal : 2026

PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : PUSKESMAS POLO CAMBA

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.02.0.00.0.00.01.0003		4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	538.927.506,00	538.927.506,00	0,00	
	1.02.0.00.0.00.01.0003		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	163.001.134,00	163.001.134,00	0,00	
	1.02.0.00.0.00.01.0003		4.1.02	Retribusi Daerah	0,00	163.001.134,00	163.001.134,00	0,00	
	1.02.0.00.0.00.01.0003		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.02.0.00.0.00.01.0003		4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	375.926.372,00	375.926.372,00	0,00	
	1.02.0.00.0.00.01.0003		4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	375.926.372,00	375.926.372,00	0,00	
				JUMLAH PENDAPATAN	0,00	538.927.506,00	538.927.506,00	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003		5	BELANJA DAERAH	1.041.772.284,00	952.134.394,00	(89.637.890,00)	91,39	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.041.772.284,00	952.134.394,00	(89.637.890,00)	91,39	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01.2.10		PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	1.041.772.284,00	952.134.394,00	(89.637.890,00)	91,39	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01.2.10.0001		PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD	1.041.772.284,00	952.134.394,00	(89.637.890,00)	91,39	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01.2.10.0001	5.1	BELANJA OPERASI	965.153.284,00	888.334.394,00	(76.818.890,00)	92,04	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01.2.10.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	33.476.196,00	32.575.277,00	(900.919,00)	97,30	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01.2.10.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	931.677.088,00	855.759.117,00	(75.917.971,00)	91,85	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01.2.10.0001	5.2	BELANJA MODAL	76.619.000,00	63.800.000,00	(12.819.000,00)	83,26	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01.2.10.0001	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	76.619.000,00	63.800.000,00	(12.819.000,00)	83,26	
				JUMLAH BELANJA	1.041.772.284,00	952.134.394,00	(89.637.890,00)	91,39	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(1.041.772.284,00)	(413.206.888,00)	628.565.396,00	39,66	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(1.041.772.284,00)	(413.206.888,00)	628.565.396,00	39,66	

MAMUJU TENGAH, 2026
BUPATI KAB. MAMUJU TENGAH

H. ARSAL ARAS

Lampiran I.3 : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah
Nomor : -
Tanggal : 2026

PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : PUSKESMAS SALUGATTA

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.02.0.00.0.00.01.0004		4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	1.897.224.129,00	1.897.224.129,00	0,00	
	1.02.0.00.0.00.01.0004		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	948.292.420,00	948.292.420,00	0,00	
	1.02.0.00.0.00.01.0004		4.1.02	Retribusi Daerah	0,00	948.292.420,00	948.292.420,00	0,00	
	1.02.0.00.0.00.01.0004		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.02.0.00.0.00.01.0004		4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	948.931.709,00	948.931.709,00	0,00	
	1.02.0.00.0.00.01.0004		4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	948.931.709,00	948.931.709,00	0,00	
				JUMLAH PENDAPATAN	0,00	1.897.224.129,00	1.897.224.129,00	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004		5	BELANJA DAERAH	2.646.140.770,00	2.329.977.524,00	(316.163.246,00)	88,05	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.646.140.770,00	2.329.977.524,00	(316.163.246,00)	88,05	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.01.2.10		PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	2.646.140.770,00	2.329.977.524,00	(316.163.246,00)	88,05	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.01.2.10.0001		PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD	2.646.140.770,00	2.329.977.524,00	(316.163.246,00)	88,05	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.01.2.10.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.549.334.670,00	2.270.822.524,00	(278.512.146,00)	89,07	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.01.2.10.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	93.068.475,00	66.429.787,00	(26.638.688,00)	71,37	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.01.2.10.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.456.266.195,00	2.204.392.737,00	(251.873.458,00)	89,74	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.01.2.10.0001	5.2	BELANJA MODAL	96.806.100,00	59.155.000,00	(37.651.100,00)	61,10	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.01.2.10.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.900.000,00	0,00	(26.900.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.01.2.10.0001	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	69.906.100,00	59.155.000,00	(10.751.100,00)	84,62	
				JUMLAH BELANJA	2.646.140.770,00	2.329.977.524,00	(316.163.246,00)	88,05	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(2.646.140.770,00)	(432.753.395,00)	2.213.387.375,00	16,35	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(2.646.140.770,00)	(432.753.395,00)	2.213.387.375,00	16,35	

MAMUJU TENGAH, 2026
BUPATI KAB. MAMUJU TENGAH

H. ARSAL ARAS

Lampiran I.3 : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah
Nomor : -
Tanggal : 2026

PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : PUSKESMAS BABANA

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.02.0.00.0.00.01.0005		4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	1.454.306.230,00	1.454.306.230,00	0,00	
	1.02.0.00.0.00.01.0005		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	726.417.950,00	726.417.950,00	0,00	
	1.02.0.00.0.00.01.0005		4.1.02	Retribusi Daerah	0,00	726.417.950,00	726.417.950,00	0,00	
	1.02.0.00.0.00.01.0005		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.02.0.00.0.00.01.0005		4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	727.888.280,00	727.888.280,00	0,00	
	1.02.0.00.0.00.01.0005		4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	727.888.280,00	727.888.280,00	0,00	
				JUMLAH PENDAPATAN	0,00	1.454.306.230,00	1.454.306.230,00	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005		5	BELANJA DAERAH	2.001.851.318,00	1.844.825.341,00	(157.025.977,00)	92,15	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.001.851.318,00	1.844.825.341,00	(157.025.977,00)	92,15	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.01.2.10		PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	2.001.851.318,00	1.844.825.341,00	(157.025.977,00)	92,15	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.01.2.10.0001		PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD	2.001.851.318,00	1.844.825.341,00	(157.025.977,00)	92,15	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.01.2.10.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.872.325.318,00	1.731.065.341,00	(141.259.977,00)	92,45	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.01.2.10.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	58.223.549,00	58.219.106,00	(4.443,00)	99,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.01.2.10.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.814.101.769,00	1.672.846.235,00	(141.255.534,00)	92,21	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.01.2.10.0001	5.2	BELANJA MODAL	129.526.000,00	113.760.000,00	(15.766.000,00)	87,82	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.01.2.10.0001	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	129.526.000,00	113.760.000,00	(15.766.000,00)	87,82	
				JUMLAH BELANJA	2.001.851.318,00	1.844.825.341,00	(157.025.977,00)	92,15	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(2.001.851.318,00)	(390.519.111,00)	1.611.332.207,00	19,50	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(2.001.851.318,00)	(390.519.111,00)	1.611.332.207,00	19,50	

MAMUJU TENGAH, 2026
BUPATI KAB. MAMUJU TENGAH

H. ARSAL ARAS

Lampiran I.3 : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah
Nomor : -
Tanggal : 2026

PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : PUSKESMAS TOBADAK

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.02.0.00.0.00.01.0006		4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	1.941.793.791,00	1.941.793.791,00	0,00	
	1.02.0.00.0.00.01.0006		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	900.113.825,00	900.113.825,00	0,00	
	1.02.0.00.0.00.01.0006		4.1.02	Retribusi Daerah	0,00	900.113.825,00	900.113.825,00	0,00	
	1.02.0.00.0.00.01.0006		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.02.0.00.0.00.01.0006		4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	1.041.679.966,00	1.041.679.966,00	0,00	
	1.02.0.00.0.00.01.0006		4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	1.041.679.966,00	1.041.679.966,00	0,00	
				JUMLAH PENDAPATAN	0,00	1.941.793.791,00	1.941.793.791,00	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006		5	BELANJA DAERAH	2.629.133.532,00	2.412.763.867,00	(216.369.665,00)	91,77	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.629.133.532,00	2.412.763.867,00	(216.369.665,00)	91,77	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.01.2.10		PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	2.629.133.532,00	2.412.763.867,00	(216.369.665,00)	91,77	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.01.2.10.0001		PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD	2.629.133.532,00	2.412.763.867,00	(216.369.665,00)	91,77	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.01.2.10.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.507.713.932,00	2.318.191.247,00	(189.522.685,00)	92,44	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.01.2.10.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	83.681.650,00	82.687.501,00	(994.149,00)	98,81	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.01.2.10.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.424.032.282,00	2.235.503.746,00	(188.528.536,00)	92,22	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.01.2.10.0001	5.2	BELANJA MODAL	121.419.600,00	94.572.620,00	(26.846.980,00)	77,88	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.01.2.10.0001	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	121.419.600,00	94.572.620,00	(26.846.980,00)	77,88	
				JUMLAH BELANJA	2.629.133.532,00	2.412.763.867,00	(216.369.665,00)	91,77	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(2.629.133.532,00)	(470.970.076,00)	2.158.163.456,00	17,91	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(2.629.133.532,00)	(470.970.076,00)	2.158.163.456,00	17,91	

MAMUJU TENGAH, 2026
BUPATI KAB. MAMUJU TENGAH

H. ARSAL ARAS

Lampiran I.3 : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah
Nomor : -
Tanggal : 2026

PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : PUSKESMAS SALUADAK

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.02.0.00.0.00.01.0007		4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	356.587.819,00	356.587.819,00	0,00	
	1.02.0.00.0.00.01.0007		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	115.830.550,00	115.830.550,00	0,00	
	1.02.0.00.0.00.01.0007		4.1.02	Retribusi Daerah	0,00	115.830.550,00	115.830.550,00	0,00	
	1.02.0.00.0.00.01.0007		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.02.0.00.0.00.01.0007		4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	240.757.269,00	240.757.269,00	0,00	
	1.02.0.00.0.00.01.0007		4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	240.757.269,00	240.757.269,00	0,00	
				JUMLAH PENDAPATAN	0,00	356.587.819,00	356.587.819,00	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007		5	BELANJA DAERAH	834.866.864,00	659.295.072,00	(175.571.792,00)	78,97	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	834.866.864,00	659.295.072,00	(175.571.792,00)	78,97	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.01.2.10		PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	834.866.864,00	659.295.072,00	(175.571.792,00)	78,97	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.01.2.10.0001		PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD	834.866.864,00	659.295.072,00	(175.571.792,00)	78,97	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.01.2.10.0001	5.1	BELANJA OPERASI	804.916.864,00	638.095.072,00	(166.821.792,00)	79,27	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.01.2.10.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	39.848.705,00	42.242.228,00	2.393.523,00	106,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.01.2.10.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	765.068.159,00	595.852.844,00	(169.215.315,00)	77,88	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.01.2.10.0001	5.2	BELANJA MODAL	29.950.000,00	21.200.000,00	(8.750.000,00)	70,78	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.01.2.10.0001	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	29.950.000,00	21.200.000,00	(8.750.000,00)	70,78	
				JUMLAH BELANJA	834.866.864,00	659.295.072,00	(175.571.792,00)	78,97	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(834.866.864,00)	(302.707.253,00)	532.159.611,00	36,25	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(834.866.864,00)	(302.707.253,00)	532.159.611,00	36,25	

MAMUJU TENGAH, 2026
BUPATI KAB. MAMUJU TENGAH

H. ARSAL ARAS

Lampiran I.3 : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah
Nomor : -
Tanggal : 2026

PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : PUSKESMAS BATUPARIGI

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.02.0.00.0.00.01.0008		4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	476.603.971,00	476.603.971,00	0,00	
	1.02.0.00.0.00.01.0008		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	127.654.850,00	127.654.850,00	0,00	
	1.02.0.00.0.00.01.0008		4.1.02	Retribusi Daerah	0,00	127.654.850,00	127.654.850,00	0,00	
	1.02.0.00.0.00.01.0008		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.02.0.00.0.00.01.0008		4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	348.949.121,00	348.949.121,00	0,00	
	1.02.0.00.0.00.01.0008		4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	348.949.121,00	348.949.121,00	0,00	
				JUMLAH PENDAPATAN	0,00	476.603.971,00	476.603.971,00	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008		5	BELANJA DAERAH	903.989.386,00	803.766.715,00	(100.222.671,00)	88,91	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	903.989.386,00	803.766.715,00	(100.222.671,00)	88,91	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.01.2.10		PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	903.989.386,00	803.766.715,00	(100.222.671,00)	88,91	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.01.2.10.0001		PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD	903.989.386,00	803.766.715,00	(100.222.671,00)	88,91	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.01.2.10.0001	5.1	BELANJA OPERASI	870.274.981,00	770.606.715,00	(99.668.266,00)	88,54	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.01.2.10.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	47.818.446,00	47.818.446,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.01.2.10.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	822.456.535,00	722.788.269,00	(99.668.266,00)	87,88	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.01.2.10.0001	5.2	BELANJA MODAL	33.714.405,00	33.160.000,00	(554.405,00)	98,35	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.01.2.10.0001	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	33.714.405,00	33.160.000,00	(554.405,00)	98,35	
				JUMLAH BELANJA	903.989.386,00	803.766.715,00	(100.222.671,00)	88,91	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(903.989.386,00)	(327.162.744,00)	576.826.642,00	36,19	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(903.989.386,00)	(327.162.744,00)	576.826.642,00	36,19	

MAMUJU TENGAH, 2026
BUPATI KAB. MAMUJU TENGAH

H. ARSAL ARAS

Lampiran I.3 : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah
Nomor : -
Tanggal : 2026

PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : PUSKESMAS TOPOYO

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.02.0.00.0.00.01.0009		4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	3.032.415.350,00	3.032.415.350,00	0,00	
	1.02.0.00.0.00.01.0009		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	1.263.021.788,00	1.263.021.788,00	0,00	
	1.02.0.00.0.00.01.0009		4.1.02	Retribusi Daerah	0,00	1.263.021.788,00	1.263.021.788,00	0,00	
	1.02.0.00.0.00.01.0009		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.02.0.00.0.00.01.0009		4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	1.769.393.562,00	1.769.393.562,00	0,00	
	1.02.0.00.0.00.01.0009		4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	1.769.393.562,00	1.769.393.562,00	0,00	
				JUMLAH PENDAPATAN	0,00	3.032.415.350,00	3.032.415.350,00	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009		5	BELANJA DAERAH	3.849.697.052,00	3.652.211.643,00	(197.485.409,00)	94,87	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.849.697.052,00	3.652.211.643,00	(197.485.409,00)	94,87	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.01.2.10		PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	3.849.697.052,00	3.652.211.643,00	(197.485.409,00)	94,87	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.01.2.10.0001		PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD	3.849.697.052,00	3.652.211.643,00	(197.485.409,00)	94,87	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.01.2.10.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.499.896.552,00	3.309.484.143,00	(190.412.409,00)	94,55	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.01.2.10.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	86.620.000,00	86.620.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.01.2.10.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.413.276.552,00	3.222.864.143,00	(190.412.409,00)	94,42	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.01.2.10.0001	5.2	BELANJA MODAL	349.800.500,00	342.727.500,00	(7.073.000,00)	97,97	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.01.2.10.0001	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	349.800.500,00	342.727.500,00	(7.073.000,00)	97,97	
				JUMLAH BELANJA	3.849.697.052,00	3.652.211.643,00	(197.485.409,00)	94,87	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(3.849.697.052,00)	(619.796.293,00)	3.229.900.759,00	16,09	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(3.849.697.052,00)	(619.796.293,00)	3.229.900.759,00	16,09	

MAMUJU TENGAH, 2026
BUPATI KAB. MAMUJU TENGAH

H. ARSAL ARAS

Lampiran I.3 : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah
Nomor : -
Tanggal : 2026

PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : PUSKESMAS SALUPANGKANG

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.02.0.00.0.00.01.0010		4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	1.228.940.277,00	1.228.940.277,00	0,00	
	1.02.0.00.0.00.01.0010		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	535.863.100,00	535.863.100,00	0,00	
	1.02.0.00.0.00.01.0010		4.1.02	Retribusi Daerah	0,00	535.863.100,00	535.863.100,00	0,00	
	1.02.0.00.0.00.01.0010		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.02.0.00.0.00.01.0010		4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	693.077.177,00	693.077.177,00	0,00	
	1.02.0.00.0.00.01.0010		4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	693.077.177,00	693.077.177,00	0,00	
				JUMLAH PENDAPATAN	0,00	1.228.940.277,00	1.228.940.277,00	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010		5	BELANJA DAERAH	1.819.698.915,00	1.662.425.747,82	(157.273.167,18)	91,35	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.819.698.915,00	1.662.425.747,82	(157.273.167,18)	91,35	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.01.2.10		PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	1.819.698.915,00	1.662.425.747,82	(157.273.167,18)	91,35	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.01.2.10.0001		PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD	1.819.698.915,00	1.662.425.747,82	(157.273.167,18)	91,35	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.01.2.10.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.731.441.615,00	1.586.483.747,82	(144.957.867,18)	91,62	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.01.2.10.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	71.727.500,00	71.726.816,00	(684,00)	99,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.01.2.10.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.659.714.115,00	1.514.756.931,82	(144.957.183,18)	91,26	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.01.2.10.0001	5.2	BELANJA MODAL	88.257.300,00	75.942.000,00	(12.315.300,00)	86,04	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.01.2.10.0001	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	88.257.300,00	75.942.000,00	(12.315.300,00)	86,04	
				JUMLAH BELANJA	1.819.698.915,00	1.662.425.747,82	(157.273.167,18)	91,35	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(1.819.698.915,00)	(433.485.470,82)	1.386.213.444,18	23,82	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(1.819.698.915,00)	(433.485.470,82)	1.386.213.444,18	23,82	

MAMUJU TENGAH, 2026
BUPATI KAB. MAMUJU TENGAH

H. ARSAL ARAS

Lampiran I.3 : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah
Nomor : -
Tanggal : 2026

PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : PUSKESMAS LARA

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.02.0.00.0.00.01.0011		4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	1.584.332.937,00	1.584.332.937,00	0,00	
	1.02.0.00.0.00.01.0011		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	825.909.325,00	825.909.325,00	0,00	
	1.02.0.00.0.00.01.0011		4.1.02	Retribusi Daerah	0,00	825.909.325,00	825.909.325,00	0,00	
	1.02.0.00.0.00.01.0011		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.02.0.00.0.00.01.0011		4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	758.423.612,00	758.423.612,00	0,00	
	1.02.0.00.0.00.01.0011		4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	758.423.612,00	758.423.612,00	0,00	
				JUMLAH PENDAPATAN	0,00	1.584.332.937,00	1.584.332.937,00	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011		5	BELANJA DAERAH	2.320.344.005,00	2.022.940.575,82	(297.403.429,18)	87,18	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.320.344.005,00	2.022.940.575,82	(297.403.429,18)	87,18	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.01.2.10		PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	2.320.344.005,00	2.022.940.575,82	(297.403.429,18)	87,18	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.01.2.10.0001		PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD	2.320.344.005,00	2.022.940.575,82	(297.403.429,18)	87,18	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.01.2.10.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.114.024.905,00	1.927.574.325,82	(186.450.579,18)	91,18	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.01.2.10.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	71.312.004,00	70.532.461,00	(779.543,00)	98,90	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.01.2.10.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.042.712.901,00	1.857.041.864,82	(185.671.036,18)	90,91	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.01.2.10.0001	5.2	BELANJA MODAL	206.319.100,00	95.366.250,00	(110.952.850,00)	46,22	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.01.2.10.0001	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	183.779.100,00	87.366.250,00	(96.412.850,00)	47,53	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.01.2.10.0001	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	22.540.000,00	8.000.000,00	(14.540.000,00)	35,49	
				JUMLAH BELANJA	2.320.344.005,00	2.022.940.575,82	(297.403.429,18)	87,18	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(2.320.344.005,00)	(438.607.638,82)	1.881.736.366,18	18,90	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(2.320.344.005,00)	(438.607.638,82)	1.881.736.366,18	18,90	

MAMUJU TENGAH, 2026
BUPATI KAB. MAUJU TENGAH

H. ARSAL ARAS

Lampiran I.3 : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah
Nomor : -
Tanggal : 2026

PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : PUSKESMAS DURIKUMBA

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.02.0.00.0.00.01.0012		4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	1.545.151.462,00	1.545.151.462,00	0,00	
	1.02.0.00.0.00.01.0012		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	772.513.500,00	772.513.500,00	0,00	
	1.02.0.00.0.00.01.0012		4.1.02	Retribusi Daerah	0,00	772.513.500,00	772.513.500,00	0,00	
	1.02.0.00.0.00.01.0012		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.02.0.00.0.00.01.0012		4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	772.637.962,00	772.637.962,00	0,00	
	1.02.0.00.0.00.01.0012		4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	772.637.962,00	772.637.962,00	0,00	
				JUMLAH PENDAPATAN	0,00	1.545.151.462,00	1.545.151.462,00	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012		5	BELANJA DAERAH	2.159.466.661,00	1.921.915.314,82	(237.551.346,18)	88,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.159.466.661,00	1.921.915.314,82	(237.551.346,18)	88,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.01.2.10		PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	2.159.466.661,00	1.921.915.314,82	(237.551.346,18)	88,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.01.2.10.0001		PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD	2.159.466.661,00	1.921.915.314,82	(237.551.346,18)	88,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.01.2.10.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.053.299.161,00	1.815.747.814,82	(237.551.346,18)	88,43	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.01.2.10.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	57.433.330,00	57.428.685,00	(4.645,00)	99,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.01.2.10.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.995.865.831,00	1.758.319.129,82	(237.546.701,18)	88,09	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.01.2.10.0001	5.2	BELANJA MODAL	106.167.500,00	106.167.500,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.01.2.10.0001	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	106.167.500,00	106.167.500,00	0,00	100,00	
				JUMLAH BELANJA	2.159.466.661,00	1.921.915.314,82	(237.551.346,18)	88,99	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(2.159.466.661,00)	(376.763.852,82)	1.782.702.808,18	17,44	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(2.159.466.661,00)	(376.763.852,82)	1.782.702.808,18	17,44	

MAMUJU TENGAH, 2026
BUPATI KAB. MAMUJU TENGAH

H. ARSAL ARAS

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah
Nomor : -
Tanggal : 2026

PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.03.0.00.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	8.524.488.250,00	6.373.856.204,00	(2.150.632.046,00)	74,77	
	1.03.0.00.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.524.488.250,00	6.373.856.204,00	(2.150.632.046,00)	74,77	
	1.03.0.00.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	8.524.488.250,00	6.370.856.204,00	(2.153.632.046,00)	74,73	
	1.03.0.00.0.00.01.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
				JUMLAH PENDAPATAN	8.524.488.250,00	6.373.856.204,00	(2.150.632.046,00)	74,77	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	35.723.748.449,22	30.610.490.618,00	(5.113.257.831,22)	85,68	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.872.403.806,74	3.334.603.804,00	(537.800.002,74)	86,11	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	50.229.252,00	47.118.268,00	(3.110.984,00)	93,80	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	1.492.330,00	1.492.000,00	(330,00)	99,97	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.492.330,00	1.492.000,00	(330,00)	99,97	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.492.330,00	1.492.000,00	(330,00)	99,97	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	1.969.003,00	1.969.000,00	(3,00)	99,99	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.969.003,00	1.969.000,00	(3,00)	99,99	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.969.003,00	1.969.000,00	(3,00)	99,99	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.01.0003		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	12.711.244,00	11.198.768,00	(1.512.476,00)	88,10	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	12.711.244,00	11.198.768,00	(1.512.476,00)	88,10	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.711.244,00	11.198.768,00	(1.512.476,00)	88,10	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.01.0004		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	1.940.032,00	1.940.000,00	(32,00)	99,99	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.940.032,00	1.940.000,00	(32,00)	99,99	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.940.032,00	1.940.000,00	(32,00)	99,99	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.01.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	4.266.681,00	2.669.000,00	(1.597.681,00)	62,55	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	4.266.681,00	2.669.000,00	(1.597.681,00)	62,55	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.266.681,00	2.669.000,00	(1.597.681,00)	62,55	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	27.849.962,00	27.849.500,00	(462,00)	99,99	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	27.849.962,00	27.849.500,00	(462,00)	99,99	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.849.962,00	27.849.500,00	(462,00)	99,99	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.265.564.415,74	2.825.141.249,00	(440.423.166,74)	86,51	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	3.257.733.731,74	2.817.311.249,00	(440.422.482,74)	86,48	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.257.733.731,74	2.817.311.249,00	(440.422.482,74)	86,48	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	3.176.093.731,74	2.742.670.003,00	(433.423.728,74)	86,35	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.640.000,00	74.641.246,00	(6.998.754,00)	91,42	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	7.830.684,00	7.830.000,00	(684,00)	99,99	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	7.830.684,00	7.830.000,00	(684,00)	99,99	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.830.684,00	7.830.000,00	(684,00)	99,99	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.03		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	3.684.640,00	3.684.000,00	(640,00)	99,98	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.03.0006		PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	3.684.640,00	3.684.000,00	(640,00)	99,98	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.03.0006	5.1	BELANJA OPERASI	3.684.640,00	3.684.000,00	(640,00)	99,98	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.03.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.684.640,00	3.684.000,00	(640,00)	99,98	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	85.105.799,00	66.594.999,00	(18.510.800,00)	78,24	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.05.0003		PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	51.505.799,00	49.003.799,00	(2.502.000,00)	95,14	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.05.0003	5.1	BELANJA OPERASI	51.505.799,00	49.003.799,00	(2.502.000,00)	95,14	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.05.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.505.799,00	49.003.799,00	(2.502.000,00)	95,14	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.05.0011		BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	33.600.000,00	17.591.200,00	(16.008.800,00)	52,35	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.05.0011	5.1	BELANJA OPERASI	33.600.000,00	17.591.200,00	(16.008.800,00)	52,35	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.05.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.600.000,00	17.591.200,00	(16.008.800,00)	52,35	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	212.419.600,00	207.459.241,00	(4.960.359,00)	97,66	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	132.386.500,00	128.371.500,00	(4.015.000,00)	96,96	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	132.386.500,00	128.371.500,00	(4.015.000,00)	96,96	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	132.386.500,00	128.371.500,00	(4.015.000,00)	96,96	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	3.125.000,00	3.115.000,00	(10.000,00)	99,68	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	3.125.000,00	3.115.000,00	(10.000,00)	99,68	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.125.000,00	3.115.000,00	(10.000,00)	99,68	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	67.908.100,00	66.972.741,00	(935.359,00)	98,62	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	67.908.100,00	66.972.741,00	(935.359,00)	98,62	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.908.100,00	66.972.741,00	(935.359,00)	98,62	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	154.490.100,00	122.179.647,00	(32.310.453,00)	79,08	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	138.890.100,00	106.579.647,00	(32.310.453,00)	76,73	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	138.890.100,00	106.579.647,00	(32.310.453,00)	76,73	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	138.890.100,00	106.579.647,00	(32.310.453,00)	76,73	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100.910.000,00	62.426.400,00	(38.483.600,00)	61,86	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	93.910.000,00	55.459.900,00	(38.450.100,00)	59,05	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	93.910.000,00	55.459.900,00	(38.450.100,00)	59,05	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	93.910.000,00	55.459.900,00	(38.450.100,00)	59,05	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	7.000.000,00	6.966.500,00	(33.500,00)	99,52	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	7.000.000,00	6.966.500,00	(33.500,00)	99,52	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	6.966.500,00	(33.500,00)	99,52	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	3.779.062.627,16	3.435.429.300,00	(343.633.327,16)	90,90	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.01		PENGELOLAAN SDA DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI PADA WILAYAH SUNGAI (WS) DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	677.593.455,76	573.252.600,00	(104.340.855,76)	84,60	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0115		PEMBANGUNAN TANGGUL SUNGAI	309.560.538,46	296.563.200,00	(12.997.338,46)	95,80	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0115	5.2	BELANJA MODAL	309.560.538,46	296.563.200,00	(12.997.338,46)	95,80	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0115	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	309.560.538,46	296.563.200,00	(12.997.338,46)	95,80	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0117		PEMBANGUNAN SEAWALL DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI LAINNYA	18.526.200,00	10.146.300,00	(8.379.900,00)	54,76	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0117	5.2	BELANJA MODAL	18.526.200,00	10.146.300,00	(8.379.900,00)	54,76	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0117	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	18.526.200,00	10.146.300,00	(8.379.900,00)	54,76	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0122		REHABILITASI KANAL BANJIR	319.186.717,30	236.223.100,00	(82.963.617,30)	74,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0122	5.2	BELANJA MODAL	319.186.717,30	236.223.100,00	(82.963.617,30)	74,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0122	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	319.186.717,30	236.223.100,00	(82.963.617,30)	74,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0128		PENYUSUNAN RENCANA TEKNIS DAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK KONSTRUKSI BENDUNGAN, EMBUNG, DAN BANGUNAN PENAMPUNG AIR LAINNYA	30.320.000,00	30.320.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0128	5.1	BELANJA OPERASI	30.320.000,00	30.320.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0128	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.320.000,00	30.320.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.02		PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA DI BAWAH 1000 HA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.101.469.171,40	2.862.176.700,00	(239.292.471,40)	92,28	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.02.0014		REHABILITASI JARINGAN IRIGASI PERMUKAAN	401.543.998,43	389.468.000,00	(12.075.998,43)	96,99	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.02.0014	5.2	BELANJA MODAL	401.543.998,43	389.468.000,00	(12.075.998,43)	96,99	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.02.0014	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	401.543.998,43	389.468.000,00	(12.075.998,43)	96,99	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.02.0022		OPERASI DAN PEMELIHARAAN BENDUNG IRIGASI	2.699.925.172,97	2.472.708.700,00	(227.216.472,97)	91,58	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.02.0022	5.2	BELANJA MODAL	2.699.925.172,97	2.472.708.700,00	(227.216.472,97)	91,58	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.02.0022	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.699.925.172,97	2.472.708.700,00	(227.216.472,97)	91,58	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	10.368.325.321,00	8.546.780.516,00	(1.821.544.805,00)	82,43	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03.2.01		PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.368.325.321,00	8.546.780.516,00	(1.821.544.805,00)	82,43	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0026		PENINGKATAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) JARINGAN PERPIPAAN	421.749.496,00	396.449.000,00	(25.300.496,00)	94,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0026	5.1	BELANJA OPERASI	8.000.000,00	7.930.000,00	(70.000,00)	99,12	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0026	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	7.930.000,00	(70.000,00)	99,12	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0026	5.2	BELANJA MODAL	413.749.496,00	388.519.000,00	(25.230.496,00)	93,90	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0026	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	413.749.496,00	388.519.000,00	(25.230.496,00)	93,90	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0028		PEMBANGUNAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) JARINGAN PERPIPAAN	5.791.959.363,00	5.120.032.902,00	(671.926.461,00)	88,39	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0028	5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	0,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0028	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	0,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0028	5.2	BELANJA MODAL	5.785.959.363,00	5.120.032.902,00	(665.926.461,00)	88,49	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0028	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.785.959.363,00	5.120.032.902,00	(665.926.461,00)	88,49	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0029		OPERASI DAN PEMELIHARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM)	4.154.616.462,00	3.030.298.614,00	(1.124.317.848,00)	72,93	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0029	5.1	BELANJA OPERASI	3.048.906.314,00	2.981.588.466,00	(67.317.848,00)	97,79	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0029	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.048.906.314,00	2.981.588.466,00	(67.317.848,00)	97,79	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0029	5.2	BELANJA MODAL	1.105.710.148,00	48.710.148,00	(1.057.000.000,00)	4,40	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0029	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.105.710.148,00	48.710.148,00	(1.057.000.000,00)	4,40	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.05		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	3.769.345.000,00	3.769.275.000,00	(70.000,00)	99,99	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.05.2.01		PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.769.345.000,00	3.769.275.000,00	(70.000,00)	99,99	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.05.2.01.0039		PENYEDIAAN SUB SISTEM PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK (SPALD) SETEMPAT	3.769.345.000,00	3.769.275.000,00	(70.000,00)	99,99	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.05.2.01.0039	5.1	BELANJA OPERASI	3.769.345.000,00	3.769.275.000,00	(70.000,00)	99,99	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.05.2.01.0039	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.769.345.000,00	3.769.275.000,00	(70.000,00)	99,99	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.06		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	230.358.059,00	93.561.000,00	(136.797.059,00)	40,61	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.06.2.01		PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGAI DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	230.358.059,00	93.561.000,00	(136.797.059,00)	40,61	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.06.2.01.0012		PEMBANGUNAN SISTEM DRAINASE LINGKUNGAN	74.351.059,00	0,00	(74.351.059,00)	0,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.06.2.01.0012	5.2	BELANJA MODAL	74.351.059,00	0,00	(74.351.059,00)	0,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.06.2.01.0012	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	74.351.059,00	0,00	(74.351.059,00)	0,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.06.2.01.0020		OPTIMALISASAI SISTEM DRAINASE LINGKUNGAN	120.027.000,00	93.561.000,00	(26.466.000,00)	77,94	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.06.2.01.0020	5.2	BELANJA MODAL	120.027.000,00	93.561.000,00	(26.466.000,00)	77,94	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.06.2.01.0020	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	120.027.000,00	93.561.000,00	(26.466.000,00)	77,94	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.06.2.01.0024		PENINGKATAN SISTEM DRAINASE PERKOTAAN	35.980.000,00	0,00	(35.980.000,00)	0,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.06.2.01.0024	5.2	BELANJA MODAL	35.980.000,00	0,00	(35.980.000,00)	0,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.06.2.01.0024	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	35.980.000,00	0,00	(35.980.000,00)	0,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	2.100.899.952,35	1.520.471.000,00	(580.428.952,35)	72,37	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08.2.01		PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DI WILAYAH DAERAH KABUPATEN/KOTA, PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG	2.100.899.952,35	1.520.471.000,00	(580.428.952,35)	72,37	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0018		PEMELIHARAAN, PERAWATAN, DAN PEMERIKSAAN BERKALA BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.758.169.033,35	1.214.826.000,00	(543.343.033,35)	69,09	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0018	5.1	BELANJA OPERASI	366.249.693,00	254.475.000,00	(111.774.693,00)	69,48	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	346.473.000,00	240.902.000,00	(105.571.000,00)	69,52	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0018	5.1.05	Belanja Hibah	19.776.693,00	13.573.000,00	(6.203.693,00)	68,63	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0018	5.2	BELANJA MODAL	1.391.919.340,35	960.351.000,00	(431.568.340,35)	68,99	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0018	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.391.919.340,35	960.351.000,00	(431.568.340,35)	68,99	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0022		PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG	52.800.000,00	38.300.000,00	(14.500.000,00)	72,53	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0022	5.1	BELANJA OPERASI	52.800.000,00	38.300.000,00	(14.500.000,00)	72,53	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0022	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.800.000,00	38.300.000,00	(14.500.000,00)	72,53	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0023		PENYELENGGARAAN PENERBITAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG), SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF), SURAT BUKTI KEPEMILIKAN BANGUNAN GEDUNG (SBKBG), RENCANA TEKNIS PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG (RTB), TIM PROFESI AHLI (TPA), TIM PENILAI TEKNIS (TPT), PENILIK, DAN PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG MELALUI SIMBG	289.930.919,00	267.345.000,00	(22.585.919,00)	92,20	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0023	5.1	BELANJA OPERASI	289.930.919,00	267.345.000,00	(22.585.919,00)	92,20	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0023	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	289.930.919,00	267.345.000,00	(22.585.919,00)	92,20	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.09		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	99.999.048,00	0,00	(99.999.048,00)	0,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.09.2.01		PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	99.999.048,00	0,00	(99.999.048,00)	0,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.09.2.01.0010		PENYUSUNAN RENCANA DAN TEKNIS PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN DI KAWASAN STRATEGIS DAERAH KABUPATEN/KOTA	99.999.048,00	0,00	(99.999.048,00)	0,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.09.2.01.0010	5.2	BELANJA MODAL	99.999.048,00	0,00	(99.999.048,00)	0,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.09.2.01.0010	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	99.999.048,00	0,00	(99.999.048,00)	0,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	11.471.674.634,97	9.884.689.998,00	(1.586.984.636,97)	86,16	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01		PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA	11.471.674.634,97	9.884.689.998,00	(1.586.984.636,97)	86,16	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0033		REKONSTRUKSI JALAN	6.730.621.260,71	5.804.795.998,00	(925.825.262,71)	86,24	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0033	5.1	BELANJA OPERASI	48.000.000,00	47.915.000,00	(85.000,00)	99,82	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.000.000,00	47.915.000,00	(85.000,00)	99,82	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0033	5.2	BELANJA MODAL	6.682.621.260,71	5.756.880.998,00	(925.740.262,71)	86,14	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0033	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	6.682.621.260,71	5.756.880.998,00	(925.740.262,71)	86,14	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0034		PEMELIHARAAN BERKALA JALAN	2.554.462.499,99	2.499.990.000,00	(54.472.499,99)	97,86	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0034	5.2	BELANJA MODAL	2.554.462.499,99	2.499.990.000,00	(54.472.499,99)	97,86	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0034	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.554.462.499,99	2.499.990.000,00	(54.472.499,99)	97,86	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0039		REHABILITASI JEMBATAN	139.727.000,00	4.029.000,00	(135.698.000,00)	2,88	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0039	5.2	BELANJA MODAL	139.727.000,00	4.029.000,00	(135.698.000,00)	2,88	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0039	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	139.727.000,00	4.029.000,00	(135.698.000,00)	2,88	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0040		PEMBANGUNAN JEMBATAN	1.302.633.224,47	846.721.000,00	(455.912.224,47)	65,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0040	5.2	BELANJA MODAL	1.302.633.224,47	846.721.000,00	(455.912.224,47)	65,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0040	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.302.633.224,47	846.721.000,00	(455.912.224,47)	65,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0043		SURVEY KONDISI JALAN/JEMBATAN	544.231.000,00	542.531.000,00	(1.700.000,00)	99,68	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0043	5.1	BELANJA OPERASI	544.231.000,00	542.531.000,00	(1.700.000,00)	99,68	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0043	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	544.231.000,00	542.531.000,00	(1.700.000,00)	99,68	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0044		REHABILITASI JALAN	199.999.649,80	186.623.000,00	(13.376.649,80)	93,31	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0044	5.2	BELANJA MODAL	199.999.649,80	186.623.000,00	(13.376.649,80)	93,31	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0044	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	199.999.649,80	186.623.000,00	(13.376.649,80)	93,31	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	31.680.000,00	25.680.000,00	(6.000.000,00)	81,06	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.2.04		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA	31.680.000,00	25.680.000,00	(6.000.000,00)	81,06	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.2.04.0004		KOORDINASI PELAKSANAAN PENATAAN RUANG	31.680.000,00	25.680.000,00	(6.000.000,00)	81,06	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.2.04.0004	5.1	BELANJA OPERASI	31.680.000,00	25.680.000,00	(6.000.000,00)	81,06	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.2.04.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.680.000,00	25.680.000,00	(6.000.000,00)	81,06	
				JUMLAH BELANJA	35.723.748.449,22	30.610.490.618,00	(5.113.257.831,22)	85,68	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(27.199.260.199,22)	(24.236.634.414,00)	2.962.625.785,22	89,10	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(27.199.260.199,22)	(24.236.634.414,00)	2.962.625.785,22	89,10	

MAMUJU TENGAH, 2026
BUPATI KAB. MAMUJU TENGAH

H. ARSAL ARAS

Lampiran I.3 : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah
Nomor : -
Tanggal : 2026

PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Organisasi : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000		5	BELANJA DAERAH	2.289.670.703,50	2.200.670.557,00	(89.000.146,50)	96,11	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.072.724.582,50	1.996.793.557,00	(75.931.025,50)	96,33	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	37.760.938,00	37.760.938,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	23.571.133,00	23.571.133,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	23.571.133,00	23.571.133,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.571.133,00	23.571.133,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	14.189.805,00	14.189.805,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	14.189.805,00	14.189.805,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.189.805,00	14.189.805,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.489.642.141,50	1.421.163.658,00	(68.478.483,50)	95,40	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.489.642.141,50	1.421.163.658,00	(68.478.483,50)	95,40	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.489.642.141,50	1.421.163.658,00	(68.478.483,50)	95,40	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.430.252.141,50	1.363.584.114,00	(66.668.027,50)	95,33	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.390.000,00	57.579.544,00	(1.810.456,00)	96,95	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.03		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	11.532.444,00	11.532.444,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.03.0006		PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	11.532.444,00	11.532.444,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.03.0006	5.1	BELANJA OPERASI	11.532.444,00	11.532.444,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.03.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.532.444,00	11.532.444,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	208.600.219,00	208.155.969,00	(444.250,00)	99,78	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	67.536.200,00	67.133.700,00	(402.500,00)	99,40	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	31.808.700,00	31.808.700,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.808.700,00	31.808.700,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	35.727.500,00	35.325.000,00	(402.500,00)	98,87	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.727.500,00	35.325.000,00	(402.500,00)	98,87	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	19.008.000,00	19.008.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	19.008.000,00	19.008.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.008.000,00	19.008.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	32.165.000,00	32.165.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	32.165.000,00	32.165.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.165.000,00	32.165.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	58.137.750,00	58.099.000,00	(38.750,00)	99,93	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	58.137.750,00	58.099.000,00	(38.750,00)	99,93	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.137.750,00	58.099.000,00	(38.750,00)	99,93	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.06.0010		PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD	31.753.269,00	31.750.269,00	(3.000,00)	99,99	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.06.0010	5.1	BELANJA OPERASI	31.753.269,00	31.750.269,00	(3.000,00)	99,99	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.06.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.753.269,00	31.750.269,00	(3.000,00)	99,99	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	209.184.000,00	209.184.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.07.0002		PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	89.184.000,00	89.184.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.07.0002	5.1	BELANJA OPERASI	89.184.000,00	89.184.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.07.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.184.000,00	89.184.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.07.0009		PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.07.0009	5.1	BELANJA OPERASI	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.07.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	116.004.840,00	108.996.548,00	(7.008.292,00)	93,95	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	38.004.840,00	35.296.548,00	(2.708.292,00)	92,87	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	38.004.840,00	35.296.548,00	(2.708.292,00)	92,87	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.004.840,00	35.296.548,00	(2.708.292,00)	92,87	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	78.000.000,00	73.700.000,00	(4.300.000,00)	94,48	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	78.000.000,00	73.700.000,00	(4.300.000,00)	94,48	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.000.000,00	73.700.000,00	(4.300.000,00)	94,48	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.02		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	98.430.586,00	89.928.100,00	(8.502.486,00)	91,36	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.02.2.03		PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA	98.430.586,00	89.928.100,00	(8.502.486,00)	91,36	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.02.2.03.0001		REHABILITASI RUMAH BAGI KORBAN BENCANA	98.430.586,00	89.928.100,00	(8.502.486,00)	91,36	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.02.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	98.430.586,00	89.928.100,00	(8.502.486,00)	91,36	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.02.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.430.586,00	89.928.100,00	(8.502.486,00)	91,36	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.03		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	118.515.535,00	113.948.900,00	(4.566.635,00)	96,14	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.03.2.03		PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA	118.515.535,00	113.948.900,00	(4.566.635,00)	96,14	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.03.2.03.0002		PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI	118.515.535,00	113.948.900,00	(4.566.635,00)	96,14	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.03.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	118.515.535,00	113.948.900,00	(4.566.635,00)	96,14	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.03.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	118.515.535,00	113.948.900,00	(4.566.635,00)	96,14	
				JUMLAH BELANJA	2.289.670.703,50	2.200.670.557,00	(89.000.146,50)	96,11	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(2.289.670.703,50)	(2.200.670.557,00)	89.000.146,50	96,11	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(2.289.670.703,50)	(2.200.670.557,00)	89.000.146,50	96,11	

MAMUJU TENGAH, 2026
BUPATI KAB. MAMUJU TENGAH

H. ARSAL ARAS

Lampiran I.3 : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah
Nomor : -
Tanggal : 2026

PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
Organisasi : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.10	1.04.2.10.0.00.02.0000		5	BELANJA DAERAH	9.076.634.801,00	6.545.769.870,00	(2.530.864.931,00)	72,11	
2.10	1.04.2.10.0.00.02.0000	2.10.05		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	9.076.634.801,00	6.545.769.870,00	(2.530.864.931,00)	72,11	
2.10	1.04.2.10.0.00.02.0000	2.10.05.2.01		PENYELESAIAN MASALAH GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.076.634.801,00	6.545.769.870,00	(2.530.864.931,00)	72,11	
2.10	1.04.2.10.0.00.02.0000	2.10.05.2.01.0002		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENYELESAIAN MASALAH GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.076.634.801,00	6.545.769.870,00	(2.530.864.931,00)	72,11	
2.10	1.04.2.10.0.00.02.0000	2.10.05.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.308.665.000,00	704.763.400,00	(603.901.600,00)	53,85	
2.10	1.04.2.10.0.00.02.0000	2.10.05.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.308.665.000,00	704.763.400,00	(603.901.600,00)	53,85	
2.10	1.04.2.10.0.00.02.0000	2.10.05.2.01.0002	5.2	BELANJA MODAL	7.767.969.801,00	5.841.006.470,00	(1.926.963.331,00)	75,19	
2.10	1.04.2.10.0.00.02.0000	2.10.05.2.01.0002	5.2.01	Belanja Modal Tanah	7.767.969.801,00	5.841.006.470,00	(1.926.963.331,00)	75,19	
				JUMLAH BELANJA	9.076.634.801,00	6.545.769.870,00	(2.530.864.931,00)	72,11	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(9.076.634.801,00)	(6.545.769.870,00)	2.530.864.931,00	72,11	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(9.076.634.801,00)	(6.545.769.870,00)	2.530.864.931,00	72,11	

MAMUJU TENGAH, 2026
BUPATI KAB. MAMUJU TENGAH

H. ARSAL ARAS

Lampiran I.3 : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah
Nomor : -
Tanggal : 2026

PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000		5	BELANJA DAERAH	7.463.070.344,10	6.893.594.519,00	(569.475.825,10)	92,36	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.241.807.867,10	3.015.214.219,00	(226.593.648,10)	93,01	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	5.330.208,00	5.330.100,00	(108,00)	99,99	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	2.837.763,00	2.837.700,00	(63,00)	99,99	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.837.763,00	2.837.700,00	(63,00)	99,99	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.837.763,00	2.837.700,00	(63,00)	99,99	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	2.492.445,00	2.492.400,00	(45,00)	99,99	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.492.445,00	2.492.400,00	(45,00)	99,99	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.492.445,00	2.492.400,00	(45,00)	99,99	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.709.303.659,10	2.542.725.519,00	(166.578.140,10)	93,85	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	2.703.136.445,10	2.536.558.419,00	(166.578.026,10)	93,83	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.703.136.445,10	2.536.558.419,00	(166.578.026,10)	93,83	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.649.136.445,10	2.485.335.069,00	(163.801.376,10)	93,81	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.000.000,00	51.223.350,00	(2.776.650,00)	94,85	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	2.555.777,00	2.555.700,00	(77,00)	99,99	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	2.555.777,00	2.555.700,00	(77,00)	99,99	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.555.777,00	2.555.700,00	(77,00)	99,99	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	3.611.437,00	3.611.400,00	(37,00)	99,99	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	3.611.437,00	3.611.400,00	(37,00)	99,99	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.611.437,00	3.611.400,00	(37,00)	99,99	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	146.000.000,00	146.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.07.0001		PENGADAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.07.0001	5.1	BELANJA OPERASI	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.07.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.07.0009		PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.07.0009	5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.07.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	339.367.000,00	279.359.000,00	(60.008.000,00)	82,31	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	82.982.000,00	82.979.000,00	(3.000,00)	99,99	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	82.982.000,00	82.979.000,00	(3.000,00)	99,99	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.982.000,00	82.979.000,00	(3.000,00)	99,99	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	256.385.000,00	196.380.000,00	(60.005.000,00)	76,59	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	256.385.000,00	196.380.000,00	(60.005.000,00)	76,59	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	256.385.000,00	196.380.000,00	(60.005.000,00)	76,59	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	32.807.000,00	32.799.600,00	(7.400,00)	99,97	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	32.807.000,00	32.799.600,00	(7.400,00)	99,97	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	32.807.000,00	32.799.600,00	(7.400,00)	99,97	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.807.000,00	32.799.600,00	(7.400,00)	99,97	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.02		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.765.062.477,00	2.600.460.300,00	(164.602.177,00)	94,04	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.02.2.01		PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.710.050.565,00	2.545.622.300,00	(164.428.265,00)	93,93	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.02.2.01.0003		KOORDINASI PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT TINGKAT KABUPATEN/KOTA	3.700.000,00	3.681.800,00	(18.200,00)	99,50	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	3.700.000,00	3.681.800,00	(18.200,00)	99,50	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.700.000,00	3.681.800,00	(18.200,00)	99,50	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.02.2.01.0015		PENCEGAHAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM MELALUI DETEKSI DINI DAN CEGAH DINI, PEMBINAAN DAN PENYULUHAN, PELAKSANAAN PATROLI, PENGAMANAN, DAN PENGAWALAN	2.625.930.210,00	2.461.528.000,00	(164.402.210,00)	93,73	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.02.2.01.0015	5.1	BELANJA OPERASI	2.625.930.210,00	2.461.528.000,00	(164.402.210,00)	93,73	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.02.2.01.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.625.930.210,00	2.461.528.000,00	(164.402.210,00)	93,73	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.02.2.01.0016		PENINDAKAN ATAS GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM BERDASARKAN PERDA DAN PERKADA MELALUI PENERTIBAN DAN PENANGANAN UNJUK RASA DAN KERUSUHAN MASSA	80.420.355,00	80.412.500,00	(7.855,00)	99,99	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.02.2.01.0016	5.1	BELANJA OPERASI	80.420.355,00	80.412.500,00	(7.855,00)	99,99	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.02.2.01.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.420.355,00	80.412.500,00	(7.855,00)	99,99	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.02.2.02		PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN PERATURAN BUPATI/WALI KOTA	55.011.912,00	54.838.000,00	(173.912,00)	99,68	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.02.2.02.0010		SOSIALISASI PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH	35.436.912,00	35.263.000,00	(173.912,00)	99,50	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.02.2.02.0010	5.1	BELANJA OPERASI	35.436.912,00	35.263.000,00	(173.912,00)	99,50	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.02.2.02.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.436.912,00	35.263.000,00	(173.912,00)	99,50	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.02.2.02.0011		PENANGANAN ATAS PELANGGARAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH	19.575.000,00	19.575.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.02.2.02.0011	5.1	BELANJA OPERASI	19.575.000,00	19.575.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.02.2.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.575.000,00	19.575.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.04		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.456.200.000,00	1.277.920.000,00	(178.280.000,00)	87,75	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.04.2.01		PENCEGAHAN, PENGENDALIAN, PEMADAMAN, PENYELAMATAN, DAN PENANGANAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.456.200.000,00	1.277.920.000,00	(178.280.000,00)	87,75	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.04.2.01.0002		PEMADAMAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.456.200.000,00	1.277.920.000,00	(178.280.000,00)	87,75	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.04.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.456.200.000,00	1.277.920.000,00	(178.280.000,00)	87,75	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.04.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.456.200.000,00	1.277.920.000,00	(178.280.000,00)	87,75	
				JUMLAH BELANJA	7.463.070.344,10	6.893.594.519,00	(569.475.825,10)	92,36	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(7.463.070.344,10)	(6.893.594.519,00)	569.475.825,10	92,36	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(7.463.070.344,10)	(6.893.594.519,00)	569.475.825,10	92,36	

MAMUJU TENGAH, 2026

BUPATI KAB. MAMUJU TENGAH

H. ARSAL ARAS

Lampiran I.3 : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah
Nomor : -
Tanggal : 2026

PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000		5	BELANJA DAERAH	4.468.316.841,00	3.747.297.892,00	(721.018.949,00)	83,86	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.786.116.352,00	1.724.883.672,00	(61.232.680,00)	96,57	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	22.069.550,00	22.067.000,00	(2.550,00)	99,98	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	19.352.664,00	19.352.000,00	(664,00)	99,99	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	19.352.664,00	19.352.000,00	(664,00)	99,99	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.352.664,00	19.352.000,00	(664,00)	99,99	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	404.041,00	403.500,00	(541,00)	99,86	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	404.041,00	403.500,00	(541,00)	99,86	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	404.041,00	403.500,00	(541,00)	99,86	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.01.0003		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	366.268,00	366.000,00	(268,00)	99,92	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	366.268,00	366.000,00	(268,00)	99,92	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	366.268,00	366.000,00	(268,00)	99,92	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.01.0004		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	404.041,00	403.500,00	(541,00)	99,86	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	404.041,00	403.500,00	(541,00)	99,86	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	404.041,00	403.500,00	(541,00)	99,86	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.01.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	366.268,00	366.000,00	(268,00)	99,92	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	366.268,00	366.000,00	(268,00)	99,92	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	366.268,00	366.000,00	(268,00)	99,92	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	1.176.268,00	1.176.000,00	(268,00)	99,97	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	1.176.268,00	1.176.000,00	(268,00)	99,97	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.176.268,00	1.176.000,00	(268,00)	99,97	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.408.660.020,00	1.348.643.256,00	(60.016.764,00)	95,73	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.371.346.697,00	1.311.339.756,00	(60.006.941,00)	95,62	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.371.346.697,00	1.311.339.756,00	(60.006.941,00)	95,62	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.327.646.697,00	1.270.988.566,00	(56.658.131,00)	95,73	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.700.000,00	40.351.190,00	(3.348.810,00)	92,33	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	996.268,00	996.000,00	(268,00)	99,97	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	996.268,00	996.000,00	(268,00)	99,97	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	996.268,00	996.000,00	(268,00)	99,97	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	36.317.055,00	36.307.500,00	(9.555,00)	99,97	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	36.317.055,00	36.307.500,00	(9.555,00)	99,97	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.317.055,00	36.307.500,00	(9.555,00)	99,97	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.03		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	15.386.268,00	15.386.000,00	(268,00)	99,99	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.03.0004		PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	15.386.268,00	15.386.000,00	(268,00)	99,99	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	15.386.268,00	15.386.000,00	(268,00)	99,99	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.386.268,00	15.386.000,00	(268,00)	99,99	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	7.110.000,00	7.100.000,00	(10.000,00)	99,85	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.05.0011		BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	7.110.000,00	7.100.000,00	(10.000,00)	99,85	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.05.0011	5.1	BELANJA OPERASI	7.110.000,00	7.100.000,00	(10.000,00)	99,85	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.05.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.110.000,00	7.100.000,00	(10.000,00)	99,85	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	44.157.205,00	44.121.105,00	(36.100,00)	99,91	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	1.795.000,00	1.795.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.795.000,00	1.795.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.795.000,00	1.795.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	3.945.505,00	3.945.505,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	3.935.505,00	3.935.505,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.935.505,00	3.935.505,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	2.208.000,00	2.208.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	2.208.000,00	2.208.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.208.000,00	2.208.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	560.000,00	560.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	560.000,00	560.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	560.000,00	560.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	9.370.000,00	9.370.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	9.370.000,00	9.370.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.370.000,00	9.370.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	26.278.700,00	26.242.600,00	(36.100,00)	99,86	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	26.278.700,00	26.242.600,00	(36.100,00)	99,86	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.278.700,00	26.242.600,00	(36.100,00)	99,86	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	109.324.431,00	109.324.431,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.07.0009		PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	109.324.431,00	109.324.431,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.07.0009	5.1	BELANJA OPERASI	109.324.431,00	109.324.431,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.07.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	109.324.431,00	109.324.431,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	54.653.000,00	54.101.250,00	(551.750,00)	98,99	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	27.053.000,00	26.501.250,00	(551.750,00)	97,96	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	27.053.000,00	26.501.250,00	(551.750,00)	97,96	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.053.000,00	26.501.250,00	(551.750,00)	97,96	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	124.755.878,00	124.140.630,00	(615.248,00)	99,50	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	24.966.440,00	24.438.230,00	(528.210,00)	97,88	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	24.966.440,00	24.438.230,00	(528.210,00)	97,88	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.966.440,00	24.438.230,00	(528.210,00)	97,88	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	98.389.438,00	98.302.400,00	(87.038,00)	99,91	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	98.389.438,00	98.302.400,00	(87.038,00)	99,91	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.389.438,00	98.302.400,00	(87.038,00)	99,91	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	2.682.200.489,00	2.022.414.220,00	(659.786.269,00)	75,40	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.01		PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA	298.721.857,00	298.716.000,00	(5.857,00)	99,99	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.01.0007		SOSIALISASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA (PER JENIS ANCAMAN BENCANA)	23.096.857,00	23.091.000,00	(5.857,00)	99,97	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	23.096.857,00	23.091.000,00	(5.857,00)	99,97	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.096.857,00	23.091.000,00	(5.857,00)	99,97	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.01.0008		PENYUSUNAN KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN/KOTA	275.625.000,00	275.625.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	275.625.000,00	275.625.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	275.625.000,00	275.625.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.02		PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA	126.088.536,00	124.082.050,00	(2.006.486,00)	98,40	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.02.0013		PENGELOLAAN RISIKO BENCANA KABUPATEN/KOTA	15.103.000,00	15.097.050,00	(5.950,00)	99,96	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.02.0013	5.1	BELANJA OPERASI	15.103.000,00	15.097.050,00	(5.950,00)	99,96	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.02.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.103.000,00	15.097.050,00	(5.950,00)	99,96	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.02.0015		PENYEDIAAN PERALATAN PERLINDUNGAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA KABUPATEN/KOTA	4.486.268,00	4.486.000,00	(268,00)	99,99	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.02.0015	5.1	BELANJA OPERASI	4.486.268,00	4.486.000,00	(268,00)	99,99	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.02.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.486.268,00	4.486.000,00	(268,00)	99,99	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.02.0018		GLADI KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA KABUPATEN/KOTA	8.170.000,00	8.170.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.02.0018	5.1	BELANJA OPERASI	8.170.000,00	8.170.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.02.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.170.000,00	8.170.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.02.0022		PENYUSUNAN RENCANA KONTIJENSI KABUPATEN/KOTA	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.02.0022	5.1	BELANJA OPERASI	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.02.0022	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.02.0026		PENGENDALIAN OPERASI DAN PENYEDIAAN SARANA PRASARANA KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA KABUPATEN/KOTA	43.329.268,00	41.329.000,00	(2.000.268,00)	95,38	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.02.0026	5.1	BELANJA OPERASI	22.871.268,00	20.871.000,00	(2.000.268,00)	91,25	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.02.0026	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.871.268,00	20.871.000,00	(2.000.268,00)	91,25	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.02.0026	5.2	BELANJA MODAL	20.458.000,00	20.458.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.02.0026	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.458.000,00	20.458.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.03		PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA	822.951.890,00	792.717.300,00	(30.234.590,00)	96,32	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.03.0002		RESPON CEPAT DARURAT BENCANA KABUPATEN/KOTA	765.636.272,00	735.634.500,00	(30.001.772,00)	96,08	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	765.636.272,00	735.634.500,00	(30.001.772,00)	96,08	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	765.636.272,00	735.634.500,00	(30.001.772,00)	96,08	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.03.0003		PENCARIAN, PERTOLONGAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA KABUPATEN/KOTA	29.280.000,00	29.068.000,00	(212.000,00)	99,27	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	29.280.000,00	29.068.000,00	(212.000,00)	99,27	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.280.000,00	29.068.000,00	(212.000,00)	99,27	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.03.0009		PENYEDIAAN LOGISTIK PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA KABUPATEN/KOTA	28.035.618,00	28.014.800,00	(20.818,00)	99,92	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.03.0009	5.1	BELANJA OPERASI	28.035.618,00	28.014.800,00	(20.818,00)	99,92	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.03.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.035.618,00	28.014.800,00	(20.818,00)	99,92	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.04		PENATAAN SISTEM DASAR PENANGGULANGAN BENCANA	1.434.438.206,00	806.898.870,00	(627.539.336,00)	56,25	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.04.0008		BIMBINGAN TEKNIS PASCA BENCANA KABUPATEN/KOTA	25.231.855,00	24.801.000,00	(430.855,00)	98,29	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.04.0008	5.1	BELANJA OPERASI	25.231.855,00	24.801.000,00	(430.855,00)	98,29	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.04.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.231.855,00	24.801.000,00	(430.855,00)	98,29	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.04.0015		PENYUSUNAN KAJIAN KEBUTUHAN PASCABENCANA (JITUPASNA) DAN RENCANA REHABILITASI DAN REKONTRUKSI PASCABENCANA (R3P) KAB/KOTA	1.409.206.351,00	782.097.870,00	(627.108.481,00)	55,49	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.04.0015	5.1	BELANJA OPERASI	63.946.351,00	60.428.500,00	(3.517.851,00)	94,49	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.04.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.946.351,00	60.428.500,00	(3.517.851,00)	94,49	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.04.0015	5.2	BELANJA MODAL	1.345.260.000,00	721.669.370,00	(623.590.630,00)	53,64	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.04.0015	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.345.260.000,00	721.669.370,00	(623.590.630,00)	53,64	
				JUMLAH BELANJA	4.468.316.841,00	3.747.297.892,00	(721.018.949,00)	83,86	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(4.468.316.841,00)	(3.747.297.892,00)	721.018.949,00	83,86	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(4.468.316.841,00)	(3.747.297.892,00)	721.018.949,00	83,86	

MAMUJU TENGAH, 2026
BUPATI KAB. MAMUJU TENGAH

H. ARSAL ARAS

Lampiran I.3 : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah
Nomor : -
Tanggal : 2026

PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Organisasi : DINAS SOSIAL

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	2.378.346.925,06	2.309.338.290,00	(69.008.635,06)	97,09	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.562.039.164,06	1.513.436.938,00	(48.602.226,06)	96,88	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	49.169.372,00	49.149.364,00	(20.008,00)	99,95	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	37.700.872,00	37.680.864,00	(20.008,00)	99,94	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	37.700.872,00	37.680.864,00	(20.008,00)	99,94	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.700.872,00	37.680.864,00	(20.008,00)	99,94	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	11.468.500,00	11.468.500,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	11.468.500,00	11.468.500,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.468.500,00	11.468.500,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	995.173.529,06	956.170.396,00	(39.003.133,06)	96,08	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	984.673.529,06	945.670.396,00	(39.003.133,06)	96,03	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	984.673.529,06	945.670.396,00	(39.003.133,06)	96,03	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	968.173.529,06	929.769.396,00	(38.404.133,06)	96,03	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.500.000,00	15.901.000,00	(599.000,00)	96,36	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.05.0011		BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.05.0011	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.05.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	199.577.228,00	199.482.228,00	(95.000,00)	99,95	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	151.150.378,00	151.150.378,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	132.150.378,00	132.150.378,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	132.150.378,00	132.150.378,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	48.426.850,00	48.331.850,00	(95.000,00)	99,80	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	48.426.850,00	48.331.850,00	(95.000,00)	99,80	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.426.850,00	48.331.850,00	(95.000,00)	99,80	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	142.545.685,00	133.739.000,00	(8.806.685,00)	93,82	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	38.745.685,00	29.939.000,00	(8.806.685,00)	77,27	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	38.745.685,00	29.939.000,00	(8.806.685,00)	77,27	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.745.685,00	29.939.000,00	(8.806.685,00)	77,27	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	97.800.000,00	97.800.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	97.800.000,00	97.800.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.800.000,00	97.800.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	170.573.350,00	169.895.950,00	(677.400,00)	99,60	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	47.966.900,00	47.289.500,00	(677.400,00)	98,58	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	47.966.900,00	47.289.500,00	(677.400,00)	98,58	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.966.900,00	47.289.500,00	(677.400,00)	98,58	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	122.606.450,00	122.606.450,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	122.606.450,00	122.606.450,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	122.606.450,00	122.606.450,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.02		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	49.627.033,00	43.627.033,00	(6.000.000,00)	87,90	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.02.2.03		PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL DAERAH KABUPATEN/KOTA	49.627.033,00	43.627.033,00	(6.000.000,00)	87,90	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.02.2.03.0002		PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	49.627.033,00	43.627.033,00	(6.000.000,00)	87,90	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.02.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	49.627.033,00	43.627.033,00	(6.000.000,00)	87,90	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.627.033,00	43.627.033,00	(6.000.000,00)	87,90	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	102.794.071,00	98.147.262,00	(4.646.809,00)	95,47	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01		REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI SOSIAL	84.276.632,00	79.699.323,00	(4.577.309,00)	94,56	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0009		PEMBERIAN LAYANAN DATA DAN PENGADUAN	84.276.632,00	79.699.323,00	(4.577.309,00)	94,56	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	84.276.632,00	79.699.323,00	(4.577.309,00)	94,56	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.276.632,00	79.699.323,00	(4.577.309,00)	94,56	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.02		REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA BUKAN KORBAN HIV/AIDS DAN NAPZA DI LUAR PANTI SOSIAL	18.517.439,00	18.447.939,00	(69.500,00)	99,62	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.02.0002		PEMBERIAN LAYANAN KEDARURATAN	18.517.439,00	18.447.939,00	(69.500,00)	99,62	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	18.517.439,00	18.447.939,00	(69.500,00)	99,62	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.517.439,00	18.447.939,00	(69.500,00)	99,62	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.05		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	110.446.137,00	106.386.537,00	(4.059.600,00)	96,32	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.05.2.02		PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	110.446.137,00	106.386.537,00	(4.059.600,00)	96,32	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.05.2.02.0001		PENDATAAN FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	84.268.040,00	80.268.040,00	(4.000.000,00)	95,25	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.05.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	84.268.040,00	80.268.040,00	(4.000.000,00)	95,25	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.05.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.268.040,00	58.268.040,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.05.2.02.0001	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	26.000.000,00	22.000.000,00	(4.000.000,00)	84,61	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.05.2.02.0003		FASILITASI BANTUAN SOSIAL KESEJAHTERAAN KELUARGA	26.178.097,00	26.118.497,00	(59.600,00)	99,77	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.05.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	26.178.097,00	26.118.497,00	(59.600,00)	99,77	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.05.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.178.097,00	26.118.497,00	(59.600,00)	99,77	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	511.650.000,00	505.950.000,00	(5.700.000,00)	98,88	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.2.01		PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL KABUPATEN/KOTA	46.150.000,00	40.450.000,00	(5.700.000,00)	87,64	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.2.01.0001		PENYEDIAAN MAKANAN	17.700.000,00	17.700.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	17.700.000,00	17.700.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.700.000,00	17.700.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.2.01.0005		PELAYANAN DUKUNGAN PSIKOSOSIAL	28.450.000,00	22.750.000,00	(5.700.000,00)	79,96	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	28.450.000,00	22.750.000,00	(5.700.000,00)	79,96	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.450.000,00	22.750.000,00	(5.700.000,00)	79,96	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.2.02		PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP KESIAPSIAGAAN BENCANA KABUPATEN/KOTA	465.500.000,00	465.500.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.2.02.0002		KOORDINASI, SOSIALISASI DAN PELAKSANAAN TARUNA SIAGA BENCANA	465.500.000,00	465.500.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	465.500.000,00	465.500.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	465.500.000,00	465.500.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.07		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	41.790.520,00	41.790.520,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.07.2.01		PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL KABUPATEN/KOTA	41.790.520,00	41.790.520,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.07.2.01.0002		PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL KABUPATEN/KOTA	41.790.520,00	41.790.520,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.07.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	41.790.520,00	41.790.520,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.07.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.790.520,00	41.790.520,00	0,00	100,00	
				JUMLAH BELANJA	2.378.346.925,06	2.309.338.290,00	(69.008.635,06)	97,09	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(2.378.346.925,06)	(2.309.338.290,00)	69.008.635,06	97,09	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(2.378.346.925,06)	(2.309.338.290,00)	69.008.635,06	97,09	

MAMUJU TENGAH, 2026
BUPATI KAB. MAMUJU TENGAH

H. ARSAL ARAS

Lampiran I.3 : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah
Nomor : -
Tanggal : 2026

PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Organisasi : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	1.665.839.039,00	1.665.793.039,00	(46.000,00)	99,99	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.02		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	16.255.944,00	16.255.944,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.02.2.01		PENYUSUNAN RENCANA TENAGA KERJA (RTK)	16.255.944,00	16.255.944,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.02.2.01.0003		FASILITASI PENYUSUNAN RENCANA TENAGA KERJA MIKRO	16.255.944,00	16.255.944,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	16.255.944,00	16.255.944,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.255.944,00	16.255.944,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.04		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	31.020.000,00	31.020.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.04.2.01		PELAYANAN ANTAR KERJA DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	31.020.000,00	31.020.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.04.2.01.0002		PELAYANAN ANTAR KERJA	31.020.000,00	31.020.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.04.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	31.020.000,00	31.020.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.04.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.020.000,00	31.020.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.05		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	1.618.563.095,00	1.618.517.095,00	(46.000,00)	99,99	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.05.2.02		PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.618.563.095,00	1.618.517.095,00	(46.000,00)	99,99	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.05.2.02.0001		PENCEGAHAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA, DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN YANG BERAKIBAT/BERDAMPAK PADA KEPENTINGAN DI 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.880.695,00	2.834.695,00	(46.000,00)	98,40	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.05.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.880.695,00	2.834.695,00	(46.000,00)	98,40	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.05.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.880.695,00	2.834.695,00	(46.000,00)	98,40	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.05.2.02.0005		PENGEMBANGAN PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA DAN FASILITAS KESEJAHTERAAN PEKERJA	1.615.682.400,00	1.615.682.400,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.05.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.615.682.400,00	1.615.682.400,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.05.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.615.682.400,00	1.615.682.400,00	0,00	100,00	
				JUMLAH BELANJA	1.665.839.039,00	1.665.793.039,00	(46.000,00)	99,99	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(1.665.839.039,00)	(1.665.793.039,00)	46.000,00	99,99	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(1.665.839.039,00)	(1.665.793.039,00)	46.000,00	99,99	

MAMUJU TENGAH, 2026
BUPATI KAB. MAMUJU TENGAH

H. ARSAL ARAS

Lampiran I.3 : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah
Nomor : -
Tanggal : 2026

PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI
Organisasi : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	1.905.358.955,10	1.830.674.913,00	(74.684.042,10)	96,08	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.669.070.376,10	1.599.603.045,00	(69.467.331,10)	95,83	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	33.304.168,00	33.302.068,00	(2.100,00)	99,99	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	28.417.067,00	28.417.067,00	0,00	100,00	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	28.417.067,00	28.417.067,00	0,00	100,00	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.417.067,00	28.417.067,00	0,00	100,00	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	952.725,00	952.725,00	0,00	100,00	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	952.725,00	952.725,00	0,00	100,00	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	952.725,00	952.725,00	0,00	100,00	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.01.0003		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	1.741.653,00	1.741.653,00	0,00	100,00	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.741.653,00	1.741.653,00	0,00	100,00	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.741.653,00	1.741.653,00	0,00	100,00	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.01.0004		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	958.777,00	958.777,00	0,00	100,00	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	958.777,00	958.777,00	0,00	100,00	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	958.777,00	958.777,00	0,00	100,00	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.01.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	1.233.946,00	1.231.846,00	(2.100,00)	99,82	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.233.946,00	1.231.846,00	(2.100,00)	99,82	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.233.946,00	1.231.846,00	(2.100,00)	99,82	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.308.476.044,10	1.247.327.166,00	(61.148.878,10)	95,32	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.275.110.773,10	1.216.461.895,00	(58.648.878,10)	95,40	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.275.110.773,10	1.216.461.895,00	(58.648.878,10)	95,40	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.228.360.773,10	1.173.051.715,00	(55.309.058,10)	95,49	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.750.000,00	43.410.180,00	(3.339.820,00)	92,85	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	1.110.146,00	1.110.146,00	0,00	100,00	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.110.146,00	1.110.146,00	0,00	100,00	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.110.146,00	1.110.146,00	0,00	100,00	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	32.255.125,00	29.755.125,00	(2.500.000,00)	92,24	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	32.255.125,00	29.755.125,00	(2.500.000,00)	92,24	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.255.125,00	29.755.125,00	(2.500.000,00)	92,24	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	9.220.000,00	9.220.000,00	0,00	100,00	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.05.0011		BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	9.220.000,00	9.220.000,00	0,00	100,00	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.05.0011	5.1	BELANJA OPERASI	9.220.000,00	9.220.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.05.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.220.000,00	9.220.000,00	0,00	100,00	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	39.277.750,00	39.277.500,00	(250,00)	99,99	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	29.277.750,00	29.277.500,00	(250,00)	99,99	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	29.277.750,00	29.277.500,00	(250,00)	99,99	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.277.750,00	29.277.500,00	(250,00)	99,99	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	95.997.240,00	95.997.240,00	0,00	100,00	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.07.0002		PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	95.997.240,00	95.997.240,00	0,00	100,00	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.07.0002	5.1	BELANJA OPERASI	95.997.240,00	95.997.240,00	0,00	100,00	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.07.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.997.240,00	95.997.240,00	0,00	100,00	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	43.052.824,00	37.853.074,00	(5.199.750,00)	87,92	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	27.452.824,00	22.253.074,00	(5.199.750,00)	81,05	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	27.452.824,00	22.253.074,00	(5.199.750,00)	81,05	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.452.824,00	22.253.074,00	(5.199.750,00)	81,05	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	100,00	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	100,00	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	100,00	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	139.742.350,00	136.625.997,00	(3.116.353,00)	97,76	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	35.922.200,00	33.044.100,00	(2.878.100,00)	91,98	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	35.922.200,00	33.044.100,00	(2.878.100,00)	91,98	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.922.200,00	33.044.100,00	(2.878.100,00)	91,98	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	99.620.150,00	99.381.897,00	(238.253,00)	99,76	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	99.620.150,00	99.381.897,00	(238.253,00)	99,76	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.620.150,00	99.381.897,00	(238.253,00)	99,76	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.02		PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	67.953.118,00	66.314.118,00	(1.639.000,00)	97,58	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.02.2.01		PENCADANGAN TANAH UNTUK KAWASAN TRANSMIGRASI	67.953.118,00	66.314.118,00	(1.639.000,00)	97,58	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.02.2.01.0001		IDENTIFIKASI POTENSI KAWASAN TRANSMIGRASI	47.952.852,00	46.313.852,00	(1.639.000,00)	96,58	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	47.952.852,00	46.313.852,00	(1.639.000,00)	96,58	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.952.852,00	46.313.852,00	(1.639.000,00)	96,58	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.02.2.01.0003		PENYEDIAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	20.000.266,00	20.000.266,00	0,00	100,00	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	20.000.266,00	20.000.266,00	0,00	100,00	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.266,00	20.000.266,00	0,00	100,00	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.04		PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	168.335.461,00	164.757.750,00	(3.577.711,00)	97,87	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.04.2.01		PENGEMBANGAN SATUAN PERMUKIMAN PADA TAHAP KEMANDIRIAN	168.335.461,00	164.757.750,00	(3.577.711,00)	97,87	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.04.2.01.0002		PENGUATAN INFRASTRUKTUR SOSIAL, EKONOMI DAN KELEMBAGAAN DALAM RANGKA KEMANDIRIAN SATUAN PEMUKIMAN	168.335.461,00	164.757.750,00	(3.577.711,00)	97,87	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.04.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	68.940.361,00	65.745.750,00	(3.194.611,00)	95,36	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.04.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.940.361,00	65.745.750,00	(3.194.611,00)	95,36	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.04.2.01.0002	5.2	BELANJA MODAL	99.395.100,00	99.012.000,00	(383.100,00)	99,61	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.04.2.01.0002	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	99.395.100,00	99.012.000,00	(383.100,00)	99,61	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	JUMLAH BELANJA	1.905.358.955,10	1.830.674.913,00	(74.684.042,10)	96,08	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.905.358.955,10)	(1.830.674.913,00)	74.684.042,10	96,08	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(1.905.358.955,10)	(1.830.674.913,00)	74.684.042,10	96,08	

MAMUJU TENGAH, 2026
BUPATI KAB. MAMUJU TENGAH

H. ARSAL ARAS

Lampiran I.3 : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah
Nomor : -
Tanggal : 2026

PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Organisasi : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000		5	BELANJA DAERAH	2.875.609.189,00	2.834.352.500,00	(41.256.689,00)	98,56	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.02		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	213.243.082,00	213.072.000,00	(171.082,00)	99,91	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.02.2.01		PEMADUAN DAN SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DENGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK	56.043.082,00	55.997.000,00	(46.082,00)	99,91	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.02.2.01.0021		KERJASAMA PELAKSANAAN PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN JALUR PENDIDIKAN FORMAL	56.043.082,00	55.997.000,00	(46.082,00)	99,91	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.02.2.01.0021	5.1	BELANJA OPERASI	56.043.082,00	55.997.000,00	(46.082,00)	99,91	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.02.2.01.0021	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.043.082,00	55.997.000,00	(46.082,00)	99,91	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.02.2.02		PEMETAAN PERKIRAAN PENGENDALIAN PENDUDUK CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	157.200.000,00	157.075.000,00	(125.000,00)	99,92	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.02.2.02.0012		PENCATATAN DAN PENGUMPULAN DATA KELUARGA	97.200.000,00	97.200.000,00	0,00	100,00	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.02.2.02.0012	5.1	BELANJA OPERASI	97.200.000,00	97.200.000,00	0,00	100,00	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.02.2.02.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.200.000,00	97.200.000,00	0,00	100,00	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.02.2.02.0013		PENGOLAHAN DAN PELAPORAN DATA PENGENDALIAN LAPANGAN DAN PELAYANAN KB	60.000.000,00	59.875.000,00	(125.000,00)	99,79	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.02.2.02.0013	5.1	BELANJA OPERASI	60.000.000,00	59.875.000,00	(125.000,00)	99,79	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.02.2.02.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	59.875.000,00	(125.000,00)	99,79	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.071.368.661,00	2.030.320.500,00	(41.048.161,00)	98,01	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.01		PELAKSANAAN ADVOKASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB SESUAI KEARIFAN BUDAYA LOKAL	749.952.669,00	745.872.500,00	(4.080.169,00)	99,45	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.01.0008		PENGENDALIAN PROGRAM KKBPK	218.490.397,00	218.282.500,00	(207.897,00)	99,90	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	218.490.397,00	218.282.500,00	(207.897,00)	99,90	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	218.490.397,00	218.282.500,00	(207.897,00)	99,90	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.01.0010		PENGELOLAAN OPERASIONAL DAN SARANA DI BALAI PENYULUHAN BANGGA KENCANA	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	100,00	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	100,00	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	100,00	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.01.0011		PELAKSANAAN MEKANISME OPERASIONAL PROGRAM BANGGA KENCANA MELALUI RAPAT KOORDINASI KECAMATAN (RAKORCAM), RAPAT KOORDINASI DESA (RAKORDES), DAN MINI LOKAKARYA (MINILOK)	77.500.000,00	77.500.000,00	0,00	100,00	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.01.0011	5.1	BELANJA OPERASI	77.500.000,00	77.500.000,00	0,00	100,00	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.500.000,00	77.500.000,00	0,00	100,00	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.01.0012		PROMOSI DAN KIE PROGRAM BANGGA KENCANA MELALUI MEDIA MASSA CETAK DAN ELEKTRONIK SERTA MEDIA LUAR RUANG	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	100,00	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.01.0012	5.1	BELANJA OPERASI	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	100,00	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.01.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	100,00	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.01.0014		ADVOKASI PROGRAM BANGGA KENCANA OLEH POKJA ADVOKASI KEPADA STAKEHOLDERS DAN MITRA KERJA	243.962.272,00	240.090.000,00	(3.872.272,00)	98,41	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.01.0014	5.1	BELANJA OPERASI	243.962.272,00	240.090.000,00	(3.872.272,00)	98,41	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.01.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	243.962.272,00	240.090.000,00	(3.872.272,00)	98,41	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.02		PENDAYAGUNAAN TENAGA PENYULUH KB/PETUGAS LAPANGAN KB (PKB/PLKB)	420.000.000,00	420.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.02.0004		PENGGERAKAN KADER INSTITUSI MASYARAKAT PEDESAAN (IMP)	420.000.000,00	420.000.000,00	0,00	100,00	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	420.000.000,00	420.000.000,00	0,00	100,00	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	420.000.000,00	420.000.000,00	0,00	100,00	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.03		PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN KEBUTUHAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI SERTA PELAKSANAAN PELAYANAN KB DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	334.615.992,00	297.648.000,00	(36.967.992,00)	88,95	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.03.0003		PENINGKATAN KESERTAAN PENGGUNAAN METODE KONTRASEPSI JANGKA PANJANG (MKJP)	321.115.992,00	284.148.000,00	(36.967.992,00)	88,48	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	321.115.992,00	284.148.000,00	(36.967.992,00)	88,48	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	321.115.992,00	284.148.000,00	(36.967.992,00)	88,48	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.03.0008		PEMBINAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI DI FASILITAS KESEHATAN TERMASUK JARINGAN DAN JEJARINGNYA	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	100,00	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.03.0008	5.1	BELANJA OPERASI	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	100,00	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.03.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	100,00	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.04		PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN PERAN SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN DAN PEMBINAAN KESERTAAN BER-KB	566.800.000,00	566.800.000,00	0,00	100,00	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.04.0002		INTEGRASI PEMBANGUNAN LINTAS SEKTOR DI KAMPUNG KB	270.000.000,00	270.000.000,00	0,00	100,00	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	270.000.000,00	270.000.000,00	0,00	100,00	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	270.000.000,00	270.000.000,00	0,00	100,00	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.04.0006		PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN PROGRAM BANGGA KENCANA DI KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS	296.800.000,00	296.800.000,00	0,00	100,00	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.04.0006	5.1	BELANJA OPERASI	296.800.000,00	296.800.000,00	0,00	100,00	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.04.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	296.800.000,00	296.800.000,00	0,00	100,00	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.04		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	590.997.446,00	590.960.000,00	(37.446,00)	99,99	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.04.2.01		PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KELUARGA MELALUI PEMBINAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	62.997.268,00	62.997.000,00	(268,00)	99,99	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.04.2.01.0008		PROMOSI DAN SOSIALISASI KELOMPOK KEGIATAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (MENJADI ORANG TUA HEBAT, GENERASI BERENCANA, KELANJUTUSIAAN SERTA PENGELOLAAN KEUANGAN KELUARGA)	14.997.268,00	14.997.000,00	(268,00)	99,99	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.04.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	14.997.268,00	14.997.000,00	(268,00)	99,99	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.04.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.997.268,00	14.997.000,00	(268,00)	99,99	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.04.2.01.0016		PENGELOLAAN KETAHANAN KELUARGA MELALUI PUSAT PELAYANAN KELUARGA SEJAHTERA (PPKS)	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	100,00	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.04.2.01.0016	5.1	BELANJA OPERASI	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	100,00	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.04.2.01.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	100,00	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.04.2.02		PELAKSANAAN DAN PENINGKATAN PERAN SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA DALAM PEMBANGUNAN KELUARGA MELALUI PEMBINAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	528.000.178,00	527.963.000,00	(37.178,00)	99,99	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.04.2.02.0005		PEMANTAUAN DATA DAN INFORMASI KELUARGA BERISIKO STUNTING (TERMASUK REMAJA CALON PENGANTIN/CALON PUS, IBU HAMIL, PASCA SALIN/KELAHIRAN, BADUTA/BALITA)	240.000.178,00	239.963.000,00	(37.178,00)	99,98	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.04.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	240.000.178,00	239.963.000,00	(37.178,00)	99,98	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.04.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	240.000.178,00	239.963.000,00	(37.178,00)	99,98	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.04.2.02.0006		PENDAMPINGAN KELUARGA BERISIKO STUNTING (TERMASUK REMAJA CALON PENGANTIN/CALON PUS, IBU HAMIL, PASCA SALIN/KELAHIRAN, BADUTA/BALITA)	288.000.000,00	288.000.000,00	0,00	100,00	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.04.2.02.0006	5.1	BELANJA OPERASI	288.000.000,00	288.000.000,00	0,00	100,00	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.04.2.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	288.000.000,00	288.000.000,00	0,00	100,00	
				JUMLAH BELANJA	2.875.609.189,00	2.834.352.500,00	(41.256.689,00)	98,56	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(2.875.609.189,00)	(2.834.352.500,00)	41.256.689,00	98,56	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(2.875.609.189,00)	(2.834.352.500,00)	41.256.689,00	98,56	

MAMUJU TENGAH, 2026

BUPATI KAB. MAMUJU TENGAH

H. ARSAL ARAS

Lampiran I.3 : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah
Nomor : -
Tanggal : 2026

PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Organisasi : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000		5	BELANJA DAERAH	3.214.394.794,98	3.108.554.251,00	(105.840.543,98)	96,70	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.765.108.617,98	2.664.287.856,00	(100.820.761,98)	96,35	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	128.617.314,00	128.351.000,00	(266.314,00)	99,79	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	84.019.615,00	84.010.500,00	(9.115,00)	99,98	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	84.019.615,00	84.010.500,00	(9.115,00)	99,98	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.019.615,00	84.010.500,00	(9.115,00)	99,98	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	28.612.666,00	28.610.000,00	(2.666,00)	99,99	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	28.612.666,00	28.610.000,00	(2.666,00)	99,99	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.612.666,00	28.610.000,00	(2.666,00)	99,99	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.01.0003		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	4.473.466,00	4.472.000,00	(1.466,00)	99,96	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	4.473.466,00	4.472.000,00	(1.466,00)	99,96	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.473.466,00	4.472.000,00	(1.466,00)	99,96	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.01.0004		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	3.275.820,00	3.274.500,00	(1.320,00)	99,95	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	3.275.820,00	3.274.500,00	(1.320,00)	99,95	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.275.820,00	3.274.500,00	(1.320,00)	99,95	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.01.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	2.995.105,00	2.994.000,00	(1.105,00)	99,96	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	2.995.105,00	2.994.000,00	(1.105,00)	99,96	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.995.105,00	2.994.000,00	(1.105,00)	99,96	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	5.240.642,00	4.990.000,00	(250.642,00)	95,21	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	5.240.642,00	4.990.000,00	(250.642,00)	95,21	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.240.642,00	4.990.000,00	(250.642,00)	95,21	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.275.073.113,00	2.180.929.222,00	(94.143.891,00)	95,86	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	2.235.764.064,00	2.141.640.222,00	(94.123.842,00)	95,79	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.235.764.064,00	2.141.640.222,00	(94.123.842,00)	95,79	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.171.314.064,00	2.077.420.006,00	(93.894.058,00)	95,67	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.450.000,00	64.220.216,00	(229.784,00)	99,64	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	39.309.049,00	39.289.000,00	(20.049,00)	99,94	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	39.309.049,00	39.289.000,00	(20.049,00)	99,94	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.309.049,00	39.289.000,00	(20.049,00)	99,94	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	45.986.959,00	40.986.000,00	(5.000.959,00)	89,12	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.05.0005		MONITORING, EVALUASI, DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI	32.236.959,00	32.236.000,00	(959,00)	99,99	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.05.0005	5.1	BELANJA OPERASI	32.236.959,00	32.236.000,00	(959,00)	99,99	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.05.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.236.959,00	32.236.000,00	(959,00)	99,99	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	13.750.000,00	8.750.000,00	(5.000.000,00)	63,63	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	13.750.000,00	8.750.000,00	(5.000.000,00)	63,63	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.750.000,00	8.750.000,00	(5.000.000,00)	63,63	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	36.241.750,00	34.872.000,00	(1.369.750,00)	96,22	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	33.241.750,00	31.872.000,00	(1.369.750,00)	95,87	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	33.241.750,00	31.872.000,00	(1.369.750,00)	95,87	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.241.750,00	31.872.000,00	(1.369.750,00)	95,87	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	184.590.170,00	184.590.100,00	(70,00)	99,99	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.07.0001		PENGADAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.07.0001	5.1	BELANJA OPERASI	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.07.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.07.0009		PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	88.590.170,00	88.590.100,00	(70,00)	99,99	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.07.0009	5.1	BELANJA OPERASI	88.590.170,00	88.590.100,00	(70,00)	99,99	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.07.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.590.170,00	88.590.100,00	(70,00)	99,99	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	34.599.311,98	34.571.500,00	(27.811,98)	99,91	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	18.999.311,98	18.971.500,00	(27.811,98)	99,85	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	18.999.311,98	18.971.500,00	(27.811,98)	99,85	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.999.311,98	18.971.500,00	(27.811,98)	99,85	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	60.000.000,00	59.988.034,00	(11.966,00)	99,98	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	60.000.000,00	59.988.034,00	(11.966,00)	99,98	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	60.000.000,00	59.988.034,00	(11.966,00)	99,98	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	59.988.034,00	(11.966,00)	99,98	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.02		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	171.599.073,00	171.568.000,00	(31.073,00)	99,98	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.02.2.02		PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG POLITIK, HUKUM, SOSIAL, DAN EKONOMI PADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	99.999.487,00	99.982.000,00	(17.487,00)	99,98	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.02.2.02.0002		ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN PENINGKATAN PARTISIPASI PEREMPUAN DAN POLITIK, HUKUM, SOSIAL DAN EKONOMI	99.999.487,00	99.982.000,00	(17.487,00)	99,98	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	99.999.487,00	99.982.000,00	(17.487,00)	99,98	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.999.487,00	99.982.000,00	(17.487,00)	99,98	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.02.2.03		PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	71.599.586,00	71.586.000,00	(13.586,00)	99,98	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.02.2.03.0005		PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	71.599.586,00	71.586.000,00	(13.586,00)	99,98	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.02.2.03.0005	5.1	BELANJA OPERASI	71.599.586,00	71.586.000,00	(13.586,00)	99,98	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.02.2.03.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.599.586,00	71.586.000,00	(13.586,00)	99,98	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.03		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	150.655.446,00	148.842.495,00	(1.812.951,00)	98,79	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.03.2.02		PENYEDIAAN LAYANAN RUJUKAN LANJUTAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MEMERLUKAN KOORDINASI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	150.655.446,00	148.842.495,00	(1.812.951,00)	98,79	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.03.2.02.0001		PENYEDIAAN LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	150.655.446,00	148.842.495,00	(1.812.951,00)	98,79	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.03.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	144.070.946,00	142.257.995,00	(1.812.951,00)	98,74	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.03.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	144.070.946,00	142.257.995,00	(1.812.951,00)	98,74	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.03.2.02.0001	5.2	BELANJA MODAL	6.584.500,00	6.584.500,00	0,00	100,00	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.03.2.02.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.584.500,00	6.584.500,00	0,00	100,00	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.04		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	49.762.025,00	49.531.000,00	(231.025,00)	99,53	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.04.2.01		PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER (KG) DAN HAK ANAK TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	49.762.025,00	49.531.000,00	(231.025,00)	99,53	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.04.2.01.0002		PELAKSANAAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI KG DAN PERLINDUNGAN ANAK BAGI KELUARGA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	49.762.025,00	49.531.000,00	(231.025,00)	99,53	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.04.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	49.762.025,00	49.531.000,00	(231.025,00)	99,53	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.04.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.762.025,00	49.531.000,00	(231.025,00)	99,53	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.06		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	77.269.633,00	74.324.900,00	(2.944.733,00)	96,18	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.06.2.01		PELEMBAGAAN PHA PADA LEMBAGA PEMERINTAH, NONPEMERINTAH, DAN DUNIA USAHA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	77.269.633,00	74.324.900,00	(2.944.733,00)	96,18	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.06.2.01.0002		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELEMBAGAAN PEMENUHAN HAK ANAK KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	77.269.633,00	74.324.900,00	(2.944.733,00)	96,18	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.06.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	77.269.633,00	74.324.900,00	(2.944.733,00)	96,18	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.06.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.269.633,00	74.324.900,00	(2.944.733,00)	96,18	
				JUMLAH BELANJA	3.214.394.794,98	3.108.554.251,00	(105.840.543,98)	96,70	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(3.214.394.794,98)	(3.108.554.251,00)	105.840.543,98	96,70	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(3.214.394.794,98)	(3.108.554.251,00)	105.840.543,98	96,70	

MAMUJU TENGAH, 2026
BUPATI KAB. MAMUJU TENGAH

H. ARSAL ARAS

Lampiran I.3 : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah
Nomor : -
Tanggal : 2026

PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Organisasi : DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	7.300.672.059,50	6.650.662.753,00	(650.009.306,50)	91,09	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.746.772.264,50	5.388.830.475,00	(357.941.789,50)	93,77	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	68.732.123,00	67.711.500,00	(1.020.623,00)	98,51	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	65.312.495,00	64.297.500,00	(1.014.995,00)	98,44	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	65.312.495,00	64.297.500,00	(1.014.995,00)	98,44	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.312.495,00	64.297.500,00	(1.014.995,00)	98,44	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	704.907,00	703.500,00	(1.407,00)	99,80	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	704.907,00	703.500,00	(1.407,00)	99,80	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	704.907,00	703.500,00	(1.407,00)	99,80	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.01.0003		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	704.907,00	703.500,00	(1.407,00)	99,80	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	704.907,00	703.500,00	(1.407,00)	99,80	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	704.907,00	703.500,00	(1.407,00)	99,80	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.01.0004		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	1.004.907,00	1.003.500,00	(1.407,00)	99,85	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.004.907,00	1.003.500,00	(1.407,00)	99,85	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.004.907,00	1.003.500,00	(1.407,00)	99,85	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.01.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	1.004.907,00	1.003.500,00	(1.407,00)	99,85	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.004.907,00	1.003.500,00	(1.407,00)	99,85	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.004.907,00	1.003.500,00	(1.407,00)	99,85	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	5.179.199.285,00	4.867.055.502,00	(312.143.783,00)	93,97	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	5.136.972.288,00	4.827.506.802,00	(309.465.486,00)	93,97	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.136.972.288,00	4.827.506.802,00	(309.465.486,00)	93,97	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	5.066.722.288,00	4.759.129.622,00	(307.592.666,00)	93,92	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.250.000,00	68.377.180,00	(1.872.820,00)	97,33	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	42.226.997,00	39.548.700,00	(2.678.297,00)	93,65	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	42.226.997,00	39.548.700,00	(2.678.297,00)	93,65	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.226.997,00	39.548.700,00	(2.678.297,00)	93,65	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.03		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	24.488.257,00	24.487.000,00	(1.257,00)	99,99	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.03.0006		PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	24.488.257,00	24.487.000,00	(1.257,00)	99,99	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.03.0006	5.1	BELANJA OPERASI	24.488.257,00	24.487.000,00	(1.257,00)	99,99	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.03.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.488.257,00	24.487.000,00	(1.257,00)	99,99	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	68.098.976,00	62.010.500,00	(6.088.476,00)	91,05	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.05.0003		PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	38.958.976,00	38.860.500,00	(98.476,00)	99,74	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.05.0003	5.1	BELANJA OPERASI	38.958.976,00	38.860.500,00	(98.476,00)	99,74	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.05.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.958.976,00	38.860.500,00	(98.476,00)	99,74	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.05.0011		BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	29.140.000,00	23.150.000,00	(5.990.000,00)	79,44	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.05.0011	5.1	BELANJA OPERASI	29.140.000,00	23.150.000,00	(5.990.000,00)	79,44	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.05.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.140.000,00	23.150.000,00	(5.990.000,00)	79,44	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	150.231.119,50	149.010.483,00	(1.220.636,50)	99,18	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	49.744.723,50	49.635.000,00	(109.723,50)	99,77	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	48.744.723,50	48.635.000,00	(109.723,50)	99,77	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.744.723,50	48.635.000,00	(109.723,50)	99,77	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	2.540.170,00	2.540.000,00	(170,00)	99,99	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	2.540.170,00	2.540.000,00	(170,00)	99,99	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.540.170,00	2.540.000,00	(170,00)	99,99	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	3.924.000,00	2.944.000,00	(980.000,00)	75,02	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	3.924.000,00	2.944.000,00	(980.000,00)	75,02	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.924.000,00	2.944.000,00	(980.000,00)	75,02	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	32.290.000,00	32.290.000,00	0,00	100,00	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	32.290.000,00	32.290.000,00	0,00	100,00	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.290.000,00	32.290.000,00	0,00	100,00	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	61.732.226,00	61.601.483,00	(130.743,00)	99,78	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	61.732.226,00	61.601.483,00	(130.743,00)	99,78	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.732.226,00	61.601.483,00	(130.743,00)	99,78	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	130.997.240,00	95.997.240,00	(35.000.000,00)	73,28	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.07.0002		PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	130.997.240,00	95.997.240,00	(35.000.000,00)	73,28	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.07.0002	5.1	BELANJA OPERASI	95.997.240,00	95.997.240,00	0,00	100,00	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.07.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.997.240,00	95.997.240,00	0,00	100,00	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.07.0002	5.2	BELANJA MODAL	35.000.000,00	0,00	(35.000.000,00)	0,00	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.07.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.000.000,00	0,00	(35.000.000,00)	0,00	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	89.991.504,00	89.961.250,00	(30.254,00)	99,96	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	50.391.504,00	50.361.250,00	(30.254,00)	99,93	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	50.391.504,00	50.361.250,00	(30.254,00)	99,93	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.391.504,00	50.361.250,00	(30.254,00)	99,93	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	100,00	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	100,00	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	100,00	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	35.033.760,00	32.597.000,00	(2.436.760,00)	93,04	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	35.033.760,00	32.597.000,00	(2.436.760,00)	93,04	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	35.033.760,00	32.597.000,00	(2.436.760,00)	93,04	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.033.760,00	32.597.000,00	(2.436.760,00)	93,04	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	771.390.187,00	616.511.978,00	(154.878.209,00)	79,92	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.2.01		PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PERTANIAN	604.625.231,00	455.193.118,00	(149.432.113,00)	75,28	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.2.01.0001		PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN SESUAI DENGAN KOMODITAS, TEKNOLOGI DAN SPESIFIK LOKASI	320.989.469,00	317.197.118,00	(3.792.351,00)	98,81	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	314.218.469,00	310.426.118,00	(3.792.351,00)	98,79	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	314.218.469,00	310.426.118,00	(3.792.351,00)	98,79	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.2.01.0001	5.2	BELANJA MODAL	6.771.000,00	6.771.000,00	0,00	100,00	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.2.01.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.771.000,00	6.771.000,00	0,00	100,00	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.2.01.0002		PENDAMPINGAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN	283.635.762,00	137.996.000,00	(145.639.762,00)	48,65	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	283.635.762,00	137.996.000,00	(145.639.762,00)	48,65	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	283.635.762,00	137.996.000,00	(145.639.762,00)	48,65	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.2.06		PENYEDIAAN BENIH/BIBIT TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK YANG SUMBERNYA DALAM I (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA LAIN	166.764.956,00	161.318.860,00	(5.446.096,00)	96,73	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.2.06.0003		PENGADAAN BIBIT TERNAK YANG SUMBERNYA DARI DAERAH KABUPATEN/KOTA LAIN	166.764.956,00	161.318.860,00	(5.446.096,00)	96,73	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	166.764.956,00	161.318.860,00	(5.446.096,00)	96,73	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	166.764.956,00	161.318.860,00	(5.446.096,00)	96,73	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.03		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	51.210.000,00	0,00	(51.210.000,00)	0,00	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.03.2.02		PEMBANGUNAN PRASARANA PERTANIAN	51.210.000,00	0,00	(51.210.000,00)	0,00	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.03.2.02.0003		PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN JALAN USAHA TANI	51.210.000,00	0,00	(51.210.000,00)	0,00	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.03.2.02.0003	5.2	BELANJA MODAL	51.210.000,00	0,00	(51.210.000,00)	0,00	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.03.2.02.0003	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	51.210.000,00	0,00	(51.210.000,00)	0,00	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.04		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	179.599.409,00	179.595.000,00	(4.409,00)	99,99	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.04.2.03		PENGELOLAAN PELAYANAN JASA LABORATORIUM DAN JASA MEDIK VETERINER DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	179.599.409,00	179.595.000,00	(4.409,00)	99,99	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.04.2.03.0002		PENYEDIAAN PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER	179.599.409,00	179.595.000,00	(4.409,00)	99,99	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.04.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	179.599.409,00	179.595.000,00	(4.409,00)	99,99	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.04.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	179.599.409,00	179.595.000,00	(4.409,00)	99,99	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.05		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	116.404.981,00	66.400.000,00	(50.004.981,00)	57,04	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.05.2.01		PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN KABUPATEN/KOTA	116.404.981,00	66.400.000,00	(50.004.981,00)	57,04	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.05.2.01.0001		PENGENDALIAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN (OPT) TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN	66.404.981,00	66.400.000,00	(4.981,00)	99,99	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.05.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	66.404.981,00	66.400.000,00	(4.981,00)	99,99	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.404.981,00	66.400.000,00	(4.981,00)	99,99	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.05.2.01.0002		PENANGANAN DAMPAK PERUBAHAN IKLIM (DPI) TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	0,00	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.05.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	0,00	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.05.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	0,00	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.07		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	435.295.218,00	399.325.300,00	(35.969.918,00)	91,73	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.07.2.01		PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN	435.295.218,00	399.325.300,00	(35.969.918,00)	91,73	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.07.2.01.0003		PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN SARANA DAN PRASARANA PENYULUHAN PERTANIAN	435.295.218,00	399.325.300,00	(35.969.918,00)	91,73	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.07.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	435.295.218,00	399.325.300,00	(35.969.918,00)	91,73	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.07.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	435.295.218,00	399.325.300,00	(35.969.918,00)	91,73	
				JUMLAH BELANJA	7.300.672.059,50	6.650.662.753,00	(650.009.306,50)	91,09	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(7.300.672.059,50)	(6.650.662.753,00)	650.009.306,50	91,09	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(7.300.672.059,50)	(6.650.662.753,00)	650.009.306,50	91,09	

MAMUJU TENGAH, 2026

BUPATI KAB. MAMUJU TENGAH

H. ARSAL ARAS

Lampiran I.3 : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah
Nomor : -
Tanggal : 2026

PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
Organisasi : DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	286.235.193,00	285.979.300,00	(255.893,00)	99,91	
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	211.671.913,00	211.428.200,00	(243.713,00)	99,88	
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03.2.01		PENYEDIAAN DAN PENYALURAN PANGAN POKOK ATAU PANGAN LAINNYA SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN	110.000.412,00	109.788.500,00	(211.912,00)	99,80	
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03.2.01.0007		PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN KELUARGA	36.840.242,00	36.823.000,00	(17.242,00)	99,95	
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	36.840.242,00	36.823.000,00	(17.242,00)	99,95	
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.840.242,00	36.823.000,00	(17.242,00)	99,95	
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03.2.01.0008		STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN TINGKAT PRODUSEN DAN KONSUMEN DI KABUPATEN/KOTA	47.544.933,00	47.352.500,00	(192.433,00)	99,59	
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	42.544.933,00	42.352.500,00	(192.433,00)	99,54	
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.544.933,00	42.352.500,00	(192.433,00)	99,54	
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03.2.01.0008	5.2	BELANJA MODAL	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03.2.01.0008	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03.2.01.0015		PEMANTAUAN HARGA DAN PASOKAN PANGAN	25.615.237,00	25.613.000,00	(2.237,00)	99,99	
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03.2.01.0015	5.1	BELANJA OPERASI	25.615.237,00	25.613.000,00	(2.237,00)	99,99	
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03.2.01.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.615.237,00	25.613.000,00	(2.237,00)	99,99	
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03.2.04		PELAKSANAAN PENCAPAIAN TARGET KONSUMSI PANGAN PERKAPITA/TAHUN SESUAI DENGAN ANGKA KECUKUPAN GIZI	101.671.501,00	101.639.700,00	(31.801,00)	99,96	
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03.2.04.0001		PENYUSUNAN DAN PENETAPAN TARGET KONSUMSI PANGAN PER KAPITA PER TAHUN	20.399.742,00	20.386.500,00	(13.242,00)	99,93	
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03.2.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	20.399.742,00	20.386.500,00	(13.242,00)	99,93	
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03.2.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.399.742,00	20.386.500,00	(13.242,00)	99,93	
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03.2.04.0002		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL	81.271.759,00	81.253.200,00	(18.559,00)	99,97	
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03.2.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	81.271.759,00	81.253.200,00	(18.559,00)	99,97	
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.271.759,00	81.253.200,00	(18.559,00)	99,97	
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.04		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	48.834.799,00	48.830.600,00	(4.199,00)	99,99	
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.04.2.01		PENYUSUNAN PETA KERENTANAN DAN KETAHANAN PANGAN KECAMATAN	48.834.799,00	48.830.600,00	(4.199,00)	99,99	
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.04.2.01.0001		PENYUSUNAN, PEMUTAKHIRAN DAN ANALISIS PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN	48.834.799,00	48.830.600,00	(4.199,00)	99,99	
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	48.834.799,00	48.830.600,00	(4.199,00)	99,99	
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.834.799,00	48.830.600,00	(4.199,00)	99,99	
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.05		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	25.728.481,00	25.720.500,00	(7.981,00)	99,96	
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.05.2.01		PELAKSANAAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR DAERAH KABUPATEN/KOTA	25.728.481,00	25.720.500,00	(7.981,00)	99,96	
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.05.2.01.0007		PENYEDIAAN SARANA PENGUJIAN KEAMANAN DAN MUTU PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	25.728.481,00	25.720.500,00	(7.981,00)	99,96	
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.05.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	25.728.481,00	25.720.500,00	(7.981,00)	99,96	
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.05.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.728.481,00	25.720.500,00	(7.981,00)	99,96	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	JUMLAH BELANJA	286.235.193,00	285.979.300,00	(255.893,00)	99,91	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(286.235.193,00)	(285.979.300,00)	255.893,00	99,91	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(286.235.193,00)	(285.979.300,00)	255.893,00	99,91	

MAMUJU TENGAH, 2026
BUPATI KAB. MAMUJU TENGAH

H. ARSAL ARAS

Lampiran I.3 : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah
Nomor : -
Tanggal : 2026

PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Organisasi : DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	2.11.0.00.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	256.800.000,00	202.115.000,00	(54.685.000,00)	78,70	
	2.11.0.00.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	256.800.000,00	202.115.000,00	(54.685.000,00)	78,70	
	2.11.0.00.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	256.800.000,00	202.115.000,00	(54.685.000,00)	78,70	
				JUMLAH PENDAPATAN	256.800.000,00	202.115.000,00	(54.685.000,00)	78,70	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	6.676.407.116,15	6.534.531.683,00	(141.875.433,15)	97,87	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.033.527.759,15	1.986.806.028,00	(46.721.731,15)	97,70	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	23.834.916,00	23.021.200,00	(813.716,00)	96,58	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	17.699.714,00	17.087.200,00	(612.514,00)	96,53	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	17.699.714,00	17.087.200,00	(612.514,00)	96,53	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.699.714,00	17.087.200,00	(612.514,00)	96,53	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	1.225.884,00	1.173.000,00	(52.884,00)	95,68	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.225.884,00	1.173.000,00	(52.884,00)	95,68	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.225.884,00	1.173.000,00	(52.884,00)	95,68	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.01.0003		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	1.342.191,00	1.280.000,00	(62.191,00)	95,36	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.342.191,00	1.280.000,00	(62.191,00)	95,36	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.342.191,00	1.280.000,00	(62.191,00)	95,36	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.01.0004		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	987.575,00	978.000,00	(9.575,00)	99,03	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	987.575,00	978.000,00	(9.575,00)	99,03	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	987.575,00	978.000,00	(9.575,00)	99,03	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.01.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	1.405.441,00	1.385.000,00	(20.441,00)	98,54	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.405.441,00	1.385.000,00	(20.441,00)	98,54	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.405.441,00	1.385.000,00	(20.441,00)	98,54	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	1.174.111,00	1.118.000,00	(56.111,00)	95,22	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	1.174.111,00	1.118.000,00	(56.111,00)	95,22	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.174.111,00	1.118.000,00	(56.111,00)	95,22	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.272.091.939,15	1.231.912.987,00	(40.178.952,15)	96,84	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.171.827.380,15	1.138.790.987,00	(33.036.393,15)	97,18	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.171.827.380,15	1.138.790.987,00	(33.036.393,15)	97,18	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.113.317.380,15	1.081.979.537,00	(31.337.843,15)	97,18	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.510.000,00	56.811.450,00	(1.698.550,00)	97,09	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	79.800.000,00	73.300.000,00	(6.500.000,00)	91,85	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	79.800.000,00	73.300.000,00	(6.500.000,00)	91,85	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.800.000,00	73.300.000,00	(6.500.000,00)	91,85	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	13.287.273,00	13.074.000,00	(213.273,00)	98,39	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	13.287.273,00	13.074.000,00	(213.273,00)	98,39	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.287.273,00	13.074.000,00	(213.273,00)	98,39	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	7.177.286,00	6.748.000,00	(429.286,00)	94,01	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	7.177.286,00	6.748.000,00	(429.286,00)	94,01	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.177.286,00	6.748.000,00	(429.286,00)	94,01	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.05.0011		BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.05.0011	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.05.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	53.802.750,00	50.964.840,00	(2.837.910,00)	94,72	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	1.025.000,00	1.025.000,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.025.000,00	1.025.000,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.025.000,00	1.025.000,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	1.945.000,00	1.720.000,00	(225.000,00)	88,43	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.945.000,00	1.720.000,00	(225.000,00)	88,43	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.945.000,00	1.720.000,00	(225.000,00)	88,43	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	4.015.000,00	2.071.600,00	(1.943.400,00)	51,59	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	4.015.000,00	2.071.600,00	(1.943.400,00)	51,59	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.015.000,00	2.071.600,00	(1.943.400,00)	51,59	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	3.680.000,00	3.505.000,00	(175.000,00)	95,24	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	3.680.000,00	3.505.000,00	(175.000,00)	95,24	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.680.000,00	3.505.000,00	(175.000,00)	95,24	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	43.137.750,00	42.643.240,00	(494.510,00)	98,85	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	43.137.750,00	42.643.240,00	(494.510,00)	98,85	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.137.750,00	42.643.240,00	(494.510,00)	98,85	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.07.0009		PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.07.0009	5.1	BELANJA OPERASI	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.07.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	42.926.294,00	40.944.650,00	(1.981.644,00)	95,38	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	18.326.294,00	16.344.650,00	(1.981.644,00)	89,18	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	18.326.294,00	16.344.650,00	(1.981.644,00)	89,18	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.326.294,00	16.344.650,00	(1.981.644,00)	89,18	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	24.600.000,00	24.600.000,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	24.600.000,00	24.600.000,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.600.000,00	24.600.000,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	515.871.860,00	514.962.351,00	(909.509,00)	99,82	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	39.647.500,00	39.080.000,00	(567.500,00)	98,56	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	39.647.500,00	39.080.000,00	(567.500,00)	98,56	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.647.500,00	39.080.000,00	(567.500,00)	98,56	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	416.814.360,00	416.522.351,00	(292.009,00)	99,92	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	416.814.360,00	416.522.351,00	(292.009,00)	99,92	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	416.814.360,00	416.522.351,00	(292.009,00)	99,92	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0003		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN ALAT BESAR	53.810.000,00	53.760.000,00	(50.000,00)	99,90	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0003	5.1	BELANJA OPERASI	53.810.000,00	53.760.000,00	(50.000,00)	99,90	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.810.000,00	53.760.000,00	(50.000,00)	99,90	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	46.554.926,00	40.427.000,00	(6.127.926,00)	86,83	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.01		PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA	46.554.926,00	40.427.000,00	(6.127.926,00)	86,83	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.01.0001		KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DILAKSANAKAN TERHADAP MEDIA TANAH, AIR, UDARA, DAN LAUT	33.349.684,00	29.711.000,00	(3.638.684,00)	89,08	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	33.349.684,00	29.711.000,00	(3.638.684,00)	89,08	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.349.684,00	29.711.000,00	(3.638.684,00)	89,08	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.01.0002		KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN EMISI GAS RUMAH KACA, MITIGASI DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM	13.205.242,00	10.716.000,00	(2.489.242,00)	81,14	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	13.205.242,00	10.716.000,00	(2.489.242,00)	81,14	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.205.242,00	10.716.000,00	(2.489.242,00)	81,14	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.04		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	363.999.135,00	343.875.500,00	(20.123.635,00)	94,47	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.04.2.01		PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KABUPATEN/KOTA	363.999.135,00	343.875.500,00	(20.123.635,00)	94,47	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.04.2.01.0004		PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)	363.999.135,00	343.875.500,00	(20.123.635,00)	94,47	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.04.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	317.359.135,00	310.125.500,00	(7.233.635,00)	97,72	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.04.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	317.359.135,00	310.125.500,00	(7.233.635,00)	97,72	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.04.2.01.0004	5.2	BELANJA MODAL	46.640.000,00	33.750.000,00	(12.890.000,00)	72,36	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.04.2.01.0004	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.750.000,00	33.750.000,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.04.2.01.0004	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	12.890.000,00	0,00	(12.890.000,00)	0,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.05		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	22.509.985,00	19.762.000,00	(2.747.985,00)	87,79	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.05.2.01		PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3	22.509.985,00	19.762.000,00	(2.747.985,00)	87,79	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.05.2.01.0001		FASILITASI PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3 DILAKSANAKAN MELALUI SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK	18.272.507,00	15.718.000,00	(2.554.507,00)	86,01	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.05.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	18.272.507,00	15.718.000,00	(2.554.507,00)	86,01	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.272.507,00	15.718.000,00	(2.554.507,00)	86,01	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.05.2.01.0002		VERIFIKASI LAPANGAN UNTUK MEMASTIKAN PEMENUHAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3	4.237.478,00	4.044.000,00	(193.478,00)	95,43	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.05.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	4.237.478,00	4.044.000,00	(193.478,00)	95,43	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.05.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.237.478,00	4.044.000,00	(193.478,00)	95,43	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	39.364.318,00	38.718.000,00	(646.318,00)	98,35	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.06.2.01		PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PPLH DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	39.364.318,00	38.718.000,00	(646.318,00)	98,35	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.06.2.01.0001		FASILITASI PEMENUHAN KETENTUAN DAN KEWAJIBAN IZIN LINGKUNGAN DAN/ATAU IZIN PPLH	22.253.221,00	21.897.000,00	(356.221,00)	98,39	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.06.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	22.253.221,00	21.897.000,00	(356.221,00)	98,39	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.06.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.253.221,00	21.897.000,00	(356.221,00)	98,39	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.06.2.01.0009		PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA ATAU PERSETUJUAN PEMERINTAH TERKAIT PERSETUJUAN LINGKUNGAN YANG DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	17.111.097,00	16.821.000,00	(290.097,00)	98,30	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.06.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	17.111.097,00	16.821.000,00	(290.097,00)	98,30	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.06.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.111.097,00	16.821.000,00	(290.097,00)	98,30	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.10		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	10.541.875,00	10.336.000,00	(205.875,00)	98,04	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.10.2.01		PENYELESAIAN PENGADUAN MASYARAKAT DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) KABUPATEN/KOTA	10.541.875,00	10.336.000,00	(205.875,00)	98,04	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.10.2.01.0004		PENGELOLAAN PENGADUAN PERMASALAHAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP TINGKAT KABUPATEN/KOTA	10.541.875,00	10.336.000,00	(205.875,00)	98,04	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.10.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	10.541.875,00	10.336.000,00	(205.875,00)	98,04	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.10.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.541.875,00	10.336.000,00	(205.875,00)	98,04	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	4.159.909.118,00	4.094.607.155,00	(65.301.963,00)	98,43	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01		PENGELOLAAN SAMPAH	4.159.909.118,00	4.094.607.155,00	(65.301.963,00)	98,43	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0007		PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI TPA/TPST/SPA KABUPATEN/KOTA	2.579.498.230,00	2.517.277.155,00	(62.221.075,00)	97,58	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	300.577.230,00	299.398.550,00	(1.178.680,00)	99,60	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.577.230,00	299.398.550,00	(1.178.680,00)	99,60	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0007	5.2	BELANJA MODAL	2.278.921.000,00	2.217.878.605,00	(61.042.395,00)	97,32	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0007	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.904.273.500,00	1.843.887.890,00	(60.385.610,00)	96,82	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0007	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	374.647.500,00	373.990.715,00	(656.785,00)	99,82	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0013		PENGURANGAN SAMPAH MELALUI PEMANFAATAN KEMBALI SAMPAH	9.610.888,00	9.430.000,00	(180.888,00)	98,11	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0013	5.1	BELANJA OPERASI	9.610.888,00	9.430.000,00	(180.888,00)	98,11	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.610.888,00	9.430.000,00	(180.888,00)	98,11	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0017		PENANGANAN SAMPAH MELALUI PEMILAHAN DAN PENGOLAHAN SAMPAH DI INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSA, RDF, PUSAT PENGOMPOSAN, BIODIGESTER, BANK SAMPAH DAN FASILITAS LAINNYA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANGAN	1.570.800.000,00	1.567.900.000,00	(2.900.000,00)	99,81	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0017	5.1	BELANJA OPERASI	1.570.800.000,00	1.567.900.000,00	(2.900.000,00)	99,81	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.570.800.000,00	1.567.900.000,00	(2.900.000,00)	99,81	
				JUMLAH BELANJA	6.676.407.116,15	6.534.531.683,00	(141.875.433,15)	97,87	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(6.419.607.116,15)	(6.332.416.683,00)	87.190.433,15	98,64	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(6.419.607.116,15)	(6.332.416.683,00)	87.190.433,15	98,64	

MAMUJU TENGAH, 2026
BUPATI KAB. MAMUJU TENGAH

H. ARSAL ARAS

Lampiran I.3 : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah
Nomor : -
Tanggal : 2026

PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Organisasi : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	2.826.791.534,87	2.775.223.285,00	(51.568.249,87)	98,17	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.673.576.265,87	1.626.725.512,00	(46.850.753,87)	97,20	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	28.397.166,00	28.252.166,00	(145.000,00)	99,48	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	14.568.786,00	14.508.786,00	(60.000,00)	99,58	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	14.568.786,00	14.508.786,00	(60.000,00)	99,58	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.568.786,00	14.508.786,00	(60.000,00)	99,58	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	13.828.380,00	13.743.380,00	(85.000,00)	99,38	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	13.828.380,00	13.743.380,00	(85.000,00)	99,38	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.828.380,00	13.743.380,00	(85.000,00)	99,38	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.265.666.620,87	1.235.114.256,00	(30.552.364,87)	97,58	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.265.666.620,87	1.235.114.256,00	(30.552.364,87)	97,58	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.265.666.620,87	1.235.114.256,00	(30.552.364,87)	97,58	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.218.966.620,87	1.188.697.236,00	(30.269.384,87)	97,51	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.700.000,00	46.417.020,00	(282.980,00)	99,39	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	39.329.500,00	39.308.500,00	(21.000,00)	99,94	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	15.329.500,00	15.313.500,00	(16.000,00)	99,89	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	15.329.500,00	15.313.500,00	(16.000,00)	99,89	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.329.500,00	15.313.500,00	(16.000,00)	99,89	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	24.000.000,00	23.995.000,00	(5.000,00)	99,97	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	24.000.000,00	23.995.000,00	(5.000,00)	99,97	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	23.995.000,00	(5.000,00)	99,97	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	50.501.683,00	50.501.683,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.07.0009		PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	50.501.683,00	50.501.683,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.07.0009	5.1	BELANJA OPERASI	50.501.683,00	50.501.683,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.07.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.501.683,00	50.501.683,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	235.701.746,00	219.597.357,00	(16.104.389,00)	93,16	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	103.101.746,00	90.597.357,00	(12.504.389,00)	87,87	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	103.101.746,00	90.597.357,00	(12.504.389,00)	87,87	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	103.101.746,00	90.597.357,00	(12.504.389,00)	87,87	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	132.600.000,00	129.000.000,00	(3.600.000,00)	97,28	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	132.600.000,00	129.000.000,00	(3.600.000,00)	97,28	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	132.600.000,00	129.000.000,00	(3.600.000,00)	97,28	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	53.979.550,00	53.951.550,00	(28.000,00)	99,94	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	53.979.550,00	53.951.550,00	(28.000,00)	99,94	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	53.979.550,00	53.951.550,00	(28.000,00)	99,94	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.979.550,00	53.951.550,00	(28.000,00)	99,94	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	407.660.488,00	403.208.200,00	(4.452.288,00)	98,90	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01		PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	18.925.000,00	18.640.000,00	(285.000,00)	98,49	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01.0004		PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	18.925.000,00	18.640.000,00	(285.000,00)	98,49	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	18.925.000,00	18.640.000,00	(285.000,00)	98,49	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.925.000,00	18.640.000,00	(285.000,00)	98,49	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.02		PENATAAN PENDAFTARAN PENDUDUK	40.090.200,00	40.090.200,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.02.0002		PENGADAAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN SELAIN BLANGKO KTP-EL, FORMULIR, DAN BUKU TERKAIT PENDAFTARAN PENDUDUK SESUAI DENGAN KEBUTUHAN	40.090.200,00	40.090.200,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	40.090.200,00	40.090.200,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.090.200,00	40.090.200,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.03		PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK	348.645.288,00	344.478.000,00	(4.167.288,00)	98,80	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.03.0002		PELAYANAN SECARA AKTIF PENDAFTARAN PERISTIWA KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN PERISTIWA PENTING TERKAIT PENDAFTARAN PENDUDUK	160.800.000,00	156.800.000,00	(4.000.000,00)	97,51	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	160.800.000,00	156.800.000,00	(4.000.000,00)	97,51	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	160.800.000,00	156.800.000,00	(4.000.000,00)	97,51	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.03.0003		FASILITASI PENDAFTARAN PENDUDUK	187.845.288,00	187.678.000,00	(167.288,00)	99,91	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	187.845.288,00	187.678.000,00	(167.288,00)	99,91	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	187.845.288,00	187.678.000,00	(167.288,00)	99,91	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	432.226.456,00	432.001.448,00	(225.008,00)	99,94	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.01		PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	82.455.875,00	82.375.875,00	(80.000,00)	99,90	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.01.0002		PENINGKATAN DALAM PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	20.525.000,00	20.445.000,00	(80.000,00)	99,61	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	20.525.000,00	20.445.000,00	(80.000,00)	99,61	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.525.000,00	20.445.000,00	(80.000,00)	99,61	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.01.0005		PENGADAAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN SELAIN BLANGKO KTP-EL, FORMULIR, DAN BUKU TERKAIT PENCATATAN SIPIL SESUAI DENGAN KEBUTUHAN	61.930.875,00	61.930.875,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	61.930.875,00	61.930.875,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.930.875,00	61.930.875,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.02		PENYELENGGARAAN PENCATATAN SIPIL	349.770.581,00	349.625.573,00	(145.008,00)	99,95	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.02.0004		PELAYANAN SECARA AKTIF PENDAFTARAN PERISTIWA KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN PERISTIWA PENTING TERKAIT PENCATATAN SIPIL	114.000.000,00	114.000.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	114.000.000,00	114.000.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.000.000,00	114.000.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.02.0006		FASILITASI TERKAIT PENCATATAN SIPIL	235.770.581,00	235.625.573,00	(145.008,00)	99,93	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.02.0006	5.1	BELANJA OPERASI	235.770.581,00	235.625.573,00	(145.008,00)	99,93	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	235.770.581,00	235.625.573,00	(145.008,00)	99,93	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	182.528.325,00	182.488.125,00	(40.200,00)	99,97	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.01		PENGUMPULAN DATA KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DAN PENYAJIAN DATABASE KEPENDUDUKAN	15.999.325,00	15.999.325,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.01.0001		PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN	15.999.325,00	15.999.325,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	15.999.325,00	15.999.325,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.999.325,00	15.999.325,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03		PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	141.589.000,00	141.548.800,00	(40.200,00)	99,97	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03.0001		KOORDINASI ANTAR LEMBAGA PEMERINTAH DAN LEMBAGA NON-PEMERINTAH DI KABUPATEN/KOTA DALAM PENERTIBAN PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	70.407.000,00	70.366.800,00	(40.200,00)	99,94	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	70.407.000,00	70.366.800,00	(40.200,00)	99,94	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.407.000,00	70.366.800,00	(40.200,00)	99,94	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03.0003		FASILITASI TERKAIT PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	71.182.000,00	71.182.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03.0003	5.2	BELANJA MODAL	37.182.000,00	37.182.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37.182.000,00	37.182.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.04		PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	24.940.000,00	24.940.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.04.0003		BIMBINGAN TEKNIS TERKAIT PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDAYAGUNAAN DATA KEPENDUDUKAN	24.940.000,00	24.940.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.04.0003	5.1	BELANJA OPERASI	24.940.000,00	24.940.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.04.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.940.000,00	24.940.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.05		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	130.800.000,00	130.800.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.05.2.01		PENYUSUNAN PROFIL KEPENDUDUKAN	130.800.000,00	130.800.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.05.2.01.0001		PENYEDIAAN DATA KEPENDUDUKAN KABUPATEN/KOTA	100.800.000,00	100.800.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.05.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	100.800.000,00	100.800.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.800.000,00	100.800.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.05.2.01.0002		PENYUSUNAN PROFIL DATA PERKEMBANGAN DAN PROYEKSI KEPENDUDUKAN SERTA KEBUTUHAN YANG LAIN	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.05.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.05.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
				JUMLAH BELANJA	2.826.791.534,87	2.775.223.285,00	(51.568.249,87)	98,17	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(2.826.791.534,87)	(2.775.223.285,00)	51.568.249,87	98,17	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(2.826.791.534,87)	(2.775.223.285,00)	51.568.249,87	98,17	

MAMUJU TENGAH, 2026
BUPATI KAB. MAMUJU TENGAH

H. ARSAL ARAS

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah
Nomor : -
Tanggal : 2026

PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Organisasi : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	3.156.682.581,88	3.015.051.663,00	(141.630.918,88)	95,51	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.499.171.055,38	1.395.605.043,00	(103.566.012,38)	93,09	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	83.037.732,00	80.537.518,00	(2.500.214,00)	96,98	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	21.018.338,00	18.518.338,00	(2.500.000,00)	88,10	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	21.018.338,00	18.518.338,00	(2.500.000,00)	88,10	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.018.338,00	18.518.338,00	(2.500.000,00)	88,10	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.01.0004		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	25.244.193,00	25.243.979,00	(214,00)	99,99	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	25.244.193,00	25.243.979,00	(214,00)	99,99	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.244.193,00	25.243.979,00	(214,00)	99,99	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.01.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	24.335.600,00	24.335.600,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	24.335.600,00	24.335.600,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.335.600,00	24.335.600,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	12.439.601,00	12.439.601,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	12.439.601,00	12.439.601,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.439.601,00	12.439.601,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.135.957.214,00	1.063.861.205,00	(72.096.009,00)	93,65	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.036.449.893,00	967.957.781,00	(68.492.112,00)	93,39	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.036.449.893,00	967.957.781,00	(68.492.112,00)	93,39	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	986.749.893,00	924.976.401,00	(61.773.492,00)	93,73	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.700.000,00	42.981.380,00	(6.718.620,00)	86,48	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	50.349.723,00	50.049.723,00	(300.000,00)	99,40	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	50.349.723,00	50.049.723,00	(300.000,00)	99,40	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.349.723,00	50.049.723,00	(300.000,00)	99,40	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	6.174.327,00	6.174.327,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	6.174.327,00	6.174.327,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.174.327,00	6.174.327,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	42.983.271,00	39.679.374,00	(3.303.897,00)	92,31	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	42.983.271,00	39.679.374,00	(3.303.897,00)	92,31	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.983.271,00	39.679.374,00	(3.303.897,00)	92,31	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	69.547.494,00	68.994.144,00	(553.350,00)	99,20	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	747.000,00	747.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	747.000,00	747.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	747.000,00	747.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	7.860.000,00	7.855.000,00	(5.000,00)	99,93	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	7.860.000,00	7.855.000,00	(5.000,00)	99,93	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.860.000,00	7.855.000,00	(5.000,00)	99,93	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	48.503.350,00	47.955.000,00	(548.350,00)	98,86	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	48.503.350,00	47.955.000,00	(548.350,00)	98,86	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.503.350,00	47.955.000,00	(548.350,00)	98,86	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0010		PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD	8.637.144,00	8.637.144,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0010	5.1	BELANJA OPERASI	8.637.144,00	8.637.144,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.637.144,00	8.637.144,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	135.125.129,85	108.052.335,00	(27.072.794,85)	79,96	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.07.0007		PENGADAAN ASET TETAP LAINNYA	15.125.129,85	15.125.129,00	(0,85)	99,99	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.07.0007	5.2	BELANJA MODAL	15.125.129,85	15.125.129,00	(0,85)	99,99	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.07.0007	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.125.129,85	15.125.129,00	(0,85)	99,99	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.07.0009		PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	120.000.000,00	92.927.206,00	(27.072.794,00)	77,43	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.07.0009	5.1	BELANJA OPERASI	120.000.000,00	92.927.206,00	(27.072.794,00)	77,43	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.07.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	92.927.206,00	(27.072.794,00)	77,43	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	16.573.339,60	15.243.591,00	(1.329.748,60)	91,97	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	16.573.339,60	15.243.591,00	(1.329.748,60)	91,97	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	16.573.339,60	15.243.591,00	(1.329.748,60)	91,97	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.573.339,60	15.243.591,00	(1.329.748,60)	91,97	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	53.930.145,93	53.916.250,00	(13.895,93)	99,97	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	49.730.145,93	49.716.250,00	(13.895,93)	99,97	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	49.730.145,93	49.716.250,00	(13.895,93)	99,97	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.730.145,93	49.716.250,00	(13.895,93)	99,97	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1.383.160.758,00	1.345.096.279,00	(38.064.479,00)	97,24	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01		PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1.383.160.758,00	1.345.096.279,00	(38.064.479,00)	97,24	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0001		FASILITASI PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1.367.679.134,00	1.329.614.655,00	(38.064.479,00)	97,21	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.367.679.134,00	1.329.614.655,00	(38.064.479,00)	97,21	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.367.679.134,00	1.329.614.655,00	(38.064.479,00)	97,21	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0003		FASILITASI PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA	15.481.624,00	15.481.624,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	15.481.624,00	15.481.624,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.481.624,00	15.481.624,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	274.350.768,50	274.350.341,00	(427,50)	99,99	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01		PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG BERGERAK DI BIDANG PEMBERDAYAAN DESA DAN LEMBAGA ADAT TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG MASYARAKAT PELAKUNYA HUKUM ADAT YANG SAMA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	274.350.768,50	274.350.341,00	(427,50)	99,99	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0002		FASILITASI PENATAAN, PEMBERDAYAAN DAN PENDAYAGUNAAN KELEMBAGAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN (RT, RW, PKK, POSYANDU, LPM, DAN KARANG TARUNA), LEMBAGA ADAT DESA/KELURAHAN DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	13.310.425,00	13.310.425,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	13.310.425,00	13.310.425,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.310.425,00	13.310.425,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0003		PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN (RT, RW, PKK, POSYANDU, LPM, DAN KARANG TARUNA), LEMBAGA ADAT DESA/KELURAHAN DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	245.940.413,50	245.939.986,00	(427,50)	99,99	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	245.940.413,50	245.939.986,00	(427,50)	99,99	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	245.940.413,50	245.939.986,00	(427,50)	99,99	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0005		FASILITASI PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA	15.099.930,00	15.099.930,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	15.099.930,00	15.099.930,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.099.930,00	15.099.930,00	0,00	100,00	
				JUMLAH BELANJA	3.156.682.581,88	3.015.051.663,00	(141.630.918,88)	95,51	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(3.156.682.581,88)	(3.015.051.663,00)	141.630.918,88	95,51	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(3.156.682.581,88)	(3.015.051.663,00)	141.630.918,88	95,51	

MAMUJU TENGAH, 2026
BUPATI KAB. MAMUJU TENGAH

H. ARSAL. ARAS

Lampiran I.3 : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah
Nomor : -
Tanggal : 2026

PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Organisasi : DINAS PERHUBUNGAN

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	2.15.0.00.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	190.000.000,00	100.000.000,00	(90.000.000,00)	52,63	
	2.15.0.00.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	190.000.000,00	100.000.000,00	(90.000.000,00)	52,63	
	2.15.0.00.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	190.000.000,00	100.000.000,00	(90.000.000,00)	52,63	
				JUMLAH PENDAPATAN	190.000.000,00	100.000.000,00	(90.000.000,00)	52,63	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	2.551.301.381,00	2.439.057.256,00	(112.244.125,00)	95,60	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.687.496.140,00	1.610.938.341,00	(76.557.799,00)	95,46	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	183.545.803,00	174.400.687,00	(9.145.116,00)	95,01	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	33.077.731,00	33.077.383,00	(348,00)	99,99	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	33.077.731,00	33.077.383,00	(348,00)	99,99	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.077.731,00	33.077.383,00	(348,00)	99,99	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	10.050.344,00	10.050.344,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	10.050.344,00	10.050.344,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.050.344,00	10.050.344,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01.0003		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	24.119.949,00	21.719.949,00	(2.400.000,00)	90,04	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	24.119.949,00	21.719.949,00	(2.400.000,00)	90,04	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.119.949,00	21.719.949,00	(2.400.000,00)	90,04	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01.0004		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	19.313.536,00	15.713.536,00	(3.600.000,00)	81,36	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	19.313.536,00	15.713.536,00	(3.600.000,00)	81,36	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.313.536,00	15.713.536,00	(3.600.000,00)	81,36	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	72.545.519,00	69.470.519,00	(3.075.000,00)	95,76	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	72.545.519,00	69.470.519,00	(3.075.000,00)	95,76	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.545.519,00	69.470.519,00	(3.075.000,00)	95,76	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	24.438.724,00	24.368.956,00	(69.768,00)	99,71	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	24.438.724,00	24.368.956,00	(69.768,00)	99,71	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.438.724,00	24.368.956,00	(69.768,00)	99,71	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.147.335.437,00	1.110.718.614,00	(36.616.823,00)	96,80	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.066.512.422,20	1.032.523.433,00	(33.988.989,20)	96,81	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.066.512.422,20	1.032.523.433,00	(33.988.989,20)	96,81	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.024.462.422,20	991.153.523,00	(33.308.899,20)	96,74	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.050.000,00	41.369.910,00	(680.090,00)	98,38	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	39.574.936,44	36.954.505,00	(2.620.431,44)	93,37	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	39.574.936,44	36.954.505,00	(2.620.431,44)	93,37	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.574.936,44	36.954.505,00	(2.620.431,44)	93,37	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	41.248.078,36	41.240.676,00	(7.402,36)	99,98	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	41.248.078,36	41.240.676,00	(7.402,36)	99,98	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.248.078,36	41.240.676,00	(7.402,36)	99,98	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	59.537.970,00	59.470.300,00	(67.670,00)	99,88	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	5.928.120,00	5.925.500,00	(2.620,00)	99,95	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	5.928.120,00	5.925.500,00	(2.620,00)	99,95	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.928.120,00	5.925.500,00	(2.620,00)	99,95	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06 0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	45.409.850,00	45.344.800,00	(65.050,00)	99,85	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	45.409.850,00	45.344.800,00	(65.050,00)	99,85	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.409.850,00	45.344.800,00	(65.050,00)	99,85	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	245.425.670,00	217.947.240,00	(27.478.430,00)	88,80	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.07.0001		PENGADAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	138.497.240,00	137.947.240,00	(550.000,00)	99,60	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.07.0001	5.1	BELANJA OPERASI	95.997.240,00	95.997.240,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.07.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.997.240,00	95.997.240,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.07.0001	5.2	BELANJA MODAL	42.500.000,00	41.950.000,00	(550.000,00)	98,70	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.07.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	42.500.000,00	41.950.000,00	(550.000,00)	98,70	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.07.0009		PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	106.928.430,00	80.000.000,00	(26.928.430,00)	74,81	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.07.0009	5.1	BELANJA OPERASI	106.928.430,00	80.000.000,00	(26.928.430,00)	74,81	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.07.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	106.928.430,00	80.000.000,00	(26.928.430,00)	74,81	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	25.851.760,00	24.172.500,00	(1.679.260,00)	93,50	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	10.251.760,00	8.572.500,00	(1.679.260,00)	83,61	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	10.251.760,00	8.572.500,00	(1.679.260,00)	83,61	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.251.760,00	8.572.500,00	(1.679.260,00)	83,61	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	20.799.500,00	19.229.000,00	(1.570.500,00)	92,44	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	12.406.500,00	10.836.000,00	(1.570.500,00)	87,34	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	12.406.500,00	10.836.000,00	(1.570.500,00)	87,34	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.406.500,00	10.836.000,00	(1.570.500,00)	87,34	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	8.393.000,00	8.393.000,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	8.393.000,00	8.393.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.393.000,00	8.393.000,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	863.805.241,00	828.118.915,00	(35.686.326,00)	95,86	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02		PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/KOTA	717.680.241,00	684.268.915,00	(33.411.326,00)	95,34	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0002		PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/KOTA	717.680.241,00	684.268.915,00	(33.411.326,00)	95,34	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	713.240.241,00	684.268.915,00	(28.971.326,00)	95,93	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	713.240.241,00	684.268.915,00	(28.971.326,00)	95,93	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0002	5.2	BELANJA MODAL	4.440.000,00	0,00	(4.440.000,00)	0,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0002	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.440.000,00	0,00	(4.440.000,00)	0,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.06		PELAKSANAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS UNTUK JARINGAN JALAN KABUPATEN/KOTA	146.125.000,00	143.850.000,00	(2.275.000,00)	98,44	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.06.0004		PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN UNTUK JALAN KABUPATEN/KOTA	146.125.000,00	143.850.000,00	(2.275.000,00)	98,44	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	146.125.000,00	143.850.000,00	(2.275.000,00)	98,44	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	146.125.000,00	143.850.000,00	(2.275.000,00)	98,44	
				JUMLAH BELANJA	2.551.301.381,00	2.439.057.256,00	(112.244.125,00)	95,60	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(2.361.301.381,00)	(2.339.057.256,00)	22.244.125,00	99,05	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(2.361.301.381,00)	(2.339.057.256,00)	22.244.125,00	99,05	

MAMUJU TENGAH, 2026
BUPATI KAB. MAMUJU TENGAH

H. ARSAL ARAS

Lampiran I.3 : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah
Nomor : -
Tanggal : 2026

PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi : DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000		5	BELANJA DAERAH	3.721.169.552,64	3.513.978.680,00	(207.190.872,64)	94,43	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.652.053.976,64	1.554.762.980,00	(97.290.996,64)	94,11	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	48.159.877,00	47.852.500,00	(307.377,00)	99,36	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	19.956.593,00	19.840.000,00	(116.593,00)	99,41	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	19.956.593,00	19.840.000,00	(116.593,00)	99,41	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.956.593,00	19.840.000,00	(116.593,00)	99,41	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	1.469.467,00	1.287.000,00	(182.467,00)	87,58	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.469.467,00	1.287.000,00	(182.467,00)	87,58	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.469.467,00	1.287.000,00	(182.467,00)	87,58	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.01.0003		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	2.680.650,00	2.678.000,00	(2.650,00)	99,90	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	2.680.650,00	2.678.000,00	(2.650,00)	99,90	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.680.650,00	2.678.000,00	(2.650,00)	99,90	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	588.604,00	585.000,00	(3.604,00)	99,38	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	588.604,00	585.000,00	(3.604,00)	99,38	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	588.604,00	585.000,00	(3.604,00)	99,38	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	23.464.563,00	23.462.500,00	(2.063,00)	99,99	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	23.464.563,00	23.462.500,00	(2.063,00)	99,99	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.464.563,00	23.462.500,00	(2.063,00)	99,99	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.221.140.006,34	1.188.880.270,00	(32.259.736,34)	97,35	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.190.368.087,34	1.158.135.270,00	(32.232.817,34)	97,29	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.190.368.087,34	1.158.135.270,00	(32.232.817,34)	97,29	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.137.958.087,34	1.106.104.916,00	(31.853.171,34)	97,20	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.410.000,00	52.030.354,00	(379.646,00)	99,27	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	10.818.460,00	10.793.000,00	(25.460,00)	99,76	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	10.818.460,00	10.793.000,00	(25.460,00)	99,76	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.818.460,00	10.793.000,00	(25.460,00)	99,76	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	19.953.459,00	19.952.000,00	(1.459,00)	99,99	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	19.953.459,00	19.952.000,00	(1.459,00)	99,99	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.953.459,00	19.952.000,00	(1.459,00)	99,99	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.03		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	3.666.936,00	3.664.000,00	(2.936,00)	99,91	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.03.0001		PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	343.013,00	341.000,00	(2.013,00)	99,41	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	343.013,00	341.000,00	(2.013,00)	99,41	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	343.013,00	341.000,00	(2.013,00)	99,41	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.03.0005		REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	3.323.923,00	3.323.000,00	(923,00)	99,97	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.03.0005	5.1	BELANJA OPERASI	3.323.923,00	3.323.000,00	(923,00)	99,97	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.03.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.323.923,00	3.323.000,00	(923,00)	99,97	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	74.390.596,00	51.774.000,00	(22.616.596,00)	69,59	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.05.0003		PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	16.515.673,00	11.700.000,00	(4.815.673,00)	70,84	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.05.0003	5.1	BELANJA OPERASI	16.515.673,00	11.700.000,00	(4.815.673,00)	70,84	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.05.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.515.673,00	11.700.000,00	(4.815.673,00)	70,84	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.05.0005		MONITORING, EVALUASI, DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI	10.069.923,00	10.069.000,00	(923,00)	99,99	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.05.0005	5.1	BELANJA OPERASI	10.069.923,00	10.069.000,00	(923,00)	99,99	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.05.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.069.923,00	10.069.000,00	(923,00)	99,99	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.05.0011		BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	47.805.000,00	30.005.000,00	(17.800.000,00)	62,76	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.05.0011	5.1	BELANJA OPERASI	47.805.000,00	30.005.000,00	(17.800.000,00)	62,76	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.05.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.805.000,00	30.005.000,00	(17.800.000,00)	62,76	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	36.653.804,00	36.580.000,00	(73.804,00)	99,79	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	2.905.000,00	2.905.000,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	2.905.000,00	2.905.000,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.905.000,00	2.905.000,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	17.824.804,00	17.751.000,00	(73.804,00)	99,58	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	6.580.504,00	6.551.000,00	(29.504,00)	99,55	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.580.504,00	6.551.000,00	(29.504,00)	99,55	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.06.0005	5.2	BELANJA MODAL	11.244.300,00	11.200.000,00	(44.300,00)	99,60	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.06.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.244.300,00	11.200.000,00	(44.300,00)	99,60	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	15.924.000,00	15.924.000,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	15.924.000,00	15.924.000,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.924.000,00	15.924.000,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	221.687.797,30	180.295.210,00	(41.392.587,30)	81,32	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.07.0001		PENGADAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	95.997.240,00	95.997.240,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.07.0001	5.1	BELANJA OPERASI	95.997.240,00	95.997.240,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.07.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.997.240,00	95.997.240,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.07.0009		PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	118.690.557,30	77.297.970,00	(41.392.587,30)	65,12	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.07.0009	5.1	BELANJA OPERASI	118.690.557,30	77.297.970,00	(41.392.587,30)	65,12	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.07.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	118.690.557,30	77.297.970,00	(41.392.587,30)	65,12	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.07.0010		PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.07.0010	5.2	BELANJA MODAL	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.07.0010	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	45.139.960,00	44.997.000,00	(142.960,00)	99,68	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	29.539.960,00	29.397.000,00	(142.960,00)	99,51	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	29.539.960,00	29.397.000,00	(142.960,00)	99,51	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.539.960,00	29.397.000,00	(142.960,00)	99,51	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.215.000,00	720.000,00	(495.000,00)	59,25	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	495.000,00	0,00	(495.000,00)	0,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	495.000,00	0,00	(495.000,00)	0,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	495.000,00	0,00	(495.000,00)	0,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	720.000,00	720.000,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	720.000,00	720.000,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	720.000,00	720.000,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.02		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	384.580.753,00	373.519.220,00	(11.061.533,00)	97,12	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.02.2.01		PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	384.580.753,00	373.519.220,00	(11.061.533,00)	97,12	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.02.2.01.0014		RELASI MEDIA	296.801.007,00	296.676.180,00	(124.827,00)	99,95	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.02.2.01.0014	5.1	BELANJA OPERASI	296.801.007,00	296.676.180,00	(124.827,00)	99,95	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.02.2.01.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	296.801.007,00	296.676.180,00	(124.827,00)	99,95	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.02.2.01.0015		KEMITRAAN KOMUNIKASI DENGAN KOMUNITAS INFORMASI MASYARAKAT	8.415.820,00	8.414.934,00	(886,00)	99,98	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.02.2.01.0015	5.1	BELANJA OPERASI	8.415.820,00	8.414.934,00	(886,00)	99,98	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.02.2.01.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.415.820,00	8.414.934,00	(886,00)	99,98	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.02.2.01.0017		PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	45.551.426,00	44.865.606,00	(685.820,00)	98,49	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.02.2.01.0017	5.1	BELANJA OPERASI	45.551.426,00	44.865.606,00	(685.820,00)	98,49	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.02.2.01.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.551.426,00	44.865.606,00	(685.820,00)	98,49	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.02.2.01.0021		PENGELOLAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK	33.812.500,00	23.562.500,00	(10.250.000,00)	69,68	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.02.2.01.0021	5.1	BELANJA OPERASI	12.312.500,00	2.062.500,00	(10.250.000,00)	16,75	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.02.2.01.0021	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.312.500,00	2.062.500,00	(10.250.000,00)	16,75	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.02.2.01.0021	5.2	BELANJA MODAL	21.500.000,00	21.500.000,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.02.2.01.0021	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.500.000,00	21.500.000,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.03		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	1.684.534.823,00	1.585.696.480,00	(98.838.343,00)	94,13	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.03.2.01		PENGELOLAAN NAMA DOMAIN YANG TELAH DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN SUB DOMAIN DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	170.220.000,00	170.220.000,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.03.2.01.0004		PENGELOLAAN NAMA DOMAIN DAN SUB DOMAIN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH DAN PENGELOLAAN NAMA DOMAIN PEMERINTAH DESA	170.220.000,00	170.220.000,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.03.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	170.220.000,00	170.220.000,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.03.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	170.220.000,00	170.220.000,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.03.2.02		PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.514.314.823,00	1.415.476.480,00	(98.838.343,00)	93,47	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.03.2.02.0018		KOORDINASI PENYUSUNAN DAN/ATAU REVIU ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA SPBE PEMERINTAH DAERAH	7.006.328,00	7.006.000,00	(328,00)	99,99	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.03.2.02.0018	5.1	BELANJA OPERASI	7.006.328,00	7.006.000,00	(328,00)	99,99	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.03.2.02.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.006.328,00	7.006.000,00	(328,00)	99,99	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.03.2.02.0021		PENYELENGGARAAN SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN PEMERINTAH DAERAH	33.158.503,00	24.535.800,00	(8.622.703,00)	73,99	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.03.2.02.0021	5.1	BELANJA OPERASI	33.158.503,00	24.535.800,00	(8.622.703,00)	73,99	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.03.2.02.0021	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.158.503,00	24.535.800,00	(8.622.703,00)	73,99	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.03.2.02.0024		PENYELENGGARAAN JARINGAN INTRA PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	1.474.149.992,00	1.383.934.680,00	(90.215.312,00)	93,88	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.03.2.02.0024	5.1	BELANJA OPERASI	934.265.552,00	850.771.680,00	(83.493.872,00)	91,06	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.03.2.02.0024	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	934.265.552,00	850.771.680,00	(83.493.872,00)	91,06	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.03.2.02.0024	5.2	BELANJA MODAL	539.884.440,00	533.163.000,00	(6.721.440,00)	98,75	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.03.2.02.0024	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	447.372.600,00	440.811.000,00	(6.561.600,00)	98,53	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.03.2.02.0024	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	92.511.840,00	92.352.000,00	(159.840,00)	99,82	
				JUMLAH BELANJA	3.721.169.552,64	3.513.978.680,00	(207.190.872,64)	94,43	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(3.721.169.552,64)	(3.513.978.680,00)	207.190.872,64	94,43	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(3.721.169.552,64)	(3.513.978.680,00)	207.190.872,64	94,43	

MAMUJU TENGAH, 2026
BUPATI KAB, MAMUJU TENGAH

H. ARSAL ARAS

Lampiran I.3 : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah
Nomor : -
Tanggal : 2026

PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
Organisasi : DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.20	2.16.2.20.2.21.04.0000		5	BELANJA DAERAH	62.660.207,00	58.939.300,00	(3.720.907,00)	94,06	
2.20	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.20.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	62.660.207,00	58.939.300,00	(3.720.907,00)	94,06	
2.20	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.20.02.2.01		PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA	62.660.207,00	58.939.300,00	(3.720.907,00)	94,06	
2.20	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.20.02.2.01.0010		PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL YANG SESUAI DENGAN PRINSIP SATU DATA INDONESIA	34.928.818,00	33.091.300,00	(1.837.518,00)	94,73	
2.20	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.20.02.2.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	34.928.818,00	33.091.300,00	(1.837.518,00)	94,73	
2.20	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.20.02.2.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.928.818,00	33.091.300,00	(1.837.518,00)	94,73	
2.20	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.20.02.2.01.0011		PELAKSANAAN PROSES BISNIS STATISTIK SEKTORAL SESUAI STANDAR	27.731.389,00	25.848.000,00	(1.883.389,00)	93,20	
2.20	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.20.02.2.01.0011	5.1	BELANJA OPERASI	27.731.389,00	25.848.000,00	(1.883.389,00)	93,20	
2.20	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.20.02.2.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.731.389,00	25.848.000,00	(1.883.389,00)	93,20	
				JUMLAH BELANJA	62.660.207,00	58.939.300,00	(3.720.907,00)	94,06	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(62.660.207,00)	(58.939.300,00)	3.720.907,00	94,06	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(62.660.207,00)	(58.939.300,00)	3.720.907,00	94,06	

MAMUJU TENGAH, 2026
BUPATI KAB. MAMUJU TENGAH

H. ARSAL ARAS

Lampiran I.3 : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah
Nomor : -
Tanggal : 2026

PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
Organisasi : DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.21	2.16.2.20.2.21.04.0000		5	BELANJA DAERAH	129.183.830,00	126.733.217,00	(2.450.613,00)	98,10	
2.21	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.21.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	129.183.830,00	126.733.217,00	(2.450.613,00)	98,10	
2.21	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.21.02.2.01		PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	129.183.830,00	126.733.217,00	(2.450.613,00)	98,10	
2.21	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.21.02.2.01.0001		PENETAPAN KEBIJAKAN TATA KELOLA KEAMANAN INFORMASI DAN JARING KOMUNIKASI SANDI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	31.947.440,00	29.539.400,00	(2.408.040,00)	92,46	
2.21	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.21.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	31.947.440,00	29.539.400,00	(2.408.040,00)	92,46	
2.21	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.21.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.947.440,00	29.539.400,00	(2.408.040,00)	92,46	
2.21	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.21.02.2.01.0002		PELAKSANAAN ANALISIS KEBUTUHAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.906.000,00	10.878.002,00	(27.998,00)	99,74	
2.21	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.21.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	10.906.000,00	10.878.002,00	(27.998,00)	99,74	
2.21	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.21.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.906.000,00	10.878.002,00	(27.998,00)	99,74	
2.21	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.21.02.2.01.0003		PELAKSANAAN KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA BERBASIS ELEKTRONIK DAN NON ELEKTRONIK	54.633.413,00	54.618.838,00	(14.575,00)	99,97	
2.21	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.21.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	54.633.413,00	54.618.838,00	(14.575,00)	99,97	
2.21	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.21.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.633.413,00	54.618.838,00	(14.575,00)	99,97	
2.21	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.21.02.2.01.0004		PENYEDIAAN LAYANAN KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	31.696.977,00	31.696.977,00	0,00	100,00	
2.21	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.21.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	31.696.977,00	31.696.977,00	0,00	100,00	
2.21	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.21.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.696.977,00	31.696.977,00	0,00	100,00	
				JUMLAH BELANJA	129.183.830,00	126.733.217,00	(2.450.613,00)	98,10	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(129.183.830,00)	(126.733.217,00)	2.450.613,00	98,10	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(129.183.830,00)	(126.733.217,00)	2.450.613,00	98,10	

MAMUJU TENGAH, 2026
BUPATI KAB. MAMUJU TENGAH

H. ARSAL ARAS

Lampiran I.3 : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah
Nomor : -
Tanggal : 2026

PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Organisasi : DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	2.17.3.30.3.31.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	160.000.000,00	142.000.000,00	(18.000.000,00)	88,75	
	2.17.3.30.3.31.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	160.000.000,00	142.000.000,00	(18.000.000,00)	88,75	
	2.17.3.30.3.31.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	160.000.000,00	142.000.000,00	(18.000.000,00)	88,75	
				JUMLAH PENDAPATAN	160.000.000,00	142.000.000,00	(18.000.000,00)	88,75	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000		5	BELANJA DAERAH	2.536.659.755,46	2.452.240.910,00	(84.418.845,46)	96,67	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.306.773.099,46	2.223.324.304,00	(83.448.795,46)	96,38	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	60.756.728,00	41.556.728,00	(19.200.000,00)	68,39	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	44.574.498,00	25.374.498,00	(19.200.000,00)	56,92	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	44.574.498,00	25.374.498,00	(19.200.000,00)	56,92	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.574.498,00	25.374.498,00	(19.200.000,00)	56,92	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.01.0003		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	16.182.230,00	16.182.230,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	16.182.230,00	16.182.230,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.182.230,00	16.182.230,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.208.851.640,46	2.145.839.576,00	(63.012.064,46)	97,14	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	2.190.559.282,46	2.127.547.218,00	(63.012.064,46)	97,12	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.190.559.282,46	2.127.547.218,00	(63.012.064,46)	97,12	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.131.609.282,46	2.070.751.136,00	(60.858.146,46)	97,14	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.950.000,00	56.796.082,00	(2.153.918,00)	96,34	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	18.292.358,00	18.292.358,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	18.292.358,00	18.292.358,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.292.358,00	18.292.358,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	7.110.000,00	7.110.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.05.0011		BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	7.110.000,00	7.110.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.05.0011	5.1	BELANJA OPERASI	7.110.000,00	7.110.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.05.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.110.000,00	7.110.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	28.654.731,00	27.468.000,00	(1.186.731,00)	95,85	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	28.654.731,00	27.468.000,00	(1.186.731,00)	95,85	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	25.654.731,00	24.468.000,00	(1.186.731,00)	95,37	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.654.731,00	24.468.000,00	(1.186.731,00)	95,37	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.400.000,00	1.350.000,00	(50.000,00)	96,42	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	1.400.000,00	1.350.000,00	(50.000,00)	96,42	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	1.400.000,00	1.350.000,00	(50.000,00)	96,42	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.350.000,00	(50.000,00)	96,42	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.03		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	58.334.850,00	57.985.800,00	(349.050,00)	99,40	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.03.2.01		PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI, KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/ KOTA	58.334.850,00	57.985.800,00	(349.050,00)	99,40	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.03.2.01.0004		PELAKSANAAN PROSES PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA DAERAH KABUPATEN/KOTA	58.334.850,00	57.985.800,00	(349.050,00)	99,40	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.03.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	58.334.850,00	57.985.800,00	(349.050,00)	99,40	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.03.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.334.850,00	57.985.800,00	(349.050,00)	99,40	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.07		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	6.721.978,00	6.721.978,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.07.2.01		PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIZINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN	6.721.978,00	6.721.978,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.07.2.01.0014		PENYUSUNAN BASIS DATA USAHA MIKRO	6.721.978,00	6.721.978,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.07.2.01.0014	5.1	BELANJA OPERASI	6.721.978,00	6.721.978,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.07.2.01.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.721.978,00	6.721.978,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.08		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	164.829.828,00	164.208.828,00	(621.000,00)	99,62	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.08.2.01		PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DENGAN ORIENTASI PENINGKATAN SKALA USAHA MENJADI USAHA KECIL	164.829.828,00	164.208.828,00	(621.000,00)	99,62	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.08.2.01.0006		PRODUKSI DAN PENGOLAHAN, PEMASARAN, SUMBER DAYA MANUSIA, SERTA DESAIN DAN TEKNOLOGI	164.829.828,00	164.208.828,00	(621.000,00)	99,62	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.08.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	164.829.828,00	164.208.828,00	(621.000,00)	99,62	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.08.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.474.848,00	45.474.848,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.08.2.01.0006	5.1.05	Belanja Hibah	119.354.980,00	118.733.980,00	(621.000,00)	99,47	
				JUMLAH BELANJA	2.536.659.755,46	2.452.240.910,00	(84.418.845,46)	96,67	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(2.376.659.755,46)	(2.310.240.910,00)	66.418.845,46	97,20	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(2.376.659.755,46)	(2.310.240.910,00)	66.418.845,46	97,20	

MAMUJU TENGAH, 2026
BUPATI KAB. MAMUJU TENGAH

H. ARSAL ARAS

Lampiran I.3 : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah
Nomor : -
Tanggal : 2026

PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
Organisasi : DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	2.17.3.30.3.31.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	160.000.000,00	142.000.000,00	(18.000.000,00)	88,75	
	2.17.3.30.3.31.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	160.000.000,00	142.000.000,00	(18.000.000,00)	88,75	
	2.17.3.30.3.31.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	160.000.000,00	142.000.000,00	(18.000.000,00)	88,75	
				JUMLAH PENDAPATAN	160.000.000,00	142.000.000,00	(18.000.000,00)	88,75	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000		5	BELANJA DAERAH	785.777.814,00	740.945.273,00	(44.832.541,00)	94,29	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	119.589.647,00	110.213.964,00	(9.375.683,00)	92,16	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	25.192.990,00	23.802.914,00	(1.390.076,00)	94,48	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	25.192.990,00	23.802.914,00	(1.390.076,00)	94,48	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	25.192.990,00	23.802.914,00	(1.390.076,00)	94,48	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.192.990,00	23.802.914,00	(1.390.076,00)	94,48	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	31.970.000,00	28.426.500,00	(3.543.500,00)	88,91	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	12.100.000,00	8.565.000,00	(3.535.000,00)	70,78	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	12.100.000,00	8.565.000,00	(3.535.000,00)	70,78	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.100.000,00	8.565.000,00	(3.535.000,00)	70,78	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	19.870.000,00	19.861.500,00	(8.500,00)	99,95	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	19.870.000,00	19.861.500,00	(8.500,00)	99,95	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.870.000,00	19.861.500,00	(8.500,00)	99,95	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	25.699.657,00	25.196.550,00	(503.107,00)	98,04	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	10.099.657,00	9.596.550,00	(503.107,00)	95,01	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	10.099.657,00	9.596.550,00	(503.107,00)	95,01	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.099.657,00	9.596.550,00	(503.107,00)	95,01	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	100,00	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	100,00	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	100,00	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	36.727.000,00	32.788.000,00	(3.939.000,00)	89,27	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	36.727.000,00	32.788.000,00	(3.939.000,00)	89,27	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	36.727.000,00	32.788.000,00	(3.939.000,00)	89,27	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.727.000,00	32.788.000,00	(3.939.000,00)	89,27	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.03		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	603.171.428,00	567.714.570,00	(35.456.858,00)	94,12	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.03.2.01		PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	14.060.000,00	14.060.000,00	0,00	100,00	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.03.2.01.0001		PENYEDIAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	14.060.000,00	14.060.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	14.060.000,00	14.060.000,00	0,00	100,00	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.060.000,00	14.060.000,00	0,00	100,00	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.03.2.02		PEMBINAAN TERHADAP PENGELOLA SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN MASYARAKAT DI WILAYAH KERJANYA	589.111.428,00	553.654.570,00	(35.456.858,00)	93,98	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.03.2.02.0001		PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PENGELOLA SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	410.220.876,00	394.164.018,00	(16.056.858,00)	96,08	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.03.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.067.018,00	2.067.018,00	0,00	100,00	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.03.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.067.018,00	2.067.018,00	0,00	100,00	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.03.2.02.0001	5.2	BELANJA MODAL	408.153.858,00	392.097.000,00	(16.056.858,00)	96,06	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.03.2.02.0001	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	408.153.858,00	392.097.000,00	(16.056.858,00)	96,06	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.03.2.02.0002		PEMBERDAYAAN PENGELOLA SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	178.890.552,00	159.490.552,00	(19.400.000,00)	89,15	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	178.890.552,00	159.490.552,00	(19.400.000,00)	89,15	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	178.890.552,00	159.490.552,00	(19.400.000,00)	89,15	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.04		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	45.160.360,00	45.160.360,00	0,00	100,00	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.04.2.02		PENGENDALIAN HARGA, DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING DI TINGKAT PASAR KABUPATEN/KOTA	42.355.910,00	42.355.910,00	0,00	100,00	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.04.2.02.0001		PEMANTAUAN HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING PADA PELAKU USAHA DISTRIBUSI BARANG DALAM 1 (SATU) KABUPATEN/KOTA	42.355.910,00	42.355.910,00	0,00	100,00	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.04.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	42.355.910,00	42.355.910,00	0,00	100,00	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.04.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.355.910,00	42.355.910,00	0,00	100,00	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.04.2.03		PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA BERSUBSIDI DI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.804.450,00	2.804.450,00	0,00	100,00	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.04.2.03.0003		PENGAWASAN PENYALURAN DAN PENGGUNAAN PUPUK DAN PESTISIDA BERSUBSIDI	2.804.450,00	2.804.450,00	0,00	100,00	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.04.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	2.804.450,00	2.804.450,00	0,00	100,00	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.04.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.804.450,00	2.804.450,00	0,00	100,00	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.06		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	17.856.379,00	17.856.379,00	0,00	100,00	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.06.2.01		PELAKSANAAN METROLOGI LEGAL, BERUPA TERA, TERA ULANG, DAN PENGAWASAN	17.856.379,00	17.856.379,00	0,00	100,00	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.06.2.01.0001		PELAKSANAAN METROLOGI LEGAL, BERUPA TERA, TERA ULANG	9.334.630,00	9.334.630,00	0,00	100,00	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.06.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	9.334.630,00	9.334.630,00	0,00	100,00	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.06.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.334.630,00	9.334.630,00	0,00	100,00	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.06.2.01.0002		PENGAWASAN/PENYULUHAN METROLOGI LEGAL	8.521.749,00	8.521.749,00	0,00	100,00	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.06.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	8.521.749,00	8.521.749,00	0,00	100,00	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.06.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.521.749,00	8.521.749,00	0,00	100,00	
				JUMLAH BELANJA	785.777.814,00	740.945.273,00	(44.832.541,00)	94,29	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(625.777.814,00)	(598.945.273,00)	26.832.541,00	95,71	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(625.777.814,00)	(598.945.273,00)	26.832.541,00	95,71	

MAMUJU TENGAH, 2026
BUPATI KAB. MAMUJU TENGAH

H. ARSAL ARAS

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah
Nomor : -
Tanggal : 2026

PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
Organisasi : DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	2.17.3.30.3.31.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	160.000.000,00	142.000.000,00	(18.000.000,00)	88,75	
	2.17.3.30.3.31.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	160.000.000,00	142.000.000,00	(18.000.000,00)	88,75	
	2.17.3.30.3.31.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	160.000.000,00	142.000.000,00	(18.000.000,00)	88,75	
				JUMLAH PENDAPATAN	160.000.000,00	142.000.000,00	(18.000.000,00)	88,75	
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000		5	BELANJA DAERAH	60.251.154,00	53.036.154,00	(7.215.000,00)	88,02	
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	910.460,00	895.460,00	(15.000,00)	98,35	
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	910.460,00	895.460,00	(15.000,00)	98,35	
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	455.230,00	442.230,00	(13.000,00)	97,14	
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	455.230,00	442.230,00	(13.000,00)	97,14	
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	455.230,00	442.230,00	(13.000,00)	97,14	
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	455.230,00	453.230,00	(2.000,00)	99,56	
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	455.230,00	453.230,00	(2.000,00)	99,56	
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	455.230,00	453.230,00	(2.000,00)	99,56	
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.04		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	59.340.694,00	52.140.694,00	(7.200.000,00)	87,86	
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.04.2.01		PENYEDIAAN INFORMASI INDUSTRI UNTUK INFORMASI INDUSTRI UNTUK IUI, IPUI, IUKI DAN IPKI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	59.340.694,00	52.140.694,00	(7.200.000,00)	87,86	
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.04.2.01.0001		FASILITASI PENGUMPULAN, PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA INDUSTRI, DATA KAWASAN INDUSTRI SERTA DATA LAIN LINGKUP KABUPATEN/KOTA MELALUI SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL (SIINAS)	59.340.694,00	52.140.694,00	(7.200.000,00)	87,86	
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	59.340.694,00	52.140.694,00	(7.200.000,00)	87,86	
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.340.694,00	52.140.694,00	(7.200.000,00)	87,86	
				JUMLAH BELANJA	60.251.154,00	53.036.154,00	(7.215.000,00)	88,02	
				SURPLUS / (DEFISIT)	99.748.846,00	88.963.846,00	(10.785.000,00)	89,18	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	99.748.846,00	88.963.846,00	(10.785.000,00)	89,18	

MAMUJU TENGAH, 2026
BUPATI KAB. MAMUJU TENGAH

H. ARSAL ARAS

Lampiran I.3 : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah
Nomor : -
Tanggal : 2026

PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
Organisasi : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	1.940.594.175,30	1.778.034.297,00	(162.559.878,30)	91,62	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.778.572.609,30	1.623.668.667,00	(154.903.942,30)	91,29	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	47.611.412,00	45.101.412,00	(2.510.000,00)	94,72	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	46.088.408,00	43.578.408,00	(2.510.000,00)	94,55	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	46.088.408,00	43.578.408,00	(2.510.000,00)	94,55	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.088.408,00	43.578.408,00	(2.510.000,00)	94,55	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	452.536,00	452.536,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	452.536,00	452.536,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	452.536,00	452.536,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.01.0004		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	576.536,00	576.536,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	576.536,00	576.536,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	576.536,00	576.536,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	493.932,00	493.932,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	493.932,00	493.932,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	493.932,00	493.932,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.180.846.283,00	1.148.036.052,00	(32.810.231,00)	97,22	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.132.061.058,00	1.099.250.828,00	(32.810.230,00)	97,10	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.132.061.058,00	1.099.250.828,00	(32.810.230,00)	97,10	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.092.011.058,00	1.060.461.218,00	(31.549.840,00)	97,11	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.050.000,00	38.789.610,00	(1.260.390,00)	96,85	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	46.624.081,00	46.624.081,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	46.624.081,00	46.624.081,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.624.081,00	46.624.081,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	2.161.144,00	2.161.143,00	(1,00)	99,99	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	2.161.144,00	2.161.143,00	(1,00)	99,99	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.161.144,00	2.161.143,00	(1,00)	99,99	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.03		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	3.269.924,00	3.269.924,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.03.0006		PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	3.269.924,00	3.269.924,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.03.0006	5.1	BELANJA OPERASI	3.269.924,00	3.269.924,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.03.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.269.924,00	3.269.924,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	15.310.000,00	15.230.000,00	(80.000,00)	99,47	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.05.0011		BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	15.310.000,00	15.230.000,00	(80.000,00)	99,47	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.05.0011	5.1	BELANJA OPERASI	15.310.000,00	15.230.000,00	(80.000,00)	99,47	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.05.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.310.000,00	15.230.000,00	(80.000,00)	99,47	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	37.417.350,00	37.317.020,00	(100.330,00)	99,73	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	4.210.000,00	4.210.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	4.210.000,00	4.210.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.210.000,00	4.210.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	33.207.350,00	33.107.020,00	(100.330,00)	99,69	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	33.207.350,00	33.107.020,00	(100.330,00)	99,69	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.207.350,00	33.107.020,00	(100.330,00)	99,69	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	421.470.420,30	304.121.059,00	(117.349.361,30)	72,15	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.07.0001		PENGADAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	95.997.240,00	95.997.240,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.07.0001	5.1	BELANJA OPERASI	95.997.240,00	95.997.240,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.07.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.997.240,00	95.997.240,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.07.0009		PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	244.270.717,30	126.961.447,00	(117.309.270,30)	51,97	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.07.0009	5.1	BELANJA OPERASI	244.270.717,30	126.961.447,00	(117.309.270,30)	51,97	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.07.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	244.270.717,30	126.961.447,00	(117.309.270,30)	51,97	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.07.0011		PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	81.202.463,00	81.162.372,00	(40.091,00)	99,95	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.07.0011	5.1	BELANJA OPERASI	16.384.413,00	16.372.372,00	(12.041,00)	99,92	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.07.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.384.413,00	16.372.372,00	(12.041,00)	99,92	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.07.0011	5.2	BELANJA MODAL	64.818.050,00	64.790.000,00	(28.050,00)	99,95	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.07.0011	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	64.818.050,00	64.790.000,00	(28.050,00)	99,95	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	53.418.420,00	52.238.000,00	(1.180.420,00)	97,79	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	25.818.420,00	24.638.000,00	(1.180.420,00)	95,42	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	25.818.420,00	24.638.000,00	(1.180.420,00)	95,42	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.818.420,00	24.638.000,00	(1.180.420,00)	95,42	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	27.600.000,00	27.600.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	27.600.000,00	27.600.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.600.000,00	27.600.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	19.228.800,00	18.355.200,00	(873.600,00)	95,45	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	12.928.800,00	12.055.200,00	(873.600,00)	93,24	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	12.928.800,00	12.055.200,00	(873.600,00)	93,24	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.928.800,00	12.055.200,00	(873.600,00)	93,24	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.02		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	11.428.236,00	11.313.472,00	(114.764,00)	98,99	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.02.2.02		PEMBUATAN PETA POTENSI INVESTASI KABUPATEN/KOTA	11.428.236,00	11.313.472,00	(114.764,00)	98,99	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.02.2.02.0004		PENYUSUNAN PETA POTENSI INVESTASI KABUPATEN/KOTA	11.428.236,00	11.313.472,00	(114.764,00)	98,99	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.02.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	11.428.236,00	11.313.472,00	(114.764,00)	98,99	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.02.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.428.236,00	11.313.472,00	(114.764,00)	98,99	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	94.084.769,00	92.583.897,00	(1.500.872,00)	98,40	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.2.01		PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA TERPADU SATU PINTU DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	94.084.769,00	92.583.897,00	(1.500.872,00)	98,40	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.2.01.0006		PENYEDIAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA MELALUI SISTEM PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK	94.084.769,00	92.583.897,00	(1.500.872,00)	98,40	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	94.084.769,00	92.583.897,00	(1.500.872,00)	98,40	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	94.084.769,00	92.583.897,00	(1.500.872,00)	98,40	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	56.508.561,00	50.468.261,00	(6.040.300,00)	89,31	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.2.01		PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	56.508.561,00	50.468.261,00	(6.040.300,00)	89,31	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.2.01.0006		PENGAWASAN PENANAMAN MODAL	56.508.561,00	50.468.261,00	(6.040.300,00)	89,31	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	56.508.561,00	50.468.261,00	(6.040.300,00)	89,31	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.508.561,00	50.468.261,00	(6.040.300,00)	89,31	
				JUMLAH BELANJA	1.940.594.175,30	1.778.034.297,00	(162.559.878,30)	91,62	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(1.940.594.175,30)	(1.778.034.297,00)	162.559.878,30	91,62	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(1.940.594.175,30)	(1.778.034.297,00)	162.559.878,30	91,62	

MAMUJU TENGAH, 2026
BUPATI KAB. MAMUJU TENGAH

H. ARSAL ARAS

Lampiran I.3 : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah
Nomor : -
Tanggal : 2026

PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Organisasi : DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	2.19.3.26.0.00.02.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	0,00	
	2.19.3.26.0.00.02.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	0,00	
	2.19.3.26.0.00.02.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	0,00	
				JUMLAH PENDAPATAN	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	0,00	
3.26	2.19.3.26.0.00.02.0000		5	BELANJA DAERAH	330.304.685,00	325.769.500,00	(4.535.185,00)	98,62	
3.26	2.19.3.26.0.00.02.0000	3.26.02		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	50.856.059,00	48.349.500,00	(2.506.559,00)	95,07	
3.26	2.19.3.26.0.00.02.0000	3.26.02.2.03		PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA	50.856.059,00	48.349.500,00	(2.506.559,00)	95,07	
3.26	2.19.3.26.0.00.02.0000	3.26.02.2.03.0003		PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA	50.856.059,00	48.349.500,00	(2.506.559,00)	95,07	
3.26	2.19.3.26.0.00.02.0000	3.26.02.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	50.856.059,00	48.349.500,00	(2.506.559,00)	95,07	
3.26	2.19.3.26.0.00.02.0000	3.26.02.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.856.059,00	48.349.500,00	(2.506.559,00)	95,07	
3.26	2.19.3.26.0.00.02.0000	3.26.03		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	235.668.289,00	235.652.000,00	(16.289,00)	99,99	
3.26	2.19.3.26.0.00.02.0000	3.26.03.2.01		PEMASARAN PARIWISATA DALAM DAN LUAR NEGERI DAYA TARIK, DESTINASI DAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN/KOTA	235.668.289,00	235.652.000,00	(16.289,00)	99,99	
3.26	2.19.3.26.0.00.02.0000	3.26.03.2.01.0004		PENINGKATAN KERJA SAMA DAN KEMITRAAN PARIWISATA DALAM DAN LUAR NEGERI	235.668.289,00	235.652.000,00	(16.289,00)	99,99	
3.26	2.19.3.26.0.00.02.0000	3.26.03.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	235.668.289,00	235.652.000,00	(16.289,00)	99,99	
3.26	2.19.3.26.0.00.02.0000	3.26.03.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	235.668.289,00	235.652.000,00	(16.289,00)	99,99	
3.26	2.19.3.26.0.00.02.0000	3.26.04		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	43.780.337,00	41.768.000,00	(2.012.337,00)	95,40	
3.26	2.19.3.26.0.00.02.0000	3.26.04.2.02		PENGEMBANGAN EKOSISTEM EKONOMI KREATIFÂ	43.780.337,00	41.768.000,00	(2.012.337,00)	95,40	
3.26	2.19.3.26.0.00.02.0000	3.26.04.2.02.0003		FASILITASI PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN	43.780.337,00	41.768.000,00	(2.012.337,00)	95,40	
3.26	2.19.3.26.0.00.02.0000	3.26.04.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	43.780.337,00	41.768.000,00	(2.012.337,00)	95,40	
3.26	2.19.3.26.0.00.02.0000	3.26.04.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.780.337,00	41.768.000,00	(2.012.337,00)	95,40	
				JUMLAH BELANJA	330.304.685,00	325.769.500,00	(4.535.185,00)	98,62	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(310.304.685,00)	(325.769.500,00)	(15.464.815,00)	104,98	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(310.304.685,00)	(325.769.500,00)	(15.464.815,00)	104,98	

MAMUJU TENGAH, 2026

BUPATI KAB. MAMUJU TENGAH

H. ARSAL ARAS

Lampiran I.3 : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah
Nomor : -
Tanggal : 2026

PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Organisasi : DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	2.19.3.26.0.00.02.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	0,00	
	2.19.3.26.0.00.02.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	0,00	
	2.19.3.26.0.00.02.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	0,00	
				JUMLAH PENDAPATAN	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	0,00	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000		5	BELANJA DAERAH	15.298.832.024,66	15.210.150.019,00	(88.682.005,66)	99,42	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.345.335.977,66	1.271.943.234,00	(73.392.743,66)	94,54	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	53.027.281,00	53.026.000,00	(1.281,00)	99,99	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	39.527.281,00	39.526.000,00	(1.281,00)	99,99	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	39.527.281,00	39.526.000,00	(1.281,00)	99,99	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.527.281,00	39.526.000,00	(1.281,00)	99,99	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.054.627.354,66	984.700.255,00	(69.927.099,66)	93,36	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	986.947.354,66	919.520.255,00	(67.427.099,66)	93,16	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	986.947.354,66	919.520.255,00	(67.427.099,66)	93,16	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	925.687.354,66	875.969.243,00	(49.718.111,66)	94,62	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.260.000,00	43.551.012,00	(17.708.988,00)	71,09	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	67.680.000,00	65.180.000,00	(2.500.000,00)	96,30	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	67.680.000,00	65.180.000,00	(2.500.000,00)	96,30	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.680.000,00	65.180.000,00	(2.500.000,00)	96,30	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.03		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.03.0004		PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	45.363.750,00	45.183.800,00	(179.950,00)	99,60	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	14.550.000,00	14.550.000,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	14.550.000,00	14.550.000,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.550.000,00	14.550.000,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	6.380.000,00	6.380.000,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	6.380.000,00	6.380.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.380.000,00	6.380.000,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	24.433.750,00	24.253.800,00	(179.950,00)	99,26	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	24.433.750,00	24.253.800,00	(179.950,00)	99,26	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.433.750,00	24.253.800,00	(179.950,00)	99,26	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	92.120.179,00	92.120.179,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.07.0009		PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	92.120.179,00	92.120.179,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.07.0009	5.1	BELANJA OPERASI	92.120.179,00	92.120.179,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.07.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.120.179,00	92.120.179,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	54.177.193,00	53.858.000,00	(319.193,00)	99,41	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	11.590.949,00	11.588.000,00	(2.949,00)	99,97	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	11.590.949,00	11.588.000,00	(2.949,00)	99,97	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.590.949,00	11.588.000,00	(2.949,00)	99,97	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	26.986.244,00	26.670.000,00	(316.244,00)	98,82	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	26.986.244,00	26.670.000,00	(316.244,00)	98,82	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.986.244,00	26.670.000,00	(316.244,00)	98,82	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	34.770.220,00	31.805.000,00	(2.965.220,00)	91,47	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	34.770.220,00	31.805.000,00	(2.965.220,00)	91,47	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	34.770.220,00	31.805.000,00	(2.965.220,00)	91,47	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.770.220,00	31.805.000,00	(2.965.220,00)	91,47	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.02		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	265.458.885,00	263.935.000,00	(1.523.885,00)	99,42	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.02.2.01		PENYADARAN, PEMBERDAYAAN, DAN PENGEMBANGAN PEMUDA DAN KEPEMUDAAN TERHADAP PEMUDA PELOPOR KABUPATEN/KOTA, WIRAUSAHA MUDA PEMULA, DAN PEMUDA KADER KABUPATEN/KOTA	90.458.885,00	88.935.000,00	(1.523.885,00)	98,31	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.02.2.01.0013		KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KEPEMIMPINAN PEMUDA TINGKAT KABUPATEN/KOTA	47.382.692,00	47.366.000,00	(16.692,00)	99,96	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.02.2.01.0013	5.1	BELANJA OPERASI	47.382.692,00	47.366.000,00	(16.692,00)	99,96	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.02.2.01.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.382.692,00	47.366.000,00	(16.692,00)	99,96	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.02.2.01.0014		PELAKSANAAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMENUHAN HAK PEMUDA DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA	31.200.000,00	29.700.000,00	(1.500.000,00)	95,19	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.02.2.01.0014	5.1	BELANJA OPERASI	31.200.000,00	29.700.000,00	(1.500.000,00)	95,19	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.02.2.01.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.200.000,00	29.700.000,00	(1.500.000,00)	95,19	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.02.2.01.0015		KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KEPELOPORAN PEMUDA BAGI PEMUDA PELOPOR TINGKAT KABUPATEN/KOTA	11.876.193,00	11.869.000,00	(7.193,00)	99,93	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.02.2.01.0015	5.1	BELANJA OPERASI	11.876.193,00	11.869.000,00	(7.193,00)	99,93	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.02.2.01.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.876.193,00	11.869.000,00	(7.193,00)	99,93	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.02.2.02		PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI KEPEMUDAAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.02.2.02.0004		KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN MELALUI KEMITRAAN BERBASIS PENEGUHAN KEMANDIRIAN EKONOMI PEMUDA TINGKAT KABUPATEN/KOTA	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.02.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.02.2.02.0004	5.1.05	Belanja Hibah	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.03		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	13.588.037.162,00	13.574.271.785,00	(13.765.377,00)	99,89	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.03.2.01		PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PENDIDIKAN PADA JENJANG PENDIDIKAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.659.066.412,00	11.648.778.985,00	(10.287.427,00)	99,91	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.03.2.01.0005		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENYEDIAAN PRASARANA OLAHRAGA MELALUI PERENCANAAN, PENGADAAN, PEMANFAATAN, PEMELIHARAAN, DAN PENGAWASAN PRASARANA OLAHRAGA DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA	11.659.066.412,00	11.648.778.985,00	(10.287.427,00)	99,91	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.03.2.01.0005	5.2	BELANJA MODAL	11.659.066.412,00	11.648.778.985,00	(10.287.427,00)	99,91	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.03.2.01.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	138.776.363,00	129.100.000,00	(9.676.363,00)	93,02	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.03.2.01.0005	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	11.520.290.049,00	11.519.678.985,00	(611.064,00)	99,99	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.03.2.03		PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PRESTASI TINGKAT DAERAH PROVINSI	78.970.750,00	75.492.800,00	(3.477.950,00)	95,59	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.03.2.03.0009		PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGAWAN BERPRESTASI KABUPATEN/KOTA	78.970.750,00	75.492.800,00	(3.477.950,00)	95,59	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.03.2.03.0009	5.1	BELANJA OPERASI	78.970.750,00	75.492.800,00	(3.477.950,00)	95,59	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.03.2.03.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.970.750,00	75.492.800,00	(3.477.950,00)	95,59	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.03.2.04		PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI OLAHRAGA	1.850.000.000,00	1.850.000.000,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.03.2.04.0006		PENINGKATAN KERJA SAMA ORGANISASI KEOLAHRAGAAN KABUPATEN/KOTA DENGAN LEMBAGA TERKAIT	1.850.000.000,00	1.850.000.000,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.03.2.04.0006	5.1	BELANJA OPERASI	1.850.000.000,00	1.850.000.000,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.03.2.04.0006	5.1.05	Belanja Hibah	1.850.000.000,00	1.850.000.000,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.04		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.04.2.01		PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI KEPRAMUKAAN	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.04.2.01.0002		PENINGKATAN KAPASITAS ORGANISASI KEPRAMUKAAN TINGKAT DAERAH	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.04.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.04.2.01.0002	5.1.05	Belanja Hibah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	
				JUMLAH BELANJA	15.298.832.024,66	15.210.150.019,00	(88.682.005,66)	99,42	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(15.278.832.024,66)	(15.210.150.019,00)	68.682.005,66	99,55	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(15.278.832.024,66)	(15.210.150.019,00)	68.682.005,66	99,55	

MAMUJU TENGAH, 2026
BUPATI KAB. MAMUJU TENGAH

H. ARSAL ARAS

Lampiran I.3 : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah
Nomor : -
Tanggal : 2026

PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH
RINCIAN APBD MENURUTURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
Organisasi : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000		5	BELANJA DAERAH	2.304.323.019,20	2.264.379.548,00	(39.943.471,20)	98,26	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.138.276.059,20	1.102.625.830,00	(35.650.229,20)	96,86	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	124.352.610,00	124.072.287,00	(280.323,00)	99,77	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	81.352.124,00	81.280.924,00	(71.200,00)	99,91	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	81.352.124,00	81.280.924,00	(71.200,00)	99,91	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.352.124,00	81.280.924,00	(71.200,00)	99,91	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	3.979.873,00	3.947.629,00	(32.244,00)	99,18	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	3.979.873,00	3.947.629,00	(32.244,00)	99,18	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.979.873,00	3.947.629,00	(32.244,00)	99,18	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.01.0003		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	4.230.868,00	4.230.868,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	4.230.868,00	4.230.868,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.230.868,00	4.230.868,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.01.0004		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	4.421.924,00	4.304.877,00	(117.047,00)	97,35	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	4.421.924,00	4.304.877,00	(117.047,00)	97,35	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.421.924,00	4.304.877,00	(117.047,00)	97,35	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.01.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	3.933.245,00	3.873.413,00	(59.832,00)	98,47	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	3.933.245,00	3.873.413,00	(59.832,00)	98,47	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.933.245,00	3.873.413,00	(59.832,00)	98,47	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	26.434.576,00	26.434.576,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	26.434.576,00	26.434.576,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.434.576,00	26.434.576,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	736.883.034,20	709.917.926,00	(26.965.108,20)	96,34	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	736.883.034,20	709.917.926,00	(26.965.108,20)	96,34	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	736.883.034,20	709.917.926,00	(26.965.108,20)	96,34	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	708.283.034,20	681.923.346,00	(26.359.688,20)	96,27	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.600.000,00	27.994.580,00	(605.420,00)	97,88	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	7.180.000,00	6.500.000,00	(680.000,00)	90,52	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.05.0011		BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	7.180.000,00	6.500.000,00	(680.000,00)	90,52	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.05.0011	5.1	BELANJA OPERASI	7.180.000,00	6.500.000,00	(680.000,00)	90,52	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.05.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.180.000,00	6.500.000,00	(680.000,00)	90,52	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	118.934.915,00	111.846.417,00	(7.088.498,00)	94,04	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	57.204.415,00	50.402.267,00	(6.802.148,00)	88,10	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	57.204.415,00	50.402.267,00	(6.802.148,00)	88,10	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.204.415,00	50.402.267,00	(6.802.148,00)	88,10	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	25.306.000,00	25.306.000,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	25.306.000,00	25.306.000,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.306.000,00	25.306.000,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	3.947.500,00	3.947.500,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	3.947.500,00	3.947.500,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.947.500,00	3.947.500,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	8.225.000,00	7.980.000,00	(245.000,00)	97,02	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	8.225.000,00	7.980.000,00	(245.000,00)	97,02	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2 23 01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.225.000,00	7.980.000,00	(245.000,00)	97,02	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	24.252.000,00	24.210.650,00	(41.350,00)	99,82	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	24.252.000,00	24.210.650,00	(41.350,00)	99,82	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.252.000,00	24.210.650,00	(41.350,00)	99,82	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.07.0001		PENGADAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.07.0001	5.1	BELANJA OPERASI	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.07.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	53.925.500,00	53.289.200,00	(636.300,00)	98,82	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	46.725.500,00	46.089.200,00	(636.300,00)	98,63	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	46.725.500,00	46.089.200,00	(636.300,00)	98,63	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.725.500,00	46.089.200,00	(636.300,00)	98,63	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.02		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1.166.046.960,00	1.161.753.718,00	(4.293.242,00)	99,63	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.02.2.01		PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	116.526.730,00	114.975.337,00	(1.551.393,00)	98,66	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.02.2.01.0011		PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.810.618,00	18.489.600,00	(321.018,00)	98,29	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.02.2.01.0011	5.1	BELANJA OPERASI	18.810.618,00	18.489.600,00	(321.018,00)	98,29	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.02.2.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.810.618,00	18.489.600,00	(321.018,00)	98,29	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.02.2.01.0016		PENINGKATAN KAPASITAS TENAGA PERPUSTAKAAN DAN PUSTAKAWAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	19.525.275,00	18.906.500,00	(618.775,00)	96,83	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.02.2.01.0016	5.1	BELANJA OPERASI	19.525.275,00	18.906.500,00	(618.775,00)	96,83	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.02.2.01.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.525.275,00	18.906.500,00	(618.775,00)	96,83	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.02.2.01.0017		PENYUSUNAN DATA DAN INFORMASI PERPUSTAKAAN	48.318.206,00	48.249.406,00	(68.800,00)	99,85	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.02.2.01.0017	5.1	BELANJA OPERASI	48.318.206,00	48.249.406,00	(68.800,00)	99,85	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.02.2.01.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.318.206,00	48.249.406,00	(68.800,00)	99,85	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.02.2.01.0019		PENGEMBANGAN KEKHASAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN DAERAH TINGKAT KABUPATEN/KOTA	29.872.631,00	29.329.831,00	(542.800,00)	98,18	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.02.2.01.0019	5.1	BELANJA OPERASI	29.872.631,00	29.329.831,00	(542.800,00)	98,18	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.02.2.01.0019	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.872.631,00	29.329.831,00	(542.800,00)	98,18	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.02.2.02		PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.049.520.230,00	1.046.778.381,00	(2.741.849,00)	99,73	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.02.2.02.0008		PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN SARANA PERPUSTAKAAN DI TEMPAT-TEMPAT UMUM YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	892.896.648,00	890.284.000,00	(2.612.648,00)	99,70	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.02.2.02.0008	5.2	BELANJA MODAL	892.896.648,00	890.284.000,00	(2.612.648,00)	99,70	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.02.2.02.0008	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	892.896.648,00	890.284.000,00	(2.612.648,00)	99,70	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.02.2.02.0009		PEMBERIAN PENGHARGAAN GERAKAN BUDAYA GEMAR MEMBACA	109.478.001,00	109.478.001,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.02.2.02.0009	5.1	BELANJA OPERASI	109.478.001,00	109.478.001,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.02.2.02.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	109.478.001,00	109.478.001,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.02.2.02.0010		SOSIALISASI BUDAYA BACA DAN LITERASI PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MASYARAKAT	47.145.581,00	47.016.380,00	(129.201,00)	99,72	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.02.2.02.0010	5.1	BELANJA OPERASI	47.145.581,00	47.016.380,00	(129.201,00)	99,72	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.02.2.02.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.145.581,00	47.016.380,00	(129.201,00)	99,72	
				JUMLAH BELANJA	2.304.323.019,20	2.264.379.548,00	(39.943.471,20)	98,26	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(2.304.323.019,20)	(2.264.379.548,00)	39.943.471,20	98,26	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(2.304.323.019,20)	(2.264.379.548,00)	39.943.471,20	98,26	

MAMUJU TENGAH, 2026
BUPATI KAB. MAMUJU TENGAH

H. ARSAL ARAS

Lampiran I.3 : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah
Nomor : -
Tanggal : 2026

PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
Organisasi : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.24	2.23.2.24.0.00.02.0000		5	BELANJA DAERAH	38.612.350,00	38.498.550,00	(113.800,00)	99,70	
2.24	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.24.02		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	38.612.350,00	38.498.550,00	(113.800,00)	99,70	
2.24	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.24.02.2.01		PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS DAERAH KABUPATEN/KOTA	38.612.350,00	38.498.550,00	(113.800,00)	99,70	
2.24	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.24.02.2.01.0003		PENGAWASAN ARSIP DINAMIS KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	38.612.350,00	38.498.550,00	(113.800,00)	99,70	
2.24	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.24.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	38.612.350,00	38.498.550,00	(113.800,00)	99,70	
2.24	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.24.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.612.350,00	38.498.550,00	(113.800,00)	99,70	
				JUMLAH BELANJA	38.612.350,00	38.498.550,00	(113.800,00)	99,70	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(38.612.350,00)	(38.498.550,00)	113.800,00	99,70	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(38.612.350,00)	(38.498.550,00)	113.800,00	99,70	

MAMUJU TENGAH, 2026
BUPATI KAB. MAMUJU TENGAH

H. ARSAL ARAS

Lampiran I.3 : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah
Nomor : -
Tanggal : 2026

PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Organisasi : DINAS PERIKANAN

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	3.25.0.00.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	100.000.000,00	75.060.000,00	(24.940.000,00)	75,06	
	3.25.0.00.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100.000.000,00	75.060.000,00	(24.940.000,00)	75,06	
	3.25.0.00.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	0,00	75.060.000,00	75.060.000,00	0,00	
	3.25.0.00.0.00.01.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	0,00	
				JUMLAH PENDAPATAN	100.000.000,00	75.060.000,00	(24.940.000,00)	75,06	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	3.708.119.769,17	3.645.142.309,00	(62.977.460,17)	98,30	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.270.112.192,17	2.219.160.225,00	(50.951.967,17)	97,75	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	29.457.682,00	29.407.000,00	(50.682,00)	99,82	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	20.103.124,00	20.095.000,00	(8.124,00)	99,95	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	20.103.124,00	20.095.000,00	(8.124,00)	99,95	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.103.124,00	20.095.000,00	(8.124,00)	99,95	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.01 0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	1.168.289,00	1.164.000,00	(4.289,00)	99,63	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.168.289,00	1.164.000,00	(4.289,00)	99,63	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.168.289,00	1.164.000,00	(4.289,00)	99,63	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.01.0003		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	1.091.829,00	1.088.000,00	(3.829,00)	99,64	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.091.829,00	1.088.000,00	(3.829,00)	99,64	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.091.829,00	1.088.000,00	(3.829,00)	99,64	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.01.0004		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	1.338.354,00	1.329.000,00	(9.354,00)	99,30	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.338.354,00	1.329.000,00	(9.354,00)	99,30	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.338.354,00	1.329.000,00	(9.354,00)	99,30	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.01.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	1.139.737,00	1.133.000,00	(6.737,00)	99,40	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.139.737,00	1.133.000,00	(6.737,00)	99,40	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.139.737,00	1.133.000,00	(6.737,00)	99,40	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	4.616.349,00	4.598.000,00	(18.349,00)	99,60	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	4.616.349,00	4.598.000,00	(18.349,00)	99,60	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.616.349,00	4.598.000,00	(18.349,00)	99,60	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.816.820.806,17	1.770.820.112,00	(46.000.694,17)	97,46	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.783.715.735,17	1.737.726.112,00	(45.989.623,17)	97,42	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.783.715.735,17	1.737.726.112,00	(45.989.623,17)	97,42	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.722.355.735,17	1.676.811.382,00	(45.544.353,17)	97,35	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.360.000,00	60.914.730,00	(445.270,00)	99,27	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	1.357.267,00	1.356.000,00	(1.267,00)	99,90	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.357.267,00	1.356.000,00	(1.267,00)	99,90	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.357.267,00	1.356.000,00	(1.267,00)	99,90	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	31.747.804,00	31.738.000,00	(9.804,00)	99,96	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	31.747.804,00	31.738.000,00	(9.804,00)	99,96	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.747.804,00	31.738.000,00	(9.804,00)	99,96	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.03		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	4.008.725,00	4.006.000,00	(2.725,00)	99,93	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.03.0005		REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	4.008.725,00	4.006.000,00	(2.725,00)	99,93	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.03.0005	5.1	BELANJA OPERASI	4.008.725,00	4.006.000,00	(2.725,00)	99,93	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.03.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.008.725,00	4.006.000,00	(2.725,00)	99,93	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	19.489.743,00	19.261.500,00	(228.243,00)	98,82	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.05.0005		MONITORING, EVALUASI, DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI	5.699.743,00	5.531.500,00	(168.243,00)	97,04	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.05.0005	5.1	BELANJA OPERASI	5.699.743,00	5.531.500,00	(168.243,00)	97,04	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.05.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.699.743,00	5.531.500,00	(168.243,00)	97,04	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.05.0011		BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	13.790.000,00	13.730.000,00	(60.000,00)	99,56	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.05.0011	5.1	BELANJA OPERASI	13.790.000,00	13.730.000,00	(60.000,00)	99,56	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.05.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.790.000,00	13.730.000,00	(60.000,00)	99,56	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	115.990.231,00	115.693.444,00	(296.787,00)	99,74	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	45.545.500,00	45.545.000,00	(500,00)	99,99	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	45.545.500,00	45.545.000,00	(500,00)	99,99	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.545.500,00	45.545.000,00	(500,00)	99,99	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	6.797.500,00	6.797.500,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	6.797.500,00	6.797.500,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.797.500,00	6.797.500,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	6.089.828,00	6.087.000,00	(2.828,00)	99,95	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	6.089.828,00	6.087.000,00	(2.828,00)	99,95	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.089.828,00	6.087.000,00	(2.828,00)	99,95	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	57.557.403,00	57.263.944,00	(293.459,00)	99,49	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	57.557.403,00	57.263.944,00	(293.459,00)	99,49	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.557.403,00	57.263.944,00	(293.459,00)	99,49	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	181.143.049,00	178.155.169,00	(2.987.880,00)	98,35	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.07.0002		PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.07.0002	5.1	BELANJA OPERASI	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.07.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.07.0009		PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	82.143.049,00	79.155.169,00	(2.987.880,00)	96,36	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.07.0009	5.1	BELANJA OPERASI	82.143.049,00	79.155.169,00	(2.987.880,00)	96,36	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.07.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.143.049,00	79.155.169,00	(2.987.880,00)	96,36	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	101.501.956,00	100.121.000,00	(1.380.956,00)	98,63	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	701.804,00	701.000,00	(804,00)	99,88	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	701.804,00	701.000,00	(804,00)	99,88	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	701.804,00	701.000,00	(804,00)	99,88	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	21.600.152,00	21.520.000,00	(80.152,00)	99,62	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	21.600.152,00	21.520.000,00	(80.152,00)	99,62	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.600.152,00	21.520.000,00	(80.152,00)	99,62	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	79.200.000,00	77.900.000,00	(1.300.000,00)	98,35	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	79.200.000,00	77.900.000,00	(1.300.000,00)	98,35	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.200.000,00	77.900.000,00	(1.300.000,00)	98,35	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.700.000,00	1.696.000,00	(4.000,00)	99,76	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	1.700.000,00	1.696.000,00	(4.000,00)	99,76	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.700.000,00	1.696.000,00	(4.000,00)	99,76	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000,00	1.696.000,00	(4.000,00)	99,76	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	226.938.174,00	224.666.710,00	(2.271.464,00)	98,99	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.02		PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	226.938.174,00	224.666.710,00	(2.271.464,00)	98,99	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.02.0001		PENGEMBANGAN KAPASITAS NELAYAN KECIL	29.231.674,00	28.328.000,00	(903.674,00)	96,90	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	29.231.674,00	28.328.000,00	(903.674,00)	96,90	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.231.674,00	28.328.000,00	(903.674,00)	96,90	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.02.0004		PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PEMBERDAYAAN USAHA NELAYAN SKALA KECIL	197.706.500,00	196.338.710,00	(1.367.790,00)	99,30	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	197.706.500,00	196.338.710,00	(1.367.790,00)	99,30	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.870.000,00	41.870.000,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.02.0004	5.1.05	Belanja Hibah	155.836.500,00	154.468.710,00	(1.367.790,00)	99,12	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1.066.004.516,00	1.058.112.874,00	(7.891.642,00)	99,25	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.04		PENGELOLAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN	1.066.004.516,00	1.058.112.874,00	(7.891.642,00)	99,25	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.04.0002		PENYEDIAAN PRASARANA PEMBUDIDAYAAN IKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	195.836.344,00	193.410.000,00	(2.426.344,00)	98,76	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	193.236.344,00	190.810.000,00	(2.426.344,00)	98,74	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	193.236.344,00	190.810.000,00	(2.426.344,00)	98,74	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.04.0002	5.2	BELANJA MODAL	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.04.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.04.0009		PENJAMINAN KETERSEDIAAN SARANA PEMBUDIDAYAAN IKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	744.172.410,00	742.400.484,00	(1.771.926,00)	99,76	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.04.0009	5.1	BELANJA OPERASI	744.172.410,00	742.400.484,00	(1.771.926,00)	99,76	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.04.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	640.000,00	640.000,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.04.0009	5.1.05	Belanja Hibah	743.532.410,00	741.760.484,00	(1.771.926,00)	99,76	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.04.0010		PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN PEMBUDIDAYAAN IKAN DI DARAT	125.995.762,00	122.302.390,00	(3.693.372,00)	97,06	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.04.0010	5.1	BELANJA OPERASI	125.995.762,00	122.302.390,00	(3.693.372,00)	97,06	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.04.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.870.872,00	58.177.500,00	(3.693.372,00)	94,03	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.04.0010	5.1.05	Belanja Hibah	64.124.890,00	64.124.890,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	145.064.887,00	143.202.500,00	(1.862.387,00)	98,71	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.2.02		PEMBINAAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BAGI USAHA PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SKALA MIKRO DAN KECIL	36.554.900,00	35.463.500,00	(1.091.400,00)	97,01	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.2.02.0002		PEMBINAAN TERHADAP PENERAPAN PERSYARATAN PERIZINAN BERUSAHA PADA USAHA PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN SESUAI SKALA USAHA DAN RISIKO	36.554.900,00	35.463.500,00	(1.091.400,00)	97,01	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	36.554.900,00	35.463.500,00	(1.091.400,00)	97,01	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.554.900,00	35.463.500,00	(1.091.400,00)	97,01	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.2.03		PENYEDIAAN DAN PENYALURAN BAHAN BAKU INDUSTRI PENGOLAHAN IKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/ KOTA	108.509.987,00	107.739.000,00	(770.987,00)	99,28	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.2.03.0001		PENINGKATAN KETERSEDIAAN IKAN UNTUK KONSUMSI DAN USAHA PENGOLAHAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	48.509.987,00	47.739.000,00	(770.987,00)	98,41	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	36.509.987,00	35.739.000,00	(770.987,00)	97,88	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.509.987,00	35.739.000,00	(770.987,00)	97,88	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.2.03.0001	5.2	BELANJA MODAL	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.2.03.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.2.03.0002		PEMBERIAN FASILITAS BAGI PELAKU USAHA PERIKANAN SKALA MIKRO DAN KECIL DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.2.03.0002	5.1.05	Belanja Hibah	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00	
				JUMLAH BELANJA	3.708.119.769,17	3.645.142.309,00	(62.977.460,17)	98,30	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(3.608.119.769,17)	(3.570.082.309,00)	38.037.460,17	98,94	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(3.608.119.769,17)	(3.570.082.309,00)	38.037.460,17	98,94	

MAMUJU TENGAH, 2026
BUPATI KAB. MAMUJU TENGAH

H. ARSAL ARAS

Lampiran I.3 : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah
Nomor : -
Tanggal : 2026

PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : BAGIAN PEMERINTAHAN

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001		5	BELANJA DAERAH	496.864.567,00	490.195.517,00	(6.669.050,00)	98,65	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.02		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	496.864.567,00	490.195.517,00	(6.669.050,00)	98,65	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.02.2.01		ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN	471.799.435,00	465.339.812,00	(6.459.623,00)	98,63	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.02.2.01.0001		PENATAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	201.694.194,00	199.694.117,00	(2.000.077,00)	99,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	201.694.194,00	199.694.117,00	(2.000.077,00)	99,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	201.694.194,00	199.694.117,00	(2.000.077,00)	99,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.02.2.01.0002		PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	60.225.708,00	58.977.634,00	(1.248.074,00)	97,92	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	60.225.708,00	58.977.634,00	(1.248.074,00)	97,92	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.225.708,00	58.977.634,00	(1.248.074,00)	97,92	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.02.2.01.0003		FASILITASI PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH	209.879.533,00	206.668.061,00	(3.211.472,00)	98,46	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	209.879.533,00	206.668.061,00	(3.211.472,00)	98,46	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	209.879.533,00	206.668.061,00	(3.211.472,00)	98,46	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.02.2.04		FASILITASI KERJA SAMA DAERAH	25.065.132,00	24.855.705,00	(209.427,00)	99,16	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.02.2.04.0001		FASILITASI KERJA SAMA DALAM NEGERI	24.264.462,00	24.055.705,00	(208.757,00)	99,13	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.02.2.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	24.264.462,00	24.055.705,00	(208.757,00)	99,13	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.02.2.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.264.462,00	24.055.705,00	(208.757,00)	99,13	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.02.2.04.0003		EVALUASI PELAKSANAAN KERJA SAMA	800.670,00	800.000,00	(670,00)	99,91	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.02.2.04.0003	5.1	BELANJA OPERASI	800.670,00	800.000,00	(670,00)	99,91	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.02.2.04.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	800.670,00	800.000,00	(670,00)	99,91	
				JUMLAH BELANJA	496.864.567,00	490.195.517,00	(6.669.050,00)	98,65	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(496.864.567,00)	(490.195.517,00)	6.669.050,00	98,65	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(496.864.567,00)	(490.195.517,00)	6.669.050,00	98,65	

MAMUJU TENGAH, 2026
BUPATI KAB. MAMUJU TENGAH

H. ARSAL ARAS

Lampiran I.3 : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah
Nomor : -
Tanggal : 2026

PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : BAGIAN HUKUM DAN HAM

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002		5	BELANJA DAERAH	313.231.979,00	290.633.800,00	(22.598.179,00)	92,78	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.02		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	313.231.979,00	290.633.800,00	(22.598.179,00)	92,78	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.02.2.03		FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	313.231.979,00	290.633.800,00	(22.598.179,00)	92,78	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.02.2.03.0001		FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH	161.161.268,00	148.699.200,00	(12.462.068,00)	92,26	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.02.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	161.161.268,00	148.699.200,00	(12.462.068,00)	92,26	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.02.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	161.161.268,00	148.699.200,00	(12.462.068,00)	92,26	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.02.2.03.0002		FASILITASI BANTUAN HUKUM	55.092.654,00	54.982.300,00	(110.354,00)	99,79	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.02.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	55.092.654,00	54.982.300,00	(110.354,00)	99,79	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.092.654,00	54.982.300,00	(110.354,00)	99,79	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.02.2.03.0003		PENDOKUMENTASIAN PRODUK HUKUM DAN PENGELOLAAN INFORMASI HUKUM	96.978.057,00	86.952.300,00	(10.025.757,00)	89,66	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.02.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	96.978.057,00	86.952.300,00	(10.025.757,00)	89,66	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.02.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	96.978.057,00	86.952.300,00	(10.025.757,00)	89,66	
				JUMLAH BELANJA	313.231.979,00	290.633.800,00	(22.598.179,00)	92,78	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(313.231.979,00)	(290.633.800,00)	22.598.179,00	92,78	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(313.231.979,00)	(290.633.800,00)	22.598.179,00	92,78	

MAMUJU TENGAH, 2026
BUPATI KAB. MAMUJU TENGAH

H. ARSAL ARAS

Lampiran I.3 : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah
Nomor : -
Tanggal : 2026

PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003		5	BELANJA DAERAH	2.979.902.616,00	2.341.419.105,00	(638.483.511,00)	78,57	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.02		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	2.979.902.616,00	2.341.419.105,00	(638.483.511,00)	78,57	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.02.2.02		PELAKSANAAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	2.979.902.616,00	2.341.419.105,00	(638.483.511,00)	78,57	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.02.2.02.0001		FASILITASI PENGELOLAAN BINA MENTAL SPIRITUAL	2.659.432.954,00	2.031.932.954,00	(627.500.000,00)	76,40	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.659.432.954,00	2.031.932.954,00	(627.500.000,00)	76,40	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.006.432.954,00	706.432.954,00	(300.000.000,00)	70,19	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.02.2.02.0001	5.1.05	Belanja Hibah	1.653.000.000,00	1.325.500.000,00	(327.500.000,00)	80,18	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.02.2.02.0002		PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN SOSIAL	235.581.280,00	234.994.780,00	(586.500,00)	99,75	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	235.581.280,00	234.994.780,00	(586.500,00)	99,75	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	235.581.280,00	234.994.780,00	(586.500,00)	99,75	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.02.2.02.0003		PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	84.888.382,00	74.491.371,00	(10.397.011,00)	87,75	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	84.888.382,00	74.491.371,00	(10.397.011,00)	87,75	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.888.382,00	74.491.371,00	(10.397.011,00)	87,75	
				JUMLAH BELANJA	2.979.902.616,00	2.341.419.105,00	(638.483.511,00)	78,57	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(2.979.902.616,00)	(2.341.419.105,00)	638.483.511,00	78,57	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(2.979.902.616,00)	(2.341.419.105,00)	638.483.511,00	78,57	

MAMUJU TENGAH, 2026
BUPATI KAB. MAMUJU TENGAH

H. ARSAL ARAS

Lampiran I.3 : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah
Nomor : -
Tanggal : 2026

PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004		5	BELANJA DAERAH	350.062.766,00	343.245.940,00	(6.816.826,00)	98,05	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.03		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	350.062.766,00	343.245.940,00	(6.816.826,00)	98,05	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.03.2.01		PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN	307.553.262,00	302.573.940,00	(4.979.322,00)	98,38	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.03.2.01.0001		KOORDINASI, SINKRONISASI, MONITORING DAN EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN BUMD DAN BLUD	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.03.2.01.0002		PENGENDALIAN DAN DISTRIBUSI PEREKONOMIAN	237.930.284,00	237.388.040,00	(542.244,00)	99,77	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	237.930.284,00	237.388.040,00	(542.244,00)	99,77	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	237.930.284,00	237.388.040,00	(542.244,00)	99,77	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.03.2.01.0003		PERENCANAAN DAN PENGAWASAN EKONOMI MIKRO KECIL	65.122.978,00	60.685.900,00	(4.437.078,00)	93,18	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	58.872.978,00	54.435.900,00	(4.437.078,00)	92,46	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.872.978,00	54.435.900,00	(4.437.078,00)	92,46	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.03.2.01.0003	5.2	BELANJA MODAL	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.03.2.01.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.03.2.04		PEMANTAUAN KEBIJAKAN SUMBER DAYA ALAM	42.509.504,00	40.672.000,00	(1.837.504,00)	95,67	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.03.2.04.0003		KOORDINASI, SINKRONISASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN ENERGI DAN AIR	42.509.504,00	40.672.000,00	(1.837.504,00)	95,67	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.03.2.04.0003	5.1	BELANJA OPERASI	32.009.504,00	30.172.000,00	(1.837.504,00)	94,25	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.03.2.04.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.009.504,00	30.172.000,00	(1.837.504,00)	94,25	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.03.2.04.0003	5.2	BELANJA MODAL	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.03.2.04.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00	
				JUMLAH BELANJA	350.062.766,00	343.245.940,00	(6.816.826,00)	98,05	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(350.062.766,00)	(343.245.940,00)	6.816.826,00	98,05	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(350.062.766,00)	(343.245.940,00)	6.816.826,00	98,05	

MAMUJU TENGAH, 2026

BUPATI KAB. MAMUJU TENGAH

H. ARSAL ARAS

Lampiran I.3 : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah
Nomor : -
Tanggal : 2026

PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005		5	BELANJA DAERAH	255.049.354,00	254.174.007,00	(875.347,00)	99,65	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.03		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	255.049.354,00	254.174.007,00	(875.347,00)	99,65	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.03.2.02		PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	255.049.354,00	254.174.007,00	(875.347,00)	99,65	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.03.2.02.0001		FASILITASI PENYUSUNAN PROGRAM PEMBANGUNAN	173.213.616,00	172.779.672,00	(433.944,00)	99,74	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.03.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	173.213.616,00	172.779.672,00	(433.944,00)	99,74	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.03.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	173.213.616,00	172.779.672,00	(433.944,00)	99,74	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.03.2.02.0002		PENGENDALIAN DAN EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN	58.298.500,00	58.059.851,00	(238.649,00)	99,59	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	43.298.500,00	43.059.851,00	(238.649,00)	99,44	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.298.500,00	43.059.851,00	(238.649,00)	99,44	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.03.2.02.0002	5.2	BELANJA MODAL	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.03.2.02.0002	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.03.2.02.0003		PENGELOLAAN EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	23.537.238,00	23.334.484,00	(202.754,00)	99,13	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	23.537.238,00	23.334.484,00	(202.754,00)	99,13	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.537.238,00	23.334.484,00	(202.754,00)	99,13	
				JUMLAH BELANJA	255.049.354,00	254.174.007,00	(875.347,00)	99,65	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(255.049.354,00)	(254.174.007,00)	875.347,00	99,65	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(255.049.354,00)	(254.174.007,00)	875.347,00	99,65	

MAMUJU TENGAH, 2026
BUPATI KAB. MAMUJU TENGAH

H. ARSAL ARAS

Lampiran I.3 : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah
Nomor : -
Tanggal : 2026

PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006		5	BELANJA DAERAH	815.415.580,00	791.375.887,00	(24.039.693,00)	97,05	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.03		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	815.415.580,00	791.375.887,00	(24.039.693,00)	97,05	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.03.2.03		PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	815.415.580,00	791.375.887,00	(24.039.693,00)	97,05	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.03.2.03.0001		PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	317.275.458,00	301.259.000,00	(16.016.458,00)	94,95	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.03.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	272.275.458,00	256.259.000,00	(16.016.458,00)	94,11	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.03.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	272.275.458,00	256.259.000,00	(16.016.458,00)	94,11	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.03.2.03.0001	5.2	BELANJA MODAL	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.03.2.03.0001	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.03.2.03.0002		PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK	375.681.493,00	374.942.487,00	(739.006,00)	99,80	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.03.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	375.681.493,00	374.942.487,00	(739.006,00)	99,80	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.03.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	375.681.493,00	374.942.487,00	(739.006,00)	99,80	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.03.2.03.0003		PEMBINAAN DAN ADVOKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA	122.458.629,00	115.174.400,00	(7.284.229,00)	94,05	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.03.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	122.458.629,00	115.174.400,00	(7.284.229,00)	94,05	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.03.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	122.458.629,00	115.174.400,00	(7.284.229,00)	94,05	
				JUMLAH BELANJA	815.415.580,00	791.375.887,00	(24.039.693,00)	97,05	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(815.415.580,00)	(791.375.887,00)	24.039.693,00	97,05	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(815.415.580,00)	(791.375.887,00)	24.039.693,00	97,05	

MAMUJU TENGAH, 2026
BUPATI KAB. MAMUJU TENGAH

H. ARSAL ARAS

Lampiran I.3 : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah
Nomor : -
Tanggal : 2026

PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : BAGIAN UMUM

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	4.01.0.00.0.00.01.0007		4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	24.865.000,00	24.865.000,00	0,00	
	4.01.0.00.0.00.01.0007		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	24.865.000,00	24.865.000,00	0,00	
	4.01.0.00.0.00.01.0007		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	24.865.000,00	24.865.000,00	0,00	
				JUMLAH PENDAPATAN	0,00	24.865.000,00	24.865.000,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007		5	BELANJA DAERAH	25.638.216.119,60	25.448.208.712,00	(190.007.407,60)	99,25	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	25.638.216.119,60	25.448.208.712,00	(190.007.407,60)	99,25	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	24.438.460,00	24.436.000,00	(2.460,00)	99,98	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	10.221.960,00	10.221.000,00	(960,00)	99,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	10.221.960,00	10.221.000,00	(960,00)	99,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.221.960,00	10.221.000,00	(960,00)	99,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.01.0004		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	6.371.960,00	6.371.000,00	(960,00)	99,98	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	6.371.960,00	6.371.000,00	(960,00)	99,98	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.371.960,00	6.371.000,00	(960,00)	99,98	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	7.844.540,00	7.844.000,00	(540,00)	99,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	7.844.540,00	7.844.000,00	(540,00)	99,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.844.540,00	7.844.000,00	(540,00)	99,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.945.258.848,60	4.869.529.782,00	(75.729.066,60)	98,46	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	4.722.257.179,60	4.646.528.782,00	(75.728.397,60)	98,39	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.722.257.179,60	4.646.528.782,00	(75.728.397,60)	98,39	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	4.543.677.179,60	4.467.948.782,00	(75.728.397,60)	98,33	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	178.580.000,00	178.580.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	223.001.669,00	223.001.000,00	(669,00)	99,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	223.001.669,00	223.001.000,00	(669,00)	99,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	223.001.669,00	223.001.000,00	(669,00)	99,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.03		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	460.798.145,00	460.782.350,00	(15.795,00)	99,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.03.0002		PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	369.050.000,00	369.034.350,00	(15.650,00)	99,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	369.050.000,00	369.034.350,00	(15.650,00)	99,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	369.050.000,00	369.034.350,00	(15.650,00)	99,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.03.0006		PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	91.748.145,00	91.748.000,00	(145,00)	99,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.03.0006	5.1	BELANJA OPERASI	91.748.145,00	91.748.000,00	(145,00)	99,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.03.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.748.145,00	91.748.000,00	(145,00)	99,99	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	943.120.000,00	943.120.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.05.0003		PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	943.120.000,00	943.120.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.05.0003	5.1	BELANJA OPERASI	943.120.000,00	943.120.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.05.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	943.120.000,00	943.120.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	6.081.987.865,00	6.081.090.478,00	(897.387,00)	99,98	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	346.045.695,00	346.045.000,00	(695,00)	99,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	346.045.695,00	346.045.000,00	(695,00)	99,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	346.045.695,00	346.045.000,00	(695,00)	99,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	1.133.758.000,00	1.132.999.600,00	(758.400,00)	99,93	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.133.758.000,00	1.132.999.600,00	(758.400,00)	99,93	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.133.758.000,00	1.132.999.600,00	(758.400,00)	99,93	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	298.185.000,00	298.185.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	298.185.000,00	298.185.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	298.185.000,00	298.185.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	1.498.550.000,00	1.498.532.481,00	(17.519,00)	99,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	1.498.550.000,00	1.498.532.481,00	(17.519,00)	99,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.498.550.000,00	1.498.532.481,00	(17.519,00)	99,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	2.805.449.170,00	2.805.328.397,00	(120.773,00)	99,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	2.805.449.170,00	2.805.328.397,00	(120.773,00)	99,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.805.449.170,00	2.805.328.397,00	(120.773,00)	99,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.251.947.350,00	2.241.457.500,00	(10.489.850,00)	99,53	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.07.0002		PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	1.487.085.000,00	1.477.955.000,00	(9.130.000,00)	99,38	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.07.0002	5.2	BELANJA MODAL	1.487.085.000,00	1.477.955.000,00	(9.130.000,00)	99,38	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.07.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.487.085.000,00	1.477.955.000,00	(9.130.000,00)	99,38	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	201.550.000,00	201.400.000,00	(150.000,00)	99,92	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	201.550.000,00	201.400.000,00	(150.000,00)	99,92	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	201.550.000,00	201.400.000,00	(150.000,00)	99,92	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	563.312.350,00	562.102.500,00	(1.209.850,00)	99,78	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.07.0006	5.1	BELANJA OPERASI	106.300.000,00	106.300.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.07.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	106.300.000,00	106.300.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	457.012.350,00	455.802.500,00	(1.209.850,00)	99,73	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	457.012.350,00	455.802.500,00	(1.209.850,00)	99,73	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.309.560.137,00	3.236.789.052,00	(72.771.085,00)	97,80	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	43.876.612,00	42.873.000,00	(1.003.612,00)	97,71	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	43.876.612,00	42.873.000,00	(1.003.612,00)	97,71	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.876.612,00	42.873.000,00	(1.003.612,00)	97,71	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	888.697.000,00	816.956.692,00	(71.740.308,00)	91,92	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	888.697.000,00	816.956.692,00	(71.740.308,00)	91,92	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	888.697.000,00	816.956.692,00	(71.740.308,00)	91,92	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.08.0003		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	1.655.615.400,00	1.655.610.400,00	(5.000,00)	99,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.655.615.400,00	1.655.610.400,00	(5.000,00)	99,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.655.615.400,00	1.655.610.400,00	(5.000,00)	99,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	721.371.125,00	721.348.960,00	(22.165,00)	99,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	721.371.125,00	721.348.960,00	(22.165,00)	99,99	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	721.371.125,00	721.348.960,00	(22.165,00)	99,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.220.202.000,00	3.207.651.726,00	(12.550.274,00)	99,61	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	1.112.975.000,00	1.109.222.226,00	(3.752.774,00)	99,66	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.112.975.000,00	1.109.222.226,00	(3.752.774,00)	99,66	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.112.975.000,00	1.109.222.226,00	(3.752.774,00)	99,66	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	705.195.000,00	704.333.500,00	(861.500,00)	99,87	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	705.195.000,00	704.333.500,00	(861.500,00)	99,87	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	705.195.000,00	704.333.500,00	(861.500,00)	99,87	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	1.402.032.000,00	1.394.096.000,00	(7.936.000,00)	99,43	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	1.402.032.000,00	1.394.096.000,00	(7.936.000,00)	99,43	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.402.032.000,00	1.394.096.000,00	(7.936.000,00)	99,43	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.11		ADMINISTRASI KEUANGAN DAN OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	982.743.314,00	968.354.674,00	(14.388.640,00)	98,53	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.11.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	219.973.314,00	207.083.174,00	(12.890.140,00)	94,14	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.11.0001	5.1	BELANJA OPERASI	219.973.314,00	207.083.174,00	(12.890.140,00)	94,14	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.11.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	219.973.314,00	207.083.174,00	(12.890.140,00)	94,14	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.11.0002		PENYEDIAAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT KELENGKAPAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	232.770.000,00	231.687.000,00	(1.083.000,00)	99,53	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.11.0002	5.1	BELANJA OPERASI	232.770.000,00	231.687.000,00	(1.083.000,00)	99,53	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.11.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	232.770.000,00	231.687.000,00	(1.083.000,00)	99,53	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.11.0003		PELAKSANAAN MEDICAL CHECK UP KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	130.000.000,00	129.984.500,00	(15.500,00)	99,98	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.11.0003	5.1	BELANJA OPERASI	130.000.000,00	129.984.500,00	(15.500,00)	99,98	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.11.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	130.000.000,00	129.984.500,00	(15.500,00)	99,98	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.11.0004		PENYEDIAAN DANA PENUNJANG OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	400.000.000,00	399.600.000,00	(400.000,00)	99,90	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.11.0004	5.1	BELANJA OPERASI	400.000.000,00	399.600.000,00	(400.000,00)	99,90	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.11.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	400.000.000,00	399.600.000,00	(400.000,00)	99,90	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.12		FASILITASI KERUMAHTANGGAAN SEKRETARIAT DAERAH	3.418.160.000,00	3.414.997.150,00	(3.162.850,00)	99,90	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.12.0001		PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA KEPALA DAERAH	1.968.150.000,00	1.966.231.150,00	(1.918.850,00)	99,90	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.12.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.663.400.000,00	1.663.379.000,00	(21.000,00)	99,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.12.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.663.400.000,00	1.663.379.000,00	(21.000,00)	99,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.12.0001	5.2	BELANJA MODAL	304.750.000,00	302.852.150,00	(1.897.850,00)	99,37	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.12.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	304.750.000,00	302.852.150,00	(1.897.850,00)	99,37	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.12.0002		PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA WAKIL KEPALA DAERAH	1.450.010.000,00	1.448.766.000,00	(1.244.000,00)	99,91	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.12.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.342.150.000,00	1.342.144.000,00	(6.000,00)	99,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.12.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.342.150.000,00	1.342.144.000,00	(6.000,00)	99,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.12.0002	5.2	BELANJA MODAL	107.860.000,00	106.622.000,00	(1.238.000,00)	98,85	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.12.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	107.860.000,00	106.622.000,00	(1.238.000,00)	98,85	
				JUMLAH BELANJA	25.638.216.119,60	25.448.208.712,00	(190.007.407,60)	99,25	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(25.638.216.119,60)	(25.423.343.712,00)	214.872.407,60	99,16	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(25.638.216.119,60)	(25.423.343.712,00)	214.872.407,60	99,16	

MAMUJU TENGAH, 2026

BUPATI KAB. MAMUJU TENGAH

H. ARSAL ARAS

Lampiran I.3 : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah
Nomor : -
Tanggal : 2026

PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008		5	BELANJA DAERAH	982.584.884,00	976.898.696,00	(5.686.188,00)	99,42	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	982.584.884,00	976.898.696,00	(5.686.188,00)	99,42	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.13		PENATAAN ORGANISASI	982.584.884,00	976.898.696,00	(5.686.188,00)	99,42	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.13.0001		PENGELOLAAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN	102.838.344,00	102.837.818,00	(526,00)	99,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.13.0001	5.1	BELANJA OPERASI	102.838.344,00	102.837.818,00	(526,00)	99,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.13.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.838.344,00	102.837.818,00	(526,00)	99,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.13.0002		FASILITASI PELAYANAN PUBLIK DAN TATA LAKSANA	111.367.950,00	111.367.878,00	(72,00)	99,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.13.0002	5.1	BELANJA OPERASI	111.367.950,00	111.367.878,00	(72,00)	99,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.13.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	111.367.950,00	111.367.878,00	(72,00)	99,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.13.0004		MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN TATA LAKSANA	109.088.424,00	103.588.000,00	(5.500.424,00)	94,95	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.13.0004	5.1	BELANJA OPERASI	109.088.424,00	103.588.000,00	(5.500.424,00)	94,95	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.13.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	109.088.424,00	103.588.000,00	(5.500.424,00)	94,95	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.13.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH	659.290.166,00	659.105.000,00	(185.166,00)	99,97	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.13.0005	5.1	BELANJA OPERASI	509.290.166,00	509.255.000,00	(35.166,00)	99,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.13.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	509.290.166,00	509.255.000,00	(35.166,00)	99,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.13.0005	5.2	BELANJA MODAL	150.000.000,00	149.850.000,00	(150.000,00)	99,90	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.13.0005	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	150.000.000,00	149.850.000,00	(150.000,00)	99,90	
				JUMLAH BELANJA	982.584.884,00	976.898.696,00	(5.686.188,00)	99,42	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(982.584.884,00)	(976.898.696,00)	5.686.188,00	99,42	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(982.584.884,00)	(976.898.696,00)	5.686.188,00	99,42	

MAMUJU TENGAH, 2026
BUPATI KAB. MAMUJU TENGAH

H. ARSAL ARAS

Lampiran I.3 : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah
Nomor : -
Tanggal : 2026

PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009		5	BELANJA DAERAH	433.883.081,00	428.660.196,00	(5.222.885,00)	98,79	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	433.883.081,00	428.660.196,00	(5.222.885,00)	98,79	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.14		PELAKSANAAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	433.883.081,00	428.660.196,00	(5.222.885,00)	98,79	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.14.0001		FASILITASI KEPROTOKOLAN	242.985.488,00	237.828.196,00	(5.157.292,00)	97,87	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.14.0001	5.1	BELANJA OPERASI	242.985.488,00	237.828.196,00	(5.157.292,00)	97,87	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.14.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	242.985.488,00	237.828.196,00	(5.157.292,00)	97,87	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.14.0002		FASILITASI KOMUNIKASI PIMPINAN	80.280.000,00	80.275.000,00	(5.000,00)	99,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.14.0002	5.1	BELANJA OPERASI	80.280.000,00	80.275.000,00	(5.000,00)	99,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.14.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.280.000,00	80.275.000,00	(5.000,00)	99,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.14.0003		PENDOKUMENTASIAN TUGAS PIMPINAN	110.617.593,00	110.557.000,00	(60.593,00)	99,94	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.14.0003	5.1	BELANJA OPERASI	110.617.593,00	110.557.000,00	(60.593,00)	99,94	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.14.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.617.593,00	110.557.000,00	(60.593,00)	99,94	
				JUMLAH BELANJA	433.883.081,00	428.660.196,00	(5.222.885,00)	98,79	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(433.883.081,00)	(428.660.196,00)	5.222.885,00	98,79	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(433.883.081,00)	(428.660.196,00)	5.222.885,00	98,79	

MAMUJU TENGAH, 2026
BUPATI KAB. MAMUJU TENGAH

H. ARSAL ARAS

Lampiran I.3 : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah
Nomor : -
Tanggal : 2026

PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : SEKRETARIAT DPRD
Organisasi : SEKRETARIAT DPRD

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	18.214.860.536,00	17.877.589.731,00	(337.270.805,00)	98,14	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.355.530.492,00	14.033.138.742,00	(322.391.750,00)	97,75	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	38.649.959,00	38.620.907,00	(29.052,00)	99,92	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	2.767.799,00	2.751.000,00	(16.799,00)	99,39	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.767.799,00	2.751.000,00	(16.799,00)	99,39	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.767.799,00	2.751.000,00	(16.799,00)	99,39	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	7.506.253,00	7.506.253,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	7.506.253,00	7.506.253,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.506.253,00	7.506.253,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01.0003		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	7.612.473,00	7.612.473,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	7.612.473,00	7.612.473,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.612.473,00	7.612.473,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01.0004		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	7.631.253,00	7.619.000,00	(12.253,00)	99,83	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	7.631.253,00	7.619.000,00	(12.253,00)	99,83	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.631.253,00	7.619.000,00	(12.253,00)	99,83	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	7.000.010,00	7.000.010,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	7.000.010,00	7.000.010,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.000.010,00	7.000.010,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	6.132.171,00	6.132.171,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	6.132.171,00	6.132.171,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.132.171,00	6.132.171,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.771.374.298,68	1.640.026.419,00	(131.347.879,68)	92,58	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.764.143.045,68	1.632.795.166,00	(131.347.879,68)	92,55	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.764.143.045,68	1.632.795.166,00	(131.347.879,68)	92,55	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.736.973.045,68	1.605.801.932,00	(131.171.113,68)	92,44	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.170.000,00	26.993.234,00	(176.766,00)	99,34	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	7.231.253,00	7.231.253,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	7.231.253,00	7.231.253,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.231.253,00	7.231.253,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	805.743.000,00	791.455.300,00	(14.287.700,00)	98,22	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.05.0001		PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA DISIPLIN PEGAWAI	234.600.000,00	232.000.000,00	(2.600.000,00)	98,89	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.05.0001	5.1	BELANJA OPERASI	234.600.000,00	232.000.000,00	(2.600.000,00)	98,89	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.05.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	234.600.000,00	232.000.000,00	(2.600.000,00)	98,89	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.05.0002		PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	236.000.000,00	233.000.000,00	(3.000.000,00)	98,72	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	236.000.000,00	233.000.000,00	(3.000.000,00)	98,72	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	236.000.000,00	233.000.000,00	(3.000.000,00)	98,72	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.05.0011		BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	335.143.000,00	326.455.300,00	(8.687.700,00)	97,40	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.05.0011	5.1	BELANJA OPERASI	335.143.000,00	326.455.300,00	(8.687.700,00)	97,40	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.05.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	335.143.000,00	326.455.300,00	(8.687.700,00)	97,40	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.367.547.580,32	1.324.612.184,00	(42.935.396,32)	96,86	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	9.810.990,00	9.809.990,00	(1.000,00)	99,98	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	9.810.990,00	9.809.990,00	(1.000,00)	99,98	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.810.990,00	9.809.990,00	(1.000,00)	99,98	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	576.465.000,00	535.075.001,00	(41.389.999,00)	92,82	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.150.000,00	0,00	(2.150.000,00)	0,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.150.000,00	0,00	(2.150.000,00)	0,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	574.315.000,00	535.075.001,00	(39.239.999,00)	93,16	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	574.315.000,00	535.075.001,00	(39.239.999,00)	93,16	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	3.399.000,00	3.399.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	3.399.000,00	3.399.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.399.000,00	3.399.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	85.998.240,32	85.996.345,00	(1.895,32)	99,99	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	85.998.240,32	85.996.345,00	(1.895,32)	99,99	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.998.240,32	85.996.345,00	(1.895,32)	99,99	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	591.485.000,00	590.139.000,00	(1.346.000,00)	99,77	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	591.485.000,00	590.139.000,00	(1.346.000,00)	99,77	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	591.485.000,00	590.139.000,00	(1.346.000,00)	99,77	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	100.389.350,00	100.192.848,00	(196.502,00)	99,80	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	100.389.350,00	100.192.848,00	(196.502,00)	99,80	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.389.350,00	100.192.848,00	(196.502,00)	99,80	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	793.954.756,00	791.074.135,00	(2.880 621,00)	99,63	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	7.538.852,00	7.538.852,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	7.538.852,00	7.538.852,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.538.852,00	7.538.852,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	254.195.904,00	254.195.283,00	(621,00)	99,99	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	254.195.904,00	254.195.283,00	(621,00)	99,99	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	254.195.904,00	254.195.283,00	(621,00)	99,99	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	532.220.000,00	529.340.000,00	(2.880.000,00)	99,45	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	532.220.000,00	529.340.000,00	(2.880 000,00)	99,45	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	532.220.000,00	529.340.000,00	(2.880.000,00)	99,45	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	332.431.890,00	332.174.600,00	(257.290,00)	99,92	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	228.325.900,00	228.124.600,00	(201.300,00)	99,91	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	228.325.900,00	228.124.600,00	(201.300,00)	99,91	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	228.325.900,00	228.124.600,00	(201.300,00)	99,91	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0007		PEMELIHARAAN ASET TETAP LAINNYA	104.105.990,00	104.050.000,00	(55.990,00)	99,94	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0007	5.1	BELANJA OPERASI	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0007	5.2	BELANJA MODAL	63.305.990,00	63.250.000,00	(55.990,00)	99,91	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0007	5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.100.000,00	8 100.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0007	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	55.205.990,00	55.150.000,00	(55.990,00)	99,89	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15		LAYANAN KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN DPRD	7.853.967.993,00	7.742.534.372,00	(111.433.621,00)	98,58	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0001		PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DPRD	7.853.967.993,00	7.742.534.372,00	(111.433.621,00)	98,58	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0001	5.1	BELANJA OPERASI	7.853.967.993,00	7.742.534.372,00	(111.433.621,00)	98,58	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	7.853.967.993,00	7.742.534.372,00	(111.433.621,00)	98,58	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16		LAYANAN ADMINISTRASI DPRD	1.391.861.015,00	1.372.640.825,00	(19.220.190,00)	98,61	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16.0003		FASILITASI RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DPRD	203.359.425,00	199.799.425,00	(3.560.000,00)	98,24	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16.0003	5.1	BELANJA OPERASI	203.359.425,00	199.799.425,00	(3.560.000,00)	98,24	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	203.359.425,00	199.799.425,00	(3.560.000,00)	98,24	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16.0004		PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA DPRD	1.188.501.590,00	1.172.841.400,00	(15.660.190,00)	98,68	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16.0004	5.1	BELANJA OPERASI	943.766.590,00	942.806.400,00	(960.190,00)	99,89	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	943.766.590,00	942.806.400,00	(960.190,00)	99,89	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16.0004	5.2	BELANJA MODAL	244.735.000,00	230.035.000,00	(14.700.000,00)	93,99	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16.0004	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	244.735.000,00	230.035.000,00	(14.700.000,00)	93,99	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	3.859.330.044,00	3.844.450.989,00	(14.879.055,00)	99,61	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01		PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD	260.664.342,00	260.564.530,00	(99.812,00)	99,96	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0001		PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH	251.698.892,00	251.599.780,00	(99.112,00)	99,96	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	251.698.892,00	251.599.780,00	(99.112,00)	99,96	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	251.698.892,00	251.599.780,00	(99.112,00)	99,96	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0003		PENYELENGGARAAN KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN	8.965.450,00	8.964.750,00	(700,00)	99,99	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	8.965.450,00	8.964.750,00	(700,00)	99,99	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.965.450,00	8.964.750,00	(700,00)	99,99	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02		PEMBAHASAN KEBIJAKAN ANGGARAN	154.408.352,00	154.408.352,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0001		PEMBAHASAN KUA DAN PPAS	32.379.662,00	32.379.662,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	32.379.662,00	32.379.662,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0001	5 1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.379.662,00	32.379.662,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0002		PEMBAHASAN PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS	31.990.506,00	31.990.506,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	31.990.506,00	31.990.506,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.990.506,00	31.990.506,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0003		PEMBAHASAN APBD	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0004		PEMBAHASAN APBD PERUBAHAN	31.877.890,00	31.877.890,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	31.877.890,00	31.877.890,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.877.890,00	31.877.890,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0005		PEMBAHASAN LAPORAN SEMESTER	16.160.294,00	16.160.294,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	16.160.294,00	16.160.294,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.160.294,00	16.160.294,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0006		PEMBAHASAN PERTANGGUNGJAWABAN APBD	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0006	5.1	BELANJA OPERASI	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04		PENINGKATAN KAPASITAS DPRD	575.400.000,00	575.400.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0005		PENYEDIAAN TENAGA AHLI FRAKSI	443.400.000,00	443.400.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0005	5.1	BELANJA OPERASI	443.400.000,00	443.400.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	443.400.000,00	443.400.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0008		PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI DPRD	132.000.000,00	132.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0008	5.1	BELANJA OPERASI	132.000.000,00	132.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	132.000.000,00	132.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05		PENYERAPAN DAN PENGHIMPUNAN ASPIRASI MASYARAKAT	933.048.750,00	918.605.500,00	(14.443.250,00)	98,45	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05.0001		KUNJUNGAN KERJA DALAM DAERAH	33.594.750,00	19.151.500,00	(14.443.250,00)	57,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05.0001	5.1	BELANJA OPERASI	33.594.750,00	19.151.500,00	(14.443.250,00)	57,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.594.750,00	19.151.500,00	(14.443.250,00)	57,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05.0003		PELAKSANAAN RESES	899.454.000,00	899.454.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05.0003	5.1	BELANJA OPERASI	899.454.000,00	899.454.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	899.454.000,00	899.454.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.08		FASILITASI TUGAS DPRD	1.935.808.600,00	1.935.472.607,00	(335.993,00)	99,98	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.08.0001		KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN TUGAS DPRD	1.935.808.600,00	1.935.472.607,00	(335.993,00)	99,98	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.935.808.600,00	1.935.472.607,00	(335.993,00)	99,98	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.935.808.600,00	1.935.472.607,00	(335.993,00)	99,98	
				JUMLAH BELANJA	18.214.860.536,00	17.877.589.731,00	(337.270.805,00)	98,14	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(18.214.860.536,00)	(17.877.589.731,00)	337.270.805,00	98,14	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(18.214.860.536,00)	(17.877.589.731,00)	337.270.805,00	98,14	

MAMUJU TENGAH, 2026
BUPATI KAB. MAMUJU TENGAH

H. ARSAL ARAS

Lampiran I.3 : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah
Nomor : -
Tanggal : 2026

PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : PERENCANAAN
Organisasi : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000		5	BELANJA DAERAH	3.322.681.209,00	3.074.247.915,00	(248.433.294,00)	92,52	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.405.619.821,00	2.255.831.395,00	(149.788.426,00)	93,77	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	138.921.435,00	135.184.800,00	(3.736.635,00)	97,31	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	50.618.778,00	50.206.000,00	(412.778,00)	99,18	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	50.618.778,00	50.206.000,00	(412.778,00)	99,18	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.618.778,00	50.206.000,00	(412.778,00)	99,18	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	9.587.421,00	9.135.400,00	(452.021,00)	95,28	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	9.587.421,00	9.135.400,00	(452.021,00)	95,28	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.587.421,00	9.135.400,00	(452.021,00)	95,28	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.01.0003		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	6.969.914,00	6.787.600,00	(182.314,00)	97,38	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	6.969.914,00	6.787.600,00	(182.314,00)	97,38	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.969.914,00	6.787.600,00	(182.314,00)	97,38	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.01.0004		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	2.765.322,00	2.764.400,00	(922,00)	99,96	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	2.765.322,00	2.764.400,00	(922,00)	99,96	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.765.322,00	2.764.400,00	(922,00)	99,96	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.01.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	4.441.031,00	4.440.000,00	(1.031,00)	99,97	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	4.441.031,00	4.440.000,00	(1.031,00)	99,97	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.441.031,00	4.440.000,00	(1.031,00)	99,97	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	64.538.969,00	61.851.400,00	(2.687.569,00)	95,83	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	64.538.969,00	61.851.400,00	(2.687.569,00)	95,83	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.538.969,00	61.851.400,00	(2.687.569,00)	95,83	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.724.244.586,00	1.609.195.248,00	(115.049.338,00)	93,32	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.687.804.612,00	1.572.978.848,00	(114.825.764,00)	93,19	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.687.804.612,00	1.572.978.848,00	(114.825.764,00)	93,19	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.634.504.612,00	1.522.812.702,00	(111.691.910,00)	93,16	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.300.000,00	50.166.146,00	(3.133.854,00)	94,12	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	36.439.974,00	36.216.400,00	(223.574,00)	99,38	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	36.439.974,00	36.216.400,00	(223.574,00)	99,38	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.439.974,00	36.216.400,00	(223.574,00)	99,38	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.03		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	55.401.683,00	46.938.648,00	(8.463.035,00)	84,72	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.03.0007		PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	55.401.683,00	46.938.648,00	(8.463.035,00)	84,72	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.03.0007	5.1	BELANJA OPERASI	55.401.683,00	46.938.648,00	(8.463.035,00)	84,72	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.03.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.401.683,00	46.938.648,00	(8.463.035,00)	84,72	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	33.169.943,00	32.916.400,00	(253.543,00)	99,23	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.05.0004		KOORDINASI DAN PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN	26.049.943,00	25.826.400,00	(223.543,00)	99,14	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.05.0004	5.1	BELANJA OPERASI	26.049.943,00	25.826.400,00	(223.543,00)	99,14	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.05.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.049.943,00	25.826.400,00	(223.543,00)	99,14	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	7.120.000,00	7.090.000,00	(30.000,00)	99,57	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	7.120.000,00	7.090.000,00	(30.000,00)	99,57	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.120.000,00	7.090.000,00	(30.000,00)	99,57	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	217.910.100,00	213.688.207,00	(4.221.893,00)	98,06	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	1.629.950,00	1.625.000,00	(4.950,00)	99,69	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.629.950,00	1.625.000,00	(4.950,00)	99,69	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.629.950,00	1.625.000,00	(4.950,00)	99,69	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	46.766.800,00	45.940.000,00	(826.800,00)	98,23	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	5.766.800,00	4.940.000,00	(826.800,00)	85,66	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.766.800,00	4.940.000,00	(826.800,00)	85,66	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	41.000.000,00	41.000.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Perulatan dan Mesin	41.000.000,00	41.000.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	35.650.000,00	35.620.000,00	(30.000,00)	99,91	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	35.650.000,00	35.620.000,00	(30.000,00)	99,91	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.650.000,00	35.620.000,00	(30.000,00)	99,91	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	49.250.000,00	48.050.000,00	(1.200.000,00)	97,56	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	49.250.000,00	48.050.000,00	(1.200.000,00)	97,56	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.250.000,00	48.050.000,00	(1.200.000,00)	97,56	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	84.613.350,00	82.453.207,00	(2.160.143,00)	97,44	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	84.613.350,00	82.453.207,00	(2.160.143,00)	97,44	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.613.350,00	82.453.207,00	(2.160.143,00)	97,44	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.07.0001		PENGADAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.07.0001	5.1	BELANJA OPERASI	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.07.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	179.258.324,00	163.080.892,00	(16.177.432,00)	90,97	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	75.134.124,00	61.237.800,00	(13.896.324,00)	81,50	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	75.134.124,00	61.237.800,00	(13.896.324,00)	81,50	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.134.124,00	61.237.800,00	(13.896.324,00)	81,50	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	20.724.200,00	19.443.092,00	(1.281.108,00)	93,81	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	20.724.200,00	19.443.092,00	(1.281.108,00)	93,81	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.724.200,00	19.443.092,00	(1.281.108,00)	93,81	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	83.400.000,00	82.400.000,00	(1.000.000,00)	98,80	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	83.400.000,00	82.400.000,00	(1.000.000,00)	98,80	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.400.000,00	82.400.000,00	(1.000.000,00)	98,80	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	40.713.750,00	38.827.200,00	(1.886.550,00)	95,36	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	20.115.000,00	18.319.200,00	(1.795.800,00)	91,07	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	20.115.000,00	18.319.200,00	(1.795.800,00)	91,07	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.115.000,00	18.319.200,00	(1.795.800,00)	91,07	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	20.598.750,00	20.508.000,00	(90.750,00)	99,55	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	20.598.750,00	20.508.000,00	(90.750,00)	99,55	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.598.750,00	20.508.000,00	(90.750,00)	99,55	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	589.729.521,00	539.751.922,00	(49.977.599,00)	91,52	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.01		PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN	448.148.277,00	402.860.422,00	(45.287.855,00)	89,89	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.01.0001		ANALISIS KONDISI DAERAH, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH	358.860.000,00	320.945.000,00	(37.915.000,00)	89,43	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	358.860.000,00	320.945.000,00	(37.915.000,00)	89,43	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	358.860.000,00	320.945.000,00	(37.915.000,00)	89,43	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.01.0002		KOORDINASI PENELAAHAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN DOKUMEN KEBIJAKAN LAINNYA	31.014.005,00	27.325.900,00	(3.688.105,00)	88,10	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	31.014.005,00	27.325.900,00	(3.688.105,00)	88,10	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.014.005,00	27.325.900,00	(3.688.105,00)	88,10	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.01.0003		PELAKSANAAN KONSULTASI PUBLIK	11.000.616,00	10.998.100,00	(2.516,00)	99,97	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	11.000.616,00	10.998.100,00	(2.516,00)	99,97	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.000.616,00	10.998.100,00	(2.516,00)	99,97	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.01.0004		KOORDINASI PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT DAERAH	13.125.571,00	13.065.300,00	(60.271,00)	99,54	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	13.125.571,00	13.065.300,00	(60.271,00)	99,54	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.125.571,00	13.065.300,00	(60.271,00)	99,54	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.01.0005		PELAKSANAAN MUSRENBANG KABUPATEN/KOTA	13.851.093,00	13.130.822,00	(720.271,00)	94,79	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	13.851.093,00	13.130.822,00	(720.271,00)	94,79	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.851.093,00	13.130.822,00	(720.271,00)	94,79	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.01.0006		PENYIAPAN BAHAN KOORDINASI MUSRENBANG KECAMATAN	9.352.268,00	7.267.200,00	(2.085.068,00)	77,70	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	9.352.268,00	7.267.200,00	(2.085.068,00)	77,70	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.352.268,00	7.267.200,00	(2.085.068,00)	77,70	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.01.0007		KOORDINASI PENYUSUNAN DAN PENETAPAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.944.724,00	10.128.100,00	(816.624,00)	92,53	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	10.944.724,00	10.128.100,00	(816.624,00)	92,53	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.944.724,00	10.128.100,00	(816.624,00)	92,53	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.03		PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	141.581.244,00	136.891.500,00	(4.689.744,00)	96,68	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.03.0001		KOORDINASI PENGENDALIAN PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN/KOTA	36.367.487,00	33.241.200,00	(3.126.287,00)	91,40	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	36.367.487,00	33.241.200,00	(3.126.287,00)	91,40	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.367.487,00	33.241.200,00	(3.126.287,00)	91,40	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.03.0003		MONITORING, EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BERKALA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	105.213.757,00	103.650.300,00	(1.563.457,00)	98,51	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	30.213.757,00	28.725.300,00	(1.488.457,00)	95,07	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.213.757,00	28.725.300,00	(1.488.457,00)	95,07	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.03.0003	5.2	BELANJA MODAL	75.000.000,00	74.925.000,00	(75.000,00)	99,90	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.03.0003	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	75.000.000,00	74.925.000,00	(75.000,00)	99,90	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	327.331.867,00	278.664.598,00	(48.667.269,00)	85,13	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01		KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	190.109.461,00	164.573.600,00	(25.535 861,00)	86,56	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0001		KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	5.023.300,00	4.937.100,00	(86.200,00)	98,28	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.023.300,00	4.937.100,00	(86.200,00)	98,28	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.023.300,00	4.937.100,00	(86.200,00)	98,28	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0002		ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN	4.689.078,00	4.673.600,00	(15.478,00)	99,66	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	4.689.078,00	4.673.600,00	(15.478,00)	99,66	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.689.078,00	4.673.600,00	(15.478,00)	99,66	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0003		PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN	5.384.617,00	4.258.300,00	(1.126.317,00)	79,08	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	5.384.617,00	4.258.300,00	(1.126.317,00)	79,08	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.384.617,00	4.258.300,00	(1.126.317,00)	79,08	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0004		KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN	7.848.074,00	7.738.400,00	(109.674,00)	98,60	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	7.848.074,00	7.738.400,00	(109.674,00)	98,60	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.848.074,00	7.738.400,00	(109.674,00)	98,60	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0005		KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	23.998.067,00	19.800.600,00	(4.197.467,00)	82,50	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	23.998.067,00	19.800.600,00	(4.197.467,00)	82,50	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.998.067,00	19.800.600,00	(4.197.467,00)	82,50	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0006		ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA	4.085.574,00	2.060.000,00	(2.025.574,00)	50,42	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	4.085.574,00	2.060.000,00	(2.025.574,00)	50,42	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.085.574,00	2.060.000,00	(2.025.574,00)	50,42	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0007		PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA	9.780.005,00	7.529.300,00	(2.250.705,00)	76,98	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	9.780.005,00	7.529.300,00	(2.250.705,00)	76,98	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.780.005,00	7.529.300,00	(2.250.705,00)	76,98	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0008		KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA	129.300.746,00	113.576.300,00	(15.724.446,00)	87,83	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	129.300.746,00	113.576.300,00	(15.724.446,00)	87,83	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	129.300.746,00	113.576.300,00	(15.724.446,00)	87,83	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.02		KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA (SUMBER DAYA ALAM)	60.577.374,00	49.203.500,00	(11.373.874,00)	81,22	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.02.0001		KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	50.902.601,00	43.522.600,00	(7.380.001,00)	85,50	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	50.902.601,00	43.522.600,00	(7.380.001,00)	85,50	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.902.601,00	43.522.600,00	(7.380.001,00)	85,50	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.02.0005		KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG SDA (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	9.674.773,00	5.680.900,00	(3.993.873,00)	58,71	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	9.674.773,00	5.680.900,00	(3.993.873,00)	58,71	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.674.773,00	5.680.900,00	(3.993.873,00)	58,71	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.03		KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	76.645.032,00	64.887.498,00	(11.757.534,00)	84,65	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.03.0001		KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	17.693.397,00	16.271.000,00	(1.422.397,00)	91,96	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	17.693.397,00	16.271.000,00	(1.422.397,00)	91,96	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.693.397,00	16.271.000,00	(1.422.397,00)	91,96	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.03.0003		PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR	13.459.555,00	11.096.900,00	(2.362.655,00)	82,44	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	13.459.555,00	11.096.900,00	(2.362.655,00)	82,44	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.459.555,00	11.096.900,00	(2.362.655,00)	82,44	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.03.0005		KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	18.174.144,00	14.431.480,00	(3.742.664,00)	79,40	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.03.0005	5.1	BELANJA OPERASI	18.174.144,00	14.431.480,00	(3.742.664,00)	79,40	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.03.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.174.144,00	14.431.480,00	(3.742.664,00)	79,40	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.03.0007		PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN	10.479.000,00	9.233.700,00	(1.245.300,00)	88,11	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.03.0007	5.1	BELANJA OPERASI	10.479.000,00	9.233.700,00	(1.245.300,00)	88,11	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.03.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.479.000,00	9.233.700,00	(1.245.300,00)	88,11	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.03.0008		KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN	16.838.936,00	13.854.418,00	(2.984.518,00)	82,27	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.03.0008	5.1	BELANJA OPERASI	16.838.936,00	13.854.418,00	(2.984.518,00)	82,27	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.03.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.838.936,00	13.854.418,00	(2.984.518,00)	82,27	
				JUMLAH BELANJA	3.322.681.209,00	3.074.247.915,00	(248.433.294,00)	92,52	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(3.322.681.209,00)	(3.074.247.915,00)	248.433.294,00	92,52	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(3.322.681.209,00)	(3.074.247.915,00)	248.433.294,00	92,52	

MAMUJU TENGAH, 2026
BUPATI KAB. MAMUJU TENGAH

H. ARSAL ARAS

Lampiran I.3 : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah
Nomor : -
Tanggal : 2026

PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Organisasi : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000		5	BELANJA DAERAH	1.131.078.383,00	974.583.300,00	(156.495.083,00)	86,16	
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.05.02		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.131.078.383,00	974.583.300,00	(156.495.083,00)	86,16	
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.05.02.2.01		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN	995.193.528,00	839.025.800,00	(156.167.728,00)	84,30	
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.05.02.2.01.0001		FASILITASI, PELAKSANAAN DAN EVALUASI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH	65.704.405,00	61.060.100,00	(4.644.305,00)	92,93	
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.05.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	65.704.405,00	61.060.100,00	(4.644.305,00)	92,93	
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.05.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.704.405,00	61.060.100,00	(4.644.305,00)	92,93	
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.05.02.2.01.0002		FASILITASI, PELAKSANAAN DAN EVALUASI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PEMERINTAHAN UMUM	779.489.123,00	627.965.700,00	(151.523.423,00)	80,56	
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.05.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	779.489.123,00	627.965.700,00	(151.523.423,00)	80,56	
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.05.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	779.489.123,00	627.965.700,00	(151.523.423,00)	80,56	
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.05.02.2.01.0005		FASILITASI, PELAKSANAAN DAN EVALUASI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KEUANGAN DAN ASET DAERAH, REFORMASI BIROKRASI	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00	
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.05.02.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00	
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.05.02.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00	
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.05.02.2.04		PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI	135.884.855,00	135.557.500,00	(327.355,00)	99,75	
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.05.02.2.04.0002		UJI COBA DAN PENERAPAN RANCANG BANGUN/MODEL REPLIKASI DAN INVENSI DI BIDANG DIFUSI INOVASI DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	135.884.855,00	135.557.500,00	(327.355,00)	99,75	
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.05.02.2.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	135.884.855,00	135.557.500,00	(327.355,00)	99,75	
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.05.02.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	135.884.855,00	135.557.500,00	(327.355,00)	99,75	
				JUMLAH BELANJA	1.131.078.383,00	974.583.300,00	(156.495.083,00)	86,16	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(1.131.078.383,00)	(974.583.300,00)	156.495.083,00	86,16	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(1.131.078.383,00)	(974.583.300,00)	156.495.083,00	86,16	

MAMUJU TENGAH, 2026
BUPATI KAB. MAMUJU TENGAH

H. ARSAL ARAS

Lampiran I.3 : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah
Nomor : -
Tanggal : 2026

PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : KEUANGAN
Organisasi : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	5.02.0.00.0.00.04.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	588.814.766.038,48	597.506.357.069,73	8.691.591.031,25	101,47	
	5.02.0.00.0.00.04.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	28.243.015.433,00	33.703.037.723,73	5.460.022.290,73	119,33	
	5.02.0.00.0.00.04.0000		4.1.01	Pajak Daerah	23.965.016.835,00	26.153.179.463,00	2.188.162.628,00	109,13	
	5.02.0.00.0.00.04.0000		4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.980.000.000,00	1.162.498.116,00	(817.501.884,00)	58,71	
	5.02.0.00.0.00.04.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	2.297.998.598,00	6.387.360.144,73	4.089.361.546,73	277,95	
	5.02.0.00.0.00.04.0000		4.2	PENDAPATAN TRANSFER	560.571.750.605,48	563.803.319.346,00	3.231.568.740,52	100,57	
	5.02.0.00.0.00.04.0000		4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	543.307.790.000,00	544.840.203.904,00	1.532.413.904,00	100,28	
	5.02.0.00.0.00.04.0000		4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	17.263.960.605,48	18.963.115.442,00	1.699.154.836,52	109,84	
				JUMLAH PENDAPATAN	588.814.766.038,48	597.506.357.069,73	8.691.591.031,25	101,47	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000		5	BELANJA DAERAH	99.644.786.094,80	94.472.688.831,00	(5.172.097.263,80)	94,80	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.285.797.242,80	4.362.809.527,00	(1.922.987.715,80)	69,40	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	89.484.612,00	83.465.502,00	(6.019.110,00)	93,27	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	31.216.335,00	30.566.533,00	(649.802,00)	97,91	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	31.216.335,00	30.566.533,00	(649.802,00)	97,91	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.216.335,00	30.566.533,00	(649.802,00)	97,91	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	5.864.218,00	5.678.696,00	(185.522,00)	96,83	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	5.864.218,00	5.678.696,00	(185.522,00)	96,83	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.864.218,00	5.678.696,00	(185.522,00)	96,83	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.01.0003		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	5.032.698,00	3.029.198,00	(2.003.500,00)	60,19	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	5.032.698,00	3.029.198,00	(2.003.500,00)	60,19	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.032.698,00	3.029.198,00	(2.003.500,00)	60,19	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.01.0004		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	5.956.757,00	5.456.757,00	(500.000,00)	91,60	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	5.956.757,00	5.456.757,00	(500.000,00)	91,60	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.956.757,00	5.456.757,00	(500.000,00)	91,60	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.01.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	5.875.306,00	4.550.000,00	(1.325.306,00)	77,44	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	5.875.306,00	4.550.000,00	(1.325.306,00)	77,44	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.875.306,00	4.550.000,00	(1.325.306,00)	77,44	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	12.943.381,00	12.943.318,00	(63,00)	99,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	12.943.381,00	12.943.318,00	(63,00)	99,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.943.381,00	12.943.318,00	(63,00)	99,99	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	22.595.917,00	21.241.000,00	(1.354.917,00)	94,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	22.595.917,00	21.241.000,00	(1.354.917,00)	94,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.595.917,00	21.241.000,00	(1.354.917,00)	94,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.454.261.105,80	2.872.206.107,00	(1.582.054.998,80)	64,48	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	4.408.880.527,80	2.826.826.552,00	(1.582.053.975,80)	64,11	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.408.880.527,80	2.826.826.552,00	(1.582.053.975,80)	64,11	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	4.335.530.527,80	2.753.478.580,00	(1.582.051.947,80)	63,50	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.350.000,00	73.347.972,00	(2.028,00)	99,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	45.380.578,00	45.379.555,00	(1.023,00)	99,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	45.380.578,00	45.379.555,00	(1.023,00)	99,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.380.578,00	45.379.555,00	(1.023,00)	99,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.03		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	37.474.712,00	36.959.000,00	(515.712,00)	98,62	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.03.0001		PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	12.765.393,00	12.750.000,00	(15.393,00)	99,87	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	12.765.393,00	12.750.000,00	(15.393,00)	99,87	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.765.393,00	12.750.000,00	(15.393,00)	99,87	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.03.0006		PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	24.709.319,00	24.209.000,00	(500.319,00)	97,97	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.03.0006	5.1	BELANJA OPERASI	24.709.319,00	24.209.000,00	(500.319,00)	97,97	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.03.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.709.319,00	24.209.000,00	(500.319,00)	97,97	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	415.447.258,00	412.923.271,00	(2.523.987,00)	99,39	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.05.0001		PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA DISIPLIN PEGAWAI	114.265.425,00	111.865.000,00	(2.400.425,00)	97,89	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.05.0001	5.1	BELANJA OPERASI	114.265.425,00	111.865.000,00	(2.400.425,00)	97,89	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.05.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.265.425,00	111.865.000,00	(2.400.425,00)	97,89	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.05.0003		PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	60.858.918,00	60.745.500,00	(113.418,00)	99,81	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.05.0003	5.1	BELANJA OPERASI	60.858.918,00	60.745.500,00	(113.418,00)	99,81	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.05.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.858.918,00	60.745.500,00	(113.418,00)	99,81	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.05.0005		MONITORING, EVALUASI, DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI	45.322.915,00	45.312.771,00	(10.144,00)	99,97	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.05.0005	5.1	BELANJA OPERASI	45.322.915,00	45.312.771,00	(10.144,00)	99,97	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.05.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.322.915,00	45.312.771,00	(10.144,00)	99,97	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.05.0011		BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	195.000.000,00	195.000.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.05.0011	5.1	BELANJA OPERASI	195.000.000,00	195.000.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.05.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	195.000.000,00	195.000.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	224.059.700,00	222.199.700,00	(1.860.000,00)	99,16	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	26.018.250,00	26.018.250,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	26.018.250,00	26.018.250,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.018.250,00	26.018.250,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	28.260.000,00	28.260.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	28.260.000,00	28.260.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.260.000,00	28.260.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	159.781.450,00	157.921.450,00	(1.860.000,00)	98,83	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	159.781.450,00	157.921.450,00	(1.860.000,00)	98,83	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	159.781.450,00	157.921.450,00	(1.860.000,00)	98,83	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	287.450.000,00	279.118.000,00	(8.332.000,00)	97,10	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.07.0001		PENGADAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	186.000.000,00	180.000.000,00	(6.000.000,00)	96,77	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.07.0001	5.1	BELANJA OPERASI	186.000.000,00	180.000.000,00	(6.000.000,00)	96,77	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.07.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	186.000.000,00	180.000.000,00	(6.000.000,00)	96,77	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	81.450.000,00	79.118.000,00	(2.332.000,00)	97,13	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.07.0006	5.1	BELANJA OPERASI	500.000,00	0,00	(500.000,00)	0,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.07.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	0,00	(500.000,00)	0,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	80.950.000,00	79.118.000,00	(1.832.000,00)	97,73	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	80.950.000,00	79.118.000,00	(1.832.000,00)	97,73	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	207.601.655,00	199.248.354,00	(8.353.301,00)	95,97	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	38.684.460,00	33.063.192,00	(5.621.268,00)	85,46	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	38.684.460,00	33.063.192,00	(5.621.268,00)	85,46	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.684.460,00	33.063.192,00	(5.621.268,00)	85,46	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	168.917.195,00	166.185.162,00	(2.732.033,00)	98,38	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	168.917.195,00	166.185.162,00	(2.732.033,00)	98,38	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	168.917.195,00	166.185.162,00	(2.732.033,00)	98,38	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	570.018.200,00	256.689.593,00	(313.328.607,00)	45,03	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	423.318.200,00	131.277.915,00	(292.040.285,00)	31,01	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	423.318.200,00	131.277.915,00	(292.040.285,00)	31,01	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	423.318.200,00	131.277.915,00	(292.040.285,00)	31,01	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	16.700.000,00	7.255.000,00	(9.445.000,00)	43,44	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	16.700.000,00	7.255.000,00	(9.445.000,00)	43,44	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.700.000,00	7.255.000,00	(9.445.000,00)	43,44	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	130.000.000,00	118.156.678,00	(11.843.322,00)	90,88	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	130.000.000,00	118.156.678,00	(11.843.322,00)	90,88	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	130.000.000,00	118.156.678,00	(11.843.322,00)	90,88	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	90.858.629.118,00	87.690.658.373,00	(3.167.970.745,00)	96,51	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.01		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH	1.202.852.443,00	1.128.791.753,00	(74.060.690,00)	93,84	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.01.0001		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN KUA DAN PPAS	34.166.622,00	32.810.000,00	(1.356.622,00)	96,02	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	34.166.622,00	32.810.000,00	(1.356.622,00)	96,02	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.166.622,00	32.810.000,00	(1.356.622,00)	96,02	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS	34.393.159,00	33.690.000,00	(703.159,00)	97,95	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	34.393.159,00	33.690.000,00	(703.159,00)	97,95	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.393.159,00	33.690.000,00	(703.159,00)	97,95	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.01.0003		KOORDINASI, PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI RKA-SKPD	44.227.514,00	42.200.000,00	(2.027.514,00)	95,41	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	44.227.514,00	42.200.000,00	(2.027.514,00)	95,41	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.227.514,00	42.200.000,00	(2.027.514,00)	95,41	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.01.0004		KOORDINASI, PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI PERUBAHAN RKA-SKPD	45.649.076,00	44.600.000,00	(1.049.076,00)	97,70	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	45.649.076,00	44.600.000,00	(1.049.076,00)	97,70	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.649.076,00	44.600.000,00	(1.049.076,00)	97,70	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.01.0005		KOORDINASI, PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI DPA-SKPD	20.984.133,00	20.470.000,00	(514.133,00)	97,54	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	20.984.133,00	20.470.000,00	(514.133,00)	97,54	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.984.133,00	20.470.000,00	(514.133,00)	97,54	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.01.0006		KOORDINASI, PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI PERUBAHAN DPA-SKPD	54.949.003,00	49.000.000,00	(5.949.003,00)	89,17	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	54.949.003,00	49.000.000,00	(5.949.003,00)	89,17	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.949.003,00	49.000.000,00	(5.949.003,00)	89,17	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.01.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN APBD	648.893.582,00	592.951.000,00	(55.942.582,00)	91,37	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	648.893.582,00	592.951.000,00	(55.942.582,00)	91,37	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	648.893.582,00	592.951.000,00	(55.942.582,00)	91,37	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.01.0008		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD DAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD	319.589.354,00	313.070.753,00	(6.518.601,00)	97,96	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	319.589.354,00	313.070.753,00	(6.518.601,00)	97,96	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	319.589.354,00	313.070.753,00	(6.518.601,00)	97,96	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.02		KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH	427.706.202,00	408.409.440,00	(19.296.762,00)	95,48	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.02.0001		KOORDINASI DAN PENGELOLAAN KAS DAERAH	190.057.168,00	188.077.191,00	(1.979.977,00)	98,95	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	190.057.168,00	188.077.191,00	(1.979.977,00)	98,95	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	190.057.168,00	188.077.191,00	(1.979.977,00)	98,95	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.02.0003		PENYIAPAN, PELAKSANAAN PENGENDALIAN DAN PENERBITAN ANGGARAN KAS DAN SPD	12.479.867,00	12.354.700,00	(125.167,00)	98,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	12.479.867,00	12.354.700,00	(125.167,00)	98,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.479.867,00	12.354.700,00	(125.167,00)	98,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.02.0005		KOORDINASI, FASILITASI, ASISTENSI, SINKRONISASI, SUPERVISI, MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN DANA PERIMBANGAN DAN DANA TRANSFER LAINNYA	46.714.267,00	46.551.918,00	(162.349,00)	99,65	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	46.714.267,00	46.551.918,00	(162.349,00)	99,65	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.714.267,00	46.551.918,00	(162.349,00)	99,65	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS DAERAH, LAPORAN ALIRAN KAS, DAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN/ PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PERHITUNGAN FIHAK KETIGA (PFK)	112.493.383,00	95.495.044,00	(16.998.339,00)	84,88	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	112.493.383,00	95.495.044,00	(16.998.339,00)	84,88	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	112.493.383,00	95.495.044,00	(16.998.339,00)	84,88	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.02.0009		REKONSILIASI DATA PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS SERTA PEMUNGUTAN DAN PEMOTONGAN ATAS SP2D DENGAN INSTANSI TERKAIT	25.990.930,00	25.975.000,00	(15.930,00)	99,93	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.02.0009	5.1	BELANJA OPERASI	25.990.930,00	25.975.000,00	(15.930,00)	99,93	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.02.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.990.930,00	25.975.000,00	(15.930,00)	99,93	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.02.0011		PEMBINAAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	39.970.587,00	39.955.587,00	(15.000,00)	99,96	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.02.0011	5.1	BELANJA OPERASI	39.970.587,00	39.955.587,00	(15.000,00)	99,96	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.970.587,00	39.955.587,00	(15.000,00)	99,96	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.03		KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH	426.511.454,00	409.223.406,00	(17.288.048,00)	95,94	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.03.0001		KOORDINASI PELAKSANAAN AKUNTANSI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS DAERAH	20.479.111,00	20.478.000,00	(1.111,00)	99,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	20.479.111,00	20.478.000,00	(1.111,00)	99,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.479.111,00	20.478.000,00	(1.111,00)	99,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.03.0002		REKONSILIASI DAN VERIFIKASI ASET, KEWAJIBAN, EKUITAS, PENDAPATAN, BELANJA, PEMBIAYAAN, PENDAPATAN-LO DAN BEBAN	26.040.241,00	25.955.000,00	(85.241,00)	99,67	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	26.040.241,00	25.955.000,00	(85.241,00)	99,67	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.040.241,00	25.955.000,00	(85.241,00)	99,67	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.03.0003		KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD BULANAN, TRIWULANAN DAN SEMESTERAN	25.219.791,00	25.219.000,00	(791,00)	99,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	25.219.791,00	25.219.000,00	(791,00)	99,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.219.791,00	25.219.000,00	(791,00)	99,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.03.0004		KONSOLIDASI LAPORAN KEUANGAN SKPD, BLUD DAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	145.291.297,00	145.045.600,00	(245.697,00)	99,83	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	145.291.297,00	145.045.600,00	(245.697,00)	99,83	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	145.291.297,00	145.045.600,00	(245.697,00)	99,83	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.03.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN/KOTA DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN/KOTA	146.521.048,00	136.504.806,00	(10.016.242,00)	93,16	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.03.0005	5.1	BELANJA OPERASI	146.521.048,00	136.504.806,00	(10.016.242,00)	93,16	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.03.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	146.521.048,00	136.504.806,00	(10.016.242,00)	93,16	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.03.0007		KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN KERUGIAN DAERAH	6.839.496,00	0,00	(6.839.496,00)	0,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.03.0007	5.1	BELANJA OPERASI	6.839.496,00	0,00	(6.839.496,00)	0,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.03.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.839.496,00	0,00	(6.839.496,00)	0,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.03.0012		PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD KABUPATEN/KOTA	14.389.379,00	14.375.000,00	(14.379,00)	99,90	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.03.0012	5.1	BELANJA OPERASI	14.389.379,00	14.375.000,00	(14.379,00)	99,90	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.03.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.389.379,00	14.375.000,00	(14.379,00)	99,90	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.03.0013		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAHAN DAERAH	41.731.091,00	41.646.000,00	(85.091,00)	99,79	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.03.0013	5.1	BELANJA OPERASI	41.731.091,00	41.646.000,00	(85.091,00)	99,79	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.03.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.731.091,00	41.646.000,00	(85.091,00)	99,79	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.04		PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	88.511.788.800,00	85.486.473.853,00	(3.025.314.947,00)	96,58	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.04.0008		ANALISIS PERENCANAAN DAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN	87.616.788.800,00	84.790.265.420,00	(2.826.523.380,00)	96,77	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.04.0008	5.4	BELANJA TRANSFER	87.616.788.800,00	84.790.265.420,00	(2.826.523.380,00)	96,77	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.04.0008	5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	87.616.788.800,00	84.790.265.420,00	(2.826.523.380,00)	96,77	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.04.0009		PENGELOLAAN DANA DARURAT DAN MENDESAK	895.000.000,00	696.208.433,00	(198.791.567,00)	77,78	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.04.0009	5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	895.000.000,00	696.208.433,00	(198.791.567,00)	77,78	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.04.0009	5.3.01	Belanja Tidak Terduga	895.000.000,00	696.208.433,00	(198.791.567,00)	77,78	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.05		PENGELOLAAN DATA DAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH LINGKUP KEUANGAN DAERAH	289.770.219,00	257.759.921,00	(32.010.298,00)	88,95	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.05.0001		INVENTARISASI DAN ANALISIS DATA BIDANG KEUANGAN DAERAH	63.916.855,00	52.475.000,00	(11.441.855,00)	82,09	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.05.0001	5.1	BELANJA OPERASI	63.916.855,00	52.475.000,00	(11.441.855,00)	82,09	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.05.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.916.855,00	52.475.000,00	(11.441.855,00)	82,09	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.05.0002		IMPLEMENTASI DAN PEMELIHARAAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH BIDANG KEUANGAN DAERAH	127.722.000,00	107.404.921,00	(20.317.079,00)	84,09	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	127.722.000,00	107.404.921,00	(20.317.079,00)	84,09	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	127.722.000,00	107.404.921,00	(20.317.079,00)	84,09	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.05.0003		PEMBINAAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH BIDANG KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	98.131.364,00	97.880.000,00	(251.364,00)	99,74	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.05.0003	5.1	BELANJA OPERASI	98.131.364,00	97.880.000,00	(251.364,00)	99,74	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.05.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.131.364,00	97.880.000,00	(251.364,00)	99,74	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.03		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	905.748.103,00	857.160.930,00	(48.587.173,00)	94,63	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.03.2.01		PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	905.748.103,00	857.160.930,00	(48.587.173,00)	94,63	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.03.2.01.0001		PENYUSUNAN STANDAR HARGA	22.807.684,00	22.780.000,00	(27.684,00)	99,87	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	22.807.684,00	22.780.000,00	(27.684,00)	99,87	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.807.684,00	22.780.000,00	(27.684,00)	99,87	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.03.2.01.0003		PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH	22.051.695,00	22.048.000,00	(3.695,00)	99,98	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	22.051.695,00	22.048.000,00	(3.695,00)	99,98	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.051.695,00	22.048.000,00	(3.695,00)	99,98	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.03.2.01.0004		PENYUSUNAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.03.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.03.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.03.2.01.0005		PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH	270.117.732,00	270.071.540,00	(46.192,00)	99,98	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.03.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	249.817.732,00	249.771.540,00	(46.192,00)	99,98	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.03.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	249.817.732,00	249.771.540,00	(46.192,00)	99,98	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.03.2.01.0005	5.2	BELANJA MODAL	20.300.000,00	20.300.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.03.2.01.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.300.000,00	20.300.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.03.2.01.0007		PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH	100.360.000,00	83.628.390,00	(16.731.610,00)	83,32	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.03.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	52.360.000,00	35.628.390,00	(16.731 610,00)	68,04	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.03.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.360.000,00	35.628.390,00	(16.731.610,00)	68,04	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.03.2.01.0007	5.2	BELANJA MODAL	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.03.2.01.0007	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.03.2.01.0008		PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH	38.056.015,00	25.874.000,00	(12.182.015,00)	67,98	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.03.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	38.056.015,00	25.874.000,00	(12.182.015,00)	67,98	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.03.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.056.015,00	25.874.000,00	(12.182.015,00)	67,98	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.03.2.01.0010		OPTIMALISASI PENGGUNAAN, PEMANFAATAN, PEMINDAHTANGANAN, PEMUSNAHAN, DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH	93.856.558,00	78.173.000,00	(15.683.558,00)	83,28	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.03.2.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	93.856.558,00	78.173.000,00	(15.683.558,00)	83,28	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.03.2.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	93.856.558,00	78.173.000,00	(15.683.558,00)	83,28	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.03.2.01.0011		REKONSILIASI DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH	11.917.514,00	11.913.000,00	(4.514,00)	99,96	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.03.2.01.0011	5.1	BELANJA OPERASI	11.917.514,00	11.913.000,00	(4.514,00)	99,96	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.03.2.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.917.514,00	11.913.000,00	(4.514,00)	99,96	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.03.2.01.0012		PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH	114.290.905,00	110.383.000,00	(3.907.905,00)	96,58	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.03.2.01.0012	5.1	BELANJA OPERASI	114.290.905,00	110.383.000,00	(3.907.905,00)	96,58	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.03.2.01.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.290.905,00	110.383.000,00	(3.907.905,00)	96,58	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.03.2.01.0013		PEMBINAAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	32.290.000,00	32.290.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.03.2.01.0013	5.1	BELANJA OPERASI	32.290.000,00	32.290.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.03.2.01.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.290.000,00	32.290.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.04		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.594.611.631,00	1.562.060.001,00	(32.551.630,00)	97,95	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.04.2.01		KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.594.611.631,00	1.562.060.001,00	(32.551.630,00)	97,95	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.04.2.01.0001		PERENCANAAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH	54.846.664,00	54.721.669,00	(124.995,00)	99,77	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	54.846.664,00	54.721.669,00	(124.995,00)	99,77	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.846.664,00	54.721.669,00	(124.995,00)	99,77	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.04.2.01.0003		PENYULUHAN DAN PENYEBARLUASAN KEBIJAKAN PAJAK DAERAH	83.080.808,00	83.080.808,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.04.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	83.080.808,00	83.080.808,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.04.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.080.808,00	83.080.808,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.04.2.01.0004		PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN PAJAK DAERAH	241.286.000,00	241.101.000,00	(185.000,00)	99,92	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.04.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	94.395.000,00	94.210.000,00	(185.000,00)	99,80	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.04.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	94.395.000,00	94.210.000,00	(185.000,00)	99,80	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.04.2.01.0004	5.2	BELANJA MODAL	146.891.000,00	146.891.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.04.2.01.0004	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	146.891.000,00	146.891.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.04.2.01.0005		PENDATAAN DAN PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH	50.365.438,00	46.365.438,00	(4.000.000,00)	92,05	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.04.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	50.365.438,00	46.365.438,00	(4.000.000,00)	92,05	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.04.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.365.438,00	46.365.438,00	(4.000.000,00)	92,05	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.04.2.01.0006		PENGOLAHAN, PEMELIHARAAN, DAN PELAPORAN BASIS DATA PAJAK DAERAH	169.478.121,00	169.345.571,00	(132.550,00)	99,92	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.04.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	119.478.121,00	119.345.571,00	(132.550,00)	99,88	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.04.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	119.478.121,00	119.345.571,00	(132.550,00)	99,88	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.04.2.01.0006	5.2	BELANJA MODAL	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.04.2.01.0006	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.04.2.01.0007		PENILAIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBBP2) SERTA BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	136.391.572,00	118.259.210,00	(18.132.362,00)	86,70	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.04.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	136.391.572,00	118.259.210,00	(18.132.362,00)	86,70	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.04.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	136.391.572,00	118.259.210,00	(18.132.362,00)	86,70	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.04.2.01.0008		PENETAPAN WAJIB PAJAK DAERAH	30.921.564,00	30.891.000,00	(30.564,00)	99,90	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.04.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	30.921.564,00	30.891.000,00	(30.564,00)	99,90	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.04.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.921.564,00	30.891.000,00	(30.564,00)	99,90	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.04.2.01.0009		PELAYANAN DAN KONSULTASI PAJAK DAERAH	82.602.494,00	82.602.494,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.04.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	82.602.494,00	82.602.494,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.04.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.602.494,00	82.602.494,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.04.2.01.0010		PENELITIAN DAN VERIFIKASI DATA PELAPORAN PAJAK DAERAH	23.065.847,00	23.065.847,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.04.2.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	23.065.847,00	23.065.847,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.04.2.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.065.847,00	23.065.847,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.04.2.01.0011		PENAGIHAN PAJAK DAERAH	479.460.920,00	471.981.458,00	(7.479.462,00)	98,44	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.04.2.01.0011	5.1	BELANJA OPERASI	479.460.920,00	471.981.458,00	(7.479.462,00)	98,44	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.04.2.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	479.460.920,00	471.981.458,00	(7.479.462,00)	98,44	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.04.2.01.0013		PENGENDALIAN, PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN PAJAK DAERAH	100.239.444,00	98.893.040,00	(1.346.404,00)	98,65	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.04.2.01.0013	5.1	BELANJA OPERASI	100.239.444,00	98.893.040,00	(1.346.404,00)	98,65	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.04.2.01.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.239.444,00	98.893.040,00	(1.346.404,00)	98,65	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.04.2.01.0014		PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH	96.925.315,00	96.059.531,00	(865.784,00)	99,10	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.04.2.01.0014	5.1	BELANJA OPERASI	96.925.315,00	96.059.531,00	(865.784,00)	99,10	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.04.2.01.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	96.925.315,00	96.059.531,00	(865.784,00)	99,10	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.04.2.01.0015		ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH	45.947.444,00	45.692.935,00	(254.509,00)	99,44	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.04.2.01.0015	5.1	BELANJA OPERASI	45.947.444,00	45.692.935,00	(254.509,00)	99,44	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.04.2.01.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.947.444,00	45.692.935,00	(254.509,00)	99,44	
				JUMLAH BELANJA	99.644.786.094,80	94.472.688.831,00	(5.172.097.263,80)	94,80	
				SURPLUS / (DEFISIT)	489.169.979.943,68	503.033.668.238,73	13.863.688.295,05	102,83	
	5.02.0.00.0.00.04.0000		6	PEMBIAYAAN DAERAH	9.874.382.874,00	9.874.382.874,43	0,43	100,00	
	5.02.0.00.0.00.04.0000		6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	13.874.382.874,00	13.874.382.874,43	0,43	100,00	
	5.02.0.00.0.00.04.0000		6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	13.874.382.874,00	13.874.382.874,43	0,43	100,00	
				JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	13.874.382.874,00	13.874.382.874,43	0,43	100,00	
	5.02.0.00.0.00.04.0000		6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	100,00	
	5.02.0.00.0.00.04.0000		6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	100,00	
				JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	100,00	
				PEMBIAYAAN NETTO	9.874.382.874,00	9.874.382.874,43	0,43	100,00	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	499.044.362.817,68	512.908.051.113,16	13.863.688.295,48	102,77	

MAMUJU TENGAH, 2026

BUPATI KAB. MAMUJU TENGAH

H. ARSAL ARAS

Lampiran I.3 : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah
Nomor : -
Tanggal : 2026

PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : KEPEGAWAIAN
Organisasi : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.03	5.03.0.00.0.00.02.0000		5	BELANJA DAERAH	4.567.136.407,06	3.984.788.391,00	(582.348.016,06)	87,24	
5.03	5.03.0.00.0.00.02.0000	5.03.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.120.388.434,06	1.963.890.694,00	(156.497.740,06)	92,61	
5.03	5.03.0.00.0.00.02.0000	5.03.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	39.521.339,00	36.982.000,00	(2.539.339,00)	93,57	
5.03	5.03.0.00.0.00.02.0000	5.03.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	29.314.563,00	26.780.000,00	(2.534.563,00)	91,35	
5.03	5.03.0.00.0.00.02.0000	5.03.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	29.314.563,00	26.780.000,00	(2.534.563,00)	91,35	
5.03	5.03.0.00.0.00.02.0000	5.03.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.314.563,00	26.780.000,00	(2.534.563,00)	91,35	
5.03	5.03.0.00.0.00.02.0000	5.03.01.2.01.0004		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	5.103.388,00	5.101.000,00	(2.388,00)	99,95	
5.03	5.03.0.00.0.00.02.0000	5.03.01.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	5.103.388,00	5.101.000,00	(2.388,00)	99,95	
5.03	5.03.0.00.0.00.02.0000	5.03.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.103.388,00	5.101.000,00	(2.388,00)	99,95	
5.03	5.03.0.00.0.00.02.0000	5.03.01.2.01.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	5.103.388,00	5.101.000,00	(2.388,00)	99,95	
5.03	5.03.0.00.0.00.02.0000	5.03.01.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	5.103.388,00	5.101.000,00	(2.388,00)	99,95	
5.03	5.03.0.00.0.00.02.0000	5.03.01.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.103.388,00	5.101.000,00	(2.388,00)	99,95	
5.03	5.03.0.00.0.00.02.0000	5.03.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.884.423.004,06	1.747.178.244,00	(137.244.760,06)	92,71	
5.03	5.03.0.00.0.00.02.0000	5.03.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.844.732.441,06	1.710.088.244,00	(134.644.197,06)	92,70	
5.03	5.03.0.00.0.00.02.0000	5.03.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.844.732.441,06	1.710.088.244,00	(134.644.197,06)	92,70	
5.03	5.03.0.00.0.00.02.0000	5.03.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.799.232.441,06	1.665.279.354,00	(133.953.087,06)	92,55	
5.03	5.03.0.00.0.00.02.0000	5.03.01.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.500.000,00	44.808.890,00	(691.110,00)	98,48	
5.03	5.03.0.00.0.00.02.0000	5.03.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	39.690.563,00	37.090.000,00	(2.600.563,00)	93,44	
5.03	5.03.0.00.0.00.02.0000	5.03.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	39.690.563,00	37.090.000,00	(2.600.563,00)	93,44	
5.03	5.03.0.00.0.00.02.0000	5.03.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.690.563,00	37.090.000,00	(2.600.563,00)	93,44	
5.03	5.03.0.00.0.00.02.0000	5.03.01.2.03		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	13.782.953,00	13.780.000,00	(2.953,00)	99,97	
5.03	5.03.0.00.0.00.02.0000	5.03.01.2.03.0006		PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	13.782.953,00	13.780.000,00	(2.953,00)	99,97	
5.03	5.03.0.00.0.00.02.0000	5.03.01.2.03.0006	5.1	BELANJA OPERASI	13.782.953,00	13.780.000,00	(2.953,00)	99,97	
5.03	5.03.0.00.0.00.02.0000	5.03.01.2.03.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.782.953,00	13.780.000,00	(2.953,00)	99,97	
5.03	5.03.0.00.0.00.02.0000	5.03.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
5.03	5.03.0.00.0.00.02.0000	5.03.01.2.05.0011		BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
5.03	5.03.0.00.0.00.02.0000	5.03.01.2.05.0011	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
5.03	5.03.0.00.0.00.02.0000	5.03.01.2.05.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
5.03	5.03.0.00.0.00.02.0000	5.03.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	64.366.700,00	54.479.700,00	(9.887.000,00)	84,63	
5.03	5.03.0.00.0.00.02.0000	5.03.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	17.685.000,00	7.798.000,00	(9.887.000,00)	44,09	
5.03	5.03.0.00.0.00.02.0000	5.03.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	17.685.000,00	7.798.000,00	(9.887.000,00)	44,09	
5.03	5.03.0.00.0.00.02.0000	5.03.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.685.000,00	7.798.000,00	(9.887.000,00)	44,09	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.03	5.03.0.00.0.00.02.0000	5.03.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	46.681.700,00	46.681.700,00	0,00	100,00	
5.03	5.03.0.00.0.00.02.0000	5.03.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	46.681.700,00	46.681.700,00	0,00	100,00	
5.03	5.03.0.00.0.00.02.0000	5.03.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.681.700,00	46.681.700,00	0,00	100,00	
5.03	5.03.0.00.0.00.02.0000	5.03.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	25.000.000,00	24.446.250,00	(553.750,00)	97,78	
5.03	5.03.0.00.0.00.02.0000	5.03.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	25.000.000,00	24.446.250,00	(553.750,00)	97,78	
5.03	5.03.0.00.0.00.02.0000	5.03.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	25.000.000,00	24.446.250,00	(553.750,00)	97,78	
5.03	5.03.0.00.0.00.02.0000	5.03.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.000.000,00	24.446.250,00	(553.750,00)	97,78	
5.03	5.03.0.00.0.00.02.0000	5.03.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	33.468.688,00	27.429.500,00	(6.039.188,00)	81,95	
5.03	5.03.0.00.0.00.02.0000	5.03.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	33.468.688,00	27.429.500,00	(6.039.188,00)	81,95	
5.03	5.03.0.00.0.00.02.0000	5.03.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	33.468.688,00	27.429.500,00	(6.039.188,00)	81,95	
5.03	5.03.0.00.0.00.02.0000	5.03.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.468.688,00	27.429.500,00	(6.039.188,00)	81,95	
5.03	5.03.0.00.0.00.02.0000	5.03.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	49.825.750,00	49.595.000,00	(230.750,00)	99,53	
5.03	5.03.0.00.0.00.02.0000	5.03.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	49.825.750,00	49.595.000,00	(230.750,00)	99,53	
5.03	5.03.0.00.0.00.02.0000	5.03.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	49.825.750,00	49.595.000,00	(230.750,00)	99,53	
5.03	5.03.0.00.0.00.02.0000	5.03.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.825.750,00	49.595.000,00	(230.750,00)	99,53	
5.03	5.03.0.00.0.00.02.0000	5.03.02		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2.446.747.973,00	2.020.897.697,00	(425.850.276,00)	82,59	
5.03	5.03.0.00.0.00.02.0000	5.03.02.2.01		PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN ASN	207.292.817,00	194.272.355,00	(13.020.462,00)	93,71	
5.03	5.03.0.00.0.00.02.0000	5.03.02.2.01.0002		PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN, JENIS DAN JUMLAH JABATAN UNTUK PELAKSANAAN PENGADAAN ASN	29.386.195,00	26.880.363,00	(2.505.832,00)	91,47	
5.03	5.03.0.00.0.00.02.0000	5.03.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	29.386.195,00	26.880.363,00	(2.505.832,00)	91,47	
5.03	5.03.0.00.0.00.02.0000	5.03.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.386.195,00	26.880.363,00	(2.505.832,00)	91,47	
5.03	5.03.0.00.0.00.02.0000	5.03.02.2.01.0003		KOORDINASI DAN FASILITASI PENGADAAN PNS DAN PPPK	146.654.142,00	142.143.868,00	(4.510.274,00)	96,92	
5.03	5.03.0.00.0.00.02.0000	5.03.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	146.654.142,00	142.143.868,00	(4.510.274,00)	96,92	
5.03	5.03.0.00.0.00.02.0000	5.03.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	146.654.142,00	142.143.868,00	(4.510.274,00)	96,92	
5.03	5.03.0.00.0.00.02.0000	5.03.02.2.01.0006		KOORDINASI PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBERHENTIAN	31.252.480,00	25.248.124,00	(6.004.356,00)	80,78	
5.03	5.03.0.00.0.00.02.0000	5.03.02.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	31.252.480,00	25.248.124,00	(6.004.356,00)	80,78	
5.03	5.03.0.00.0.00.02.0000	5.03.02.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.252.480,00	25.248.124,00	(6.004.356,00)	80,78	
5.03	5.03.0.00.0.00.02.0000	5.03.02.2.02		MUTASI DAN PROMOSI ASN	529.625.033,00	287.129.026,00	(242.496.007,00)	54,21	
5.03	5.03.0.00.0.00.02.0000	5.03.02.2.02.0001		PENGELOLAAN MUTASI ASN	15.513.192,00	15.506.140,00	(7.052,00)	99,95	
5.03	5.03.0.00.0.00.02.0000	5.03.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	15.513.192,00	15.506.140,00	(7.052,00)	99,95	
5.03	5.03.0.00.0.00.02.0000	5.03.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.513.192,00	15.506.140,00	(7.052,00)	99,95	
5.03	5.03.0.00.0.00.02.0000	5.03.02.2.02.0002		PENGELOLAAN KENAIKAN PANGKAT ASN	46.587.901,00	42.548.852,00	(4.039.049,00)	91,33	
5.03	5.03.0.00.0.00.02.0000	5.03.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	46.587.901,00	42.548.852,00	(4.039.049,00)	91,33	
5.03	5.03.0.00.0.00.02.0000	5.03.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.587.901,00	42.548.852,00	(4.039.049,00)	91,33	
5.03	5.03.0.00.0.00.02.0000	5.03.02.2.02.0003		PENGELOLAAN PROMOSI ASN	467.523.940,00	229.074.034,00	(238.449.906,00)	48,99	
5.03	5.03.0.00.0.00.02.0000	5.03.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	467.523.940,00	229.074.034,00	(238.449.906,00)	48,99	
5.03	5.03.0.00.0.00.02.0000	5.03.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	467.523.940,00	229.074.034,00	(238.449.906,00)	48,99	
5.03	5.03.0.00.0.00.02.0000	5.03.02.2.03		PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN	1.655.481.121,00	1.485.200.869,00	(170.280.252,00)	89,71	
5.03	5.03.0.00.0.00.02.0000	5.03.02.2.03.0001		PENINGKATAN KAPASITAS KINERJA ASN	306.544.932,00	302.774.307,00	(3.770.625,00)	98,76	
5.03	5.03.0.00.0.00.02.0000	5.03.02.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	306.544.932,00	302.774.307,00	(3.770.625,00)	98,76	
5.03	5.03.0.00.0.00.02.0000	5.03.02.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	306.544.932,00	302.774.307,00	(3.770.625,00)	98,76	
5.03	5.03.0.00.0.00.02.0000	5.03.02.2.03.0004		PENGELOLAAN PENDIDIKAN LANJUTAN ASN	375.954.215,00	231.029.215,00	(144.925.000,00)	61,45	
5.03	5.03.0.00.0.00.02.0000	5.03.02.2.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	375.954.215,00	231.029.215,00	(144.925.000,00)	61,45	
5.03	5.03.0.00.0.00.02.0000	5.03.02.2.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	375.954.215,00	231.029.215,00	(144.925.000,00)	61,45	
5.03	5.03.0.00.0.00.02.0000	5.03.02.2.03.0005		KOORDINASI DAN KERJA SAMA PELAKSANAAN DIKLAT	972.981.974,00	951.397.347,00	(21.584.627,00)	97,78	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.03	5.03.0.00.0.00.02.0000	5.03.02.2.03.0005	5.1	BELANJA OPERASI	972.981.974,00	951.397.347,00	(21.584.627,00)	97,78	
5.03	5.03.0.00.0.00.02.0000	5.03.02.2.03.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	972.981.974,00	951.397.347,00	(21.584.627,00)	97,78	
5.03	5.03.0.00.0.00.02.0000	5.03.02.2.04		PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR	54.349.002,00	54.295.447,00	(53.555,00)	99,90	
5.03	5.03.0.00.0.00.02.0000	5.03.02.2.04.0002		PELAKSANAAN PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR	13.311.136,00	13.275.363,00	(35.773,00)	99,73	
5.03	5.03.0.00.0.00.02.0000	5.03.02.2.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	13.311.136,00	13.275.363,00	(35.773,00)	99,73	
5.03	5.03.0.00.0.00.02.0000	5.03.02.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.311.136,00	13.275.363,00	(35.773,00)	99,73	
5.03	5.03.0.00.0.00.02.0000	5.03.02.2.04.0004		PENGELOLAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI	21.148.197,00	21.136.900,00	(11.297,00)	99,94	
5.03	5.03.0.00.0.00.02.0000	5.03.02.2.04.0004	5.1	BELANJA OPERASI	21.148.197,00	21.136.900,00	(11.297,00)	99,94	
5.03	5.03.0.00.0.00.02.0000	5.03.02.2.04.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.148.197,00	21.136.900,00	(11.297,00)	99,94	
5.03	5.03.0.00.0.00.02.0000	5.03.02.2.04.0007		PEMBINAAN DISIPLIN ASN	19.889.669,00	19.883.184,00	(6.485,00)	99,96	
5.03	5.03.0.00.0.00.02.0000	5.03.02.2.04.0007	5.1	BELANJA OPERASI	19.889.669,00	19.883.184,00	(6.485,00)	99,96	
5.03	5.03.0.00.0.00.02.0000	5.03.02.2.04.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.889.669,00	19.883.184,00	(6.485,00)	99,96	
				JUMLAH BELANJA	4.567.136.407,06	3.984.788.391,00	(582.348.016,06)	87,24	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(4.567.136.407,06)	(3.984.788.391,00)	582.348.016,06	87,24	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(4.567.136.407,06)	(3.984.788.391,00)	582.348.016,06	87,24	

MAMUJU TENGAH, 2026
BUPATI KAB. MAMUJU TENGAH

H. ARSAL ARAS

Lampiran I.3 : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah
Nomor : -
Tanggal : 2026

PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : INSPEKTORAT DAERAH
Organisasi : INSPEKTORAT

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	9.344.822.976,00	9.242.119.177,00	(102.703.799,00)	98,90	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.260.466.400,00	7.159.399.183,00	(101.067.217,00)	98,60	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	104.360.031,00	104.174.000,00	(186.031,00)	99,82	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	57.081.498,00	57.045.000,00	(36.498,00)	99,93	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	57.081.498,00	57.045.000,00	(36.498,00)	99,93	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.081.498,00	57.045.000,00	(36.498,00)	99,93	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	4.978.576,00	4.960.000,00	(18.576,00)	99,62	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	4.978.576,00	4.960.000,00	(18.576,00)	99,62	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.978.576,00	4.960.000,00	(18.576,00)	99,62	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0003		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	19.145.457,00	19.135.000,00	(10.457,00)	99,94	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	19.145.457,00	19.135.000,00	(10.457,00)	99,94	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.145.457,00	19.135.000,00	(10.457,00)	99,94	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0004		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	4.268.288,00	4.254.000,00	(14.288,00)	99,66	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	4.268.288,00	4.254.000,00	(14.288,00)	99,66	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.268.288,00	4.254.000,00	(14.288,00)	99,66	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	13.846.580,00	13.790.000,00	(56.580,00)	99,59	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	13.846.580,00	13.790.000,00	(56.580,00)	99,59	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.846.580,00	13.790.000,00	(56.580,00)	99,59	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	5.039.632,00	4.990.000,00	(49.632,00)	99,01	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	5.039.632,00	4.990.000,00	(49.632,00)	99,01	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.039.632,00	4.990.000,00	(49.632,00)	99,01	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.783.387.588,00	2.700.912.720,00	(82.474.868,00)	97,03	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	2.742.836.788,00	2.660.958.720,00	(81.878.068,00)	97,01	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.742.836.788,00	2.660.958.720,00	(81.878.068,00)	97,01	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.690.706.788,00	2.609.184.168,00	(81.522.620,00)	96,97	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.130.000,00	51.774.552,00	(355.448,00)	99,31	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	34.682.900,00	34.134.500,00	(548.400,00)	98,41	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	34.682.900,00	34.134.500,00	(548.400,00)	98,41	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.682.900,00	34.134.500,00	(548.400,00)	98,41	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	5.867.900,00	5.819.500,00	(48.400,00)	99,17	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	5.867.900,00	5.819.500,00	(48.400,00)	99,17	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.867.900,00	5.819.500,00	(48.400,00)	99,17	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	589.061.350,00	584.884.862,00	(4.176.488,00)	99,29	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	589.061.350,00	584.884.862,00	(4.176.488,00)	99,29	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	589.061.350,00	584.884.862,00	(4.176.488,00)	99,29	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	589.061.350,00	584.884.862,00	(4.176.488,00)	99,29	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	500.990.048,00	499.730.657,00	(1.259.391,00)	99,74	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	1.868.391,00	1.800.000,00	(68.391,00)	96,33	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.868.391,00	1.800.000,00	(68.391,00)	96,33	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.868.391,00	1.800.000,00	(68.391,00)	96,33	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	181.714.557,00	181.658.557,00	(56.000,00)	99,96	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	181.714.557,00	181.658.557,00	(56.000,00)	99,96	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	181.714.557,00	181.658.557,00	(56.000,00)	99,96	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	1.776.000,00	721.000,00	(1.055.000,00)	40,59	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.776.000,00	721.000,00	(1.055.000,00)	40,59	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.776.000,00	721.000,00	(1.055.000,00)	40,59	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	16.798.000,00	16.798.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	16.798.000,00	16.798.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.798.000,00	16.798.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	298.833.100,00	298.753.100,00	(80.000,00)	99,97	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	298.833.100,00	298.753.100,00	(80.000,00)	99,97	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	298.833.100,00	298.753.100,00	(80.000,00)	99,97	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.033.262.759,00	3.030.789.920,00	(2.472.839,00)	99,91	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	45.676.500,00	45.676.500,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	45.676.500,00	45.676.500,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.676.500,00	45.676.500,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	2.987.586.259,00	2.985.113.420,00	(2.472.839,00)	99,91	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07.0006	5.1	BELANJA OPERASI	150.235.000,00	150.013.000,00	(222.000,00)	99,85	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.235.000,00	150.013.000,00	(222.000,00)	99,85	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	2.837.351.259,00	2.835.100.420,00	(2.250.839,00)	99,92	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	558.345.820,00	557.776.720,00	(569.100,00)	99,89	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07.0006	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.279.005.439,00	2.277.323.700,00	(1.681.739,00)	99,92	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	148.812.824,00	139.451.324,00	(9.361.500,00)	93,70	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	41.212.824,00	40.851.324,00	(361.500,00)	99,12	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	41.212.824,00	40.851.324,00	(361.500,00)	99,12	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.212.824,00	40.851.324,00	(361.500,00)	99,12	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	106.600.000,00	97.600.000,00	(9.000.000,00)	91,55	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	106.600.000,00	97.600.000,00	(9.000.000,00)	91,55	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	106.600.000,00	97.600.000,00	(9.000.000,00)	91,55	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100.591.800,00	99.455.700,00	(1.136.100,00)	98,87	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	47.045.800,00	47.010.000,00	(35.800,00)	99,92	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	47.045.800,00	47.010.000,00	(35.800,00)	99,92	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.045.800,00	47.010.000,00	(35.800,00)	99,92	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	31.346.000,00	30.395.700,00	(950.300,00)	96,96	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	31.346.000,00	30.395.700,00	(950.300,00)	96,96	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.346.000,00	30.395.700,00	(950.300,00)	96,96	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	22.200.000,00	22.050.000,00	(150.000,00)	99,32	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	22.200.000,00	22.050.000,00	(150.000,00)	99,32	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.200.000,00	22.050.000,00	(150.000,00)	99,32	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.545.472.000,00	1.545.031.914,00	(440.086,00)	99,97	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01		PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL	1.225.328.000,00	1.225.166.800,00	(161.200,00)	99,98	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0001		PENGAWASAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH	188.720.000,00	188.610.000,00	(110.000,00)	99,94	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	188.720.000,00	188.610.000,00	(110.000,00)	99,94	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	188.720.000,00	188.610.000,00	(110.000,00)	99,94	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0002		PENGAWASAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	256.560.000,00	256.560.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	256.560.000,00	256.560.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	256.560.000,00	256.560.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0003		REVIU LAPORAN KINERJA	433.424.000,00	433.415.600,00	(8.400,00)	99,99	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	433.424.000,00	433.415.600,00	(8.400,00)	99,99	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	433.424.000,00	433.415.600,00	(8.400,00)	99,99	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0004		REVIU LAPORAN KEUANGAN	154.368.000,00	154.368.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	154.368.000,00	154.368.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	154.368.000,00	154.368.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0005		PENGAWASAN DESA	82.400.000,00	82.400.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	82.400.000,00	82.400.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.400.000,00	82.400.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0007		MONITORING DAN EVALUASI TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN APIP	109.856.000,00	109.813.200,00	(42.800,00)	99,96	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	109.856.000,00	109.813.200,00	(42.800,00)	99,96	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	109.856.000,00	109.813.200,00	(42.800,00)	99,96	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.02		PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU	320.144.000,00	319.865.114,00	(278.886,00)	99,91	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.02.0001		PENANGANAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH	30.728.000,00	30.713.400,00	(14.600,00)	99,95	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	30.728.000,00	30.713.400,00	(14.600,00)	99,95	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.728.000,00	30.713.400,00	(14.600,00)	99,95	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.02.0002		PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU	289.416.000,00	289.151.714,00	(264.286,00)	99,90	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	289.416.000,00	289.151.714,00	(264.286,00)	99,90	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	289.416.000,00	289.151.714,00	(264.286,00)	99,90	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	538.884.576,00	537.688.080,00	(1.196.496,00)	99,77	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02		PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	538.884.576,00	537.688.080,00	(1.196.496,00)	99,77	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0001		PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	523.684.576,00	522.488.080,00	(1.196.496,00)	99,77	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	523.684.576,00	522.488.080,00	(1.196.496,00)	99,77	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	523.684.576,00	522.488.080,00	(1.196.496,00)	99,77	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0003		KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI SERTA VERIFIKASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI	15.200.000,00	15.200.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	15.200.000,00	15.200.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.200.000,00	15.200.000,00	0,00	100,00	
				JUMLAH BELANJA	9.344.822.976,00	9.242.119.177,00	(102.703.799,00)	98,90	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(9.344.822.976,00)	(9.242.119.177,00)	102.703.799,00	98,90	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(9.344.822.976,00)	(9.242.119.177,00)	102.703.799,00	98,90	

MAMUJU TENGAH, 2026
BUPATI KAB. MAMUJU TENGAH

H. ARSAL ARAS

Lampiran I.3 : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah
Nomor : -
Tanggal : 2026

PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : KECAMATAN TOPOYO

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	1.488.679.573,19	1.396.646.051,00	(92.033.522,19)	93,81	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.374.672.360,19	1.289.138.838,00	(85.533.522,19)	93,77	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	76.778.139,00	76.778.139,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	1.043.839,00	1.043.839,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.043.839,00	1.043.839,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.043.839,00	1.043.839,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	2.071.094,00	2.071.094,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.071.094,00	2.071.094,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.071.094,00	2.071.094,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.01.0003		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	3.094.282,00	3.094.282,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	3.094.282,00	3.094.282,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.094.282,00	3.094.282,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.01.0004		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	1.670.908,00	1.670.908,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.670.908,00	1.670.908,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.670.908,00	1.670.908,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.01.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	2.332.258,00	2.332.258,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	2.332.258,00	2.332.258,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.332.258,00	2.332.258,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	64.252.443,00	64.252.443,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	64.252.443,00	64.252.443,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.252.443,00	64.252.443,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	2.313.315,00	2.313.315,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	2.313.315,00	2.313.315,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.313.315,00	2.313.315,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.065.851.218,19	984.051.696,00	(81.799.522,19)	92,32	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.063.897.087,19	982.097.565,00	(81.799.522,19)	92,31	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.063.897.087,19	982.097.565,00	(81.799.522,19)	92,31	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.037.337.087,19	956.274.803,00	(81.062.284,19)	92,18	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.560.000,00	25.822.762,00	(737.238,00)	97,22	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	1.954.131,00	1.954.131,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.954.131,00	1.954.131,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.954.131,00	1.954.131,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	9.876.443,00	9.196.443,00	(680.000,00)	93,11	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.05.0005		MONITORING, EVALUASI, DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI	1.696.443,00	1.696.443,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.05.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.696.443,00	1.696.443,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.05.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.696.443,00	1.696.443,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.05.0011		BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	8.180.000,00	7.500.000,00	(680.000,00)	91,68	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.05.0011	5.1	BELANJA OPERASI	8.180.000,00	7.500.000,00	(680.000,00)	91,68	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.05.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.180.000,00	7.500.000,00	(680.000,00)	91,68	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	32.443.905,00	32.425.805,00	(18.100,00)	99,94	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	15.155.390,00	15.155.390,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	155.390,00	155.390,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	155.390,00	155.390,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	424.559,00	424.559,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	424.559,00	424.559,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	424.559,00	424.559,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	795.956,00	795.956,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	795.956,00	795.956,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	795.956,00	795.956,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	10.868.000,00	10.849.900,00	(18.100,00)	99,83	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	10.868.000,00	10.849.900,00	(18.100,00)	99,83	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.868.000,00	10.849.900,00	(18.100,00)	99,83	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	10.748.500,00	10.748.500,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.07.0010		PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	948.500,00	948.500,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.07.0010	5.1	BELANJA OPERASI	948.500,00	948.500,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.07.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	948.500,00	948.500,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	93.399.155,00	91.786.255,00	(1.612.900,00)	98,27	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	34.201.111,00	34.201.111,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	34.201.111,00	34.201.111,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.201.111,00	34.201.111,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	15.098.044,00	13.485.144,00	(1.612.900,00)	89,31	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	15.098.044,00	13.485.144,00	(1.612.900,00)	89,31	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.098.044,00	13.485.144,00	(1.612.900,00)	89,31	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	44.100.000,00	44.100.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	44.100.000,00	44.100.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.100.000,00	44.100.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	85.575.000,00	84.152.000,00	(1.423.000,00)	98,33	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	85.575.000,00	84.152.000,00	(1.423.000,00)	98,33	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	85.575.000,00	84.152.000,00	(1.423.000,00)	98,33	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.575.000,00	84.152.000,00	(1.423.000,00)	98,33	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	35.232.026,00	32.732.026,00	(2.500.000,00)	92,90	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.01		KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	35.232.026,00	32.732.026,00	(2.500.000,00)	92,90	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.01.0001		KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL TERKAIT	2.203.711,00	2.203.711,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.203.711,00	2.203.711,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.203.711,00	2.203.711,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.01.0002		PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	33.028.315,00	30.528.315,00	(2.500.000,00)	92,43	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	33.028.315,00	30.528.315,00	(2.500.000,00)	92,43	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.028.315,00	30.528.315,00	(2.500.000,00)	92,43	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	45.308.926,00	43.808.926,00	(1.500.000,00)	96,68	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.01		KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	45.308.926,00	43.808.926,00	(1.500.000,00)	96,68	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.01.0001		PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA	26.059.550,00	26.059.550,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	26.059.550,00	26.059.550,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.059.550,00	26.059.550,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.01.0003		PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	19.249.376,00	17.749.376,00	(1.500.000,00)	92,20	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	19.249.376,00	17.749.376,00	(1.500.000,00)	92,20	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.249.376,00	17.749.376,00	(1.500.000,00)	92,20	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	741.443,00	741.443,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.04.2.01		KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	741.443,00	741.443,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.04.2.01.0002		HARMONISASI HUBUNGAN DENGAN TOKOH AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT	741.443,00	741.443,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.04.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	741.443,00	741.443,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.04.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	741.443,00	741.443,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1.285.000,00	1.285.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.05.2.01		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	1.285.000,00	1.285.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.05.2.01.0005		PENANGANAN KONFLIK SOSIAL SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	1.285.000,00	1.285.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.05.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.285.000,00	1.285.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.05.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.285.000,00	1.285.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	31.439.818,00	28.939.818,00	(2.500.000,00)	92,04	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.06.2.01		FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	31.439.818,00	28.939.818,00	(2.500.000,00)	92,04	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.06.2.01.0009		FASILITASI SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN PEMBANGUNAN DESA	2.198.140,00	2.198.140,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.06.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	2.198.140,00	2.198.140,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.06.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.198.140,00	2.198.140,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.06.2.01.0018		KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN DI WILAYAH KECAMATAN	29.241.678,00	26.741.678,00	(2.500.000,00)	91,45	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.06.2.01.0018	5.1	BELANJA OPERASI	29.241.678,00	26.741.678,00	(2.500.000,00)	91,45	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.06.2.01.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.241.678,00	26.741.678,00	(2.500.000,00)	91,45	
				JUMLAH BELANJA	1.488.679.573,19	1.396.646.051,00	(92.033.522,19)	93,81	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(1.488.679.573,19)	(1.396.646.051,00)	92.033.522,19	93,81	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(1.488.679.573,19)	(1.396.646.051,00)	92.033.522,19	93,81	

MAMUJU TENGAH, 2026
BUPATI KAB. MAMUJU TENGAH

H. ARSAL ARAS

Lampiran I.3 : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah
Nomor : -
Tanggal : 2026

PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : KECAMATAN PANGALE

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000		5	BELANJA DAERAH	1.471.286.170,92	1.412.478.128,00	(58.808.042,92)	96,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.396.089.058,92	1.342.782.228,00	(53.306.830,92)	96,18	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	41.165.582,00	41.152.400,00	(13.182,00)	99,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	1.677.773,00	1.674.000,00	(3.773,00)	99,77	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.677.773,00	1.674.000,00	(3.773,00)	99,77	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.677.773,00	1.674.000,00	(3.773,00)	99,77	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01.0003		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	1.677.773,00	1.674.000,00	(3.773,00)	99,77	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.677.773,00	1.674.000,00	(3.773,00)	99,77	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.677.773,00	1.674.000,00	(3.773,00)	99,77	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01.0004		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	1.677.773,00	1.676.600,00	(1.173,00)	99,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.677.773,00	1.676.600,00	(1.173,00)	99,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.677.773,00	1.676.600,00	(1.173,00)	99,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	1.677.773,00	1.674.000,00	(3.773,00)	99,77	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.677.773,00	1.674.000,00	(3.773,00)	99,77	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.677.773,00	1.674.000,00	(3.773,00)	99,77	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	34.454.490,00	34.453.800,00	(690,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	34.454.490,00	34.453.800,00	(690,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.454.490,00	34.453.800,00	(690,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.184.385.438,92	1.139.809.549,00	(44.575.889,92)	96,23	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.126.402.351,92	1.085.432.069,00	(40.970.282,92)	96,36	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.126.402.351,92	1.085.432.069,00	(40.970.282,92)	96,36	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.102.892.351,92	1.062.570.259,00	(40.322.092,92)	96,34	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.510.000,00	22.861.810,00	(648.190,00)	97,24	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	9.402.924,00	9.398.600,00	(4.324,00)	99,95	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	9.402.924,00	9.398.600,00	(4.324,00)	99,95	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.402.924,00	9.398.600,00	(4.324,00)	99,95	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	41.030.088,00	41.029.680,00	(408,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	41.030.088,00	41.029.680,00	(408,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.030.088,00	41.029.680,00	(408,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	7.550.075,00	3.949.200,00	(3.600.875,00)	52,30	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	7.550.075,00	3.949.200,00	(3.600.875,00)	52,30	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.550.075,00	3.949.200,00	(3.600.875,00)	52,30	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	6.360.000,00	6.360.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.05.0011		BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	6.360.000,00	6.360.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.05.0011	5.1	BELANJA OPERASI	6.360.000,00	6.360.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.05.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.360.000,00	6.360.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	23.903.000,00	23.833.000,00	(70.000,00)	99,70	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0003	5.2	BELANJA MODAL	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	5.375.000,00	5.375.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	5.375.000,00	5.375.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.375.000,00	5.375.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	9.528.000,00	9.458.000,00	(70.000,00)	99,26	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	9.528.000,00	9.458.000,00	(70.000,00)	99,26	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.528.000,00	9.458.000,00	(70.000,00)	99,26	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	54.085.038,00	45.766.479,00	(8.318.559,00)	84,61	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	46.543.922,00	39.039.600,00	(7.504.322,00)	83,87	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	46.543.922,00	39.039.600,00	(7.504.322,00)	83,87	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.543.922,00	39.039.600,00	(7.504.322,00)	83,87	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	7.541.116,00	6.726.879,00	(814.237,00)	89,20	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	7.541.116,00	6.726.879,00	(814.237,00)	89,20	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.541.116,00	6.726.879,00	(814.237,00)	89,20	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	86.190.000,00	85.860.800,00	(329.200,00)	99,61	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	81.990.000,00	81.660.800,00	(329.200,00)	99,59	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	81.990.000,00	81.660.800,00	(329.200,00)	99,59	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.990.000,00	81.660.800,00	(329.200,00)	99,59	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	27.126.804,00	27.126.600,00	(204,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.01		KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	4.499.536,00	4.499.400,00	(136,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.01.0003		PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	4.499.536,00	4.499.400,00	(136,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	4.499.536,00	4.499.400,00	(136,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.499.536,00	4.499.400,00	(136,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.03		PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN	22.627.268,00	22.627.200,00	(68,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.03.0004		FASILITASI PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT	22.627.268,00	22.627.200,00	(68,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	22.627.268,00	22.627.200,00	(68,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.627.268,00	22.627.200,00	(68,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	13.204.536,00	10.204.000,00	(3.000.536,00)	77,27	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.05.2.01		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	13.204.536,00	10.204.000,00	(3.000.536,00)	77,27	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.05.2.01.0005		PENANGANAN KONFLIK SOSIAL SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	13.204.536,00	10.204.000,00	(3.000.536,00)	77,27	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.05.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	13.204.536,00	10.204.000,00	(3.000.536,00)	77,27	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.05.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.204.536,00	10.204.000,00	(3.000.536,00)	77,27	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	34.865.772,00	32.365.300,00	(2.500.472,00)	92,82	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.06.2.01		FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	34.865.772,00	32.365.300,00	(2.500.472,00)	92,82	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.06.2.01.0009		FASILITASI SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN PEMBANGUNAN DESA	15.652.632,00	15.652.300,00	(332,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.06.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	15.652.632,00	15.652.300,00	(332,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.06.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.652.632,00	15.652.300,00	(332,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.06.2.01.0016		FASILITASI PENYUSUNAN PROGRAM DAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	19.213.140,00	16.713.000,00	(2.500.140,00)	86,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.06.2.01.0016	5.1	BELANJA OPERASI	19.213.140,00	16.713.000,00	(2.500.140,00)	86,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.06.2.01.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.213.140,00	16.713.000,00	(2.500.140,00)	86,98	
				JUMLAH BELANJA	1.471.286.170,92	1.412.478.128,00	(58.808.042,92)	96,00	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(1.471.286.170,92)	(1.412.478.128,00)	58.808.042,92	96,00	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(1.471.286.170,92)	(1.412.478.128,00)	58.808.042,92	96,00	

MAMUJU TENGAH, 2026
BUPATI KAB. MAMUJU TENGAH

H. ARSAL ARAS

Lampiran I.3 : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah
Nomor : -
Tanggal : 2026

PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : KECAMATAN TOBADAK

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000		5	BELANJA DAERAH	1.305.060.840,00	1.248.980.211,00	(56.080.629,00)	95,70	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.233.016.293,00	1.176.935.664,00	(56.080.629,00)	95,45	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	68.259.843,00	65.259.843,00	(3.000.000,00)	95,60	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	30.019.084,00	28.519.084,00	(1.500.000,00)	95,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	30.019.084,00	28.519.084,00	(1.500.000,00)	95,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.019.084,00	28.519.084,00	(1.500.000,00)	95,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	19.952.087,00	18.452.087,00	(1.500.000,00)	92,48	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	19.952.087,00	18.452.087,00	(1.500.000,00)	92,48	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.952.087,00	18.452.087,00	(1.500.000,00)	92,48	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.01.0004		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	18.288.672,00	18.288.672,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	18.288.672,00	18.288.672,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.288.672,00	18.288.672,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	996.928.163,00	953.865.138,00	(43.063.025,00)	95,68	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	963.680.312,00	920.617.287,00	(43.063.025,00)	95,53	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	963.680.312,00	920.617.287,00	(43.063.025,00)	95,53	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	940.670.312,00	897.607.287,00	(43.063.025,00)	95,42	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.010.000,00	23.010.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	13.317.225,00	13.317.225,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	13.317.225,00	13.317.225,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.317.225,00	13.317.225,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	19.930.626,00	19.930.626,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	19.930.626,00	19.930.626,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.930.626,00	19.930.626,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	19.600.455,00	9.600.455,00	(10.000.000,00)	48,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.05.0005		MONITORING, EVALUASI, DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI	9.600.455,00	9.600.455,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.05.0005	5.1	BELANJA OPERASI	9.600.455,00	9.600.455,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.05.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.600.455,00	9.600.455,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.05.0011		BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.05.0011	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.05.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	37.379.278,00	37.379.278,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	650.000,00	650.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	650.000,00	650.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	650.000,00	650.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	8.373.278,00	8.373.278,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	8.373.278,00	8.373.278,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.373.278,00	8.373.278,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	22.356.000,00	22.356.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	22.356.000,00	22.356.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.356.000,00	22.356.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	82.000.000,00	82.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.07.0001		PENGADAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.07.0001	5.1	BELANJA OPERASI	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.07.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	13.361.689,00	13.344.085,00	(17.604,00)	99,86	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	12.084.085,00	12.084.085,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	12.084.085,00	12.084.085,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.084.085,00	12.084.085,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	1.277.604,00	1.260.000,00	(17.604,00)	98,62	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.277.604,00	1.260.000,00	(17.604,00)	98,62	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.277.604,00	1.260.000,00	(17.604,00)	98,62	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	15.486.865,00	15.486.865,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	8.525.000,00	8.525.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	8.525.000,00	8.525.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.525.000,00	8.525.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	6.961.865,00	6.961.865,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	6.961.865,00	6.961.865,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.961.865,00	6.961.865,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	21.053.559,00	21.053.559,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.02.2.01		KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	21.053.559,00	21.053.559,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.02.2.01.0002		PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	21.053.559,00	21.053.559,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	21.053.559,00	21.053.559,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.053.559,00	21.053.559,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	32.607.600,00	32.607.600,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03.2.01		KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	32.607.600,00	32.607.600,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03.2.01.0001		PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA	32.607.600,00	32.607.600,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	32.607.600,00	32.607.600,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.607.600,00	32.607.600,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	18.383.388,00	18.383.388,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.05.2.01		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	18.383.388,00	18.383.388,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.05.2.01.0005		PENANGANAN KONFLIK SOSIAL SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	18.383.388,00	18.383.388,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.05.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	18.383.388,00	18.383.388,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.05.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.383.388,00	18.383.388,00	0,00	100,00	
				JUMLAH BELANJA	1.305.060.840,00	1.248.980.211,00	(56.080.629,00)	95,70	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(1.305.060.840,00)	(1.248.980.211,00)	56.080.629,00	95,70	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(1.305.060.840,00)	(1.248.980.211,00)	56.080.629,00	95,70	

MAMUJU TENGAH, 2026
BUPATI KAB. MAMUJU TENGAH

H. ARSAL ARAS

Lampiran I.3 : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah
Nomor : -
Tanggal : 2026

PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : KECAMATAN KAROSSA

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000		5	BELANJA DAERAH	1.590.506.993,00	1.529.565.508,00	(60.941.485,00)	96,16	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.547.768.491,00	1.487.441.258,00	(60.327.233,00)	96,10	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	40.860.436,00	33.618.000,00	(7.242.436,00)	82,27	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	13.185.790,00	13.183.000,00	(2.790,00)	99,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	13.185.790,00	13.183.000,00	(2.790,00)	99,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.185.790,00	13.183.000,00	(2.790,00)	99,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	20.027.597,00	12.826.500,00	(7.201.097,00)	64,04	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	20.027.597,00	12.826.500,00	(7.201.097,00)	64,04	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.027.597,00	12.826.500,00	(7.201.097,00)	64,04	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.01.0003		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	4.401.289,00	4.375.500,00	(25.789,00)	99,41	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	4.401.289,00	4.375.500,00	(25.789,00)	99,41	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.401.289,00	4.375.500,00	(25.789,00)	99,41	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	3.245.760,00	3.233.000,00	(12.760,00)	99,60	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	3.245.760,00	3.233.000,00	(12.760,00)	99,60	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.245.760,00	3.233.000,00	(12.760,00)	99,60	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.326.019.979,00	1.278.103.058,00	(47.916.921,00)	96,38	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.271.227.934,00	1.233.853.058,00	(37.374.876,00)	97,05	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.271.227.934,00	1.233.853.058,00	(37.374.876,00)	97,05	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.246.097.934,00	1.211.222.732,00	(34.875.202,00)	97,20	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.130.000,00	22.630.326,00	(2.499.674,00)	90,05	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.02.0004		KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI SKPD	51.407.960,00	40.904.000,00	(10.503.960,00)	79,56	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	51.407.960,00	40.904.000,00	(10.503.960,00)	79,56	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.407.960,00	40.904.000,00	(10.503.960,00)	79,56	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	3.384.085,00	3.346.000,00	(38.085,00)	98,87	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	3.384.085,00	3.346.000,00	(38.085,00)	98,87	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.384.085,00	3.346.000,00	(38.085,00)	98,87	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.05.0011		BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.05.0011	5.1	BELANJA OPERASI	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.05.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	24.582.000,00	24.491.200,00	(90.800,00)	99,63	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	1.840.000,00	1.820.000,00	(20.000,00)	98,91	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.840.000,00	1.820.000,00	(20.000,00)	98,91	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.840.000,00	1.820.000,00	(20.000,00)	98,91	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	1.991.000,00	1.955.000,00	(36.000,00)	98,19	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.991.000,00	1.955.000,00	(36.000,00)	98,19	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.991.000,00	1.955.000,00	(36.000,00)	98,19	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	2.000.000,00	1.985.000,00	(15.000,00)	99,25	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	1.985.000,00	(15.000,00)	99,25	
7.01	7.01 0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	1.985.000,00	(15.000,00)	99,25	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	12.151.000,00	12.131.200,00	(19.800,00)	99,83	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	12.151.000,00	12.131.200,00	(19.800,00)	99,83	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06 0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.151.000,00	12.131.200,00	(19.800,00)	99,83	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.07.0001		PENGADAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.07.0001	5.1	BELANJA OPERASI	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.07.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	67.881.796,00	63.192.000,00	(4.689.796,00)	93,09	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	40.064.288,00	37.064.000,00	(3.000.288,00)	92,51	
7.01	7.01 0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	40.064.288,00	37.064.000,00	(3.000.288,00)	92,51	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.064.288,00	37.064.000,00	(3.000.288,00)	92,51	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	15.817.508,00	14.128.000,00	(1.689.508,00)	89,31	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	15.817.508,00	14.128.000,00	(1.689.508,00)	89,31	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.817.508,00	14.128.000,00	(1.689.508,00)	89,31	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	9.674.280,00	9.287.000,00	(387.280,00)	95,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	4.995.000,00	4.640.000,00	(355.000,00)	92,89	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.995.000,00	4.640.000,00	(355.000,00)	92,89	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.995.000,00	4.640.000,00	(355.000,00)	92,89	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	4.679.280,00	4.647.000,00	(32.280,00)	99,31	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	4.679.280,00	4.647.000,00	(32.280,00)	99,31	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.679.280,00	4.647.000,00	(32.280,00)	99,31	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3.478.195,00	3.468.000,00	(10.195,00)	99,70	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.02.2.02		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	3.478.195,00	3.468.000,00	(10.195,00)	99,70	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.02.2.02.0003		PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	3.478.195,00	3.468.000,00	(10.195,00)	99,70	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	3.478.195,00	3.468.000,00	(10.195,00)	99,70	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.478.195,00	3.468.000,00	(10.195,00)	99,70	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	10.492.636,00	9.940.000,00	(552.636,00)	94,73	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.03.2.01		KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	10.492.636,00	9.940.000,00	(552.636,00)	94,73	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.03.2.01.0003		PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	10.492.636,00	9.940.000,00	(552.636,00)	94,73	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	10.492.636,00	9.940.000,00	(552.636,00)	94,73	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.492.636,00	9.940.000,00	(552.636,00)	94,73	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	28.767.671,00	28.716.250,00	(51.421,00)	99,82	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.06.2.01		FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	28.767.671,00	28.716.250,00	(51.421,00)	99,82	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.06.2.01.0009		FASILITASI SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN PEMBANGUNAN DESA	22.990.465,00	22.941.000,00	(49.465,00)	99,78	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.06.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	22.990.465,00	22.941.000,00	(49.465,00)	99,78	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.06.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.990.465,00	22.941.000,00	(49.465,00)	99,78	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.06.2.01.0018		KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN DI WILAYAH KECAMATAN	5.777.206,00	5.775.250,00	(1.956,00)	99,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.06.2.01.0018	5.1	BELANJA OPERASI	5.777.206,00	5.775.250,00	(1.956,00)	99,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.06.2.01.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.777.206,00	5.775.250,00	(1.956,00)	99,96	
				JUMLAH BELANJA	1.590.506.993,00	1.529.565.508,00	(60.941.485,00)	96,16	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(1.590.506.993,00)	(1.529.565.508,00)	60.941.485,00	96,16	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(1.590.506.993,00)	(1.529.565.508,00)	60.941.485,00	96,16	

MAMUJU TENGAH, 2026
BUPATI KAB. MAMUJU TENGAH

H. ARSAL ARAS

Lampiran I.3 : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah
Nomor : -
Tanggal : 2026

PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : KECAMATAN BUDONG-BUDONG

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000		5	BELANJA DAERAH	1.217.023.990,92	1.172.591.922,00	(44.432.068,92)	96,34	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.090.119.658,92	1.050.241.922,00	(39.877.736,92)	96,34	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	33.623.145,00	31.400.000,00	(2.223.145,00)	93,38	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	27.458.453,00	27.200.000,00	(258.453,00)	99,05	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	27.458.453,00	27.200.000,00	(258.453,00)	99,05	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.458.453,00	27.200.000,00	(258.453,00)	99,05	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	2.158.651,00	970.000,00	(1.188.651,00)	44,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.158.651,00	970.000,00	(1.188.651,00)	44,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.158.651,00	970.000,00	(1.188.651,00)	44,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.01.0004		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	1.729.216,00	955.000,00	(774.216,00)	55,22	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.729.216,00	955.000,00	(774.216,00)	55,22	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.729.216,00	955.000,00	(774.216,00)	55,22	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	2.276.825,00	2.275.000,00	(1.825,00)	99,91	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	2.276.825,00	2.275.000,00	(1.825,00)	99,91	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.276.825,00	2.275.000,00	(1.825,00)	99,91	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	897.340.590,92	864.810.922,00	(32.529.668,92)	96,37	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	886.585.089,92	854.055.922,00	(32.529.167,92)	96,33	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	886.585.089,92	854.055.922,00	(32.529.167,92)	96,33	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	866.175.089,92	834.890.118,00	(31.284.971,92)	96,38	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.410.000,00	19.165.804,00	(1.244.196,00)	93,90	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	10.755.501,00	10.755.000,00	(501,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	10.755.501,00	10.755.000,00	(501,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.755.501,00	10.755.000,00	(501,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	3.165.093,00	3.160.000,00	(5.093,00)	99,83	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.05.0003		PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	3.165.093,00	3.160.000,00	(5.093,00)	99,83	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.05.0003	5.1	BELANJA OPERASI	3.165.093,00	3.160.000,00	(5.093,00)	99,83	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.05.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.165.093,00	3.160.000,00	(5.093,00)	99,83	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	24.695.000,00	24.480.000,00	(215.000,00)	99,12	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	1.405.000,00	1.400.000,00	(5.000,00)	99,64	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.405.000,00	1.400.000,00	(5.000,00)	99,64	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.405.000,00	1.400.000,00	(5.000,00)	99,64	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	1.255.000,00	1.100.000,00	(155.000,00)	87,64	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.255.000,00	1.100.000,00	(155.000,00)	87,64	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.255.000,00	1.100.000,00	(155.000,00)	87,64	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	7.055.000,00	7.030.000,00	(25.000,00)	99,64	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	7.055.000,00	7.030.000,00	(25.000,00)	99,64	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.055.000,00	7.030.000,00	(25.000,00)	99,64	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	5.980.000,00	5.950.000,00	(30.000,00)	99,49	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	5.980.000,00	5.950.000,00	(30.000,00)	99,49	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.980.000,00	5.950.000,00	(30.000,00)	99,49	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.07.0001		PENGADAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.07.0001	5.1	BELANJA OPERASI	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.07.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	48.790.804,00	44.951.000,00	(3.839.804,00)	92,13	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	29.981.540,00	28.480.000,00	(1.501.540,00)	94,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	29.981.540,00	28.480.000,00	(1.501.540,00)	94,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.981.540,00	28.480.000,00	(1.501.540,00)	94,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	12.809.264,00	10.471.000,00	(2.338.264,00)	81,74	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	12.809.264,00	10.471.000,00	(2.338.264,00)	81,74	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.809.264,00	10.471.000,00	(2.338.264,00)	81,74	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	10.505.026,00	9.440.000,00	(1.065.026,00)	89,86	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	5.160.000,00	4.100.000,00	(1.060.000,00)	79,45	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.160.000,00	4.100.000,00	(1.060.000,00)	79,45	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.160.000,00	4.100.000,00	(1.060.000,00)	79,45	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	5.345.026,00	5.340.000,00	(5.026,00)	99,90	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	5.345.026,00	5.340.000,00	(5.026,00)	99,90	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.345.026,00	5.340.000,00	(5.026,00)	99,90	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	98.219.470,00	94.585.000,00	(3.634.470,00)	96,29	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.02.2.01		KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	30.026.925,00	30.000.000,00	(26.925,00)	99,91	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.02.2.01.0001		KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL TERKAIT	30.026.925,00	30.000.000,00	(26.925,00)	99,91	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	30.026.925,00	30.000.000,00	(26.925,00)	99,91	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.026.925,00	30.000.000,00	(26.925,00)	99,91	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.02.2.02		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	34.441.446,00	32.640.000,00	(1.801.446,00)	94,76	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.02.2.02.0002		FASILITASI PERCEPATAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI WILAYAH KECAMATAN	34.441.446,00	32.640.000,00	(1.801.446,00)	94,76	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	34.441.446,00	32.640.000,00	(1.801.446,00)	94,76	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.441.446,00	32.640.000,00	(1.801.446,00)	94,76	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.02.2.04		PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	33.751.099,00	31.945.000,00	(1.806.099,00)	94,64	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.02.2.04.0003		PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPAHKAN	33.751.099,00	31.945.000,00	(1.806.099,00)	94,64	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.02.2.04.0003	5.1	BELANJA OPERASI	33.751.099,00	31.945.000,00	(1.806.099,00)	94,64	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.02.2.04.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.751.099,00	31.945.000,00	(1.806.099,00)	94,64	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	9.246.411,00	8.440.000,00	(806.411,00)	91,27	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.03.2.01		KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	9.246.411,00	8.440.000,00	(806.411,00)	91,27	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.03.2.01.0003		PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	9.246.411,00	8.440.000,00	(806.411,00)	91,27	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	9.246.411,00	8.440.000,00	(806.411,00)	91,27	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.246.411,00	8.440.000,00	(806.411,00)	91,27	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5.189.307,00	5.085.000,00	(104.307,00)	97,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.04.2.01		KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5.189.307,00	5.085.000,00	(104.307,00)	97,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.04.2.01.0002		HARMONISASI HUBUNGAN DENGAN TOKOH AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT	5.189.307,00	5.085.000,00	(104.307,00)	97,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.04.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	5.189.307,00	5.085.000,00	(104.307,00)	97,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.04.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.189.307,00	5.085.000,00	(104.307,00)	97,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	10.035.266,00	10.030.000,00	(5.266,00)	99,94	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.05.2.01		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	10.035.266,00	10.030.000,00	(5.266,00)	99,94	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.05.2.01.0005		PENANGANAN KONFLIK SOSIAL SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	7.012.971,00	7.010.000,00	(2.971,00)	99,95	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.05.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	7.012.971,00	7.010.000,00	(2.971,00)	99,95	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.05.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.012.971,00	7.010.000,00	(2.971,00)	99,95	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.05.2.01.0008		PELAKSANAAN TUGAS FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN	3.022.295,00	3.020.000,00	(2.295,00)	99,92	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.05.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	3.022.295,00	3.020.000,00	(2.295,00)	99,92	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.05.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.022.295,00	3.020.000,00	(2.295,00)	99,92	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	4.213.878,00	4.210.000,00	(3.878,00)	99,90	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.06.2.01		FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	4.213.878,00	4.210.000,00	(3.878,00)	99,90	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.06.2.01.0018		KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN DI WILAYAH KECAMATAN	4.213.878,00	4.210.000,00	(3.878,00)	99,90	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.06.2.01.0018	5.1	BELANJA OPERASI	4.213.878,00	4.210.000,00	(3.878,00)	99,90	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.06.2.01.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.213.878,00	4.210.000,00	(3.878,00)	99,90	
				JUMLAH BELANJA	1.217.023.990,92	1.172.591.922,00	(44.432.068,92)	96,34	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(1.217.023.990,92)	(1.172.591.922,00)	44.432.068,92	96,34	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(1.217.023.990,92)	(1.172.591.922,00)	44.432.068,92	96,34	

MAMUJU TENGAH, 2026
BUPATI KAB. MAMUJU TENGAH

H. ARSAL ARAS

Lampiran I.3 : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah
Nomor : -
Tanggal : 2026

PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
Bidang Urusan : KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Organisasi : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	2.497.818.753,92	2.391.664.256,00	(106.154.497,92)	95,75	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.277.767.465,92	1.181.564.349,00	(96.203.116,92)	92,47	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	57.488.070,00	55.946.000,00	(1.542.070,00)	97,31	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	13.738.070,00	12.886.000,00	(852.070,00)	93,79	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	13.738.070,00	12.886.000,00	(852.070,00)	93,79	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.738.070,00	12.886.000,00	(852.070,00)	93,79	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	31.275.000,00	31.157.000,00	(118.000,00)	99,62	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	31.275.000,00	31.157.000,00	(118.000,00)	99,62	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.275.000,00	31.157.000,00	(118.000,00)	99,62	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	12.475.000,00	11.903.000,00	(572.000,00)	95,41	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	12.475.000,00	11.903.000,00	(572.000,00)	95,41	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.475.000,00	11.903.000,00	(572.000,00)	95,41	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	934.372.390,92	879.990.064,00	(54.382.326,92)	94,17	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	934.372.390,92	879.990.064,00	(54.382.326,92)	94,17	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	934.372.390,92	879.990.064,00	(54.382.326,92)	94,17	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	889.812.390,92	838.219.994,00	(51.592.396,92)	94,20	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.560.000,00	41.770.070,00	(2.789.930,00)	93,73	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	37.500.000,00	28.000.000,00	(9.500.000,00)	74,66	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.05.0003		PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	37.500.000,00	28.000.000,00	(9.500.000,00)	74,66	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.05.0003	5.1	BELANJA OPERASI	37.500.000,00	28.000.000,00	(9.500.000,00)	74,66	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.05.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.500.000,00	28.000.000,00	(9.500.000,00)	74,66	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	7.088.000,00	6.427.285,00	(660.715,00)	90,67	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0003	5.2	BELANJA MODAL	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	4.088.000,00	3.427.285,00	(660.715,00)	83,83	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	4.088.000,00	3.427.285,00	(660.715,00)	83,83	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.088.000,00	3.427.285,00	(660.715,00)	83,83	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	95.997.240,00	86.484.000,00	(9.513.240,00)	90,09	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.07.0001		PENGADAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	95.997.240,00	86.484.000,00	(9.513.240,00)	90,09	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.07.0001	5.1	BELANJA OPERASI	95.997.240,00	86.484.000,00	(9.513.240,00)	90,09	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.07.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.997.240,00	86.484.000,00	(9.513.240,00)	90,09	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	114.818.765,00	94.214.000,00	(20.604.765,00)	82,05	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	45.859.685,00	32.461.000,00	(13.398.685,00)	70,78	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	45.859.685,00	32.461.000,00	(13.398.685,00)	70,78	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.859.685,00	32.461.000,00	(13.398.685,00)	70,78	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	3.559.080,00	3.553.000,00	(6.080,00)	99,82	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	3.559.080,00	3.553.000,00	(6.080,00)	99,82	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.559.080,00	3.553.000,00	(6.080,00)	99,82	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	65.400.000,00	58.200.000,00	(7.200.000,00)	88,99	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	65.400.000,00	58.200.000,00	(7.200.000,00)	88,99	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.400.000,00	58.200.000,00	(7.200.000,00)	88,99	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	30.503.000,00	30.503.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	5.550.000,00	5.550.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	5.550.000,00	5.550.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.550.000,00	5.550.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	24.953.000,00	24.953.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	24.953.000,00	24.953.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.953.000,00	24.953.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	723.311.991,00	723.270.641,00	(41.350,00)	99,99	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01		PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	723.311.991,00	723.270.641,00	(41.350,00)	99,99	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0006		PEMBENTUKAN DAN PENUMBUHAN KARAKTER KELUARGA MELALUI PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT AKAN PENTINGNYA PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA DALAM SEMUA ASPEK KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA, DAN BERNEGARA	8.989.993,00	8.989.993,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	8.989.993,00	8.989.993,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.989.993,00	8.989.993,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0008		PEMBENTUKAN PASKIBRAKA	410.821.998,00	410.780.648,00	(41.350,00)	99,98	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	410.821.998,00	410.780.648,00	(41.350,00)	99,98	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	410.821.998,00	410.780.648,00	(41.350,00)	99,98	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0011		PENGANGKATAN PURNAPASKIBRAKA DUTA PANCASILA	303.500.000,00	303.500.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0011	5.1	BELANJA OPERASI	303.500.000,00	303.500.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	303.500.000,00	303.500.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	373.070.000,00	373.070.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01		PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK	373.070.000,00	373.070.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0001		PENYUSUNAN PROGRAM KERJA DI BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK DI DAERAH	373.070.000,00	373.070.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	373.070.000,00	373.070.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0001	5.1.05	Belanja Hibah	373.070.000,00	373.070.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	15.758.370,00	15.704.066,00	(54.304,00)	99,65	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.2.01		PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	15.758.370,00	15.704.066,00	(54.304,00)	99,65	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.2.01.0005		PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN DI BIDANG PENDAFTARAN ORMAS, PEMBERDAYAAN ORMAS, EVALUASI DAN MEDIASI SENGKETA ORMAS, PENGAWASAN ORMAS DAN ORMAS ASING DI DAERAH	15.758.370,00	15.704.066,00	(54.304,00)	99,65	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	15.758.370,00	15.704.066,00	(54.304,00)	99,65	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.758.370,00	15.704.066,00	(54.304,00)	99,65	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01		PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01.0001		PENYUSUNAN PROGRAM KERJA DI BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAGUNAAN NARKOTIKA, FASILITASI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI DAERAH	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01.0001	5.1.05	Belanja Hibah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	57.910.927,00	48.055.200,00	(9.855.727,00)	82,98	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01		PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PELAKSANAAN PEMANTAPAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	57.910.927,00	48.055.200,00	(9.855.727,00)	82,98	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0004		PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG KEWASPADAAN DINI, KERJA SAMA INTELIJEN, PEMANTAUAN ORANG ASING, TENAGA KERJA ASING DAN LEMBAGA ASING, KEWASPADAAN PERBATASAN ANTAR NEGARA, FASILITASI KELEMBAGAAN BIDANG KEWASPADAAN, SERTA PENANGANAN KONFLIK DI DAERAH	32.897.953,00	23.043.200,00	(9.854.753,00)	70,04	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	32.897.953,00	23.043.200,00	(9.854.753,00)	70,04	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.897.953,00	23.043.200,00	(9.854.753,00)	70,04	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0006		PELAKSANAAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	25.012.974,00	25.012.000,00	(974,00)	99,99	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	25.012.974,00	25.012.000,00	(974,00)	99,99	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.012.974,00	25.012.000,00	(974,00)	99,99	
				JUMLAH BELANJA	2.497.818.753,92	2.391.664.256,00	(106.154.497,92)	95,75	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(2.497.818.753,92)	(2.391.664.256,00)	106.154.497,92	95,75	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(2.497.818.753,92)	(2.391.664.256,00)	106.154.497,92	95,75	

MAMUJU TENGAH, 2026
BUPATI KAB. MAMUJU TENGAH

H. ARSAL ARAS

Lampiran 1.4 : Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah
Nomor :
Tanggal : 2026

KAB. MAMUJU TENGAH
REKAPITULASI REALISASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	332.616.561.152,15	329.106.358.920,46	60.649.796.079,01	55.217.783.900,00	0	0	0	0
1.01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	178.772.628.187,15	181.758.850.972,00	10.020.992.884,00	9.984.018.216,00	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	178.772.628.187,15	181.758.850.972,00	10.020.992.884,00	9.984.018.216,00	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	148.382.813.702,11	151.874.541.065,00	117.895.500,00	117.535.000,00	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	94.804.039,00	92.478.129,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	37.381.963,00	35.863.718,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12.235.126,00	12.235.126,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	9.188.527,00	9.188.527,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.234.352,00	10.234.352,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	8.278.527,00	8.278.527,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17.485.544,00	16.677.879,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	147.445.474.275,11	150.951.873.326,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	147.425.815.707,11	150.932.408.758,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.062.260,00	7.992.260,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	11.596.308,00	11.472.308,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	50.817.530,00	50.817.530,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0 00.02.0000	1.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	27.276.208,00	27.276.208,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	23.541.322,00	23.541.322,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	140.458.082,00	139.490.931,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	68.174.912,00	68.174.912,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	23.197.818,00	23.179.000,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	22.017.352,00	21.967.352,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	27.068.000,00	26.169.667,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	228.540.376,00	225.863.202,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.045.000,00	445.000,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	28.090.626,00	28.089.000,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	23.085.000,00	23.048.920,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	133.319.750,00	132.280.282,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	42.000.000,00	42.000.000,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	230.430.000,00	230.430.000,00	117.895.500,00	117.535.000,00	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	96.000.000,00	96.000.000,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	0	0	46.350.000,00	45.990.000,00	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0	71.545.500,00	71.545.000,00	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	134.430.000,00	134.430.000,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	126.823.847,00	125.325.647,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	34.330.956,00	32.850.647,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	58.892.891,00	58.875.000,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	33.600.000,00	33.600.000,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65.465.553,00	58.262.300,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41.371.048,00	34.787.300,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.698.750,00	8.080.000,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.395.755,00	15.395.000,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	30.117.039.063,04	29.611.560.699,00	9.903.097.384,00	9.866.483.216,00	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	14.978.612.264,04	14.847.274.836,00	6.425.186.886,00	6.403.140.713,00	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	11.024.000,00	11.024.000,00	115.232.900,00	115.232.900,00	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	0	0	65.917.650,00	65.917.650,00	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	71.034.414,00	71.034.414,00	253.335.268,00	249.235.000,00	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	0	0	179.999.727,00	177.618.270,00	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	0	0	70.162.650,00	70.162.650,00	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	0	0	781.190.103,00	780.909.416,00	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	417.768.620,00	414.095.500,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.042.000.000,00	1.037.400.000,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	117.716.265,00	117.704.000,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	135.524.038,00	135.514.500,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	11.445.458.116,04	11.416.105.092,00	2.483.741.808,00	2.472.893.208,00	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	185.014.210,00	185.010.500,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	0	0	115.360.250,00	115.360.250,00	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	150.604.449,00	150.604.449,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	145.043.198,00	140.593.198,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	96.004.195,00	94.803.000,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	32.407.000,00	32.342.553,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	100.015.203,00	100.002.000,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	9.000.000,00	9.000.000,00	0	0	0	0	0	0

1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	23.579.081,00	22.489.081,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0045	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	125.000.000,00	123.990.000,00	83.656.000,00	83.480.017,00	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	191.621.329,00	113.926.253,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	135.050.000,00	135.050.000,00	1.397.060.130,00	1.395.140.144,00	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	64.413.350,00	62.120.000,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	146.828.515,00	142.680.015,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	11.076.000,00	11.076.000,00	636.484.900,00	636.484.900,00	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	320.870.281,00	320.710.281,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	1.560.000,00	0	243.045.500,00	240.706.308,00	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	7.017.304.440,00	6.779.604.412,00	2.923.286.186,00	2.909.553.841,00	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	117.330.620,00	98.050.040,00	1.007.911.873,00	996.638.837,00	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	0	0	149.512.158,00	149.199.705,00	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	0	0	89.008.517,00	88.460.849,00	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	320.970.281,00	320.503.781,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	139.390.905,00	139.385.000,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	67.588.000,00	65.880.000,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	200.112.493,00	200.112.493,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	123.162.015,00	122.462.015,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	4.723.467.150,00	4.717.088.750,00	1.048.978.850,00	1.048.913.350,00	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	165.000.893,00	164.986.000,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	109.467.150,00	92.077.650,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	107.479.607,00	107.379.607,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	100.000.000,00	100.000.000,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	79.278.262,00	79.278.262,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	5.655.000,00	5.655.000,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	0	0	35.000.000,00	35.000.000,00	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	324.852.050,00	324.634.800,00	576.783.788,00	575.250.100,00	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	67.955.819,00	67.955.819,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	175.025.000,00	173.586.000,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	190.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	569.195,00	569.195,00	16.091.000,00	16.091.000,00	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	4.304.767.207,00	4.304.046.299,00	548.124.312,00	547.288.662,00	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	27.657.000,00	27.657.000,00	253.101.742,00	252.477.754,00	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD	99.991.428,00	99.991.428,00	249.978.570,00	249.766.908,00	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	234.068.984,00	234.068.984,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	237.654.101,00	237.654.101,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	2.704.376.000,00	2.704.376.000,00	45.044.000,00	45.044.000,00	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	69.751.153,00	69.751.153,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03.0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	80.698.324,00	80.698.324,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	149.999.154,00	149.999.154,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	149.997.789,00	149.997.789,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	345.173.770,00	344.452.862,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03.0037	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	100.000.002,00	100.000.002,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	99.999.502,00	99.999.502,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	5.400.000,00	5.400.000,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3.816.355.152,00	3.680.635.152,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	265.722.086,00	135.163.086,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	82.162.825,00	82.162.825,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	3.068.600.000,00	3.068.600.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.04.0026	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	162.949.710,00	162.949.710,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	60.670.081,00	55.509.081,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.04.0028	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	149.250.450,00	149.250.450,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.04.0042	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	27.000.000,00	27.000.000,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	197.032.146,00	197.021.932,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	197.032.146,00	197.021.932,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	108.718.714,00	108.708.500,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.03.2.01.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	88.313.432,00	88.313.432,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	75.743.276,00	75.727.276,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	75.743.276,00	75.727.276,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	43.200.000,00	43.200.000,00	0	0	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	32.543.276,00	32.527.276,00	0	0	0	0	0	0
1.02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	126.742.428.923,60	121.834.402.795,46	25.407.153.973,53	24.985.478.961,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000		DINAS KESEHATAN	67.431.838.642,89	63.896.134.773,00	22.481.886.646,53	22.360.218.639,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	34.909.777.264,00	33.693.177.104,00	298.907.627,00	297.007.871,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	164.916.365,00	149.534.500,00	0	0	0	0	0	0

1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	66.037.498,00	64.226.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.699.119,00	5.492.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	11.340.936,00	10.416.500,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	79.838.812,00	69.400.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	33.502.351.634,00	32.403.441.145,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	33.422.260.197,00	32.324.206.145,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.707.205,00	10.140.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	69.384.232,00	69.095.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	15.044.998,00	15.023.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15.044.998,00	15.023.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	106.342.662,00	89.654.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	62.800.000,00	62.800.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	9.000.000,00	9.000.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	6.742.662,00	5.954.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	27.800.000,00	11.900.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	256.306.443,00	249.314.830,00	298.907.627,00	297.007.871,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.188.943,00	31.469.730,00	298.907.627,00	297.007.871,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.337.400,00	12.969.500,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16.580.000,00	16.580.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	33.900.000,00	30.300.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	159.300.100,00	157.995.600,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	215.229.450,00	204.873.765,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	164.829.450,00	154.473.765,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	50.400.000,00	50.400.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	609.113.800,00	542.999.864,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	512.668.200,00	460.259.990,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	66.755.600,00	61.160.874,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.690.000,00	21.579.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	40.471.912,00	38.336.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	40.471.912,00	38.336.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	31.426.247.950,89	29.214.900.969,00	22.182.979.019,53	22.063.210.768,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	8.261.322.204,89	7.199.904.615,00	22.134.253.020,53	22.042.484.769,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	830.486.357,89	822.480.270,00	18.559.218.804,78	18.479.743.625,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	79.375.200,00	79.136.400,00	1.910.918.536,75	1.904.550.580,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	91.136.000,00	0	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	72.694.654,00	40.290.100,00	1.660.446 650,00	1.658.190.564,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0	0	3.669.029,00	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	182.991.300,00	174.310.630,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	7.004.638.693,00	6.083.687.215,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	23.153.519.236,00	22.005.510.115,00	43.120.000,00	15.120.000,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	107.911.250,00	98.000.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	70.210.000,00	47.545.530,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	64.008.094,00	63.370.400,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	99.999.791,00	95.658.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	7.040.000,00	7.040.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	14.080.000,00	13.760.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	3.874.990,00	3.840.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	3.874.990,00	3.874.990,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	3.520.000,00	3.520.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	154.960.703,00	154.850.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	10.249.980,00	10.180.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	108.583.935,00	105.452.932,00	37.520.000,00	9.620.000,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	24.500.000,00	21.550.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	54.959.130,00	54.869.450,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	357.524.000,00	329.255.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	284.645.193,00	190.040.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	37.013.757,00	36.775.370,00	5.600.000,00	5.500.000,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	244.580.543,00	244.238.665,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	17.613.127.315,00	16.954.592.910,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	105.271.000,00	9.250.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	8.249.990,00	8.200.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	539.481.977,00	536.548.960,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	3.057.442.161,00	2.850.722.908,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	5.094.990,00	5.060.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	10.295.457,00	10.165.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	3.874.990,00	3.840.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	159.145.000,00	143.310.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	11.406.510,00	9.486.239,00	5.605.999,00	5.605.999,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	11.406.510,00	9.486.239,00	5.605.999,00	5.605.999,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	857.488.438,00	771.340.700,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	4.327.735,00	4.255.000,00	0	0	0	0	0	0

1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	4.327.735,00	4.255.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	6.320.933,00	4.895.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	6.320.933,00	4.895.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	846.839.770,00	762.190.700,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	846.839.770,00	762.190.700,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	197.059.990,00	183.106.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	48.845.000,00	47.524.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	48.845.000,00	47.524.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	92.740.000,00	80.588.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	92.740.000,00	80.588.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	3.874.990,00	3.840.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	3.874.990,00	3.840.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	51.600.000,00	51.154.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	51.600.000,00	51.154.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	41.265.000,00	33.610.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	17.040.000,00	17.040.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	17.040.000,00	17.040.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	24.225.000,00	16.570.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	24.225.000,00	16.570.000,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	38.524.968.193,71	39.006.502.373,00	1.590.676.324,00	1.544.292.245,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	33.950.943.193,71	34.433.415.767,00	539.391.720,00	535.098.650,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.267.960.042,71	11.940.526.822,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.267.960.042,71	11.940.526.822,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	21.682.983.151,00	22.492.888.945,00	539.391.720,00	535.098.650,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	21.682.983.151,00	22.492.888.945,00	539.391.720,00	535.098.650,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	4.574.025.000,00	4.573.086.606,00	1.051.284.604,00	1.009.193.595,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	158.400.000,00	158.267.974,00	1.051.284.604,00	1.009.193.595,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	158.400.000,00	158.267.974,00	1.051.284.604,00	1.009.193.595,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4.415.625.000,00	4.414.818.632,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	4.415.625.000,00	4.414.818.632,00	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002		PUSKESMAS PANGALE	1.817.240.805,00	1.675.360.325,00	96.011.498,00	75.117.207,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.817.240.805,00	1.675.360.325,00	96.011.498,00	75.117.207,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.817.240.805,00	1.675.360.325,00	96.011.498,00	75.117.207,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.817.240.805,00	1.675.360.325,00	96.011.498,00	75.117.207,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003		PUSKESMAS POLO CAMBA	965.153.284,00	888.334.394,00	76.619.000,00	63.800.000,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	965.153.284,00	888.334.394,00	76.619.000,00	63.800.000,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	965.153.284,00	888.334.394,00	76.619.000,00	63.800.000,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	965.153.284,00	888.334.394,00	76.619.000,00	63.800.000,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004		PUSKESMAS SALUGATTA	2.549.334.670,00	2.270.822.524,00	96.806.100,00	59.155.000,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.549.334.670,00	2.270.822.524,00	96.806.100,00	59.155.000,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	2.549.334.670,00	2.270.822.524,00	96.806.100,00	59.155.000,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.549.334.670,00	2.270.822.524,00	96.806.100,00	59.155.000,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005		PUSKESMAS BABANA	1.872.325.318,00	1.731.065.341,00	129.526.000,00	113.760.000,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.872.325.318,00	1.731.065.341,00	129.526.000,00	113.760.000,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.872.325.318,00	1.731.065.341,00	129.526.000,00	113.760.000,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.872.325.318,00	1.731.065.341,00	129.526.000,00	113.760.000,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006		PUSKESMAS TOBADAK	2.507.713.932,00	2.318.191.247,00	121.419.600,00	94.572.620,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.507.713.932,00	2.318.191.247,00	121.419.600,00	94.572.620,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	2.507.713.932,00	2.318.191.247,00	121.419.600,00	94.572.620,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.507.713.932,00	2.318.191.247,00	121.419.600,00	94.572.620,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007		PUSKESMAS SALUADAK	804.916.864,00	638.095.072,00	29.950.000,00	21.200.000,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	804.916.864,00	638.095.072,00	29.950.000,00	21.200.000,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	804.916.864,00	638.095.072,00	29.950.000,00	21.200.000,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	804.916.864,00	638.095.072,00	29.950.000,00	21.200.000,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008		PUSKESMAS BATUPARIGI	870.274.981,00	770.606.715,00	33.714.405,00	33.160.000,00	0	0	0	0

1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	870.274.981,00	770.606.715,00	33.714.405,00	33.160.000,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	870.274.981,00	770.606.715,00	33.714.405,00	33.160.000,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	870.274.981,00	770.606.715,00	33.714.405,00	33.160.000,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009		PUSKESMAS TOPOYO	3.499.896.552,00	3.309.484.143,00	349.800.500,00	342.727.500,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.499.896.552,00	3.309.484.143,00	349.800.500,00	342.727.500,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	3.499.896.552,00	3.309.484.143,00	349.800.500,00	342.727.500,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	3.499.896.552,00	3.309.484.143,00	349.800.500,00	342.727.500,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010		PUSKESMAS SALUPANGKANG	1.731.441.615,00	1.586.483.747,82	88.257.300,00	75.942.000,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.731.441.615,00	1.586.483.747,82	88.257.300,00	75.942.000,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.731.441.615,00	1.586.483.747,82	88.257.300,00	75.942.000,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.731.441.615,00	1.586.483.747,82	88.257.300,00	75.942.000,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011		PUSKESMAS LARA	2.114.024.905,00	1.927.574.325,82	206.319.100,00	95.366.250,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.114.024.905,00	1.927.574.325,82	206.319.100,00	95.366.250,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	2.114.024.905,00	1.927.574.325,82	206.319.100,00	95.366.250,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.114.024.905,00	1.927.574.325,82	206.319.100,00	95.366.250,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012		PUSKESMAS DURIKUMBA	2.053.299.161,00	1.815.747.814,82	106.167.500,00	106.167.500,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.053.299.161,00	1.815.747.814,82	106.167.500,00	106.167.500,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	2.053.299.161,00	1.815.747.814,82	106.167.500,00	106.167.500,00	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.053.299.161,00	1.815.747.814,82	106.167.500,00	106.167.500,00	0	0	0	0
1.03			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	11.935.480.232,74	11.171.591.770,00	23.788.268.216,48	19.438.898.848,00	0	0	0	0
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	11.935.480.232,74	11.171.591.770,00	23.788.268.216,48	19.438.898.848,00	0	0	0	0
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.740.017.306,74	3.206.232.304,00	132.386.500,00	128.371.500,00	0	0	0	0
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.229.252,00	47.118.268,00	0	0	0	0	0	0
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.492.330,00	1.492.000,00	0	0	0	0	0	0
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.969.003,00	1.969.000,00	0	0	0	0	0	0
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	12.711.244,00	11.198.768,00	0	0	0	0	0	0
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.940.032,00	1.940.000,00	0	0	0	0	0	0
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	4.266.681,00	2.669.000,00	0	0	0	0	0	0
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	27.849.962,00	27.849.500,00	0	0	0	0	0	0
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.265.564.415,74	2.825.141.249,00	0	0	0	0	0	0
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.257.733.731,74	2.817.311.249,00	0	0	0	0	0	0
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.830.684,00	7.830.000,00	0	0	0	0	0	0
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.684.640,00	3.684.000,00	0	0	0	0	0	0
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.684.640,00	3.684.000,00	0	0	0	0	0	0
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	85.105.799,00	66.594.999,00	0	0	0	0	0	0
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	51.505.799,00	49.003.799,00	0	0	0	0	0	0
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	33.600.000,00	17.591.200,00	0	0	0	0	0	0
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	80.033.100,00	79.087.741,00	132.386.500,00	128.371.500,00	0	0	0	0
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0	132.386.500,00	128.371.500,00	0	0	0	0
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.000.000,00	9.000.000,00	0	0	0	0	0	0
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.125.000,00	3.115.000,00	0	0	0	0	0	0
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	67.908.100,00	66.972.741,00	0	0	0	0	0	0
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	154.490.100,00	122.179.647,00	0	0	0	0	0	0
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	138.890.100,00	106.579.647,00	0	0	0	0	0	0
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	15.600.000,00	15.600.000,00	0	0	0	0	0	0
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.910.000,00	62.426.400,00	0	0	0	0	0	0
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	93.910.000,00	55.459.900,00	0	0	0	0	0	0
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.000.000,00	6.966.500,00	0	0	0	0	0	0
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	30.320.000,00	30.320.000,00	3.748.742.627,16	3.405.109.300,00	0	0	0	0
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	30.320.000,00	30.320.000,00	647.273.455,76	542.932.600,00	0	0	0	0
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0115	Pembangunan Tanggul Sungai	0	0	309.560.538,46	296.563.200,00	0	0	0	0
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0117	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	0	0	18.526.200,00	10.146.300,00	0	0	0	0
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0122	Rehabilitasi Kanal Banjir	0	0	319.186.717,30	236.223.100,00	0	0	0	0
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	30.320.000,00	30.320.000,00	0	0	0	0	0	0
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0	0	3.101.469.171,40	2.862.176.700,00	0	0	0	0
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	0	0	401.543.998,43	389.468.000,00	0	0	0	0
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.02.0022	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	0	0	2.699.925.172,97	2.472.708.700,00	0	0	0	0
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	3.062.906.314,00	2.989.518.466,00	7.305.419.007,00	5.557.262.050,00	0	0	0	0
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	3.062.906.314,00	2.989.518.466,00	7.305.419.007,00	5.557.262.050,00	0	0	0	0
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	8.000.000,00	7.930.000,00	413.749.496,00	388.519.000,00	0	0	0	0
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	6.000.000,00	0	5.785.959.363,00	5.170.032.902,00	0	0	0	0
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	3.048.906.314,00	2.981.588.466,00	1.105.710.148,00	48.710.148,00	0	0	0	0
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	3.769.345.000,00	3.769.275.000,00	0	0	0	0	0	0
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.769.345.000,00	3.769.275.000,00	0	0	0	0	0	0
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	3.769.345.000,00	3.769.275.000,00	0	0	0	0	0	0
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	0	0	230.358.059,00	93.561.000,00	0	0	0	0
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	0	0	230.358.059,00	93.561.000,00	0	0	0	0
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	0	0	74.351.059,00	0	0	0	0	0
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.06.2.01.0020	Optimalisasi Sistem Drainase Lingkungan	0	0	120.027.000,00	93.561.000,00	0	0	0	0
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.06.2.01.0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	0	0	35.980.000,00	0	0	0	0	0

1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	708.980.612,00	560.120.000,00	1.391.919.340,35	960.351.000,00	0	0	0	0
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	708.980.612,00	560.120.000,00	1.391.919.340,35	960.351.000,00	0	0	0	0
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	366.249.693,00	254.475.000,00	1.391.919.340,35	960.351.000,00	0	0	0	0
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0022	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	52.800.000,00	38.300.000,00	0	0	0	0	0	0
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	289.930.919,00	267.345.000,00	0	0	0	0	0	0
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	0	0	99.999.048,00	0	0	0	0	0
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	0	0	99.999.048,00	0	0	0	0	0
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.09.2.01.0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	0	0	99.999.048,00	0	0	0	0	0
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	592.231.000,00	590.446.000,00	10.879.443.634,97	9.294.243.998,00	0	0	0	0
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	592.231.000,00	590.446.000,00	10.879.443.634,97	9.294.243.998,00	0	0	0	0
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan	48.000.000,00	47.915.000,00	6.682.621.260,71	5.756.880.998,00	0	0	0	0
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	0	0	2.554.462.499,99	2.499.990.000,00	0	0	0	0
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan	0	0	139.727.000,00	4.029.000,00	0	0	0	0
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan	0	0	1.302.633.224,47	846.721.000,00	0	0	0	0
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	544.231.000,00	542.531.000,00	0	0	0	0	0	0
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan	0	0	199.999.649,80	186.623.000,00	0	0	0	0
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	31.680.000,00	25.680.000,00	0	0	0	0	0	0
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	31.680.000,00	25.680.000,00	0	0	0	0	0	0
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	31.680.000,00	25.680.000,00	0	0	0	0	0	0
1.04			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	2.253.943.203,50	2.165.345.557,00	35.727.500,00	35.325.000,00	0	0	0	0
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	2.253.943.203,50	2.165.345.557,00	35.727.500,00	35.325.000,00	0	0	0	0
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.036.997.082,50	1.961.468.557,00	35.727.500,00	35.325.000,00	0	0	0	0
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	37.760.938,00	37.760.938,00	0	0	0	0	0	0
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23.571.133,00	23.571.133,00	0	0	0	0	0	0
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.189.805,00	14.189.805,00	0	0	0	0	0	0
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.489.642.141,50	1.421.163.658,00	0	0	0	0	0	0
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.489.642.141,50	1.421.163.658,00	0	0	0	0	0	0
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	11.532.444,00	11.532.444,00	0	0	0	0	0	0
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	11.532.444,00	11.532.444,00	0	0	0	0	0	0
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	172.872.719,00	172.830.969,00	35.727.500,00	35.325.000,00	0	0	0	0
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.808.700,00	31.808.700,00	35.727.500,00	35.325.000,00	0	0	0	0
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	19.008.000,00	19.008.000,00	0	0	0	0	0	0
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	32.165.000,00	32.165.000,00	0	0	0	0	0	0
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	58.137.750,00	58.099.000,00	0	0	0	0	0	0
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	31.753.269,00	31.750.269,00	0	0	0	0	0	0
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	209.184.000,00	209.184.000,00	0	0	0	0	0	0
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	89.184.000,00	89.184.000,00	0	0	0	0	0	0
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	120.000.000,00	120.000.000,00	0	0	0	0	0	0
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	116.004.840,00	108.996.548,00	0	0	0	0	0	0
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	38.004.840,00	35.296.548,00	0	0	0	0	0	0
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	78.000.000,00	73.700.000,00	0	0	0	0	0	0
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	98.430.586,00	89.928.100,00	0	0	0	0	0	0
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	98.430.586,00	89.928.100,00	0	0	0	0	0	0
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	98.430.586,00	89.928.100,00	0	0	0	0	0	0
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	118.515.535,00	113.948.900,00	0	0	0	0	0	0
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	118.515.535,00	113.948.900,00	0	0	0	0	0	0
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.03.2.03.0002	Perbaiken Rumah Tidak Layak Huni	118.515.535,00	113.948.900,00	0	0	0	0	0	0
1.05			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	10.552.733.680,10	9.885.829.536,00	1.378.653.505,00	755.062.875,00	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	7.454.070.344,10	6.884.594.519,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.232.807.867,10	3.006.214.219,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.330.208,00	5.330.100,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.837.763,00	2.837.700,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.492.445,00	2.492.400,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.709.303.659,10	2.542.725.519,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.703.136.445,10	2.536.558.419,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.555.777,00	2.555.700,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.611.437,00	3.611.400,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	0	0	9.000.000,00	9.000.000,00	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0	9.000.000,00	9.000.000,00	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	146.000.000,00	146.000.000,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	96.000.000,00	96.000.000,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000,00	50.000.000,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	339.367.000,00	279.359.000,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	82.982.000,00	82.979.000,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	256.385.000,00	196.380.000,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	32.807.000,00	32.799.600,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	32.807.000,00	32.799.600,00	0	0	0	0	0	0

1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.765.062.477,00	2.600.460.300,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.710.050.565,00	2.545.622.300,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	3.700.000,00	3.681.800,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Meliputi Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	2.625.930.210,00	2.461.528.000,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Meliputi Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	80.420.355,00	80.412.500,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	55.011.912,00	54.838.000,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	35.436.912,00	35.263.000,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	19.575.000,00	19.575.000,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.456.200.000,00	1.277.920.000,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.456.200.000,00	1.277.920.000,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.456.200.000,00	1.277.920.000,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3.098.663.336,00	3.001.235.017,00	1.369.653.505,00	746.062.875,00	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.782.180.847,00	1.720.948.167,00	3.935.505,00	3.935.505,00	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.069.550,00	22.067.000,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19.352.664,00	19.352.000,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	404.041,00	403.500,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	366.268,00	366.000,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	404.041,00	403.500,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	366.268,00	366.000,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.176.268,00	1.176.000,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.408.660.020,00	1.348.643.256,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.371.346.697,00	1.311.339.756,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	996.268,00	996.000,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	36.317.055,00	36.307.500,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	15.386.268,00	15.386.000,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	15.386.268,00	15.386.000,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.110.000,00	7.100.000,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7.110.000,00	7.100.000,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	40.221.700,00	40.185.600,00	3.935.505,00	3.935.505,00	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.795.000,00	1.795.000,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000,00	10.000,00	3.935.505,00	3.935.505,00	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.208.000,00	2.208.000,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	560.000,00	560.000,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.370.000,00	9.370.000,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26.278.700,00	26.242.600,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	109.324.431,00	109.324.431,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	109.324.431,00	109.324.431,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	54.653.000,00	54.101.250,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000,00	6.000.000,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27.053.000,00	26.501.250,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	21.600.000,00	21.600.000,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	124.755.878,00	124.140.630,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	24.966.440,00	24.438.230,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	98.389.438,00	98.302.400,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.400.000,00	1.400.000,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.316.482.489,00	1.280.286.850,00	1.365.718.000,00	742.127.370,00	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	298.721.857,00	298.716.000,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	23.096.857,00	23.091.000,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.01.0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	275.625.000,00	275.625.000,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	105.630.536,00	103.624.050,00	20.458.000,00	20.458.000,00	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.02.0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	15.103.000,00	15.097.050,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	4.486.268,00	4.486.000,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	8.170.000,00	8.170.000,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.02.0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	55.000.000,00	55.000.000,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	22.871.268,00	20.871.000,00	20.458.000,00	20.458.000,00	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	822.951.890,00	792.717.300,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	765.636.272,00	735.634.500,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	29.280.000,00	29.068.000,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	28.035.618,00	28.014.800,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	89.178.206,00	85.229.500,00	1.345.260.000,00	721.669.370,00	0	0	0	0

1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.04.0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	25.231.855,00	24.801.000,00	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.04.0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (RSP) Kab/Kota	63.946.351,00	60.428.500,00	1.345.260.000,00	721.669.370,00	0	0	0	0
1.06			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	2.359.346.925,06	2.290.338.290,00	19.000.000,00	19.000.000,00	0	0	0	0
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000		DINAS SOSIAL	2.359.346.925,06	2.290.338.290,00	19.000.000,00	19.000.000,00	0	0	0	0
1.06	1.06 0.00 0.00.01.0000	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.543.039.164,06	1.494.436.938,00	19.000.000,00	19 000.000,00	0	0	0	0
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	49.169.372,00	49.149.364,00	0	0	0	0	0	0
1.06	1.06 0.00.0 00.01.0000	1.06 01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	37.700.872,00	37.680.864,00	0	0	0	0	0	0
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	11.468.500,00	11.468.500,00	0	0	0	0	0	0
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	995.173.529,06	956.170.396,00	0	0	0	0	0	0
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	984.673.529,06	945.670.396,00	0	0	0	0	0	0
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06 01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	10.500.000,00	10.500.000,00	0	0	0	0	0	0
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0	0	0	0	0	0
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000,00	5.000.000,00	0	0	0	0	0	0
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	180.577.228,00	180.482.228,00	19.000.000,00	19.000.000,00	0	0	0	0
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	132.150.378,00	132.150.378,00	19.000.000,00	19.000.000,00	0	0	0	0
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48.426.850,00	48.331.850,00	0	0	0	0	0	0
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	142.545.685,00	133.739.000,00	0	0	0	0	0	0
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000,00	6.000.000,00	0	0	0	0	0	0
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	38.745.685,00	29.939.000,00	0	0	0	0	0	0
1.06	1.06 0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	97.800.000,00	97.800.000,00	0	0	0	0	0	0
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	170.573.350,00	169.895.950,00	0	0	0	0	0	0
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	47.966.900,00	47.289.500,00	0	0	0	0	0	0
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	122.606.450,00	122.606.450,00	0	0	0	0	0	0
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	49.627.033,00	43.627.033,00	0	0	0	0	0	0
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	49.627.033,00	43.627.033,00	0	0	0	0	0	0
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	49.627.033,00	43.627.033,00	0	0	0	0	0	0
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	102.794.071,00	98.147.262,00	0	0	0	0	0	0
1.06	1.06.0.00 0.00.01 0000	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	84.276.632,00	79.699.323,00	0	0	0	0	0	0
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	84.276.632,00	79.699.323,00	0	0	0	0	0	0
1.06	1.06.0.00 0.00.01.0000	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	18.517.439,00	18.447.939,00	0	0	0	0	0	0
1.06	1.06.0.00 0.00.01.0000	1.06.04.2.02.0002	Pemberian Layanan Kedaruratan	18.517.439,00	18.447.939,00	0	0	0	0	0	0
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	110.446.137,00	106.386.537,00	0	0	0	0	0	0
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	110.446.137,00	106.386.537,00	0	0	0	0	0	0
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	84.268.040,00	80.268.040,00	0	0	0	0	0	0
1.06	1.06.0.00 0.00.01.0000	1.06.05.2 02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	26.178.097,00	26.118.497,00	0	0	0	0	0	0
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	511.650.000,00	505.950.000,00	0	0	0	0	0	0
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	46.150.000,00	40.450.000,00	0	0	0	0	0	0
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	17.700.000,00	17.700.000,00	0	0	0	0	0	0
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	28.450.000,00	22.750.000,00	0	0	0	0	0	0
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	465.500.000,00	465.500.000,00	0	0	0	0	0	0
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	465.500.000,00	465.500.000,00	0	0	0	0	0	0
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	41.790.520,00	41.790.520,00	0	0	0	0	0	0
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	41.790.520,00	41.790.520,00	0	0	0	0	0	0
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	41.790.520,00	41.790.520,00	0	0	0	0	0	0
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	35.149.335.456,29	33.461.403.679,00	23.460.123.011,85	21.433.356.689,00	0	0	0	0
2.07			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	1.665.839.039,00	1.665.793.039,00	0	0	0	0	0	0
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1.665.839.039,00	1.665.793.039,00	0	0	0	0	0	0
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	16.255.944,00	16.255.944,00	0	0	0	0	0	0
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	16.255.944,00	16.255.944,00	0	0	0	0	0	0
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.02.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	16.255.944,00	16.255.944,00	0	0	0	0	0	0
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	31.020.000,00	31.020.000,00	0	0	0	0	0	0
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	31.020.000,00	31.020.000,00	0	0	0	0	0	0
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja	31.020.000,00	31.020.000,00	0	0	0	0	0	0
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	1.618.563.095,00	1.618.517.095,00	0	0	0	0	0	0
2.07	2 07.3.32.0.00.01.0000	2 07.05.2 02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	1.618.563.095,00	1.618.517.095,00	0	0	0	0	0	0
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.880.695,00	2.834.695,00	0	0	0	0	0	0
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	1.615.682.400,00	1.615.682.400,00	0	0	0	0	0	0
2.08			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	3.207.810.294,98	3.101.969.751,00	6.584.500,00	6.584.500,00	0	0	0	0
2.08	2.08.2.14.0 00.02.0000		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3.207.810.294,98	3.101.969.751,00	6.584.500,00	6.584.500,00	0	0	0	0
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.765.108.617,98	2.664.287.856,00	0	0	0	0	0	0
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	128.617.314,00	128.351.000,00	0	0	0	0	0	0
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	84.019.615,00	84.010.500,00	0	0	0	0	0	0
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	28.612.666,00	28.610.000,00	0	0	0	0	0	0

2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.473.466,00	4.472.000,00	0	0	0	0	0	0
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.275.820,00	3.274.500,00	0	0	0	0	0	0
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.995.105,00	2.994.000,00	0	0	0	0	0	0
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.240.642,00	4.990.000,00	0	0	0	0	0	0
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.275.073.113,00	2.180.929.222,00	0	0	0	0	0	0
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.235.764.064,00	2.141.640.222,00	0	0	0	0	0	0
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	39.309.049,00	39.289.000,00	0	0	0	0	0	0
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	45.986.959,00	40.986.000,00	0	0	0	0	0	0
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	32.236.959,00	32.236.000,00	0	0	0	0	0	0
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	13.750.000,00	8.750.000,00	0	0	0	0	0	0
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	36.241.750,00	34.872.000,00	0	0	0	0	0	0
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.06.0003	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.000.000,00	3.000.000,00	0	0	0	0	0	0
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	33.241.750,00	31.872.000,00	0	0	0	0	0	0
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	184.590.170,00	184.590.100,00	0	0	0	0	0	0
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	96.000.000,00	96.000.000,00	0	0	0	0	0	0
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	88.590.170,00	88.590.100,00	0	0	0	0	0	0
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	34.599.311,98	34.571.500,00	0	0	0	0	0	0
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.999.311,98	18.971.500,00	0	0	0	0	0	0
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	15.600.000,00	15.600.000,00	0	0	0	0	0	0
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60.000.000,00	59.988.034,00	0	0	0	0	0	0
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60.000.000,00	59.988.034,00	0	0	0	0	0	0
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	171.599.073,00	171.568.000,00	0	0	0	0	0	0
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	99.999.487,00	99.982.000,00	0	0	0	0	0	0
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.02.2.02.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	99.999.487,00	99.982.000,00	0	0	0	0	0	0
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	71.599.586,00	71.586.000,00	0	0	0	0	0	0
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.02.2.03.0005	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	71.599.586,00	71.586.000,00	0	0	0	0	0	0
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	144.070.946,00	142.257.995,00	6.584.500,00	6.584.500,00	0	0	0	0
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	144.070.946,00	142.257.995,00	6.584.500,00	6.584.500,00	0	0	0	0
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	144.070.946,00	142.257.995,00	6.584.500,00	6.584.500,00	0	0	0	0
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	49.762.025,00	49.531.000,00	0	0	0	0	0	0
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	49.762.025,00	49.531.000,00	0	0	0	0	0	0
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.04.2.01.0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	49.762.025,00	49.531.000,00	0	0	0	0	0	0
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	77.269.633,00	74.324.900,00	0	0	0	0	0	0
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	77.269.633,00	74.324.900,00	0	0	0	0	0	0
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	77.269.633,00	74.324.900,00	0	0	0	0	0	0
2.09			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	281.235.193,00	280.979.300,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0	0	0	0
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	281.235.193,00	280.979.300,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0	0	0	0
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	206.671.913,00	206.428.200,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0	0	0	0
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	105.000.412,00	104.788.500,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0	0	0	0
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	36.840.242,00	36.823.000,00	0	0	0	0	0	0
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03.2.01.0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	42.544.933,00	42.352.500,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0	0	0	0
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03.2.01.0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	25.615.237,00	25.613.000,00	0	0	0	0	0	0
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	101.671.501,00	101.639.700,00	0	0	0	0	0	0
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	20.399.742,00	20.386.500,00	0	0	0	0	0	0
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	81.271.759,00	81.253.200,00	0	0	0	0	0	0
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	48.834.799,00	48.830.600,00	0	0	0	0	0	0
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	48.834.799,00	48.830.600,00	0	0	0	0	0	0
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	48.834.799,00	48.830.600,00	0	0	0	0	0	0
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	25.728.481,00	25.720.500,00	0	0	0	0	0	0
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	25.728.481,00	25.720.500,00	0	0	0	0	0	0
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	25.728.481,00	25.720.500,00	0	0	0	0	0	0
2.10			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	1.308.665.000,00	704.763.400,00	7.767.969.801,00	5.841.006.470,00	0	0	0	0
2.10	1.04.2.10.0.00.02.0000		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	1.308.665.000,00	704.763.400,00	7.767.969.801,00	5.841.006.470,00	0	0	0	0
2.10	1.04.2.10.0.00.02.0000	2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	1.308.665.000,00	704.763.400,00	7.767.969.801,00	5.841.006.470,00	0	0	0	0
2.10	1.04.2.10.0.00.02.0000	2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.308.665.000,00	704.763.400,00	7.767.969.801,00	5.841.006.470,00	0	0	0	0
2.10	1.04.2.10.0.00.02.0000	2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.308.665.000,00	704.763.400,00	7.767.969.801,00	5.841.006.470,00	0	0	0	0
2.11			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	4.350.846.116,15	4.282.903.078,00	2.325.561.000,00	2.251.628.605,00	0	0	0	0
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000		DINAS LINGKUNGAN HIDUP	4.350.846.116,15	4.282.903.078,00	2.325.561.000,00	2.251.628.605,00	0	0	0	0

2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.033.527.759,15	1.986.806.028,00	0	0	0	0	0	0
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.01	Perencanaan, Pengenggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.834.916,00	23.021.200,00	0	0	0	0	0	0
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17.699.714,00	17.087.200,00	0	0	0	0	0	0
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.225.884,00	1.173.000,00	0	0	0	0	0	0
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.342.191,00	1.280.000,00	0	0	0	0	0	0
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	987.575,00	978.000,00	0	0	0	0	0	0
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.405.441,00	1.385.000,00	0	0	0	0	0	0
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.174.111,00	1.118.000,00	0	0	0	0	0	0
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.272.091.939,15	1.231.912.987,00	0	0	0	0	0	0
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.171.827.380,15	1.138.790.987,00	0	0	0	0	0	0
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	79.800.000,00	73.300.000,00	0	0	0	0	0	0
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	13.287.273,00	13.074.000,00	0	0	0	0	0	0
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	7.177.286,00	6.748.000,00	0	0	0	0	0	0
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0	0	0	0	0	0
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000,00	5.000.000,00	0	0	0	0	0	0
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	53.802.750,00	50.964.840,00	0	0	0	0	0	0
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.025.000,00	1.025.000,00	0	0	0	0	0	0
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.945.000,00	1.720.000,00	0	0	0	0	0	0
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.015.000,00	2.071.600,00	0	0	0	0	0	0
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.680.000,00	3.505.000,00	0	0	0	0	0	0
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	43.137.750,00	42.643.240,00	0	0	0	0	0	0
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	120.000.000,00	120.000.000,00	0	0	0	0	0	0
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	120.000.000,00	120.000.000,00	0	0	0	0	0	0
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	42.926.294,00	40.944.650,00	0	0	0	0	0	0
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.326.294,00	16.344.650,00	0	0	0	0	0	0
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	24.600.000,00	24.600.000,00	0	0	0	0	0	0
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	515.871.860,00	514.962.351,00	0	0	0	0	0	0
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.647.500,00	39.050.000,00	0	0	0	0	0	0
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	416.814.360,00	416.522.351,00	0	0	0	0	0	0
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Berat	53.810.000,00	53.760.000,00	0	0	0	0	0	0
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.600.000,00	5.600.000,00	0	0	0	0	0	0
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	46.554.926,00	40.427.000,00	0	0	0	0	0	0
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	46.554.926,00	40.427.000,00	0	0	0	0	0	0
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	33.349.684,00	29.711.000,00	0	0	0	0	0	0
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	13.205.242,00	10.716.000,00	0	0	0	0	0	0
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	317.359.135,00	310.125.500,00	46.640.000,00	33.750.000,00	0	0	0	0
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	317.359.135,00	310.125.500,00	46.640.000,00	33.750.000,00	0	0	0	0
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	317.359.135,00	310.125.500,00	46.640.000,00	33.750.000,00	0	0	0	0
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	22.509.985,00	19.762.000,00	0	0	0	0	0	0
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	22.509.985,00	19.762.000,00	0	0	0	0	0	0
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.05.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	18.272.507,00	15.718.000,00	0	0	0	0	0	0
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.05.2.01.0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	4.237.478,00	4.044.000,00	0	0	0	0	0	0
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	39.364.318,00	38.718.000,00	0	0	0	0	0	0
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	39.364.318,00	38.718.000,00	0	0	0	0	0	0
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	22.253.221,00	21.897.000,00	0	0	0	0	0	0
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	17.111.097,00	16.821.000,00	0	0	0	0	0	0
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	10.541.875,00	10.336.000,00	0	0	0	0	0	0
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	10.541.875,00	10.336.000,00	0	0	0	0	0	0
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	10.541.875,00	10.336.000,00	0	0	0	0	0	0
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	1.880.988.118,00	1.876.728.550,00	2.278.921.000,00	2.217.878.605,00	0	0	0	0
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	1.880.988.118,00	1.876.728.550,00	2.278.921.000,00	2.217.878.605,00	0	0	0	0
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	300.577.230,00	299.398.550,00	2.278.921.000,00	2.217.878.605,00	0	0	0	0
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0013	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	9.610.888,00	9.430.000,00	0	0	0	0	0	0
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	1.570.800.000,00	1.567.900.000,00	0	0	0	0	0	0

2.12			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.789.609.534,87	2.738.041.285,00	37.182.000,00	37.182.000,00	0	0	0	0
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.789.609.534,87	2.738.041.285,00	37.182.000,00	37.182.000,00	0	0	0	0
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.673.576.265,87	1.626.725.512,00	0	0	0	0	0	0
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.397.166,00	28.252.166,00	0	0	0	0	0	0
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.568.786,00	14.508.786,00	0	0	0	0	0	0
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.828.380,00	13.743.380,00	0	0	0	0	0	0
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.265.666.620,87	1.235.114.256,00	0	0	0	0	0	0
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.265.666.620,87	1.235.114.256,00	0	0	0	0	0	0
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	39.329.500,00	39.308.500,00	0	0	0	0	0	0
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.329.500,00	15.313.500,00	0	0	0	0	0	0
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	24.000.000,00	23.995.000,00	0	0	0	0	0	0
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	50.501.683,00	50.501.683,00	0	0	0	0	0	0
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.501.683,00	50.501.683,00	0	0	0	0	0	0
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	235.701.746,00	219.597.357,00	0	0	0	0	0	0
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	103.101.746,00	90.597.357,00	0	0	0	0	0	0
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	132.600.000,00	129.000.000,00	0	0	0	0	0	0
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	53.979.550,00	53.951.550,00	0	0	0	0	0	0
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	53.979.550,00	53.951.550,00	0	0	0	0	0	0
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	407.660.488,00	403.208.200,00	0	0	0	0	0	0
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	18.925.000,00	18.640.000,00	0	0	0	0	0	0
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	18.925.000,00	18.640.000,00	0	0	0	0	0	0
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.02	Pencatatan Pendaftaran Penduduk	40.090.200,00	40.090.200,00	0	0	0	0	0	0
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.02.0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	40.090.200,00	40.090.200,00	0	0	0	0	0	0
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	348.645.288,00	344.478.000,00	0	0	0	0	0	0
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.03.0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	160.800.000,00	156.800.000,00	0	0	0	0	0	0
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.03.0003	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	187.845.288,00	187.678.000,00	0	0	0	0	0	0
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	432.226.456,00	437.001.448,00	0	0	0	0	0	0
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	82.455.875,00	82.375.875,00	0	0	0	0	0	0
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	20.525.000,00	20.445.000,00	0	0	0	0	0	0
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.01.0005	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	61.930.875,00	61.930.875,00	0	0	0	0	0	0
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	349.770.581,00	349.625.573,00	0	0	0	0	0	0
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.02.0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	114.000.000,00	114.000.000,00	0	0	0	0	0	0
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.02.0006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	235.770.581,00	235.625.573,00	0	0	0	0	0	0
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	145.346.325,00	145.306.125,00	37.182.000,00	37.182.000,00	0	0	0	0
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	15.999.325,00	15.999.325,00	0	0	0	0	0	0
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	15.999.325,00	15.999.325,00	0	0	0	0	0	0
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	104.407.000,00	104.366.800,00	37.182.000,00	37.182.000,00	0	0	0	0
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03.0001	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	70.407.000,00	70.366.800,00	0	0	0	0	0	0
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	34.000.000,00	34.000.000,00	37.182.000,00	37.182.000,00	0	0	0	0
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	24.940.000,00	24.940.000,00	0	0	0	0	0	0
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.04.0003	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	24.940.000,00	24.940.000,00	0	0	0	0	0	0
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	130.800.000,00	130.800.000,00	0	0	0	0	0	0
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	130.800.000,00	130.800.000,00	0	0	0	0	0	0
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.05.2.01.0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	100.800.000,00	100.800.000,00	0	0	0	0	0	0
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	30.000.000,00	30.000.000,00	0	0	0	0	0	0
2.13			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	3.141.557.452,03	2.999.926.534,00	15.125.129,85	15.125.129,00	0	0	0	0
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	3.141.557.452,03	2.999.926.534,00	15.125.129,85	15.125.129,00	0	0	0	0
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.484.045.925,53	1.380.479.914,00	15.125.129,85	15.125.129,00	0	0	0	0
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	83.037.732,00	80.537.518,00	0	0	0	0	0	0
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21.018.338,00	18.518.338,00	0	0	0	0	0	0
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	25.244.193,00	25.243.979,00	0	0	0	0	0	0
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	24.335.600,00	24.335.600,00	0	0	0	0	0	0
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.439.601,00	12.439.601,00	0	0	0	0	0	0
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.135.957.214,00	1.063.861.205,00	0	0	0	0	0	0
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.036.449.893,00	967.957.781,00	0	0	0	0	0	0
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50.349.723,00	50.049.723,00	0	0	0	0	0	0
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.174.327,00	6.174.327,00	0	0	0	0	0	0
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	42.983.271,00	39.679.374,00	0	0	0	0	0	0
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0	0	0	0	0	0
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5.000.000,00	5.000.000,00	0	0	0	0	0	0
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	69.547.494,00	68.994.144,00	0	0	0	0	0	0
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	747.000,00	747.000,00	0	0	0	0	0	0
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.800.000,00	3.800.000,00	0	0	0	0	0	0
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.860.000,00	7.855.000,00	0	0	0	0	0	0
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48.503.350,00	47.955.000,00	0	0	0	0	0	0
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	8.637.144,00	8.637.144,00	0	0	0	0	0	0
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	120.000.000,00	92.927.206,00	15.125.129,85	15.125.129,00	0	0	0	0
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	0	0	15.125.129,85	15.125.129,00	0	0	0	0
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	120.000.000,00	92.927.206,00	0	0	0	0	0	0

2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.573.339,60	15.243.591,00	0	0	0	0	0	0
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.573.339,60	15.243.591,00	0	0	0	0	0	0
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	53.930.145,93	53.916.250,00	0	0	0	0	0	0
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	49.730.145,93	49.716.250,00	0	0	0	0	0	0
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.200.000,00	4.200.000,00	0	0	0	0	0	0
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1.383.160.758,00	1.345.096.279,00	0	0	0	0	0	0
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1.383.160.758,00	1.345.096.279,00	0	0	0	0	0	0
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1.367.679.134,00	1.329.614.655,00	0	0	0	0	0	0
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	15.481.624,00	15.481.624,00	0	0	0	0	0	0
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	274.350.768,50	274.350.341,00	0	0	0	0	0	0
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	274.350.768,50	274.350.341,00	0	0	0	0	0	0
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	13.310.425,00	13.310.425,00	0	0	0	0	0	0
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	245.940.413,50	245.939.986,00	0	0	0	0	0	0
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	15.099.930,00	15.099.930,00	0	0	0	0	0	0
2.14			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.875.609.189,00	2.834.352.500,00	0	0	0	0	0	0
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.875.609.189,00	2.834.352.500,00	0	0	0	0	0	0
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	213.243.082,00	213.072.000,00	0	0	0	0	0	0
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	56.043.082,00	55.997.000,00	0	0	0	0	0	0
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.02.2.01.0021	Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	56.043.082,00	55.997.000,00	0	0	0	0	0	0
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	157.200.000,00	157.075.000,00	0	0	0	0	0	0
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	97.200.000,00	97.200.000,00	0	0	0	0	0	0
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	60.000.000,00	59.875.000,00	0	0	0	0	0	0
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.071.368.661,00	2.030.320.500,00	0	0	0	0	0	0
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	749.952.669,00	745.872.500,00	0	0	0	0	0	0
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.01.0003	Pengendalian Program KKBPK	218.490.397,00	218.282.500,00	0	0	0	0	0	0
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	120.000.000,00	120.000.000,00	0	0	0	0	0	0
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	77.500.000,00	77.500.000,00	0	0	0	0	0	0
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	90.000.000,00	90.000.000,00	0	0	0	0	0	0
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	243.962.272,00	240.090.000,00	0	0	0	0	0	0
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	420.000.000,00	420.000.000,00	0	0	0	0	0	0
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	420.000.000,00	420.000.000,00	0	0	0	0	0	0
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Ketersediaan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	334.615.992,00	297.648.000,00	0	0	0	0	0	0
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	321.115.992,00	284.148.000,00	0	0	0	0	0	0
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	13.500.000,00	13.500.000,00	0	0	0	0	0	0
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Ketertaan Ber-KB	566.800.000,00	566.800.000,00	0	0	0	0	0	0
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	270.000.000,00	270.000.000,00	0	0	0	0	0	0
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	296.800.000,00	296.800.000,00	0	0	0	0	0	0
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	590.997.446,00	590.960.000,00	0	0	0	0	0	0
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	62.997.268,00	62.997.000,00	0	0	0	0	0	0
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.04.2.01.0003	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Ketanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	14.997.268,00	14.997.000,00	0	0	0	0	0	0
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	48.000.000,00	48.000.000,00	0	0	0	0	0	0
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	528.000.178,00	527.963.000,00	0	0	0	0	0	0
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/melahirkan, Baduta/Balita)	240.000.178,00	239.963.000,00	0	0	0	0	0	0

2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	288.000.000,00	288.000.000,00	0	0	0	0	0	0
2.15			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.498.361.381,00	2.391.107.256,00	52.940.000,00	47.950.000,00	0	0	0	0
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000		DINAS PERHUBUNGAN	2.498.361.381,00	2.391.107.256,00	52.940.000,00	47.950.000,00	0	0	0	0
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.638.996.140,00	1.562.988.341,00	48.500.000,00	47.950.000,00	0	0	0	0
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	183.545.803,00	174.400.687,00	0	0	0	0	0	0
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	33.077.731,00	33.077.383,00	0	0	0	0	0	0
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.050.344,00	10.050.344,00	0	0	0	0	0	0
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	24.119.949,00	21.719.949,00	0	0	0	0	0	0
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	19.313.536,00	15.713.536,00	0	0	0	0	0	0
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	72.545.519,00	69.470.519,00	0	0	0	0	0	0
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24.438.724,00	24.368.956,00	0	0	0	0	0	0
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.147.335.437,00	1.110.718.614,00	0	0	0	0	0	0
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.066.512.422,20	1.032.523.433,00	0	0	0	0	0	0
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	39.574.936,44	36.954.505,00	0	0	0	0	0	0
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	41.248.078,36	41.240.676,00	0	0	0	0	0	0
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0	0	0	0	0	0
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5.000.000,00	5.000.000,00	0	0	0	0	0	0
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	53.537.970,00	53.470.300,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0	0	0	0
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0	6.000.000,00	6.000.000,00	0	0	0	0
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.928.120,00	5.925.500,00	0	0	0	0	0	0
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.200.000,00	2.200.000,00	0	0	0	0	0	0
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45.409.850,00	45.344.800,00	0	0	0	0	0	0
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	202.925.670,00	175.997.240,00	42.500.000,00	41.950.000,00	0	0	0	0
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	95.997.240,00	95.997.240,00	42.500.000,00	41.950.000,00	0	0	0	0
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	106.928.430,00	80.000.000,00	0	0	0	0	0	0
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25.851.760,00	24.172.500,00	0	0	0	0	0	0
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.251.760,00	8.572.500,00	0	0	0	0	0	0
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	15.600.000,00	15.600.000,00	0	0	0	0	0	0
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.799.500,00	19.229.000,00	0	0	0	0	0	0
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12.406.500,00	10.836.000,00	0	0	0	0	0	0
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.393.000,00	8.393.000,00	0	0	0	0	0	0
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	859.365.241,00	828.118.915,00	4.440.000,00	0	0	0	0	0
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	713.240.241,00	684.268.915,00	4.440.000,00	0	0	0	0	0
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	713.240.241,00	684.268.915,00	4.440.000,00	0	0	0	0	0
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	146.125.000,00	143.850.000,00	0	0	0	0	0	0
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	146.125.000,00	143.850.000,00	0	0	0	0	0	0
2.16			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3.141.540.812,64	2.941.115.680,00	579.628.740,00	572.863.000,00	0	0	0	0
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000		DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN	3.141.540.812,64	2.941.115.680,00	579.628.740,00	572.863.000,00	0	0	0	0
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.633.809.676,64	1.536.562.980,00	18.244.300,00	18.200.000,00	0	0	0	0
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48.159.877,00	47.852.500,00	0	0	0	0	0	0
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19.956.593,00	19.840.000,00	0	0	0	0	0	0
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.469.467,00	1.287.000,00	0	0	0	0	0	0
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.680.650,00	2.678.000,00	0	0	0	0	0	0
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	588.604,00	585.000,00	0	0	0	0	0	0
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.464.563,00	23.462.500,00	0	0	0	0	0	0
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.221.140.006,34	1.188.880.270,00	0	0	0	0	0	0
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.190.368.087,34	1.158.135.270,00	0	0	0	0	0	0
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji2an/Verifikasi Keuangan SKPD	10.818.460,00	10.793.000,00	0	0	0	0	0	0
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	19.953.459,00	19.952.000,00	0	0	0	0	0	0
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.666.936,00	3.664.000,00	0	0	0	0	0	0
2.16	2.16.2.20 2.21.04.0000	2.16.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	343.013,00	341.000,00	0	0	0	0	0	0
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.323.923,00	3.323.000,00	0	0	0	0	0	0
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	74.390.596,00	51.774.000,00	0	0	0	0	0	0
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	16.515.673,00	11.700.000,00	0	0	0	0	0	0
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	10.069.923,00	10.069.000,00	0	0	0	0	0	0
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	47.805.000,00	30.005.000,00	0	0	0	0	0	0
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	25.409.504,00	25.380.000,00	11.244.300,00	11.200.000,00	0	0	0	0
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.905.000,00	2.905.000,00	0	0	0	0	0	0
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.580.504,00	6.551.000,00	11.244.300,00	11.200.000,00	0	0	0	0
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15.924.000,00	15.924.000,00	0	0	0	0	0	0
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	214.687.797,30	173.295.210,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0	0	0	0
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	95.997.240,00	95.997.240,00	0	0	0	0	0	0
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	118.690.557,30	77.297.970,00	0	0	0	0	0	0
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	7.000.000,00	7.000.000,00	0	0	0	0
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	45.139.960,00	44.997.000,00	0	0	0	0	0	0
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29.539.960,00	29.397.000,00	0	0	0	0	0	0
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	15.600.000,00	15.600.000,00	0	0	0	0	0	0
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.215.000,00	720.000,00	0	0	0	0	0	0
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	495.000,00	0	0	0	0	0	0	0

2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	720.000,00	720.000,00	0	0	0	0	0	0
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	363.080.753,00	352.019.220,00	21.500.000,00	21.500.000,00	0	0	0	0
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	363.080.753,00	352.019.220,00	21.500.000,00	21.500.000,00	0	0	0	0
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.02.2.01.0014	Relasi Media	296.801.007,00	296.676.180,00	0	0	0	0	0	0
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	8.415.820,00	8.414.934,00	0	0	0	0	0	0
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik	45.551.426,00	44.865.606,00	0	0	0	0	0	0
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	12.312.500,00	2.062.500,00	21.500.000,00	21.500.000,00	0	0	0	0
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	1.144.650.383,00	1.052.533.480,00	539.884.440,00	533.163.000,00	0	0	0	0
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	170.220.000,00	170.220.000,00	0	0	0	0	0	0
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.03.2.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	170.220.000,00	170.220.000,00	0	0	0	0	0	0
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	974.430.383,00	882.313.480,00	539.884.440,00	533.163.000,00	0	0	0	0
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.03.2.02.0018	Koordinasi penyusunan dan/atau revisi arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	7.006.328,00	7.006.000,00	0	0	0	0	0	0
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.03.2.02.0021	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	33.158.503,00	24.535.800,00	0	0	0	0	0	0
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	934.265.552,00	850.771.680,00	539.884.440,00	533.163.000,00	0	0	0	0
2.17			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.511.005.024,46	2.427.772.910,00	25.654.731,00	24.468.000,00	0	0	0	0
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000		DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	2.511.005.024,46	2.427.772.910,00	25.654.731,00	24.468.000,00	0	0	0	0
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.281.118.368,46	2.198.856.304,00	25.654.731,00	24.468.000,00	0	0	0	0
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60.756.728,00	41.556.728,00	0	0	0	0	0	0
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	44.574.498,00	25.374.498,00	0	0	0	0	0	0
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	16.182.230,00	16.182.230,00	0	0	0	0	0	0
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.208.851.640,46	2.145.839.576,00	0	0	0	0	0	0
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.190.559.282,46	2.127.547.218,00	0	0	0	0	0	0
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	18.292.358,00	18.292.358,00	0	0	0	0	0	0
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.110.000,00	7.110.000,00	0	0	0	0	0	0
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7.110.000,00	7.110.000,00	0	0	0	0	0	0
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	25.654.731,00	24.468.000,00	0	0	0	0
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	25.654.731,00	24.468.000,00	0	0	0	0
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.400.000,00	1.350.000,00	0	0	0	0	0	0
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.400.000,00	1.350.000,00	0	0	0	0	0	0
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	58.334.850,00	57.985.800,00	0	0	0	0	0	0
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	58.334.850,00	57.985.800,00	0	0	0	0	0	0
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	58.334.850,00	57.985.800,00	0	0	0	0	0	0
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	6.721.978,00	6.721.978,00	0	0	0	0	0	0
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	6.721.978,00	6.721.978,00	0	0	0	0	0	0
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	6.721.978,00	6.721.978,00	0	0	0	0	0	0
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	164.829.828,00	164.208.828,00	0	0	0	0	0	0
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	164.829.828,00	164.208.828,00	0	0	0	0	0	0
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	164.829.828,00	164.208.828,00	0	0	0	0	0	0
2.18			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	1.875.776.125,30	1.713.244.297,00	64.818.050,00	64.790.000,00	0	0	0	0
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1.875.776.125,30	1.713.244.297,00	64.818.050,00	64.790.000,00	0	0	0	0
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.713.754.559,30	1.558.878.667,00	64.818.050,00	64.790.000,00	0	0	0	0
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	47.611.412,00	45.101.412,00	0	0	0	0	0	0
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	46.088.408,00	43.578.408,00	0	0	0	0	0	0
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	452.536,00	452.536,00	0	0	0	0	0	0
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	576.536,00	576.536,00	0	0	0	0	0	0
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	493.932,00	493.932,00	0	0	0	0	0	0
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.180.846.283,00	1.148.036.052,00	0	0	0	0	0	0
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.132.061.058,00	1.099.250.828,00	0	0	0	0	0	0
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	46.624.081,00	46.624.081,00	0	0	0	0	0	0
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.161.144,00	2.161.143,00	0	0	0	0	0	0
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.269.924,00	3.269.924,00	0	0	0	0	0	0
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.269.924,00	3.269.924,00	0	0	0	0	0	0
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15.310.000,00	15.230.000,00	0	0	0	0	0	0
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15.310.000,00	15.230.000,00	0	0	0	0	0	0
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	37.417.350,00	37.317.020,00	0	0	0	0	0	0
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.210.000,00	4.210.000,00	0	0	0	0	0	0
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	33.207.350,00	33.107.020,00	0	0	0	0	0	0
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	356.652.370,30	239.331.059,00	64.818.050,00	64.790.000,00	0	0	0	0
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	95.997.240,00	95.997.240,00	0	0	0	0	0	0
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	244.270.717,30	126.961.447,00	0	0	0	0	0	0
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16.384.413,00	16.372.372,00	64.818.050,00	64.790.000,00	0	0	0	0
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	53.418.420,00	52.238.000,00	0	0	0	0	0	0
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.818.420,00	24.638.000,00	0	0	0	0	0	0
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	27.600.000,00	27.600.000,00	0	0	0	0	0	0
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19.228.800,00	18.355.200,00	0	0	0	0	0	0
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12.928.800,00	12.055.200,00	0	0	0	0	0	0

2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.300.000,00	6.300.000,00	0	0	0	0	0	0
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	11.428.236,00	11.313.472,00	0	0	0	0	0	0
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	11.428.236,00	11.313.472,00	0	0	0	0	0	0
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	11.428.236,00	11.313.472,00	0	0	0	0	0	0
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	94.084.769,00	92.583.897,00	0	0	0	0	0	0
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	94.084.769,00	92.583.897,00	0	0	0	0	0	0
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	94.084.769,00	92.583.897,00	0	0	0	0	0	0
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	56.508.561,00	50.468.261,00	0	0	0	0	0	0
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	56.508.561,00	50.468.261,00	0	0	0	0	0	0
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	56.508.561,00	50.468.261,00	0	0	0	0	0	0
2.19			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	3.625.215.612,66	3.546.821.034,00	11.673.616.412,00	11.663.328.985,00	0	0	0	0
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000		DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	3.625.215.612,66	3.546.821.034,00	11.673.616.412,00	11.663.328.985,00	0	0	0	0
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.330.785.977,66	1.257.393.234,00	14.550.000,00	14.550.000,00	0	0	0	0
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	53.027.281,00	53.026.000,00	0	0	0	0	0	0
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	39.527.281,00	39.526.000,00	0	0	0	0	0	0
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	13.500.000,00	13.500.000,00	0	0	0	0	0	0
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.054.627.354,66	984.700.255,00	0	0	0	0	0	0
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	986.947.354,66	919.520.255,00	0	0	0	0	0	0
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	67.680.000,00	65.180.000,00	0	0	0	0	0	0
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	11.250.000,00	11.250.000,00	0	0	0	0	0	0
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	11.250.000,00	11.250.000,00	0	0	0	0	0	0
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	30.813.750,00	30.633.800,00	14.550.000,00	14.550.000,00	0	0	0	0
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0	14.550.000,00	14.550.000,00	0	0	0	0
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.380.000,00	6.380.000,00	0	0	0	0	0	0
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24.433.750,00	24.253.800,00	0	0	0	0	0	0
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	92.120.179,00	92.120.179,00	0	0	0	0	0	0
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	92.120.179,00	92.120.179,00	0	0	0	0	0	0
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	54.177.193,00	53.858.000,00	0	0	0	0	0	0
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.590.949,00	11.588.000,00	0	0	0	0	0	0
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.986.244,00	26.670.000,00	0	0	0	0	0	0
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	15.600.000,00	15.600.000,00	0	0	0	0	0	0
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	34.770.220,00	31.805.000,00	0	0	0	0	0	0
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	34.770.220,00	31.805.000,00	0	0	0	0	0	0
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	265.458.885,00	263.935.000,00	0	0	0	0	0	0
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	90.458.885,00	88.935.000,00	0	0	0	0	0	0
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.02.2.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	47.382.692,00	47.366.000,00	0	0	0	0	0	0
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.02.2.01.0014	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	31.200.000,00	29.700.000,00	0	0	0	0	0	0
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	11.876.193,00	11.869.000,00	0	0	0	0	0	0
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	175.000.000,00	175.000.000,00	0	0	0	0	0	0
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.02.2.02.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis penegakkan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	175.000.000,00	175.000.000,00	0	0	0	0	0	0
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	1.928.970.750,00	1.925.492.800,00	11.659.066.412,00	11.648.778.985,00	0	0	0	0
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	0	0	11.659.066.412,00	11.648.778.985,00	0	0	0	0
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	0	0	11.659.066.412,00	11.648.778.985,00	0	0	0	0
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	78.970.750,00	75.492.800,00	0	0	0	0	0	0
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	78.970.750,00	75.492.800,00	0	0	0	0	0	0
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	1.850.000.000,00	1.850.000.000,00	0	0	0	0	0	0
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.03.2.04.0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	1.850.000.000,00	1.850.000.000,00	0	0	0	0	0	0
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	100.000.000,00	100.000.000,00	0	0	0	0	0	0
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	100.000.000,00	100.000.000,00	0	0	0	0	0	0
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	0	0	0	0	0	0
2.20			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	62.660.207,00	58.939.300,00	0	0	0	0	0	0
2.20	2.16.2.20.2.21.04.0000		DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN	62.660.207,00	58.939.300,00	0	0	0	0	0	0
2.20	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	62.660.207,00	58.939.300,00	0	0	0	0	0	0
2.20	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	62.660.207,00	58.939.300,00	0	0	0	0	0	0
2.20	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.20.02.2.01.0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	34.928.818,00	33.091.300,00	0	0	0	0	0	0
2.20	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.20.02.2.01.0011	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	27.731.389,00	25.848.000,00	0	0	0	0	0	0
2.21			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	129.183.830,00	126.733.217,00	0	0	0	0	0	0
2.21	2.16.2.20.2.21.04.0000		DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN	129.183.830,00	126.733.217,00	0	0	0	0	0	0

2.21	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	129.183.830,00	126.733.217,00	0	0	0	0	0	0
2.21	2.16.2.20 2.21.04.0000	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	129.183.830,00	126.733.217,00	0	0	0	0	0	0
2.21	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.21.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	31.947.440,00	29.539.400,00	0	0	0	0	0	0
2.21	2.16 2.20.2.21.04.0000	2.21.02.2.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	10.906.000,00	10.878.002,00	0	0	0	0	0	0
2.21	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	54.633.413,00	54.618.838,00	0	0	0	0	0	0
2.21	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	31.696.977,00	31.696.977,00	0	0	0	0	0	0
2.22			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	234.381.923,00	234.347.000,00	13.146.000,00	13.146.000,00	0	0	0	0
2.22	1.01.2.22.0.00.02.0000		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	234.381.923,00	234.347.000,00	13.146.000,00	13.146.000,00	0	0	0	0
2.22	1.01.2.22.0.00.02.0000	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	130.380.669,00	130.354.000,00	13.146.000,00	13.146.000,00	0	0	0	0
2.22	1.01.2.22.0.00.02.0000	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	130.380.669,00	130.354.000,00	0	0	0	0	0	0
2.22	1.01.2.22.0.00.02.0000	2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	130.380.669,00	130.354.000,00	0	0	0	0	0	0
2.22	1.01.2.22.0.00.02.0000	2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Pengamalnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	0	0	13.146.000,00	13.146.000,00	0	0	0	0
2.22	1.01.2.22.0.00.02.0000	2.22.02.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	0	0	13.146.000,00	13.146.000,00	0	0	0	0
2.22	1.01.2.22.0.00.02.0000	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	104.001.254,00	103.993.000,00	0	0	0	0	0	0
2.22	1.01.2.22.0.00.02.0000	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	104.001.254,00	103.993.000,00	0	0	0	0	0	0
2.22	1.01.2.22.0.00.02.0000	2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	104.001.254,00	103.993.000,00	0	0	0	0	0	0
2.23			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	1.411.426.371,20	1.374.095.548,00	892.896.648,00	890.284.000,00	0	0	0	0
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1.411.426.371,20	1.374.095.548,00	892.896.648,00	890.284.000,00	0	0	0	0
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.138.276.059,20	1.102.625.830,00	0	0	0	0	0	0
2.23	2.23.2.24.0 00.02.0000	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	124.352.610,00	124.072.287,00	0	0	0	0	0	0
2.23	2.23.2.24 0.00.02.0000	2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	81.352.124,00	81.280.924,00	0	0	0	0	0	0
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.979.873,00	3.947.629,00	0	0	0	0	0	0
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.230.868,00	4.230.868,00	0	0	0	0	0	0
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.421.924,00	4.304.877,00	0	0	0	0	0	0
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2 23.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.933.245,00	3.873.413,00	0	0	0	0	0	0
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	26.434.576,00	26.434.576,00	0	0	0	0	0	0
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	736.883.034,20	709.917.926,00	0	0	0	0	0	0
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	736.883.034,20	709.917.926,00	0	0	0	0	0	0
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.180.000,00	6.500.000,00	0	0	0	0	0	0
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7.180.000,00	6.500.000,00	0	0	0	0	0	0
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	118.934.915,00	111.846.417,00	0	0	0	0	0	0
2.23	2.23.2.24 0.00.02.0000	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	57.204.415,00	50.402.267,00	0	0	0	0	0	0
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	25.306.000,00	25.306.000,00	0	0	0	0	0	0
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.947.500,00	3.947.500,00	0	0	0	0	0	0
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.225.000,00	7.980.000,00	0	0	0	0	0	0
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24.252.000,00	24.210.650,00	0	0	0	0	0	0
2.23	2.23 2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	96.000.000,00	96.000.000,00	0	0	0	0	0	0
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	96.000.000,00	96.000.000,00	0	0	0	0	0	0
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.000.000,00	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	53.925.500,00	53.289.200,00	0	0	0	0	0	0
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23 01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	46.725.500,00	46.089.200,00	0	0	0	0	0	0
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.200.000,00	7.200.000,00	0	0	0	0	0	0
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	273.150.312,00	271.469.718,00	892.896.648,00	890.284.000,00	0	0	0	0
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	116.526.730,00	114.975.337,00	0	0	0	0	0	0
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	18.810.618,00	18.489.600,00	0	0	0	0	0	0
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.02.2.01.0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	19.525.275,00	18.906.500,00	0	0	0	0	0	0
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.02.2.01.0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	48.318.206,00	48.249.406,00	0	0	0	0	0	0
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.02.2.01.0019	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	29.872.631,00	29.329.831,00	0	0	0	0	0	0
2.23	2.23.2.24 0.00.02.0000	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	156.623.582,00	156.494.381,00	892.896.648,00	890.284.000,00	0	0	0	0
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.02.2.02.0003	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	0	0	892.896.648,00	890 284 000,00	0	0	0	0
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	109.478.001,00	109.478.001,00	0	0	0	0	0	0
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23 02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	47.145.581,00	47.016.380,00	0	0	0	0	0	0
2.24			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	38.612.350,00	38.498.550,00	0	0	0	0	0	0
2.24	2.23.2.24.0.00.02.0000		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	38.612.350,00	38.498.550,00	0	0	0	0	0	0
2.24	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	38.612.350,00	38.498.550,00	0	0	0	0	0	0
2.24	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	38.612.350,00	38.498.550,00	0	0	0	0	0	0
2.24	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	38.612.350,00	38.498.550,00	0	0	0	0	0	0
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	13.378.064.255,27	12.636.570.902,00	712.420.181,50	609.660.000,00	0	0	0	0
3.25			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.644.974.269,17	3.581.997.309,00	63.145.500,00	63.145.000,00	0	0	0	0
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000		DINAS PERIKANAN	3.644.974.269,17	3.581.997.309,00	63.145.500,00	63.145.000,00	0	0	0	0
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.221.566.692,17	2.170.615.225,00	48.545.500,00	48.545.000,00	0	0	0	0
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.457.682,00	29.407.000,00	0	0	0	0	0	0
3.25	3.25 0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.103.124,00	20.095.000,00	0	0	0	0	0	0
3.25	3.25.0 00.0 00.01 0000	3.25.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.168.289,00	1.164.000,00	0	0	0	0	0	0

3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.091.829,00	1.088.000,00	0	0	0	0	0	0
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.338.354,00	1.329.000,00	0	0	0	0	0	0
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.139.737,00	1.133.000,00	0	0	0	0	0	0
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.616.349,00	4.598.000,00	0	0	0	0	0	0
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.816.820.806,17	1.770.820.112,00	0	0	0	0	0	0
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.783.715.735,17	1.737.726.112,00	0	0	0	0	0	0
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.357.267,00	1.356.000,00	0	0	0	0	0	0
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	31.747.804,00	31.738.000,00	0	0	0	0	0	0
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.008.725,00	4.006.000,00	0	0	0	0	0	0
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.008.725,00	4.006.000,00	0	0	0	0	0	0
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	19.489.743,00	19.261.500,00	0	0	0	0	0	0
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5.699.743,00	5.531.500,00	0	0	0	0	0	0
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	13.790.000,00	13.730.000,00	0	0	0	0	0	0
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	70.444.731,00	70.148.444,00	45.545.500,00	45.545.000,00	0	0	0	0
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0	45.545.500,00	45.545.000,00	0	0	0	0
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.797.500,00	6.797.500,00	0	0	0	0	0	0
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.089.828,00	6.087.000,00	0	0	0	0	0	0
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	57.557.403,00	57.263.944,00	0	0	0	0	0	0
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	178.143.049,00	175.155.169,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0	0	0	0
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	96.000.000,00	96.000.000,00	0	0	0	0	0	0
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	0	0	3.000.000,00	3.000.000,00	0	0	0	0
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	82.143.049,00	79.155.169,00	0	0	0	0	0	0
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	101.501.956,00	100.121.000,00	0	0	0	0	0	0
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	701.804,00	701.000,00	0	0	0	0	0	0
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.600.152,00	21.520.000,00	0	0	0	0	0	0
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	79.200.000,00	77.900.000,00	0	0	0	0	0	0
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.700.000,00	1.696.000,00	0	0	0	0	0	0
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.700.000,00	1.696.000,00	0	0	0	0	0	0
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	226.938.174,00	224.666.710,00	0	0	0	0	0	0
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	226.938.174,00	224.666.710,00	0	0	0	0	0	0
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	29.231.674,00	28.328.000,00	0	0	0	0	0	0
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.02.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	197.706.500,00	196.338.710,00	0	0	0	0	0	0
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1.063.404.516,00	1.055.512.874,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0	0	0	0
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	1.063.404.516,00	1.055.512.874,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0	0	0	0
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	193.236.344,00	190.810.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0	0	0	0
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	744.172.410,00	742.400.484,00	0	0	0	0	0	0
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.04.0010	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	125.995.762,00	122.302.390,00	0	0	0	0	0	0
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	133.064.887,00	131.202.500,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0	0	0	0
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	36.554.900,00	35.463.500,00	0	0	0	0	0	0
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.2.02.0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	36.554.900,00	35.463.500,00	0	0	0	0	0	0
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	96.509.987,00	95.739.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0	0	0	0
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	36.509.987,00	35.739.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0	0	0	0
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	60.000.000,00	60.000.000,00	0	0	0	0	0	0
3.26			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	330.304.685,00	325.769.500,00	0	0	0	0	0	0
3.26	2.19.3.26.0.00.02.0000		DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	330.304.685,00	325.769.500,00	0	0	0	0	0	0
3.26	2.19.3.26.0.00.02.0000	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	50.856.059,00	48.349.500,00	0	0	0	0	0	0
3.26	2.19.3.26.0.00.02.0000	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	50.856.059,00	48.349.500,00	0	0	0	0	0	0
3.26	2.19.3.26.0.00.02.0000	3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	50.856.059,00	48.349.500,00	0	0	0	0	0	0
3.26	2.19.3.26.0.00.02.0000	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	235.668.289,00	235.652.000,00	0	0	0	0	0	0
3.26	2.19.3.26.0.00.02.0000	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	235.668.289,00	235.652.000,00	0	0	0	0	0	0
3.26	2.19.3.26.0.00.02.0000	3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	235.668.289,00	235.652.000,00	0	0	0	0	0	0
3.26	2.19.3.26.0.00.02.0000	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	43.780.337,00	41.768.000,00	0	0	0	0	0	0
3.26	2.19.3.26.0.00.02.0000	3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	43.780.337,00	41.768.000,00	0	0	0	0	0	0
3.26	2.19.3.26.0.00.02.0000	3.26.04.2.02.0003	Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan	43.780.337,00	41.768.000,00	0	0	0	0	0	0
3.27			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	7.158.946.336,00	6.595.256.753,00	141.725.723,50	55.406.000,00	0	0	0	0
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	7.158.946.336,00	6.595.256.753,00	141.725.723,50	55.406.000,00	0	0	0	0
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.663.027.541,00	5.340.195.475,00	83.744.723,50	48.635.000,00	0	0	0	0
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	68.732.123,00	67.711.500,00	0	0	0	0	0	0
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	65.312.495,00	64.297.500,00	0	0	0	0	0	0
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	704.907,00	703.500,00	0	0	0	0	0	0
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	704.907,00	703.500,00	0	0	0	0	0	0
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.004.907,00	1.003.500,00	0	0	0	0	0	0
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.004.907,00	1.003.500,00	0	0	0	0	0	0
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.179.199.285,00	4.867.055.502,00	0	0	0	0	0	0
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.136.972.288,00	4.827.506.802,00	0	0	0	0	0	0
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	42.226.997,00	39.548.700,00	0	0	0	0	0	0
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	24.488.257,00	24.487.000,00	0	0	0	0	0	0

3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.03.0006	Pemanasahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	24.488.257,00	24.487.000,00	0	0	0	0	0	0
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	68.098.976,00	62.010.500,00	0	0	0	0	0	0
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	38.958.976,00	38.860.500,00	0	0	0	0	0	0
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	29.140.000,00	23.150.000,00	0	0	0	0	0	0
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	101.486.396,00	100.375.483,00	48.744.723,50	48.635.000,00	0	0	0	0
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	48.744.723,50	48.635.000,00	0	0	0	0
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.540.170,00	2.540.000,00	0	0	0	0	0	0
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.924.000,00	2.944.000,00	0	0	0	0	0	0
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	32.290.000,00	32.290.000,00	0	0	0	0	0	0
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	61.732.226,00	61.601.483,00	0	0	0	0	0	0
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95.997.240,00	95.997.240,00	35.000.000,00	0	0	0	0	0
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	95.997.240,00	95.997.240,00	35.000.000,00	0	0	0	0	0
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	89.991.504,00	89.961.250,00	0	0	0	0	0	0
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.391.504,00	50.361.250,00	0	0	0	0	0	0
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	39.600.000,00	39.600.000,00	0	0	0	0	0	0
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35.033.760,00	32.597.000,00	0	0	0	0	0	0
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.033.760,00	32.597.000,00	0	0	0	0	0	0
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	764.619.187,00	609.740.978,00	6.771.000,00	6.771.000,00	0	0	0	0
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	597.854.231,00	448.422.118,00	6.771.000,00	6.771.000,00	0	0	0	0
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	314.218.469,00	310.426.118,00	6.771.000,00	6.771.000,00	0	0	0	0
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	283.635.762,00	137.996.000,00	0	0	0	0	0	0
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	166.764.956,00	161.318.860,00	0	0	0	0	0	0
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	166.764.956,00	161.318.860,00	0	0	0	0	0	0
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	0	0	51.210.000,00	0	0	0	0	0
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	0	0	51.210.000,00	0	0	0	0	0
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	0	0	51.210.000,00	0	0	0	0	0
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	179.599.409,00	179.595.000,00	0	0	0	0	0	0
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	179.599.409,00	179.595.000,00	0	0	0	0	0	0
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	179.599.409,00	179.595.000,00	0	0	0	0	0	0
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	116.404.981,00	66.400.000,00	0	0	0	0	0	0
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	116.404.981,00	66.400.000,00	0	0	0	0	0	0
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	66.404.981,00	66.400.000,00	0	0	0	0	0	0
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.05.2.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	50.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	435.295.218,00	399.325.300,00	0	0	0	0	0	0
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	435.295.218,00	399.325.300,00	0	0	0	0	0	0
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	435.295.218,00	399.325.300,00	0	0	0	0	0	0
3.30			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	377.623.956,00	348.848.273,00	408.153.858,00	392.097.000,00	0	0	0	0
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000		DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	377.623.956,00	348.848.273,00	408.153.858,00	392.097.000,00	0	0	0	0
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	119.589.647,00	110.213.964,00	0	0	0	0	0	0
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.192.990,00	23.802.914,00	0	0	0	0	0	0
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.192.990,00	23.802.914,00	0	0	0	0	0	0
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	31.970.000,00	28.426.500,00	0	0	0	0	0	0
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.100.000,00	8.565.000,00	0	0	0	0	0	0
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19.870.000,00	19.861.500,00	0	0	0	0	0	0
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25.699.657,00	25.196.550,00	0	0	0	0	0	0
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.099.657,00	9.596.550,00	0	0	0	0	0	0
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	15.600.000,00	15.600.000,00	0	0	0	0	0	0
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36.727.000,00	32.788.000,00	0	0	0	0	0	0
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36.727.000,00	32.788.000,00	0	0	0	0	0	0
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	195.017.570,00	175.617.570,00	408.153.858,00	392.097.000,00	0	0	0	0
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	14.060.000,00	14.060.000,00	0	0	0	0	0	0
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	14.060.000,00	14.060.000,00	0	0	0	0	0	0
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	180.957.570,00	161.557.570,00	408.153.858,00	392.097.000,00	0	0	0	0
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	2.067.018,00	2.067.018,00	408.153.858,00	392.097.000,00	0	0	0	0
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.03.2.02.0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	178.890.552,00	159.490.552,00	0	0	0	0	0	0
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	45.160.360,00	45.160.360,00	0	0	0	0	0	0
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	42.355.910,00	42.355.910,00	0	0	0	0	0	0
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	42.355.910,00	42.355.910,00	0	0	0	0	0	0
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.804.450,00	2.804.450,00	0	0	0	0	0	0
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	2.804.450,00	2.804.450,00	0	0	0	0	0	0
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	17.856.379,00	17.856.379,00	0	0	0	0	0	0
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	17.856.379,00	17.856.379,00	0	0	0	0	0	0
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	9.334.630,00	9.334.630,00	0	0	0	0	0	0

3.30	2.17.3.30.3 31.01.0000	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	8.521.749,00	8.521.749,00	0	0	0	0	0	0
3.31			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	60.251.154,00	53.036.154,00	0	0	0	0	0	0
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000		DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	60.251.154,00	53.036.154,00	0	0	0	0	0	0
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	910.460,00	895.460,00	0	0	0	0	0	0
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	910.460,00	895.460,00	0	0	0	0	0	0
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	455.230,00	442.230,00	0	0	0	0	0	0
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	455.230,00	453.230,00	0	0	0	0	0	0
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	59.340.694,00	52.140.694,00	0	0	0	0	0	0
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	59.340.694,00	52.140.694,00	0	0	0	0	0	0
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	59.340.694,00	52.140.694,00	0	0	0	0	0	0
3.32			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	1.805.963.855,10	1.731.662.913,00	99.395.100,00	99.012.000,00	0	0	0	0
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1.805.963.855,10	1.731.662.913,00	99.395.100,00	99.012.000,00	0	0	0	0
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.669.070.376,10	1.599.603.045,00	0	0	0	0	0	0
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33.304.168,00	33.302.068,00	0	0	0	0	0	0
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28.417.067,00	28.417.067,00	0	0	0	0	0	0
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	952.725,00	952.725,00	0	0	0	0	0	0
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.741.653,00	1.741.653,00	0	0	0	0	0	0
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	958.777,00	958.777,00	0	0	0	0	0	0
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.233.946,00	1.231.846,00	0	0	0	0	0	0
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.308.476.044,10	1.247.327.166,00	0	0	0	0	0	0
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.275.110.773,10	1.216.461.895,00	0	0	0	0	0	0
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.110.146,00	1.110.146,00	0	0	0	0	0	0
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	32.255.125,00	29.755.125,00	0	0	0	0	0	0
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	9.220.000,00	9.220.000,00	0	0	0	0	0	0
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	9.220.000,00	9.220.000,00	0	0	0	0	0	0
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	39.277.750,00	39.277.500,00	0	0	0	0	0	0
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.06.0003	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000,00	10.000.000,00	0	0	0	0	0	0
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	29.277.750,00	29.277.500,00	0	0	0	0	0	0
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95.997.240,00	95.997.240,00	0	0	0	0	0	0
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	95.997.240,00	95.997.240,00	0	0	0	0	0	0
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	43.052.824,00	37.853.074,00	0	0	0	0	0	0
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27.452.824,00	22.253.074,00	0	0	0	0	0	0
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	15.600.000,00	15.600.000,00	0	0	0	0	0	0
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	139.742.350,00	136.625.997,00	0	0	0	0	0	0
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35.922.200,00	33.044.100,00	0	0	0	0	0	0
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.200.000,00	4.200.000,00	0	0	0	0	0	0
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	99.620.150,00	99.381.897,00	0	0	0	0	0	0
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.02	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	67.953.118,00	66.314.118,00	0	0	0	0	0	0
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.02.2.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	67.953.118,00	66.314.118,00	0	0	0	0	0	0
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.02.2.01.0001	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	47.952.852,00	46.313.852,00	0	0	0	0	0	0
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.02.2.01.0003	Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	20.000.266,00	20.000.266,00	0	0	0	0	0	0
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	68.940.361,00	65.745.750,00	99.395.100,00	99.012.000,00	0	0	0	0
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.04.2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	68.940.361,00	65.745.750,00	99.395.100,00	99.012.000,00	0	0	0	0
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.04.2.01.0002	Pengisian Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	68.940.361,00	65.745.750,00	99.395.100,00	99.012.000,00	0	0	0	0
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	46.812.708.142,60	45.642.809.940,00	3.667.363.340,00	3.599.591.651,00	0	0	0	0
4.01			SEKRETARIAT DAERAH	29.480.203.596,60	28.593.580.210,00	2.785.007.350,00	2.771.231.650,00	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001		BAGIAN PEMERINTAHAN	496.864.567,00	490.195.517,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	496.864.567,00	490.195.517,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	471.799.435,00	465.339.812,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	201.694.194,00	199.694.117,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	60.225.708,00	58.977.634,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	209.879.533,00	206.668.061,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	25.065.132,00	24.855.705,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	24.264.462,00	24.055.705,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	800.670,00	800.000,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002		BAGIAN HUKUM DAN HAM	313.231.979,00	290.633.800,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	313.231.979,00	290.633.800,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	313.231.979,00	290.633.800,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	161.161.268,00	148.699.200,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	55.092.654,00	54.982.300,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	96.978.057,00	86.952.300,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003		BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	2.979.902.616,00	2.341.419.105,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	2.979.902.616,00	2.341.419.105,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	2.979.902.616,00	2.341.419.105,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	2.659.432.954,00	2.031.932.954,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	235.581.280,00	234.994.780,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	84.888.382,00	74.491.371,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004		BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	333.312.766,00	326.495.940,00	16.750.000,00	16.750.000,00	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	333.312.766,00	326.495.940,00	16.750.000,00	16.750.000,00	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	301.303.262,00	296.323.940,00	6.250.000,00	6.250.000,00	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	4.500.000,00	4.500.000,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	237.930.284,00	237.388.040,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	58.872.978,00	54.435.900,00	6.250.000,00	6.250.000,00	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	32.009.504,00	30.172.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	32.009.504,00	30.172.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	0	0	0	0

4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005		BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	240.049.354,00	239.174.007,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	240.049.354,00	239.174.007,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	240.049.354,00	239.174.007,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	173.213.616,00	172.779.672,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	43.298.500,00	43.059.851,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	23.537.238,00	23.334.484,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006		BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	770.415.580,00	746.375.887,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	770.415.580,00	746.375.887,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	770.415.580,00	746.375.887,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	272.275.458,00	256.259.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	375.681.493,00	374.942.487,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	122.458.629,00	115.174.400,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007		BAGIAN UMUM	23.079.958.769,60	22.903.577.062,00	2.558.257.350,00	2.544.631.650,00	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	23.079.958.769,60	22.903.577.062,00	2.558.257.350,00	2.544.631.650,00	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.438.460,00	24.436.000,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.221.960,00	10.221.000,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.371.960,00	6.371.000,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.844.540,00	7.844.000,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.945.258.848,60	4.869.529.782,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.722.257.179,60	4.646.528.782,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	223.001.669,00	223.001.000,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	460.798.145,00	460.782.350,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	369.050.000,00	369.034.350,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	91.748.145,00	91.748.000,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	943.120.000,00	943.120.000,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	943.120.000,00	943.120.000,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.081.987.865,00	6.081.090.478,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	346.045.695,00	346.045.000,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.133.758.000,00	1.132.999.600,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	298.185.000,00	298.185.000,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.498.550.000,00	1.498.532.481,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.805.449.170,00	2.805.328.397,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	106.300.000,00	106.300.000,00	2.145.647.350,00	2.135.157.500,00	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	0	1.487.085.000,00	1.477.955.000,00	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	0	0	201.550.000,00	201.400.000,00	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	106.300.000,00	106.300.000,00	457.012.350,00	455.802.500,00	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.309.560.137,00	3.236.789.052,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	43.876.612,00	42.873.000,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	888.697.000,00	816.956.692,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.655.615.400,00	1.655.610.400,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	721.371.125,00	721.348.960,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.220.202.000,00	3.207.651.726,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.112.975.000,00	1.109.222.226,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	705.195.000,00	704.333.500,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.402.032.000,00	1.394.096.000,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	982.743.314,00	968.354.674,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	219.973.314,00	207.083.174,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	232.770.000,00	231.687.000,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	130.000.000,00	129.984.500,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	400.000.000,00	399.600.000,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	3.005.550.000,00	3.005.523.000,00	412.610.000,00	409.474.150,00	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	1.663.400.000,00	1.663.379.000,00	304.750.000,00	302.852.150,00	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	1.342.150.000,00	1.342.144.000,00	107.860.000,00	106.622.000,00	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008		BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	832.584.884,00	827.048.696,00	150.000.000,00	149.850.000,00	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	832.584.884,00	827.048.696,00	150.000.000,00	149.850.000,00	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	832.584.884,00	827.048.696,00	150.000.000,00	149.850.000,00	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	102.838.344,00	102.837.818,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	111.367.950,00	111.367.878,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	109.088.424,00	103.588.000,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	509.290.166,00	509.255.000,00	150.000.000,00	149.850.000,00	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009		BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	433.883.081,00	428.660.196,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	433.883.081,00	428.660.196,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	433.883.081,00	428.660.196,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	242.985.488,00	237.828.196,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	80.280.000,00	80.275.000,00	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	110.617.593,00	110.557.000,00	0	0	0	0	0	0
4.02			SEKRETARIAT DPRD	17.332.504.546,00	17.049.229.730,00	882.355.990,00	828.360.001,00	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000		SEKRETARIAT DPRD	17.332.504.546,00	17.049.229.730,00	882.355.990,00	828.360.001,00	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.473.174.502,00	13.204.778.741,00	882.355.990,00	828.360.001,00	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38.649.959,00	38.620.907,00	0	0	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.767.799,00	2.751.000,00	0	0	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.506.253,00	7.506.253,00	0	0	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.612.473,00	7.612.473,00	0	0	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7.631.253,00	7.619.000,00	0	0	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	7.000.010,00	7.000.010,00	0	0	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.132.171,00	6.132.171,00	0	0	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.771.374.298,68	1.640.026.419,00	0	0	0	0	0	0

4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.764.143.045,68	1.632.795.166,00	0	0	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.231.253,00	7.231.253,00	0	0	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	805.743.000,00	791.455.300,00	0	0	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	234.600.000,00	232.000.000,00	0	0	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	236.000.000,00	233.000.000,00	0	0	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	335.143.000,00	326.455.300,00	0	0	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	793.232.580,32	789.537.183,00	574.315.000,00	535.075.001,00	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.810.990,00	9.809.990,00	0	0	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.150.000,00	0	574.315.000,00	535.075.001,00	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.399.000,00	3.399.000,00	0	0	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	85.998.240,32	85.996.345,00	0	0	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	591.485.000,00	590.139.000,00	0	0	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.389.350,00	100.192.848,00	0	0	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	793.954.756,00	791.074.135,00	0	0	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.538.852,00	7.538.852,00	0	0	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	254.195.904,00	254.195.283,00	0	0	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	532.220.000,00	529.340.000,00	0	0	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	269.125.900,00	268.924.600,00	63.305.990,00	63.250.000,00	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	228.325.900,00	228.124.600,00	0	0	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	40.800.000,00	40.800.000,00	63.305.990,00	63.250.000,00	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	7.853.967.993,00	7.742.534.372,00	0	0	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	7.853.967.993,00	7.742.534.372,00	0	0	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	1.147.126.015,00	1.142.605.825,00	244.735.000,00	230.035.000,00	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	203.359.425,00	199.799.425,00	0	0	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	943.766.590,00	942.806.400,00	244.735.000,00	230.035.000,00	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	3.859.330.044,00	3.844.450.989,00	0	0	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	260.664.342,00	260.564.530,00	0	0	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	251.698.892,00	251.599.780,00	0	0	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	8.965.450,00	8.964.750,00	0	0	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	154.408.352,00	154.408.352,00	0	0	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	32.379.662,00	32.379.662,00	0	0	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	31.990.506,00	31.990.506,00	0	0	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD	29.400.000,00	29.400.000,00	0	0	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan	31.877.890,00	31.877.890,00	0	0	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0005	Pembahasan Laporan Semester	16.160.294,00	16.160.294,00	0	0	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	12.600.000,00	12.600.000,00	0	0	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	575.400.000,00	575.400.000,00	0	0	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	443.400.000,00	443.400.000,00	0	0	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	132.000.000,00	132.000.000,00	0	0	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	933.048.750,00	918.605.500,00	0	0	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	33.594.750,00	19.151.500,00	0	0	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	899.454.000,00	899.454.000,00	0	0	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	1.935.808.600,00	1.935.472.607,00	0	0	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1.935.808.600,00	1.935.472.607,00	0	0	0	0	0	0
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	19.646.752.293,86	16.515.154.334,00	507.141.000,00	504.680.250,00	895.000.000,00	696.208.433,00	87.616.788.800,00	84.790.265.420,00
5.01			PERENCANAAN	3.206.681.209,00	2.958.322.915,00	116.000.000,00	115.925.000,00	0	0	0	0
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	3.206.681.209,00	2.958.322.915,00	116.000.000,00	115.925.000,00	0	0	0	0
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.364.619.871,00	2.214.831.395,00	41.000.000,00	41.000.000,00	0	0	0	0
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	138.921.435,00	135.184.800,00	0	0	0	0	0	0
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.618.778,00	50.206.000,00	0	0	0	0	0	0
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9.587.421,00	9.135.400,00	0	0	0	0	0	0
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.969.914,00	6.787.600,00	0	0	0	0	0	0
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.765.322,00	2.764.400,00	0	0	0	0	0	0
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	4.441.031,00	4.440.000,00	0	0	0	0	0	0
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	64.538.969,00	61.851.400,00	0	0	0	0	0	0
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.724.244.586,00	1.609.195.248,00	0	0	0	0	0	0
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.687.804.612,00	1.572.978.848,00	0	0	0	0	0	0
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	36.439.974,00	36.216.400,00	0	0	0	0	0	0
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	55.401.683,00	46.938.648,00	0	0	0	0	0	0
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	55.401.683,00	46.938.648,00	0	0	0	0	0	0
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	33.169.943,00	32.916.400,00	0	0	0	0	0	0
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	26.049.943,00	25.826.400,00	0	0	0	0	0	0
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	7.120.000,00	7.090.000,00	0	0	0	0	0	0
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	176.910.100,00	172.688.207,00	41.000.000,00	41.000.000,00	0	0	0	0
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.629.950,00	1.625.000,00	0	0	0	0	0	0
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.766.800,00	4.940.000,00	41.000.000,00	41.000.000,00	0	0	0	0
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	35.650.000,00	35.620.000,00	0	0	0	0	0	0
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	49.250.000,00	48.050.000,00	0	0	0	0	0	0
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	84.613.350,00	82.453.207,00	0	0	0	0	0	0
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	16.000.000,00	16.000.000,00	0	0	0	0	0	0
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	16.000.000,00	16.000.000,00	0	0	0	0	0	0
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	179.258.324,00	163.080.892,00	0	0	0	0	0	0
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	75.134.124,00	61.237.800,00	0	0	0	0	0	0
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.724.200,00	19.443.092,00	0	0	0	0	0	0
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	83.400.000,00	82.400.000,00	0	0	0	0	0	0
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40.713.750,00	38.827.200,00	0	0	0	0	0	0
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20.115.000,00	18.319.200,00	0	0	0	0	0	0
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.598.750,00	20.508.000,00	0	0	0	0	0	0
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	514.729.521,00	464.826.922,00	75.000.000,00	74.925.000,00	0	0	0	0
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	448.148.277,00	402.860.422,00	0	0	0	0	0	0

5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	358.860.000,00	320.945.000,00	0	0	0	0	0	0
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	31.014.005,00	27.325.900,00	0	0	0	0	0	0
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	11.000.616,00	10.998.100,00	0	0	0	0	0	0
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	13.125.571,00	13.065.300,00	0	0	0	0	0	0
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrembang Kabupaten/Kota	13.851.093,00	13.130.822,00	0	0	0	0	0	0
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrembang Kecamatan	9.352.268,00	7.267.200,00	0	0	0	0	0	0
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	10.944.724,00	10.128.100,00	0	0	0	0	0	0
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01 02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	66.581.244,00	61.966.500,00	75.000.000,00	74.925.000,00	0	0	0	0
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.03 0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	36.367.487,00	33.241.200,00	0	0	0	0	0	0
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	30.213.757,00	28.725.300,00	75.000.000,00	74.925.000,00	0	0	0	0
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	327.331.867,00	278.664.598,00	0	0	0	0	0	0
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	190.109.461,00	164.573.600,00	0	0	0	0	0	0
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5.023.300,00	4.937.100,00	0	0	0	0	0	0
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	4.689.078,00	4.673.600,00	0	0	0	0	0	0
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	5.384.617,00	4.258.300,00	0	0	0	0	0	0
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	7.848.074,00	7.738.400,00	0	0	0	0	0	0
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	23.998.067,00	19.800.600,00	0	0	0	0	0	0
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	4.085.574,00	2.060.000,00	0	0	0	0	0	0
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	9.780.005,00	7.529.300,00	0	0	0	0	0	0
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	129.300.746,00	113.576.300,00	0	0	0	0	0	0
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	60.577.374,00	49.203.500,00	0	0	0	0	0	0
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	50.902.601,00	43.522.600,00	0	0	0	0	0	0
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	9.674.773,00	5.680.900,00	0	0	0	0	0	0
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	76.645.032,00	64.887.498,00	0	0	0	0	0	0
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	17.693.397,00	16.271.000,00	0	0	0	0	0	0
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	13.459.555,00	11.096.900,00	0	0	0	0	0	0
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	18.174.144,00	14.431.480,00	0	0	0	0	0	0
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	10.479.000,00	9.233.700,00	0	0	0	0	0	0
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	16.838.936,00	13.854.418,00	0	0	0	0	0	0
5.02			KEUANGAN	10.766.856.294,80	8.621.905.978,00	366.141.000,00	364.309.000,00	895.000.000,00	696.208.433,00	87.616.788.800,00	84.790.265.420,00
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	10.766.856.294,80	8.621.905.978,00	366.141.000,00	364.309.000,00	895.000.000,00	696.208.433,00	87.616.788.800,00	84.790.265.420,00
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.184.847.242,80	4.263.691.527,00	100.950.000,00	99.118.000,00	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	89.484.612,00	83.465.502,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	31.216.335,00	30.566.533,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.864.218,00	5.678.696,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.032.698,00	3.029.198,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.956.757,00	5.456.757,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	5.875.306,00	4.550.000,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.943.381,00	12.943.318,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.595.917,00	21.241.000,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.454.261.105,80	2.872.206.107,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.408.880.527,80	2.826.826.552,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	45.380.578,00	45.379.555,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	37.474.712,00	36.959.000,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	12.765.393,00	12.750.000,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.03.0006	Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada SKPD	24.709.319,00	24.209.000,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	415.447.258,00	412.923.271,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	114.265.425,00	111.865.000,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	60.858.918,00	60.745.500,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	45.322.915,00	45.312.771,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	195.000.000,00	195.000.000,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	224.059.700,00	222.199.700,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.018.250,00	26.018.250,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	28.260.000,00	28.260.000,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.000.000,00	10.000.000,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	159.781.450,00	157.921.450,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	186.500.000,00	180.000.000,00	100.950.000,00	99.118.000,00	0	0	0	0

5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	186.000.000,00	180.000.000,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	0	0	20.000.000,00	20.000.000,00	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	500.000,00	0	80.950.000,00	79.118.000,00	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	207.601.655,00	199.248.354,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	38.684.460,00	33.063.192,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	168.917.195,00	166.185.162,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	570.018.200,00	256.689.593,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	423.318.200,00	131.277.915,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.700.000,00	7.255.000,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	130.000.000,00	118.156.678,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	2.346.840.318,00	2.204.184.520,00	0	0	895.000.000,00	696.208.433,00	87.616.788.800,00	84.790.265.420,00
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.202.852.443,00	1.128.791.753,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	34.166.622,00	32.810.000,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	34.393.159,00	33.690.000,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	44.227.514,00	42.200.000,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	45.649.076,00	44.600.000,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	20.984.133,00	20.470.000,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	54.949.003,00	49.000.000,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	648.893.582,00	592.951.000,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	319.589.354,00	313.070.753,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	427.706.202,00	408.409.440,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	190.057.168,00	188.077.191,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	12.479.867,00	12.354.700,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	46.714.267,00	46.551.918,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	112.493.383,00	95.495.044,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	25.990.930,00	25.975.000,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	39.970.587,00	39.955.587,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	426.511.454,00	409.223.406,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	20.479.111,00	20.478.000,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	26.040.241,00	25.955.000,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	25.219.791,00	25.219.000,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	145.291.297,00	145.045.600,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	146.521.048,00	136.504.806,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	6.839.496,00	0	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.03.0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	14.389.379,00	14.375.000,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.03.0013	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	41.731.091,00	41.646.000,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	0	0	0	0	895.000.000,00	696.208.433,00	87.616.788.800,00	84.790.265.420,00
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	0	0	0	0	0	0	87.616.788.800,00	84.790.265.420,00
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	0	0	0	0	895.000.000,00	696.208.433,00	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	289.770.219,00	257.759.921,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.05.0001	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	63.916.855,00	52.475.000,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	127.722.000,00	107.404.921,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.05.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	98.131.364,00	97.880.000,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	837.448.103,00	788.860.930,00	68.300.000,00	68.300.000,00	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	837.448.103,00	788.860.930,00	68.300.000,00	68.300.000,00	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	22.807.684,00	22.780.000,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	22.051.695,00	22.048.000,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	200.000.000,00	200.000.000,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	249.817.732,00	249.771.540,00	20.300.000,00	20.300.000,00	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	52.360.000,00	35.628.390,00	48.000.000,00	48.000.000,00	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	38.056.015,00	25.874.000,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	93.856.558,00	78.173.000,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	11.917.514,00	11.913.000,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	114.290.905,00	110.383.000,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	32.290.000,00	32.290.000,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.397.720.631,00	1.365.169.001,00	196.891.000,00	196.891.000,00	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.397.720.631,00	1.365.169.001,00	196.891.000,00	196.891.000,00	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	54.846.664,00	54.721.669,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	83.080.808,00	83.080.808,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	94.395.000,00	94.210.000,00	146.891.000,00	146.891.000,00	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	50.365.438,00	46.365.438,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	119.478.121,00	119.345.571,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0	0	0	0

5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	136.391.572,00	118.259.210,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	30.921.564,00	30.891.000,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	82.602.494,00	82.602.494,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	23.065.847,00	23.065.847,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	479.460.920,00	471.981.458,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	100.239.444,00	98.893.040,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	96.925.315,00	96.059.531,00	0	0	0	0	0	0
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	45.947.444,00	45.692.935,00	0	0	0	0	0	0
5.03			KEPEGAWAIAN	4.542.136.407,06	3.960.342.141,00	25.000.000,00	24.446.250,00	0	0	0	0
5.03	5.03.0.00.0.00.02.0000		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	4.542.136.407,06	3.960.342.141,00	25.000.000,00	24.446.250,00	0	0	0	0
5.03	5.03.0.00.0.00.02.0000	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.095.388.434,06	1.939.444.444,00	25.000.000,00	24.446.250,00	0	0	0	0
5.03	5.03.0.00.0.00.02.0000	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39.521.339,00	36.982.000,00	0	0	0	0	0	0
5.03	5.03.0.00.0.00.02.0000	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29.314.563,00	26.780.000,00	0	0	0	0	0	0
5.03	5.03.0.00.0.00.02.0000	5.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.103.388,00	5.101.000,00	0	0	0	0	0	0
5.03	5.03.0.00.0.00.02.0000	5.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	5.103.388,00	5.101.000,00	0	0	0	0	0	0
5.03	5.03.0.00.0.00.02.0000	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.884.423.004,06	1.747.178.244,00	0	0	0	0	0	0
5.03	5.03.0.00.0.00.02.0000	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.844.732.441,06	1.710.088.244,00	0	0	0	0	0	0
5.03	5.03.0.00.0.00.02.0000	5.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguijian/Verifikasi Keuangan SKPD	39.690.563,00	37.090.000,00	0	0	0	0	0	0
5.03	5.03.0.00.0.00.02.0000	5.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	13.782.953,00	13.780.000,00	0	0	0	0	0	0
5.03	5.03.0.00.0.00.02.0000	5.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	13.782.953,00	13.780.000,00	0	0	0	0	0	0
5.03	5.03.0.00.0.00.02.0000	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0	0	0	0	0	0
5.03	5.03.0.00.0.00.02.0000	5.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000,00	10.000.000,00	0	0	0	0	0	0
5.03	5.03.0.00.0.00.02.0000	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	64.366.700,00	54.479.700,00	0	0	0	0	0	0
5.03	5.03.0.00.0.00.02.0000	5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	17.685.000,00	7.798.000,00	0	0	0	0	0	0
5.03	5.03.0.00.0.00.02.0000	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	46.681.700,00	46.681.700,00	0	0	0	0	0	0
5.03	5.03.0.00.0.00.02.0000	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0	25.000.000,00	24.446.250,00	0	0	0	0
5.03	5.03.0.00.0.00.02.0000	5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0	25.000.000,00	24.446.250,00	0	0	0	0
5.03	5.03.0.00.0.00.02.0000	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	33.468.688,00	27.429.500,00	0	0	0	0	0	0
5.03	5.03.0.00.0.00.02.0000	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	33.468.688,00	27.429.500,00	0	0	0	0	0	0
5.03	5.03.0.00.0.00.02.0000	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49.825.750,00	49.595.000,00	0	0	0	0	0	0
5.03	5.03.0.00.0.00.02.0000	5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	49.825.750,00	49.595.000,00	0	0	0	0	0	0
5.03	5.03.0.00.0.00.02.0000	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2.446.747.973,00	2.020.897.697,00	0	0	0	0	0	0
5.03	5.03.0.00.0.00.02.0000	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	207.292.817,00	194.272.355,00	0	0	0	0	0	0
5.03	5.03.0.00.0.00.02.0000	5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	29.386.195,00	26.880.363,00	0	0	0	0	0	0
5.03	5.03.0.00.0.00.02.0000	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	146.654.142,00	142.143.868,00	0	0	0	0	0	0
5.03	5.03.0.00.0.00.02.0000	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	31.252.480,00	25.248.124,00	0	0	0	0	0	0
5.03	5.03.0.00.0.00.02.0000	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	529.625.033,00	287.129.026,00	0	0	0	0	0	0
5.03	5.03.0.00.0.00.02.0000	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	15.513.192,00	15.506.140,00	0	0	0	0	0	0
5.03	5.03.0.00.0.00.02.0000	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	46.587.901,00	42.548.852,00	0	0	0	0	0	0
5.03	5.03.0.00.0.00.02.0000	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	467.523.940,00	229.074.034,00	0	0	0	0	0	0
5.03	5.03.0.00.0.00.02.0000	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	1.655.481.121,00	1.485.200.869,00	0	0	0	0	0	0
5.03	5.03.0.00.0.00.02.0000	5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	306.544.932,00	302.774.307,00	0	0	0	0	0	0
5.03	5.03.0.00.0.00.02.0000	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	375.954.215,00	231.029.215,00	0	0	0	0	0	0
5.03	5.03.0.00.0.00.02.0000	5.03.02.2.03.0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	972.981.974,00	951.397.347,00	0	0	0	0	0	0
5.03	5.03.0.00.0.00.02.0000	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	54.349.002,00	54.295.447,00	0	0	0	0	0	0
5.03	5.03.0.00.0.00.02.0000	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	13.311.136,00	13.275.363,00	0	0	0	0	0	0
5.03	5.03.0.00.0.00.02.0000	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	21.148.197,00	21.136.900,00	0	0	0	0	0	0
5.03	5.03.0.00.0.00.02.0000	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	19.889.669,00	19.883.184,00	0	0	0	0	0	0
5.05			PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.131.078.383,00	974.583.300,00	0	0	0	0	0	0
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	1.131.078.383,00	974.583.300,00	0	0	0	0	0	0
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.131.078.383,00	974.583.300,00	0	0	0	0	0	0
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	995.193.528,00	839.025.800,00	0	0	0	0	0	0
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.05.02.2.01.0001	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	65.704.405,00	61.060.100,00	0	0	0	0	0	0
5.05	5.01.5 05 0.00.02 0000	5.05.02.2.01.0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	779 489.123,00	627 965.700,00	0	0	0	0	0	0
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.05.02.2.01.0005	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	150.000.000,00	150.000.000,00	0	0	0	0	0	0
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	135.884.855,00	135.557.500,00	0	0	0	0	0	0
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.05.02.2.04.0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inversi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	135.884.855,00	135.557.500,00	0	0	0	0	0	0
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.461.795.217,00	6.361.342.257,00	2.883.027.759,00	2.880.776.920,00	0	0	0	0
6.01			INSPEKTORAT DAERAH	6.461.795.217,00	6.361.342.257,00	2.883.027.759,00	2.880.776.920,00	0	0	0	0
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000		INSPEKTORAT	6.461.795.217,00	6.361.342.257,00	2.883.027.759,00	2.880.776.920,00	0	0	0	0
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.377.438.641,00	4.278.622.263,00	2.883.027.759,00	2.880.776.920,00	0	0	0	0
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	104.360.031,00	104.174.000,00	0	0	0	0	0	0
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	57.081.498,00	57.045.000,00	0	0	0	0	0	0
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.978.576,00	4.960.000,00	0	0	0	0	0	0
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	19.145.457,00	19.135.000,00	0	0	0	0	0	0
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.268.288,00	4.254.000,00	0	0	0	0	0	0
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	13.846.580,00	13.790.000,00	0	0	0	0	0	0
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.039.632,00	4.990.000,00	0	0	0	0	0	0
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.783.387.588,00	2.700.912.720,00	0	0	0	0	0	0
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.742.836.788,00	2.660.958.720,00	0	0	0	0	0	0
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	34.682.900,00	34.134.500,00	0	0	0	0	0	0
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.867.900,00	5.819.500,00	0	0	0	0	0	0
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	589.061.350,00	584.884.862,00	0	0	0	0	0	0
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	589.061.350,00	584.884.862,00	0	0	0	0	0	0

6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	500.990.048,00	499.730.657,00	0	0	0	0	0	0
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.868.391,00	1.800.000,00	0	0	0	0	0	0
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	181.714.557,00	181.658.557,00	0	0	0	0	0	0
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.776.000,00	721.000,00	0	0	0	0	0	0
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16.798.000,00	16.798.000,00	0	0	0	0	0	0
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	298.833.100,00	298.753.100,00	0	0	0	0	0	0
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	150.235.000,00	150.013.000,00	2.883.027.759,00	2.880.776.920,00	0	0	0	0
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	0	0	45.676.500,00	45.676.500,00	0	0	0	0
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	150.235.000,00	150.013.000,00	2.837.351.259,00	2.835.100.420,00	0	0	0	0
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	148.812.824,00	139.451.324,00	0	0	0	0	0	0
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	41.212.824,00	40.851.324,00	0	0	0	0	0	0
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	106.600.000,00	97.600.000,00	0	0	0	0	0	0
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.591.800,00	99.455.700,00	0	0	0	0	0	0
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	47.045.800,00	47.010.000,00	0	0	0	0	0	0
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	31.346.000,00	30.395.700,00	0	0	0	0	0	0
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.200.000,00	22.050.000,00	0	0	0	0	0	0
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.545.472.000,00	1.545.031.914,00	0	0	0	0	0	0
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.225.328.000,00	1.225.166.800,00	0	0	0	0	0	0
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	188.720.000,00	188.610.000,00	0	0	0	0	0	0
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	256.560.000,00	256.560.000,00	0	0	0	0	0	0
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	433.424.000,00	433.415.600,00	0	0	0	0	0	0
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	154.368.000,00	154.368.000,00	0	0	0	0	0	0
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa	82.400.000,00	82.400.000,00	0	0	0	0	0	0
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	109.856.000,00	109.813.200,00	0	0	0	0	0	0
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	320.144.000,00	319.865.114,00	0	0	0	0	0	0
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	30.728.000,00	30.713.400,00	0	0	0	0	0	0
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	289.416.000,00	289.151.714,00	0	0	0	0	0	0
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	538.884.576,00	537.688.080,00	0	0	0	0	0	0
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	538.884.576,00	537.688.080,00	0	0	0	0	0	0
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	523.684.576,00	522.488.080,00	0	0	0	0	0	0
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	15.200.000,00	15.200.000,00	0	0	0	0	0	0
7			UNSUR KEWILAYAHAN	7.022.757.568,03	6.710.461.820,00	49.800.000,00	49.800.000,00	0	0	0	0
7.01			KECAMATAN	7.022.757.568,03	6.710.461.820,00	49.800.000,00	49.800.000,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000		KECAMATAN TOPOYO	1.463.879.573,19	1.371.846.051,00	24.800.000,00	24.800.000,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.349.872.360,19	1.264.338.838,00	24.800.000,00	24.800.000,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	76.778.139,00	76.778.139,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.043.839,00	1.043.839,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.071.094,00	2.071.094,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.094.282,00	3.094.282,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.670.908,00	1.670.908,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.332.258,00	2.332.258,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	64.252.443,00	64.252.443,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.313.315,00	2.313.315,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.065.851.218,19	984.051.696,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.063.897.087,19	982.097.565,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.954.131,00	1.954.131,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	9.876.443,00	9.196.443,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Pegawai	1.696.443,00	1.696.443,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8.180.000,00	7.500.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	17.443.905,00	17.425.805,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	155.390,00	155.390,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	424.559,00	424.559,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	795.956,00	795.956,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.200.000,00	5.200.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.868.000,00	10.849.900,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	948.500,00	948.500,00	9.800.000,00	9.800.000,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	0	0	9.800.000,00	9.800.000,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	948.500,00	948.500,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	93.399.155,00	91.786.255,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	34.201.111,00	34.201.111,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.098.044,00	13.485.144,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	44.100.000,00	44.100.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85.575.000,00	84.152.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	85.575.000,00	84.152.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	35.232.026,00	32.732.026,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	35.232.026,00	32.732.026,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2.203.711,00	2.203.711,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	33.028.315,00	30.528.315,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	45.308.926,00	43.808.926,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	45.308.926,00	43.808.926,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	26.059.550,00	26.059.550,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	19.249.376,00	17.749.376,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	741.443,00	741.443,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	741.443,00	741.443,00	0	0	0	0	0	0

7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	741.443,00	741.443,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1.285.000,00	1.285.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1.285.000,00	1.285.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1.285.000,00	1.285.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	31.439.818,00	28.939.818,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	31.439.818,00	28.939.818,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	2.198.140,00	2.198.140,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	29.241.678,00	26.741.678,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000		KECAMATAN PANGALE	1.463.786.170,92	1.404.978.128,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.388.589.058,92	1.335.282.228,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	41.165.582,00	41.152.400,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.677.773,00	1.674.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.677.773,00	1.674.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.677.773,00	1.676.600,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.677.773,00	1.674.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	34.454.490,00	34.453.800,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.184.385.438,92	1.139.809.549,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.126.402.351,92	1.085.432.069,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9.402.924,00	9.398.600,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	41.030.088,00	41.029.680,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	7.550.075,00	3.949.200,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6.360.000,00	6.360.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6.360.000,00	6.360.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	16.403.000,00	16.333.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0	0	7.500.000,00	7.500.000,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.500.000,00	1.500.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.375.000,00	5.375.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9.528.000,00	9.458.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	54.085.038,00	45.766.479,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	46.543.922,00	39.039.600,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.541.116,00	6.726.879,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86.190.000,00	85.860.800,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	81.990.000,00	81.660.800,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.200.000,00	4.200.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	27.126.804,00	27.126.600,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	4.499.536,00	4.499.400,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4.499.536,00	4.499.400,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyerakatan Tingkat Kecamatan	22.627.268,00	22.627.200,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	22.627.268,00	22.627.200,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	13.204.536,00	10.204.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	13.204.536,00	10.204.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	13.204.536,00	10.204.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	34.865.772,00	32.365.300,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	34.865.772,00	32.365.300,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	15.652.632,00	15.652.300,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	19.213.140,00	16.713.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000		KECAMATAN TOBADAK	1.295.060.840,00	1.238.980.211,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.223.016.293,00	1.166.935.664,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	68.259.843,00	65.259.843,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.019.084,00	28.519.084,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	19.952.087,00	18.452.087,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	18.288.672,00	18.288.672,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	996.928.163,00	953.865.138,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	963.680.312,00	920.617.287,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	13.317.225,00	13.317.225,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	19.930.626,00	19.930.626,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	19.600.455,00	9.600.455,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	9.600.455,00	9.600.455,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	37.379.278,00	37.379.278,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	650.000,00	650.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.000.000,00	6.000.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.373.278,00	8.373.278,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	22.356.000,00	22.356.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	72.000.000,00	72.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	72.000.000,00	72.000.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0	10.000.000,00	10.000.000,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.361.689,00	13.344.085,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.084.085,00	12.084.085,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.277.604,00	1.260.000,00	0	0	0	0	0	0

7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.486.865,00	15.486.865,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	8.525.000,00	8.525.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.961.865,00	6.961.865,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	21.053.559,00	21.053.559,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	21.053.559,00	21.053.559,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	21.053.559,00	21.053.559,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	32.607.600,00	32.607.600,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	32.607.600,00	32.607.600,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	32.607.600,00	32.607.600,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	18.383.388,00	18.383.388,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	18.383.388,00	18.383.388,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	18.383.388,00	18.383.388,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000		KECAMATAN KAROSSA	1.390.506.993,00	1.529.565.503,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.547.768.491,00	1.487.441.258,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.860.436,00	33.618.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.185.790,00	13.183.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	20.027.597,00	12.826.500,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.401.289,00	4.375.500,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.245.760,00	3.233.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.326.019.979,00	1.278.103.058,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.271.227.934,00	1.233.853.058,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	51.407.960,00	40.904.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.384.085,00	3.346.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6.750.000,00	6.750.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6.750.000,00	6.750.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	24.582.000,00	24.491.200,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.840.000,00	1.820.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.991.000,00	1.955.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.000.000,00	1.985.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.500.000,00	1.500.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.100.000,00	5.100.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.151.000,00	12.131.200,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	72.000.000,00	72.000.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	72.000.000,00	72.000.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	67.881.796,00	63.192.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	40.064.288,00	37.064.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.817.508,00	14.128.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12.000.000,00	12.000.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.674.280,00	9.287.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4.995.000,00	4.640.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.679.280,00	4.647.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3.478.195,00	3.468.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	3.478.195,00	3.468.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3.478.195,00	3.468.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	10.492.636,00	9.940.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	10.492.636,00	9.940.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10.492.636,00	9.940.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	28.767.671,00	28.716.250,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	28.767.671,00	28.716.250,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	22.990.465,00	22.941.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	5.777.206,00	5.775.250,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000		KECAMATAN BUDONG-BUDONG	1.209.523.990,92	1.165.091.922,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.082.619.658,92	1.042.741.922,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33.623.145,00	31.400.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	27.458.453,00	27.200.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.158.651,00	970.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.729.216,00	955.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.276.825,00	2.275.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	897.340.590,92	864.810.922,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	886.585.089,92	854.055.922,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.755.501,00	10.755.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.165.093,00	3.160.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3.165.093,00	3.160.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	17.195.000,00	16.980.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.405.000,00	1.400.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0	7.500.000,00	7.500.000,00	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.255.000,00	1.100.000,00	0	0	0	0	0	0

7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.500.000,00	1.500.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.055.000,00	7.030.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.980.000,00	5.950.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	72.000.000,00	72.000.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	72.000.000,00	72.000.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48.790.804,00	44.951.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	29.981.540,00	28.480.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.809.264,00	10.471.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.505.026,00	9.440.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5.160.000,00	4.100.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.345.026,00	5.340.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	98.219.470,00	94.585.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	30.026.925,00	30.000.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	30.026.925,00	30.000.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	34.441.446,00	32.640.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	34.441.446,00	32.640.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	33.751.099,00	31.945.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	33.751.099,00	31.945.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	9.246.411,00	8.440.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	9.246.411,00	8.440.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9.246.411,00	8.440.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5.189.307,00	5.085.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5.189.307,00	5.085.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	5.189.307,00	5.085.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	10.035.266,00	10.030.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	10.035.266,00	10.030.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	7.012.971,00	7.010.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	3.022.295,00	3.020.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	4.213.878,00	4.210.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	4.213.878,00	4.210.000,00	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	4.213.878,00	4.210.000,00	0	0	0	0	0	0
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	2.496.318.753,92	2.390.164.256,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0	0	0	0
8.01			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2.496.318.753,92	2.390.164.256,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0	0	0	0
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2.496.318.753,92	2.390.164.256,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0	0	0	0
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.276.267.465,92	1.180.064.349,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0	0	0	0
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	57.468.070,00	55.946.000,00	0	0	0	0	0	0
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.738.070,00	12.886.000,00	0	0	0	0	0	0
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	31.275.000,00	31.157.000,00	0	0	0	0	0	0
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.475.000,00	11.903.000,00	0	0	0	0	0	0
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	934.372.390,92	879.990.064,00	0	0	0	0	0	0
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	934.372.390,92	879.990.064,00	0	0	0	0	0	0
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	37.500.000,00	28.000.000,00	0	0	0	0	0	0
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	37.500.000,00	28.000.000,00	0	0	0	0	0	0
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.588.000,00	4.927.285,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0	0	0	0
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0	0	0	0
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.088.000,00	3.427.285,00	0	0	0	0	0	0
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95.997.240,00	86.484.000,00	0	0	0	0	0	0
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	95.997.240,00	86.484.000,00	0	0	0	0	0	0
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	114.818.765,00	94.214.000,00	0	0	0	0	0	0
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	45.859.685,00	32.461.000,00	0	0	0	0	0	0
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.559.080,00	3.553.000,00	0	0	0	0	0	0
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	65.400.000,00	58.200.000,00	0	0	0	0	0	0
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30.503.000,00	30.503.000,00	0	0	0	0	0	0
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan	5.550.000,00	5.550.000,00	0	0	0	0	0	0
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	24.953.000,00	24.953.000,00	0	0	0	0	0	0
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	723.311.991,00	723.270.641,00	0	0	0	0	0	0
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	723.311.991,00	723.270.641,00	0	0	0	0	0	0
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0006	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	8.989.993,00	8.989.993,00	0	0	0	0	0	0
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka	410.821.998,00	410.780.648,00	0	0	0	0	0	0
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0011	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	303.500.000,00	303.500.000,00	0	0	0	0	0	0
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	373.070.000,00	373.070.000,00	0	0	0	0	0	0

8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	373.070.000,00	373.070.000,00	0	0	0	0	0	0
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	373.070.000,00	373.070.000,00	0	0	0	0	0	0
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	15.758.370,00	15.704.066,00	0	0	0	0	0	0
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	15.758.370,00	15.704.066,00	0	0	0	0	0	0
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	15.758.370,00	15.704.066,00	0	0	0	0	0	0
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	50.000.000,00	50.000.000,00	0	0	0	0	0	0
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	50.000.000,00	50.000.000,00	0	0	0	0	0	0
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0	0	0	0	0	0
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	57.910.927,00	48.055.200,00	0	0	0	0	0	0
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	57.910.927,00	48.055.200,00	0	0	0	0	0	0
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	32.897.953,00	23.043.200,00	0	0	0	0	0	0
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	25.012.974,00	25.012.000,00	0	0	0	0	0	0
			Jumlah	463.584.292.839,12	452.824.266.108,46	91.931.171.371,36	84.297.149.410,00	895.000.000,00	696.208.433,00	87.616.788.800,00	84.790.265.420,00

MAMUJU TENGAH, 2026
BUPATI KAB. MAMUJU TENGAH

H. ARSAL ARAS

Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah
Nomor :
Tanggal : 2026

PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PERIODE 1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2025	2024
SISA ANGGARAN LEBIH AWAL	13.874.382.874,43	41.381.753.452,10
PENGGUNAAN SALDO ANGGARAN LEBIH	13.874.382.874,43	41.381.753.452,10
SUBTOTAL (1-2)	0,00	0,00
SiLPA/(SiKPA)	32.445.847.496,70	13.874.382.874,43
SUBTOTAL (3+4)	32.445.847.496,70	13.874.382.874,43
KOREKSI KESALAHAN PEMBUKUAN TAHUN SEBELUMNYA	0,00	0,00
LAIN-LAIN	0,00	0,00
SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR (5+6+7)	32.445.847.496,70	13.874.382.874,43

MAMUJU TENGAH, 2026
BUPATI KAB. MAMUJU TENGAH

H. ARSAL ARAS

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah
Nomor :
Tanggal : 2026

PEMERINTAHAN KABUPATEN MAMUJU TENGAH
LAPORAN OPERASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2025
1 JANUARI 2025 SAMPAI 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
7	PENDAPATAN	637.644.205.608,25	631.124.344.302,20	6.519.861.306,05	1,03
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	79.712.886.720,48	60.232.316.138,65	19.480.570.581,83	32,34
7.1.01	Pajak Daerah-LO	26.515.451.873,29	17.446.886.106,00	9.068.565.767,29	51,98
7.1.02	Retribusi Daerah-LO	45.686.344.604,00	14.101.109.594,00	31.585.235.010,00	223,99
7.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	1.162.498.116,00	729.061.014,00	433.437.102,00	59,45
7.1.04	Lain-lain PAD yang Sah-LO	6.348.592.127,19	27.955.259.424,65	(21.606.667.297,46)	(77,29)
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	79.712.886.720,48	60.232.316.138,65	19.480.570.581,83	32,34
7.2	PENDAPATAN TRANSFER-LO	518.209.507.922,00	557.051.912.311,00	(38.842.404.389,00)	(6,97)
7.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	496.805.039.284,00	531.765.771.129,00	(34.960.731.845,00)	(6,57)
	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	496.805.039.284,00	531.765.771.129,00	(34.960.731.845,00)	(6,57)
7.2.02	*PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH-LO*	21.404.468.638,00	25.286.141.182,00	(3.881.672.544,00)	(15,35)
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH-LO	21.404.468.638,00	25.286.141.182,00	(3.881.672.544,00)	(15,35)
	TOTAL PENDAPATAN TRANSFER-LO	518.209.507.922,00	557.051.912.311,00	(38.842.404.389,00)	(6,97)
7.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	39.721.810.965,77	13.840.115.852,55	25.881.695.113,22	187,00
7.3.01	Pendapatan Hibah-LO	39.721.810.965,77	6.147.586.949,55	33.574.224.016,22	546,14
7.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	0,00	7.692.528.903,00	(7.692.528.903,00)	(100,00)
	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	39.721.810.965,77	13.840.115.852,55	25.881.695.113,22	187,00
	JUMLAH PENDAPATAN	637.644.205.608,25	631.124.344.302,20	6.519.861.306,05	1,03
8	BEBAN	807.823.517.246,17	628.606.809.659,13	179.216.707.587,04	28,51
8.1	BEBAN OPERASI	456.171.169.041,65	474.252.152.143,55	(18.080.983.101,90)	(3,81)
8.1.01	Beban Pegawai	252.975.978.731,00	225.500.671.076,00	27.475.307.655,00	12,18
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	190.033.097.592,58	202.734.273.172,64	(12.701.175.580,06)	(6,26)
8.1.05	Beban Hibah	11.434.402.282,00	40.313.528.000,01	(28.879.125.718,01)	(71,64)
8.1.06	Beban Bantuan Sosial	22.000.000,00	18.500.000,00	3.500.000,00	18,92
8.1.07	Beban Penyisihan Piutang	1.705.690.436,07	5.685.179.894,90	(3.979.489.458,83)	(70,00)
	JUMLAH BEBAN OPERASI	456.171.169.041,65	474.252.152.143,55	(18.080.983.101,90)	(3,81)
8.1.08	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	314.146.619.971,52	116.517.103.715,58	197.629.516.255,94	169,61
	JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	314.146.619.971,52	116.517.103.715,58	197.629.516.255,94	169,61
8.3	BEBAN TRANSFER	36.809.519.800,00	37.362.448.300,00	(552.928.500,00)	(1,48)
8.3.02	Beban Bantuan Keuangan	36.809.519.800,00	37.362.448.300,00	(552.928.500,00)	(1,48)
	JUMLAH BEBAN TRANSFER	36.809.519.800,00	37.362.448.300,00	(552.928.500,00)	(1,48)
8.2	BEBAN TIDAK TERDUGA	696.208.433,00	475.105.500,00	221.102.933,00	46,54
8.2.01	Beban Tidak Terduga	696.208.433,00	475.105.500,00	221.102.933,00	46,54
	JUMLAH BEBAN TIDAK TERDUGA	696.208.433,00	475.105.500,00	221.102.933,00	46,54
	JUMLAH BEBAN	807.823.517.246,17	628.606.809.659,13	179.216.707.587,04	28,51
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(170.179.311.637,92)	2.517.534.643,07	(172.696.846.280,99)	(6.859,76)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL					
8.4	DEFISIT NON OPERASIONAL-LO	0,00	(0,01)	0,01	(100,00)
8.4.03	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	0,00	(0,01)	0,01	(100,00)
	JUMLAH DEFISIT NON OPERASIONAL-LO	0,00	(0,01)	0,01	(100,00)
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	0,01	(0,01)	(100,00)
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(170.179.311.637,92)	2.517.534.643,08	(172.696.846.281,00)	(6.859,76)
POS LUAR BIASA					
8.5	BEBAN LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BEBAN LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(170.179.311.637,92)	2.517.534.643,08	(172.696.846.281,00)	(6.859,76)

MAMUJU TENGAH, 2026
BUPATI KAB. MAMUJU TENGAH

H. ARSAL ARAS

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah
Nomor :
Tanggal : 2026

PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
1 JANUARI 2025 SAMPAI 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2025	2024
EKUITAS AWAL	1.370.861.712.546,60	1.370.346.846.195,22
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(170.179.311.637,92)	2.517.534.643,08
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	4.581.200,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
LAIN-LAIN	(10.846.598.354,59)	(2.007.249.491,70)
EKUITAS AKHIR	1.189.835.802.554,09	1.370.861.712.546,60

MAMUJU TENGAH, 2026
BUPATI KAB. MAMUJU TENGAH

H. ARSAL ARAS

Lampiran V : Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah
Nomor :
Tanggal : 2026

PEMERINTAHAN KABUPATEN MAMUJU TENGAH
NERACA
TAHUN ANGGARAN 2025
1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1	**ASET**	**1.194.443.438.959,02**	**1.378.301.374.472,31**
1.1	**ASET LANCAR**	**51.386.723.825,54**	**36.455.641.658,58**
1.1.01	Kas dan Setara Kas	32.510.502.992,70	14.083.589.293,43
1.1.01.01	Kas di Kas Daerah	26.323.060.548,26	10.009.738.986,53
1.1.01.02	Kas di Bendahara Penerimaan	77.740.250,00	18.800.000,00
1.1.01.03	Kas di Bendahara Pengeluaran	31.237.659,00	225.421.845,00
1.1.01.04	Kas di BLUD	5.210.389.594,40	2.103.923.795,86
1.1.01.07	Kas Lainnya	66.421.912,00	218.879.508,00
1.1.01.10	Kas Dana BOSP	33.980.124,04	40.938.422,04
1.1.01.11	Kas Dana BOK Puskesmas	767.672.905,00	1.465.886.736,00
1.1.03	Piutang Pajak Daerah	16.158.785.084,00	22.259.634.950,00
1.1.03.10	Piutang Pajak Penerangan Jalan	0,00	544.137.744,00
1.1.03.15	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	15.538.412.885,00	21.715.497.206,00
1.1.03.19	Piutang Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	620.372.199,00	0,00
1.1.04	Piutang Retribusi Daerah	3.006.582.682,00	1.414.766.945,00
1.1.04.01	Piutang Retribusi Jasa Umum	1.801.227.182,00	584.625.695,00
1.1.04.02	Piutang Retribusi Jasa Usaha	1.205.355.500,00	830.141.250,00
1.1.06	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	7.091.529.697,00	3.552.070.295,00
1.1.06.09	Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	38.681.900,00
1.1.06.12	Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	6.904.258.748,00	0,00
1.1.06.13	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah	187.200.000,00	0,00
1.1.06.15	Piutang Pendapatan dari Pengembalian	70.949,00	62.635.488,00
1.1.06.16	Piutang Pendapatan BLUD	0,00	3.450.752.907,00
1.1.08	Piutang Transfer Antar Daerah	2.441.353.196,00	0,00
1.1.08.01	Piutang Bagi Hasil	2.441.353.196,00	0,00
1.1.10	Penyisihan Piutang	(20.086.156.169,96)	(15.520.273.439,20)
1.1.10.01	Penyisihan Piutang Pendapatan	(20.086.156.169,96)	(15.520.273.439,20)
1.1.11	Beban Dibayar Dimuka	228.629.155,13	0,00
1.1.11.03	Beban Dibayar Dimuka Asuransi Barang Milik Daerah	228.629.155,13	0,00
1.1.12	Persediaan	10.035.497.188,67	10.665.853.614,35
1.1.12.01	Barang Pakai Habis	10.035.497.188,67	10.665.853.614,35
	JUMLAH ASET LANCAR	**51.386.723.825,54**	**36.455.641.658,58**
1.2	**INVESTASI JANGKA PANJANG**	**10.000.000.000,00**	**6.000.000.000,00**
1.2.02	Investasi Jangka Panjang Permanen	10.000.000.000,00	6.000.000.000,00
1.2.02.01	Penyertaan Modal	10.000.000.000,00	6.000.000.000,00
	JUMLAH INVESTASI PERMANEN	**10.000.000.000,00**	**6.000.000.000,00**
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	**10.000.000.000,00**	**6.000.000.000,00**
1.3	**ASET TETAP**	**1.118.324.158.291,99**	**1.322.010.125.591,49**
1.3.01	Tanah	77.273.517.037,00	67.787.756.175,00
1.3.01.01	Tanah	77.273.517.037,00	67.787.756.175,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	316.133.746.124,21	311.380.597.717,34
1.3.02.01	Alat Besar	12.846.560.047,00	13.263.691.047,00
1.3.02.02	Alat Angkutan	62.033.630.016,75	61.544.686.775,54
1.3.02.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	2.149.672.988,30	1.676.681.016,27
1.3.02.04	Alat Pertanian	2.327.431.256,00	1.590.017.393,00
1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	71.938.453.758,72	67.713.336.918,71
1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	5.165.279.571,00	4.958.342.671,00
1.3.02.07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	83.713.769.388,41	89.499.391.196,81
1.3.02.08	Alat Laboratorium	12.905.279.083,82	13.276.621.401,05
1.3.02.09	Alat Persenjataan	326.422.050,00	329.432.050,00
1.3.02.10	Komputer	58.435.295.119,21	54.007.266.118,96
1.3.02.11	Alat Eksplorasi	20.000.000,00	20.000.000,00
1.3.02.13	Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	8.330.000,00	4.330.000,00
1.3.02.14	Alat Bantu Eksplorasi	534.540.000,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1.3.02.15	Alat Keselamatan Kerja	1.649.639.909,00	1.634.839.909,00
1.3.02.16	Alat Peraga	2.500.000,00	2.500.000,00
1.3.02.17	Peralatan Proses/Produksi	176.215.000,00	191.805.000,00
1.3.02.18	Rambu-rambu	1.284.232.851,00	1.174.209.850,00
1.3.02.19	Peralatan Olahraga	616.495.085,00	493.446.370,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan	684.550.193.693,06	610.628.683.427,77
1.3.03.01	Bangunan Gedung	663.043.001.770,44	589.578.557.044,71
1.3.03.02	Monumen	9.158.537.561,56	9.185.247.376,00
1.3.03.03	Bangunan Menara	0,00	30.000.000,00
1.3.03.04	Tugu Titik Kontrol/Pasti	12.348.654.361,06	11.834.879.007,06
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.125.160.259.754,04	1.114.859.229.056,45
1.3.04.01	Jalan dan Jembatan	762.039.013.046,13	758.266.907.586,31
1.3.04.02	Bangunan Air	298.261.009.620,62	292.996.089.787,21
1.3.04.03	Instalasi	58.932.520.073,29	57.670.802.356,93
1.3.04.04	Jaringan	5.927.717.014,00	5.925.429.326,00
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	8.949.488.740,01	9.616.240.817,91
1.3.05.01	Bahan Perpustakaan	5.575.761.444,01	6.150.688.521,91
1.3.05.02	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	1.594.968.466,00	1.594.968.466,00
1.3.05.05	Tanaman	556.107.000,00	556.107.000,00
1.3.05.07	Aset Tetap Dalam Renovasi	1.222.651.830,00	1.314.476.830,00
1.3.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	41.950.516.092,76	36.845.057.769,67
1.3.06.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah	6.947.583.590,00	6.847.972.190,00
1.3.06.03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan	20.698.399.618,00	21.246.208.099,91
1.3.06.04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	14.304.532.884,76	8.750.877.479,76
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(1.135.693.563.149,09)	(829.107.439.372,65)
1.3.07.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(273.829.497.962,07)	(230.038.851.774,52)
1.3.07.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(249.069.435.733,80)	(213.122.029.201,81)
1.3.07.03	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(610.355.462.160,65)	(383.834.922.394,32)
1.3.07.04	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(2.439.167.292,57)	(2.111.636.002,00)
	JUMLAH ASET TETAP	**1.118.324.158.291,99**	**1.322.010.125.591,49**
1.5	**ASET LAINNYA**	**9.284.557.729,49**	**8.387.608.110,24**
1.5.01	Tagihan Jangka Panjang	3.784.190.264,33	3.052.198.564,18
1.5.01.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	3.784.190.264,33	3.052.198.564,18
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	5.901.059.941,00	5.501.621.941,00
1.5.03.01	Aset Tidak Berwujud	5.901.059.941,00	5.501.621.941,00
1.5.04	Aset Lain-lain	24.021.007.135,63	20.416.109.038,75
1.5.04.01	Aset Lain-lain	24.021.007.135,63	20.416.109.038,75
1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(4.137.109.613,89)	(3.900.717.310,00)
1.5.05.01	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(4.137.109.613,89)	(3.900.717.310,00)
1.5.06	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(20.284.589.997,58)	(16.736.023.123,69)
1.5.06.01	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(20.284.589.997,58)	(16.736.023.123,69)
1.5.08	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	0,00	54.419.000,00
1.5.08.01	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	0,00	54.419.000,00
	JUMLAH ASET LAINNYA	**9.284.557.729,49**	**8.387.608.110,24**
1.6	**PROPERTI INVESTASI**	**5.447.999.112,00**	**5.447.999.112,00**
1.6.01	Properti Investasi Tanah	5.447.999.112,00	5.447.999.112,00
1.6.01.01	Properti Investasi Tanah	5.447.999.112,00	5.447.999.112,00
	JUMLAH PROPERTI INVESTASI	**5.447.999.112,00**	**5.447.999.112,00**
1.6	**PROPERTI INVESTASI**	**5.447.999.112,00**	**5.447.999.112,00**
1.6.01	Properti Investasi Tanah	5.447.999.112,00	5.447.999.112,00
1.6.01.01	Properti Investasi Tanah	5.447.999.112,00	5.447.999.112,00
	JUMLAH PROPERTI INVESTASI	**5.447.999.112,00**	**5.447.999.112,00**
	JUMLAH ASET	**1.194.443.438.959,02**	**1.378.301.374.472,31**
2	**KEWAJIBAN**	**4.607.636.404,93**	**7.439.661.925,71**
2.1	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**	**4.607.636.404,93**	**7.439.661.925,71**
2.1.01	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	64.655.496,00	209.206.419,00
2.1.01.05	Utang PPh Pusat	15.201.795,00	66.954.916,00
2.1.01.06	Utang PPN Pusat	49.453.701,00	142.251.503,00
2.1.05	Pendapatan Diterima Dimuka	59.970.807,71	0,00
2.1.05.05	Pendapatan Diterima Dimuka-Pajak Daerah	59.970.807,71	0,00
2.1.06	Utang Belanja	4.483.010.101,22	7.230.455.506,71
2.1.06.01	Utang Belanja Pegawai	139.838.899,00	1.401.915.700,00

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
2.1.06.02	Utang Belanja Barang dan Jasa	1.455.729.847,91	1.153.779.184,00
2.1.06.05	Utang Belanja Hibah	12.102.000,31	434.378.850,31
2.1.06.06	Utang Belanja Modal Tanah	12.890.000,00	68.397.650,00
2.1.06.07	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.992.536,00	21.992.536,00
2.1.06.08	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	228.071.833,00	1.345.714.745,40
2.1.06.09	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.612.384.985,00	2.804.276.841,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**4.607.636.404,93**	**7.439.661.925,71**
	JUMLAH KEWAJIBAN	**4.607.636.404,93**	**7.439.661.925,71**
3	**EKUITAS**	**1.189.835.802.554,09**	**1.370.861.712.546,60**
3.1	**EKUITAS**	**1.189.835.802.554,09**	**1.370.861.712.546,60**
3.1.01	Ekuitas	1.189.835.802.554,09	1.370.861.712.546,60
3.1.01.01	Ekuitas	1.360.015.114.192,01	1.370.861.712.546,60
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO	(170.179.311.637,92)	0,00
	JUMLAH EKUITAS	**1.189.835.802.554,09**	**1.370.861.712.546,60**
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**1.194.443.438.959,02**	**1.378.301.374.472,31**

MAMUJU TENGAH, 2026
BUPATI KAB. MAMUJU TENGAH

H. ARSAL ARAS

Lampiran VI : Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah
Nomor :
Tanggal : 2026

PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	2025	2024
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan Pajak Daerah	26.212.709.603,00	12.064.921.118,00
Penerimaan Retribusi Daerah	39.358.480.825,00	14.041.286.339,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.162.498.116,00	729.061.014,00
Penerimaan Lain - lain PAD yang sah	6.356.898.504,73	25.238.041.781,24
Penerimaan Dana Bagi Hasil	0,00	12.479.058.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	0,00	369.183.892.749,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik	0,00	82.048.913.591,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	0,00	68.598.180.789,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil	*7.575.226.600,00*	*0,00*
Penerimaan Dana Alokasi Umum	368.877.743.984,00	0,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik	32.134.009.341,00	0,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	88.272.478.359,00	0,00
Penerimaan Dana Desa	47.980.745.620,00	51.461.215.000,00
Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi	18.963.115.442,00	26.414.089.638,00
Penerimaan dari Pendapatan Lainnya	8.285.447.599,00	7.692.528.903,00
Jumlah Arus Masuk Kas Aktifitas Operasi	645.179.353.993,73	669.951.188.922,24
ARUS KELUAR KAS AKTIFITAS OPERASI		
Pembayaran Pegawai	254.238.055.532,00	224.098.755.376,00
Pembayaran Barang dan Jasa	186.791.941.444,46	203.336.294.992,91
Pembayaran Belanja Hibah	11.772.269.132,00	41.571.650.615,00
Pembayaran Belanja Bantuan Sosial	22.000.000,00	18.500.000,00
Pembayaran Tak Terduga	696.208.433,00	475.105.500,00
Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	105.000.000,00	0,00
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Desa	84.685.265.420,00	88.823.663.300,00
Jumlah Arus Keluar Kas Aktifitas Operasi	538.310.739.961,46	558.323.969.783,91
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	106.868.614.032,27	111.627.219.138,33
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	819.410.000,00	230.337.498,00
Jumlah Arus Masuk Kas Aktifitas Investasi	819.410.000,00	230.337.498,00
ARUS KELUAR KAS AKTIFITAS INVESTASI		
Perolehan Tanah	6.364.747.767,00	2.055.173.000,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	15.372.942.512,00	35.957.625.906,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	39.872.038.119,00	41.278.328.853,00
Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	19.849.155.028,00	57.979.234.714,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	1.509.889.157,00	1.267.128.002,00
Perolehan Aset Lainnya	1.328.376.827,00	597.099.241,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	4.000.000.000,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas Aktifitas Investasi	88.297.149.410,00	139.134.589.716,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi	(87.477.739.410,00)	(138.904.252.218,00)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Jumlah Arus Masuk Kas Aktifitas Pendanaan	0,00	0,00
ARUS KELUAR KAS AKTIFITAS PENDANAAN		
Jumlah Arus Keluar Kas Aktifitas Pendanaan	0,00	0,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	64.655.496,00	209.206.419,00
Jumlah Arus Masuk Kas Aktifitas Transitoris	64.655.496,00	209.206.419,00
ARUS KELUAR KAS AKTIFITAS TRANSITORIS		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	209.206.419,00	0,00

Uraian	2025	2024
Jumlah Arus Keluar Kas Aktifitas Transitoris	209.206.419,00	0,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris	(144.550.923,00)	209.206.419,00
Kenaikan/Penurunan Kas	19.246.323.699,27	(27.067.826.660,67)
Saldo Awal Kas	14.313.926.791,43	41.381.753.452,10
Koreksi SiLPA	0,00	0,00
Saldo Awal Kas Setelah Koreksi	14.313.926.791,43	41.381.753.452,10
Saldo Akhir Kas	33.560.250.490,70	14.313.926.791,43

MAMUJU TENGAH, 2026
BUPATI KAB. MAMUJU TENGAH

H. ARSAL ARAS

7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

7.1. Pendahuluan

Dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) maka pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada Perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat. Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dalam melaksanakan pembangunan selalu diawali dengan proses perencanaan pembangunan seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dilaksanakan berdasarkan peran serta masyarakat dan program-program yang telah ditetapkan dalam Target APBD Tahun Anggaran 2025.

Berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, program maupun kegiatan telah mengacu pada amanat Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan tersebut, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah setiap tahun disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Bupati selaku kepala daerah yang memiliki kuasa pengelolaan keuangan daerah menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Bab VII bahwa Akuntansi Pemerintah Daerah didesain sebagai sebuah sistem yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan mengakomodasi arsitektur Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibangun oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Pilar utama pengembangan akuntansi pemerintah daerah terletak pada perumusan kebijakan akuntansi dan pengembangan sistem akuntansi. Pedoman tersebut mengisyaratkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah agar berasaskan prestasi kerja. Hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban dari suatu kegiatan untuk sebuah produk/hasil yang mengutamakan *output*. Berkaitan dengan pertanggungjawaban penggunaan anggaran, maka sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, maka Kepala Daerah harus menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Salah satu bagian yang terpenting dan tak terpisahkan dari Laporan Keuangan adalah Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang merupakan ungkapan naratif atas pos-pos Laporan Keuangan, sehingga dapat dipahami dan dimengerti oleh *stakeholder*.

7.1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan Keuangan disusun untuk:

a. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
d. Menyediakan informasi transaksi non kas baik berupa pendapatan dan beban yang merupakan tolok ukur kinerja keuangan daerah;
e. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
f. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang; dan
g. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi Keuangan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

7.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

a. Arah dan kebijakan umum bagian pendapatan Pada Tahun Anggaran 2025

Arah dan kebijakan umum bagian pendapatan adalah untuk mencapai target dan berupaya meningkatkan penerimaan pendapatan pada seluruh obyek pendapatan, sehingga memenuhi kapasitas/kemampuan anggaran daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Proyeksi rencana pendapatan daerah yang digunakan adalah perkiraan yang terukur, rasional, dan mempunyai kepastian dasar hukum. Adapun kebijakan pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan manajemen tata-kelola pemungutan dan penerimaan Pendapatan Daerah sesuai dengan mekanisme dan standar baku serta memanfaatkan teknologi terkini;
b. Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui perluasan obyek dan intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara optimal;
c. Pendayagunaan aset daerah;
d. Optimalisasi hasil dividen pada PT. Bank Sulselbaryang saat ini telah ada agar memberikan kontribusi yang optimal kepada PAD pada khususnya dan Penerimaan Daerah pada umumnya; dan
e. Mengadakan peninjauan kembali atas berbagai Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan memperumit birokrasi guna mempermudah investasi.

Secara lebih rinci kebijakan pengelolaan Pendapatan Daerah difokuskan pada:

a. Identifikasi dan penggalian sumber-sumber obyek pajak dan retribusi daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD);
b. Optimalisasi pemungutan disertai dengan pengawasan dan pengendalian yang ketat serta sistematis;
c. Peningkatan sosialisasi kepada subyek dan obyek pajak maupun retribusi serta melakukan pendekatan persuasif;
d. Pembinaan yang intensif kepada petugas dan unit penghasil;
e. Kerja sama dengan lembaga/institusi lainnya yang akan membantu dan mendukung kelancaran pemungutan pajak dan/atau retribusi daerah;
f. Koordinasi ke Pemerintah Pusat dan Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka meningkatkan alokasi atau bagian yang akan diterima oleh Kabupaten Mamuju Tengah untuk setiap obyek dari dana perimbangan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku;
g. Komunikasi yang intensif kepada lembaga di tingkat pusat dan provinsi, khususnya pada lembaga yang berwenang mengatur dan mengalokasikan dana perimbangan bagi kabupaten/kota; dan
h. Pengkajian dan penyesuaian Perda dan Perbup yang berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah.

Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah akan mengoptimalkan Pendapatan Daerah pada Tahun 2025 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat. Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah berhak mendapatkan alokasi dana perimbangan dan dana transfer lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta memaksimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah yang ada.

Arah Kebijakan keuangan daerah tidak lepas dari arah kebijakan pendapatan yang dikelola secara efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel dan tepat saran, dengan berdasar analisis perkembangan ekonomi daerah. Diharapkan di tahun 2025 kondisi keuangan daerah sudah stabil dan kondusif untuk mendukung berbagai kegiatan pembangunan. Kebijakan keuangan daerah Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2025 secara umum diarahkan untuk:

Menjamin ketersediaan dana untuk membiayai program dan kegiatan prioritas, melalui kebijakan pendapatan Tahun Anggaran 2025 di antaranya dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan yang berkelanjutan, serta menumbuhkan iklim usaha dan investasi yang kondusif;

b. Upaya-upaya Pemerintah Dalam Mencapai Target

Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah telah berdasarkan peraturan perundangan-undangan di bidang keuangan daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah yang dimaksud meliputi keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Termasuk yang dilaksanakan dalam mencapai target pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah yang berasal dari potensi-potensi PAD, dana perimbangan dan pendapatan hibah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat adalah dengan penetapan APBD Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025 ini melalui peraturan daerah, penetapan ini telah didasarkan pada peraturan per Undang-Undangan yang berlaku, sehingga Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dapat merealisasikan Rencana Kerja Tahunannya.

c. Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2025

Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025 ini diarahkan pada pemenuhan kebutuhan mendasar penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pelaksanaan pembangunan. Dalam pelaksanaannya prinsip-prinsip anggaran perlu ditegaskan kembali terutama pada efisiensi dan efektivitas. Adapun kebijakan Bupati Mamuju Tengah terhadap Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer untuk seluruh bagian belanja pada setiap fungsi bidang urusan pemerintahan, baik yang bersifat wajib maupun urusan pilihan yang implementasinya dilaksanakan oleh SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah melalui pelaksanaan agenda prioritas pembangunan di Tahun 2025, yaitu:

a) Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah belanja operasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta belanja hibah yang hanya dialokasikan di PPKD saja. Kecuali khusus Bantuan Sosial yang dikelola sendiri oleh Sekretariat Daerah bagian Kesejahteraan Rakyat.

Anggaran Belanja Operasi untuk Tahun 2025 senilai Rp463.584.292.839,12 terealisasi sampai dengan 31 Desember 2025 mencapai Rp 452.824.266.108,46 atau 97,68% dari anggaran.

Penjelasan lebih lanjut mengenai target dan realisasi belanja operasi sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

1) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penghasilan lainnya diberikan untuk peningkatan kesejahteraan dengan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Belanja Pegawai untuk Tahun Anggaran 2025 dianggarkan senilai Rp256.322.902.842,46 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2025 senilai Rp254.238.055.532,00 atau 99,19%.

Besarnya penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan:

(a) Pemberian gaji ke-13 dan gaji ke-14;

(b) Kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besar maksimum 2,5% dari jumlah gaji pokok dan tunjangan;

(c) Kebutuhan gaji PPPK Penuh Waktu;

(d) Penganggaran penghasilan dan penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD, serta alokasi belanja penunjang operasional DPRD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dan perubahannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;

(e) Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

(f) Insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah, dianggarkan pada SKPD Badan Keuangan. Insentif dimaksud dapat diberikan sepanjang telah diatur dalam Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

(g) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2025. Terkait dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk pengembangan cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD;

(h) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial tenaga Kerja dan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial;

(i) Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD, penentuan kriteria harus ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan kepala daerah;

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pembelian barang dan jasa yang pakai habis guna menunjang kegiatan operasional yang diselenggarakan tiap unit kerja. Anggaran belanja barang dan jasa untuk Tahun Anggaran 2025 dianggarkan senilai Rp195.117.291.217,66 Realisasi sampai dengan 31 Desember 2025 mencapai Rp186.791.941.444,46 atau 95,73% dari anggaran yang ditetapkan.

3) Belanja Hibah

Belanja hibah dipergunakan untuk menganggarkan pemberian hibah, dengan anggaran hibah untuk Tahun Anggaran 2025 senilai Rp12.118.098.779,00 dengan realisasi sampai 31 Desember 2025 senilai Rp 11.772.269.132,00 atau 97,15% yang diberikan kepada:

(a) Masyarakat, diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat-istiadat, dan keolahragaan non-profesional yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintah;

(b) Organisasi kemasyarakatan, diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang telah dibentuk berdasarkan peraturan per Undang-Undangan (memiliki akta notaris);

(c) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik; dan

(d) Penganggaran hibah dalam bentuk uang dan barang harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Kepala Daerah atas dasar rekomendasi SKPD.

4) Belanja Bantuan Sosial

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD, bantuan sosial berupa uang atau barang. Anggaran bantuan sosial untuk Tahun Anggaran 2025 senilai Rp26.000.000,00 realisasi sampai 31 Desember 2025 senilai Rp22.000.000,,00 atau 84,62% yang diberikan kepada:

(a) Anggota/kelompok masyarakat yang meliputi individu, keluarga dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;

(b) Lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lain yang berperan melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial; dan

(c) Penganggaran bantuan sosial dalam bentuk uang dan barang harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Kepala Daerah atas dasar rekomendasi SKPD.

b) Belanja Modal

Belanja Modal merupakan belanja yang dianggarkan untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Tahun 2025 dianggarkan senilai Rp91.931.171.371,36 direalisasikan senilai Rp84.297.149.410,00 atau 91,70%.

c) Belanja Tidak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional, Anggaran Belanja Tidak Terduga Tahun 2025 senilai Rp895.000.000,00 dengan realisasi sampai 31 Desember 2025 senilai Rp696.208.433,00 atau 77,79%, mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2024 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan berpengaruh terhadap pemerintah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti:

1) Kebutuhan tanggap darurat; dan

2) Penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

d) Transfer Bantuan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah mengalokasikan anggaran Alokasi Dana Desa dalam APBD sebesar 10% dari dana DAU ditambah DBH non earmarked yang diterima daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Desa (DD).

Transfer Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dianggarkan untuk Tahun Anggaran 2025 senilai Rp87.616.788.800,00 dengan realisasi sampai 31 Desember 2025 senilai Rp84.790.265.420,00 atau 96,77% yang terdiri dari:

1) Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Kabupaten/Kota ke provinsi dianggarkan senilai Rp105.000.000,00 dengan realisasi senilai Rp105.000.000,00.
2) Alokasi Dana Desa (ADD) APBD dianggarkan senilai Rp36.704.612.800,00 dengan realisasi senilai Rp36.704.519.800,00 atau 99,99%.
3) Dana Desa (DD) APBN dianggarkan senilai Rp50.655.471.000,00 dengan realisasi senilai Rp47.980.745.620,00 atau 94,71%.

d. Kebijakan Pembangunan Daerah dan Kendala yang Dihadapi

Sebagai daerah otonomi baru, Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah menghadapi beberapa tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Beberapa tantangan tersebut teridentifikasi sebagai berikut:

a) Keterbatasan sumber pendapatan daerah;
b) Keterbatasan sarana dan prasarana pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat; dan
c) Terbatasnya jumlah dan kapabilitas aparatur Pemerintah Daerah.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, dalam pelaksanaan Tahun Anggaran 2025 ini, kebijakan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah adalah:

a) Akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan belanja daerah;
b) Alokasi belanja daerah sesuai skala prioritas dalam rangka memenuhi kebutuhan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat;
c) Pemenuhan kebutuhan data dan informasi dalam rangka memenuhi prasyarat usulan pembangunan infrastruktur kawasan pemerintahan, jalan dan jembatan, kesehatan, pendidikan, pertanian, kawasan permukiman, dan pemberdayaan masyarakat; dan
d) Peningkatan pemahaman dan kompetensi aparatur Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah melalui penajaman visi dan misi dalam penyelenggaraan tugas.
e) Pemantapan infrastruktur dasar untuk penguatan perekonomian rakyat berbasis agribisnis agropolitan didukung pemeliharaan ketertiban dan ketenteraman.

e. Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja Daerah

1. Berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah

Pelaksanaan urusan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah meliputi urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan pemerintah fungsi penunjang, dilaksanakan sesuai urusan pemerintahan daerah yang mendasar untuk dilaksanakan oleh daerah otonomi baru. Sehingga kebijakan yang akan dilaksanakan adalah prioritas belanja daerah pada upaya memenuhi kebutuhan mendasar dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah.

2. Berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah yang telah diubah dalam Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Di tahun 2025 dilakukan Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah dalam Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah .

Adapun SKPD yang menangani urusan wajib pelayanan dasar urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan Pemerintah fungsi penunjang, yang dilaksanakan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a) Sekretariat Daerah, terdiri dari 9 (sembilan) Bagian yaitu:
   1) Bagian Kesejahteraan Rakyat;
   2) Bagian Pemerintahan;
   3) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
   4) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
   5) Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan;
   6) Bagian Administrasi Pembangunan;
   7) Bagian Umum;
   8) Bagian Organisasi dan Tata Laksana; dan
   9) Bagian Hukum dan HAM.
b) Sekretariat DPRD;
c) Inspektorat Daerah;
d) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
e) Dinas Kesehatan;
f) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
g) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan;
h) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
i) Dinas Sosial;
j) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
k) Dinas Lingkungan Hidup;
l) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
m) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
n) Dinas Perhubungan;
o) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
p) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
q) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
r) Dinas Perikanan;
s) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
t) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
u) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
v) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
w) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
x) Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah;
y) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
z) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
aa) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
bb) Rumah Sakit Umum Daerah;
cc) Kecamatan, yang terdiri dari 5 (lima) Kecamatan, yaitu:
   1) Kecamatan Tobadak;
   2) Kecamatan Topoyo;
   3) Kecamatan Karossa;
   4) Kecamatan Budong-Budong;
   5) Kecamatan Pangale.

SKPD yang menangani urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan pemerintah fungsi penunjang, tersebut dapat diuraikan di bawah ini:

a) Urusan Wajib Pelayanan Dasar
   1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
   2) Dinas Kesehatan;
   3) Rumah Sakit Umum Daerah;
   4) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
   5) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan;
   6) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
   7) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
   8) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
   9) Dinas Sosial.

b) Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
   1) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
   2) Dinas Lingkungan Hidup;
   3) Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil;
   4) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
   5) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
   6) Dinas Perhubungan;
   7) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
   8) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
   9) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

c) Urusan Pilihan
   1) Dinas Perikanan;
   2) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
   3) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
   4) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.

d) Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang
   1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
   2) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
   3) Sekretariat Daerah;
   4) Bagian Administrasi Pemerintahan;
   5) Bagian Kesejahteraan;
   6) Bagian Pemerintahan;
   7) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
   8) Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
   9) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan;
   10) Bagian Administrasi Pembangunan;
   11) Bagian Hukum dan HAM;
   12) Bagian Umum;
   13) Bagian Organisasi dan Tata Laksana;
   14) Sekretariat DPRD;
   15) Kecamatan Tobadak;
   16) Kecamatan Topoyo;
   17) Kecamatan Karossa;
   18) Kecamatan Budong-Budong;
   19) Kecamatan Pangale;
   20) Inspektorat Daerah;
   21) Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah;
   22) Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah;
   23) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Kebijakan belanja daerah untuk pelaksanaan tugas SKPD didasarkan pada upaya pemenuhan kebutuhan pelaksanaan tugas yang mendasar sehingga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dan memenuhi kebutuhan data dan informasi dalam rangka penyusunan perencanaan program dan kegiatan tahun depan.

Adapun pemenuhan kebutuhan dasar tersebut lebih kepada penyediaan sarana dan prasarana perkantoran, penyelenggaraan program dan kegiatan urusan *desentralisasi* masing-masing SKPD dan pelaksanaan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Pemerintah Pusat, serta lembaga/instansi terkait pelaksanaan rencana kerja Tahun Anggaran 2025.

f. Berdasarkan Jenis Belanja yang Terkait Langsung dengan Program dan Kegiatan

Penganggaran belanja yang terkait langsung dengan program dan kegiatan (belanja) dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan SKPD, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Perencanaan program dan kegiatan yang akan dilakukan melalui pendekatan teknokratis, partisipatif, politis,*top-down* dan *bottom-up*;

2. Penyusunan RKA-SKPD wajib berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM), Analisis Standar Belanja (ASB), dan Standar Harga Satuan (SHS) yang telah ditetapkan. ASB dan SHS ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah; dan
3. Setiap belanja yang dicantumkan dalam suatu kegiatan harus mencerminkan nama kegiatan dan indikator kinerja serta hubungan langsung dari kegiatan tersebut.

Jenis belanja dirinci lebih lanjut ke dalam jenis-jenis belanja sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai adalah kompensasi dalam bentuk uang yang diberikan kepada pegawai pemerintah (pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS) yang bertugas untuk kepentingan daerah sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal dan/atau kegiatan yang mempunyai *output* dalam kategori belanja barang dialokasikan bersamaan dengan belanja barang/modal tersebut.

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa, dipergunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan barang yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 57 sampai dengan Pasal 63.

3. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah nilai aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi (12 bulan) serta melebihi batas minimal kapitalisasi aset atau aset lainnya yang dialokasikan sebesar biaya belanja modal ditambah dengan biaya-biaya pendukung lainnya sampai dengan belanja tersebut siap digunakan. Aset tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja atau dipergunakan oleh masyarakat/publik namun tercatat dalam registrasi aset SKPD terkait serta bukan untuk dijual/diberikan kepada masyarakat atau pihak ke tiga.

4. *Surplus/(Defisit)*

Kebijakan daerah di Tahun Anggaran 2025 adalah bersaldo nol. Namun dalam proses penganggaran program dan kegiatan SKPD diperkirakan akan mengalami *defisit*, Pemerintah Daerah menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, , hasil kekayaan daerah yang dipisahkan. Kebijakan defisit dapat dilakukan dengan memedomani batas maksimal defisit APBD Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan melaporkan posisi *surplus/defisit* APBD kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap semester Tahun Anggaran 2025.

5. Pembiayaan Daerah

Sebagai daerah otonomi baru, Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah merencanakan anggaran untuk Pembiayaan Daerah baik itu Penerimaan Pembiayaan maupun Pengeluaran Pembiayaan, berupa penyertaan modal (investasi) pemerintah pada Badan Usaha Milik Daerah yaitu Bank Sulselbar, yang ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal.

6. Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan

Pemerintah Daerah menetapkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Anggaran 2025 bersaldo nol. Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan APBD menghasilkan SILPA tahun berjalan positif, Pemerintah Daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, *volume* program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.

Dalam hal perhitungan SILPA tahun berjalan negatif, Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatan.

g. Strategi Pemerintah Daerah dalam Mencapai Target

Berkaitan dengan kebijakan pendapatan daerah, strategi yang akan dilakukan sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah mencapai target atau meningkatkan pencapaian target pendapatan yang diarahkan pada pemantapan landasan ekonomi daerah yang mandiri, antara lain adalah:

1. Mendorong pertumbuhan ekonomi secara adil dan merata dengan prioritas pada bidang perdagangan dan jasa sebagai tulang punggung perekonomian daerah dengan memacu wilayah pengembangan;
2. Mengembangkan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan kesempatan berusaha, optimalisasi potensi ekonomi lokal, pemberdayaan usaha sektor informal, Koperasi dan UKM serta keadilan kesempatan untuk berusaha dalam iklim yang kondusif;
3. Meningkatkan iklim investasi guna mendorong agar dapat mengurangi hambatan- hambatan baik yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, permodalan, infrastruktur, kelembagaan serta kepastian dan keamanan berinvestasi;
4. Perlindungan dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dalam bentuk pemantapan kehidupan beragama, pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak dengan memprioritaskan pada golongan masyarakat miskin;
5. Mengembangkan iklim kondusif bagi peningkatan swadaya melalui pola/skema kemitraan baik antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat, Pemerintah Daerah dengan swasta atau masyarakat dengan swasta;
6. Struktur ekonomi daerah diarahkan untuk mewujudkan struktur perekonomian daerah yang kokoh dimana perdagangan dan jasa menjadi basis aktivitas perekonomian yang didukung oleh aktivitas perekonomian lainnya;
7. Mengoptimalkan pendapatan melalui *intensifikasi*, *ekstensifikasi* dan *diversifikasi* sumber-sumber pendapatan tanpa membebani masyarakat;
8. Mengoptimalkan pengelolaan aset dan kekayaan daerah agar dapat memberikan nilai tambah bagi pendapatan daerah, melalui *profesionalisme* manajemen; dan
9. Mengoptimalkan pengelolaan pengeluaran daerah yang didasarkan pada standar analisa belanja, standar harga, tolok ukur kinerja, dan standar pelayanan minimal serta memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas.

h. Kebijakan Pembangunan Daerah

Sebagai Daerah Otonomi Baru, pada Tahun Anggaran 2025 Kebijakan Umum Anggaran yang akan dilaksanakan merupakan penjabaran dari empat tugas Bupati Mamuju Tengah serta berpedoman pada RPJMD Provinsi dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional Tahun 2025, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Integrasi perencanaan pembangunan yang diperoleh secara sistematis dan berjenjang melalui mekanisme musrenbang baik aspirasi dari kebutuhan masyarakat maupun kebijakan pemerintah adalah diharapkan dapat menjamin penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Dengan demikian kepentingan hak dan kewajiban masyarakat dapat berjalan secara bersinergi untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagaimana komitmen visi dan misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan daerah. Sebagai mana di jelaskan pada tabel berikut :

Tabel 7. 10
Sinergi Kebijakan Pembangunan Pusat dan Daerah Tahun 2025

No	Dimensi Prioritas	Kebijakan Nasional	Kebijakan Provinsi Sulawesi Barat	Kebijakan Kabupaten Mamuju Tengah
1	Pembangunan Manusia dan Kualitas SDM	Fokus pada peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, dan gizi. Program unggulan: pemeriksaan kesehatan gratis, penurunan stunting.	Menyiapkan sarana Sekolah Rakyat di 4 lokasi, memperluas akses layanan kesehatan dasar.	Menjalankan layanan kesehatan gratis, intervensi stunting terpadu, dan peningkatan mutu pendidikan dasar.
2	Pengentasan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial	Target penurunan angka kemiskinan menjadi 4,5–5,0% pada 2029 melalui bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi.	Menurunkan kemiskinan secara bertahap dengan program perlindungan sosial yang terintegrasi.	Melaksanakan Makanan Bergizi Gratis dan memperkuat jaring pengaman sosial bagi kelompok rentan.
3	Infrastruktur Dasar dan Konektivitas	Membangun infrastruktur untuk konektivitas antarwilayah, ketahanan pangan, dan energi, termasuk Proyek Strategis Nasional.	Membangun jalan penghubung antarkabupaten serta infrastruktur pendukung kawasan agropolitan dan sentra produksi.	Membangun jalan kabupaten penghubung sentra produksi, irigasi, dan sarana dasar pendukung aktivitas ekonomi.

No	Dimensi Prioritas	Kebijakan Nasional	Kebijakan Provinsi Sulawesi Barat	Kebijakan Kabupaten Mamuju Tengah
4	Ekonomi, Investasi dan Sektor Unggulan	Mendorong pertumbuhan ekonomi tinggi melalui industri pengolahan, konstruksi, dan pariwisata.	Mengembangkan sektor unggulan pertanian, perkebunan, dan kelautan yang inklusif.	Mengembangkan kawasan agropolitan berbasis pertanian, perkebunan, dan industri pengolahan hasil bumi.
5	Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi	Menggencarkan digitalisasi pelayanan publik dan penerapan SPBE untuk birokrasi yang bersih dan efisien.	Mendorong inovasi pelayanan publik serta memperkuat akuntabilitas kinerja.	Menerapkan SPBE, memperbaiki pelayanan perizinan dan adminduk, serta meningkatkan integritas aparatur.
6	Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana dan Ekologi	Menjalankan ekonomi hijau, konservasi sumber daya alam, dan mitigasi bencana (termasuk Giant Sea Wall).	Mengelola Daerah Aliran Sungai (DAS) secara terpadu dan meningkatkan kesiapsiagaan bencana.	Melaksanakan rehabilitasi mangrove, konservasi pesisir, dan pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat.
7	Ketahanan Pangan dan Pengembangan Wilayah	Mencanangkan swasembada pangan dan energi dengan dukungan infrastruktur pertanian dan irigasi.	Mengembangkan lumbung pangan provinsi dan memperkuat rantai pasok komoditas strategis.	Mengoptimalkan lahan pertanian berkelanjutan, memberdayakan kelompok tani, dan mengembangkan pasar lokal.
8	Inovasi, Riset, dan Daya Saing Daerah	Mendorong riset dan inovasi sebagai fondasi transformasi ekonomi, menyiapkan Quick Wins.	Menyelaraskan program litbang dengan prioritas daerah serta mendorong inovasi di kabupaten/kota.	Mengembangkan inovasi lokal untuk UMKM dan industri kerajinan, serta kerja sama dengan perguruan tinggi.

i. Tantangan dan Upaya Pembangunan Tahun 2025

1. Layanan Pendidikan dan Kesehatan

Pelayanan dibidang Pendidikan dan Kesehatan adalah dua hal yang memiliki andil atau sumbangan terhadap peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). Jika kualitas Pendidikan dan Kesehatan baik, maka kualitas Sumber Daya Manusia akan terus meningkat, oleh karena itu menjadi hal yang sangat penting untuk mendapat penanganan yang serius sebagaimana Program dari Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Program MDGS.

Kualitas Sumber Daya Manusia di Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah menjadi perhatian yang serius oleh Pemerintah Daerah walaupun data tentang Indeks Pembangunan Manusia (IPM) telah mengalami peningkatan dari 0,10% pada Tahun 2025.

SDM adalah modal utama dalam proses pembangunan, suatu daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik serta memiliki tingkat kesejahteraan yang juga baik, cenderung memiliki kualitas Sumber Daya Manusia yang baik. Oleh karena itu untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia tersebut, maka masalah-masalah yang berkaitan dengan Pendidikan dan Kesehatan harus mendapat perhatian yang cukup serius dalam penanganannya.

Untuk meningkatkan IPM dihadapkan pembangunan di sektor pendidikan, kesehatan dan peningkatan paritas daya beli *(income per kapita)* Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dihadapkan pada tantangan untuk mengurangi angka buta huruf dan meningkatkan angka partisipasi kasar/sekolah serta meningkatkan *income per kapita.* Upaya demikian akan memungkinkan terjadi manakala terdapat pemerataan akses pendidikan ke berbagai penjuru wilayah. Selain itu, juga dihadapkan pada tantangan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Melalui pendidikan yang berkualitas, para siswa akan lebih mudah untuk melanjutkan pendidikan di sekolah-sekolah atau perguruan-perguruan tinggi yang berkualitas. Bagi yang tidak melanjutkan pendidikan, bisa lebih mudah terserap di lapangan kerja, atau bahkan bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Masalah peningkatan kualitas pendidikan ini juga terkait dengan berbagai jenis pendidikan yang ada. Peningkatan kualitas pendidikan, misalnya, tidak hanya untuk pendidikan formal, tetapi juga informal dan non-formal. Dengan demikian, peningkatan akses dan kualitas pendidikan itu bisa berlangsung lebih menyeluruh.

Selain pendidikan, kesehatan juga masih menjadi isu penting, Umur Harapan Hidup (UHH) di Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025 adalah 69,68 tahun. Keadaan ini juga sangat dipengaruhi oleh ketersediaan fasilitas kesehatan, ketersediaan tenaga kesehatan, angka kematian ibu, angka kematian bayi, Prevalensi balita gizi buruk dan stunting, penemuan penderita tuberkulosis, penemuan penderita HIV/AIDS, penemuan penderita demam berdarah, penemuan

penderita hipertensi, penemuan penderita diabetes melitus, persentase desa/kelurahan universal *child immunization* (UCI).

Karena rendahnya pola pangan yaitu pola kecukupan asupan pangan dan gizi termasuk akses terhadap air bersih. Disamping angka kematian bayi dan ibu yang melahirkan masih perlu perhatian yang serius. Keadaan demikian akan menjadi tantangan di dalam meningkatkan kualitas kesehatan di Kabupaten Mamuju Tengah. Status gizi balita bersifat labil, karena sangat dipengaruhi pola asupan makanan bergizi dan penyakit penyerta, misalnya BBLR, diare, cacingan, demam berdarah, tipes, dan lain-lain. Masih diperlukan adanya upaya peningkatan status gizi bayi dan balita melalui program-program yang terkait dengan kesehatan bayi dan balita. Kesehatan seorang balita sangat dipengaruhi oleh asupan gizi yang terserap dalam tubuh. Kurangnya gizi yang diserap oleh tubuh mengakibatkan seorang balita mudah terserang penyakit, karena gizi memberikan pengaruh yang besar terhadap kekebalan tubuh. Peningkatan gizi pada balita ini dipengaruhi oleh peningkatan pengetahuan ibu tentang gizi, melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan, perbaikan ekonomi keluarga, perbaikan perilaku pengasuhan, konsumsi makanan dengan gizi seimbang dan peningkatan kesehatan ibu dan anak. Salah satu akibat kekurangan gizi balita dapat menyebabkan stunting.

Reformasi struktural, yang difokuskan pada:

a. Reformasi pelayanan Pendidikan dan Kesehatan serta transformasi digital. Dengan mengedepankan inovasi di bidang Pendidikan dan Kesehatan menghadapi era *"new normal"*.
b. Reformasi iklim investasi daerah, dengan melakukan inovasi dalam pengembangan investasi daerah serta promosi potensi daerah.

2. Infrastruktur

Salah satu syarat bagi pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah ketersediaan sarana infrastruktur, khususnya infrastruktur fisik. Infrastruktur fisik akan menunjang proses produksi yang lebih efisien dan efektif, demikian pula proses distribusi hasil produksi. Oleh karena itu, suatu daerah ketika terjadi percepatan perbaikan ekonomi, mau tidak mau harus memperhatikan infrastruktur. Kondisi infrastruktur fisik di Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah masih belum memadai bagi berbagai kegiatan masyarakat, khususnya kegiatan ekonomi. Kerusakan jalan, menjadi tidak kondusif bagi upaya meningkatkan kegiatan ekonomi dan akses kegiatan masyarakat lainnya. Keadaan semacam itu bisa jadi bukan tantangan yang cukup serius manakala terdapat dana yang memadai. Di daerah ini, anggaran untuk kepentingan pembangunan masih relatif terbatas. Untuk itu, dibutuhkan langkah-langkah strategis untuk mengatasinya. Diantaranya adalah pengutamaan pembangunan infrastruktur yang menjadi poros bagi desa satu dengan desa lainnya, atau antara desa dengan kota, dan infrastruktur-infrastruktur lain yang memiliki keterkaitan langsung dengan kegiatan ekonomi masyarakat, seperti pembangunan dan perbaikan dam dan saluran irigasi, serta jalan tani. Infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah, yang difokuskan pada mengefektifkan daya dukung infrastruktur dasar dan pendukungnya yaitu penguatan infrastruktur komunikasi dan informasi, pengelolaan lingkungan dan bangunan serta pembangunan infrastruktur transportasi perdesaan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, status jalan dibagi ke dalam lima jenis yaitu, Jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten, Jalan Kota, dan Jalan Desa. Jalan Kabupaten didefinisikan sebagai jalan yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat desa, antar ibukota kecamatan, ibukota kecamatan dengan desa dan antar desa. Jalan Kabupaten juga bisa berupa jalan sekunder yang tidak masuk sebagai jalan provinsi dan jalan strategis kabupaten, lalu penghubung antar-pusat kegiatan lokal. Kode jalan ini ditandai dengan K4. Pengelolaan dan penanggung jawab jalan kabupaten adalah pemerintah daerah kabupaten baik oleh bupati maupun pejabat yang ditunjuk. Ciri warna marka jalan kabupaten sama dengan jalan provinsi yakni hanya berwarna putih saja, baik terputus maupun garis tanpa putus. Namun biasanya jalan kabupaten memiliki ukuran lebar yang lebih kecil dari jalan provinsi.

Masalah dibalik realitas ini adalah kondisi infrastruktur jalan yang masih buruk sehingga mempengaruhi aspek ekonomi dan pelayanan di desa. Dari total panjang jalan kabupaten, hanya sekitar 20% dalam kondisi baik. Sebagian besar jalan antar desa serta jalan dari desa ke ibu kota kabupaten masih berstatus jalan tanah dan jalan kerikil. Jalan aspal antar desa atau dari desa ke ibu kota kabupaten sebagian dalam kondisi rusak dan rusak berat. Selain itu, sarana/prasarana dalam mewujudkan agropolitan di ibu kota Kabupaten serta sarana/prasarana pendukung sentra agribisnis di ibu kota kecamatan, belum tersedia dengan cukup. Akar masalah dari kondisi ini terkait dengan aspek historis daerah ini yang awalnya merupakan daerah transmigrasi berbasis unit permukiman

transmigrasi (UPT), setelah berstatus desa maka jalan antar desa itu sebelumnya merupakan jalan antar UPT yang memerlukan dana dalam jumlah besar untuk pembangunannya. Misi ini juga mencakup upaya umum dalam pembangunan sarana/prasarana dalam mewujudkan agropolitan di ibukota kabupaten yang ditopang oleh sarana/prasarana pendukung sentra agribisnis di seluruh kecamatan.

3. Kemiskinan dan Ketertinggalan

Berdasarkan RPJMD Tahun 2021-2026, dimana kemiskinan termasuk masalah pokok dalam pembangunan Kabupaten Mamuju Tengah dalam lima tahun kedepan. Menurut SDGs, tujuan yang dituju adalah terhapusnya semua kemiskinan. Pada tahun 2019, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Mamuju Tengah 9.160 orang, bertambah dibanding tahun 2015 yang sebanyak 8.390 orang. Persentase penduduk miskin tahun 2019 adalah 6,87%, bertambah dibanding tahun 2015 (6,86%). Masalah dibalik kemiskinan ini adalah pengangguran terbuka dan pengangguran tersembunyi serta rendahnya pendapatan masyarakat yang bekerja. Pada tahun 2019, jumlah penduduk yang bekerja sendiri sebanyak 10.880 orang, memiliki usaha dan dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar sebanyak 17.499 orang, berusaha dan dibantu buruh tetap sebanyak 1.222 orang, pekerja bebas pertanian 4.004 orang, pekerja bebas non pertanian 3.976 orang. Pekerja pada berbagai jenis pekerjaan utama ini rata-rata memiliki pendapatan rendah. Masalah lain terkait dengan perbedaan sistem nafkah rumah tangga yang mengarah pada kesenjangan. Lebih dari 50% rumah tangga hidup dari sistem nafkah kebun sawit yang hingga saat ini hasil nafkahnya relatif tinggi (di atas garis kemiskinan), bersifat reguler, dan sebagian besar pelakunya adalah bekas transmigran. Berbeda dengan masyarakat nelayan yang bermukim di sepanjang pesisir Kabupaten Mamuju Tengah yang sistem nafkahnya bergantung pada musim tangkap, teknologinya sederhana, alokasi waktu kerjanya tinggi, dan pendapatannya rendah sehingga hidup di bawah garis kemiskinan.

Salah satu penanganan penting dalam bidang perumahan dan penanganan kemiskinan selama lima tahun terakhir adalah pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menjadi Rumah Layak Huni (RLH). Pembangunan RTLH dilakukan secara bersinergi, dengan melibatkan secara langsung komponen masyarakat. Pembangunan RTLH menggunakan berbagai sumber pendanaan meliputi APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN melalui Kementerian Perumahan Rakyat maupun Kementerian Sosial RI. Ada lima kriteria rumah layak huni yaitu Ketahanan dan Keselamatan Bangunan, Kecukupan Luas Ruang Penghuni, Akses Sanitasi Layak, Air Minum Layak dan adanya Luas Pencahayaan dan Pengawasan.

4. Rendahnya Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Publik

Rendahnya kepuasan masyarakat atas pelayanan publik juga merupakan masalah pokok. Pada tahun 2025, kepuasan masyarakat atas pelayanan pada RSUD, UPTD Pengelolaan Bersih, DPM PTSP Koperasi dan UKM, serta Disdukcapil hanya mencapai kategori C atau Kurang Baik, sementara pelayanan pada Dinas Sosial kategori B atau Baik. Capaian SPM juga belum memenuhi target 100% pada berbagai indikator yakni pelayanan ibu hamil sesuai (76,51%), pelayanan ibu melahirkan (84,88%), pelayanan bayi baru lahir (88,67%), pelayanan kesehatan balita (76,36%), penyediaan air minum sehari-hari (65%), pengelolaan limbah domestik (69%), pelayanan warga terkait penegakan hukum Perda (50%), pelayanan informasi bencana (14%) dan rehabilitas sosial dasar di luar panti 63,90%. Masalah terkait rendahnya kepuasan masyarakat dan capaian SPM terkait dengan keterbatasan sarana-prasarana, teknologi, dan SDM penyelenggara pelayanan. Fasilitas dan tenaga kesehatan, termasuk dokter ahli, untuk pelayanan kesehatan level rumah sakit, puskesmas serta puskesmas pembantu dan jaringannya belum sepenuhnya memenuhi standar dan sebarannya belum menjangkau seluruh penerima layanan terutama layanan ibu hamil, ibu melahirkan, bayi baru lahir dan balita. Pelayanan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar juga berhadapan dengan masalah terbatasnya jumlah dan kualitas sarana. Demikian halnya dengan tenaga guru yang dari segi jumlah, kualitas dan sebaran belum optimal. Fasilitas pelayanan air minum sehari-hari dan fasilitas sanitasi juga masih terbatas.

5. Pembangunan Pertanian

Masalah pokok urusan pertanian adalah adanya alih fungsi lahan pertanian yang diakibatkan oleh ketidakstabilan harga hasil produksi di tingkat petani. Ketersediaan infrastruktur prasarana pertanian yang kurang memadai seperti jalan tani dan jalan produksi, irigasi teknis untuk mengairi lahan sawah seluas 198 Ha dalam kondisi rusak berat dan sedang. Untuk ketersediaan sarana pertanian yang masih kurang seperti pupuk bersubsidi, bibit dan benih tanaman yang tidak optimal. Dari segi SDM penyuluh pertanian juga menjadi masalah karena kurangnya kualitas pengetahuan

SDM penyuluh dan jumlah tenaga penyuluh pertanian organik serta banyaknya penyuluh yang memasuki masa pensiun.

6. Lingkungan

Suatu pembangunan akan bermakna lebih baik manakala memiliki keberlanjutan (*sustainability*). Diantara faktor penting bagi adanya keberlanjutan adalah berkaitan dengan lingkungan. Di daerah ini masalah lingkungan menjadi isu yang sangat penting karena kegiatan ekonomi masyarakat sebagian besar berkaitan dengan pemanfaatan sumber-sumber alam. Sektor yang berkaitan dengan pertanian, seperti perkebunan, pertambangan, dan perikanan. Misalnya, sangat jelas tergantung pada masalah lingkungan. Ketika kualitas lingkungan mengalami penurunan, kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan sumber daya alam itu juga akan mengalami penurunan.

Lingkungan juga terkait dengan kepentingan ekologi, seperti ketersediaan air, kelestarian keanekaragaman hayati dan pengaruh perubahan cuaca. Daya dukung lingkungan ini mengalami penurunan, seperti menurunnya sumber mata air untuk kepentingan air bersih dan irigasi. Menurunnya keseimbangan ekosistem dan kualitas udara. Karena itu, tantangan besar bagi daerah ini adalah menjaga kelestarian lingkungan. Dengan demikian, pemanfaatan sumber daya alam itu tidak hanya untuk kepentingan sesaat dan jangka pendek, melainkan untuk kelangsungan alam itu sendiri dan kelangsungan pemanfaatannya oleh generasi berikutnya.

Masalah pokok urusan lingkungan hidup adalah degradasi lingkungan dan sumber daya alam yaitu berbagai persoalan seperti deforestasi atau penggundulan hutan, pembuangan limbah dan persampahan. Degradasi lingkungan dapat mengganggu siklus hidrologi dengan dampak pada terjadinya banjir karena luapan air sungai, bencana kebakaran lahan, hutan dan persoalan-persoalan lain yang ditimbulkan dari Degradasi lingkungan dan sumber daya alam. Tercemarnya air sungai karena limbah pabrik utamanya di dua sungai utama yaitu Sungai Budong-Budong dan Sungai Barakkang.

Selain hal tersebut, persoalan lingkungan juga dipicu dari kurangnya sarana prasarana yang mendukung baik dari pengelolaan persampahan maupun air limbah sehingga kondisi persampahan dan air limbah terutama di wilayah Tumbuh perkotaan belum dikelola dengan maksimal, hal lain yang menjadi persoalan adalah belum tersusunnya Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) sehingga potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya belum dapat dipetakan dengan baik. Dari segi sumber daya manusia juga masih mengalami kendala yaitu masih sangat kurangnya pejabat pengawas lingkungan hidup yang mengikuti diklat bersertifikat hal ini mengakibatkan tidak maksimalnya Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

Berdasarkan RKPD Perubahan Tahun 2025 persentase Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 75,59%, sedangkan berdasarkan Profil Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Mamuju Tengah 2025 sebesar 76% dengan predikat baik atau kategori B.

7. Pengawasan

Pengawasan Intern Pemerintah Daerah merupakan unsur manajemen pemerintah yang penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintahan Daerah mengamanatkan Inspektorat selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) melakukan pengawasan intern atas penyelenggara urusan pemerintahan daerah untuk memberikan jaminan (*reasonable assurance*) bahwa pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana secara efektif dan efisien serta mempedomani ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku. Dalam mewujudkan tujuan dan visi Inspektorat, terdapat beberapa kendala – kendala antara lain:

1. Dari segi SDM yaitu kompetensi teknis (adanya kesenjangan antara bimtek/diklat dengan kebutuhan);
2. Dari segi Anggaran yaitu belum adanya jaminan kecukupan anggaran bagi pelaksanaan kegiatan pengawasan;
3. Dari segi *Stakeholder*/Auditan yaitu masih kurangnya tanggapan objek pemeriksaan terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan. Atas beberapa masalah tersebut, Inspektorat berharap dukungan dari Pemerintah Daerah, antara lain:
   a. Program pembinaan Jabatan Fungsional secara periodik bagi APIP;
   b. Dukungan kebijakan anggaran dalam bidang pengawasan APIP;
   c. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mewujudkan *Good Governance*.

j. Mandatory Spending

1. Pendidikan

Anggaran Pendidikan dalam postur APBD Tahun Anggaran 2025 senilai Rp207.016.648.243,65 dari jumlah APBD keseluruhan senilai Rp644.027.253.010,48 atau 32,14% dari jumlah anggaran. Sedangkan realisasi dari bidang pendidikan senilai Rp209.725.114.991,00 atau 33,69%.

2. Kesehatan

Anggaran Kesehatan dalam postur APBD Tahun Anggaran 2025 senilai Rp112.033.938.379,42 dari jumlah APBD keseluruhan diluar gaji senilai Rp387.704.350.168,02 atau 28,98% dari jumlah anggaran. Sedangkan realisasi dari bidang Kesehatan senilai Rp106.266.469.080,46 atau 94,85%.

3. Infrastruktur

Anggaran Infrastruktur dalam postur APBD Tahun Anggaran 2025 yaitu senilai Rp189.461.008.471,36 dari jumlah APBD senilai Rp644.027.253.010,48 atau 26,86% dari jumlah anggaran. Sedangkan realisasi dari bidang Infrastruktur senilai Rp178.657.533.374,00 atau 94,30%.

4. Alokasi Dana Desa

Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dalam postur APBD Tahun Anggaran 2025 yaitu 10% dari DAU dan DBH senilai Rp36.704.612.800,00 dari jumlah DAU dan DBH senilai Rp369.378.709.000,00 atau 9,94% dari jumlah anggaran. Sedangkan realisasi Alokasi Dana Desa senilai Rp36.704.519.800,00 atau 100%.

5. Transfer Desa

Anggaran Transfer Desa dalam postur APBD Tahun Anggaran 2025 yaitu senilai Rp50.655.471.000,00 dari jumlah PAD senilai Rp644.027.253.010,48 sedangkan realisasi Transfer Desa senilai Rp47.980.745.620,00 atau 94,71%.

6. Pengawasan

Anggaran Pengawasan dalam postur APBD Tahun Anggaran 2025 yaitu senilai Rp9.344.822.976,00 dari jumlah APBD senilai Rp644.027.253.010,48 atau 1,45% sedangkan realisasi pengawasan senilai Rp9.242.119.177,00 atau 98,90%.

7.2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Anggaran Pendapatan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2025 dianggarkan senilai Rp634.152.870.136,48 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah senilai Rp23.965.016.835,00 Pendapatan Transfer senilai Rp560.571.750.605,48 dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah senilai Rp8.339.182.911,00.

Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2025 senilai Rp645.179.353.993,73 atau 101,744% yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah senilai Rp 73.090.587.048,73 atau 112,03% , Pendapatan Transfer senilai Rp563.803.319.346,00 atau 100,58% dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah senilai Rp8.285.447.599 atau 99,36%.

Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah pada Tahun Anggaran 2025 dianggarkan senilai Rp644.027.253.010,48 yang terdiri dari belanja operasi senilai Rp463.584.292.839,12, belanja modal senilai Rp91.931.171.371,36 dan belanja tidak terduga senilai Rp895.000.000,00. Untuk Transfer Bantuan Keuangan dianggarkan senilai Rp87.616.788.800,00.

Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2025 adalah senilai Rp622.607.889.371,46 atau 96,67% yang terdiri dari belanja operasi senilai Rp452.824.266.108,46 atau 97,688%, belanja modal senilai Rp84.297.149.410,00 atau 91,70%, belanja tidak terduga senilai Rp696.208.433,00 atau 77,79% dan transfer bantuan keuangan senilai Rp84.790.265.420,00 atau 96,77%.

Sebagai daerah otonomi baru Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2013-2025 akan berfokus pada pelaksanaan empat tugas yang diemban oleh Bupati Mamuju Tengah, yang akan diuraikan sebagai berikut:

Tugas 1: Pembentukan Struktur Kelembagaan dan Pemerintahan

Tahun 2025 ini merupakan tahun ke 12 (dua belas) efektifnya Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah yang diawali pelantikan Pj. Bupati Pertama oleh Gubernur Sulawesi Barat pada tanggal 8 Juli 2013 dan pelantikan Bupati Definitif pada tanggal 25 Juli 2014. kemudian memantapkan pembentukan kelembagaan dengan Peraturan Bupati, dengan membentuk beberapa kelembagaan yang terdiri dari:

a. Sekretariat Daerah, terdiri dari 3 (tiga) asisten yang dibawahi langsung oleh Sekretaris Daerah, terdiri dari beberapa bagian-bagian, yaitu:
   1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:

a) Bagian Pemerintahan ;
b) Bagian Kesejahteraan Rakyat;
c) Bagian Hukum.

2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari:
   a) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
   b) Bagian Administrasi Pembangunan; dan
   c) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
3. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari :
   a) Bagian Umum;
   b) Bagian Organisasi dan Tata Laksana; dan
   c) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.

b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Sekretariat DPRD Kabupaten yang selanjutnya disebut Setwan merupakan unsur staf pelayanan terhadap DPRD Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Kabupaten.

Sekretaris DPRD Kabupaten mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administratif kepada anggota DPRD untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud Setwan mempunyai fungsi:

1. Fasilitator rapat anggota DPRD;
2. Pelaksanaan urusan Kepegawaian, Keuangan, Perlengkapan, Rumah Tangga, Perjalanan Dinas Anggota DPRD, Kehumasan dan Protokoler;
3. Pengelolaan administrasi tata usaha DPRD.

c. Staf Ahli

Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Staf Ahli. Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Aparatur Sipil Negara. Tugas dan fungsi Staf Ahli ditetapkan oleh Bupati di luar tugas dan fungsi perangkat daerah. Staf Ahli Bupati Kabupaten Mamuju Tengah ada tiga orang dengan jabatan sebagai berikut:

1. Staf Ahli Pemerintahan, Hukum dan Politik;
2. Staf Ahli Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan; dan
3. Staf Ahli Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

d. Dinas daerah yang terdapat di Kabupaten Mamuju Tengah, terdiri dari 19 (Sembilan Belas) Dinas, yaitu:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan;
5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
6. Dinas Sosial;
7. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
8. Dinas Lingkungan Hidup;
9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
11. Dinas Perhubungan;
12. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
13. Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
15. Dinas Perikanan;
16. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga;
17. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
18. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
19. Dinas Transmigrasi dan Tenaga kerja.

e. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mamuju Tengah yang mempunyai fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan serta fungsi pelayanan masyarakat yang dapat berbentuk Badan dan/atau Kantor, yang terdiri dari:

1. Inspektorat Daerah;
2. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD);
3. Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA);
4. Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM);
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD); dan
6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

f. Kantor Kecamatan, terdiri dari 5 (lima) kantor kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Tobadak;
2. Kecamatan Topoyo;
3. Kecamatan Karossa;
4. Kecamatan Budong-Budong; dan
5. Kecamatan Pangale.

g. Badan Layanan Umun Daerah (BLUD)

a. Rumah Sakit Umum Daerah.

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Mamuju Tengah adalah unsur penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah, di bidang pelayanan kesehatan yang mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Mamuju Tengah mempunyai tugas pokok:

1. Melaksanakan Pelayanan Kesehatan (*Caring*);
2. Penyembuhan (*Curing*);
3. Penderita *(Sufferer);*
4. Pemulihan keadaan cacat badan dan jiwa (*Rehabilitation*);
5. Melaksanakan upaya rujukan dan
6. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai standar pelayanan rumah sakit.

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Mamuju Tengah diresmikan pada tanggal 20 Oktober 2014 oleh Bupati. Pada tahun 2017 telah terakreditasi untuk kali pertama dengan predikat perdana bintang satu, dengan kelas (tipe D) kemudian pada tahun 2022 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) telah melaksanakan *survey* akreditasi ke 2 (dua) dengan Predikat Paripurna bintang Lima. Pada Tahun 2025 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Mamuju Tengah telah berubah status menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sesuai Surat Keputusan Bupati Mamuju Tengah Nomor 188.4.45/569/XII/2024 tanggal 21 Desember 2024.

b. Puskesmas

Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) Puskesmas merupakan konsep baru dalam pengelolaan keuangan negara.Konsep ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan fleksibilitas pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip,ekonomi,produktivitas,dan penerapan praktek bisnis yang sehat sebagaimana tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum dan Peraturan Dalam Negeri Nomor 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah yang ditahun 2024 disetujui dan termuat dalam Peraturan Bupati Nomor 204 tahun 2024 tentang Penerapan Badan Layanan Umum Daerah pada Puskesmas Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2024.

h. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah. telah diubah dalam Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Sebagaimana diubah berdasarkan Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

Menindaklanjuti pembentukan kelembagaannya, pengisian eselonisasi dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah mulai Tahun 2014 - 2025, telah dilaksanakan sebanyak 18 (Delapan Belas) kali pengambilan sumpah jabatan, baik itu eselon II, III, IV dan Jabatan Fungsional, sebagai berikut:

1. Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Pejabat Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2014;
2. Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Pejabat Eselon III dan Eselon IV, dilaksanakan pada tanggal 5 September 2014;
3. Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Pejabat Eselon II dan Eselon, dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2016;
4. Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Pejabat Eselon IV dan Eselon II, dilaksanakan pada tanggal 9 Januari 2017;
5. Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Pejabat Eselon II, Eselon III dan Eselon IV dan Eselon II, dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober 2021;
6. Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Penyetaraan Jabatan Fungsional dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah pada tanggal 29 Desember 2021;
7. Pengambilan Sumpah dan Pelantikan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Eselon IV-A dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah pada tanggal 07 Januari 2022;
8. Pengambilan Sumpah dan Pelantikan dalam Jabatan Administrator Eselon III-B dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah pada tanggal 04 April 2022;
9. Pengambilan Sumpah dan Pelantikan dalam Jabatan Administrator Eselon III-B dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah pada tanggal 04 April 2022;
10. Pengambilan Sumpah dan Pelantikan dalam Jabatan Eselon IV-A dan Eselon II-B dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah pada tanggal 09 Mei 2022; dan
11. Pengambilan Sumpah dan Pelantikan dalam Jabatan Administrator Eselon II-B dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah pada tanggal 27 Mei 2022.
12. Pengambilan Sumpah dan Pelantikan dalam Jabatan Fungsional dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah pada tanggal 30 Desember 2022.
13. Pengambilan Sumpah dan Pelantikan dalam Jabatan Administrator Eselon II B, Eselon III A Eselon III B Eselon IV A Eselon IV B dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah pada tanggal 31 Januari 2024
14. Pengambilan Sumpah dan Pelantikan dalam Jabatan Administrator Eselon II B, Eselon III, B, Eselon IV A, dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah pada tanggal 11 April 2024.
15. Pengambilan Sumpah dan Pelantikan dalam Jabatan Administrator Eselon II B, Eselon III A, Eselon III B, Eselon IV A, Eselon IV B dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah pada tanggal 27 Oktober 2024.
16. Pengambilan Sumpah dan Pelantikan dalam Jabatan Administrator Eselon II B, Eselon III A, Eselon III B, Eselon IV A dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah pada tanggal 27 Mei 2025.
17. Pengambilan Sumpah dan Pelantikan dalam Jabatan Pejabat Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah pada tanggal 02 September 2025.
18. Pengambilan Sumpah dan Pelantikan dalam Jabatan Administrator Eselon II B, dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah pada tanggal 28 Oktober 2025.
19. Pengambilan Sumpah dan Pelantikan dalam Jabatan Administrator Eselon II A, Eselon II B,Eselon III A, Eselon III B, jabatan Pengawas Eselon IV A dan eselon IV B, dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah pada tanggal 15 Desember 2025.

Masalah pokok urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan adalah ketersediaan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Mamuju Tengah yang masih sangat kurang. Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara merupakan kebutuhan yang mendasar dalam penyelenggaraan birokrasi pada suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), sehingga ketersediaan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara sangatlah diperlukan sebagai faktor penunjang keberlangsungan penyelenggaraan tata kelola birokrasi pada Pemerintah Daerah sehingga dapat berjalan dengan baik sebagaimana semestinya.

Ketersediaan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Mamuju Tengah yang masih sangat terbatas, sehingga hal inilah yang menjadi faktor utama sampai dengan saat ini masih terdapat posisi jabatan yang belum terisi atau kosong, dimana tercatat sebanyak 139 jabatan yang kosong dari jumlah keseluruhan jabatan yaitu 296 jabatan, angka tersebut dilihat dari jumlah jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan fungsional pada instansi pemerintah daerah yang belum mencapai interpretasi. Hal tersebut disebabkan masih banyaknya Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang belum memenuhi kualifikasi atau standar kompetensi untuk menduduki jabatan yang kosong tersebut. Sebagaimana telah diamanatkan di dalam PP 17 Tahun 2020 perubahan atas PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

yang bertujuan untuk meningkatkan pengembangan karier, pemenuhan kebutuhan organisasi dan pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil belum bisa terlaksana secara baik dan optimal. Hal tersebut disebabkan karena terbatasnya alokasi anggaran yang diperuntukkan untuk pelaksanaan diklat kepemimpinan dan pelaksanaan kediklatan lainnya serta alokasi anggaran untuk diklat kepemimpinan masih melekat pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan tidak terpusat pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) melalui Bidang Pengembangan Karier ASN. Hal ini dapat dilihat dari persentase rata-rata lama pegawai yang mendapat pendidikan dan pelatihan, persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan serta persentase ASN yang telah mengikuti pendidikan formal, dimana ketiga substansi tersebut juga masih belum mencapai interpretasi. Sehingga ke depannya perlu adanya penambahan alokasi anggaran baik untuk pelaksanaan diklat kepemimpinan dan pelaksanaan kediklatan lainnya yang kemudian pelaksanaannya pun baik itu berupa diklat kepemimpinan ataupun kediklatan lainnya semua pelaksanaannya terpusat atau dipusatkan secara satu pintu pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) melalui Bidang Pengembangan Karier ASN

Tugas 2: Menyelenggarakan Pemerintahan Daerah

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dimana urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, yaitu urusan Wajib pelayanan dasar menjadi delapan, urusan wajib bukan pelayanan dasar menjadi sembilan, urusan pilihan menjadi lima, dan urusan pemerintah fungsi penunjang menjadi 15.

Tugas 3 : Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Mamuju Tengah Hasil Pemilu 2025

Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Mamuju Tengah berdasarkan hasil Pemilu 2025, dilantik sebanyak 25 (Dua Puluh Lima) orang, yang terdiri dari:

a. 3 (Tiga) orang Unsur Pimpinan, terdiri dari: 1 orang Ketua, 2 orang Wakil Ketua
b. 3 (Tiga) orang Unsur Komisi, terdiri dari Komisi I berjumlah 7 orang anggota, Komisi II 8 orang anggota dan Komisi III 7 orang anggota

Tugas 4 : Memfasilitasi Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Mamuju Tengah

Memfasilitasi Pemilukada Kabupaten Mamuju Tengah yang dilaksanakan di Tahun 2025 merupakan tugas keempat atau terakhir dari Bupati Mamuju Tengah, dan untuk pertama kalinya Pemilihan Bupati definitif sejak terbentuk menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) adalah di Tahun 2016. Bupati Mamuju Tengah menyusun dan menetapkan program dan kegiatan dalam Peraturan Bupati Mamuju Tengah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025 yang mendukung seluruh kelancaran pemilihan kepala daerah yang ke tiga yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 November 2025 yang lalu.

Berdasarkan Empat Tugas yang diemban Bupati Mamuju Tengah dan masalah daerah yang mendesak untuk dilaksanakan maka, isu strategis kabupaten dalam Rencana Kerja Daerah Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Penyelesaian Rancangan RT-RW untuk dijadikan program legislasi daerah. Adapun *progress* penyiapan RT-RW dari Tahun 2014-2025, antara lain:
    1. Konsultasi ke BPKRD;
    2. Konsultasi ke BPKRN;
    3. Asistensi Pemetaan BIG Tahap II (Peta Tematik);
    4. *Clearing House* dalam rangka evaluasi hasil-hasil tindak lanjut konsultasi dengan BPKRD Kabupaten dan Provinsi; dan
    5. Konsultasi ke Kementerian Agraria untuk memperoleh rekomendasi substansi teknis.
b. Penurunan Anak Putus Sekolah setiap jenjang sekolah. Salah satu indikator peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan adalah penurunan angka putus sekolah (APS) di setiap jenjang pendidikan. Berbagai upaya yang dilakukan dalam mendorong dan menarik kembali anak-anak yang putus sekolah sehingga mampu merasakan pelayanan pendidikan sebagai pelayanan dasar;
c. Penurunan Angka Kematian Ibu Melahirkan, Bayi, dan Balita. Salah satu indikator peningkatan kualitas pemerataan pelayanan kesehatan serta peningkatan kualitas keluarga adalah menurunnya angka kematian ibu melahirkan, bayi, dan balita. Indikator ini harus terpenuhi melalui ketersediaan tenaga medis yang memiliki kompetensi, prasarana dan sarana medis yang memadai dalam membantu ibu, bayi dan balita mendapatkan hak dasarnya;
d. Peningkatan infrastruktur, sebagai berikut:
    1. Pengembangan dan pengelolaan jaringan air bersih/minum. Kabupaten Mamuju Tengah khususnya di sekitar Kecamatan Topoyo dan Tobadak yang merupakan kecamatan berpenduduk terbesar, belum memiliki jaringan air bersih/minum yang memadai untuk didistribusikan ke rumah-rumah penduduk. Berbagai upaya telah dilakukan oleh masyarakat dan Pemerintah antara lain dengan

memanfaatkan air permukaan, sumur bor dan mata air. Selain itu Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum diharapkan dapat membantu pelayanan air bersih/minum di wilayah ini;

2. Pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan. Prasarana jaringan jalan dan jembatan yang ada di kabupaten ini kondisinya sangat belum cukup memadai, sehingga belum mampu secara maksimal menunjang pola pergerakan orang dan barang dalam menunjang kegiatan perekonomian masyarakat dan daerah;
3. Pengembangan dan pengelolaan jaringan air dan irigasi. Dalam rangka peningkatan potensi sektor pertanian yang merupakan sektor kontribusi PDRB terbesar atau sektor yang penduduk bermata pencaharian terbesar untuk tetap dan meningkatkan sektor ini dengan masih minimnya prasarana pertanian maka perlu untuk pemeliharaan dan peningkatan jaringan air bersih dan irigasi/saluran pembuang serta pembangunan talud/turap/bronjong yang mampu mengaliri daerah pertanian dan perkebunan masyarakat;
4. Peningkatan jaringan listrik. Secara umum pelayanan dan keterjangkauan listrik di daerah ini sudah sampai masuk ke desa-desa dan dirasakan oleh semua golongan masyarakat, namun kenyataannya pemadaman listrik seringnya terjadi karena belum dapat terpenuhinya kebutuhan daya listrik; dan
5. Sarana transportasi berupa armada-armada transportasi (transportasi darat, transportasi air), dan prasarana transportasi diharapkan dapat menunjang arus transportasi dalam dan luar daerah.

e. Reformasi Birokrasi. Dalam menyinkronkan program pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah dalam mendukung pencapaian reformasi birokrasi yang bermuara pada pemerintahan yang bersih, maka perlu tatanan birokrasi Kabupaten Mamuju Tengah berupa Kegiatan Penataan Pengelolaan Keuangan Daerah, Peningkatan Kapasitas Aparatur, Penyusunan dan Penyelenggaraan SPM dan SOP SKPD;

f. Penanganan Pasca bencana dan Pengendalian Bencana Alam. Daerah ini merupakan daerah rawan bencana terutama air bah yang berasal dari hulu sungai, sungai yang berpotensi tersebut adalah Sungai Salulebo, Sungai Budong-budong, Sungai Antalili, Sungai Salowadak, Sungai Lumu, Sungai Salubarana dan Sungai Tasokko. Untuk itu penanganan pasca bencana dan pengendalian bencana alam diperlukan;

g. Pemberdayaan masyarakat dan Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha masyarakat. Daerah ini sangat kaya akan sumber daya alam utamanya di sektor pertanian/perkebunan, yang hasilnya boleh dijadikan produk olahan sehingga mampu membuka usaha kewirausahaan lokal namun belum tersentuh, untuk itu perlu merangsang hal tersebut melalui bantuan pembinaan dan permodalan, melalui program usaha ekonomi masyarakat;

h. Penguatan Lembaga Desa berupa program Bangun Desaku. Banyaknya prasarana yang perlu untuk dibenah dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan desa, untuk itu perlu memberikan bantuan keuangan yang dapat dikelola langsung secara swakelola oleh masyarakat dan aparat desa; dan

i. Jumlah PNS dan Tenaga Kontrak Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah Jumlah PNS menurut Eselon: dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 7. 11
Jumlah PNS berdasarkan Eselon

No.	Eselon	Jenis Kelamin		Jumlah ASN (Orang)
		Laki-laki	Perempuan	
1	Eselon II			
	II/A		-	
	II/B	28	4	32
2	Eselon III			
	III/A	36	6	42
	III/B	60	25	85
3	Eselon IV			
	IV/A	50	38	88
	IV/B	6	4	10
4	Fungsional Umum (OPD,PKM,RSUD)	81	61	142
5	Fungsional Tertentu OPD	112	56	168
6	Fungsional Tertentu (PKS,RSUD)	52	234	286
7	Fungsional Tertentu (Sekolah)	341	476	817
8	Fungsional Umum (Sekolah)	5	9	14
Jumlah Eselon		**180**	**77**	**257**

No.	Eselon	Jenis Kelamin		Jumlah ASN (Orang)
		Laki-laki	Perempuan	
Jumlah Non Eselon		591	836	1427

Tabel 7. 12
Jumlah PNS dan PPPK berdasarkan Golongan

No	Pangkat/Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah ASN (Orang)
		Laki-laki	Perempuan	
1	**Golongan I**			
	I/C	-	-	-
	I/d	-	-	-
2	**Golongan II**			
	II/a	7		7
	II/b	11	9	20
	II/c	22	13	35
	II/d	24	69	93
	Total Golongan II	64	91	155
3	**Golongan III**			
	III/a	66	134	200
	III/b	215	295	510
	III/c	144	130	274
	III/d	87	111	198
	Total Golongan III	512	670	182
4	**Golongan IV**			
	IV/a	88	64	152
	IV/b	89	85	174
	IV/c	18	3	21
	IV/d	195	152	347
	Total Golongan IV	390	304	694
5	**Golongan VII**	61	220	281
6	**Golongan IX**	146	38	618
7	**Golongan X**	22	730	60
	Total PPPK	229	730	959
	2024	**977**	**1.474**	**2.451**
	2025	**1.000**	**1.643**	**2.643**

Tabel 7. 13
Jumlah Pegawai Tidak Tetap (PTT)

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	LAKI-LAKI	1.080
2	PEREMPUAN	1.021
2025		**2.101**
2024		**2.676**

7.3. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

7.3.1. Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Mamuju Tengah

Aspek penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah visi dan misi yang merupakan cerminan tujuan serta proses pencapaiannya. Pada hakikatnya membentuk visi Pemerintah berarti menggali gambaran bersama mengenai masa depan yang pada akhirnya menjadi akselerator, termasuk menjadi pedoman dalam pengelolaan perencanaan, pengalokasian sumber daya, pengembangan, pengukuran dan evaluasi kinerja daerah.

Visi dari Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah Periode 2025 – 2029 adalah Mamuju Tengah daerah Agropolitan Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan dimana muara dari visi ini adalah:

1. Memperkuat Transformasi Sosial;
2. Memperkuat Transformasi Ekonomi;
3. Memperkuat Transformasi Tata Kelola;
4. Memelihara Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Stabilitas Makro Ekonomi;
5. Memelihara Ketahanan Sosial dan Ekologi;
6. Mendorong Pembangunan Kewilayahan yang merata;
7. Mendorong Pembangunan Infrastruktur; dan
8. Menjaga Kesinambungan Pembangunan dan Daya Saing Daerah.

Indonesia Emas Tahun 2045 yang menjadi Visi RPJPN Tahun 2025-2045 dengan fokus pada Transformasi Sosial, Transformasi Ekonomi dan Transformasi Tata Kelola perlu didukung dengan kontribusi pembangunan di tingkat daerah sesuai urusan dan kewenangan masing-masing. Untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045, dibutuhkan sinkronisasi dan sinergitas antara perencanaan nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Penyusunan RPJPD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2045 mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sistematis, terarah, terpadu, inovatif dan responsif, serta selaras dengan RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025-2045. Selain itu dalam penyusunan RPJPD memperhatikan RTRW sebagaimana amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 bahwa penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 berpedoman pada rencana tata ruang wilayah dan dilakukan secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RTRW atau revisi RTRW. Oleh karena itu, penyusunan RPJPD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2045 memperhatikan muatan revisi Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014-2034 dan revisi Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2017-2037.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2045 disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan strategi pembangunan jangka panjang sekaligus menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan (pemerintah, swasta dan masyarakat) dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah. RPJPD ini menjadi pedoman bagi perencanaan dan pembangunan daerah yang akan dilaksanakan untuk 20 (dua puluh) tahun kedepan. Adapun tujuan penyusunan RPJPD yakni:

a. menjadi dasar penyusunan RPJMD secara teknokratik dan menjadi pedoman dalam merumuskan visi, misi dan program bagi calon Kepala Daerah yang akan mengikuti Pilkada serentak Tahun 2024;

b. sebagai dasar atau acuan penyusunan RPJMD dilakukan dengan cara menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah;

c. sebagai tolok ukur dalam mengukur dan melakukan evaluasi kinerja setiap lima tahunan setiap Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2045.

7.3.2. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Dalam Tahun Anggaran 2025, direncanakan penerimaan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dalam APBD setelah perubahan senilai Rp634.152.870.136,48 yang bersumber dari pendapatan asli daerah senilai Rp65.241.936.620,00 pendapatan dana perimbangan/transfer senilai Rp560.571.750.605,48 serta lain-lain pendapatan daerah yang sah senilai Rp8.339.182.911,00 penerimaan tersebut akan digunakan untuk membiayai belanja daerah senilai Rp644.027.253.010,48 terdiri dari belanja operasi senilai Rp463.584.292.839,12, Belanja modal senilai Rp91.931.171.371,36 dan belanja tak terduga senilai Rp895.000.000,00. Sedangkan untuk transfer bantuan keuangan senilai Rp87.616.788.800,00

Dengan komposisi seperti tersebut di atas, maka pada Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah mengalami *defisit* anggaran senilai (Rp9.874.382.874,00). Defisit ini akan ditutupi dari pembiayaan netto yang mengalami *surplus* senilai Rp9.874.382.874,00. Sebagaimana diuaraikan pada tabel berikut:

Tabel 7. 14
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA.2025 dan 2024

Dalam Rupiah

No	Uraian	2025			2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Pendapatan	634.152.870.136,48	645.179.353.993,73	101,744	669.951.188.922,24

No	Uraian	2025			2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
2	Belanja	644.027.253.010,48	622.607.889.371,46	96,67	697.458.559.499,91
3	Surplus/ Defisit	(9.874.382.874,00)	22.571.464.622,27	(228,599)	(27.507370.577,67)
4	Pembiayaan Netto	9.874.382.874,00	9.874.382.874,43	100,00	41.381.753.452,10
5	SiLPA	0,00	32.445.847.496,70	0,00	13.874.382.874,43

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan pada Tahun Anggaran 2025 secara umum untuk pendapatan dan belanja serta pembiayaan sebagai berikut:

a. Pendapatan

Rincian pendapatan daerah dalam Perubahan APBD pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah dianggarkan senilai Rp65.241.936.620,00 dan terealisasi senilai Rp73.090.587.048,73 atau 112,03% . Menurut jenisnya Pendapatan Asli Daerah ini terdiri dari:
   a) Pajak Daerah Tahun Anggaran 2025 ini direncanakan senilai Rp23.965.016.835,00 terealisasi senilai Rp26.153.179.463,00 atau 109,13% ;
   b) Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025 ini direncanakan senilai Rp36.898.921.187,00 terealisasi senilai Rp39.359.684.325,00 atau 106,677% ;
   c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2025 ini direncanakan senilai Rp1.980.000.000,00 terealisasi senilai Rp1.162.498.116,00 atau 58,71%; dan
   d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah pada perubahan anggaran senilai Rp2.397.998.598,00 yang sampai akhir Tahun Anggaran 2025 dapat direalisasi senilai Rp6.415.225.144,73 atau 267,52%.
2. Pendapatan Transfer pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan senilai Rp560.571.750.605,48 yang sampai akhir Tahun Anggaran 2025 terealisasi senilai Rp563.803.319.346,00 atau 100,58% dengan rincian sebagai berikut:
   a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada Tahun Anggaran 2025 dianggarkan senilai Rp560.571.750.605,48 realisasi sampai akhir Tahun 2025 senilai Rp563.803.319.346,00 atau 100,57%, yang terdiri dari:
      1) Dana Bagi Hasil dianggarkan senilai Rp7.604.575.000,00 sampai akhir Tahun Anggaran 2025 dapat direalisasi senilai Rp7.575.226.600,00 atau 99,61% sampai akhir Tahun Anggaran 2025;
      2) Dana Alokasi Umum dianggarkan senilai Rp361.774.134.000,00 sampai akhir Tahun Anggaran 2025 dapat direalisasi senilai Rp368.977.743.984,00 atau 101,96% sampai akhir Tahun Anggaran 2025;
      3) Dana Alokasi Khusus Fisik dianggarkan senilai Rp32.185.425.000,00 dan terealisasi senilai Rp32.134.009.341,00 atau 99,84% sampai akhir Tahun Anggaran 2025;
      4) Dana Alokasi Khusus Non Fisik dianggarkan senilai Rp90.936.477.000,00 dan terealisasi senilai Rp88.272.478.359,00 atau 97,07% sampai akhir Tahun Anggaran 2025.
   b) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya yang dianggarkan senilai Rp50.807.179.000,00 dan terealisasi senilai Rp47.980.745.620,00 atau 94,44% pada akhir Tahun Anggaran 2025. dengan rincian sebagai berikut:
      1) Dana Desa dianggarkan senilai Rp50.807.179.000,00 dan terealisasi senilai Rp47.980.745.620,00 atau 94,44% pada akhir Tahun Anggaran 2025.
   c) Pendapatan Transfer antar Daerah yang dianggarkan senilai Rp17.263.960.605,48 dan terealisasi senilai Rp18.963.115.442,00 atau 109,84% pada akhir Tahun Anggaran 2025. dengan rincian sebagai berikut:
      1) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor dianggarkan senilai Rp0,00 dan terealisasi senilai Rp1.773.607.256,000 atau 0,00%.
      2) Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dianggarkan senilai Rp0,00 dan terealisasi senilai Rp1.629.713.687,00 atau 0,00%.
      3) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dianggarkan senilai Rp7.947.292.207,33,00 dan terealisasi senilai Rp6.460.148.495,00 atau 81,28%.
      4) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan dianggarkan senilai Rp24.287.702,15 dan terealisasi senilai Rp18.084.393,00 atau 74,45%.
      5) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok dianggarkan senilai Rp9.292.380.696,00 dan terealisasi senilai Rp9.081.561.611,00 atau 97,73%.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Tahun 2025 dianggarkan senilai Rp8.339.182.911,00 dan terealisasi senilai Rp8.285.447.599,00 atau 99,36% pada akhir Tahun Anggaran 2025. dengan rincian sebagai berikut:
    1) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) senilai Rp8.339.182.911,00 dan terealisasi senilai Rp8.285.447.599,00 atau 99,36%.

b. Belanja

Pada perubahan anggaran tahun 2025, program dan kegiatan Badan/Dinas/Kantor/BLUD Kabupaten Mamuju Tengah dianggarkan ke dalam belanja pegawai, belanja barang dan jasa,belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja modal dan belanja tidak terduga. Di dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dialokasikan dana untuk belanja daerah senilai Rp644.027.253.010,48 yang sampai akhir Tahun Anggaran 2025 dapat terealisasikan senilai Rp 622.607.889.371,46 ` atau 96,67%, dengan prioritas mendukung peningkatan profesionalisme aparatur *(personal capacity building)* Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah, peningkatan kualitas dan perluasan ketersediaan sarana dan prasarana ekonomi vital, peningkatan promosi dan kerjasama dengan pihak ketiga baik dalam negeri maupun luar negeri, peningkatan pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan pemerintahan yang peduli lingkungan, yang sesuai dengan slogan *lalla tassi'sara* membangun Mamuju Tengah, serta dengan tetap menjaga dan memelihara hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai agar tetap dapat difungsikan secara maksimal.

c. Pembiayaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, sumber-sumber pembiayaan pada Badan/Dinas/Kantor Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dalam rangka pelaksanaan *desentralisasi*, terdapat pada Pembiayaan Penerimaan Daerah.

Pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 dianggarkan senilai Rp9.874.382.874,00 dan pada akhir tahun anggaran dapat direalisasikan senilai Rp Rp9.874.382.874,43 atau 100,00% dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada Tahun 2025 dianggarkan senilai Rp4.000.000.000,00.

7.3.3. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target kinerja dalam yang tercantum dalam APBD yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah adalah sebagai berikut:

a. Masih terbatasnya tenaga teknis baik kuantitas dan kualitas SDM dalam pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya;
b. Belum samanya persepsi pelaksana tugas dalam mengoperasionalkan kegiatan;
c. Belum maksimalnya koordinasi intern di SKPD diantara pelaku yang terkait pelaksanaan kegiatan dan pengelola keuangan dan pengelola barang di SKPD;
d. *Fluktuasi* harga barang dan jasa mempengaruhi pelaksanaan kegiatan;
e. Tingkat pemahaman masyarakat dalam implementasi pembangunan belum seragam sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda;
f. Belum adanya sistem *reward* (penghargaan terhadap prestasi) dan *punishment* (sanksi) bagi aparatur pengelola keuangan;
g. Teknologi informasi belum diterapkan secara maksimal dalam penatausahaan keuangan, administrasi dan pelayanan publik; dan
h. Keterbatasan sumber dana untuk membiayai program-program pembangunan.

7.3.4. Prosedur yang telah dijalankan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah

Prosedur pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2025 mengacu pada:

a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah Berbasis Akrual bagi Pemerintah Daerah;
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; dan

d. Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 31/PER-BUP/XII/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah yang telah diubah menjadi Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah. Yang telah dilakukan perubahan menjadi Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah.

7.4. Kebijakan Akuntansi

7.4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan per Undang-Undangan wajib menyampaikan Laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah, entitas pelaporan dalam hal ini adalah Badan Keuangan yang mempunyai kewajiban menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Sedangkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah entitas akuntansi yang berkewajiban menyusun laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di SKPD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

7.4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah adalah:

a. Basis akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca.

1. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah;
2. Basis akrual untuk Laporan Operasional dan Neraca berarti bahwa Pendapatan-LO, Beban, aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada Keuangan Pemerintah Daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

b. Prinsip nilai perolehan

Aset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh Aset tersebut pada saat perolehan. Utang dicatat sebesar jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah. Penggunaan nilai perolehan lebih dapat diandalkan daripada nilai yang lain, karena nilai perolehan lebih obyektif dan dapat diverifikasi.

c. Prinsip realisasi

Ketersediaan pendapatan daerah yang telah diotorisasikan melalui APBD selama satu tahun anggaran akan digunakan untuk membiayai belanja/beban daerah dalam periode tahun anggaran dimaksud. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching-cost against revenue principle*) tidak ditekankan dalam akuntansi Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah, sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi sektor swasta.

d. Prinsip substansi mengungguli formalitas

Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

e. Prinsip periodisitas

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja Pemerintah Daerah dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama untuk pelaporan keuangan yang digunakan adalah tahunan. Namun periode semesteran juga diperkenankan.

f. Prinsip konsistensi

Perlakuan akuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh Pemerintah Daerah (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain.

Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan harus menunjukkan hasil yang lebih baik dari metode yang lama. Pengaruh dan pertimbangan atas perubahan penerapan metode ini harus diungkapkan dalam laporan keuangan.

g. Prinsip pengungkapan lengkap (*Full Disclosure Principle*)

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on face*) laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.

h. Prinsip penyajian wajar *(Fair Presentation Principle)*

Laporan keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan Pemerintah Daerah diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi serta kewajiban dan belanja tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya pembentukan dana cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah atau sengaja mencatat kewajiban dan belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan Pemerintah Daerah tidak netral dan tidak andal.

Prinsip ini akan menentukan dasar yang akan digunakan untuk mencatat pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban dan ekuitas dana. Berdasarkan prinsip ini maka akan ditentukan dalam periode mana/kapan pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban dan ekuitas dana akan dilaporkan.

7.4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah

a. Pendapatan-LO berbasis akrual diakui pada saat:
   1. Timbulnya hak atas pendapatan;

      Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perUndang-Undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan.
   2. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

      Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh Pemerintah Daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

b. Beban diakui pada saat:
   1. Timbulnya kewajiban;

      Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah Daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.
   2. Terjadinya konsumsi aset;

      Konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah.
   3. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

      Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu.

c. Pendapatan LRA

Pendapatan diakui pada saat diterima pada rekening Kas Umum Daerah.

d. Belanja

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran berupa uang persediaan, pengakuan belanja terjadi pada saat

pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh fungsi Perbendaharaan dengan diterbitkannya SP2D GU/ LPJ UP/TU.

e. Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening Kas Daerah sedangkan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas daerah.

f. Transaksi dalam mata uang asing

Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

g. Kas dan setara kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Uang tunai terdiri atas uang kertas dan logam. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) Uang Persediaan (UP) Yang Belum di dipertanggungjawabkan hingga tanggal neraca. Termasuk setara kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek yaitu kurang dari tiga bulan sejak tanggal perolehannya.

Pengakuan saat diterima atau dikeluarkan dan dinilai berdasarkan nilai nominal uang. Apabila ada kas daerah dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs pada tanggal transaksi.

Kas terdiri atas Kas di Umum Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran dan Setara kas terdiri atas simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 (tiga) bulan, investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari 3 (tiga) bulan.

h. Investasi jangka pendek

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan berisiko rendah serta dimiliki sampai dengan 12 (dua belas) bulan.

Investasi Jangka Pendek terdiri dari Deposito Berjangka tiga sampai dua belas bulan dan atau yang dapat diperpanjang secara otomatis *(revolving deposits)* serta pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek oleh pemerintah pusat maupun daerah dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Investasi jangka pendek diakui berdasarkan bukti investasi dan dicatat sebesar nilai perolehan.

Pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi salah satu kriteria:

1. Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh Pemerintah Daerah; dan
2. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

i. Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan per Undang-Undangan atau akibat lainnya yang sah.

Pengakuan piutang terjadi pada akhir periode ketika akan disusun neraca dan diakui sebesar Surat Ketetapan tentang Piutang yang belum dilunasi atau pada saat terjadinya pengakuan hak untuk menagih piutang yaitu pada saat terbitnya Surat Ketetapan tentang Piutang. Piutang dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

Agar nilai piutang sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) maka disesuaikan dengan melakukan penyisihan piutang tidak tertagih. Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dalam periode yang sama dengan periode timbulnya piutang sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih. Penyisihan piutang tidak tertagih dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan umur piutang.

j. Piutang lain-lain

Pada dasarnya tidak terdapat perbedaan definisi antara piutang dengan piutang lain-lain, hanya klasifikasinya saja yang berbeda. Piutang lain-lain terdiri dari :

1. Piutang bagian lancar penjualan angsuran;
2. Piutang ganti rugi atas kekayaan daerah;
3. Piutang hasil penjualan barang milik daerah;
4. Piutang dividen;
5. Piutang bagi hasil laba usaha perusahaan daerah; dan
6. Piutang fasilitas sosial dan fasilitas umum.

k. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berwujud:

1. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah;
2. Bahan atau perlengkapan *(supplies)* yang digunakan dalam proses produksi;
3. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
4. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan Pemerintah Daerah.

Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan inventarisasi fisik (*stock opname*).

Persediaan disajikan sebesar:

1. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
2. Biaya standar jika diperoleh dengan memproduksi sendiri; dan
3. Nilai wajar jika diperoleh dengan cara lain seperti donasi/rampasan.

Persediaan antara lain terdiri dari:

1. Persediaan alat tulis kantor;
2. Persediaan alat listrik;
3. Persediaan material/bahan;
4. Persediaan benda pos;
5. Persediaan bahan bakar; dan
6. Persediaan bahan makanan pokok.

l. Investasi jangka panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:

1. Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah; dan
2. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah Daerah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah Daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Penilaian investasi Pemerintah Daerah dilakukan dengan tiga metode, yaitu:

1. Metode biaya

   Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait. Kriterianya adalah kepemilikan kurang dari 20%;

2. Metode ekuitas

   Dengan menggunakan metode ekuitas, pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh *valuta* asing serta *revaluasi* aset tetap. Kriterianya adalah kepemilikan 20% sampai 50% atau kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan atau kepemilikan lebih dari 50%. Investasi Jangka panjang terdiri dari:

   a) Investasi Permanen yaitu: investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Terdiri dari: penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/perusahaan daerah, lembaga keuangan Negara, badan hukum milik Negara, badan internasional dan badan hukum lainnya bukan milik Negara serta investasi permanen lainnya.

b) Investasi Non-Permanen yaitu investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya. Terdiri dari pembelian Surat Utang Negara, penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, investasi non permanen lainnya.

Investasi non permanen dalam bentuk dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*). Penyisihan investasi non permanen dana bergulir yang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur investasi non permanen dana bergulir.

m. Aset tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:

1. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
3. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
4. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Selain itu juga mempunyai nilai yang material sesuai nilai minimum kapitalisasi sebagaimana diatur dalam kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Mamuju tengah. Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi Pemerintah Daerah, seperti bahan *(materials)* dan perlengkapan *(supplies)*.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, ditambah pengeluaran-pengeluaran lainnya yang dapat diatribusikan secara langsung ke dalam aset tersebut ke kondisi siap untuk digunakan.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan meliputi:

1. Tanah;
2. Peralatan dan mesin, yang antara lain terdiri atas:
   a) alat-alat besar;
   b) alat-alat angkutan;
   c) alat-alat bengkel dan alat ukur;
   d) alat-alat pertanian/peternakan;
   e) alat-alat kantor dan rumah tangga;
   f) alat studio dan alat komunikasi;
   g) alat-alat kedokteran;
   h) alat-alat laboratorium; dan
   i) alat keamanan.
3. Gedung dan bangunan, yang antara lain terdiri atas:
   a) bangunan gedung;
   b) bangunan monumen.
4. Jalan, irigasi dan jaringan, yang antara lain terdiri atas:
   a) jalan dan jembatan;
   b) bangunan air/irigasi;
   c) instalasi; dan
   d) jaringan.
5. Aset tetap lainnya, yang antara lain terdiri atas:
   a) buku dan perpustakaan;
   b) barang bercorak kesenian/kebudayaan; dan
   c) hewan/ternak dan tumbuhan.
6. Konstruksi dalam pengerjaan.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang

bersangkutan. Kapitalisasi aset tetap ditetapkan dalam kebijakan akuntansi ini berupa suatu batasan jumlah biaya *(capitalization thresholds)* tertentu untuk dapat digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak.

Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa *(service potential)* yang akan mengalir ke Pemerintah Daerah. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dan diinvestasikan dalam Aset Tetap.

Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus *(straight line method)*. Selain tanah, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Penghitungan dan pencatatan penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan asumsi Tanpa Nilai Sisa; Masa Manfaat (umur ekonomis) Aset Tetap diklasifikasikan sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Bupati Mamuju Tengah tentang Kebijakan Akuntansi.

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Aset tetap secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai nilai tercatatnya.

n. Dana cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk beberapa tahun anggaran menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan harus diatur dengan peraturan daerah, sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain. Biasanya digunakan untuk pembangunan aset, misalnya rumah sakit, pasar induk, atau gedung olah raga.

o. Aset lainnya

Aset lainnya adalah aset Pemerintah Daerah yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya terdiri atas:

1. Tagihan piutang penjualan angsuran

Menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset Pemerintah Daerah secara langsung kepada pegawai Pemerintah Daerah/Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Contoh: tagihan piutang penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.

Tagihan piutang penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai Pemerintah Daerah/Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah ke kas umum daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

2. Tagihan tuntutan ganti kerugian Daerah

Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Negara/daerah sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Tuntutan perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah. Tuntutan ganti rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh pemerintah/daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.

3. Properti Investasi

Pemerintah daerah dapat memiliki properti investasi yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/ atau untuk peningkatan nilai dengan keadaan sebagai berikut:

a) Pemerintah daerah mengelola portofolio properti berdasarkan basis komersial; atau
b) Pemerintah daerah memiliki properti untuk disewakan atau untuk mendapatkan peningkatan nilai, dan menggunakan hasil yang diperoleh tersebut untuk membiayai kegiatannya.

Properti investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar tidak bergantung pada aset lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah. Berikut ini adalah aset yang merupakan properti investasi dan termasuk dalam ruang lingkup kebijakan akuntansi ini:

a) Tanah, yang dikuasai dan/atau dimiliki dalam jangka panjang dengan tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai dan bukan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek;
b) Tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan penggunaannya di masa depan. Jika pemerintah daerah belum menentukan penggunaan tanah sebagai properti yang digunakan sendiri atau akan dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada pemerintah yang lain dalam jangka pendek, tanah tersebut diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka kenaikan nilai;
c) Bangunan yang dimiliki oleh pemerintah daerah (atau dikuasai oleh pemerintah daerah melalui sewa pembiayaan) dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
d) Bangunan yang belum terpakai yang dikuasai dan/ atau dimiliki tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
e) Properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi.

Sedangkan aset yang bukan merupakan properti investasi dan dengan demikian tidak termasuk dalam ruang lingkup kebijakan akuntansi ini:

a) Properti yang dimaksudkan untuk dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau sedang dalam proses pembangunan atau pengembangan untuk dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, misalnya properti yang diperoleh secara eksklusif dengan maksud diserahkan dalam waktu dekat atau untuk pengembangan dan diserahkan kembali;
b) Properti yang masih dalam proses pembangunan atau pengembangan atas nama pihak ketiga;
c) Properti yang digunakan sendiri, termasuk di antaranya properti yang dikuasai untuk digunakan di masa depan sebagai properti yang digunakan sendiri, properti yang dimiliki untuk pengembangan di masa depan dan penggunaan selanjutnya sebagai properti yang digunakan sendiri, dan properti yang digunakan sendiri yang menunggu untuk dijual;
d) Properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa pembiayaan;
e) Properti yang dimiliki dalam rangka program bantuan sosial, seperti penyediaan perumahan, rumah susun, dan properti lainnya, bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui penetapan tarif sewa di bawah harga pasar.
f) Properti yang dimiliki untuk tujuan strategis yang dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi yang mengatur aset tetap
g) Properti yang tidak ditujukan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan peningkatan nilai, namun sesekali disewakan kepada pihak lain.

4. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Bentuk kemitraan antara lain berupa:

a) Bangun, Kelola/Guna, Serah adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset Pemerintah Daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkannya kembali dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada Pemerintah Daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak. Dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset Bangun, Kelola/Guna, Serah tersebut. Aset yang berada dalam Bangun, Kelola/Guna, Serah ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.
b) Bangun, Serah, Kelola/Guna adalah pemanfaatan aset Pemerintah Daerah. Pemerintah daerah dapat memiliki properti investasi yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/ atau untuk peningkatan nilai dengan keadaan sebagai berikut:

c) Pemerintah daerah mengelola portofolio properti berdasarkan basis komersial; atau oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada Pemerintah Daerah untuk dikelola/digunakan sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut oleh pihak ketiga/investor tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati. Bangun, Serah, Kelola/Guna dicatat sebesar nilai perolehan aset yang dibangun, yaitu sebesar nilai aset yang dipisahkan dari aset tetap ditambah dengan jumlah aset yang dibangun oleh pihak ketiga/investor sesuai dengan perjanjian kerjasama.

d) Kerjasama Operasi (KSO) adalah perikatan antara Pemerintah Daerah yang menyediakan aset daerah dengan pihak ketiga menanamkan modalnya, selanjutnya kedua belah pihak secara bersama-sama atau bergantian mengelola manajemen dan proses operasionalnya sesuai dengan kesepakatannya. Pengakuan dan penilaian berdasarkan harga perolehan pada saat bangunan atau aset lainnya tersebut selesai dibangun.

p. Aset tidak berwujud

Aset tidak berwujud adalah aset yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. contoh: hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh Pemerintah Daerah.

Aset tidak berwujud meliputi:

1. *Software* komputer yang dipergunakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun;
2. Lisensi dan *franchise*;
3. Hak cipta (*copyright*), paten dan hak lainnya;
4. Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang; dan
5. Aset lain-lain.

Pos aset lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah.

Amortisasi adalah pengurangan nilai aset lainnya secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi. Pengurangan ini dilakukan dengan mendebit akun "Beban Amortisasi" terhadap akun "Akumulasi Amortisasi". Aset Lainnya dilakukan amortisasi, kecuali atas Aset Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas.

Pengakuan amortisasi aset lainnya dilakukan pada saat akhir tahun saat akan dilakukan penyusunan laporan keuangan atau pada saat aset tersebut akan dipindahtangankan kepemilikannya. Pengukuran jumlah amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus.

q. Kewajiban jangka pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu, yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi terdiri dari:

1. Utang perhitungan fihak ketiga (PFK)

   Utang PFK merupakan kewajiban yang timbul akibat pemerintah belum menyetor kepada pihak lain atas pungutan/potongan PFK dari SP2D atau dokumen lain yang dipersamakan.

   Nilai yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain sampai dengan tanggal neraca. Terdiri dari: Utang Taspen, Utang Askes, Utang PPh Pusat, Utang PPN Pusat, Utang Taperum, Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya.

2. Utang bunga

   Utang bunga timbul karena Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk membayar beban bunga atas utang. Nilai yang dicantumkan adalah sebesar biaya bunga yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh Pemerintah Daerah.

   Utang bunga terdiri dari: Utang Bunga kepada Pemerintah Pusat, Utang Bunga kepada Daerah Otonom Lainnya, Utang Bunga kepada BUMN/BUMD, Utang Bunga kepada Bank/Lembaga Keuangan, Utang Bunga Dalam Negeri Lainnya, Utang Bunga Luar Negeri.

3. Bagian lancar utang jangka panjang

   Bagian lancar utang jangka panjang merupakan bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.

Pengakuan dan penilaian pada saat reklasifikasi dalam periode berjalan atau berdasarkan jumlah pembayaran bagian lancar utang jangka panjang yang akan dibayarkan di satu periode akuntansi mendatang. Terdiri dari Utang Bank, Utang Obligasi, Utang Pemerintah Pusat, Utang Pemerintah Provinsi, Utang Pemerintah Kabupaten/Kota.

4. Pendapatan diterima dimuka

   Pendapatan diterima dimuka merupakan pendapatan yang sudah diterima kasnya namun pendapatan tersebut belum menjadi hak pada periode yang bersangkutan. Pengakuan dan penilaian pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah penerimaan kas yang telah diakui dalam periode berjalan. Terdiri dari setoran kelebihan pembayaran dari pihak ketiga, uang muka penjualan produk Pemerintah Daerah dari pihak III, uang muka lelang penjualan aset daerah.

5. Utang jangka pendek lainnya

   Kewajiban Lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut.

r. Kewajiban jangka panjang

Kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

Kewajiban dicatat senilai nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Kewajiban Jangka Panjang terdiri dari:

1. Utang Dalam Negeri: Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan, Utang Dalam Negeri Obligasi, Utang Pemerintah Pusat, Utang Pemerintah Provinsi, Utang Pemerintah Kabupaten/Kota.
2. Utang Luar Negeri: Utang Luar Negeri Sektor Perbankan.

s. Koreksi kesalahan, Perubahan kebijakan akuntansi, dan Peristiwa luar biasa

Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.

Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.

Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

1. Kesalahan yang tidak berulang;
2. Kesalahan yang berulang dan sistemik.

Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

1. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
2. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.

Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

Terhadap setiap kesalahan harus dilakukan koreksi segera setelah diketahui. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan atau akun belanja dari periode yang bersangkutan.

Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, serta mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain, akun aset, serta akun ekuitas yang terkait.

Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain.

Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas. Akibat koreksi kesalahan tersebut selanjutnya diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan dianggap sudah diterbitkan apabila sudah ditetapkan dengan Undang-Undang atau peraturan daerah.

Contoh koreksi kesalahan belanja yang menambah saldo kas yaitu pengembalian belanja pegawai karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi menambah saldo kas dan pendapatan lain-lain. Contoh koreksi kesalahan belanja yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi belanja pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi mengurangi akun ekuitas dan mengurangi saldo kas. Terhadap koreksi kesalahan yang berkaitan dengan belanja yang menghasilkan aset, disamping mengoreksi saldo kas dan pendapatan lain-lain juga perlu dilakukan koreksi terhadap aset yang bersangkutan dan pos ekuitas. Sebagai contoh, belanja aset tetap yang di-*mark up* dan setelah dilakukan pemeriksaan, kelebihan belanja tersebut harus dikembalikan, maka koreksi yang harus dilakukan adalah dengan menambah kas dan pendapatan lain-lain, serta mengurangi pos aset tetap dan pos ekuitas.

Koreksi kesalahan pendapatan dapat dibagi dua yaitu yang menambah saldo kas dan yang mengurangi saldo kas. Contoh koreksi kesalahan pendapatan yang menambah saldo kas yaitu terdapat transaksi penyetoran bagian laba perusahaan daerah yang belum dilaporkan. Dalam hal demikian, koreksi yang perlu dilakukan adalah menambah saldo kas dan ekuitas. Contoh koreksi kesalahan pendapatan yang mengurangi saldo kas yaitu kesalahan pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer. Dalam hal demikian, koreksi yang perlu dilakukan adalah mengurangi saldo kas dan ekuitas.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan. Contoh kesalahan yang tidak mempengaruhi posisi kas adalah belanja untuk membeli perabot kantor (aset tetap) dilaporkan sebagai belanja pakai habis kantor. Dalam hal demikian, koreksi yang perlu dilakukan. Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi. Akibat kumulatif dari koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode- periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam baris tersendiri pada Laporan Arus Kas tahun berjalan.

t. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas. Perubahan kebijakan akuntansi dan pengaruhnya harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam hal metode prospektif dalam kebijakan akuntansi berarti perubahan diterapkan **mulai periode berjalan dan periode berikutnya**, tanpa mengubah laporan keuangan periode sebelumnya.

Dalam praktik akuntansi, metode prospektif biasanya digunakan untuk:

1. Perubahan estimasi akuntansi
   Contoh:
   a. perubahan umur manfaat aset tetap,
   b. perubahan estimasi piutang tak tertagih, dan
   c. perubahan nilai residu aset.
2. Beberapa perubahan kebijakan akuntansi tertentu jika standar tidak memungkinkan penerapan retrospektif.

Ciri-ciri metode prospektif

1. Tidak melakukan restatement laporan keuangan tahun sebelumnya.
2. Dampak perubahan diakui pada:
   a. periode saat perubahan terjadi, dan/atau
   b. periode masa depan.
3. Saldo laba awal tidak disesuaikan.

u. Peristiwa Luar Biasa

Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Di dalam aktivitas biasa entitas Pemerintah Daerah termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang. Dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa-peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya.

Peristiwa yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas adalah kejadian yang sukar diantisipasi dan oleh karena itu tidak dicerminkan di dalam anggaran. Suatu kejadian atau transaksi yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas merupakan peristiwa luar biasa bagi suatu entitas atau tingkatan pemerintah tertentu, tetapi peristiwa yang sama tidak tergolong luar biasa untuk entitas atau tingkatan pemerintah yang lain.

Dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian dimaksud secara tunggal menyebabkan penyerapan sebagian besar anggaran belanja tak tersangka atau dana darurat sehingga memerlukan perubahan/pergeseran anggaran secara mendasar.Anggaran belanja tak terduga atau anggaran belanja lain-lain yang ditujukan untuk keperluan darurat biasanya ditetapkan besarnya berdasarkan perkiraan dengan memanfaatkan informasi kejadian yang bersifat darurat pada tahun-tahun lalu. Apabila selama tahun anggaran berjalan terjadi peristiwa darurat, bencana, dan sebagainya yang menyebabkan penyerapan dana dari mata anggaran ini, peristiwa tersebut tidak dengan sendirinya termasuk peristiwa luar biasa, terutama bila peristiwa tersebut tidak sampai menyerap porsi yang signifikan dari anggaran yang tersedia. Tetapi apabila peristiwa tersebut secara tunggal harus menyerap 50% (lima puluh persen) atau lebih anggaran tahunan, maka peristiwa tersebut layak digolongkan sebagai peristiwa luar biasa. Sebagai petunjuk, akibat penyerapan dana yang besar itu, entitas memerlukan perubahan atau pergeseran anggaran guna membiayai peristiwa luar biasa dimaksud atau peristiwa lain yang seharusnya dibiayai dengan mata anggaran belanja tak tersangka atau anggaran lain-lain untuk kebutuhan darurat.

Dampak yang signifikan terhadap posisi aset/kewajiban karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian atau transaksi dimaksud menyebabkan perubahan yang mendasar dalam keberadaan atau nilai aset/kewajiban entitas.

Peristiwa luar biasa harus memenuhi seluruh persyaratan berikut:

1. Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas;
2. Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang;
3. Berada di luar kendali atau pengaruh entitas; dan
4. Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.

Hakikat, jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh peristiwa luar biasa harus diungkapkan secara terpisah dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

7.4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dan Basis Kas untuk Pendapatan LRA dan Belanja.

a. Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Kas Daerah dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Kas Daerah. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.
b. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh Kas Daerah; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Kas Daerah.

c. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh Kas Daerah.

7.5. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode, agar informasi yang dijadikan dapat dipahami atau untuk memudahkan pembaca perlu diberikan penjelasan untuk masing-masing pos pada laporan keuangan, sejalan dengan maksud tersebut tahapan penjelasan pos-pos Laporan Keuangan ini akan diawali dengan penjelasan Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas.

7.5.1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran merupakan komponen Laporan Keuangan yang menyajikan Pendapatan dan sumber Pendapatan, Belanja, Transfer, Surplus/Defisit dan Pembiayaan, di sisi lain Laporan Realisasi Anggaran mencerminkan komparasi antara anggaran dan realisasinya sehingga tingkat serapan anggaran pada kegiatan normal entitas dapat diukur secara nyata.

Laporan Realisasi Anggaran disajikan dengan menggunakan basis kas yang mengakui semua transaksi ketika terjadi penerimaan dan pengeluaran kas. Dalam penjelasan LRA ini akan disajikan sesuai dengan Struktur APBD yang meliputi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

a. Pendapatan

Pendapatan daerah-LRA adalah semua penerimaan pada Kas Umum Daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali. Target pendapatan merupakan batas minimal jumlah pendapatan yang dianggarkan harus diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah pada Tahun Anggaran tertentu. Pendapatan daerah terdiri dari tiga komponen yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah-LRA meliputi pendapatan Pajak Daerah-LRA, Retribusi Daerah-LRA, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LRA;
2. Pendapatan Transfer-LRA yang meliputi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari DBH, DAU, DAK, Dana Desa-LRA, dan Transfer Pemerintah Provinsi berupa Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LRA; dan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah-LRA yang meliputi Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP.

Pendapatan dianggarkan pada Tahun Anggaran 2025 senilai Rp634.152.870.136,48 den terealisasi senilai Rp645.179.353.993,73 atau mencapai 101,74%. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp24.771.834.928,51 atau 3,70% dari realisasi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp669.951.188.922,24 dengan rincian pada tabel berikutt:

Tabel 7. 15
Rincian Pendapatan

Dalam Rupiah

No	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Pendapatan Asli Daerah	73.090.587.048,73	52.073.310.252,24	21.017.276.796,49
2	Pendapatan Transfer	563.803.319.346,00	610.185.349.767,00	(46.382.030.421,00)
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	8.285.447.599,00	7.692.528.903,00	592.918.696,00
Jumlah		**645.179.353.993,73**	**669.951.188.922,24**	**(24.771.834.928,51)**

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) –LRA

Pendapatan Asli Daerah dianggarkan pada Tahun Anggaran 2025 senilai Rp65.241.936.620,00 dan terealisasi senilai Rp73.090.587.048,73 atau mencapai 112,03%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp21.017.276.796,49 atau 40,36% dari realisasi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp52.073.310.252,24 dengan rinican pada tabel berikut:

Tabel 7. 16
Rincian Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025

Dalam Rupiah

No	Uraian	2025		%	Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi		
1	Pendapatan hasil Pajak Daerah – LRA	23.965.016.835,00	26.153.179.463,00	109,13	12.064.921.118,00
2	Pendapatan Retribusi Daerah – LRA	36.898.921.187,00	39.359.684.325,00	106,67	14.041.286.339,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.980.000.000,00	1.162.498.116,00	58,71	729.061.014,00
4	Lain-lain PAD Yang Sah – LRA	2.397.998.598,00	6.415.225.144,73	267,52	25.238.041.781,24
Jumlah		**65.241.936.620,00**	73.090.587.048,73	**112,03**	**52.073.310.252,24**

a) Pendapatan Pajak Daerah – LRA

Pendapatan Pajak Daerah dianggarkan pada Tahun Anggaran 2025 senilai Rp23.965.016.835,00 dan terealisasi senilai Rp26.153.179.463,00 atau mencapai 109,13% mengalami kenaikan senilai Rp14.088.258.345,00 atau 116,77% dari realisasi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp12.064.921.118,00 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 7. 17
Rincian Pendapatan Pajak – LRA

Dalam Rupiah

Uraian	2025		%	Realisasi 2024
	Anggaran	Realisasi		
Pajak Hotel	148.500.000,00	27.143.500,00	18,28	32.673.000,00
Pajak Restoran	1.100.000.000,00	1.030.761.567,00	93,71	1.006.742.551,00
Pajak Hiburan	0,00	2.200.000,00	0,00	500.000,00
Pajak Reklame	500.000.000,00	503.133.986,00	100,63	302.845.126,00
Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00	0,00	6.225.662.570,00
Pajak Air Tanah	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	3.000.000,00
Pajak Sarang Burung Walet	0,00	200.000,00	0,00	0,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	700.000.000,00	658.011.971,00	94,00	658.879.733,00
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	4.697.000.000,00	3.434.749.355,00	73,13	3.175.091.213,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.064.831.898,00	214.761.375,00	20,17	659.526.925,00
Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	5.200.000.000,00	6.202.638.409,00	119,28	0,00
Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	5.269.399.019,00	6.343.939.900,00	120,39	0,00
Opsen bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	5.282.285.918,00	7.732.639.400,00	146,39	0,00
Jumlah	**23.965.016.835,00**	**26.153.179.463,00**	**109,13**	**12.064.921.118,00**

Pada tabel 7.17 diatas terdapat penurunan yang sangat signifikan pada realisasi Pajak Penerangan Jalan (PPJ), dimana pada Tahun 2024 terealisasi senilai Rp6.225.662.570,00, sedangkan pada Tahun 2025 belum terdapat realisasi atau tercatat senilai Rp0,00. Kondisi ini disebabkan adanya perubahan mekanisme atau perubahan nomenklatur ketentuan pajak daerah terbaru. Selanjutnya, terdapat selisih yang cukup signifikan antara anggaran dan realisasi pada Pajak Hotel senilai 18,28%. Rendahnya realisasi Pajak Hotel di Kabupaten Mamuju Tengah dipengaruhi oleh masih terbatasnya tingkat hunian hotel dan aktivitas jasa penginapan yang belum sepenuhnya pulih atau berkembang sesuai target yang ditetapkan. Karakteristik daerah yang belum memiliki tingkat kunjungan wisata maupun aktivitas perjalanan dinas yang tinggi

turut mempengaruhi penerimaan pajak hotel. Selain itu, kepatuhan wajib pajak hotel dalam pelaporan dan pembayaran pajak juga masih menjadi tantangan dalam optimalisasi penerimaan daerah. Pada komponen Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), terdapat selisih antara anggaran dan realisasi senilai 20,17%. Rendahnya realisasi BPHTB dipengaruhi oleh menurunnya aktivitas transaksi jual beli tanah dan bangunan di masyarakat dibandingkan dengan proyeksi awal anggaran. Selain itu, nilai transaksi objek pajak yang cenderung lebih rendah, proses administrasi peralihan hak yang belum seluruhnya terselesaikan pada tahun berjalan, serta kondisi perekonomian masyarakat yang mempengaruhi minat investasi dan transaksi properti turut berdampak terhadap capaian realisasi BPHTB di Kabupaten Mamuju Tengah.

Dengan kondisi tersebut, Pemerintah Daerah perlu melakukan evaluasi terhadap penetapan target pendapatan agar lebih realistis sesuai potensi riil daerah, meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait dalam pemungutan pajak, serta memperkuat pengawasan dan optimalisasi kepatuhan wajib pajak guna meningkatkan realisasi pendapatan daerah pada tahun berikutnya.

b) Pendapatan Retribusi Daerah -LRA

Pendapatan Retribusi Daerah dianggarkan pada Tahun Anggaran 2025 senilai Rp36.898.921.187,00 dan terealisasi senilai Rp39.359.684.325,00 atau mencapai 106,67%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp25.318.397.986,00 atau 180,31% dari realisasi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp14.041.286.339,00 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 7. 18
Rincian Retribusi Daerah

Dalam Rupiah

Uraian	2025		%	Realisasi 2024
	Anggaran	Realisasi		
Retribusi Pelayanan Kesehatan	27.747.632.937,00	32.469.653.121,00	117,02	7.169.986.069,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	0,00	0,00	0,00	221.640.000,00
Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	190.000.000,00	100.000.000,00	52,63	187.700.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar	0,00	0,00	0,00	132.250.000,00
Retribusi Pelayanan Kebersihan	256.800.000,00	202.115.000,00	78,71	0,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	7.524.488.250,00	6.027.688.000,00	80,11	5.818.791.000,00
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	160.000.000,00	142.000.000,00	88,75	0,00
Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi,Pariwisata dan Olah Raga	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	0,00	75.060.000,00	0,00	41.105.000,00
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.000.000.000,00	343.168.204,00	34,32	469.814.270,00
Jumlah	**36.898.921.187,00**	**39.359.684.325,00**	**106,67**	**14.041.286.339,00**

Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Tahun Anggaran 2024 senilai Rp7.169.986.069,00 mengalami peningkatan signifikan pada Tahun Anggaran 2025 menjadi 32.469.653.121,00. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh:

1. **Reklasifikasi Pendapatan BLUD**

   Pendapatan layanan kesehatan yang sebelumnya dicatat pada akun Lain-lain PAD yang Sah – Pendapatan BLUD pada tahun 2024, pada tahun 2025 dicatat sebagai bagian dari Retribusi Pelayanan Kesehatan sesuai penyesuaian nomenklatur dan kebijakan pengelolaan pendapatan daerah.

2. **Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan**

   Pemerintah Daerah melakukan peningkatan tata kelola pelayanan kesehatan, optimalisasi penagihan, serta peningkatan cakupan layanan pada fasilitas kesehatan daerah sehingga berdampak pada meningkatnya penerimaan retribusi.

3. **Peningkatan Aktivitas dan Pemanfaatan Layanan Kesehatan**

Bertambahnya jumlah kunjungan masyarakat pada fasilitas pelayanan kesehatan daerah, termasuk pelayanan rawat jalan, rawat inap, laboratorium, dan layanan penunjang lainnya, turut meningkatkan realisasi pendapatan retribusi kesehatan.

Dengan kondisi tersebut, kenaikan signifikan pada akun Retribusi Pelayanan Kesehatan tahun 2025 pada dasarnya merupakan dampak kombinasi antara perubahan klasifikasi akun pendapatan dan peningkatan kinerja pelayanan kesehatan daerah.

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dianggarkan pada Tahun Anggaran 2025 senilai Rp1.980.000.000,00 dan terealisasi senilai Rp1.162.498.116,00 atau 58,71%. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp817.501.884,00 atau 112,13% dari realisasi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp729.061.014,00. Ini merupakan Pembagian laba bagi Pemerintah daerah dari Penyertaan Modal kepada PT. Bank Sulselbar.

d) Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dianggarkan pada Tahun Anggaran 2025 senilai Rp2.397.998.598,00 dan terealisasi senilai Rp6.415.225.144,73 atau mencapai 267,52%. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp18.821.697.236,51 atau 74,58% dari realisasi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp25.238.041.781,24 dengan rincian pada tabel sebagai berikut:

Tabel 7. 19
Rincian Lain-Lain PAD yang Sah

Dalam Rupiah

Uraian	2025		%	Realisasi 2024
	Anggaran	Realisasi		
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	350.000.000,00	819.410.000,00	234,12	230.337.498,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	173.000.000,00	44.865.000,00	25,93	57.025.000,00
Jasa Giro	700.000.000,00	1.124.482.266,00	160,64	1.197.050.360,00
Pendapatan Bunga	0,00	221.797.197,00	0,00	6.798.593,00
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	409.398.100,00	3.193.667.113,45	780,09	2.340.745.761,96
Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	59.529.871,00	0,00	0,00
Pendapatan BLUD	0,00	0,00	0,00	20.027.748.456,86
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	765.600.498,00	951.473.697,28	124,28	1.378.336.111,42
Jumlah	**2.397.998.598,00**	**6.415.225.144,73**	**267,52**	**25.238.041.781,24**

Pada Tahun Anggaran 2024, akun Lain-lain PAD yang Sah – Pendapatan BLUD terealisasi senilai Rp20.027.748.456,86, sedangkan pada Tahun Anggaran 2025 menjadi Rp0,00. Perubahan tersebut terjadi karena adanya penyesuaian klasifikasi penganggaran dan pencatatan pendapatan sektor kesehatan sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah dan penerapan nomenklatur akun terbaru. Pendapatan yang sebelumnya dicatat pada kelompok Lain-lain PAD yang Sah – Pendapatan BLUD pada tahun 2025 dialihkan dan dicatat ke dalam kelompok Retribusi Daerah, khususnya pada objek Retribusi Pelayanan Kesehatan. Dengan demikian, nihilnya saldo Pendapatan BLUD pada tahun 2025 bukan disebabkan oleh tidak adanya penerimaan layanan BLUD, melainkan karena perubahan mekanisme penganggaran dan reklasifikasi akun pendapatan.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer adalah mekanisme bantuan dari Pemerintah untuk menutupi keterbatasan sumber dana. Pendapatan Transfer Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025 yang bersumber dari Dana Perimbangan Pemerintah Pusat berupa penerimaan Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-lainnya yang merupakan dana penyesuaian.

Pendapatan Transfer dianggarkan pada Tahun Anggaran 2025 senilai Rp560.571.750.605,48 dan teralisasi senilai Rp563.803.319.346,00 atau mencapai 100,58%. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp46.382.030.421,00 atau 7,60% dari realisasi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp610.185.349.767,00 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 7. 20
Rincian Pendapatan Transfer

Dalam Rupiah

Uraian	2025		%	Realisasi 2024
	Anggaran	Realisasi		
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LRA	492.500.611.000,00	496.859.458.284,00	100,89	532.310.045.129,00
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	50.807.179.000,00	47.980.745.620,00	94,44	51.461.215.000,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah – LRA	17.263.960.605,48	18.963.115.442,00	109,84	26.414.089.638,00
Jumlah	**560.571.750.605,48**	**563.803.319.346,00**	**100,58**	**610.185.349.767,00**

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2025 senilai Rp563.803.319.346,00 terdiri dari:

a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dianggarkan pada Tahun Anggaran 2025 senilai Rp492.500.611.000,00 dan terealisasi senilai Rp496.859.458.284,00 atau mencapai 100,89%. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp35.450.586.845,00 atau 6,66% dari realisasi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp532.310.045.129,00 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 7. 21
Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA

Dalam Rupiah

Uraian	2025		%	Realisasi 2024
	Anggaran	Realisasi		
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	7.604.575.000,00	7.575.226.600,00	99,61	12.479.058.000,00
DAU	361.774.134.000,00	368.877.743.984,00	101,96	369.183.892.749,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik – LRA	32.185.425.000,00	32.134.009.341,00	99,84	82.048.913.591,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	90.936.477.000,00	88.272.478.359,00	97,07	68.598.180.789,00
Jumlah	**492.500.611.000,00**	**496.859.458.284,00**	**100,89**	**532.310.045.129,00**

1) Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil dianggarkan pada Tahun Anggaran 2025 senilai Rp7.604.575.000,00 dan terealisasi senilai Rp7.575.226.600,00 atau mencapai 99,61%. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp4.903.831.400,00 atau 39,30% dari realisasi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp12.479.058.000,00 dikarenakan adanya pengurangan transfer DBH Sawit.

2) Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA

Dana Alokasi Umum dianggarkan pada Tahun Anggaran 2025 senilai Rp361.774.134.000,00 dan terealisasi senilai Rp368.877.743.984,00 atau mencapai 101,96%. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp306.148.765,00 atau 0,08% dari realisasi Tahun Angaran 2024 senilai Rp369.183.892.749,00 dengan rincian sebagai berikut:

(a) Dana Alokasi Umum Tidak Ditentukan Penggunaannya dengan anggaran per 31 Desember 2025 senilai Rp299.616.375.000,00 dan terealisasi senilai Rp307.875.671.000,00 atau 102,76%.
(b) Dana Alokasi Umum Penggajian Formasi PPPK dengan anggaran per 31 Desember 2025 senilai Rp5.227.060.000,00 dan terealisasi senilai Rp4.071.373.984 atau 77,89%.
(c) Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan dengan anggaran per 31 Desember 2025 senilai Rp33.833.611.000,00 dan terealisasi senilai Rp33.833.611.000,00 atau 100,00%.
(d) Dana Alokasi Umum Bidang Kesehatan dengan anggaran per 31 Desember 2025 senilai Rp23.097.088.000,00 dan terealisasi senilai Rp23.097.088.000,000 atau 100,00%.

3) **Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik - LRA**

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dianggarkan pada Tahun Anggaran 2025 senilai Rp32.185.425.000,00 dan terealisasi senilai Rp32.134.009.341,00 atau mencapai 99,84%. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp49.914.904.250,00 atau 60,84% dari realisasi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp82.048.913.591,00. Dengan rincian sebagai berikut:

(a) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD dengan anggaran per 31 Desember 2025 senilai Rp349.970.000,00 dan terealisasi senilai Rp349.758.336,00 atau 99,94%.
(b) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD dengan anggaran per 31 Desember 2025 senilai Rp241.716.000,00 dan terealisasi senilai Rp238.845.825,00 atau 98,81%.
(c) DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan dengan anggaran per 31 Desember 2025 senilai Rp5.273.805.000,00 dan terealisasi senilai Rp5.256.556.300,00 atau 99,67%.
(d) DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan dengan anggaran per 31 Desember 2025 senilai Rp3.578.375.000,00 dan terealisasi senilai Rp3.578.375.000,00 atau 100,00%.
(e) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan dengan anggaran per 31 Desember 2025 senilai Rp22.741.559.000,00 dan terealisasi senilai Rp22.710.473.880,00 atau 99,86%.

4) **Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LRA**

Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dianggarkan pada Tahun Anggaran 2025 senilai Rp90.936.477.000,00 dan terealisasi senilai Rp88.272.478.359,00 atau mencapai 97,07%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp19.674.297.570,00 atau 28,68% dari realisasi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp68.598.180.789,00. Dengan rincian sebagai berikut:

(a) DAK Non Fisik-BOS Reguler dengan anggaran per 31 Desember 2025 senilai Rp18.578.465.000,00 dan terealisasi senilai Rp18.565.799.600,00 atau 99,93%.
(b) DAK Non Fisik-BOS Kinerja dengan anggaran per 31 Desember 2025 senilai Rp1.112.250.000,00 dan terealisasi senilai Rp1.112.250.000,00 atau 100,00%.
(c) DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan dengan anggaran per 31 Desember 2025 senilai Rp2.985.100.000,00 dan terealisasi senilai Rp2.985.100.000,00 atau 100,00%.
(d) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK dengan anggaran per 31 Desember 2025 senilai Rp8.247.714.000,00 dan terealisasi senilai Rp7.927.725.538,00 atau 96,12%.
(e) DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan dengan anggaran per 31 Desember 2025 senilai Rp193.185.000,00 dan terealisasi senilai Rp193.185.000,00 atau 100,00%.
(f) DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB dengan anggaran per 31 Desember 2025 senilai Rp2.549.000.000,00 dan terealisasi senilai Rp2.522.130.600,00 atau 98,95%.
(g) DAK Non Fisik-Dana ketahanan Pangan dan Pertanian dengan anggaran per 31 Desember 2025 senilai Rp149.112.000,00 dan terealisasi senilai Rp149.112.000,00 atau 100,00%.
(h) DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Paud Reguler dengan anggaran per 31 Desember 2025 senilai Rp2.704.420.000,00 dan terealisasi senilai Rp2.704.420.000,00 atau 100,00%.
(i) DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Paud Kinerja dengan anggaran per 31 Desember senilai 2025 Rp15.000.000,00 dan terealisasi senilai Rp15.000.000,00 atau 100,00%.
(j) DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja dengan anggaran per 31 Desember 2025 senilai Rp90.000.000,00 dan terealisasi senilai Rp90.000.000,00 atau 100,00%.
(k) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas dengan anggaran per 31 Desember 2025 senilai Rp7.534.697.000,00 dan terealisasi senilai Rp6.067.514.821,00 atau 80,53%.
(l) DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Profesi Guru dengan anggaran per 31 Desember 2025 senilai Rp44.141.591.000,00 dan terealisasi senilai Rp43.721.462.000,00 atau 99,05%.
(m) DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tambahan Penghasilan Guru dengan anggaran per 31 Desember 2025 senilai Rp927.750.000,00 dan terealisasi senilai Rp358.000.000,00 atau 38,59%.
(n) DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tambahan Khusus Guru dengan anggaran per 31 Desember 2025 senilai Rp1.708.193.000,00 dan terealisasi senilai Rp1.860.778.800,00 atau 108,93%.

b) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya dianggarkan pada Tahun Angaran 2025 senilai Rp50.807.179.000,00 dan terealisasi senilai Rp 47.980.745.620,00 atau mencapai 94,44%. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp3.480.469.380,00 atau 6,76% dari realisasi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp51.461.215.000,00. Dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 7. 22
Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya

Dalam Rupiah

Uraian	2025		%	Realisasi 2024
	Anggaran	Realisasi		
Dana Desa – LRA	50.807.179.000,00	47.980.745.620,00	94,44	51.461.215.000,00
Jumlah	**50.807.179.000,00**	**47.980.745.620,00**	94,44	**51.461.215.000,00**

1) Dana Desa

Dana Desa dianggarkan pada Tahun Anggaran 2025 senilai Rp50.807.179.000,00 dan terealisasi senilai Rp47.980.745.620,00 atau mencapai 94,44%. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp3.480.469.380,00 atau 6,76% dari realisasi Tahun Angaran 2024 senilai Rp51.461.215.000,00.

Pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 terdapat pengurangan Dana Desa senilai Rp2.826.433.380,00 untuk meningkatkan efektivitas tata kelola penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan kebijakan Presiden Republik Indonesia dalam rangka mendukung pembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih.

c) Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA

1) Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LRA

Pendapatan Bagi Hasil Pajak dianggarkan pada Tahun Anggaran 2025 senilai Rp17.263.960.605,48 dan terealisasi senilai Rp18.963.115.442,00 atau mencapai 109,84%. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp7.450.974.196,00 atau 28,21% dari realisasi tahun 2024 senilai Rp26.414.089.638,00 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 7. 23
Rincian Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA

Dalam Rupiah

Uraian	2025		%	Realisasi 2024
	Anggaran	Realisasi		
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	0,00	1.773.607.256,00	0,00	3.754.610.082,00
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	0,00	1.629.713.687,00	0,00	5.352.561.968,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	7.947.292.207,33	6.460.148.495,00	81,29	8.357.499.019,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	24.287.702,15	18.084.393,00	74,46	17.334.878,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	9.292.380.696,00	9.081.561.611,00	97,73	8.932.083.691,00
Jumlah	**17.263.960.605,48**	**18.963.115.442,00**	**109,84**	**26.414.089.638,00**

3. Lain- Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dianggarkan pada Tahun Anggaran 2025 ditetapkan senilai Rp8.339.182.911,00 dan terealisasi senilai Rp8.285.447.599,00 atau mencapai 99,36%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp592.918.696,00 atau 7,71% dari realisasi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp7.692.528.903,00 dengan rincian tabel berikut:

Tabel 7. 24
Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA

Dalam Rupiah

Uraian	2025		%	Realisasi 2024
	Anggaran	Realisasi		
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP BLUD - LRA	8.339.182.911,00	8.285.447.599,00	99,36	7.692.528.903,00
Jumlah	**8.339.182.911,00**	**8.285.447.599,00**	**99,36**	**7.692.528.903,00**

b. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.

Belanja Daerah dianggarkan pada Tahun Anggaran 2025 senilai Rp644.027.253.010,48 dan terealisasi senilai Rp622.607.889.371,46 atau mencapai 96,67%. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp74.850.670.128,45 atau 10,73% dari realisasi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp697.458.559.499,91 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 7. 25
Rincian Belanja Daerah

Dalam Rupiah

Uraian	2025		%	Realisasi 2024
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Operasi	463.584.292.839,12	452.824.266.108,46	97,68	469.025.200.983,91
Belanja Modal	91.931.171.371,36	84.297.149.410,00	91.69	139.134.589.716,00
Belanja Tidak Terduga	895.000.000,00	696.208.433,00	77,79	475.105.500,00
Belanja Transfer	87.616.788.800,00	84.790.265.420,00	96.77	88.823.663.300,00
Jumlah	**644.027.253.010,48**	**622.607.889.371,46**	**96,67**	**697.458.559.499,91**

Jumlah Belanja yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025 telah termasuk realisasi pengeluaran dari Belanja Dana BOSP, Belanja BOK Puskesmas, Belanja Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Masyarakat (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan juga Belanja BLUD dari RSUD dan 11 Puseksmas yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah.

1. Belanja Operasi

Belanja Opersai dianggarkan pada Tahun Anggaran 2025 senilai Rp463.584.292.839,12 dan terealisasi senilai Rp452.824.266.108,46 atau mencapai 97,68%. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp16.200.934.875,45 atau 3,45% dari realisasi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp469.025.200.983,91 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 7. 26
Rincian Belanja Operasi

Dalam Rupiah

Uraian	2025		%	Realisasi 2024
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Pegawai	256.322.902.842,46	254.238.055.532,00	99,19	224.098.755.376,00
Belanja Barang dan Jasa	195.117.291.217,66	186.791.941.444,46	95,73	203.336.294.992,91
Belanja Hibah	12.118.098.779,00	11.772.269.132,00	97,15	41.571.650.615,00
Belanja Bantuan Sosial	26.000.000,00	22.000.000,00	84,62	18.500.000,00
Jumlah	**463.584.292.839,12**	**452.824.266.108,46**	**97,68**	**469.025.200.983,91**

a) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai dianggarkan pada Tahun Anggaran 2025 senilai Rp256.322.902.842,46 dan realisasi senilai Rp254.238.055.532,00 atau mencapai 99,19%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp30.139.300.156,00 atau 13,45% dari realisasi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp224.098.755.376,00. Pengeluaran Belanja tersebut dialokasikan untuk gaji dan tunjangan ASN yang meliputi PNS dan PPPK, tambahan penghasilan PNS, Belanja untuk pimpinan dan anggota DPRD/KDH/WKDH, biaya pemungutan pajak dan pemungutan retribusi. Rincian belanja pegawai dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7. 27
Rincian Belanja Pegawai

Dalam Rupiah

Uraian	2025		%	Realisasi 2024
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	187.231.253.981,80	178.742.031.009,00	95,47	169.720.699.136,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	60.617.707.553,66	67.146.806.977,00	110,77	5.165.910.130,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	40.775.046.744,00
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	7.743.087.993,00	7.631.654.372,00	98,56	7.843.288.208,00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	219.973.314,00	207.083.174,00	94,14	172.171.158,00
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	510.880.000,00	510.480.000,00	99,92	421.640.000,00
Jumlah	**256.322.902.842,46**	**254.238.055.532,00**	**99,19**	**224.098.755.376,00**

Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN melebihi anggaran disebabkan adanya tambahan Tunjangan Profesi Guru, Tunjangan Khusus Guru, serta Tambahan Penghasilan Guru bulan ke-13 dan ke-14 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 372 Tahun 2025 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil negara Daerah Tahun Anggaran 2025 yang diterima pada tanggal 27 Desember 2025 sehingga belum sempat dilakukan perubahan anggaran atas penerimaan tersebut.

b) Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa dimaksudkan untuk setiap pengeluaran pembelian barang dan jasa dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah.

Belanja Barang dan Jasa dianggarakan pada Tahun Anggaran 2025 senilai Rp195.117.291.217,66 dan terealisasi senilai Rp186.791.941.444,46 atau mencapai 95,73%. Realisasi tersebut mengalami penurunan seniai Rp16.544.353.548,45 atau 8,14% dari realisasi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp203.336.294.992,91 dengan rincian tabel berikut:

Tabel 7. 28
Rincian Belanja Barang dan Jasa

Dalam Rupiah

Uraian	2025		%	Realisasi 2024
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Barang	37.321.499.746,55	35.427.129.761,00	94,92	41.479.567.467,00
Belanja Jasa	80.237.690.436,07	75.757.549.306,00	94,42	92.064.191.277,91
Belanja Pemeliharaan	4.943.524.150,00	4.785.059.272,00	96,79	2.964.644.154,00
Belanja Perjalanan Dinas	12.995.304.320,00	12.709.039.401,00	97,80	25.692.786.208,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.851.853.920,00	1.248.957.450,00	67,44	978.527.650,00
Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00	16.712.447.138,00
Belanja Barang dan Jasa BOSP	16.385.461.266,04	16.350.479.242,00	99,79	0,00
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	6.446.753.685,00	5.854.801.070,00	90,82	5.879.182.437,00
Belanja Barang dan Jasa BLUD	34.935.203.694,00	34.658.925.942,46	99,21	17.564.948.661,00
Jumlah	**195.117.291.217,66**	**186.791.941.444,46**	**95,73**	**203.336.294.992,91**

1) Belanja Barang
Belanja Barang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2025 senilai Rp37.321.499.746,55 dan terealisasi senilai Rp35.427.129.761,00 atau mencapai 94,92%. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp6.052.437.706,00 atau 14,59% dari realisasi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp41.479.567.467,00.

2) Belanja Jasa
Belanja Jasa dianggarkan pada Tahun Anggaran 2025 senilai Rp80.237.690.436,07 dan terealisasi senilai Rp75.757.549.306,00 atau mencapai 94,42%. Realisasi tersebut

mengalami penurunan senilai Rp16.306.641.971,91 atau 17,71% dari realisasi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp92.064.191.277,91 .

3) Belanja Pemeliharaan
Belanja Pemeliharaan dianggarkan pada Tahun Anggaran 2025 senilai Rp 4.943.524.150,00 dan terealisasi senilai Rp4.785.059.272,00 atau mencapai 96,79%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp1.820.415.118,00 atau 61,40% dari realisasi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp2.964.644.154,00.

4) Belanja Perjalanan Dinas
Belanja Perjalanan Dinas dianggarkan pada Tahun Anggaran 2025 senilai Rp12.995.304.320,00 dan terealisasi senilai Rp12.709.039.401,00 atau mencapai 97,80%. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp12.983.746.807,00 atau 50,53% dari realisasi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp25.692.786.208,00.

5) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dianggarkan pada Tahun Anggaran 2025 senilai Rp1.851.853.920,00 dan terealisasi senilai Rp1.248.957.450,00 atau mencapai 67,44% mengalami kenaikan senilai Rp270.429.800,00 atau 27,64% dari realisasi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp978.527.650,00.

6) Belanja Barang dan Jasa BOS
Belanja Barang dan Jasa BOS dianggarkan pada Tahun Anggaran 2025 senilai Rp0,00 dan terealisasi senilai Rp0,00 atau mencapai 0,00%. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp16.712.447.138,00 atau 100% dari realisasi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp16.712.447.138,00.

7) Belanja Barang dan Jasa BOSP
Belanja Barang dan Jasa BOSP diangarkan pada Tahun Anggaran 2025 senilai Rp16.385.461.266,04 dan terealisasi senilai Rp16.350.479.242,00 atau mencapai 99,79%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp16.350.479.242,00 dari realisasi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp0,00.

8) Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas dianggarkan pada Tahun Anggaran 2025 senilai Rp6.446.753.685,00 dan terealisasi senilai Rp5.854.801.070,00 atau mencapai 90,82%. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp24.381.367,00 atau 0,41% dari realisasi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp5.879.182.437,00.

9) Belanja Barang dan Jasa BLUD
Belanja Barang dan Jasa BLUD dianggarkan pada Tahun Anggaran 2025 senilai Rp34.935.203.694,00 dan terealisasi senilai Rp34.658.925.942,46 atau mencapai 99,21%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp17.093.977.281,46 atau 97,32% dari realisasi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp17.564.948.661,00.

c) Belanja Hibah

Belanja Hibah dianggarkan pada Tahun Anggaran 2025 dianggarkan senilai Rp12.118.098.779,00 dengan realisasi senilai Rp11.772.269.132,00 atau mencapai 97,15%. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp29.799.381.483,00 atau 71,68% dari realisasi tahun anggaran 2024 senilai Rp41.571.650.615,00 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 7. 29
Rincian Belanja Hibah

Dalam Rupiah

Uraian	2025		%	Realisasi 2024
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	251.000.000,00
Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	4.462.000,00
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan PerUndang-Undangan	1.950.000.000,00	1.950.000.000,00	100,00	27.302.930.000,00
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan	3.276.500.869,00	2.934.560.338,00	89,56	5.017.576.986,00

Uraian	2025		%	Realisasi 2024
	Anggaran	Realisasi		
Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar				
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	962.087.910,00	958.948.194,00	99,67	3.704.609.629,00
Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	274.920.000,00	274.470.600,00	99,84	0,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	373.070.000,00	373.070.000,00	100,00	308.495.000,00
Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	0,00	0,00	0,00	346.977.000,00
Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	2.239.420.000,00	2.239.420.000,00	100,00	2.235.900.000,00
Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	3.042.100.000,00	3.041.800.000,00	99,99	2.399.700.000,00
Jumlah	**12.118.098.779,00**	**11.772.269.132,00**	**97,15**	**41.571.650.615,00**

1) Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat
Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat dianggarkan pada Tahun Anggaran 2025 senilai Rp0,00 dan terealisasi senilai Rp0,00 atau mencapai 0,00%. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp255.462.000,00 atau 100% dari realisasi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp255.462.000,00.

2) Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat
Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat dianggarkan pada Tahun Anggaran 2025 senilai Rp0,00 dan terealisasi senilai Rp0,00 atau mencapai 0,00%. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp4.462.000,00 atau 100% dari realisasi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp4.462.000,00.

3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dianggarkan pada Tahun Anggaran 2025 senilai Rp1.950.000.000,00 dan terealisasi senilai Rp1.950.000.000,00 atau mencapai 100%. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp25.352.930.000,00 atau 92,86% dari realisasi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp27.302.930.000,00.

4) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar dianggarkan pada Tahun Anggaran 2025 senilai Rp3.276.500.869,00 dan terealisasi senilai Rp2.934.560.338,00 atau mencapai 89,56%. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp2.083.016.648,00 atau 41,51% dari realisasi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp5.017.576.986,00.

5) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan dianggarkan pada Tahun Anggaran 2025 senilai R962.087.910,00 dan terealisasi senilai Rp958.948.194,00 atau mencapai 99,67%. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp2.745.661.435,00 atau 74,11% dari realisasi Tahun Angaran 2024 senilai Rp3.704.609.629,00.

6) Belanja Hibah Uang Dana BOS yang diterima oleh Satdikdas Swasta
Belanja Hibah Uang Dana BOS yang diterima oleh Satdikdas Swasta dianggarkan pada Tahun Anggaran 2025 senilai Rp274.920.000,00 dan terealisasi senilai Rp274.470.600,00 atau mencapai 99,84%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp274.470.600,00 atau 100,00% dari realisasi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp0,00.

7) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dianggarkan pada Tahun Anggaran 2025 senilai Rp373.070.000,00 dan terealisasi senilai Rp 373.070.000,00 atau mencapai 100%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan dari realisasi tahun 2024 senilai

Rp64.575.000,00 atau 20,93% dari realisasi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp308.495.000,00 .

8) Belanja Hibah Dana BOSP-BOS
Belanja Hibah Dana BOSP-BOS dianggarkan pada Tahun Anggaran 2025 senilai Rp0,00 dan terealisasi senilai Rp0,00 atau mencapai 100%. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp346.977.000,00 atau 100% dari realisasi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp346.977.000,00 .

9) Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD
Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD dianggarkan pada Tahun Anggaran 2025 senilai Rp2.239.420.000,00 dan terealisasi senilai Rp2.239.420.000,00 atau mencapai 100%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp3.520.000,00 atau 0,16% dari realisasi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp2.235.900.000,00.

10) Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan
Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan dianggarkan pada Tahun Anggaran 2025 senilai Rp3.042.100.000,00 dan terealisasi senilai Rp3.041.800.000,00 atau mencapai 99,99%. Realisasi mengalami kenaikan senilai Rp642.100.000,00 atau 26,76% dari realisasi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp2.399.700.000,00.

d) Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial adalah pengeluaran Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial baik masyarakat pada umumnya maupun pegawai Pemerintah Daerah pada khususnya. Belanja Bantuan Sosial dianggarkan pada Tahun Anggaran 2025 senilai Rp26.000.000,00 dan terealisasi senilai Rp22.000.000,00 atau mencapai 84,62%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp3.500.000,00 atau 18,92% dari realisasi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp18.500.000,00. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7. 30
Rincian Belanja Bantuan Sosial

Dalam Rupiah

Uraian	2025		%	Realisasi 2024
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	26.000.000,00	22.000.000,00	84,62	6.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00
Jumlah	**26.000.000,00**	**22.000.000,00**	**84,62**	**18.500.000,00**

Belanja Bantuan Sosial adalah belanja Bantuan Uang yang direncanakan kepada Individu dan Belanja Bantuan yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat dengan rincian sebagai berikut Belanja Bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu di dianggarkan senilai Rp26.000.000,00 dan terealisasi senilai Rp22.000.000,00 atau 84,62% dan belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat tidak dianggarkan dan tidak terealisasi.

2. Belanja Modal

Belanja Modal dianggarkan pada Tahun Anggaran 2025 senilai Rp91.931.171.371,36 dan terealisasi senilai Rp84.297.149.410,00 atau mencapai 91,70%. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp54.837.440.306,00 atau 39,41% dari realisasi Tahun Anggaran 2024 Rp139.134.589.716,00 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 7. 31
Rincian Belanja Modal

Dalam Rupiah

Uraian	2025		%	Realisasi 2024
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Modal Tanah	8.296.028.191,00	6.364.747.767,00	76,72	2.055.173.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.710.129.687,35	15.372.942.512,00	97,85	35.957.625.906,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	40.498.349.634,88	39.872.038.119,00	98,45	41.278.328.853,00
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	24.343.704.865,13	19.849.155.028,00	81,54	57.979.234.714,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.624.047.090,00	1.509.889.157,00	92,97	1.267.128.002,00

Uraian	2025		%	Realisasi 2024
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Modal Aset lainnya	1.458.911.903,00	1.328.376.827,00	91,05	597.099.241,00
Jumlah	**91.931.171.371,36**	**84.297.149.410,00**	**91,70**	**139.134.589.716,00**

a) Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga pembelian serta biaya untuk memperoleh hak biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan.

Belanja Modal Tanah dianggarkan pada Tahun Anggaran 2025 senilai Rp8.296.028.191,00 dan terealisasi senilai Rp6.364.747.767,00 atau mencapai 76,72%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp4.309.574.767,00 atau 209,69% dari realisasi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp2.055.173.000,00 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 7. 32
Rincian Belanja Modal Tanah

Dalam Rupiah

Uraian	2025		%	Realisasi 2024
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	8.296.028.191,00	6.364.747.767,00	76,72	1.856.384.000,00
Belanja Modal lapangan	0,00	0,00	0,00	198.789.000,00
Jumlah	**8.296.028.191,00**	**6.364.747.767,00**	**76,72**	**2.055.173.000,00**

b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh peralatan dan mesin sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga pembelian dan biaya instalasi serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan aset sehingga dapat digunakan.

Belanja Modal Peralatan dan Mesin dianggarkan pada Tahun Anggaran 2025 senilai Rp15.710.129.687,35 dan terealisasi senilai Rp15.372.942.512,00 atau mencapai 97,85%. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp20.584.683.394,00 atau 57,25% dari realisasi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp35.957.625.906,00 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 7. 33
Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Dalam Rupiah

Uraian	2025		%	Realisasi 2024
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Modal Alat Besar	606.094.500,00	606.063.000,00	99,99	1.553.580.000,00
Belanja Modal Alat Angkutan	3.779.248.500,00	3.664.365.290,00	96,96	9.320.448.611,00
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	56.610.000,00	56.610.000,00	100,00	0,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.209.199.110,00	3.145.859.045,00	98,03	3.800.926.451,00
Belanja Modal Alat Studio. Komunikasi dan Pemancar	93.600.000,00	93.600.000,00	100,00	1.436.954.200,00
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	1.052.686.911,00	988.668.900,00	93,92	15.601.150.752,00
Belanja Modal Komputer	2.419.667.708,35	2.327.103.051,00	96,17	1.605.962.182,00
Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	885.000.000,00	885.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	569.500.000,00	565.000.000,00	99,21	0,00
Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi	0,00	0,00	0,00	108.180.600,00
Belanja Modal Rambu-Rambu	21.500.000,00	21.500.000,00	100,00	99.161.850,00
Belanja Modal Peralatan Olahraga	249.978.570,00	249.766.908,00	99,92	64.065.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	00,00	00,00	0,00	2.008.320.260,00

Uraian	2025		%	Realisasi 2024
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	2.227.652.668,00	2.234.307.668,00	100,30	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	539.391.720,00	535.098.650,00	99,20	358.876.000,00
Jumlah	**15.710.129.687,35**	**15.372.942.512,00**	**97,85**	**35.957.625.906,00**

c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga beli, biaya pembebasan, biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak.

Belanja Modal Gedung dan Bangunan dianggarkan pada Tahun Anggaran 2025 senilai Rp40.498.349.634,88 dan terealisasi senilai Rp39.872.038.119,00 atau mencapai 98,45%. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp1.406.290.734,00 atau 3,41% dari realisasi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp41.278.328.853,00 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 7. 34
Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Dalam Rupiah

Uraian	2025		%	Realisasi 2024
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	38.984.533.644,36	38.672.960.205,00	99,20	37.209.398.557,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	665.213.147,52	355.527.270,00	53,45	0,00
Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	848.602.843,00	843.550.644,00	99,40	4.068.930.296,00
Jumlah	**40.498.349.634,88**	**39.872.038.119,00**	**98,45**	**41.278.328.853,00**

d) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain biaya perolehan dan biaya-biaya lain sampai dengan jaringan tersebut siap pakai.

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dianggarkan pada Tahun Anggaran 2025 senilai Rp24.343.704.865,13 dan terealisasi senilai Rp19.849.155.028,00 atau mencapai 81,54%. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp38.130.079.686,00 atau 65,77% dari realisasi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp57.979.234.714,00 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 7. 35
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Dalam Rupiah

Uraian	2025		%	Realisasi 2024
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Modal Jalan	9.428.260.860,70	8.382.054.998,00	88,90	34.177.145.950,00
Belanja Modal Jembatan	2.094.859.874,27	1.330.377.470,00	63,51	5.748.666.800,00
Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	101.558.000,00	93.234.000,00	91,80	4.418.000,00
Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut	3.460.176.888,70	3.119.590.100,00	90,16	3.114.612.800,00
Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	1.217.783.738,46	714.511.100,00	58,67	60.068.000,00
Belanja Modal Air Bersih/Air Baku	5.531.792.640,00	5.068.949.200,00	91,63	412.721.000,00
Belanja Modal Bangunan Air Kotor	80.928.114,00	0,00	0,00	1.280.326.476,00
Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	1.753.149.312,00	474.466.850,00	27,06	10.781.275.688,00
Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	574.598.597,00	573.619.310,00	99,83	0,00
Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	0,00	0,00	0,00	2.400.000.000
Belanja Modal Jaringan Air Minum	3.645.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Jaringan Listrik	96.951.840,00	92.352.000,00	95,26	0,00
Jumlah	**24.343.704.865,13**	**19.849.155.028,00**	**81,54**	**57.979.234.714,00**

e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dianggarkan pada Tahun Anggaran senilai Rp1.624.047.090,00 dan terealisasi senilai Rp1.509.889.157,00 atau mencapai 92,97%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp242.761.155,00 atau 19,16% dari realisasi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp1.267.128.002,00 dengan rincian pada tabel berikutt:

Tabel 7. 36
Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Dalam Rupiah

Uraian	2025		%	2024
	Anggaran	Realisasi		Realisasi
Belanja Modal Bahan Perpustakaan	83.656.000,00	83.480.017,00	99,79	545.138.000,00
Belanja Modal Aset Tetap lainnya BOS	0	0	0	721.990.002,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	1.356.611.990,00	1.339.042.890,00	98,70	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	183.779.100,00	87.366.250,00	47,54	0,00
Jumlah	**1.624.047.090,00**	**1.509.889.157,00**	**92,97**	**1.267.128.002,00**

f) Belanja Modal Aset Lainnya

Belanja Modal Aset Lainnya dianggarkan pada Tahun 2025 senilai Rp1.458.911.903,00 dan terealisasi senilai Rp1.328.376.827,00 atau mencapai 91,05%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp731.277.586,00 atau 122,47% dari realisasi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp597.099.241,00 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 7. 37
Rincian Belanja Modal Aset Lainnya

Dalam Rupiah

Uraian	2025		%	Realisasi 2024
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	335.000.000,00	334.775.000,00	99,93	597.099.241,00
Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	1.123.911.903,0	993.601.827,00	88,41	0,00
Jumlah	**1.458.911.903,0**	**1.328.376.827,0**	**91,05**	**597.099.241,00**

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran Pemerintah Daerah yang digunakan untuk penanganan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah.

Belanja Tidak Terduga dianggarkan pada Tahun Anggaran 2025 senilai Rp895.000.000,00 dan terealisasi senilai Rp696.208.433,00 atau mencapai 77,79%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp221.102.933,00 atau 46,54% dari realisasi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp475.105.500,00.

4. Transfer Bantuan Keuangan

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan dianggarkan pada Tahun Anggaran 2025 senilai Rp87.616.788.800,00 dan terealisasi senilai Rp84.790.265.420,00 atau mencapai 96,77%. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp4.033.397.880,00 atau 4,54% dari realisasi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp88.823.663.300,00 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 7. 38
Rincian Transfer Bantuan Keuangan

Dalam Rupiah

Uraian	2025		%	Realisasi 2024
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	105.000.000,00	105.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	87.511.788.800,00	84.685.265.420,00	96,77	88.823.663.300,00
Jumlah	**87.616.788.800,00**	**84.790.265.420,00**	**96,77**	**88.823.663.300,00**

c. Surplus/Defisit – LRA

Berdasarkan hasil realisasi total pendapatan Tahun Anggaran 2025 senilai Rp645.179.353.993,73 dan realisasi total belanja Tahun Anggaran 2025 senilai Rp622.607.889.371,46 maka Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah mengalami *surplus* senilai Rp22.571.464.622,27.

d. Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya yang dalam anggaran terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Sedangkan Pembiayaan Netto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. Realisasi Pembiayaan Netto Tahun Anggaran 2025 adalah senilai Rp9.874.382.874,43. Realisasi pembiayaan Tahun Anggaran 2025 dapat disajikan dalam ikhtisar realisasi pembiayaan sebagai berikut:

Tabel 7. 39
Rincian Pembiayaan

Dalam Rupiah

Uraian	2025		%	Realisasi 2024
	Anggaran	Realisasi		
Penerimaan Pembiayaan	13.874.382.874,00	13.874.382.874,43	100,00	41.381.753.452,10
Pengeluaran Pembiayaan	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100,00	0,00
Pembiayaan Netto	**9.874.382.874,00**	**9.874.382.874,43**	**100,00**	**41.381.753.452,10**

Penerimaan Pembiayaan Tahun 2025 dianggarkan senilai Rp13.874.382.874,00 dan terealisasi senilai Rp13.874.382.874,43 atau 100,00% yang merupakan Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya senilai Rp13.874.382.874,43.

Pada Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Mamuju Tengah melakukan penambahan Penyertaan Modal untuk tahun ke 4 senilai Rp4.000.000.000,00 pada pengeluaran pembiayaan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah kepada PT. Bank Sulselbar.

e. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 adalah senilai Rp32.445.847.496,70 yang merupakan hasil total *Surplus* senilai Rp22.571.464.622,27 ditambah dengan pembiayaan netto senilai Rp9.874.382.874,43. Rincian SiLPA per sumber dana dapat dilihat pada *lampiran 1.*

7.5.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan pos-pos saldo anggaran lebih awal. Penggunaan saldo tahun berjalan, sisa lebih/kurang pembiayaan tahun berjalan, koreksi kesalahan dan saldo anggaran lebih akhir.

a. Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih Awal senilai Rp13.874.382.874,43 jumlah ini merupakan hasil posisi SiLPA Tahun 2024 yang disajikan senilai Rp13.874.382.874,43.

b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Selama Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah memanfaatkan keseluruhan Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun senilai Rp13.874.382.874,43 untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran tahun berjalan.

c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) merupakan akumulasi SiLPA awal tahun dan penggunaan SiLPA sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan. Jumlah Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah per 31 Desember 2025 senilai Rp32.445.847.496,70. Dapat diuraikan sebagai berikut:

- *Surplus/(Defisit)* Anggaran Rp 22.571.464.622,27
- Pembiayaan Netto Rp 9.874.382.874,43
- SiLPA Tahun berjalan Rp 32.445.847.496,70+

d. Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo Anggaran Lebih Akhir menggambarkan posisi saldo anggaran Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah di akhir periode akuntansi. Posisi SiLPA awal tahun yang diakui sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan ditambah dengan koreksi pembukuan tahun sebelumnya akan menggambarkan posisi Saldo Tahun Anggaran 2025 senilai Rp32.445.847.496,70.

7.5.3. Neraca

Neraca (*statement of financial performance*) adalah pernyataan tertulis sah bagi publik tentang kewajaran keuangan yang dinyatakan oleh entitas karena postur neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu, posisi keuangan tersebut adalah posisi tentang aset, kewajiban, dan ekuitas. Aset mencakup seluruh sumber daya yang memberikan manfaat ekonomi dan/atau sosial yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah. Kewajiban merupakan utang yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Daerah di masa yang akan datang. Ekuitas mencerminkan kekayaan bersih Pemerintah Daerah, yaitu selisih antara aset dan kewajiban. Berikut ini deskripsi setiap akun-akun yang disajikan dalam Neraca Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah.

Posisi keuangan per 31 Desember 2025 Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah secara umum adalah sebagai berikut:

Tabel 7. 40
Rincian Neraca

Dalam Rupiah

No	Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Aset	1.194.443.438.959,02	1.378.301.374.472,31	(183.857.935.513,29)	(13,34)
2	Kewajiban	4.607.636.404,93	7.439.661.925,71	(2.832.025.520,78)	(38,07)
3	Ekuitas	1.189.835.802.554,09	1.370.861.712.546,60	(181.025.909.992,51)	(13,21)

a. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah akibat dari peristiwa masa lalu dan manfaat ekonomi atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh Pemerintah sendiri maupun masyarakat, dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non keuangan dan sumber daya lainnya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp1.194.443.438.959,02 dan per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp1.378.301.374.472,31 mengalami penurunan senilai Rp183.857.935.513,29 atau 13,34%. Rincian aset dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 7. 41
Rincian Aset

Dalam Rupiah

No	Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Aset Lancar	51.386.723.825,54	36.455.641.658,58	14.931.082.166,96	40,96
2	Investasi Jangka Panjang	10.000.000.000,00	6.000.000.000,00	4.000.000.000,00	66,67
3	Aset Tetap	1.118.324.158.291,99	1.322.010.125.591,49	(203.685.967.299,50)	(15,41)
4	Properti Investasi	5.447.999.112,00	5.447.999.112,00	0,00	0,00
5	Aset Lainnya	9.284.557.729,49	8.387.608.110,24	896.949.619,25	10,69
Jumlah		**1.194.443.438.959,02**	**1.378.301.374.472,31**	**(183.857.935.513,29)**	**(13,34)**

1. Aset Lancar

Aset Lancar diklasifikasikan berdasarkan tingkat likuiditasnya sebab diharapkan akan dipakai dalam jangka waktu di bawah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal neraca.

Aset Lancar per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp51.386.723.825,54 mengalami kenaikan senilai Rp14.931.082.166,96 atau 40,96% dari Aset Lancar per 31 Desember 2024 dan Tahun 2024 adalah senilai Rp36.455.641.658,58 dengan rincian pada tabel berikut:.

Tabel 7. 42
Rincian Aset Lancar

Dalam Rupiah

No	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Kas di Kas Daerah	26.323.060.548,26	10.009.738.986,53	16.313.321.561,73	162,97
2	Kas di Bendahara Penerimaan	77.740.250,00	18.800.000,00	58.940.250,00	313,51
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	31.237.659,00	225.421.845,00	(194.184.186,00)	(86,14)
4	Kas di BLUD	5.210.389.594,40	2.103.923.795,86	3.106.465.798,54	147,65
5	Kas Lainnya	66.421.912,00	218.879.508,00	(152.457.596,00)	(69,65)
6	Kas Dana BOSP	33.980.124,04	40.938.422,04	(6.958.298,00)	(17,00)
7	Kas Dana BOK Puskesmas	767.672.905,00	1.465.886.736,00	(698.213.831,00)	(47,63)
8	Piutang Pajak Daerah	16.158.785.084,00	22.259.634.950,00	(6.100.849.866,00)	(27,41)
9	Piutang Retribusi Daerah	3.006.582.682,00	1.414.766.945,00	1.591.815.737,00	112,51
10	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	7.091.529.697,00	3.552.070.295,00	3.539.459.402,00	99,64
11	Piutang Transfer	2.441.353.196,00	0,00	2.441.353.196,00	0,00
12	Penyisihan Piutang	(20.086.156.169,96)	(15.520.273.439,20)	(4.565.882.730,76)	29,42
13	Beban Dibayar Dimuka	228.629.155,13	0,00	228.629.155,13	0,00
14	Persediaan	10.035.497.188,67	10.665.853.614,35	(630.356.425,68)	(5,91)
	Jumlah	**51.386.723.825,54**	**36.455.641.658,58**	**14.931.082.166,96**	**40,96**

a) Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp26.323.060.548,26 mengalami kenaikan senilai Rp16.313.321.561,73 atau 162,97% dari saldo kas per 31 Desember 2024 senilai Rp10.009.738.986,53. Jumlah ini merupakan saldo kas Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah yang berada di rekening bank dengan rincian pada tabel berikut

Tabel 7. 43
Daftar Rekening Kas Daerah

Dalam Rupiah

No	Nama Bank	No. Rekening	Jumlah
1	Bank SULSELBAR Cabang Topoyo (RKUD)	077-001-000000001-3	13.086.696.280,26
2	Bank SULSELBAR Cabang Topoyo (DAK FISIK)	077-001-000000002-1	2.718.769.126,00
3	Bank SULSELBAR Cabang Topoyo (DAK NON FISIK)	077-001-000000003-0	1.953.667.677,00
4	Bank SULSELBAR Cabang Topoyo (BKK)	077-001-000000004-8	86.102.667,00
5	Bank SULSELBAR Cabang Topoyo (DKTG)	077-001-000000006-4	187.138.142,00
6	Bank SULSELBAR Cabang Topoyo (OPSEN PKB))	077-001-000000007-2	8.290.686.656,00
Jumlah			**26.323.060.548,26**

Untuk rincian per sumber dana yang berada di saldo kas Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah disetiap rekening banknya terdiri dari:

1) Dana Alokasi Umum Block Grant senilai Rp9.085.936.933,26
2) Dana Alokasi Umum Specific Grant Bidang Pendidikan senilai Rp1.134.457.355,00
3) Dana Alokasi Umum Specific Grant Bidang Kesehatan senilai Rp2.319.669.682,00
4) Dana Bagi Hasil Sawit senilai Rp546.632.310,00
5) Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp2.718.769.126,00
6) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp1.953.667.677,00
7) Dana DTKG senilai Rp187.138.142,00
8) Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) senilai Rp86.102.667,00
9) Dana Opsen PKB senilai Rp8.290.686.656,00

Di Tahun 2025 juga telah disepakati antara Direktur RSUD dengan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah untuk memberikan sebagian sisa silpa anggaran 2024 yang dimiliki oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamuju Tengah, untuk mentransfer dana silpa tahun 2024 yang telah disepakati senilai Rp1.381.548.925,00 (Satu Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Juta Lima Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) ke

rekening nomor: 077-001-000000001-3 an. RKUD Kabupaten Mamuju Tengah. Permintaan Dana SiLPA tahun 2024 tersebut tertuang pada Surat Edaran Bupati Nomor : 900.1.14.4/647/X/2025.

b) Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp77.740.250,00 mengalami kenaikan senilai Rp58.940.000,00 atau 313,51% dari saldo kas per 31 Desember 2024 senilai Rp18.800.000,00. Terdapat saldo kas di Bendahara Penerimaan Dinas PUPR senilai Rp67.900.250,00 yang merupakan penerimaan UPTD Pengelolaan Air Bersih bulan Desember 2025 yang belum sempat disetorkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025. Atas saldo tersebut telah disetorkan ke Kas Daerah tanggal 29 Januari 2026. Selain itu, terdapat saldo kas di Bendahara Penerimaan Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp9.840.000,00 yang merupakan penerimaan tahun 2025 namun belum disetorkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025. Atas saldo tersebut telah disetorkan ke Kas Daerah tanggal 18 Februari 2026.

c) Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran per tanggal 31 Desember 2025 senilai Rp31.237.659,00 mengalami penurunan senilai Rp194.184.186,00 atau 86,14% dari kas per 31 Desember 2024 senilai Rp225.421.845,00. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan sisa kas yang masih dalam penguasaan bendahara pengeluaran pada dua SKPD dengan rincian pada tabel dibawah ini:

Tabel 7. 44
Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2025

Dalam Rupiah

No	Nama SKPD	Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran			Jumlah
		Sisa UP	Sisa TU	PFK	
1	Inspektorat	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
2	Sekretariat DPRD	22.754.059,00	8.303.600,00	0,00	31.057.659,00
Jumlah		**22.934.059,00**	**8.303.600,00**	**0,00**	**31.237.659,00**

Terdapat saldo Kas di Bendahara Pengeluaran yang belum disetor ke Kas Daerah per 31 Desember 2025 pada Inspektorat senilai Rp180.000,00. Atas saldo tersebut telah disetorkan ke RKUD tanggal 14 Januari 2026. Selain itu, terdapat saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD senilai Rp22.754.059,00 yang merupakan sisa UP dan senilai Rp8.303.600,00 yang merupakan sisa TU yang belum disetorkan ke Kas Daerah per 31 Desember 2025. Atas saldo tersebut telah disetorkan ke RKUD masing-masing pada tanggal 13 Januari 2026 dan dan Sisa TU senilai Rp8.303.600,00 yang disetor tanggal 07 Januari 2026.

d) Kas di BLUD

Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah telah mencatat transaksi BLUD yang terdiri BLUD RSUD dan BLUD pada 11 Puskesmas Mamuju Tengah pada tahun anggaran 2025. Kas di BLUD per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp5.210.389.594,40 mengalami kenaikan senilai Rp3.106.465.798,54 atau 147,65% dari saldo kas per 31 Desember 2024 senilai Rp2.103.923.795,86.

Pada BLUD RSUD terdapat selisih kas antara BKU dengan rekening koran dan kas tunai RSUD senilai Rp3.990.856,00. Atas nilai tersebut telah disetor ke Rekening Kas BLUD senilai Rp2.869.144,00 pada tanggal 29 April 2026 dan senilai Rp1.121.712,00 pada tanggal 19 Mei 2026.

Selain itu, pada Puskesmas Babana terdapat saldo utang Jasa Pelayanan senilai Rp547.215,00 yang merupakan jasa susulan nonkapitasi rujukan Rp217.566,00 dan Jasa susulan nonkapitasi ANC USG senilai Rp329.649,00 yang sudah dicatat sebagai belanja pada SP2B, namun per 31 Desember 2025 dana tersebut masih tersimpan di rekening PKM Babana. Atas dana tersebut, telah disalurkan kepada penerima Jasa Pelayanan pada tanggal 11 Maret 2026.

e) Kas Lainnya

Kas lainnya mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di Bank maupun saldo uang tunai yang pengelolaannya di luar mekanisme Kas Daerah dan Kas BLUD serta menjadi tanggungjawab entitas pelaksana teknis.

Kas Lainnya 31 Desember 2025 senilai Rp66.421.912,00 mengalami penurunan senilai Rp152.457.596 atau 69,65% dari saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2024 senilai Rp218.879.508,00. Penurunan ini menunjukkan adanya peningkatan kepatuhan penyetoran kewajiban dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 7. 45
Rincian Kas Lainnya

Dalam Rupiah

No.	SKPD	2025	2024
1	Prolanis BPJS Kesehatan	1.766.416,00	9.673.089,00
2	Utang PFK – BLUD	1.926.481,00	0,00
3	Utang PFK – BOSP	62.729.015,00	178.221.123,00
4	Utang PFK – BOK	0,00	2.734.407
5	Utang PFK – Kapitasi JKN	0,00	7.235.590
6	Utang PFK – Sekretariat DPRD	0,00	11.662.799,00
7	Utang PFK – Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	0,00	9.352.500,00
Jumlah		**66.421.912,00**	**218.879.508,00**

Berikut penjelasan lebih rinci untuk setiap komponen yang masih tersisa per 31 Desember 2025:

1) Dana prolanis BPJS kesehatan di 3 puskesmas yaitu Puskesmas Saloadak Senilai Rp55.154,00, Puskesmas Batuparigi senilai Rp1.628.412,00, dan Puskesmas Durikumba senilai Rp82.850,00 yang belum melakukan penutupan rekening hingga berakhirnya tahun anggaran 2025;
2) Utang PFK BLUD ini berasal dari Puskesmas Babana yang telah memotong PPh Pasal 21 atas jasa pelayanan kesehatan di tahun 2025 senilai Rp1.926.481,00. Potongan tersebut belum disetorkan ke Kas Negara hingga berakhirnya Tahun Anggaran 2025 namun telah disetorkan di tahun 2026, sehingga per tanggal penyelesaian laporan keuangan, tidak ada tunggakan lebih lanjut; dan
3) Utang PFK BOSP merupakan kewajiban perpajakan yang timbul dari pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah pada satuan pendidikan dasar dan menengah. Saldo senilai Rp62.729.015,00 terdiri dari dua komponen:
   (a) Sisa utang tahun 2024 senilai Rp24.861.513,00. Ini adalah pajak yang telah dipotong oleh 8 sekolah pada tahun 2024 tetapi belum dilaporkan dan disetorkan hingga akhir tahun 2025. Pemerintah daerah akan menindaklanjuti dengan pendampingan kepada sekolah-sekolah tersebut pada tahun 2026; dan
   (b) Utang yang timbul di tahun 2025 senilai Rp37.867.502,00. Ini merupakan pajak atas belanja BOSP yang belum disetorkan per 31 Desember 2025 dengan rincian yaitu PPN senilai Rp30.264.528,00, PPH 21 Senilai Rp649.500,00, dan PPH 23 Senilai Rp6.953.474,00 dan telah disetorkan di tahun 2026.

f) Kas Dana BOSP

Kas Dana BOSP per 31 Desember 2025 senilai Rp33.980.124,04 yang mengalami penurunan senilai Rp6.958.298,00 atau 17,00% dari saldo kas per 31 Desember 2024 senilai Rp40.938.422,04. Penurunan ini menunjukkan bahwa penyerapan dana BOSP oleh sekolah-sekolah berjalan lebih baik dibanding tahun sebelumnya, sehingga sisa kas yang tidak terpakai semakin kecil. Secara rinci penerimaan dan pengeluaran dana BOSP dapat dilihat pada *lampiran 2*.

g) Kas Dana BOK Puskesmas

Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah telah mencatat transaksi kas dana BOK Puskesmas yang dikelola oleh 11 (Sebelas) Puskesmas yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah.

Kas Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp767.672.905,00 mengalami penurunan senilai Rp698.213.831,00 atau 47,63% dari saldo kas per 31 Desember 2024 senilai Rp1.465.886.736,00. Secara rinci penerimaan dan pengeluaran dana BOK Puskesmas dapat dilihat pada *lampiran 3*.

h) Piutang Pajak Daerah

Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2025 senilai Rp16.158.785.084,00 mengalami penurunan senilai Rp6.100.849.866,00 atau 27,41% dari saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp22.259.634.950,00 dengan rincian piutang pajak daerah pada tabel berikut:

Tabel 7. 46
Rincian Piutang Pajak Daerah Per 31 Desember 2025

Dalam Rupiah

Uraian	2025	2024
Piutang PBBP2	15.538.412.885,00	21.715.497.206,00
Piutang PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	620.372.199,00	544.137.744,00
Jumlah	**16.158.785.084,00**	**22.259.634.950,00**

1) Piutang PBBP2 merupakan nilai piutang selama Tahun 2013-2025 per 31 Desember 2025 senilai Rp15.538.412.885,00 mengalami penurunan senilai Rp6.177.084.321,00 atau 28,45% dari saldo piutang per 31 Desember 2024 senilai Rp21.715.497.206,00.
Saldo piutang ini mengalami penurunan yang signifikan karena adanya reklasifikasi piutang denda PBBP2 yang sebelumnya dicatat di rekening piutang PBBP2 senilai Rp6.904.258.748,00 sesuai data yang telah diperbaharui dari Bidang Pendapatan BPKPAD. Secara rinci dapat dilihat pada *lampiran 4 & 5*;

2) Piutang PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain per 31 Desember 2025 senilai Rp620.372.199,00 mengalami kenaikan senilai Rp76.234.455 atau 14,01% dari saldo piutang per 31 Desember 2024 Rp544.137.744,00. Untuk penggunaan Bulan Desember 2025 dan piutang tersebut tidak dilakukan penyisihan piutang di tahun berjalan sesuai dengan kebijakan akuntansi.

i) Piutang Retribusi Daerah

Piutang Retribusi Daerah per tanggal 31 Desember 2025 senilai Rp3.006.582.682,00 mengalami kenaikan senilai Rp1.591.815.737,00 atau 112,51% dari saldo piutang per 31 Desember 2024 senilai Rp1.414.766.945,00, ini merupakan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di 11 Puskesmas senilai Rp111.489.225,00, Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp1.689.737.957,00 dan Piutang Retribusi Pemakaian Alat/piutang retribusi UPTD Air Bersih senilai Rp1.205.355.500,00, yang belum terbayarkan sampai berakhir Tahun Anggaran 2025. Secara rinci piutang retribusi dapat dilihat pada *lampiran 6-7*.

j) Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Piutang Lain-lain PAD yang Sah pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah per 31 Desember 2025 senilai Rp7.091.529.697,00 mengalami kenaikan senilai Rp3.539.459.402,00 atau 99,64% dari saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp3.552.070.295,00 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 7. 47
Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Per 31 Desember 2025

Dalam Rupiah

Uraian	2025	2024
Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	38.681.900,00
Piutang Pendapatan dari Pengembalian	0,00	62.635.488,00
Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	0,00	3.450.752.907,00
Piutang Pendapatan Denda (PBBP2)-Pajak Bumi dan Bangunan, Pedesaan dan Perkotaan	6.904.258.748,00	0,00
Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Alat	187.200.000,00	0,00
Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	70.949,00	0,00
Jumlah	7.091.529.697,00	**3.552.070.295,00**

Per 31 Desember 2025, saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah tercatat senilai Rp7.091.529.697,00, meningkat signifikan dibandingkan tahun 2024 yang senilai Rp3.552.070.295,00. Peningkatan ini karena munculnya dua piutang denda yang baru dipisahkan pencatatannya dari pokok piutang di tahun 2025, yaitu Piutang Pendapatan Denda PBB-P2 senilai Rp6.904.258.748,00 dan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Alat

senilai Rp187.200.000,00. Kedua piutang denda ini berasal dari sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran pajak dan retribusi, dan masih dalam proses penagihan. Pemerintah daerah akan terus menagih piutang denda tersebut dan membentuk penyisihan piutang sesuai dengan analisis umur piutang serta kualitas masing-masing tagihan. Selain itu, terdapat penambahan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal senilai Rp70.949,00 yang merupakan sisa kelebihan bayar proyek gudang dan akan diselesaikan pada tahun 2026.

Sementara itu, pengurangan piutang-piutang yang tercatat di tahun 2024 diantaranya karena,

a. Pelunasan Piutang Penerimaan Komisi/Potongan Piutang Penerimaan Komisi/Potongan senilai Rp38.681.900,00;
b. Piutang Pendapatan dari Pengembalian senilai Rp62.635.488,00 telah dihapuskan karena merupakan piutang atas selisih fisik pekerjaan dengan nilai yang dibayarkan per 31 Desember 2024. Pada tahun 2025 piutang tersebut telah diperhitungkan dengan sisa utang pekerjaan yang harus dibayarkan; dan
c. Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan Rp3.450.752.907,00 tidak lagi dicatat di akun ini mulai tahun 2025, karena sesuai dengan ketentuan Undang-Undang HKPD, pendapatan BLUD direklasifikasi ke dalam Retribusi Pelayanan Kesehatan, sehingga piutangnya pun ikut dipindahkan ke akun Piutang Retribusi Daerah.

k) Piutang Transfer

Piutang Transfer pada Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp2.441.353.196,00 dari saldo piutang per 31 Desember 2024 Rp0,00. Piutang ini timbul karena adanya keterlambatan transfer dana bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat kepada Kabupaten Mamuju Tengah untuk periode tahun 2025. Dengan kata lain, hak daerah atas bagian pajak provinsi sudah diakui secara akrual, tetapi kasnya belum diterima hingga berakhirnya tahun anggaran 2025. Rincian piutang tersebut terdiri dari Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor senilai Rp73.355.286,00, Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor senilai Rp2.360.222.856,00, dan Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan adenilai Rp7.775.054,00. Piutang ini merupakan tagihan yang masih harus ditagih kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Pemerintah daerah akan berkoordinasi secara intensif dengan provinsi untuk mempercepat realisasi transfer dana tersebut pada awal tahun 2026. Karena piutang ini masih tergolong baru dan memiliki kepastian pembayaran dari pemerintah provinsi, maka belum dilakukan penyisihan piutang atas tagihan ini sesuai dengan kebijakan akuntansi yang berlaku.

l) Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp20.086.156.169,96 mengalami kenaikan senilai Rp4.565.882.730,76 atau 29,42% dari Tahun 2024 senilai Rp15.520.273.439,20. Penyisihan ini dihitung berdasarkan aturan penggolongan kualitas piutang terbaru yang membedakan perlakuan untuk Pajak Daerah (*self assessment* maupun *official assessment*), Retribusi Daerah, dan piutang lainnya. Berikut penjelasan penerapan aturan tersebut pada setiap kelompok piutang:

(1) Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) senilai Rp15.538.412.885,00 dikelola dengan sistem *official assessment*. Berdasarkan aturan terbaru, penggolongan kualitasnya mempertimbangkan umur piutang dan perilaku wajib pajak. Dari analisis umur piutang yang merupakan akumulasi tunggakan sejak tahun 2013–2025, sebagian besar telah berumur lebih dari 5 tahun (kualitas macet) sehingga wajib dibentuk penyisihan 100%. Sisanya yang berumur 3–5 tahun masuk kualitas diragukan (penyisihan 50%), umur 1–2 tahun masuk kurang lancar (penyisihan 10%), dan umur kurang dari 1 tahun masuk lancar (penyisihan 0,5%). Dengan perhitungan tersebut, total penyisihan untuk Piutang PBB-P2 ditetapkan senilai Rp12.755.147.668,21.
(2) Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (tagihan air bersih) senilai Rp1.205.355.500,00 digolongkan berdasarkan aturan khusus retribusi. Aturan ini menetapkan kualitas lancar untuk umur 0–1 bulan, kurang lancar untuk umur 1–3 bulan, diragukan untuk umur 3–12 bulan, dan macet untuk umur lebih dari 12 bulan. Berdasarkan analisis umur piutang, diketahui bahwa sebagian tagihan telah berumur di atas 12 bulan (kualitas macet), sebagian lagi berumur 3–12 bulan (diragukan), dan sisanya berumur 1–3 bulan (kurang lancar). Dengan menerapkan persentase penyisihan sesuai aturan (0,5% untuk lancar, 10% kurang lancar, 50% diragukan, 100% macet), diperoleh total penyisihan senilai Rp257.120.253,75.

(3) Piutang Lain-lain PAD yang Sah terdiri dari dua jenis, yaitu Piutang Pendapatan Denda PBB-P2 senilai Rp6.904.258.748,00, seluruh tagihan telah berumur lebih dari 3 bulan (bahkan sudah bertahun-tahun) sehingga masuk kualitas macet dan dibentuk penyisihan 100% senilai Rp6.904.258.748,00. Untuk Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Alat senilai Rp187.200.000,00, berdasarkan analisis umur piutang, tagihan dengan umur 2 bulan (kualitas kurang lancar) senilai Rp11.645.000,00 disisihkan 10% atau Rp1.164.500,00, tagihan dengan umur 3 bulan (kualitas diragukan) senilai Rp14.180.000,00 disisihkan 50% atau Rp7.090.000,00, serta tagihan dengan umur lebih dari 3 bulan (kualitas macet) senilai Rp161.375.000,00 disisihkan 100% atau Rp161.375.000,00. Dengan demikian, total penyisihan untuk denda retribusi adalah Rp169.629.500,00, sehingga total penyisihan untuk Piutang Lain-lain PAD yang Sah adalah Rp7.073.888.248,00. Nilai tersebut didapatkan berdasarkan aturan kebijakan baru yaitu Piutang Selain Pajak dan Retribusi dikelompokkan berdasarkan umur tagihan: lancar jika kurang dari 1 bulan (penyisihan 0,5%), kurang lancar jika tepat 2 bulan (penyisihan 10%), diragukan jika tepat 3 bulan (penyisihan 50%), dan macet jika lebih dari 3 bulan (penyisihan 100%).

m) Beban Dibayar Dimuka

Beban Dibayar Dimuka Per 31 Desember 2025 Per 31 Desember 2025 Rp228.629.155,13 dari saldo yang merupakan premi asuransi kendaraan dinas roda empat. Premi ini dibayar di muka oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah untuk masa pertanggungan Juni 2025 sampai dengan Mei 2026. Sesuai dengan basis akrual, beban asuransi hanya diakui pada periode yang sudah lewat. Dengan demikian, untuk tahun 2025, beban asuransi yang diakui adalah periode Juni sampai dengan Desember 2025 (7 bulan). Sementara itu, sisa premi untuk periode Januari sampai dengan Mei 2026 (5 bulan) yang belum menjadi beban sampai dengan 31 Desember 2025 dicatat sebagai Beban Dibayar Dimuka senilai Rp228.629.155,13. Jumlah ini akan diakui sebagai beban asuransi secara bertahap pada tahun 2026 sesuai dengan berlalunya waktu.

n) Persediaan

Persediaan merupakan aset lancar berupa barang atau perlengkapan yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, serta barang yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan.

Saldo Persediaan Pemerintah Per 31 Desember 2025 senilai Rp10.035.497.188,67 atau mengalami penurunan senilai Rp630.356.425,68 atau 5,91% dibandingkan saldo per 31 Desember 2024 yang senilai Rp10.665.853.614,35. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pemakaian persediaan untuk kegiatan operasional serta identifikasi persediaan yang sudah tidak layak pakai.

Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan fisik, ditemukan persediaan obat yang telah kadaluwarsa (*expired*) di Puskesmas Tobadak dengan nilai Rp111.810.178,08. Obat-obatan tersebut berasal dari gudang farmasi Dinas Kesehatan yang dikirim dalam kondisi sudah mendekati tanggal kadaluwarsa dan jarang digunakan, sehingga hingga akhir tahun 2025 tidak termanfaatkan dan belum dimusnahkan. Pemerintah daerah akan segera memproses penghapusan barang dimaksud pada tahun 2026, termasuk melakukan pemusnahan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga nilai persediaan yang disajikan di neraca dapat mencerminkan barang yang benar-benar siap pakai. Atas saldo persediaan kadaluwarsa tersebut tidak tersaji sebagai saldo Persediaan per 31 Desember 2025.

Adapun rincian Persediaan dilihat pada *lampiran 8.*

2. Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan, Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2025 telah memiliki Investasi Jangka Panjang senilai Rp10.000.000.000,00, mengalami kenaikan senilai Rp4.000.000.000,00 atau 66,67% dari Tahun 2024 senilai Rp6.000.000.000,00.

a) Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Saldo Investasi Jangka Panjang Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang kepemilikannya berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah tidak memiliki saldo investasi jangka panjang non permanen.

b) Investasi Jangka Panjang Permanen

Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah memiliki Investasi Jangka Panjang Permanen berupa penyertaan modal pada PT. Bank Sulawesi Selatan dan Barat (Bank Sulselbar) yang bergerak di bidang jasa keuangan perbankan. Investasi ini direncanakan senilai Rp10.000.000.000,00 selama empat tahun mulai tahun 2021 hingga 2025. Realisasinya adalah Rp1.000.000.000,00 pada tahun 2021, Rp2.000.000.000,00 pada tahun 2022, Rp3.000.000.000,00 pada tahun 2023, tidak ada penganggaran di tahun 2024 karena keterbatasan anggaran akibat pembiayaan Pemilihan Kepala Daerah (PEMILUKADA), kemudian dilanjutkan pada tahun 2025 sSenilai Rp4.000.000.000,00. Dengan demikian, per 31 Desember 2025 total investasi yang telah direalisasikan adalah Rp10.000.000.000,00. Selama tahun 2025 daerah menerima dividen senilai Rp1.162.498.116,00 dari penyertaan modal tersebut, yang telah diakui sebagai Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.
Metode pencatatan atas investasi tersebut menggunakan metode biaya atau *cost method* dikarenakan nilai proporsi kepemilikan saham pada PT Bank Sulselbar hanya senilai 0,27%.

3. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi yang digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber sebagian atau seluruhnya dari APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya, serta sitaan atau rampasan.

Saldo aset tetap yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah per 31 Desember 2025 senilai Rp1.118.324.158.291,99, mengalami penurunan senilai Rp203.685.967.299,50 atau 15,41% dari saldo aset per 31 Desember 2024 senilai Rp1.322.010.125.591,49. Rincian aset tetap Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 7. 48
Rincian Aset tetap

Dalam Rupiah

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Tanah	77.273.517.037,00	67.787.756.175,00	9.485.760.862,00	13,99
2	Peralatan dan mesin	316.133.746.124,21	311.380.597.717,34	4.753.148.406,87	1,53
3	Gedung dan Bangunan	684.550.193.693,06	610.628.683.427,77	73.921.510.265,29	12,11
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.125.160.259.754,04	1.114.859.229.056,45	10.301.030.697,59	0,92
5	Aset tetap Lainnya	8.949.488.740,01	9.616.240.817,91	(666.752.077,90)	(6,93)
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	41.950.516.092,76	36.845.057.769,67	5.105.458.323,09	13,86
7	Akumulasi Penyusutan	(1.135.693.563.149,09)	(829.107.439.372,65)	(306.586.123.776,44)	36,98
Jumlah		**1.118.324.158.291,99**	**1.322.010.125.591,49**	**(203.685.967.299,50)**	**(15,41)**

a) Tanah

Tanah menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga pembelian serta biaya untuk memperoleh hak dan biaya yang berhubungan dengan pengukuran.

Saldo aset tetap tanah per 31 Desember 2025 senilai Rp77.273.517.037,00 mengalami kenaikan senilai Rp9.485.760.862,00 atau 13,99% dari saldo aset tetap tanah per 31 Desember 2024 senilai Rp67.787.756.175,00, Rincian Aset tetap tanah senilai Rp77.273.517.037,00 pada OPD per 31 Desember 2025, sebagaimana diuraikan pada *lampiran 9.*

Tabel 7. 49
Rincian Penambahan/Pengurangan Aset tetap Tanah

Dalam Rupiah

Uraian	Saldo Akhir 31 Desember 2024	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 31 Desember 2025
Tanah	67.787.756.175,00	9.614.442.042,00	128.681.180,00	77.273.517.037,00

1) Penambahan Aset tetap Tanah senilai Rp9.614.442.042,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 7. 50
Rincian Penambahan Aset tetap Tanah pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah

Dalam Rupiah

No	Nama SKPD	Mutasi Tambah
1	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan	6.009.524.470,00
2	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	256.313.960,00
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	523.741.297,00
4	Dinas Sosial	2.700.000.000,00
5	Dinas Lingkungan Hidup	124.862.315,00
Total		**9.614.442.042,00**

Adapun penjelasan penambahan aset tetap tanah Tahun Anggaran 2025 senilai Rp9.614.442.042,00 terdiri dari:

(a) Realisasi Belanja Modal
Penambahan Aset Tetap Tanah dari realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 senilai Rp6.364.747.767,00 merupakan belanja modal tanah yang telah direalisasikan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah.

(b) Penerimaan Hibah
Penambahan Aset Tetap Tanah dari penerimaan hibah senilai Rp2.956.313.960,00 merupakan tanah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dari pihak ketiga/masyarakat berdasarkan dokumen hibah dan/atau dokumen penyerahan lainnya. Atas tanah yang diterima tersebut telah dilakukan pencatatan sebagai Barang Milik Daerah dan disajikan sebagai Aset Tetap Tanah pada Neraca per 31 Desember 2025. Rincian penerimaan hibah Aset Tetap Tanah dimaksud dapat dijelaskan sebagai berikut :

(1) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menerima hibah sebidang tanah senilai Rp256.313.960,00 berasal dari :
   a. Sebidang tanah dari masyarakat an. H. Aras Tammauni, SE dengan luas 25x50 meter persegi dengan nomor : 01/SKHT/Ds.TBD/I/2012 tanggal 13 Januari 2012, dihargai berdasarkan nilai NJOP Rp94.318,00 ditahun 2025, sehingga nilai perolehan yang dicatat senilai Rp103.750.000,00 dan dipergunakan untuk balai penyuluh KB Desa Tobadak Kecamatan Tobadak;
   b. Sebidang tanah dari masyarakat an. Miseran dengan luas 22x30 meter persegi dengan nomor : 141/D.KB/X/2012 tanggal 15 Oktober 2012, dihargai berdasarkan nilai NJOP Rp83.000,00 ditahun 2025, sehingga nilai perolehan yang dicatat senilai Rp54.780.000,00 dan dipergunakan untuk balai penyuluh KB, Baruga KB Desa Kabubu Kecamatan Topoyo;
   c. Sebidang tanah dari masyarakat an. Muh. Arifin dengan luas 600 meter persegi dengan nomor : 593/011/DPP/IV/2016 tanggal 14 April 2016, dihargai berdasarkan nilai NJOP Rp83.000,00 ditahun 2025, sehingga nilai perolehan yang dicatat senilai Rp49.800.000,00 dan dipergunakan untuk balai penyuluh KB Dusun Mekarsari Desa Polo Pangale Kecamatan Pangale;
   d. Sebidang tanah dari masyarakat an. H. Suhardi,S. Pd.,M.Pd (Kepala SMPN 1 Budong-budong) dengan luas dengan luas 9,3x18,4 meter persegi dengan nomor : - tanggal 10 Januari 2022, dihargai berdasarkan nilai NJOP Rp83.000,00 ditahun 2025, sehingga nilai perolehan yang dicatat senilai Rp14.202.960,00 dan dipergunakan untuk balai penyuluh KB Dusun Panggajoang Desa Babana Kecamatan Budong-budong;
   e. Sebidang tanah dari masyarakat an. TAUFIK S (Kepala Desa Kadaila) dengan luas 407 meter persegi dengan nomor : 206/011/DPP/I/2018 tanggal 05 Januari 2018, dihargai berdasarkan nilai NJOP Rp83.000,00 ditahun 2025, sehingga nilai perolehan yang dicatat senilai Rp33.781.000,00 dan dipergunakan untuk balai penyuluh KB Desa Kadaila Kecamatan Karossa.

(2) Pada Dinas Sosial menerima hibah sebidang tanah dari masyarakat an. Adnan Sahrir dengan luas 75.000 Meter persegi dengan nomor : 097/597-SH/DK/V/2025

tanggal 27 Mei 2025, dihargai berdasarkan nilai NJOP Rp36.000,00 ditahun 2025, sehingga nilai perolehan yang dicatat senilai Rp2.700.000.000,00 dan dipergunakan untuk Pembangunan Sekolah Rakyat, Durikumba, Desa Karossa Kecamatan Karossa.

(c) Reklasifikasi antar KIB

Penambahan Aset Tetap Tanah dari reklasifikasi antar KIB senilai Rp124.862.315,00 merupakan reklasifikasi aset dari Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang merupakan Penimbunan pada Lokasi TPA (Tempat Pembuangan Akhir) pada Dinas Lingkungan Hidup.

(d) Koreksi dari Belanja Barang dan Jasa

Koreksi dari Belanja Barang dan Jasa Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan senilai Rp168.518.000,00 merupakan koreksi atas kesalahan penganggaran dan pencatatan belanja pada Tahun Anggaran 2025. Berdasarkan hasil pemeriksaan, terdapat realisasi Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan, Ganti Rugi dan Santunan Tanaman Tumbuh serta Benda-Benda di Atasnya yang semula dianggarkan dan dicatat pada rekening Belanja Barang dan Jasa, yaitu Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan. Berdasarkan substansi transaksi dan dokumen pendukung, belanja tersebut merupakan pengeluaran yang berhubungan langsung dengan perolehan tanah dan seharusnya dikapitalisasi sebagai bagian dari nilai Aset Tetap Tanah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah melakukan koreksi dengan mereklasifikasi nilai belanja tersebut dari Belanja Barang dan Jasa menjadi penambahan Aset Tetap Tanah.

2) Pengurangan Aset tetap Tanah senilai Rp128.681.180,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 7. 51
Rincian Pengurangan Aset tetap Tanah pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah

Dalam Rupiah

No	Nama SKPD	Mutasi Kurang
1	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan	128.681.180,00
	Total	**128.681.180,00**

Adapun penjelasan Pengurangan aset tetap tanah Tahun Anggaran 2025 senilai Rp128.681.180,00 terdiri dari:

(a) Kesalahan Penganggaran

Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan, pengurangan Aset Tetap Tanah dari kesalahan penganggaran senilai Rp54.033.680,00 merupakan koreksi atas realisasi belanja modal yang sebelumnya dianggarkan dan dicatat sebagai bagian dari perolehan Aset Tetap Tanah. Berdasarkan hasil penelaahan dokumen dan substansi transaksi, belanja tersebut merupakan biaya perjalanan dinas yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi sebagai Aset Tetap Tanah, sehingga tidak dapat menambah nilai Aset Tetap Tanah. Atas koreksi tersebut, nilai Aset Tetap Tanah dikurangi dan direklasifikasi sesuai dengan substansi belanja yang sebenarnya.Reklasifikasi antar KIB dan

Berasal dari reklasifikasi antar KIB senilai Rp74.647.500,00 merupakan koreksi atas pengadaan papan plang yang sebelumnya dicatat dan dianggarkan menggunakan belanja modal tanah. Berdasarkan hasil penelaahan dokumen dan substansi barang, papan plang tersebut tidak memenuhi karakteristik sebagai Aset Tetap Tanah. Aset dimaksud lebih tepat diklasifikasikan sebagai Aset Tetap Peralatan dan Mesin, karena merupakan barang berwujud yang memiliki bentuk fisik tersendiri, dapat digunakan untuk menunjang kegiatan operasional, dan bukan merupakan bagian dari perolehan tanah. Atas koreksi tersebut, nilai Aset Tetap Tanah dikurangi senilai Rp74.647.500,00 dan direklasifikasi ke kelompok Aset Tetap Peralatan dan Mesin sesuai dengan jenis dan karakteristik barang.

Penambahan/Pengurangan Aset tetap		
Tanah		
Saldo Akhir 2024	**Rp**	**67.787.756.175,00**
Mutasi Tahun 2025		
Penambahan :		
- Realisasi belanja modal	Rp	6.364.747.767,00
- Terima Hibah	Rp	2.956.313.960,00
- Reklasifikasi Antar KIB	Rp	124.862.315,00
- Koreksi dari Barjas	Rp	168.518.000,00
Sub. Total Penambahan	**Rp**	**9.614.442.042,00**
Pengurangan :		
- Kesalahan Penganggaran	Rp	54.033.680,00
- Reklasifikasi Antar KIB	Rp	74.647.500,00
Sub. Total Pengurangan	**Rp**	**128.681.180,00**
Saldo Akhir 2025	**Rp**	**77.273.517.037,00**

Untuk menentukan nilai catat tanah Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah belum memiliki tenaga ahli penilai tanah, hanya berdasarkan dengan nilai perolehan dan disesuaikan dengan Nilai Jual Objek pajak (NJOP).

Dalam hal pengungkapan properti investasi Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah telah melaksanakan pemetaan daftar aset yang memenuhi standarisasi dalam properti investasi sesuai PSAP 17. Jika terdapat tanah idle yang masuk dalam kategori properti investasi, PSAP 17 mungkin mengharuskan entitas tersebut untuk merekam nilai aset tersebut dengan cara yang berbeda. Properti investasi biasanya diukur dengan nilai wajar, yang mungkin berubah dari waktu ke waktu tergantung pada faktor-faktor seperti permintaan pasar, kondisi ekonomi, dan perubahan regulasi. Jika terdapat tanah idle yang termasuk dalam kategori properti investasi, maka pencatatan tanah tersebut akan disesuaikan berdasarkan standar akuntansi perubahan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah.

Kurangnya Pencatatan Terkait Tanah dibawah Jalan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah berdasarkan identifikasi dan verifikasi dokumen pendukung sebagai dasar dalam melakukan pencatatan, ditemukan berbagai permasalahan yang diantaranya adalah data pelimpahan dari Pemerintah Kabupaten Mamuju tidak didukung oleh bukti alas hak atau sumber perolehan lainnya yang sah sehingga menyebabkan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah tidak dapat memberikan informasi secara valid.

Pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah terdapat 568 bidang tanah dengan nilai senilai Rp77.104.999.037,00 yang tercatat dalam daftar barang tanah dari jumlah tersebut, 289 bidang tanah senilai Rp25.647.562.550,61 telah memiliki sertifikat hak atas tanah, sedangkan 279 bidang tanah lainnya senilai Rp51.457.436.486,39 belum memiliki sertifikat, namun telah tercatat dalam KIB Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah.

b) Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin adalah mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Adapun Batasan minimal kapitalisasi aset tetap (*capitalization thresholds*) ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 7. 52
Batasan Kapitalisasi Untuk Pengadaan Baru Untuk Peralatan dan Mesin

No	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
1.3.2	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	
1.3.2.01	Alat Besar	1.000.000
1.3.2.02	Alat Angkutan	1.000.000
1.3.2.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	1.000.000
1.3.2.04	Alat Pertanian	300.000
1.3.2.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	300.000
1.3.2.06	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	300.000

No	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
1.3.2.07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	1.000.000
1.3.2.08	Alat Laboratorium	1.000.000
1.3.2.09	Alat Persenjataan	1.000.000
1.3.2.10	Komputer	1.000.000
1.3.2.11	Alat Eksplorasi	1.000.000
1.3.2.12	Alat Pengeboran	1.000.000
1.3.2.13	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	1.000.000
1.3.2.14	Alat Bantu Eksplorasi	1.000.000
1.3.2.15	Alat Bantu Keselamatan Kerja	300.000
1.3.2.16	Alat Peraga	300.000
1.3.2.17	Peralatan Proses/Produksi	1.000.000
1.3.2.18	Rambu-Rambu	l.000.000
1.3.2.19	Peralatan Olah Raga	300.000

Saldo Aset tetap Peralatan dan Mesin per tanggal 31 Desember 2025 senilai Rp316.133.746.124,21 mengalami kenaikan senilai Rp4.753.148.406,87 atau 1,53% dari saldo Aset tetap Peralatan dan Mesin per tanggal 31 Desember 2024 senilai Rp311.380.597.717,34. Akumulasi penyusutan aset tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 senilai (Rp273.829.497.962,07), sehingga nilai buku pada tanggal pelaporan senilai Rp42.304.248.162,14. Rincian Aset tetap Peralatan dan Mesin pada SKPD per 31 Desember 2025, sebagaimana diuraikan pada *lampiran 10.*

Tabel 7. 53
Penambahan/pengurangan Aset tetap Peralatan dan Mesin

Dalam Rupiah

Uraian	Saldo Akhir 31 Desember 2024	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 31 Desember 2025
Peralatan dan Mesin	311.380.597.717,34	18.602.726.551,00	13.849.578.144,13	316.133.746.124,21

1. Penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp18.602.726.551,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 7. 54
Rincian Penambahan Aset tetap Peralatan dan Mesin

Dalam Rupiah

No	Nama SKPD	Tambah
1	Sekretariat DPRD	775.710.001,00
2	Sekretariat Daerah	2.566.711.650,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	128.371.500,00
4	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan	109.972.500,00
5	Dinas Perhubungan	139.473.001,00
6	Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian	596.919.450,00
7	Dinas Kesehatan	3.218.690.703,00
8	Puskesmas Pangale	76.013.707,00
9	Puskesmas Polocamba	67.026.500,00
10	Puskesmas Salugatta	63.081.500,00
11	Puskesmas Babana	118.386.500,00
12	Puskesmas Tobadak	102.399.120,00
13	Puskesmas Saloadak	23.776.500,00
14	Puskesmas Batuparigi	33.160.000,00
15	Puskesmas Topoyo	343.727.500,00
16	Puskesmas Salupangkang	77.292.000,00
17	Puskesmas Lara	99.566.250,00
18	Puskesmas Durikumba	107.667.500,00
19	Rumah Sakit Umum Daerah	1.102.988.650,00
20	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	6.584.500,00
21	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	4.998.539.958,00
22	Dinas Sosial	30.000.000,00
23	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	34.393.505,00
24	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	20.525.129,00

No	Nama SKPD	Tambah
25	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	37.182.000,00
26	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	147.090.000,00
27	Dinas Perikanan	82.459.000,00
28	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Perindustrian Dan Perdagangan	24.468.000,00
29	Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah	314.309.000,00
30	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	82.690.000,00
31	Inspektorat	603.453.220,00
32	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan	61.785.000,00
33	Dinas Lingkungan Hidup	2.027.154.890,00
34	Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata	282.111.567,00
35	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	1.500.000,00
36	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	13.500.000,00
37	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	24.446.250,00
38	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	8.300.000,00
39	Kecamatan Pangale	7.500.000,00
40	Kecamatan Topoyo	24.800.000,00
41	Kecamatan Budong-Budong	9.000.000,00
42	Kecamatan Tobadak	10.000.000,00
Total		**18.602.726.551,00**

Adapun penjelasan penambahan aset tetap peralatan dan mesin Tahun Anggaran 2025 senilai Rp18.602.726.551,00 sebagai berikut:

(a) Realisasi Belanja Modal

Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 senilai Rp15.372.942.512,00 merupakan pengadaan peralatan dan mesin yang telah direalisasikan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah.

(b) Penerimaan Hibah

Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp626.380.571,00 merupakan aset peralatan dan mesin yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah, sebagai Barang Milik Daerah dan disajikan sebagai Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Neraca per 31 Desember 2025. Rincian penerimaan hibah Aset Tetap Peralatan dan mesin dimaksud dapat dijelaskan sebagai berikut :

(1) Pada Dinas Kesehatan menerima hibah berupa barang Freeze Free Cold Box berasal dari Kementrian Kesehatan senilai Rp3.658.635,00 dengan nomor : KN.01.08/C.IV/2608/2025 tanggal 15 agustus 2025 dan telah dicatat pada aplikasi e-BMD.

(2) Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdapat penerimaan hibah dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah berupa Program Revitalisasi Satuan Pendidikan senilai Rp622.721.936,00. Penerimaan hibah tersebut berdasarkan dokumen sebagai berikut:

a. Surat Keputusan Direktur Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 0972/C2/DM.00.01/2025 tanggal 2 Juni 2025 tentang Penetapan Sasaran Program Revitalisasi Satuan PAUD Tahap 2 Tahun 2025;

b. Surat Keputusan Direktur Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1207/C3/HK.03.01/2025 tanggal 13 Juni 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1020/C3/DM.00.00/2025 tentang Penetapan Sasaran dan Menu Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Tahun 2025 Angkatan 2; dangSurat Keputusan Direktur Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 2061/C4/DM.00.03/2025 tanggal 5 Agustus 2025 tentang Penetapan Sasaran dan Menu Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Tahun 2025 Tahap 3.g

Per 31 Desember 2025, Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah telah melakukan pencatatan atas sebagian barang hasil Program Revitalisasi Satuan Pendidikan yang diserahkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada aplikasi SIPD E-BMD. Namun demikian, berdasarkan Berita Acara Serah Terima yang diperlihatkan oleh masing-masing satuan pendidikan penerima, tidak seluruh pekerjaan revitalisasi telah diselesaikan sampai dengan 31 Desember 2025.

Selain itu, masih terdapat barang hasil pekerjaan revitalisasi yang belum dilakukan pencatatan pada aplikasi SIPD E-BMD per 31 Desember 2025, karena dokumen Berita Acara Serah Terima atas barang tersebut diterbitkan pada bulan Januari 2026. Atas barang yang Berita Acara Serah Terimanya diterbitkan pada Tahun 2026, pencatatan sebagai Barang Milik Daerah akan dilakukan pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan dokumen sumber dan ketentuan pencatatan Barang Milik Daerah yang berlaku.

(c) Reklasifikasi dari barang dan jasa

Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari reklasifikasi Barang dan Jasa senilai Rp24.056.450,00 merupakan koreksi atas realisasi belanja yang semula dicatat sebagai Belanja Barang dan Jasa, namun berdasarkan hasil penelaahan dokumen dan substansi transaksi memenuhi kriteria sebagai Aset Tetap Peralatan dan Mesin. Sehingga Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian melakukan pencatatan pada aplikasi e-BMD yang bersumber dari realisasi belanja barang dan jasa.

(d) Reklasifikasi Antar KIB (APBD)

Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari reklasifikasi antar KIB yang bersumber dari APBD senilai Rp1.535.946.144,00 merupakan pemindahan pencatatan aset dari kelompok KIB lainnya ke kelompok Aset Tetap Peralatan dan Mesin berdasarkan hasil penelusuran dan rekonsiliasi data Barang Milik Daerah.

Reklasifikasi tersebut terdiri dari reklasifikasi dari Aset Tetap Tanah senilai Rp74.647.500,00, dari Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp241.869.000,00, dari Gedung dan Bangunan senilai Rp138.461.567,00, dari Aset Lainnya senilai Rp993.601.827,00, serta dari Aset Tetap Lainnya senilai Rp87.366.250,00.

Reklasifikasi tersebut dilakukan karena berdasarkan hasil penelaahan dokumen, jenis barang, dan karakteristik aset, barang dimaksud lebih tepat disajikan sebagai Aset Tetap Peralatan dan Mesin. Reklasifikasi antar KIB tersebut tidak menambah nilai Aset Tetap secara keseluruhan, melainkan merupakan pemindahan penyajian nilai aset antar kelompok aset tetap agar sesuai dengan substansi, jenis, dan karakteristik barang. Rincian reklasifikasi antar KIB APBD ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7. 55
Rincian Reklasifikasi Aset Tetap ke Peralatan dan Mesin

Dalam Rupiah

No	Nama OPD/Unit Kerja	Reklasifikasi dari	Reklasifikasi Ke	Nilai
1	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan	Tanah	Peralatan dan Mesin	74.647.500,00
2	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Peralatan dan Mesin	92.352.000,00
3	Dinas Lingkungan Hidup	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Peralatan dan Mesin	149.517.000,00
4	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	Gedung dan Bangunan	Peralatan dan Mesin	138.461.567,00
5	Puskesmas Pangale	Aset Lainnya	Peralatan dan Mesin	75.117.207,00
6	Puskesmas Polocamba	Aset Lainnya	Peralatan dan Mesin	63.800.000,00
7	Puskesmas Salugatta	Aset Lainnya	Peralatan dan Mesin	59.155.000,00
8	Puskesmas Babana	Aset Lainnya	Peralatan dan Mesin	113.760.000,00
9	Puskesmas Tobadak	Aset Lainnya	Peralatan dan Mesin	94.572.620,00
10	Puskesmas Saloadak	Aset Lainnya	Peralatan dan Mesin	21.200.000,00
11	Puskesmas Batuparigi	Aset Lainnya	Peralatan dan Mesin	33.160.000,00
12	Puskesmas Topoyo	Aset Lainnya	Peralatan dan Mesin	342.727.500,00
13	Puskesmas Salupangkang	Aset Lainnya	Peralatan dan Mesin	75.942.000,00
14	Puskesmas Lara	Aset Lainnya	Peralatan dan Mesin	8.000.000,00

No	Nama OPD/Unit Kerja	Reklasifikasi dari	Reklasifikasi Ke	Nilai
15	Puskesmas Lara	Aset Tetap Lainnya	Peralatan dan Mesin	87.366.250,00
16	Puskesmas Durikumba	Aset Lainnya	Peralatan dan Mesin	106.167.500,00
Total				**1.535.946.144,00**

(e) Reklasifikasi Antar KIB Dana BOS

Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari reklasifikasi antar KIB yang bersumber dari Dana BOS senilai Rp123.414.900,00 merupakan pemindahan pencatatan aset dari kelompok Aset Tetap Lainnya ke kelompok Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada satuan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Reklasifikasi tersebut dilakukan karena berdasarkan hasil penelusuran, rekonsiliasi, serta penelaahan atas jenis dan karakteristik barang, aset yang semula dicatat pada kelompok Aset Tetap Lainnya lebih tepat disajikan sebagai Aset Tetap Peralatan dan Mesin. Reklasifikasi antar KIB Dana BOS tersebut tidak menambah nilai Aset Tetap secara keseluruhan, melainkan hanya memindahkan penyajian nilai aset antar kelompok aset tetap agar sesuai dengan substansi, jenis, dan karakteristik barang. Rincian reklasifikasi antar KIB Dana BOS ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7. 56
Rincian Rekalsifikasi Antar KIB Dana BOS Aset Tetap Peralatan dan Mesin

No	Nama UPB	Reklasifikasi dari	Reklasifikasi Ke	Nilai
1	UPTD SD Inpres Bayor	Aset Tetap Lainnya	Peralatan dan Mesin	6.600.000,00
2	UPTD SDN Sinabatta	Aset Tetap Lainnya	Peralatan dan Mesin	4.000.000,00
3	UPTD SD Inpres Tabolang	Aset Tetap Lainnya	Peralatan dan Mesin	600.000,00
4	UPTD SD Inpres Ngapaboa	Aset Tetap Lainnya	Peralatan dan Mesin	5.000.000,00
5	UPTD SDK Salunusu	Aset Tetap Lainnya	Peralatan dan Mesin	1.500.000,00
6	UPTD SDK Tanjung Lallere	Aset Tetap Lainnya	Peralatan dan Mesin	1.400.000,00
7	UPTD SMPN 6 Topoyo	Aset Tetap Lainnya	Peralatan dan Mesin	7.034.900,00
8	UPTD SD Inpres Batu Parigi	Aset Tetap Lainnya	Peralatan dan Mesin	7.939.000,00
9	UPTD SD Inpres Tasantung	Aset Tetap Lainnya	Peralatan dan Mesin	2.500.000,00
10	UPTD SMP Negeri 2 Tobadak	Aset Tetap Lainnya	Peralatan dan Mesin	29.226.000,00
11	UPTD SMP Negeri 5 Tobadak	Aset Tetap Lainnya	Peralatan dan Mesin	3.765.000,00
12	UPTD SDN Bulu Rembu	Aset Tetap Lainnya	Peralatan dan Mesin	2.600.000,00
13	UPTD SD Inpres Salumanurung	Aset Tetap Lainnya	Peralatan dan Mesin	5.000.000,00
14	UPTD SMPN 7 Budong-Budong	Aset Tetap Lainnya	Peralatan dan Mesin	2.000.000,00
15	UPTD SMP Negeri 6 Budong-Budong	Aset Tetap Lainnya	Peralatan dan Mesin	23.630.000,00
16	UPTD SD Negeri Kombiling	Aset Tetap Lainnya	Peralatan dan Mesin	4.500.000,00
17	UPTD SD Inpres Karama	Aset Tetap Lainnya	Peralatan dan Mesin	1.180.000,00
18	UPTD SMP Negeri 3 Pangale	Aset Tetap Lainnya	Peralatan dan Mesin	14.940.000,00
Total				**123.414.900,00**

(f) Reklasifikasi dari Barang dan Jasa Dana BOS

Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari reklasifikasi Barang dan Jasa bersumber dari Dana BOS senilai Rp21.555.000,00 merupakan koreksi atas belanja yang bersumber dari Dana BOS yang semula dicatat sebagai Barang dan Jasa, namun berdasarkan hasil penelaahan dokumen dan substansi transaksi memenuhi kriteria kapitalisasi sebagai Aset Tetap Peralatan dan Mesin. Reklasifikasi tersebut dilakukan karena barang yang diperoleh dari belanja dimaksud memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan, digunakan untuk menunjang kegiatan operasional satuan pendidikan, serta lebih tepat disajikan sebagai Aset Tetap Peralatan dan Mesin. Rincian reklasifikasi dari Barang dan Jasa Dana BOS ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7. 57
Rincian Reklasifikasi Barang dan Jasa Dana BOS ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin

No	Nama UPB	Reklasifikasi dari	Reklasifikasi Ke	Nilai
1	UPTD SDK Kalubibing	Barang dan Jasa	Peralatan dan Mesin	2.000.000,00
2	UPTD SD Inpres Salupangkang IV	Barang dan Jasa	Peralatan dan Mesin	1.200.000,00
3	UPTD SD Inpres Salupangkang	Barang dan Jasa	Peralatan dan Mesin	5.950.000,00
4	UPTD SDN Kamansi	Barang dan Jasa	Peralatan dan Mesin	3.500.000,00
5	UPTD SDK Sampolotu	Barang dan Jasa	Peralatan dan Mesin	1.500.000,00
6	UPTD SMPN 3 Pangale	Barang dan Jasa	Peralatan dan Mesin	7.405.000,00
Total				**21.555.000,00**

(g) Koreksi Ekstrakomptabel ke Intrakomptabel

Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari koreksi ekstrakomptabel ke intrakomptabel senilai Rp898.430.974,00 merupakan koreksi pencatatan atas barang yang sebelumnya disajikan sebagai aset ekstrakomptabel. Sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah terkait pengakuan dan batas kapitalisasi aset tetap, terdapat barang yang berdasarkan nilai perolehan, masa manfaat, dan karakteristik aset memenuhi kriteria untuk dicatat sebagai aset intrakomptabel. Atas kondisi tersebut, dilakukan koreksi pencatatan dari ekstrakomptabel ke intrakomptabel dan disajikan sebagai penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Neraca per 31 Desember 2025. Rincian koreksi ekstrakomptabel ke intrakomptabel Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7. 58
Rincian Koreksi Ekstrakomptabel ke Intrakomptabel Aset Tetap peralatan dan Mesin

No	SKPD	Nilai Perolehan
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10.000.000,00
2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	20.785.000,00
3	Dinas Kesehatan	56.320.000,00
4	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	86.684.000,00
5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	5.400.000,00
6	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	17.900.000,00
7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	468.070.973,00
8	Dinas Perhubungan	91.523.001,00
9	Dinas Perikanan	19.314.000,00
10	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	8.300.000,00
11	Dinas Sosial	11.000.000,00
12	Kecamatan Budong-Budong	1.500.000,00
13	Puskesmas Babana	4.626.500,00
14	Puskesmas Durikumba	1.500.000,00
15	Puskesmas Lara	4.200.000,00
16	Puskesmas Pangale	896.500,00
17	Puskesmas Polocamba	3.226.500,00
18	Puskesmas Saloadak	2.576.500,00
19	Puskesmas Salugatta	3.926.500,00
20	Puskesmas Salupangkang	1.350.000,00
21	Puskesmas Tobadak	7.826.500,00
22	Puskesmas Topoyo	1.000.000,00
23	Rumah Sakit Umum Daerah	58.175.000,00
24	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	4.500.000,00
25	Sekretariat Daerah	5.330.000,00
26	Sekretariat DPRD	2.500.000,00
Total		**898.430.974,00**

1) Pengurangan aset tetap peralatan dan mesin senilai Rp13.849.578.144,13 dapat dilihat pada rincian tabel berikut:

Tabel 7. 59
Rincian Pengurangan Aset tetap Peralatan dan mesin

Dalam Rupiah

No	Nama SKPD	Kurang
1	Sekretariat DPRD	44.715.000,00
2	Sekretariat Daerah	2.082.831.247,74
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	355.359.524,00
4	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan	124.948.100,00
5	Dinas Perhubungan	147.129.500,00
6	Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian	29.750.000,00
7	Dinas Kesehatan	1.591.905.512,22
8	Puskesmas Pangale	231.287.664,28
9	Puskesmas Polocamba	158.887.948,08
10	Puskesmas Salugatta	281.644.981,10
11	Puskesmas Babana	176.513.002,53
12	Puskesmas Tobadak	218.374.785,61
13	Puskesmas Saloadak	232.333.090,42
14	Puskesmas Batuparigi	40.850.373,95
15	Puskesmas Topoyo	365.936.094,54
16	Puskesmas Salupangkang	278.174.559,75
17	Puskesmas Lara	274.211.124,34
18	Puskesmas Durikumba	246.303.993,66
19	Rumah Sakit Umum Daerah	4.502.267.032,14
20	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	9.286.400,00
21	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	1.320.152.254,77
22	Dinas Sosial	700.000,00
23	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	800.000,00
24	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	37.812.000,00
25	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	57.841.675,00
26	Dinas Perikanan	6.240.000,00
27	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Perindustrian Dan Perdagangan	34.293.000,00
28	Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah	105.035.999,99
29	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	34.300.000,00
30	Inspektorat	2.400.000,00
31	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan	3.294.480,00
32	Dinas Lingkungan Hidup	547.766.000,00
33	Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata	129.100.000,00
34	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.050.000,00
35	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	775.000,00
36	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	19.650.000,00
37	Kecamatan Pangale	10.400.000,00
38	Kecamatan Topoyo	65.500.000,00
39	Kecamatan Budong-Budong	800.000,00
40	Kecamatan Tobadak	20.407.800,00
41	Kecamatan Karossa	58.550.000,00

No	Nama SKPD	Kurang
	Total	**13.849.578.144,13**

Adapun penjelasan pengurangan aset tetap peralatan dan mesin Tahun Anggaran 2025 senilai Rp13.849.578.144,13 sebagai berikut :

(a) Ekstrakom dari Pengadaan APBD

Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari ekstrakom pengadaan APBD senilai Rp178.603.820,00 merupakan koreksi atas barang hasil pengadaan APBD Tahun Anggaran 2025 yang sebelumnya tercatat sebagai Aset Tetap Peralatan dan Mesin intrakomptabel. Berdasarkan hasil penelaahan nilai perolehan, jenis barang, masa manfaat, dan ketentuan batas kapitalisasi aset tetap, terdapat barang-barang hasil pengadaan yang nilai perolehannya tidak memenuhi batas kapitalisasi sebagai aset tetap intrakomptabel. Oleh karena itu, barang dimaksud dikeluarkan dari pencatatan Aset Tetap Peralatan dan Mesin intrakomptabel dan dicatat sebagai barang ekstrakomptabel. Koreksi tersebut tidak menghapus keberadaan fisik barang, melainkan hanya mengubah klasifikasi pencatatan dari aset tetap intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel sesuai dengan ketentuan kebijakan akuntansi yang berlaku. Rincian ekstrakom dari pengadaan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7. 60
Rincian Ekstrakomptabel dari Pengadaan APBD

No	OPD/Unit Kerja	Jumlah Barang	Nilai
1	Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah	2	1.200.000,00
2	Dinas Kesehatan	4	520.000,00
3	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	9	2.250.000,00
4	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan	1	812.000,00
5	Dinas Lingkungan Hidup	7	5.250.000,00
6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	37	7.277.950,00
7	Dinas Perikanan	1	600.000,00
8	Kecamatan Pangale	50	7.500.000,00
9	Puskesmas Babana	12	5.760.000,00
10	Puskesmas Batuparigi	17	6.410.000,00
11	Puskesmas Durikumba	93	20.730.000,00
12	Puskesmas Lara	10	6.720.250,00
13	Puskesmas Pangale	12	5.700.000,00
14	Puskesmas Polocamba	3	1.650.000,00
15	Puskesmas Saloadak	4	1.700.000,00
16	Puskesmas Salugatta	35	8.175.000,00
17	Puskesmas Salupangkang	14	8.076.000,00
18	Puskesmas Tobadak	42	14.457.620,00
19	Puskesmas Topoyo	67	42.804.000,00
20	Rumah Sakit Umum Daerah	25	13.156.000,00
21	Sekretariat DPRD	80	17.855.000,00
	Total	**525**	**178.603.820,00**

(b) Reklas ke barang dan jasa APBD

Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari reklasifikasi ke Barang dan Jasa APBD senilai Rp179.553.201,00 merupakan koreksi atas realisasi belanja yang sebelumnya dicatat sebagai Aset Tetap Peralatan dan Mesin. Berdasarkan hasil penelaahan dokumen dan substansi transaksi, belanja tersebut tidak memenuhi kriteria kapitalisasi sebagai aset tetap, sehingga direklasifikasi ke Beban Barang dan Jasa dan/atau beban lainnya sesuai dengan substansi belanja yang sebenarnya.

Reklasifikasi tersebut terdiri dari belanja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp153.053.201,00 dan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset

Daerah senilai Rp26.500.000,00. Rincian reklasifikasi ke Barang dan Jasa APBD Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7. 61
Rincian Reklasifikasi ke Barang dan Jasa

No	Nama OPD	Reklasifikasi dari	Reklasifikasi Ke	Jumlah Barang	Nilai
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Belanja Modal Peralatan Permainan	Beban Barang dan Jasa	175	152.678.193,00
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	Beban Barang dan Jasa	2	375.008,00
3	Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	2	22.000.000,00
4	Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Beban Barang dan Jasa	2	4.500.000,00
Total				**181**	**179.553.201,00**

(c) Reklas kurang antar KIB APBD

Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari reklasifikasi kurang antar KIB APBD senilai Rp1.614.100.000,00 merupakan pemindahan pencatatan aset dari kelompok Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke kelompok aset tetap lainnya yang lebih sesuai berdasarkan jenis, fungsi, dan karakteristik aset.

Reklasifikasi tersebut dilakukan berdasarkan hasil penelusuran, rekonsiliasi, serta penelaahan dokumen Barang Milik Daerah. Berdasarkan hasil penelaahan, terdapat aset yang sebelumnya tercatat pada kelompok Peralatan dan Mesin, namun secara substansi lebih tepat disajikan pada kelompok Jalan, Irigasi dan Jaringan serta Gedung dan Bangunan. Rincian reklasifikasi kurang antar KIB APBD Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7. 62
Rincian Reklasifikasi Kurang antar KIB

Dalam Rupiah

No	Nama OPD	Reklasifikasi dari	Reklasifikasi Ke	Jumlah Barang	Nilai
1	Dinas Kesehatan	Peralatan dan Mesin	Jalan, Irigasi dan Jaringan	4	1.485.000.000,00
2	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	1	129.100.000,00
Total				**5**	**1.614.100.000,00**

(d) Reklas ke aset lain-lain

Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari reklasifikasi ke Aset Lain-lain senilai Rp8.232.628.270,88 merupakan koreksi atas aset yang berdasarkan hasil inventarisasi, penelusuran, dan rekonsiliasi data Barang Milik Daerah direklasifikasi dari kelompok Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke kelompok Aset Lain-lain.

Reklasifikasi tersebut dilakukan karena aset dimaksud berdasarkan kondisi, status pemanfaatan, dan/atau hasil penelaahan dokumen tidak lagi memenuhi kriteria untuk disajikan sebagai Aset Tetap Peralatan dan Mesin. Aset yang direklasifikasi antara lain berupa kendaraan, alat kantor, alat komputer, alat kesehatan, alat angkutan, serta peralatan lainnya pada beberapa OPD. Reklasifikasi tersebut didasarkan pada dokumen Nomor 000.2.3.2/454/VIII/2025. Rincian reklasifikasi ke Aset Lain-lain Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7. 63
Rincian Reklasifikasi ke Aset Lain-lain

Dalam Rupiah

No	Nama OPD	Jumlah Barang	Nilai
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2	35.112.000,00
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3	65.772.650,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	47	355.359.524,00
4	Dinas Kesehatan	6	115.324.942,00
5	Kecamatan Karossa	7	57.800.000,00
6	Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah	3	47.556.000,00
7	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	1	27.500.000,00
8	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan	3	32.887.000,00
9	Dinas Lingkungan Hidup	36	542.516.000,00
10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5	34.300.000,00
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	3	47.791.675,00
12	Dinas Perhubungan	7	145.629.500,00
13	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan	4	117.348.100,00
14	Rumah Sakit Umum Daerah	92	4.430.507.832,14
15	Sekretariat Daerah	15	2.071.665.247,74
16	Kecamatan Tobadak	1	20.407.800,00
17	Kecamatan Topoyo	3	65.500.000,00
18	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1	19.650.000,00
Total		**239**	**8.232.628.270,88**

(e) Ekstrakom Dari Pengadaan Dana BOS

Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari ekstrakom pengadaan Dana BOS senilai Rp87.910.100,00 merupakan koreksi atas barang hasil pengadaan yang bersumber dari Dana BOS yang sebelumnya tercatat sebagai Aset Tetap Peralatan dan Mesin intrakomptabel.

Berdasarkan hasil penelaahan nilai perolehan, jenis barang, masa manfaat, dan ketentuan batas kapitalisasi aset tetap, terdapat barang hasil pengadaan Dana BOS yang nilai perolehannya tidak memenuhi batas kapitalisasi sebagai aset tetap intrakomptabel. Oleh karena itu, barang dimaksud dikeluarkan dari pencatatan Aset Tetap Peralatan dan Mesin intrakomptabel dan dicatat sebagai barang ekstrakomptabel.

Koreksi tersebut tidak menghapus keberadaan fisik barang, melainkan hanya mengubah klasifikasi pencatatan dari aset tetap intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel sesuai dengan ketentuan kebijakan akuntansi yang berlaku. Rincian ekstrakom dari pengadaan Dana BOS Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7. 64
Rincian Ekstrakom dari Pengadaan Dana BOS

No	Nama UPB	Jumlah Barang	Nilai
1	UPTD SD Inpres Anggaleha	2	1.150.000,00
2	UPTD SD Inpres Argomulyo	1	650.000,00
3	UPTD SD Inpres Batu Parigi	6	900.000,00
4	UPTD SD Inpres Bayor	2	1.750.000,00
5	UPTD SD Inpres Benteng	1	750.000,00
6	UPTD SD Inpres Duri Kumba	1	610.000,00
7	UPTD SD Inpres Karama	2	580.000,00
8	UPTD SD Inpres Karossa	1	650.000,00
9	UPTD SD Inpres Lara I	4	412.100,00
10	UPTD SD Inpres Mora I	8	2.500.000,00
11	UPTD SD Inpres Ngapaboa	1	500.000,00
12	UPTD SD Inpres Patulana	10	2.500.000,00

No	Nama UPB	Jumlah Barang	Nilai
13	UPTD SD Inpres Pir Pontanakayang	1	450.000,00
14	UPTD SD Inpres Purwodadi	1	800.000,00
15	UPTD SD Inpres Tangkou	10	2.350.000,00
16	UPTD SD Inpres Tinali	8	1.200.000,00
17	UPTD SD Inpres Tumbu	6	840.000,00
18	UPTD SD Inpres Wae Puteh	4	1.850.000,00
19	UPTD SD Negeri 1 Budong-Budong	30	6.000.000,00
20	UPTD SD Negeri Kambunong	6	2.400.000,00
21	UPTD SD Negeri Polo Camba	1	685.000,00
22	UPTD SD Negeri Simbar Allo	1	745.000,00
23	UPTD SD Negeri Tobadak	1	888.000,00
24	UPTD SDK Bendungan	1	700.000,00
25	UPTD SDK Bunga Padi	6	900.000,00
26	UPTD SDK Pulo Kambunong	14	3.000.000,00
27	UPTD SDK Tomemba	1	300.000,00
28	UPTD SDN Bulu Rembu	12	3.000.000,00
29	UPTD SDN Passapa	1	250.000,00
30	UPTD SDN Sinabatta	8	1.880.000,00
31	UPTD SMP Negeri 1 Budong-Budong	45	11.250.000,00
32	UPTD SMP Negeri 1 Pangale	2	1.800.000,00
33	UPTD SMP Negeri 2 Topoyo	6	1.390.000,00
34	UPTD SMP Negeri 3 Budong-Budong	12	3.000.000,00
35	UPTD SMP Negeri 3 Karossa	10	2.000.000,00
36	UPTD SMP Negeri 3 Pangale	26	8.165.000,00
37	UPTD SMP Negeri 4 Pangale	1	750.000,00
38	UPTD SMP Negeri 5 Tobadak	1	600.000,00
39	UPTD SMPN 5 Budong-Budong	6	1.200.000,00
40	UPTD SMPN 6 Topoyo	43	11.220.000,00
41	UPTD SMPN 7 Budong-Budong	10	2.000.000,00
42	UPTD TK Negeri Amatullah Kire	2	660.000,00
43	UPTD TK Negeri Pertiwi Tobadak	13	1.785.000,00
44	UPTD TK Negeri Tunas Bangsa Sulobaja	3	900.000,00
Total		**331**	**87.910.100,00**

Atas koreksi tersebut, nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2025 berkurang senilai Rp87.910.100,00 dan dicatat sebagai barang ekstrakomptabel pada masing-masing satuan pendidikan.

(f) Reklas ke Beban Barang dan Jasa Dana BOS

Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari reklasifikasi ke Barang dan Jasa Dana BOS senilai Rp61.375.800,00 merupakan koreksi atas belanja yang bersumber dari Dana BOS yang sebelumnya dicatat sebagai Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS, namun berdasarkan hasil penelaahan dokumen dan substansi transaksi tidak memenuhi kriteria kapitalisasi sebagai Aset Tetap Peralatan dan Mesin.

Belanja tersebut lebih tepat disajikan sebagai Beban Barang dan Jasa BOS, karena berdasarkan nilai, jenis, dan karakteristik barang, pengeluaran dimaksud tidak memenuhi ketentuan pengakuan sebagai aset tetap intrakomptabel. Atas koreksi tersebut, nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2025 dikurangi senilai Rp61.375.800,00 dan direklasifikasi ke Beban Barang dan Jasa BOS. Rincian reklasifikasi ke Barang dan Jasa Dana BOS Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7. 65
Rincian Reklasifikasi ke Barang dan jasa Dana BOS

No	Nama UPB	Reklasifikasi dari	Reklasifikasi Ke	Jumlah Barang	Nilai
1	UPTD SD Inpres Bambadaru	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	Beban Barang dan Jasa BOS	1	550.000,00
2	UPTD SD Inpres Bayor	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	Beban Barang dan Jasa BOS	31	7.813.300,00
3	UPTD SD Inpres Karossa	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	Beban Barang dan Jasa BOS	1	350.000,00
4	UPTD SD Inpres Kire	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	Beban Barang dan Jasa BOS	1	350.000,00

No	Nama UPB	Reklasifikasi dari	Reklasifikasi Ke	Jumlah Barang	Nilai
5	UPTD SD Inpres Panggaloang	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	Beban Barang dan Jasa BOS	154	10.511.800,00
6	UPTD SD Inpres Salumanurung	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	Beban Barang dan Jasa BOS	5	250.000,00
7	UPTD SD Inpres Wae Puteh	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	Beban Barang dan Jasa BOS	2	800.000,00
8	UPTD SD Negeri 2 Budong-Budong	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	Beban Barang dan Jasa BOS	25	9.000.000,00
9	UPTD SD Negeri Simbar Allo	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	Beban Barang dan Jasa BOS	9	1.665.000,00
10	UPTD SDK Bunga Padi	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	Beban Barang dan Jasa BOS	10	1.510.000,00
11	UPTD SMP Negeri 1 Karossa	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	Beban Barang dan Jasa BOS	2	1.000.000,00
12	UPTD SMP Negeri 3 Karossa	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	Beban Barang dan Jasa BOS	10	3.500.000,00
13	UPTD SMP Negeri 4 Tobadak	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	Beban Barang dan Jasa BOS	5	1.300.000,00
14	UPTD SMP Negeri 7 Karossa	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	Beban Barang dan Jasa BOS	1	276.700,00
15	UPTD TK Kencana Mahahe	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	Beban Barang dan Jasa BOS	18	5.004.000,00
16	UPTD TK Negeri Delima Topoyo	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	Beban Barang dan Jasa BOS	9	2.020.000,00
17	UPTD TK Negeri Dharma Pertiwi	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	Beban Barang dan Jasa BOS	5	2.150.000,00
18	UPTD TK Negeri Dharma Wanita Babana	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	Beban Barang dan Jasa BOS	5	1.595.000,00
19	UPTD TK Negeri Duta Mario Karossa	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	Beban Barang dan Jasa BOS	7	1.590.000,00
20	UPTD TK Negeri Handayani Budong-Budong	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	Beban Barang dan Jasa BOS	4	640.000,00
21	UPTD TK Negeri Handayani Kuo	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	Beban Barang dan Jasa BOS	1	130.000,00
22	UPTD TK Negeri Harapan Baru Budong-Budong	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	Beban Barang dan Jasa BOS	7	1.080.000,00
23	UPTD TK Negeri Lestari Tobadak	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	Beban Barang dan Jasa BOS	8	1.040.000,00
24	UPTD TK Negeri Rahmat Karama	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	Beban Barang dan Jasa BOS	5	540.000,00
25	UPTD TK Negeri Raudatul Athfal Masyitah Budong-Budong	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	Beban Barang dan Jasa BOS	1	120.000,00
26	UPTD TK Negeri Sikamasei Budong-Budong	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	Beban Barang dan Jasa BOS	6	950.000,00
27	UPTD TK Negeri Tunas Mulia Karossa	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	Beban Barang dan Jasa BOS	8	920.000,00
28	UPTD TK Negeri Yaumil Iffah Patulana	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	Beban Barang dan Jasa BOS	10	1.680.000,00
29	UPTD TK Nurul Falah	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	Beban Barang dan Jasa BOS	3	1.000.000,00
30	UPTD TK Pembina Pertiwi	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	Beban Barang dan Jasa BOS	15	2.040.000,00
Total				**361**	**61.375.800,00**

(g) Koreksi Intrakomptable ke Ekstrakomptable

Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari koreksi intrakomptabel ke ekstrakomptabel senilai Rp3.495.406.952,25 merupakan koreksi pencatatan atas barang yang sebelumnya disajikan sebagai aset intrakomptabel. Berdasarkan hasil penelaahan kembali terhadap nilai perolehan, jenis barang, masa manfaat, serta ketentuan batas kapitalisasi aset tetap, terdapat barang yang lebih tepat dicatat sebagai barang ekstrakomptabel.

Koreksi tersebut dilakukan sehubungan dengan penerapan kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah terkait pengakuan dan batas kapitalisasi aset tetap. Atas koreksi tersebut, nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2025 dikurangi dan barang dimaksud tetap dicatat secara ekstrakomptabel sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Koreksi ini tidak menghapus keberadaan fisik barang,

melainkan hanya mengubah klasifikasi pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel. Rincian koreksi intrakomptabel ke ekstrakomptabel dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7. 66
Rincian Koreksi Intrakomptabel ke Ekstrakomptabel

No	Nama OPD/Unit Kerja	Jumlah Barang	Nilai Perolehan
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3	1.050.000,00
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	800.000,00
3	Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah	50	29.779.999,99
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	4	3.294.480,00
5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4	2.700.000,00
6	Dinas Kesehatan	180	106.385.512,22
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	16	10.050.000,00
8	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan	1	594.000,00
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	19	9.286.400,00
10	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.547	944.762.553,77
11	Dinas Perhubungan	3	1.500.000,00
12	Dinas Perikanan	12	5.640.000,00
13	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1	775.000,00
14	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	8	7.600.000,00
15	Dinas Sosial	1	700.000,00
16	Inspektorat	3	2.400.000,00
17	Kecamatan Budong-Budong	2	800.000,00
18	Kecamatan Karossa	1	750.000,00
19	Kecamatan Pangale	4	2.900.000,00
20	Puskesmas Babana	258	153.112.913,53
21	Puskesmas Batuparigi	67	34.440.373,95
22	Puskesmas Durikumba	342	212.573.993,66
23	Puskesmas Lara	460	267.490.874,34
24	Puskesmas Pangale	384	225.587.664,28
25	Puskesmas Polocamba	278	157.237.948,08
26	Puskesmas Saloadak	259	145.948.237,42
27	Puskesmas Salugatta	448	273.469.981,10
28	Puskesmas Salupangkang	468	270.098.559,75
29	Puskesmas Tobadak	330	203.917.165,61
30	Puskesmas Topoyo	560	323.132.094,54
31	Rumah Sakit Umum Daerah	111	58.603.200,00
32	Sekretariat Daerah	15	11.166.000,00
33	Sekretariat DPRD	31	26.860.000,00
Total		**5.871**	**3.495.406.952,25**

2) Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin senilai (Rp273.829.497.962,07) dan dapat dijelaskan pada rincian berikut:

Tabel 7. 67
Rincian Kenaikan/Penurunan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan mesin

Dalam Rupiah

Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2024	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2025
316.133.746.124,21	(230.038.851.774,52)	(85.236.134.440,43)	(41.445.488.252,49)	(273.829.497.962,07)

Penambahan/Pengurangan Aset tetap Peralatan dan mesin

Saldo Akhir 2024	**Rp**	**311.380.597.717,34**
Penambahan :		
- Realisasi belanja modal	Rp	15.372.942.512,00
- Terima Hibah	Rp	626.380.571,00

- Reklas dari barang dan jasa APBD	Rp	24.056.450,00
- Reklas antar KIB APBD	Rp	1.535.946.144,00
- Reklas antar KIB Dana BOS	Rp	123.414.900,00
- Reklas dari barang dan jasa Dana BOS	Rp	21.555.000,00
- Koreksi Ekstra ke Intra	Rp	898.430.974,00
Sub. Total Penambahan	**Rp**	**18.602.726.551,00**
Pengurangan:		
- Ekstrakom Dari Pengadaan APBD	Rp	178.603.820,00
- Reklas ke barang dan jasa APBD	Rp	179.553.201,00
- Reklas kurang antar KIB APBD	Rp	1.614.100.000,00
- Reklas ke aset lain-lain	Rp	8.232.628.270,88
- Ekstrakom Dari Pengadaan Dana BOS	Rp	87.910.100,00
- Reklas ke barang dan jasa Dana BOS	Rp	61.375.800,00
- Koreksi Intra ke Ekstra	Rp	3.495.406.952,25
Sub Total Pengurangan	**Rp**	**13.849.578.144,13**
Saldo Akhir 2025	**Rp**	**316.133.746.124,21**
Akumulasi Penyusutan	Rp	-273.829.497.962,07
Nilai Buku	**Rp**	**42.304.248.162,14**

Dalam Pencatatan Aset tetap Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah telah menyusun Batasan Kapitalisasi terkait dengan Aset tetap Peralatan dan Mesin sesuai rincian dan jenis Peralatan dan Mesin yang terdapat pada Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah.

Pencatatan nilai perolehan pada Aset tetap peralatan dan mesin berdasarkan harga pasar dan sesuai dengan Realisasi belanja. Adanya Penyebab perubahan kondisi (Rusak Berat/Ringan) disebabkan Aset sudah melewati masa usia pakai sehingga aset tersebut sudah tidak layak digunakan lagi untuk mendukung operasional kerja pada OPD terkait, Kesalahan Pencatatan disebabkan oleh OPD kurang cermat dalam pemilihan kode rekening yang seharusnya rekening belanja modal akan tetapi menggunakan rekening barang dan jasa sehingga menyebabkan reklasifikasi begitu pun sebaliknya.

Pada lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah berdasarkan dalam daftar pencatatan dan pembukuan telah memiliki jumlah kendaraan dinas sebanyak 934 unit kendaraan, terdapat 670 unit kendaraan yang didukung dokumen kepemilikan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dan 264 yang belum didukung dengan dokumen kepemilikan kendaraan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor).

Terhadap Aset Tetap yang dihentikan penggunaannya karena sudah dilakukan pemindahtanganan melalui penjualan lelang dan selanjutnya akan ditindaklanjuti melalui Proses Penghapusan Aset dari pencatatan setelah diterbitkannya surat keputusan Bupati selaku kuasa pengelola BMD Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah.

Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah, Bagian Umum, terdapat kehilangan kendaraan dinas roda empat berupa truk dengan nilai perolehan sebesar Rp405.300.000,00. Kehilangan tersebut telah dilaporkan kepada pihak Kepolisian berdasarkan Surat Tanda Terima Laporan Nomor: STTP/B/41/IV/2024/SPKT/POLRES MAMUJU TENGAH/POLDA SULBAR. Selanjutnya, pada tanggal 12/12/2023 Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah telah mengajukan klaim asuransi atas kendaraan dinas roda empat tersebut senilai Rp234.000.000,00 dan telah dilakukan penyetoran ke kas daerah dengan nomor bukti SES SRT ASKRIDA 421/CAB-MMJ/KEU/XII-23. Atas kejadian tersebut, Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah masih mencatat kendaraan dinas dimaksud pada rekening Aset Lain-lain dan belum dilakukan penghapusan dari daftar aset.

Selain itu, terdapat kendaraan dinas roda dua pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan nilai perolehan senilai Rp20.000.000,00 yang sampai dengan saat ini belum dilaporkan kepada pihak yang berwajib.

Pada Kecamatan Topoyo juga terdapat kehilangan aset tetap peralatan dan mesin berupa 1 (satu) Kas di BLUD unit laptop dengan nilai perolehan senilai Rp7.500.000,00. Kehilangan tersebut telah dilaporkan kepada pihak Kepolisian berdasarkan Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Nomor: SKTLK/20/III/2025/POLSEK TOPOYO.

Per 31 Desember 2025, BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat menemukan bahwa terdapat 6 unit kendaraan dinas pada Dinas Sosial yang belum dilakukan pencatatan dalam aplikasi e-BMD. Berdasarkan penelusuran, kendaraan tersebut pada awalnya merupakan kendaraan yang digunakan melalui mekanisme pinjam pakai dari Kementerian Sosial. Namun demikian, sampai dengan tanggal pelaporan, belum terdapat kejelasan apakah status pinjam pakai atas kendaraan dimaksud masih berlanjut atau telah berakhir.

Sehubungan dengan kondisi tersebut, Dinas Sosial telah berupaya melakukan koordinasi melalui penyampaian surat kepada Kementerian Sosial dalam rangka permohonan hibah atas 6 (enam) unit kendaraan dimaksud. Namun, sampai dengan penyusunan laporan ini, Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah belum memperoleh tanggapan atau balasan resmi dari Kementerian Sosial atas permohonan hibah tersebut.

Dengan mempertimbangkan belum adanya kepastian status kepemilikan dan belum tersedianya dokumen sumber yang sah dan memadai, seperti Berita Acara Serah Terima (BAST), dokumen hibah, dokumen kepemilikan, atau dokumen penyerahan lainnya, maka 6 (enam) unit kendaraan tersebut belum dapat diakui dan dicatat sebagai aset tetap milik Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dalam aplikasi e-BMD.

Namun demikian, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan serta sebagai bentuk pengungkapan dan pengendalian atas barang yang berada dalam penguasaan/pemanfaatan Dinas Sosial, Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah menambahkan informasi terkait keberadaan 6 (enam) unit kendaraan dinas tersebut dalam catatan dan penjelasan atas Barang Milik Daerah. Pengungkapan ini dilakukan berdasarkan rekomendasi Tim BPK RI, sambil tetap melakukan penelusuran, koordinasi lanjutan, dan permintaan dokumen pendukung kepada pihak Kementerian Sosial agar status kendaraan tersebut dapat ditetapkan secara jelas.

Adapun rincian 6 (enam) unit kendaraan dinas pada Dinas Sosial yang belum tercatat dalam aplikasi e-BMD adalah sebagai berikut.

1) 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 jenis Rescue dengan Nomor Polisi B 9550 PSD, tahun perolehan 2016, dalam kondisi baik, dengan Nomor Rangka MMBJNKL30GH063102 dan Nomor Mesin 4D56UAG0989.
2) 1 (satu) unit Kendaraan Roda 6 jenis Dalmas dengan Nomor Polisi B 9698 POQ, tahun perolehan 2015, dalam kondisi baik, dengan Nomor Rangka MHMFE73P3FK005465 dan Nomor Mesin 4D34TL09903.
3) 1 (satu) unit Kendaraan Roda 6 jenis Truk/Dumlap dengan Nomor Polisi B 9392 PQV, tahun perolehan 2015, dalam kondisi baik, dengan Nomor Rangka MHCNKR71HFJ069272 dan Nomor Mesin B069272.
4) 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 jenis Sepeda Motor Trail dengan Nomor Polisi B 3066 PBQ, tahun perolehan 2015, dalam kondisi baik, dengan Nomor Rangka MH4LX150CFJP28010 dan Nomor Mesin LX150CEPM5227.
5) 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 jenis Sepeda Motor Trail dengan Nomor Polisi B 3068 PBQ, tahun perolehan 2015, dalam kondisi baik, dengan Nomor Rangka MH4LX150CFJP28587 dan Nomor Mesin LX150CEPD9218.
6) 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 jenis Sepeda Motor Trail dengan Nomor Polisi B 3176 PBQ, tahun perolehan 2015, dalam kondisi baik, dengan Nomor Rangka MH4LX150CFJP28534 dan Nomor Mesin LX150CEPM2506.

c) Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan adalah seluruh aset dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Adapun Batasan minimal kapitalisasi aset tetap (*capitalization thresholds*) ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 7. 68
Batasan Kapitalisasi Untuk Pengadaan Baru Gedung dan Bangunan

No	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/ Satuan (Rp)
1.3.3	Gedung dan Bangunan, terdiri atas:	
1.3.3.01	Bangunan Gedung	20.000.000
1.3.3.02	Monumen	20.000.000
1.3.3.03	Bangunan Menara	20.000.000
1.3.3.04	Tugu Titik Kontrol/Pasti	20.000.000

Per 31 Desember 2025 terdapat kesalahan penganggaran atas realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan yang telah dilakukan koreksi sehingga terdapat mutasi kurang dan mutasi tambah pada pencatatan nilai aset tetap Gedung dan Bangunan. Atas permasalahan kesalahan penganggaran tersebut Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah akan memverifikasi kembali usulan-usulan belanja OPD berdasarkan Standar Harga Satuan (SHS) Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dan penentuan kode rekening belanja di tahun berikutnya.

Saldo aset tetap Gedung dan Bangunan per tanggal 31 Desember 2025 senilai Rp684.550.193.693,06 mengalami kenaikan senilai Rp73.921.510.265,29 atau 12,11% dari saldo aset tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 senilai Rp610.628.683.427,77. Akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 senilai (Rp249.069.435.733,80) sehingga nilai buku pada tanggal pelaporan senilai Rp435.480.757.959,26. Rincian Aset tetap Gedung dan Bangunan pada SKPD per 31 Desember 2025, sebagaimana diuraikan pada *lampiran 11*.

Tabel 7. 69
Penambahan/pengurangan Aset tetap Gedung dan Bangunan

Dalam rupiah

Uraian	Saldo Akhir 31 Des 2024	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 31 Des 2025
Gedung dan Bangunan	610.628.683.427,77	94.425.940.346,68	20.504.430.081,39	684.550.193.693,06

Penambahan/pengurangan Aset tetap Gedung dan Bangunan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Penambahan Aset tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp94.425.940.346,68 dapat dilihat pada rincian tabel berikut:

Tabel 7. 70
Rincian Penambahan Aset tetap Gedung dan Bangunan

Dalam Rupiah

No	Nama SKPD	Mutasi Tambah
1	Sekretariat DPRD	906.193.000,00
2	Sekretariat Daerah	1.032.822.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1.619.115.358,00
4	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan	21.399.509.664,00
5	Dinas Kesehatan	19.992.837.811,00
6	Rumah Sakit Umum Daerah	1.507.796.295,00
7	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	23.405.607.146,17
8	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Perindustrian Dan Perdagangan	491.914.500,00
9	Inspektorat	2.277.323.700,00
10	Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata	11.648.778.985,00
11	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	9.894.688.387,51
12	Kecamatan Topoyo	249.353.500,00
Total		**94.425.940.346,68**

Adapun penjelasan Penambahan Aset tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2025 senilai Rp94.425.940.346,68 sebagai berikut:

(a) Realisasi Belanja Modal

Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 senilai Rp39.872.038.119,00 merupakan belanja modal yang direalisasikan untuk pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, renovasi, dan/atau pengadaan aset yang termasuk dalam kelompok Gedung dan Bangunan. Belanja tersebut memenuhi kriteria pengakuan sebagai aset tetap karena memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan, digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah, serta memberikan manfaat ekonomi dan/atau sosial pada periode berjalan maupun periode berikutnya.

(b) Utang

Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari pengakuan utang senilai Rp56.052.740,00 merupakan pengakuan atas pekerjaan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, renovasi, dan/atau pemeliharaan yang memenuhi kriteria kapitalisasi sebagai Aset Tetap Gedung dan Bangunan, namun sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 belum dilakukan pembayaran kepada pihak penyedia.

Nilai tersebut terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp13.553.000,00 dan Dinas Kesehatan senilai Rp42.499.740,00. Atas pekerjaan yang telah selesai dan memenuhi kriteria pengakuan aset tetap tersebut, Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah mengakui penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan serta mencatat kewajiban berupa utang belanja sesuai dengan dokumen sumber yang tersedia. Rincian pengakuan utang atas Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7. 71
Rincian Pengakuan Utang atas Aset Tetap Gedung dan Bangunan

No	Nama OPD	Nilai
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	13.553.000,00
2	Dinas Kesehatan	42.499.740,00
	Total	**56.052.740,00**

(c) Penerimaan Hibah

Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari penerimaan hibah merupakan aset gedung dan bangunan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dari pihak ketiga, instansi lain, dan/atau masyarakat berdasarkan dokumen hibah dan/atau dokumen serah terima yang sah. Aset tersebut telah dicatat sebagai Barang Milik Daerah dan disajikan sebagai penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Neraca per 31 Desember 2025. Rincian penerimaan hibah Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut.

(1) Penerimaan hibah pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan

Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan terdapat penerimaan hibah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berupa bangunan Rumah Susun Patulana senilai Rp7.609.378.164,00, berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Nomor 217/PKS/Dr/2019 dan Nomor 007.1/3599/VII/2019 tanggal 18 September 2019. Selain itu, terdapat penerimaan hibah berupa Rumah Susun Tumbu senilai Rp13.790.131.500,00, berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Nomor 30/PKS/Sj/2022 tanggal 7 Desember 2022.

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Kinerja BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah belum melakukan pencatatan atas aset hibah tersebut sebagai Barang Milik Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat merekomendasikan agar Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah melakukan pencatatan atas aset hibah dimaksud sesuai dengan dokumen sumber dan ketentuan pengelolaan Barang Milik Daerah yang berlaku.

Menindaklanjuti rekomendasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah melakukan pencatatan atas aset hibah Rumah Susun Patulana dan Rumah Susun Tumbu sebagai penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Tahun Anggaran 2025.

(2) Penerimaan hibah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdapat penerimaan hibah dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah berupa Program Revitalisasi Satuan Pendidikan senilai Rp14.739.606.770,77. Penerimaan hibah tersebut didasarkan pada dokumen sebagai berikut:

a. Surat Keputusan Direktur Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 0972/C2/DM.00.01/2025 tanggal 2 Juni 2025 tentang Penetapan Sasaran Program Revitalisasi Satuan PAUD Tahap 2 Tahun 2025;
b. Surat Keputusan Direktur Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1207/C3/HK.03.01/2025 tanggal 13 Juni 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1020/C3/DM.00.00/2025 tentang Penetapan Sasaran dan Menu Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Tahun 2025 Angkatan 2; dan
Surat Keputusan Direktur Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 2061/C4/DM.00.03/2025 tanggal 5 Agustus 2025 tentang Penetapan Sasaran dan Menu Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Tahun 2025 Tahap 3.

Per 31 Desember 2025, Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah telah melakukan pencatatan atas sebagian barang hasil Program Revitalisasi Satuan Pendidikan yang diserahkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada aplikasi SIPD E-BMD. Namun demikian, berdasarkan Berita Acara Serah Terima yang diperlihatkan oleh masing-masing satuan pendidikan penerima, tidak seluruh pekerjaan revitalisasi telah diselesaikan sampai dengan 31 Desember 2025.

Selain itu, masih terdapat barang hasil pekerjaan revitalisasi yang belum dilakukan pencatatan pada aplikasi SIPD E-BMD per 31 Desember 2025 karena dokumen Berita Acara Serah Terima atas barang tersebut diterbitkan pada bulan Januari 2026. Atas barang yang Berita Acara Serah Terimanya diterbitkan pada Tahun 2026, pencatatan sebagai Barang Milik Daerah akan dilakukan pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan dokumen sumber dan ketentuan pencatatan Barang Milik Daerah yang berlaku.

(d) Reklas dari Barang dan Jasa APBD

Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari reklasifikasi Barang dan Jasa APBD senilai Rp750.081.500,00 terdapat pada Dinas Kesehatan. Nilai tersebut merupakan koreksi atas belanja konsultansi perencanaan dan pengawasan yang sebelumnya dicatat sebagai Belanja Barang dan Jasa.

Berdasarkan hasil penelaahan dokumen dan substansi transaksi, belanja konsultansi perencanaan dan pengawasan tersebut berkaitan langsung dengan pelaksanaan pembangunan dan/atau pekerjaan konstruksi Gedung dan Bangunan, sehingga memenuhi kriteria untuk dikapitalisasi sebagai bagian dari nilai perolehan Aset Tetap Gedung dan Bangunan. Oleh karena itu, nilai tersebut direklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa menjadi penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan. Atas reklasifikasi tersebut, nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2025 bertambah senilai Rp750.081.500,00. Rincian reklasifikasi dari Barang dan Jasa APBD Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

(e) Reklas antar KIB APBD

Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari reklasifikasi antar KIB APBD senilai Rp15.320.465.552,91 merupakan pemindahan pencatatan aset dari kelompok aset tetap lainnya ke kelompok Aset Tetap Gedung dan Bangunan berdasarkan hasil penelusuran, rekonsiliasi, dan penelaahan data Barang Milik Daerah.

Reklasifikasi tersebut dilakukan karena berdasarkan jenis, fungsi, bentuk fisik, dan karakteristik aset, terdapat aset yang sebelumnya tercatat pada kelompok Peralatan dan Mesin, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, serta Konstruksi Dalam Pengerjaan yang sudah selesai, namun secara substansi lebih tepat disajikan sebagai Aset Tetap Gedung dan Bangunan. Reklasifikasi ini tidak menambah nilai Aset Tetap secara keseluruhan, melainkan merupakan pemindahan penyajian nilai aset antar kelompok aset tetap agar sesuai dengan substansi dan karakteristik barang. Rincian reklasifikasi antar KIB APBD ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7. 72
Rincian Rekalasifikasi antar KIB ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan

No	Nama OPD	Reklasifikasi dari	Reklasifikasi Ke	Jumlah Barang	Nilai
1	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	1 Unit	129.100.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Gedung dan Bangunan	1 Unit	645.211.358,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Gedung dan Bangunan	1 Unit	199.628.595,00
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Gedung dan Bangunan	2 Unit	11.076.000,00
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Gedung dan Bangunan	1 Paket	1.008.317.700,00
6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Gedung dan Bangunan	13 Unit	13.327.131.899,91
Total					**15.320.465.552,91**

Atas reklasifikasi tersebut, nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2025 bertambah senilai Rp15.320.465.552,91, sedangkan kelompok aset tetap asal berkurang dengan nilai yang sama sesuai dengan hasil reklasifikasi antar KIB.

(f) Mutasi Kapitalsiasi Antar OPD

Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari mutasi kapitalisasi antar OPD merupakan pemindahan pencatatan aset dan/atau kapitalisasi nilai atas aset yang telah dimanfaatkan oleh OPD tujuan, sehingga penyajiannya disesuaikan pada OPD yang secara substansi menguasai dan menggunakan aset tersebut.

Mutasi kapitalisasi antar OPD tersebut tidak menambah nilai Aset Tetap secara keseluruhan pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah, melainkan merupakan pemindahan pencatatan aset antar OPD dan/atau penambahan nilai kapitalisasi pada aset induk yang berada pada OPD tujuan. Penyesuaian tersebut dilakukan agar pencatatan Barang Milik Daerah mencerminkan OPD pengguna, jenis aset, dan aset induk yang tepat. Rincian mutasi kapitalisasi antar OPD ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7. 73
Rincian Mutasi Kapitalisasi antar OPD ke Aset Tetap Gedung ddan Bangunan

No	SKPD Asal	Jenis Aset Asal	SKPD Tujuan	Jenis Aset Tujuan	Jumlah	Mutasi Induk/Aset Baru	Mutasi Kapitalisasi
1	Sekretariat DPRD	Gedung dan Bangunan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Cabang Dinas Pendidikan Topoyo)	Gedung dan Bangunan	1 Unit	-	55.150.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Gedung dan Bangunan	Sekretariat DPRD	Gedung dan Bangunan	1 Unit	428.035.000,00	-
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Gedung dan Bangunan	Sekretariat DPRD	Gedung dan Bangunan	1 Unit	-	36.108.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Gedung dan Bangunan	Kecamatan Topoyo	Gedung dan Bangunan	1 Unit	-	99.745.500,00
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Gedung dan Bangunan	Kecamatan Topoyo	Gedung dan Bangunan	1 Unit	-	149.608.000,00
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Gedung dan Bangunan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan	Gedung dan Bangunan	1 Unit	99.817.500,00	-

No	SKPD Asal	Jenis Aset Asal	SKPD Tujuan	Jenis Aset Tujuan	Jumlah	Mutasi Induk/Aset Baru	Mutasi Kapitalisasi
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Sekretariat DPRD	Gedung dan Bangunan	1 Unit	386.900.000,00	-
Total						**914.752.500,00**	**340.611.500,00**

Dengan demikian, mutasi kapitalisasi antar OPD tersebut terdiri dari mutasi induk/aset baru senilai Rp914.752.500,00 dan mutasi kapitalisasi senilai Rp340.611.500,00. Atas mutasi tersebut, nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada OPD tujuan bertambah sesuai dengan nilai aset yang diterima dan/atau nilai kapitalisasi yang menambah aset induk.

(g) Koreksi Reklas dari Barjas

Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan melalui jurnal koreksi reklasifikasi dari Barang dan Jasa senilai Rp1.032.822.000,00 terdapat pada Sekretariat Daerah. Nilai tersebut merupakan koreksi atas temuan BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat terhadap realisasi belanja yang semula dicatat pada rekening Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelaahan substansi transaksi, belanja tersebut merupakan pekerjaan yang meningkatkan kondisi, fungsi, dan/atau manfaat aset Gedung dan Bangunan, sehingga memenuhi kriteria kapitalisasi. Atas temuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah melakukan jurnal koreksi dengan mereklasifikasi nilai belanja dimaksud dari Barang dan Jasa menjadi penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2025.

Tabel 7. 74
Rincian Reklasifikasi Nilai Belanja Barang dan Jasa ke Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan

No	Uraian Pekerjaan	Komponen	Nilai
1	Rehabilitasi Rumah Jabatan Bupati	Perencanaan	14.973.000,00
		Fisik	152.178.000,00
		Fisik	355.082.000,00
		Pengawasan	20.202.000,00
	Subtotal Rehabilitasi Rumah Jabatan Bupati		**542.435.000,00**
2	Instalasi Rumah Jabatan Bupati	Perencanaan	3.762.000,00
		Pengawasan	5.006.000,00
		Fisik	125.208.000,00
	Subtotal Instalasi Rumah Jabatan Bupati		**133.976.000,00**
3	Plafond Rumah Jabatan Bupati	Perencanaan	4.095.000,00
		Fisik	148.113.000,00
		Pengawasan	5.938.000,00
	Subtotal Plafond Rumah Jabatan Bupati		**158.146.000,00**
4	Paving Blok Halaman Kantor Bupati	Perencanaan	5.550.000,00
		Fisik	128.030.000,00
		Fisik	57.237.000,00
		Pengawasan	7.448.000,00
	Subtotal Paving Blok Halaman Kantor Bupati		**198.265.000,00**
Total			**1.032.822.000,00**

2) Pengurangan Aset tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp20.504.430.081,39 dapat dilihat pada rincian tabel berikut:

Tabel 7. 75
Rincian Pengurangan Aset Gedung dan Bangunan Pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah

Dalam Rupiah

No	Nama SKPD	Mutasi Kurang
1	Sekretariat DPRD	55.150.000,00
1	Sekretariat Daerah	48.443.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	867.711.414,87

No	Nama SKPD	Mutasi Kurang
1	Sekretariat DPRD	55.150.000,00
3	Dinas Perhubungan	15.000.000,00
4	Dinas Kesehatan	73.574.646,07
5	Puskesmas Tobadak	13.950.000,00
6	Puskesmas Topoyo	90.460.000,00
7	Puskesmas Salupangkang	12.600.000,00
8	Rumah Sakit Umum Daerah	283.692.125,19
9	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	5.064.109.068,26
10	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	27.637.142,00
11	Inspektorat	2.277.323.700,00
12	Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata	11.648.778.985,00
13	Kecamatan Budong-Budong	10.000.000,00
14	Kecamatan Tobadak	16.000.000,00
	Total	**20.504.430.081,39**

Adapun penjelasan pengurangan Aset tetap Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2025 senilai Rp20.504.430.081,39 sebagai berikut:

(a) Pembayaran Utang

Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari pembayaran utang senilai Rp1.234.009.502,40 merupakan penyesuaian atas pembayaran kewajiban Tahun Anggaran 2025 atas pekerjaan Gedung dan Bangunan yang sebelumnya telah diakui sebagai utang dan telah dicatat sebagai aset pada periode sebelumnya. Pembayaran utang tersebut terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp10.827.000,00, Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp249.875.000,00, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp973.307.502,40. Atas pembayaran tersebut dilakukan penyesuaian pencatatan agar tidak terjadi pencatatan kembali atas nilai aset yang telah diakui sebelumnya.

(b) Penghapusan (Dobel Catat)

Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari penghapusan karena dobel catat senilai Rp3.271.199.181,00 merupakan koreksi atas aset yang tercatat lebih dari satu kali pada kelompok Aset Tetap Gedung dan Bangunan. Koreksi tersebut terdapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebanyak 18 unit aset gedung dan bangunan.

Penghapusan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas temuan BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat pada saat pemeriksaan kinerja, yang mengidentifikasi adanya aset gedung dan bangunan yang tercatat ganda dalam daftar Barang Milik Daerah. Berdasarkan dokumen permohonan penghapusan dobel catat Nomor : 009.8/1228/Disdik/IV/2022 tanggal 18 April 2022, aset dimaksud terdiri dari beberapa jenis bangunan, antara lain bangunan gedung kantor, bangunan gedung laboratorium, bangunan gedung tempat ibadah, bangunan gedung pendidikan, gedung olahraga, gedung pertokoan/koperasi/pasar, bangunan gedung perpustakaan, bangunan gedung tempat kerja lainnya, dan bangunan menara perambuan.

Atas kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah melakukan koreksi dengan menghapus pencatatan aset yang teridentifikasi dobel catat agar penyajian Aset Tetap Gedung dan Bangunan mencerminkan nilai yang wajar dan tidak melebihi aset yang secara substansi dikuasai oleh Pemerintah Daerah. Koreksi ini tidak menghapus keberadaan fisik aset, melainkan hanya menghilangkan pencatatan ganda dalam administrasi Barang Milik Daerah. Rincian penghapusan aset dobel catat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7. 76
Rincian Penghapusan Aset Double Catat

No	Nama OPD	Jumlah Barang	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	18 unit	3.271.199.181,00	1.129.989.749,00	2.141.209.432,00

	Total	**18 unit**	**3.271.199.181,00**	**1.129.989.749,00**	**2.141.209.432,00**

(c) Reklas ke aset lain-lain

Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari reklasifikasi ke Aset Lain-lain senilai Rp90.460.000,00 terdapat pada Dinas Kesehatan. Nilai tersebut merupakan reklasifikasi atas aset Gedung dan Bangunan berupa Bangunan Klinik/Puskesmas yang berdasarkan hasil penelaahan kondisi fisik telah mengalami rusak berat dan diusulkan untuk dilakukan pemusnahan dalam rangka pelaksanaan rehab total.

Reklasifikasi tersebut dilakukan berdasarkan dokumen Permohonan Persetujuan Pemusnahan Barang Milik Daerah Nomor 000.2.3.2/561/IX/2025 tanggal 23 September 2025. Aset dimaksud direklasifikasi ke Aset Lain-lain karena tidak lagi digunakan sesuai fungsi operasional semula dan secara substansi sedang dalam proses usulan pemusnahan sebagai bagian dari tahapan pelaksanaan rehab total.

Atas reklasifikasi tersebut, nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2025 dikurangi senilai Rp90.460.000,00, dengan akumulasi penyusutan senilai Rp46.351.583,00 dan nilai buku senilai Rp44.108.417,00. Reklasifikasi ini tidak merupakan penghapusan langsung atas aset, melainkan pemindahan klasifikasi penyajian dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Aset Lain-lain sampai dengan proses persetujuan pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku.Rincian reklasifikasi ke Aset Lain-lain dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7. 77
Rincian Reklasifikasi ke Aset Lain-lain

No	OPD	Nama Barang	Jumlah	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Dinas Kesehatan	Bangunan Klinik/Puskesmas	1 unit	39.500.000,00	29.789.583,00	9.710.417,00
2	Dinas Kesehatan	Bangunan Klinik/Puskesmas	1 unit	50.960.000,00	16.562.000,00	34.398.000,00
Total			**2 unit**	**90.460.000,00**	**46.351.583,00**	**44.108.417,00**

(d) Reklas kurang antar KIB APBD

Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari reklasifikasi kurang antar KIB bersumber dari belanja APBD senilai Rp13.926.102.685,00 merupakan koreksi atas kesalahan penganggaran dan/atau kodefikasi jenis barang yang sebelumnya dicatat pada kelompok Aset Tetap Gedung dan Bangunan. Berdasarkan hasil penelaahan terhadap substansi transaksi, jenis barang, fungsi aset, dan kondisi pekerjaan, sebagian aset lebih tepat direklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan karena belum memenuhi kriteria siap digunakan, sedangkan sebagian lainnya berupa peralatan kantor, AC, sound system, APAR, komputer, laptop, printer, scanner, dan peralatan lainnya lebih tepat disajikan sebagai Aset Tetap Peralatan dan Mesin. Reklasifikasi ini tidak mengurangi nilai aset tetap secara keseluruhan, melainkan hanya memindahkan penyajian nilai aset antar kelompok aset tetap agar sesuai dengan substansi dan karakteristik aset yang sebenarnya.

Tabel 7. 78
Rincian Rekalsifikasi Nilai aset antar Kelompok Aset tetap

No	Nama SKPD	Reklasifikasi Dari	Reklasifikasi Ke	Jml	Harga
1	INSPEKTORAT	Gedung dan Bangunan	Konstruksi dalam Pengerjaan	5	2.277.323.700,00
2	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Gedung dan Bangunan	Peralatan dan Mesin	36	138.461.567,00
3	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Gedung dan Bangunan	Konstruksi dalam Pengerjaan	10	11.510.317.418,00
TOTAL				**51**	**13.926.102.685,00**

(e) Mutasi Kapitalsiasi Antar OPD

Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari mutasi kapitalisasi antar OPD senilai Rp868.464.000,00 merupakan penyesuaian pencatatan atas pekerjaan yang dianggarkan pada kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, namun hasil pekerjaan tersebut secara substansi dimanfaatkan oleh OPD lain sebagai pengguna barang.

Mutasi tersebut dilakukan karena belanja yang bersumber dari anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menghasilkan aset dan/atau menambah nilai aset yang berada pada penguasaan atau pemanfaatan OPD lain. Oleh karena itu, nilai pekerjaan tersebut dipindahkan pencatatannya kepada OPD tujuan agar penyajian Barang Milik Daerah mencerminkan pengguna barang, lokasi, dan aset induk yang sebenarnya. Rincian mutasi kapitalisasi antar OPD Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 7. 79
Rincian Mutasi Kapitalisasi antar OPD

No	SKPD Pelaksana/Anggaran	SKPD Tujuan	Uraian	Nilai
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sekretariat DPRD	Pos Jaga	36.108.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sekretariat DPRD	Rehabilitasi Rumah Jabatan Ketua DPRD	428.035.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kecamatan Topoyo	Rehabilitasi Rumah Jabatan Camat untuk Rumah Jabatan Wakil Ketua DPRD	149.608.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kecamatan Topoyo	Rehabilitasi Kantor Camat Topoyo	99.745.500,00
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Rehabilitasi WC di Pasar Baru Topoyo	99.817.500,00
6	Sekretariat DPRD	Dinas Pendidikan (KCD Topoyo)	Rehab Rumah Dinas	55.150.000,00
Total				**868.464.000,00**

Atas mutasi tersebut, nilai pekerjaan yang bersumber dari anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dialihkan pencatatannya kepada OPD tujuan sesuai dengan pengguna barang dan aset induk yang terkait. Mutasi ini tidak mengurangi nilai Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah secara keseluruhan, melainkan merupakan penyesuaian penyajian antar OPD agar sesuai dengan substansi pemanfaatan aset.

(f) Koreksi Reklas Intra Ke Ekstra

Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan melalui jurnal koreksi reklasifikasi intrakomptabel ke ekstrakomptabel senilai Rp578.007.240,40 merupakan penyesuaian atas aset yang sebelumnya dicatat sebagai aset tetap intrakomptabel. Koreksi tersebut dilakukan sebagai dampak dari perubahan kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah terkait pengakuan aset tetap dan penerapan batas kapitalisasi.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap nilai perolehan, karakteristik aset, masa manfaat, serta ketentuan batas kapitalisasi yang berlaku, terdapat aset yang tidak lagi memenuhi kriteria untuk disajikan sebagai Aset Tetap Gedung dan Bangunan intrakomptabel. Oleh karena itu, aset dimaksud lebih tepat diklasifikasikan sebagai barang ekstrakomptabel.

Koreksi ini tidak berdampak pada keberadaan fisik aset, melainkan hanya memengaruhi klasifikasi pencatatan dan penyajian aset dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel. Atas koreksi tersebut, nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2025 berkurang senilai Rp578.007.240,40, dengan akumulasi penyusutan seniali Rp356.876.070,45. Rincian jurnal koreksi reklasifikasi intrakomptabel ke ekstrakomptabel dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7. 80
Rincian Reklasifikasi Intrakomptabel ke Ekstrakomptabel

No	Organisasi	Jumlah Barang	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan
1	Puskesmas Tobadak	1	13.950.000,00	11.206.500,00
2	Puskesmas Salupangkang	1	12.600.000,00	10.122.000,00
3	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2	27.637.142,00	22.201.838,00
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	32	434.377.098,40	271.126.409,41
5	Dinas Perhubungan	1	15.000.000,00	7.556.818,18
6	Kecamatan Budong-Budong	1	10.000.000,00	5.537.500,30
7	Kecamatan Tobadak	1	16.000.000,00	6.461.538,77
8	Sekretariat Daerah	3	48.443.000,00	22.663.465,78
Total		**42**	**578.007.240,40**	**356.876.070,44**

(g) Koreksi Kurang Volume

Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan melalui jurnal koreksi kurang volume senilai Rp536.187.472,59 merupakan penyesuaian atas nilai aset tetap sebagai tindak lanjut atas temuan pemeriksaan BPK RI pada tahun sebelumnya, sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Tahun 2023/2024. Temuan tersebut mengungkapkan adanya selisih volume pekerjaan pada beberapa aset Gedung dan Bangunan, sehingga nilai perolehan aset yang telah dicatat perlu disesuaikan dengan volume pekerjaan yang seharusnya diakui.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelaahan kembali terhadap nilai perolehan, volume pekerjaan, dan data aset yang tercatat, terdapat perbedaan antara nilai/volume pekerjaan yang telah dicatat dalam nilai perolehan aset dengan nilai/volume pekerjaan yang seharusnya diakui. Oleh karena itu, dilakukan koreksi terhadap nilai perolehan Aset Tetap Gedung dan Bangunan agar penyajiannya mencerminkan nilai yang lebih wajar sesuai dengan kondisi, volume, dan substansi pekerjaan yang sebenarnya. Rincian jurnal koreksi kurang volume Aset Tetap Gedung dan Bangunan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7. 81
Rincian Kurang Volume Aset Tetap Gedung dan Bangunan

No	OPD/Uraian	Nilai Koreksi	Koreksi Ekuitas	Koreksi Beban Penyusutan	Koreksi Akumulasi Penyusutan
1	Dinas Kesehatan	73.574.646,07	366.222,05	3.660.421,20	4.026.643,25
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	43.570.414,87		2.523.453,19	2.523.453,19
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	385.225.286,46	19.555.791,82	19.124.101,64	38.679.893,46
4	Rumah Sakit Umum Daerah	33.817.125,19		1.690.856,26	1.690.856,26
Total		**536.187.472,59**	**19.922.013,87**	**26.998.832,29**	**46.920.846,16**

3) Akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan senilai (Rp249.069.435.733,80) dan dapat dijelaskan pada rincian berikut:

Tabel 7. 82
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Gedung dan Bangunan

Dalam Rupiah

Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan 31/12/2024	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Akumulasi Penyusutan 31/12/2025
684.550.193.693,06	(213.122.029.201,81)	(127.376.839.067,00)	(91.429.432.535,01)	(249.069.435.733,80)

Penambahan/Pengurangan Aset tetap Gedung dan Bangunan

Saldo Akhir 2024	**Rp**	**610.628.683.427,77**
Penambahan :		
- Realisasi belanja modal	Rp	39.872.038.119,00
- Utang	Rp	56.052.740,00
- Terima Hibah	Rp	36.139.116.434,77
- Reklas dari Barang dan Jasa APBD	Rp	750.081.500,00
- Reklas antar KIB APBD	Rp	15.320.465.552,91
- Mutasi Kapitalsiasi Antar OPD	Rp	1.255.364.000,00
- Koreksi Reklas dari Barjas	Rp	1.032.822.000,00
Sub. Total Penambahan	**Rp**	**94.425.940.346,68**
Pengurangan:		
- Pembayaran Utang	Rp	1.234.009.502,40
- Penghapusan (Dobel Catat)	Rp	3.271.199.181,00
- Reklas ke aset lain-lain	Rp	90.460.000,00
- Reklas kurang antar KIB APBD	Rp	13.926.102.685,00
- Mutasi Kapitalsiasi Antar OPD	Rp	868.464.000,00
- Koreksi Reklas Intra Ke Ekstra	Rp	578.007.240,40
- Koreksi Kurang Volume	Rp	536.187.472,59
Sub Total Pengurangan	**Rp**	**20.504.430.081,39**
Saldo Akhir 2025	**Rp**	**684.550.193.693,06**
Akumulasi Penyusutan	Rp	(249.069.435.733,80)
Nilai Buku	**Rp**	**435.480.757.959,26**

Per 31 desember 2025 ada kelebihan pembayaran utang tahun sebelumnya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp534.942.987,60, akibat dari realisasi pembayaran utang sebelum laporan keuangan audited. Sehingga dasar bayar utang tersebut menggunakan daftar utang belanja modal yang unaudited (belum dikoreksi) sesuai progres fisik. Adapun kelebihan bayar tersebut dicatat kembali menjadi tambahan nilai aset tersebut.

Pencatatan Aset tetap Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah saat ini adalah berdasarkan pada Nilai NJOP dan Realisasi Anggaran Pada OPD yang seharusnya Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah sudah memiliki Tim Penilai/Penaksir BMD yang dapat menghitung besaran dan Nilai suatu Bangunan yang sesuai dengan standarisasi seharusnya.

Rincian jenis-jenis Aset tetap Gedung dan Bangunan terdiri dari dua bagian yaitu Bangunan Gedung tempat Kerja dan Bangunan Gedung Tempat Tinggal, dan keduanya terdiri dari beberapa jenis Bangunan. Sesuai dengan rincian dalam Kebijakan Akuntansi.

Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah telah mencatat Gedung dan Bangunan sebanyak 1.675 unit jenis bangunan, dari 1.675 unit Bangunan tersebut telah memiliki 289 alas hak berupa sertifikat. Dalam satu (1) alas hak tanah terdapat beberapa jenis bangunan di atasnya mencerminkan potensi pengembangan yang luas dan kompleks.

Dalam hal pengamanan Gedung dan Bangunan baik secara administrasi, fisik dan hukum, Pemerintah Daerah telah melakukan berbagai upaya dan langkah-langkah strategis sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan yang berlaku. Namun demikian berbagai upaya yang telah dilakukan belum menjamin sepenuhnya status Gedung dan Bangunan aman dalam penguasaan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah. Pencatatan Gedung dan Bangunan saat ini masih ditemukan adanya Gedung dan Bangunan yang berdiri diatas tanah yang belum bersertifikat atau diakui secara legal oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah. Hal ini berkonsekuensi hukum dan berpotensi adanya pengakuan dari pihak lain dan itu berarti memungkinkan dimiliki oleh orang lain sehingga mengakibatkan kerugian daerah.

d) Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, Irigasi, dan Jaringan adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap pakai. Aset ini mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1) Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
2) Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;

3) Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan
4) Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.

Biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi, dan jaringan tersebut siap pakai. Adapun batasan minimal kapitalisasi aset tetap (*capitalization thresholds*) ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 7. 83
Batasan Kapitalisasi Untuk Pengadaan Baru Jalan, Irigasi dan Jaringan

No	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/ Satuan (Rp)
1.3.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan, terdiri atas:	
1.3.4.01	Jalan dan Jembatan	20.000.000
1.3.4.02	Bangunan Air	20.000.000
1.3.4.03	Instalasi	10.000.000
1.3.4.04	Jaringan	10.000.000

Saldo Aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan per tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp1.125.160.259.754,04 mengalami kenaikan senilai Rp10.301.030.697,59 atau 0,92% dari saldo per tanggal 31 Desember 2024 senilai Rp1.114.859.229.056,45. Akumulasi penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2025 senilai (Rp610.355.462.160,65) sehingga nilai buku pada tanggal pelaporan senilai Rp514.804.797.593,39. Rincian Aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada SKPD per 31 Desember 2025. sebagaimana diuraikan pada *lampiran 12.*

Tabel 7. 84
Penambahan/Pengurangan Aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Dalam Rupiah

Uraian	Saldo Akhir 31 Des 2024	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 31 Des 2025
Jalan. Irigasi, dan Jaringan	1.114.859.229.056,45	22.339.371.876,00	12.038.341.178,40	1.125.160.259.754,04

Penambahan nilai aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan senilai Rp22.339.371.876,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Penambahan aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan senilai Rp22.339.371.876,00 dapat dilihat pada rincian tabel berikut:

Tabel 7. 85
Rincian Penambahan Aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Dalam Rupiah

No	Nama SKPD	Mutasi Tambah
1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	19.355.393.196,00
2	Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian	92.352.000,00
3	Dinas Kesehatan	1.486.250.000,00
4	Rumah Sakit Umum Daerah	199.628.595,00
5	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	11.076.000,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	721.669.370,00
7	Dinas Lingkungan Hidup	373.990.715,00
8	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	99.012.000,00
Jumlah		**22.339.371.876,00**

Adapun penjelasan penambahan aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan Tahun Anggaran 2025 senilai Rp22.339.371.876,00 sebagai berikut:

(a) Realisasi belanja modal

Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan dari realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 senilai Rp19.849.155.028,00 merupakan belanja modal yang direalisasikan untuk pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, dan/atau pengadaan aset yang termasuk dalam kelompok Jalan, Irigasi, dan Jaringan. Belanja tersebut memenuhi kriteria pengakuan sebagai aset tetap karena memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah.

(b) Utang

Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan dari pengakuan utang senilai Rp854.451.848,00 terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Nilai tersebut merupakan pekerjaan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, dan/atau

pemeliharaan yang memenuhi kriteria kapitalisasi sebagai Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan, namun sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 belum dilakukan pembayaran kepada pihak penyedia.

Atas pekerjaan yang telah selesai dan telah memenuhi kriteria pengakuan aset tetap tersebut, Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah mengakui penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan serta mencatat kewajiban berupa utang belanja sesuai dengan dokumen sumber yang tersedia. Dengan demikian, nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun Anggaran 2025 bertambah senilai Rp854.451.848,00 dan disajikan sebagai bagian dari saldo aset tetap per 31 Desember 2025.

(c) Reklas antar KIB APBD

Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan dari reklasifikasi antar KIB APBD senilai Rp1.635.765.000,00 merupakan pemindahan pencatatan aset dari kelompok aset tetap lainnya ke kelompok Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan berdasarkan hasil penelusuran, rekonsiliasi, dan penelaahan data Barang Milik Daerah.

Reklasifikasi tersebut dilakukan karena berdasarkan jenis, fungsi, dan karakteristik aset, barang/pekerjaan yang sebelumnya tercatat pada kelompok Peralatan dan Mesin serta Konstruksi Dalam Pengerjaan lebih tepat disajikan sebagai Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan. Reklasifikasi antar KIB tersebut tidak menambah nilai Aset Tetap secara keseluruhan, melainkan hanya memindahkan penyajian nilai aset antar kelompok aset tetap agar sesuai dengan substansi, jenis, dan kondisi aset. Rincian reklasifikasi antar KIB APBD ke Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7. 86
Rincian reklasifikasi antar KIB ke Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan

No	Nama OPD	Sebelum Reklas	Reklasifikasi Ke	Jumlah Barang	Nilai
1	Dinas Kesehatan	Peralatan dan Mesin	Jalan, Irigasi dan Jaringan	4	1.485.000.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Jalan, Irigasi dan Jaringan	3	150.765.000,00
Total				**7**	**1.635.765.000,00**

Atas reklasifikasi tersebut, nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun Anggaran 2025 bertambah senilai Rp1.635.765.000,00, dengan rincian berasal dari reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp1.485.000.000,00 dan reklasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp150.765.000,00.

2) Pengurangan Aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang senilai Rp12.038.341.178,40 dapat dilihat pada rincian tabel berikut:

Tabel 7. 87
Rincian Pengurangan Aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Dalam Rupiah

No	Nama SKPD/Unit Kerja	Pengurangan
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10.468.883.138,40
2	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	92.352.000,00
3	Dinas Kesehatan	1.250.000,00
4	Puskesmas Pangale	13.000.000,00
5	Puskesmas Polocamba	1.429.000,00
6	Puskesmas Salugatta	1.327.000,00
7	Puskesmas Tobadak	5.000.000,00
8	Puskesmas Salupangkang	5.000.000,00
9	Puskesmas Lara	5.000.000,00
10	Rumah Sakit Umum Daerah	199.628.595,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6.373.360,00

No	Nama SKPD/Unit Kerja	Pengurangan
12	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	30.926.000,00
13	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	721.669.370,00
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.000.000,00
15	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan	5.000.000,00
16	Dinas Lingkungan Hidup	373.990.715,00
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	99.012.000,00
18	Kecamatan Pangale	3.500.000,00
Total		**12.038.341.178,40**

Adapun penjelasan pengurangan aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan Tahun Anggaran 2025 senilai Rp12.038.341.178,40 sebagai berikut:

(a) Pembayaran Utang

Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan dari pembayaran utang senilai Rp1.467.153.515,00 terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Nilai tersebut merupakan pembayaran atas pekerjaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang sebelumnya telah diakui sebagai utang dan telah dicatat sebagai aset pada periode sebelumnya. Atas pembayaran tersebut dilakukan penyesuaian pencatatan untuk menghindari pencatatan ganda, sehingga pengurangan ini bukan merupakan penghapusan fisik aset, melainkan koreksi atas mutasi pencatatan karena penyelesaian kewajiban atas pekerjaan yang telah diakui sebelumnya.

(b) Ekstrakomptabel

Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan dari ekstrakom senilai Rp1.250.000,00 terdapat pada Dinas Kesehatan. Nilai tersebut merupakan pengadaan Tahun Anggaran 2025 yang pada saat penginputan ke aplikasi SIPD E-BMD teridentifikasi tidak memenuhi standar kapitalisasi untuk diakui sebagai aset tetap intrakomptabel. Berdasarkan mekanisme aplikasi SIPD E-BMD, barang yang nilai perolehannya tidak memenuhi batas kapitalisasi aset tetap secara otomatis tersaring dan tidak dicatat sebagai Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan intrakomptabel, melainkan dicatat sebagai barang ekstrakomptabel sesuai dengan ketentuan kebijakan akuntansi yang berlaku.

(c) Reklasifikasi ke Barang dan Jasa APBD

Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan dari reklasifikasi ke Barang dan Jasa APBD senilai Rp2.573.702.648,00 terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Nilai tersebut merupakan koreksi atas belanja yang semula dicatat sebagai Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan, namun berdasarkan hasil penelaahan dokumen dan substansi transaksi lebih tepat disajikan sebagai Beban Barang dan Jasa. Reklasifikasi tersebut antara lain berupa kegiatan pemeliharaan jalan, pemeliharaan bangunan air bersih/air baku, biaya operasional alat, sewa alat, belanja bahan, honorarium, transportasi, ATK, makan minum rapat, snack, spanduk, serta belanja pendukung kegiatan lainnya yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi aset tetap.

Tabel 7. 88
Rincian Reklasifikasi ke Barang dan Jasa

No	Nama OPD	Sebelum Reklas	Reklasifikasi Ke	Nilai
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Modal Jalan Kabupaten	Beban Barang dan Jasa	2.522.392.500,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	Beban Barang dan Jasa	51.310.148,00
	Total			**2.573.702.648,00**

(d) Reklasifikasi kurang antar KIB APBD

Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan dari reklasifikasi kurang antar KIB APBD/mutasi kapitalisasi antar OPD senilai Rp6.776.137.123,00 merupakan pemindahan pencatatan aset dari kelompok Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan ke

kelompok aset tetap lainnya berdasarkan hasil penelusuran, rekonsiliasi, dan penelaahan data Barang Milik Daerah.

Reklasifikasi tersebut dilakukan karena berdasarkan jenis, fungsi, dan karakteristik aset, terdapat aset yang sebelumnya tercatat pada kelompok Jalan, Irigasi, dan Jaringan, namun lebih tepat disajikan pada kelompok Konstruksi Dalam Pengerjaan, Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, dan Tanah. Reklasifikasi ini tidak mengurangi nilai aset tetap secara keseluruhan, melainkan hanya memindahkan penyajian nilai aset antar kelompok aset tetap dan/atau antar OPD agar sesuai dengan substansi, kondisi, dan penggunaan aset. Rincian reklasifikasi kurang antar KIB APBD/mutasi kapitalisasi antar OPD Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7. 89
Rincian Rekalasifikasi Kurang antar KIB atau Mutasi Kapitalisasi antar OPD

No	Nama OPD	Reklasifikasi Ke	Jumlah Barang	Nilai
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Konstruksi Dalam Pengerjaan	5	721.669.370,00
2	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	Peralatan dan Mesin	8	92.352.000,00
3	Dinas Lingkungan Hidup	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1	99.611.400,00
4	Dinas Lingkungan Hidup	Peralatan dan Mesin	3	149.517.000,00
5	Dinas Lingkungan Hidup	Tanah	1	124.862.315,00
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Gedung dan Bangunan	1	645.211.358,00
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Konstruksi Dalam Pengerjaan	23	4.633.197.085,00
8	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Gedung dan Bangunan	2	11.076.000,00
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1	99.012.000,00
10	Rumah Sakit Umum Daerah	Gedung dan Bangunan	1	199.628.595,00
Total			**46**	**6.776.137.123,00**

(e) Reklasifikasi/Mutasi Kapitalsiasi Antar OPD

Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan dari reklasifikasi kurang antar KIB APBD/mutasi kapitalisasi senilai Rp386.900.000,00 merupakan pemindahan pencatatan aset dari kelompok Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan ke kelompok Aset Tetap Gedung dan Bangunan.

Reklasifikasi tersebut terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Gedung Pos Jaga Permanen yang dimutasi ke Sekretariat DPRD. Berdasarkan hasil penelaahan jenis, fungsi, dan karakteristik aset, aset tersebut lebih tepat disajikan sebagai Aset Tetap Gedung dan Bangunan, bukan sebagai Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan.

Atas reklasifikasi tersebut, nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun Anggaran 2025 dikurangi senilai Rp386.900.000,00, sedangkan Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Sekretariat DPRD bertambah dengan nilai yang sama. Reklasifikasi ini tidak mengurangi nilai aset tetap secara keseluruhan, melainkan hanya memindahkan penyajian nilai aset antar kelompok aset tetap dan antar OPD sesuai dengan substansi, jenis, lokasi, dan penggunaan aset. Rincian reklasifikasi kurang antar KIB APBD/mutasi kapitalisasi Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7. 90
Rincian Reklasifikasi Kurang antar KIB atau Mutasi Kaptalisasi

No	SKPD Asal	Jenis Aset Asal	Nama Barang	SKPD Tujuan	Jenis Aset Tujuan	Jumlah	Nilai
1	Dinas Pekerjaan Umum dan	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Gedung Pos Jaga Permanen	Sekretariat DPRD	Gedung dan Bangunan	1 Unit	386.900.000,00

	Penataan Ruang						
Total						**1 Unit**	**386.900.000,00**

(f) Koreksi Reklas Intrakomptable ke Ekstrakomptable

Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan melalui jurnal koreksi reklasifikasi dari intrakomptabel ke ekstrakomptabel senilai Rp223.229.860,00 merupakan penyesuaian atas aset yang sebelumnya dicatat sebagai aset tetap intrakomptabel. Penyesuaian tersebut dilakukan sebagai konsekuensi dari perubahan kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah terkait pengakuan aset tetap dan penerapan batas kapitalisasi. Berdasarkan hasil penelaahan terhadap nilai perolehan, karakteristik aset, masa manfaat, serta ketentuan batas kapitalisasi yang berlaku, aset dimaksud tidak lagi memenuhi kriteria untuk disajikan sebagai aset tetap intrakomptabel dan lebih tepat diklasifikasikan sebagai barang ekstrakomptabel. Koreksi ini tidak berdampak pada keberadaan fisik aset, melainkan hanya memengaruhi klasifikasi pencatatan dan penyajian aset dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel sesuai dengan kebijakan akuntansi yang berlaku. Rincian jurnal koreksi reklasifikasi intrakomptabel ke ekstrakomptabel dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7. 91
Rincian rekalsifikasi Intrakomptabel ke Ekstrakomptabel

No	Nama OPD/Unit Kerja	Jumlah Barang	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11	152.750.500,00	119.790.479,00
2	Puskesmas Lara	1	5.000.000,00	5.000.000,00
3	Puskesmas Pangale	3	13.000.000,00	8.033.334,00
4	Puskesmas Salupangkang	1	5.000.000,00	5.000.000,00
5	Puskesmas Tobadak	1	5.000.000,00	5.000.000,00
6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8	19.850.000,00	10.977.333,00
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1	6.373.360,00	2.921.124,00
8	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan	1	5.000.000,00	2.208.333,00
9	Kecamatan Pangale	1	3.500.000,00	1.458.333,00
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	5.000.000,00	2.270.833,00
11	Puskesmas Polocamba	1	1.429.000,00	525.158,00
12	Puskesmas Salugatta	1	1.327.000,00	493.202,00
Total		**31**	**223.229.860,00**	**163.678.129,00**

(g) Koreksi Kurang Volume

Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan melalui jurnal koreksi kurang volume senilai Rp403.349.204,69 merupakan penyesuaian atas nilai aset tetap sehubungan dengan adanya selisih volume pekerjaan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Sulawesi Barat atas Laporan Hasil Pemeriksaan Tahun 2023/2024. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelaahan dokumen pendukung, terdapat perbedaan antara volume pekerjaan yang tercatat dalam nilai perolehan aset dengan volume pekerjaan yang seharusnya diakui. Oleh karena itu, dilakukan koreksi untuk menyesuaikan nilai perolehan aset agar penyajian Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan mencerminkan nilai yang lebih wajar sesuai dengan kondisi dan substansi pekerjaan yang sebenarnya.

Koreksi kurang volume tersebut juga berdampak pada penyesuaian akumulasi penyusutan atas aset terkait. Penyesuaian penyusutan yang berasal dari periode sebelum Tahun Anggaran 2025 dicatat sebagai koreksi ekuitas, sedangkan dampak

penyusutan yang berkaitan dengan Tahun Anggaran 2025 dicatat sebagai koreksi beban penyusutan tahun berjalan.

Tabel 7. 92
Rincian Kurang Volume Penyesuaian Akumulasi Penyusutan atas Aset

No	Uraian	Nilai Koreksi	Koreksi Ekuitas	Koreksi Beban	Koreksi Akumulasi Penyusutan
1	Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	1.829.697,70	15.247,48	181.445,02	**196.692,50**
2	Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku	13.973.268,89	58.221,95	1.391.504,69	**1.449.726,65**
3	Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	44.828.336,45	276.193,07	4.455.214,34	**4.731.407,41**
4	Instalasi Air Kotor Lainnya	7.499.147,18	31.246,45	746.790,07	**778.036,52**
5	Jalan Desa	90.867.243,50	11.196.304,96	15.182.875,23	**26.379.180,19**
6	Jalan Kabupaten	172.825.465,74	2.309.897,30	17.180.469,56	**19.490.366,86**
7	Jembatan pada Jalan Desa	79.134.272,94	659.452,27	4.130.253,72	**4.789.705,99**
Total		**410.957.432.40**	**14.546.563,48**	**43.268.552.63**	**57.815.116.11**

(h) Koreksi Reklas ke Barjas

Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan melalui jurnal koreksi reklasifikasi ke Barang dan Jasa senilai Rp199.010.600,00 merupakan penyesuaian atas pengeluaran Tahun Anggaran 2025 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang sebelumnya tercatat sebagai Bangunan Pembuang Irigasi. Nilai tersebut merupakan pekerjaan normalisasi saluran, terdiri dari Normalisasi Desa Pangalloang senilai Rp99.616.600,00 dan Normalisasi Desa Polo Pangale senilai Rp99.394.000,00.

Berdasarkan hasil penelaahan dokumen dan substansi transaksi, pekerjaan normalisasi tersebut tidak memenuhi kriteria kapitalisasi sebagai Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan, karena kegiatan dimaksud hanya bersifat mengembalikan atau menormalkan fungsi saluran, bukan membangun aset baru, menambah kapasitas, memperpanjang masa manfaat, atau meningkatkan manfaat ekonomi aset secara signifikan. Oleh karena itu, nilai tersebut dikoreksi dari Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan dan direklasifikasi ke Barang dan Jasa sesuai dengan substansi belanja yang sebenarnya.

Karena pengeluaran tersebut merupakan transaksi Tahun Anggaran 2025, tidak terdapat koreksi penyusutan tahun-tahun sebelumnya yang dibebankan ke ekuitas. Dampak penyusutan yang timbul hanya berkaitan dengan Tahun Anggaran 2025, yaitu berupa penyesuaian beban penyusutan dan akumulasi penyusutan Tahun Anggaran 2025 senilai Rp19.901.060,00.

Tabel 7. 93
Rincian Reklasifikasi Barang dan Jasa Penyesuaian Beban Penyusutan dan Akumulasi Penyusutan

No	Uraian	Nilai Reklas	Akumulasi 2024	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan
1	Bangunan Pembuang Irigasi	199.010.600,00	-	19.901.060,00	19.901.060,00
Total		**199.010.600,00**	**-**	**19.901.060,00**	**19.901.060,00**

Tabel 7. 94
Rincian Kenaikan/Penurunan Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan

Dalam Rupiah

Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2024	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2025
1.125.160.259.754,04	383.834.922.394,32	(696.477.214.062,89)	(469.956.674.296,56)	(610.355.462.160,65)

Penambahan/Pengurangan Aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Akhir 2024	**Rp**	**1.114.859.229.056,44**
Penambahan :		
- Realisasi belanja modal	Rp	19.849.155.028,00
- Utang	Rp	854.451.848,00
- Reklas antar KIB APBD	Rp	1.635.765.000,00
Sub. Total Penambahan	**Rp**	**22.339.371.876,00**
Pengurangan:		
- Pembayaran Utang	Rp	Rp1.467.153.515,00
- Ekstrakom	Rp	1.250.000,00
- Reklas ke Barang dan jasa APBD	Rp	2.573.702.648,00
- Reklas kurang antar KIB APBD	Rp	6.776.137.123,00
- Reklasifikasi/Mutasi Kapitalsiasi Antar OPD	Rp	386.900.000,00
- Koreksi Reklas Intra ke Ekstra	Rp	223.229.860,00
- Koreksi Kurang Volume	Rp	410.957.432,40
- Koreksi Reklas ke Barjas	Rp	199.010.600,00
Sub Total Pengurangan	**Rp**	**12.038.341.178,40**
Saldo Akhir 2025	**Rp**	**1.125.160.259.754,04**
Akumulasi Penyusutan	Rp	-610.355.462.160,65
Nilai Buku	**Rp**	**514.804.797.593,39**

Tanggal 31 Desember 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang belum menyelesaikan catatan wajib per 31 Desember 2022, terkait dua ruas jalan yang seharusnya dicatat oleh Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan SK Jalan Provinsi Sulawesi Barat Nomor 188.4/278/SULBAR/VII/2024, namun masih tercatat sebagai aset tetap di Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dengan ruas sebagai berikut:

1) Jalan Polohu – Babana (Pelabuhan)
2) Jalan Tobadak II – Tobadak VIII

Adapun hasil dari tindak lanjut tersebut Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat telah bersedia menerima hibah tersebut dengan bukti Surat Pernyataan Bersedia Menerima Hibah Barang Milik Daerah dari Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dengan Nomor Surat : 000.4.3.2/47/2024 Tanggal 20 Oktober 2024.

Dasar nilai pencatatan Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah berdasarkan pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan nilai Realisasi Anggaran yang terdapat Pada OPD. Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah belum menggunakan jasa Tim Penilai/Penaksir yang telah memiliki Sertifikasi sebagaimana yang dipersyaratkan.

Nilai Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun berjalan dan tahun sebelumnya diketahui terjadi penambahan dan pengurangan nilai catat hal ini disebabkan adanya proses mutasi tambah, mutasi kurang, dan reklasifikasi.

Kesalahan Penganggaran pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah, terjadi disebabkan adanya perubahan kebijakan yang berimplikasi pada pelaksana pengguna anggaran khususnya kepada OPD atas kekeliruan pemilihan kodefikasi dan rekening belanja.

Rincian Aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disesuaikan dengan rincian Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah. Berdasarkan SK Jalan Provinsi Sulawesi Barat Nomor 188.4/278/SULBAR/VII/2024 dan SK Penetapan Ruas Jalan Kabupaten Mamuju Tengah Nomor : 607/42/I/2024 tanggal 06 Januari 2024.

Berdasarkan SK Penetapan Ruas Jalan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor : 607/42/I/2024 tanggal 06 Januari 2024 terdapat 93 Jalan Kabupaten dan 225 Ruas Jalan yang tercatat dalam daftar pembukuan Pemerintah Daerah.

Dalam pencatatan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dengan berdasarkan SK Jalan diketahui seluruhnya belum memiliki sertifikat hak secara legal sebagai dasar pengakuan sah sebagai aset Pemerintah Daerah. Kondisi ini dapat mengakibatkan terjadinya dobel intervensi penganggaran antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

Pengadaan Aset Tetap berupa sambungan rumah (SR) yang telah dinyatakan hilang dan tidak diketahui keberadaannya dan telah dilaporkan kepada Kepolisian. Mengenai hal ini Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah akan melakukan penelusuran dan investigasi yang selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

e) Aset Tetap Lainnya

Aset tetap Lainnya adalah aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Adapun Batasan minimal kapitalisasi aset tetap (*capitalization thresholds*) ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 7. 95
Batasan Kapitalisasi Untuk Pengadaan Baru Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/ Satuan (Rp)
1.3.5	Aset Tetap Lainnya, terdiri atas:	
1.3.5.01	Bahan Perpustakaan	150.000
1.3.5.02	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	300.000
1.3.5.03	Hewan	1.000.000
1.3.5.04	Biodata Perairan	1.000.000
1.3.5.05	Tanaman	Persediaan
1.3.5.06	Barang Koleksi Non Budaya	1.000.000
1.3.5.07	Aset Tetap Dalam Renovasi	20.000.000

Saldo Aset tetap Lainnya per tanggal 31 Desember 2025 senilai Rp8.949.488.740,01 mengalami penurunan senilai Rp666.752.077,90 atau 6,93% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp9.616.240.817,91. Akumulasi penyusutan Aset tetap Lainnya per 31 Desember 2025 senilai Rp2.439.167.292,57, sehingga nilai buku pada tanggal pelaporan senilai Rp6.510.321.447,45, rincian dapat dilihat pada *lampiran 13.*

Tabel 7. 96
Penambahan/Pengurangan Aset tetap Lainnya

Dalam Rupiah

Uraian	Saldo Akhir 31 Des 2024	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 31 Des 2025
Aset tetap Lainnya	9.616.240.817,91	1.509.889.157,00	2.176.641.234,90	8.949.488.740,01

1) Penambahan aset tetap lainnya senilai Rp1.509.889.157,00 dapat dilihat pada rincian tabel berikut:

Tabel 7. 97
Rincian Penambahan Aset tetap Lainnya pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah

Dalam Rupiah

No	Nama SKPD	Penambahan
1	Puskesmas Lara	87.366.250,00
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.422.522.907,00
Jumlah		**1.509.889.157,00**

Adapun penjelasan penambahan aset tetap lainnya senilai Rp1.509.889.157,00 sebagai berikut:

(a) Realisasi Belanja Modal

Penambahan Aset Tetap Lainnya dari realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 senilai Rp1.509.889.157,00 merupakan belanja modal yang direalisasikan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah untuk pengadaan aset tetap yang diklasifikasikan ke dalam kelompok Aset Tetap Lainnya. Belanja modal tersebut memenuhi kriteria pengakuan sebagai aset tetap karena memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan, digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah, serta memberikan manfaat ekonomi dan/atau sosial pada periode berjalan maupun periode berikutnya.

Atas realisasi belanja modal tersebut, nilai Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2025 bertambah senilai Rp1.509.889.157,00 dan disajikan sebagai bagian dari saldo Aset Tetap Lainnya pada Neraca per 31 Desember 2025.

2) Pengurangan aset tetap lainnya senilai Rp2.176.641.234,90 dapat dilihat pada rincian tabel berikut:

Tabel 7. 98
Rincian Pengurangan Aset tetap Lainnya pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah

Dalam Rupiah

No	Nama SKPD	Pengurangan
1	Sekretariat Daerah	2.300.000,00
2	Dinas Perhubungan	11.880.000,00
3	Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian	10.000.000,00
4	Dinas Kesehatan	132.000,00
5	Puskesmas Lara	87.366.250,00
6	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	1.784.046.438,00
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	14.000.000,00
8	Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah	33.776.147,00
9	Inspektorat	4.922.625,00
10	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan	10.000.000,00
11	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	13.945.000,00
12	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	186.272.774,90
13	Kecamatan Tobadak	18.000.000,00
Total		**2.176.641.234,90**

Adapun penjelasan Pengurangan aset tetap lainnya senilai Rp2.176.641.234,90 sebagai berikut:

(a) Reklas ke Barang dan Jasa APBD

Pengurangan Aset Tetap Lainnya dari reklasifikasi ke Barang dan Jasa APBD senilai Rp79.180.017,00 merupakan koreksi atas belanja yang sebelumnya dicatat sebagai Belanja Modal Buku Umum pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Berdasarkan hasil penelaahan terhadap nilai perolehan, jenis barang, karakteristik, serta substansi transaksi, belanja tersebut lebih tepat diklasifikasikan sebagai Beban Barang dan Jasa karena tidak memenuhi kriteria kapitalisasi sebagai Aset Tetap Lainnya.

Oleh karena itu, nilai belanja dimaksud dikeluarkan dari pencatatan Aset Tetap Lainnya dan direklasifikasi ke Beban Barang dan Jasa sesuai dengan substansi belanja yang sebenarnya. Koreksi ini tidak memengaruhi keberadaan fisik barang, melainkan hanya mengubah klasifikasi penyajian dari Aset Tetap Lainnya menjadi Beban Barang dan Jasa.

Untuk penganggaran tahun berikutnya, apabila sejak tahap perencanaan telah diketahui bahwa buku yang akan dibelanjakan tidak memenuhi standar kapitalisasi aset tetap sesuai kebijakan akuntansi, maka penganggaran sebaiknya tidak menggunakan rekening belanja modal aset tetap. Penganggaran dapat menggunakan kode rekening 5.1.02.01.04.0710 Belanja Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum, yaitu sub rincian objek yang digunakan untuk mencatat belanja aset tetap lainnya berupa bahan perpustakaan tercetak/buku umum yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(b) Reklas kurang antar KIB APBD

Pengurangan Aset Tetap Lainnya dari reklasifikasi kurang antar KIB senilai Rp87.366.250,00 terdapat pada Puskesmas Lara sebanyak 29 buah barang. Reklasifikasi tersebut merupakan koreksi atas kesalahan penganggaran belanja modal, khususnya pada pemilihan kodefikasi jenis aset. Barang yang sebelumnya dianggarkan dan dicatat pada kelompok Aset Tetap Lainnya, berdasarkan hasil penelaahan terhadap

jenis, fungsi, karakteristik, dan substansi barang, lebih tepat diklasifikasikan sebagai Aset Tetap Peralatan dan Mesin.

Atas reklasifikasi tersebut, nilai Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2025 dikurangi senilai Rp87.366.250,00 dan direklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin. Reklasifikasi ini tidak mengurangi nilai Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah secara keseluruhan, melainkan hanya memindahkan penyajian nilai aset antar kelompok aset tetap sebagai akibat dari koreksi atas kesalahan penganggaran dan kodefikasi jenis aset. Rincian reklasifikasi kurang antar KIB APBD Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7. 99
Rincian Reklasifikasi Kurang antar KIB

No	Nama OPD	Sebelum Reklas	Reklasifikasi Ke	Jumlah Barang	Nilai
1	Puskesmas Lara	Aset Tetap Lainnya	Peralatan dan Mesin	29	87.366.250,00
Total				**29**	**87.366.250,00**

(c) Ekstrakomptable Dana BOS

Pengurangan Aset Tetap Lainnya dari ekstrakom Dana BOS senilai Rp8.512.100,00 merupakan koreksi atas barang hasil pengadaan yang bersumber dari Dana BOS yang sebelumnya dicatat sebagai Aset Tetap Lainnya.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap nilai perolehan, jenis barang, masa manfaat, serta ketentuan batas kapitalisasi aset tetap, barang-barang tersebut tidak memenuhi kriteria untuk dicatat sebagai aset tetap intrakomptabel. Oleh karena itu, barang dimaksud dikeluarkan dari pencatatan Aset Tetap Lainnya dan dicatat sebagai barang ekstrakomptabel.

Koreksi tersebut tidak menghapus keberadaan fisik barang, melainkan hanya mengubah klasifikasi pencatatan dari aset tetap intrakomptabel menjadi barang ekstrakomptabel sesuai dengan ketentuan kebijakan akuntansi yang berlaku. Rincian ekstrakom Dana BOS Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7. 100
Rincian Ekstrakomptable Dana BOS

No	Status Penggunaan	Jumlah	Nilai
1	UPTD SDN Bulu Rembu	48	5.808.000,00
2	UPTD SD Negeri Lembaharapan	4	452.600,00
3	UPTD SDK Sampolotu	1	131.100,00
4	UPTD SD Negeri Salulebo	9	1.053.100,00
5	UPTD SD Negeri Tanete Baha	4	420.200,00
6	UPTD SDN Rante Mario	4	420.200,00
7	UPTD SMP Negeri 2 Budong-Budong	2	226.900,00
Total		**72**	**8.512.100,00**

(d) Reklas kurang antar KIB Dana BOS

Pengurangan Aset Tetap Lainnya dari reklasifikasi kurang antar KIB Dana BOS senilai Rp123.414.900,00 merupakan koreksi atas barang yang bersumber dari Dana BOS yang sebelumnya dicatat sebagai Aset Tetap Lainnya, namun berdasarkan jenis, fungsi, dan karakteristik barang lebih tepat diklasifikasikan sebagai Aset Tetap Peralatan dan Mesin. Barang tersebut antara lain berupa sound system, microphone, LCD projector/infocus, loudspeaker, amplifier, alat musik, kipas angin, lemari kaca, rak sepatu, dan peralatan lainnya pada satuan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Atas reklasifikasi tersebut, nilai Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2025 dikurangi senilai Rp123.414.900,00 dan direklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin. Reklasifikasi ini tidak mengurangi nilai aset tetap secara keseluruhan, melainkan hanya memindahkan penyajian antar kelompok aset tetap sesuai dengan substansi barang. Rincian reklasifikasi kurang antar KIB Dana BOS Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7. 101
Rincian Reklasifikasi Kurang antar KIB Dana Bos

No	Nama Sekolah/UPB	Nilai
1	UPTD SD Inpres Bayor	6.600.000,00
2	UPTD SDN Sinabatta	4.000.000,00
3	UPTD SD Inpres Tabolang	600.000,00
4	UPTD SD Inpres Ngapaboa	5.000.000,00
5	UPTD SDK Salunusu	1.500.000,00
6	UPTD SDK Tanjung Lallere	1.400.000,00
7	UPTD SMPN 6 Topoyo	7.034.900,00
8	UPTD SD Inpres Batu Parigi	7.939.000,00
9	UPTD SD Inpres Tasantung	2.500.000,00
10	UPTD SMP Negeri 2 Tobadak	29.226.000,00
11	UPTD SMP Negeri 5 Tobadak	3.765.000,00
12	UPTD SDN Bulu Rembu	2.600.000,00
13	UPTD SD Inpres Salumanurung	5.000.000,00
14	UPTD SMPN 7 Budong-Budong	2.000.000,00
15	UPTD SMP Negeri 6 Budong-Budong	23.630.000,00
16	UPTD SD Negeri Kombiling	4.500.000,00
17	UPTD SD Inpres Karama	1.180.000,00
18	UPTD SMP Negeri 3 Pangale	14.940.000,00
Total		**123.414.900,00**

(e) Reklas ke Beban Barang dan Jasa Dana BOS

Pengurangan Aset Tetap Lainnya dari reklasifikasi ke Barang dan Jasa Dana BOS senilai Rp1.136.114.500,00 merupakan koreksi atas pengadaan bahan perpustakaan/buku umum yang bersumber dari Dana BOS/BOSP, yang sebelumnya dicatat sebagai Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, namun berdasarkan hasil penelaahan tidak memenuhi standar kapitalisasi aset tetap sesuai kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah.

Berdasarkan kebijakan akuntansi yang berlaku, nilai satuan barang di bawah standar kapitalisasi senilai Rp150.000,00 tidak memenuhi kriteria untuk diakui sebagai aset tetap. Oleh karena itu, pengadaan buku umum yang nilai satuannya berada di bawah batas kapitalisasi tersebut seharusnya dianggarkan dan dicatat menggunakan rekening 5.1.02.01.04.0710 Belanja Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum, dan selanjutnya direklasifikasi ke Beban Barang dan Jasa BOS sesuai substansi belanja yang sebenarnya.

Atas koreksi tersebut, nilai Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2025 dikurangi senilai Rp1.136.114.500,00 dan direklasifikasi ke Barang dan Jasa Dana BOS. Koreksi ini tidak memengaruhi keberadaan fisik buku, melainkan hanya mengubah klasifikasi penyajian dari Aset Tetap Lainnya menjadi Beban Barang dan Jasa BOS sesuai dengan ketentuan kapitalisasi aset tetap yang berlaku.

(f) Reklasifikasi Intrakomptabel ke Ekstrakomptabel

Pengurangan Aset Tetap Lainnya dari reklasifikasi intrakomptabel ke ekstrakomptabel senilai Rp742.053.467,90 merupakan koreksi atas aset yang sebelumnya dicatat sebagai Aset Tetap Lainnya intrakomptabel. Koreksi tersebut dilakukan sebagai dampak penerapan kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah terkait pengakuan aset tetap dan batas kapitalisasi. Berdasarkan hasil penelaahan terhadap nilai perolehan, jenis aset, karakteristik, masa manfaat, dan ketentuan batas kapitalisasi, aset dimaksud lebih tepat diklasifikasikan sebagai barang ekstrakomptabel. Koreksi ini tidak menghapus keberadaan fisik barang, melainkan hanya mengubah klasifikasi pencatatan dan penyajian dari aset intrakomptabel menjadi

barang ekstrakomptabel. Rincian Reklasifikasi aset intrakomptabel ke ekstrakomptabel dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7. 102
Rincian Reklasifikasi Aset Intrakomptabel ke Ekstrakomptabel

No	Organisasi	Nilai Perolehan	Beban Penyusutan/ Amortisasi	Penyusutan/ Amortisasi s.d. 2024	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi
1	Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah	33.776.147,00	2.888.889,00	23.333.333,00	26.222.222,00
2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	10.000.000,00	520.833,00	9.479.167,00	10.000.000,00
3	Dinas Kesehatan	132.000,00	-	-	-
4	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	10.000.000,00	1.666.667,00	8.333.333,00	10.000.000,00
5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	14.000.000,00	1.798.611,00	8.604.167,00	10.402.778,00
6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	436.824.921,00	-	-	-
7	Dinas Perhubungan	11.880.000,00	1.584.000,00	3.960.000,00	5.544.000,00
8	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	186.272.774,90	-	-	-
9	Inspektorat	4.922.625,00	-	-	-
10	Kecamatan Tobadak	18.000.000,00	-	-	-
11	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	13.945.000,00	290.521,00	13.654.479,00	13.945.000,00
12	Sekretariat Daerah	2.300.000,00	-	-	-
	Total	**742.053.467,90**	**8.749.521,00**	**67.364.479,00**	**76.114.000,00**

Akumulasi penyusutan Aset tetap Lainnya senilai (Rp2.439.167.292,57) dan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 7. 103
Rincian Kenaikan/Penurunan Akumulasi Penyusutan Aset tetap Lainnya

Dalam Rupiah

Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2024	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2025
8.949.488.740,01	(2.111.636.002,00)	(1.339.662.558,40)	(1.012.131.267,83)	(2.439.167.292,57)

Penambahan/Pengurangan Aset tetap Lainnya adalah sebagai berikut:

Saldo Akhir 2024	**Rp**	**9.616.240.817,91**
Penambahan :		
- Realisasi belanja modal	Rp	1.509.889.157,00
Sub. Total Penambahan	**Rp**	**1.509.889.157,00**
Pengurangan:		
- Reklas ke Barang dan jasa APBD	Rp	79.180.017,00
- Reklas kurang antar KIB APBD	Rp	87.366.250,00
- Ekstrakom Dana BOS	Rp	8.512.100,00
- Reklas kurang antar KIB Dana BOS	Rp	123.414.900,00
- Reklas ke Barang dan jasa Dana BOS	Rp	1.136.114.500,00
- Reklasifikasi Intra ke Ekstra	Rp	742.053.467,90
Sub Total Pengurangan	**Rp**	**2.176.641.234,90**
Saldo Akhir 2025	**Rp**	**8.949.488.740,01**
Akumulasi Penyusutan	Rp	(2.439.167.292,57)
Nilai Buku	**Rp**	**6.510.321.447,45**

f) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal Laporan Keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup Tanah, Peralatan dan mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa lebih dari satu periode akuntansi.

Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan : Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada saat penyusunan laporan keuangan jika:

1) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang
2) Berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
3) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
4) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

Konstruksi Dalam Pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahterimakan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya. Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:

Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi antara lain meliputi:

1) Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
2) Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
3) Biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan-bahan dari dan ke tempat lokasi pekerjaan;
4) Biaya penyewaan sarana dan prasarana; dan
5) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi, seperti biaya konsultan perencana.

Biaya-biaya yang dapat distribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu, meliputi:

1) Asuransi;
2) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara tidak langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan
3) Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasikan untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:

1) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
2) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
3) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar;
4) Uang muka kerja yang diberikan; dan
5) Retensi.

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 senilai Rp41.950.516.092,76 Nilai tersebut mengalami kenaikan senilai Rp5.105.458.323,09 atau 13,86% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp36.845.057.769,67 sebagaimana diuraikan pada *lampiran 14*.

Tabel 7. 104
Rincian Penambahan/Pengurangan Konstruksi dalam Pengerjaan

Dalam Rupiah

Uraian	Saldo Akhir 31 Desember 2024	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 31 Desember 2025
Konstruksi dalam Pengerjaan	36.845.057.769,67	19.591.672.923,00	14.486.214.599,91	41.950.516.092,76

1) Penambahan KDP senilai Rp19.591.672.923,00 dapat dilihat pada rincian tabel berikut:

Tabel 7. 105
Rincian Penambahan Konstruksi dalam Pengerjaan

Dalam Rupiah

No	Nama Dinas	Mutasi Tambah
1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	4.883.739.035,00
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	721.669.370,00

No	Nama Dinas	Mutasi Tambah
3	Inspektorat	2.277.323.700,00
4	Dinas Lingkungan Hidup	99.611.400,00
5	Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata	11.510.317.418,00
6	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	99.012.000,00
Jumlah		**19.591.672.923,00**

Adapun penjelasan penambahan konstruksi dalam pengerjaan Tahun 2025 senilai Rp19.591.672.923,00 sebagai berikut:

(a) Reklas tambah antar KIB

Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan dari reklasifikasi tambah antar KIB senilai Rp19.341.130.973,00 merupakan pemindahan pencatatan aset ke kelompok Konstruksi Dalam Pengerjaan. Reklasifikasi tersebut dilakukan karena berdasarkan hasil penelaahan terhadap substansi pekerjaan dan kondisi fisik aset, terdapat pekerjaan yang belum sepenuhnya memenuhi kriteria sebagai aset tetap atau belum siap digunakan sampai dengan 31 Desember 2025.

Reklasifikasi tersebut berasal dari aset yang sebelumnya dicatat pada kelompok Gedung dan Bangunan serta Jalan, Irigasi, dan Jaringan, kemudian direklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan. Pekerjaan dimaksud antara lain berupa pembangunan Gedung Kantor Inspektorat, pembangunan Gedung Sport Center, pembangunan Lapangan Tennis, pembangunan Lapangan Panahan, rehabilitasi bendung dan jaringan irigasi, pembangunan jembatan, perencanaan/pengawasan pekerjaan konstruksi, serta pekerjaan konstruksi lainnya.

Atas reklasifikasi tersebut, saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun Anggaran 2025 mengalami penambahan senilai Rp19.341.130.973,00. Reklasifikasi dimaksud tidak berdampak pada penambahan nilai aset tetap Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah secara keseluruhan, melainkan merupakan penyesuaian klasifikasi penyajian antar kelompok aset tetap. Penyesuaian tersebut dilakukan agar penyajian aset mencerminkan substansi transaksi, kondisi fisik, serta tingkat penyelesaian pekerjaan sampai dengan tanggal pelaporan. Rincian reklasifikasi tambah antar KIB ke Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7. 106
Rincian Reklasifikasi tambah antar KIB ke KDP

No	Nama OPD	Sebelum Reklas	Reklasifikasi Ke	Nilai
1	Inspektorat	Gedung dan Bangunan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	2.277.323.700,00
2	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	Gedung dan Bangunan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	11.510.317.418,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	4.633.197.085,00
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	721.669.370,00
5	Dinas Lingkungan Hidup	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	99.611.400,00
6	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	99.012.000,00
	Total			**19.341.130.973,00**

(b) Penambahan Progres Fisik

Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan dari penambahan progres fisik senilai Rp250.541.950,00 merupakan penyesuaian kembali atas nilai pekerjaan Uprating Instalasi Pengolahan Air (IPA)/Penambahan Sumur Dalam Terlindungi/Broncaptering.

Pada Tahun Anggaran 2024, terhadap pekerjaan tersebut telah dilakukan pengurangan nilai aset berdasarkan progres fisik pekerjaan yang belum sepenuhnya terselesaikan. Namun pada Tahun Anggaran 2025, pekerjaan dimaksud telah diselesaikan, sehingga Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah melakukan penyesuaian kembali dengan mengakui penambahan nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai nilai aset yang sebelumnya telah dikoreksi.

Dengan demikian, penambahan nilai tersebut bukan merupakan pengadaan baru, melainkan merupakan pemulihan/penyesuaian kembali atas nilai pekerjaan yang pada tahun sebelumnya telah dikurangi karena belum mencapai progres fisik yang seharusnya. Atas penyesuaian tersebut, saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun Anggaran 2025 bertambah senilai Rp250.541.950,00 sesuai dengan realisasi penyelesaian pekerjaan sampai dengan tanggal pelaporan.

2) Pengurangan KDP senilai Rp14.486.214.599,91 dapat dilihat pada rincian tabel berikut:

Tabel 7. 107
Rincian Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah

Dalam Rupiah

No	Nama SKPD	Pengurangan
1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	150.765.000,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah	1.008.317.700,00
3	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	4.322.727.512,40
4	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	9.004.404.387,51
	Jumlah	**14.486.214.599,91**

Adapun penjelasan Pengurangan senilai Rp14.486.214.599,91 sebagai berikut:

(a) Reklasifikasi Kurang Antar KIB

Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan dari reklasifikasi kurang antar KIB APBD senilai Rp14.486.214.599,91 merupakan reklasifikasi atas pekerjaan konstruksi yang telah selesai dan memenuhi kriteria untuk dipindahkan dari Konstruksi Dalam Pengerjaan ke kelompok aset tetap definitif sesuai dengan jenis dan substansi asetnya.

Reklasifikasi tersebut dilakukan karena sampai dengan Tahun Anggaran 2025 pekerjaan telah selesai, telah memberikan manfaat, dan/atau telah memenuhi kondisi siap digunakan. Dengan demikian, nilai pekerjaan yang sebelumnya disajikan sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan tidak lagi memenuhi kriteria untuk tetap disajikan sebagai KDP, sehingga direklasifikasi ke kelompok aset tetap yang sesuai. Rincian pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun Anggaran 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

(1) Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp150.765.000,00 merupakan KDP selesai Tahun Pembukuan 2025 berupa Perencanaan Instalasi Air Bersih yang direklasifikasi ke kelompok aset tetap sesuai substansi pekerjaannya.
(2) Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp1.008.317.700,00 merupakan KDP selesai berupa Gedung UTD yang direklasifikasi ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan.
(3) Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp4.322.727.512,40 merupakan KDP selesai yang direklasifikasi ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan.
(4) Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan senilai Rp9.004.404.387,51 merupakan KDP selesai yang direklasifikasi ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan.

Atas reklasifikasi tersebut, saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun Anggaran 2025 berkurang senilai Rp14.486.214.599,91. Reklasifikasi ini tidak mengurangi nilai aset tetap Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah secara keseluruhan, melainkan merupakan pemindahan penyajian nilai aset dari Konstruksi Dalam Pengerjaan ke kelompok aset tetap definitif karena pekerjaan telah selesai dan memenuhi kriteria siap digunakan.

Penambahan/Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan :

Saldo Akhir 2024	**Rp**	**36.845.057.769,67**
Penambahan :		
- Reklas tambah antar KIB	Rp	19.341.130.973,00
- Penambahan Progres Fisik	Rp	250.541.950,00
Sub. Total Penambahan	**Rp**	**19.591.672.923,00**

Pengurangan:		
- Reklas kurang antar KIB	Rp	14.486.214.599,91
Sub Total Pengurangan	**Rp**	**14.486.214.599,91**
Saldo Akhir 2025	**Rp**	**41.950.516.092,76**
Akumulasi Penyusutan	Rp	-
Nilai Buku	**Rp**	**41.950.516.092,76**

g) Akumulasi Penyusutan

Pada Tahun Pembukuan 2024, penetapan masa manfaat aset tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah mengacu pada Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi. Ketentuan masa manfaat tersebut diterapkan terhadap seluruh aset tetap sejak aset diperoleh, kecuali tanah dan konstruksi dalam pengerjaan. Seluruh aset tetap yang memenuhi kriteria penyusutan disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik masing-masing aset.

Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah menerapkan Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi, yang merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Kebijakan tersebut mengamanatkan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah berbasis akrual.

Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (straight line method) berdasarkan tahun perolehan aset. Penyusutan setiap periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada akun Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap. Dalam perhitungan penyusutan, Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah menetapkan nilai residu senilai nol sesuai dengan ketentuan kebijakan akuntansi yang berlaku.

Pada Tahun Pembukuan 2025, terdapat kenaikan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang cukup signifikan dibandingkan dengan Tahun 2024. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada LKPD Unaudited Tahun 2025 mengalami kenaikan senilai Rp625.499.481.650,03 atau 75,44% dibandingkan dengan Tahun 2024. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh adanya penyesuaian data aset tetap sebagai dampak migrasi database dari aplikasi SIMDA BMD ke aplikasi SIPD E-BMD.

Dalam proses migrasi tersebut, ditemukan beberapa aset tetap yang nilai akumulasi penyusutannya belum sepenuhnya mencerminkan perhitungan penyusutan sesuai dengan ketentuan kebijakan akuntansi yang berlaku. Atas kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah melakukan koreksi dan penyesuaian terhadap saldo awal akumulasi penyusutan agar nilai yang disajikan dalam laporan keuangan menjadi lebih wajar dan andal.

Selain disebabkan oleh dampak migrasi sistem informasi, pada Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah juga melakukan penyesuaian kebijakan akuntansi terkait masa manfaat aset tetap serta penyempurnaan metode perhitungan penyusutan berbasis tahunan. Penyesuaian tersebut mengacu pada Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 34 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, perubahan kebijakan akuntansi terkait masa manfaat aset tetap seharusnya diterapkan secara prospektif. Penerapan prospektif dimaksud adalah penerapan perubahan kebijakan terhadap periode berjalan dan periode selanjutnya sejak tanggal perubahan kebijakan diberlakukan, dengan menggunakan nilai buku dan sisa masa manfaat aset pada saat perubahan kebijakan tersebut diterapkan. Namun demikian, dalam penyusunan LKPD Unaudited Tahun 2025 masih terdapat beberapa penyesuaian aset tetap yang diterapkan dengan pendekatan retrospektif.

Atas kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah melakukan jurnal balik atas koreksi atau penyesuaian yang sebelumnya dicatat dengan pendekatan retrospektif. Selanjutnya, dilakukan perhitungan ulang penyusutan aset tetap dengan menerapkan perubahan kebijakan akuntansi secara prospektif, yaitu berdasarkan nilai buku aset dan sisa masa manfaat pada saat perubahan kebijakan diberlakukan.

Dalam penyusunan LKPD Audited Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah telah melakukan perhitungan ulang penyusutan aset tetap dengan menerapkan pendekatan prospektif. Pendekatan tersebut digunakan karena perubahan masa manfaat aset tetap merupakan karakteristik dari perubahan estimasi akuntansi, sehingga dampaknya diperhitungkan sejak periode berjalan dan periode selanjutnya, bukan dengan menghitung kembali seluruh penyusutan sejak aset diperoleh.

Perhitungan ulang penyusutan secara prospektif dilakukan dengan menggunakan nilai buku aset tetap dan sisa masa manfaat pada saat perubahan kebijakan diberlakukan. Dengan pendekatan tersebut, beban penyusutan Tahun 2025 dihitung berdasarkan estimasi masa manfaat yang baru, sedangkan akumulasi penyusutan periode sebelumnya tetap menjadi dasar dalam menentukan nilai buku awal yang digunakan untuk perhitungan penyusutan tahun berjalan dan tahun berikutnya.

Perhitungan penyusutan pada tahap penyusunan LKPD Audited Tahun 2025 dilakukan dengan menggunakan kertas kerja Microsoft Excel sebagai alat bantu perhitungan. Kertas kerja tersebut digunakan untuk memastikan bahwa beban penyusutan Tahun 2025, akumulasi penyusutan, dan nilai buku aset tetap telah dihitung kembali sesuai dengan karakteristik penerapan prospektif atas perubahan estimasi masa manfaat aset tetap.

Namun demikian, dalam proses perhitungan tersebut masih terdapat perbedaan nilai desimal antara hasil perhitungan dalam kertas kerja Excel dengan saldo Neraca pada SIPD Aklap hasil jurnal. Perbedaan tersebut disebabkan oleh formula perhitungan penyusutan dalam kertas kerja Excel yang belum sepenuhnya menggunakan pembulatan sampai dua angka di belakang koma atau fungsi ROUND 2. Akibatnya, terdapat selisih koma atau selisih desimal antara hasil perhitungan penyusutan pada kertas kerja, nilai jurnal penyesuaian, dan saldo yang tersaji pada Neraca SIPD Aklap.

Selisih desimal tersebut tidak mempengaruhi keberadaan fisik aset tetap dan tidak mengubah substansi penerapan prospektif atas perubahan estimasi masa manfaat aset tetap. Selisih tersebut lebih disebabkan oleh perbedaan teknis pembulatan angka dalam proses perhitungan dan penyajian saldo pada sistem. Namun demikian, selisih dimaksud tetap perlu menjadi perhatian agar terdapat kesesuaian antara kertas kerja perhitungan penyusutan, jurnal penyesuaian, dan saldo Neraca SIPD Aklap.

Sehubungan dengan hal tersebut, penyesuaian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2025 merupakan bagian dari proses penyempurnaan data aset tetap, penyesuaian atas dampak migrasi sistem informasi, jurnal balik atas penerapan retrospektif yang tidak sesuai, serta perhitungan ulang penyusutan berdasarkan penerapan prospektif atas perubahan estimasi masa manfaat aset tetap.

Penyesuaian ini tidak mempengaruhi keberadaan fisik aset tetap, melainkan mempengaruhi nilai tercatat aset tetap, akumulasi penyusutan, nilai buku, dan beban penyusutan yang disajikan dalam laporan keuangan. Dengan dilakukannya jurnal balik dan perhitungan ulang tersebut, saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2025 diharapkan telah mencerminkan nilai yang lebih wajar, andal, dan sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah serta hasil koreksi selama proses pemeriksaan.

Untuk meningkatkan keandalan perhitungan dan kesesuaian saldo pada periode berikutnya, direkomendasikan agar Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah melakukan penyempurnaan kertas kerja perhitungan penyusutan dengan menerapkan pembulatan dua angka di belakang koma secara konsisten. Selain itu, apabila pada tahun berikutnya masih terdapat selisih desimal antara hasil perhitungan penyusutan dengan saldo Neraca SIPD Aklap, maka perlu dilakukan koreksi penyesuaian atas selisih koma tersebut agar penyajian akumulasi penyusutan, beban penyusutan, dan nilai buku aset tetap dapat tersaji secara lebih selaras, wajar, dan andal.

Tabel 7. 108
Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan Aset tetap
Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025

Dalam Rupiah

No	Uraian	Akumulasi Penyusutan 31/12/2024	Akumulasi Penyusutan 31/12/2025
1	Tanah	-	-

2	Peralatan dan mesin	230.038.851.774,52	273.829.497.962,07
3	Gedung dan Bangunan	213.122.029.201,81	249.069.435.733,80
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	383.834.922.394,32	610.355.462.160,65
5	Aset tetap Lainnya	2.111.636.002,00	2.439.167.292,57
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
Jumlah		**829.107.439.372,65**	**1.135.693.563.149,09**

Dengan rincian terdapat pada lampiran 15.

Tabel 7. 109
Kenaikan/penurunan Akumulasi Penyusutan Aset tetap

Dalam Rupiah

Uraian	Akumulasi Penyusutan 31/12/2024	Akumulasi Penyusutan 31/12/2025	Kenaikan/ penurunan	%
Akumulasi Penyusutan	(829.107.439.372,65)	(1.135.693.563.149,09)	(306.586.123.776,44)	36,98

Tabel 7. 110
Penambahan/Pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset tetap

Dalam Rupiah

Uraian	Akumulasi Penyusutan 31/12/2024	Penambahan	Pengurangan	Akumulasi Penyusutan 31/12/2025
Akumulasi Penyusutan	(829.107.439.372,65)	(861.259.255.357,65)	(554.673.131.581,21)	(1.135.693.563.149,09)

1) Adapun penjelasan penambahan akumulasi penyusutan aset tetap senilai (Rp861.259.255.357,33) dapat dijelaskan sebagai berikut :
   (a) Koreksi Penyesuaian Saldo Awal setelah migrasi

   Koreksi penyesuaian saldo awal setelah migrasi senilai Rp428.098.187.760,54 merupakan penambahan akumulasi penyusutan aset tetap sebagai akibat dari proses migrasi database aset tetap dari aplikasi SIMDA BMD ke aplikasi SIPD E-BMD. Dalam proses migrasi tersebut, terdapat beberapa data aset tetap yang nilai akumulasi penyusutannya belum sepenuhnya mencerminkan hasil perhitungan penyusutan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang berlaku, sehingga diperlukan koreksi atas saldo awal akumulasi penyusutan. Koreksi tersebut berasal dari beberapa OPD sebagai berikut:

Tabel 7. 111
Rincian Koreksi Penyesuaian Saldo Awal setelah migrasi

No.	OPD	Akumulasi Penyusutan
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	408.842.001.386,39
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.055.026.326,00
3	Dinas Kesehatan	5.048.706.121,37
4	Rumah Sakit Umum Daerah	2.878.690.123,08
5	Sekretariat Daerah	1.386.004.979,20
6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.250.774.615,50
7	Dinas Lingkungan Hidup	589.756.125,00
8	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	314.865.665,00
9	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	192.436.959,00
10	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	181.381.250,00
11	Sekretariat DPRD	91.457.991,00
12	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	89.778.333,00
13	Dinas Perikanan	83.337.571,00
14	Dinas Perhubungan	60.485.192,00
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	9.808.332,00
16	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	9.605.792,00
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.799.121,00
18	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.281.251,00
19	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	2.125.000,00
20	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.611.460,00
21	Kecamatan Pangale	1.254.167,00
	Jumlah	**428.098.187.760,54**

(b) Koreksi Penyesuaian Saldo Awal Perubahan Kebijakan Akuntansi

Koreksi Penyesuaian Saldo Awal atas Perubahan Kebijakan Akuntansi senilai Rp111.155.062.424,87 merupakan penambahan akumulasi penyusutan aset tetap yang timbul pada tahap penyusunan LKPD Unaudited Tahun 2025. Nilai tersebut diperoleh dari perhitungan penyusutan yang pada saat penyusunan laporan keuangan unaudited masih menggunakan pendekatan retrospektif sebagai dampak atas perubahan kebijakan akuntansi terkait masa manfaat aset tetap.

Pendekatan retrospektif tersebut menyebabkan penyusutan aset tetap dihitung kembali seolah-olah kebijakan akuntansi yang baru telah berlaku sejak aset diperoleh. Dengan demikian, terdapat penyesuaian terhadap akumulasi penyusutan tahun-tahun sebelumnya yang kemudian dicatat sebagai koreksi saldo awal akumulasi penyusutan. Rincian Koreksi Penyesuaian Saldo Awal Perubahan Kebijakan Akuntansi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 7. 112
Rincian Koreksi Penyesuaian Saldo Awal Perubahan Kebijakan Akuntansi

No.	OPD	Akumulasi Penyusutan
1	Sekretariat DPRD	514.942.801,00
2	Sekretariat Daerah	1.560.260.953,33
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	53.703.388.770,75
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	4.482.995.716,80
5	Dinas Perhubungan	398.313.989,20
6	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	49.045.504,00
7	Dinas Kesehatan	2.620.098.342,74
8	Puskesmas Pangale	1.348.874.954,87
9	Puskesmas Polocamba	1.122.121.566,38
10	Puskesmas Salugatta	1.077.520.001,18
11	Puskesmas Babana	1.680.319.914,43
12	Puskesmas Tobadak	1.344.289.628,55
13	Puskesmas Saloadak	517.164.536,18
14	Puskesmas Batuparigi	563.592.325,88
15	Puskesmas Topoyo	1.583.654.542,57
16	Puskesmas Salupangkang	1.082.439.613,69
17	Puskesmas Lara	1.067.791.203,14
18	Puskesmas Durikumba	1.621.363.168,22
19	Rumah Sakit Umum Daerah	8.273.706.608,50
20	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.240.967.695,90
21	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	21.068.973.267,22
22	Dinas Sosial	17.322.542,20
23	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	219.281.374,80
24	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.475.129,80
25	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	104.755.610,40
26	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	8.947.452,80
27	Dinas Perikanan	105.681.958,00
28	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	1.305.501.963,20
29	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	383.173.436,60
30	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	72.471.584,40
31	Inspektorat	32.593.227,00
32	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	90.308.952,60
33	Dinas Lingkungan Hidup	967.674.433,60
34	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	184.069.704,80
35	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.560.247,20
36	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	150.722.166,00
37	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	21.954.303,00
38	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	89.031.458,00
39	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	65.245.903,60
40	Kecamatan Pangale	10.479.634,00
41	Kecamatan Topoyo	30.341.367,00
42	Kecamatan Budong-Budong	71.391.309,60
43	Kecamatan Tobadak	263.145.677,75
44	Kecamatan Karossa	30.107.884,00
	Jumlah	**111.155.062.424,87**

Secara substansi, koreksi tersebut merupakan dampak dari penerapan awal perhitungan retrospektif pada tahap LKPD Unaudited Tahun 2025. Selanjutnya, sesuai dengan karakteristik perubahan estimasi akuntansi, Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah melakukan penyesuaian kembali agar perlakuan penyusutan atas perubahan masa manfaat aset tetap diterapkan secara prospektif pada laporan keuangan audited.

(c) Beban Penyusutan Tahun Berjalan

Beban Penyusutan Tahun Berjalan senilai Rp96.662.604.272,80 merupakan penambahan akumulasi penyusutan aset tetap yang berasal dari pengakuan beban penyusutan Tahun Anggaran 2025 pada tahap penyusunan LKPD Unaudited Tahun 2025. Nilai tersebut dihitung berdasarkan data aset tetap yang tercatat pada masing-masing OPD dan merupakan bagian dari proses pengakuan penyusutan periodik atas aset tetap yang masih memiliki masa manfaat.

Namun demikian, perhitungan beban penyusutan tahun berjalan tersebut masih menggunakan pendekatan retrospektif sebagai dampak dari perubahan kebijakan akuntansi terkait masa manfaat aset tetap. Dengan pendekatan tersebut, perhitungan penyusutan dilakukan dengan memperhitungkan kembali masa manfaat aset berdasarkan kebijakan baru seolah-olah telah berlaku sejak aset diperoleh. Oleh karena itu, nilai beban penyusutan tahun berjalan yang disajikan pada tahap unaudited masih berkaitan dengan metode perhitungan yang belum sepenuhnya mencerminkan karakteristik perubahan estimasi akuntansi secara prospektif.

Selanjutnya, pada tahap penyusunan LKPD Audited Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah melakukan evaluasi dan penyesuaian kembali terhadap perhitungan penyusutan tersebut. Hal ini dilakukan karena perubahan masa manfaat aset tetap lebih tepat diperlakukan sebagai perubahan estimasi akuntansi, sehingga dampaknya diterapkan secara prospektif, yaitu terhadap periode berjalan dan periode berikutnya dengan menggunakan nilai buku serta sisa masa manfaat aset pada saat kebijakan baru diterapkan. Rincian Beban Penyusutan Tahun Berjalan pada tahap unaudited adalah sebagai berikut:

Tabel 7. 113
Rincian Beban Penyusutan Tahun Berjalan

No.	OPD	Nilai Akumulasi Penyusutan
1	Sekretariat DPRD	692.615.655,20
2	Sekretariat Daerah	2.252.852.489,05
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	47.670.104.988,81
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	1.529.982.923,60
5	Dinas Perhubungan	242.099.087,00
6	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	155.081.490,00
7	Dinas Kesehatan	4.374.573.101,59
8	Puskesmas Pangale	1.046.379.442,65
9	Puskesmas Polocamba	519.582.427,44
10	Puskesmas Salugatta	1.040.578.626,71
11	Puskesmas Babana	1.040.748.382,20
12	Puskesmas Tobadak	930.295.216,80
13	Puskesmas Saloadak	415.689.724,29
14	Puskesmas Batuparigi	797.785.400,39
15	Puskesmas Topoyo	1.223.317.929,64
16	Puskesmas Salupangkang	913.483.840,67
17	Puskesmas Lara	715.455.442,87
18	Puskesmas Durikumba	937.691.283,61
19	Rumah Sakit Umum Daerah	5.657.916.766,99
20	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	516.854.882,30
21	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	16.086.863.301,61
22	Dinas Sosial	16.468.942,60
23	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.854.680.398,80
24	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	15.557.465,20
25	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	54.550.650,00
26	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	347.714.334,60
27	Dinas Perikanan	154.838.930,00
28	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	1.421.518.231,65
29	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	594.983.105,60



No.	OPD	Nilai Akumulasi Penyusutan
30	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	130.136.603,80
31	Inspektorat	162.069.144,00
32	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	137.805.478,80
33	Dinas Lingkungan Hidup	649.442.334,80
34	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	426.710.071,20
35	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	27.043.301,20
36	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	280.344.552,00
37	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	32.961.819,00
38	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	672.462.043,38
39	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	528.740.866,40
40	Kecamatan Pangale	28.829.730,00
41	Kecamatan Topoyo	39.046.475,00
42	Kecamatan Budong-Budong	71.781.147,60
43	Kecamatan Tobadak	196.601.993,75
44	Kecamatan Karossa	58.364.250,00
	Jumlah	**96.662.604.272,80**

Dengan demikian, Beban Penyusutan Tahun Berjalan senilai Rp96.662.604.272,80 merupakan beban penyusutan yang diakui pada tahap LKPD Unaudited Tahun 2025 dan masih dihitung dengan pendekatan retrospektif. Nilai tersebut selanjutnya menjadi bagian dari saldo yang dievaluasi kembali pada tahap LKPD Audited untuk disesuaikan dengan penerapan prospektif atas perubahan estimasi masa manfaat aset tetap.

(d) Jurnal Balik atas Penyesuaian Saldo Awal setelah migrasi

Jurnal Balik Penyesuaian Saldo Awal setelah Migrasi senilai Rp831.351.289,00 merupakan penambahan akumulasi penyusutan aset tetap yang dicatat dalam rangka menyesuaikan kembali saldo akumulasi penyusutan setelah dilakukan evaluasi atas hasil migrasi data aset tetap dari aplikasi SIMDA BMD ke aplikasi SIPD E-BMD.

Penyesuaian ini berkaitan dengan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK yang menunjukkan bahwa perubahan masa manfaat aset tetap memiliki karakteristik sebagai perubahan estimasi akuntansi, sehingga penerapannya seharusnya dilakukan secara prospektif, bukan retrospektif. Dengan demikian, saldo yang sebelumnya telah dikoreksi dalam proses migrasi dan berdampak terhadap akumulasi penyusutan perlu ditelaah kembali untuk memastikan bahwa pengakuannya telah sesuai dengan prinsip penerapan prospektif.

Jurnal balik tersebut dilakukan untuk mengoreksi bagian penyesuaian saldo awal setelah migrasi yang tidak lagi relevan dipertahankan berdasarkan pendekatan prospektif. Dalam pendekatan prospektif, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap tidak dihitung kembali sejak tanggal perolehan aset, melainkan diterapkan terhadap periode berjalan dan periode selanjutnya dengan menggunakan nilai buku serta sisa masa manfaat aset pada saat perubahan estimasi diberlakukan. Rincian Jurnal Balik Penyesuaian Saldo Awal setelah Migrasi adalah sebagai berikut:

Tabel 7. 114
Rincian Jurnal Balik atas Penyesuaian Saldo Awal setelah migrasi

No.	OPD	Nilai Akumulasi Penyusutan
1	Sekretariat DPRD	5.000.000,00
2	Sekretariat Daerah	88.522.500,00
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	735.928.789,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	400.000,00
5	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.500.000,00
	Jumlah	**831.351.289,00**

Dengan demikian, Jurnal Balik Penyesuaian Saldo Awal setelah Migrasi senilai Rp831.351.289,00 merupakan bagian dari proses penyelarasan akuntansi atas dampak migrasi data aset tetap dengan perlakuan prospektif atas perubahan estimasi masa manfaat aset tetap. Penyesuaian ini tidak mempengaruhi keberadaan fisik aset tetap, melainkan hanya mempengaruhi penyajian nilai akumulasi penyusutan, nilai buku, dan beban penyusutan dalam laporan keuangan.

(e) Jurnal Balik atas Penyesuaian Saldo Awal Penerapan Retrospektif

Jurnal Balik atas Penyesuaian Saldo Awal Penerapan Retrospektif senilai Rp278.324.493,30 merupakan penambahan akumulasi penyusutan aset tetap yang

timbul sebagai bagian dari proses koreksi atas perlakuan akuntansi sebelumnya yang menggunakan pendekatan retrospektif dalam menghitung dampak perubahan kebijakan akuntansi terkait masa manfaat aset tetap.

Pada tahap penyusunan LKPD Unaudited Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah masih melakukan penyesuaian saldo awal akumulasi penyusutan dengan pendekatan retrospektif. Pendekatan tersebut mengakibatkan adanya perhitungan kembali penyusutan tahun-tahun sebelumnya seolah-olah kebijakan masa manfaat yang baru telah berlaku sejak aset diperoleh. Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, perubahan masa manfaat aset tetap memiliki karakteristik sebagai perubahan estimasi akuntansi, sehingga penerapannya seharusnya dilakukan secara prospektif, yaitu diterapkan pada periode berjalan dan periode berikutnya dengan menggunakan nilai buku dan sisa masa manfaat pada saat perubahan estimasi diberlakukan.

Sehubungan dengan hal tersebut, jurnal balik ini dilakukan untuk menyesuaikan kembali saldo akumulasi penyusutan yang sebelumnya telah dipengaruhi oleh penerapan retrospektif. Penyesuaian tersebut bertujuan agar penyajian akumulasi penyusutan, nilai buku aset tetap, dan beban penyusutan Tahun 2025 lebih mencerminkan perlakuan akuntansi yang sesuai dengan karakteristik perubahan estimasi akuntansi. Rincian Jurnal Balik atas Penyesuaian Saldo Awal Penerapan Retrospektif adalah sebagai berikut:

Tabel 7. 115
Rincian Jurnal Balik atas Penyesuaian Saldo Awal Penerapan Retrospektif

No.	OPD	Nilai Akumulasi Penyusutan
1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	231.831.741,90
2	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	46.492.751,40
	Jumlah	**278.324.493,30**

Dengan demikian, Jurnal Balik atas Penyesuaian Saldo Awal Penerapan Retrospektif sebesar Rp278.324.493,30 merupakan bagian dari proses penyesuaian atas penerapan prospektif dalam penyusunan LKPD Audited Tahun 2025. Penyesuaian ini tidak berkaitan dengan perubahan fisik aset tetap, melainkan merupakan koreksi atas metode pengakuan akumulasi penyusutan agar selaras dengan karakteristik perubahan estimasi akuntansi.

(f) Kurang Saji Beban Tahun Berjalan

Kurang Saji Beban Tahun Berjalan senilai Rp219.043.684.957,40 merupakan penambahan akumulasi penyusutan aset tetap yang timbul dari selisih antara beban penyusutan Tahun 2025 yang sebelumnya dihitung menggunakan pendekatan retrospektif dengan hasil perhitungan kembali yang disesuaikan berdasarkan pendekatan prospektif.

Pada tahap penyusunan LKPD Unaudited Tahun 2025, perhitungan beban penyusutan tahun berjalan masih dipengaruhi oleh penerapan retrospektif atas perubahan kebijakan akuntansi terkait masa manfaat aset tetap. Pendekatan tersebut menyebabkan perhitungan penyusutan dilakukan dengan memperlakukan kebijakan masa manfaat baru seolah-olah telah berlaku sejak aset diperoleh. Setelah dilakukan evaluasi dalam proses penyusunan LKPD Audited, diketahui bahwa perubahan masa manfaat aset tetap memiliki karakteristik sebagai perubahan estimasi akuntansi, sehingga penerapannya seharusnya dilakukan secara prospektif.

Dengan pendekatan prospektif, beban penyusutan Tahun 2025 dihitung berdasarkan nilai buku dan sisa masa manfaat aset pada saat perubahan estimasi diterapkan. Hasil perhitungan kembali tersebut menunjukkan adanya kekurangan pengakuan beban penyusutan tahun berjalan pada beberapa OPD. Oleh karena itu, dilakukan penyesuaian untuk menambah akumulasi penyusutan dan beban penyusutan Tahun 2025 sebesar Rp219.043.684.957,40. Rincian Kurang Saji Beban Tahun Berjalan adalah sebagai berikut:

Tabel 7. 116
Rincian Kurang Saji Beban Tahun Berjalan

No.	OPD	Beban Penyusutan
1	Sekretariat DPRD	440.389.939,50
2	Sekretariat Daerah	3.484.682.212,31
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	178.230.802.157,16

No.	OPD	Beban Penyusutan
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	158.102.601,00
5	Dinas Perhubungan	329.182.584,02
6	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	64.844.005,45
7	Dinas Kesehatan	2.783.867.478,23
8	Puskesmas Pangale	1.150.607.088,77
9	Puskesmas Polocamba	1.006.727.745,39
10	Puskesmas Salugatta	1.201.464.169,93
11	Puskesmas Babana	1.155.142.747,68
12	Puskesmas Tobadak	975.696.901,62
13	Puskesmas Saloadak	729.663.596,42
14	Puskesmas Batuparigi	618.373.116,99
15	Puskesmas Topoyo	1.003.399.848,89
16	Puskesmas Salupangkang	713.192.473,92
17	Puskesmas Lara	879.291.498,54
18	Puskesmas Durikumba	908.530.806,13
19	Rumah Sakit Umum Daerah	9.360.068.467,20
20	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	816.837.199,03
21	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7.584.258.955,03
22	Dinas Sosial	27.024.110,15
23	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.635.266.142,53
24	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5.523.959,93
25	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	148.261.609,08
26	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	286.353.655,20
27	Dinas Perikanan	101.099.028,75
28	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	483.650.851,94
29	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	416.711.903,07
30	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	29.267.553,87
31	Inspektorat	26.534.296,67
32	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	109.692.424,12
33	Dinas Lingkungan Hidup	1.440.063.257,07
34	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	83.031.737,15
35	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.052.776,97
36	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	319.549.253,64
37	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	25.256.473,00
38	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	92.643.002,33
39	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	91.658.287,83
40	Kecamatan Pangale	8.924.233,50
41	Kecamatan Topoyo	29.651.015,75
42	Kecamatan Budong-Budong	28.147.446,22
43	Kecamatan Tobadak	24.690.454,17
44	Kecamatan Karossa	32.505.891,25
	Jumlah	**219.043.684.957,40**

Dengan demikian, Kurang Saji Beban Tahun Berjalan sebesar Rp219.043.684.957,40 merupakan koreksi atas kekurangan pengakuan beban penyusutan Tahun 2025 setelah dilakukan perhitungan ulang berdasarkan pendekatan prospektif. Penyesuaian ini dilakukan agar beban penyusutan tahun berjalan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku aset tetap yang disajikan dalam LKPD Audited Tahun 2025 mencerminkan nilai yang lebih wajar dan sesuai dengan karakteristik perubahan estimasi akuntansi.

(g) Aset Baru ditemukan

Aset baru ditemukan senilai Rp4.351.333.174,20 merupakan penambahan akumulasi penyusutan aset tetap pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan. Penambahan tersebut berasal dari aset hibah Kementerian Sosial yang baru dicatat dalam pembukuan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah pada Tahun Pembukuan 2025. Rincian aset baru ditemukan adalah sebagai berikut:

(h) Kelebihan Reklas Akumulasi Penyusutan ke Aset Lain-lain

Kelebihan reklasifikasi akumulasi penyusutan ke Aset Lain-lain senilai Rp27.156.479,00 terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Nilai tersebut berkaitan dengan aset berupa pompa air yang sebelumnya direklasifikasi ke

Aset Lain-lain sehubungan dengan adanya usulan pemindahtanganan melalui mekanisme lelang.

Pada saat proses reklasifikasi awal dilakukan, nilai akumulasi penyusutan yang digunakan masih mengacu pada saldo akumulasi penyusutan yang telah dipengaruhi oleh hasil penyesuaian migrasi database serta penyesuaian saldo awal akibat penerapan retrospektif atas perubahan kebijakan akuntansi. Dengan demikian, nilai akumulasi penyusutan yang turut direklasifikasi ke Aset Lain-lain belum sepenuhnya mencerminkan hasil perhitungan penyusutan berdasarkan pendekatan prospektif.

Setelah dilakukan perhitungan ulang penyusutan dengan menggunakan pendekatan prospektif, diketahui terdapat kelebihan akumulasi penyusutan yang sebelumnya telah direklasifikasi ke Aset Lain-lain. Atas kelebihan tersebut, dilakukan penyesuaian dengan mengembalikan nilai akumulasi penyusutan dimaksud ke kelompok Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp27.156.479,00.

Dengan demikian, penyesuaian sebesar Rp27.156.479,00 merupakan koreksi atas kelebihan reklasifikasi akumulasi penyusutan ke Aset Lain-lain. Penyesuaian ini dilakukan agar nilai akumulasi penyusutan yang disajikan pada kelompok Aset Tetap Peralatan dan Mesin serta Aset Lain-lain telah mencerminkan hasil perhitungan penyusutan yang sesuai dengan pendekatan prospektif atas perubahan estimasi masa manfaat aset tetap.

(i) Koreksi Reklasifikasi Ekstrakomptabel ke Intrakomptabel

Jurnal koreksi reklasifikasi ekstra ke intra merupakan penambahan akumulasi penyusutan aset tetap yang timbul akibat adanya penyesuaian klasifikasi barang dari kelompok ekstrakomptabel ke kelompok intrakomptabel. Reklasifikasi tersebut dilakukan karena terdapat aset yang sebelumnya dicatat sebagai barang ekstrakomptabel, namun berdasarkan hasil penelaahan kembali memenuhi kriteria pengakuan sebagai aset tetap intrakomptabel sesuai dengan kebijakan kapitalisasi aset tetap yang berlaku.

Sebagai konsekuensi atas reklasifikasi tersebut, aset yang sebelumnya berada di luar kelompok aset tetap intrakomptabel perlu dicatat kembali pada kelompok aset tetap yang sesuai. Pengakuan tersebut tidak hanya berdampak pada nilai perolehan aset, tetapi juga terhadap akumulasi penyusutan yang melekat pada aset dimaksud. Oleh karena itu, dilakukan penyesuaian akumulasi penyusutan agar nilai tercatat aset tetap setelah reklasifikasi mencerminkan kondisi yang wajar dan sesuai dengan kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah. Rincian Jurnal Koreksi Reklasifikasi Ekstra ke Intra adalah sebagai berikut:

Tabel 7. 117
Rincian Koreksi Reklasifikasi Ekstra ke Intra

No.	OPD	Akumulasi Penyusutan
1	Sekretariat DPRD	2.500.000,00
2	Sekretariat Daerah	3.332.000,00
3	Dinas Perhubungan	73.598.497,60
4	Dinas Kesehatan	56.320.000,00
5	Puskesmas Pangale	896.500,00
6	Puskesmas Polocamba	3.226.500,00
7	Puskesmas Salugatta	3.926.500,00
8	Puskesmas Babana	4.626.500,00
9	Puskesmas Tobadak	7.826.500,00
10	Puskesmas Saloadak	2.576.500,00
11	Puskesmas Topoyo	1.000.000,00
12	Puskesmas Salupangkang	1.350.000,00
13	Puskesmas Lara	3.120.000,00
14	Puskesmas Durikumba	1.500.000,00
15	Rumah Sakit Umum Daerah	57.875.000,00
16	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	369.030.793,00
17	Dinas Sosial	11.000.000,00
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10.000.000,00
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5.400.000,00
20	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	86.684.000,00
21	Dinas Perikanan	11.588.400,00
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	17.900.000,00
23	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	20.785.000,00
24	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	4.500.000,00
25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	8.300.000,00

No.	OPD	Akumulasi Penyusutan
26	Kecamatan Budong-Budong	1.500.000,00
	Jumlah	**770.362.690,60**

(j) Koreksi Reklasifikasi dari Barang dan Jasa

Jurnal koreksi reklasifikasi dari Barang dan Jasa senilai Rp41.187.815,94 merupakan penambahan akumulasi penyusutan aset tetap pada Sekretariat Daerah. Penyesuaian ini timbul karena terdapat belanja yang sebelumnya dicatat pada kelompok Belanja Barang dan Jasa, namun berdasarkan hasil penelaahan kembali memenuhi kriteria pengakuan sebagai aset tetap.

Reklasifikasi tersebut dilakukan untuk menyajikan belanja sesuai dengan substansi ekonominya. Apabila suatu pengeluaran memenuhi kriteria kapitalisasi aset tetap, maka pengeluaran tersebut seharusnya tidak dibebankan sebagai belanja barang dan jasa, melainkan diakui sebagai aset tetap pada kelompok aset yang sesuai. Sebagai konsekuensi atas pengakuan aset tetap tersebut, dilakukan pula pengakuan akumulasi penyusutan sesuai dengan masa manfaat dan kebijakan penyusutan yang berlaku.

2) Pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset tetap senilai (Rp554.673.131.580,89) dapat dijelaskan sebagai berikut :

(a) Koreksi Penyesuaian Saldo Awal setelah migrasi

Koreksi Penyesuaian Saldo Awal setelah Migrasi senilai Rp831.351.289,00 merupakan pengurangan akumulasi penyusutan aset tetap yang timbul dari hasil penelaahan kembali atas koreksi saldo awal setelah proses migrasi database aset tetap dari aplikasi SIMDA BMD ke aplikasi SIPD E-BMD.

Pengurangan ini dilakukan karena terdapat sebagian nilai akumulasi penyusutan yang sebelumnya telah disesuaikan pada saat migrasi, namun berdasarkan hasil evaluasi lanjutan perlu dikoreksi kembali agar tidak menyebabkan lebih saji pada saldo akumulasi penyusutan. Dengan demikian, koreksi ini merupakan bagian dari proses penyelarasan data aset tetap hasil migrasi dengan saldo yang disajikan dalam laporan keuangan. Rincian Koreksi Penyesuaian Saldo Awal setelah Migrasi adalah sebagai berikut:

Tabel 7. 118
Rincian Koreksi Penyesuaian Saldo Awal setelah migrasi

No.	OPD	Akumulasi Penyusutan
1	Sekretariat DPRD	5.000.000,00
2	Sekretariat Daerah	88.522.500,00
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	735.928.789,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	400.000,00
5	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.500.000,00
	Jumlah	**831.351.289,00**

(b) Koreksi Penyesuaian Saldo Awal Perubahan Kebijakan Akuntansi

Koreksi Penyesuaian Saldo Awal Perubahan Kebijakan Akuntansi senilai Rp278.324.493,30 merupakan pengurangan akumulasi penyusutan aset tetap yang timbul dari hasil penelaahan kembali atas penyesuaian saldo awal akibat perubahan kebijakan akuntansi terkait masa manfaat aset tetap.

Pada tahap penyusunan LKPD Unaudited Tahun 2025, perubahan kebijakan akuntansi atas masa manfaat aset tetap masih diterapkan dengan pendekatan retrospektif, yaitu dengan menghitung kembali akumulasi penyusutan tahun-tahun sebelumnya seolah-olah kebijakan masa manfaat yang baru telah berlaku sejak aset diperoleh. Namun, berdasarkan hasil evaluasi dan pemeriksaan, perubahan masa manfaat aset tetap memiliki karakteristik sebagai perubahan estimasi akuntansi, sehingga penerapannya lebih tepat dilakukan secara prospektif.

Dengan pendekatan prospektif, perubahan estimasi masa manfaat tidak dilakukan dengan menghitung ulang penyusutan sejak tahun perolehan aset, melainkan diterapkan terhadap periode berjalan dan periode selanjutnya dengan menggunakan nilai buku serta sisa masa manfaat aset pada saat perubahan estimasi diberlakukan. Oleh karena itu, sebagian saldo awal akumulasi penyusutan yang sebelumnya telah

disesuaikan melalui pendekatan retrospektif perlu dikurangkan kembali agar penyajian akumulasi penyusutan, nilai buku, dan beban penyusutan mencerminkan perlakuan akuntansi yang sesuai. Rincian Koreksi Penyesuaian Saldo Awal Perubahan Kebijakan Akuntansi adalah sebagai berikut:

Tabel 7. 119
Rincian Koreksi Penyesuaian Saldo Awal Perubahan Kebijakan Akuntansi

No.	OPD	Akumulasi Penyusutan
1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	231.831.741,90
2	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	46.492.751,40
	Jumlah	**278.324.493,30**

(c) Reklas ke Aset lain-lain

Reklasifikasi ke Aset Lain-lain senilai Rp8.176.707.276,88 merupakan pengurangan akumulasi penyusutan aset tetap yang terjadi akibat pemindahan aset tetap dari kelompok aset tetap ke kelompok Aset Lain-lain. Reklasifikasi tersebut dilakukan terhadap aset yang berdasarkan hasil penelaahan tidak lagi digunakan dalam operasional pemerintahan, dalam kondisi rusak berat, atau sedang dalam proses usulan pemindahtanganan/penghapusan, sehingga secara substansi lebih tepat disajikan sebagai Aset Lain-lain.

Sebagai konsekuensi dari reklasifikasi aset tetap ke Aset Lain-lain, akumulasi penyusutan yang melekat pada aset tersebut juga ikut direklasifikasi. Oleh karena itu, nilai akumulasi penyusutan pada kelompok aset tetap dikurangkan dan dipindahkan mengikuti nilai aset yang direklasifikasi ke kelompok Aset Lain-lain. Perlakuan ini dilakukan agar penyajian nilai aset tetap, akumulasi penyusutan aset tetap, dan nilai buku aset tetap mencerminkan klasifikasi aset yang lebih tepat sesuai dengan kondisi dan status pemanfaatannya. Rincian pengurangan akumulasi penyusutan atas Reklasifikasi ke Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

Tabel 7. 120
Rincian Reklas ke Aset lain-lain

No.	OPD	Akumulasi Penyusutan
1	Sekretariat Daerah	2.071.665.247,74
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	320.683.191,00
3	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	117.348.100,00
4	Dinas Perhubungan	145.629.500,00
5	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	27.500.000,00
6	Puskesmas Babana	17.640.089,00
7	Puskesmas Saloadak	84.684.853,00
8	Puskesmas Topoyo	46.351.583,00
9	Puskesmas Durikumba	13.000.000,00
10	Rumah Sakit Umum Daerah	4.365.611.588,14
11	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	65.772.650,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	35.112.000,00
13	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	47.791.675,00
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	32.887.000,00
15	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	47.556.000,00
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	34.300.000,00
17	Dinas Lingkungan Hidup	542.516.000,00
18	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	19.650.000,00
19	Kecamatan Topoyo	63.008.333,00
20	Kecamatan Tobadak	20.407.800,00
21	Kecamatan Karossa	57.591.667,00
	Jumlah	**8.176.707.276,88**

(d) Penghapusan

Penghapusan senilai Rp1.129.989.749,00 merupakan pengurangan akumulasi penyusutan aset tetap pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Pengurangan tersebut terjadi karena adanya aset tetap yang telah dilakukan penghapusan dari daftar aset tetap Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah pada Tahun Pembukuan 2025.

Sebagai konsekuensi dari penghapusan aset tetap, nilai perolehan aset dan akumulasi penyusutan yang melekat pada aset tersebut harus dikeluarkan dari pembukuan. Dengan demikian, akumulasi penyusutan pada kelompok aset tetap berkurang sebesar nilai akumulasi penyusutan yang telah terbentuk sampai dengan tanggal penghapusan aset.

(e) Jurnal Balik Penyesuaian Saldo Awal setelah migrasi

Jurnal Balik Penyesuaian Saldo Awal setelah Migrasi senilai Rp428.098.187.760,54 merupakan pengurangan akumulasi penyusutan aset tetap yang dilakukan untuk membalik koreksi saldo awal akumulasi penyusutan yang sebelumnya dicatat pada saat proses migrasi database dari aplikasi SIMDA BMD ke aplikasi SIPD E-BMD.

Pada tahap awal penyusunan LKPD Unaudited Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah melakukan penyesuaian saldo awal akumulasi penyusutan sebagai dampak dari migrasi data aset tetap. Namun, setelah dilakukan penelaahan lebih lanjut dalam proses penyusunan LKPD Audited, diketahui bahwa sebagian penyesuaian saldo awal tersebut perlu dibalik karena berkaitan dengan penerapan perhitungan yang belum sepenuhnya mencerminkan pendekatan prospektif atas perubahan estimasi masa manfaat aset tetap.

Jurnal balik ini dilakukan agar saldo akumulasi penyusutan tidak mengalami lebih saji dan agar nilai yang disajikan dalam laporan keuangan mencerminkan hasil perhitungan ulang penyusutan yang sesuai dengan karakteristik perubahan estimasi akuntansi. Dengan demikian, pengurangan ini merupakan bagian dari proses penyelarasan saldo akumulasi penyusutan setelah migrasi dengan hasil koreksi dan evaluasi pada tahap LKPD Audited Tahun 2025. Rincian Jurnal Balik Penyesuaian Saldo Awal setelah Migrasi adalah sebagai berikut:

Tabel 7. 121
Rincian Jurnal Balik
Penyesuaian Saldo Awal Setelah Migrasi

No.	OPD	Nilai Akumulasi Penyusutan
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	408.842.001.386,39
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.055.026.326,00
3	Dinas Kesehatan	5.048.706.121,37
4	Rumah Sakit Umum Daerah	2.878.690.123,08
5	Sekretariat Daerah	1.386.004.979,20
6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.250.774.615,50
7	Dinas Lingkungan Hidup	589.756.125,00
8	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	314.865.665,00
9	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	192.436.959,00
10	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	181.381.250,00
11	Sekretariat DPRD	91.457.991,00
12	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	89.778.333,00
13	Dinas Perikanan	83.337.571,00
14	Dinas Perhubungan	60.485.192,00
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	9.808.332,00
16	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	9.605.792,00
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.799.121,00
18	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.281.251,00
19	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	2.125.000,00
20	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.611.460,00
21	Kecamatan Pangale	1.254.167,00
	Jumlah	**428.098.187.760,54**

Dengan demikian, Jurnal Balik Penyesuaian Saldo Awal setelah Migrasi sebesar Rp428.098.187.760,54 merupakan koreksi balik atas penyesuaian saldo awal akumulasi penyusutan yang sebelumnya dicatat sebagai dampak migrasi data aset tetap. Penyesuaian ini tidak berkaitan dengan pengurangan fisik aset tetap, melainkan merupakan koreksi akuntansi untuk memastikan bahwa saldo akumulasi penyusutan yang disajikan dalam LKPD Audited Tahun 2025 telah mencerminkan perhitungan yang lebih wajar, andal, dan sesuai dengan pendekatan prospektif atas perubahan estimasi masa manfaat aset tetap.

(f) Jurnal Balik Penyesuaian Saldo Awal Penerapan Retrospektif

Jurnal Balik Penyesuaian Saldo Awal Penerapan Retrospektif senilai Rp111.155.062.424,87 merupakan pengurangan akumulasi penyusutan aset tetap yang dilakukan untuk membalik penyesuaian saldo awal yang sebelumnya dicatat akibat penerapan pendekatan retrospektif atas perubahan kebijakan akuntansi terkait masa manfaat aset tetap.

Pada tahap penyusunan LKPD Unaudited Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah melakukan penyesuaian saldo awal akumulasi penyusutan dengan menghitung kembali penyusutan tahun-tahun sebelumnya seolah-olah kebijakan masa manfaat yang baru telah berlaku sejak aset diperoleh. Pendekatan tersebut mengakibatkan adanya tambahan akumulasi penyusutan pada saldo awal.

Namun, berdasarkan hasil evaluasi dan pemeriksaan, perubahan masa manfaat aset tetap memiliki karakteristik sebagai perubahan estimasi akuntansi, sehingga penerapannya seharusnya dilakukan secara prospektif, yaitu diterapkan terhadap periode berjalan dan periode berikutnya dengan menggunakan nilai buku serta sisa masa manfaat aset pada saat perubahan estimasi diberlakukan. Oleh karena itu, penyesuaian saldo awal yang sebelumnya timbul dari pendekatan retrospektif perlu dibalik agar penyajian akumulasi penyusutan, nilai buku, dan beban penyusutan dalam LKPD Audited Tahun 2025 mencerminkan perlakuan akuntansi yang tepat. Rincian Jurnal Balik Penyesuaian Saldo Awal Penerapan Retrospektif adalah sebagai berikut:

Tabel 7. 122
Rincian Jurnal Balik
Penyesuaian Saldo Awal Penerapan Retrospektif

No.	OPD	Nilai Akumulasi Penyusutan
1	Sekretariat DPRD	514.942.801,00
2	Sekretariat Daerah	1.560.260.953,33
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	53.703.388.770,75
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	4.482.995.716,80
5	Dinas Perhubungan	398.313.989,20
6	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	49.045.504,00
7	Dinas Kesehatan	2.620.098.342,74
8	Puskesmas Pangale	1.348.874.954,87
9	Puskesmas Polocamba	1.122.121.566,38
10	Puskesmas Salugatta	1.077.520.001,18
11	Puskesmas Babana	1.680.319.914,43
12	Puskesmas Tobadak	1.344.289.628,55
13	Puskesmas Saloadak	517.164.536,18
14	Puskesmas Batuparigi	563.592.325,88
15	Puskesmas Topoyo	1.583.654.542,57
16	Puskesmas Salupangkang	1.082.439.613,69
17	Puskesmas Lara	1.067.791.203,14
18	Puskesmas Durikumba	1.621.363.168,22
19	Rumah Sakit Umum Daerah	8.273.706.608,50
20	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.240.967.695,90
21	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	21.068.973.267,22
22	Dinas Sosial	17.322.542,20
23	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	219.281.374,80
24	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.475.129,80
25	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	104.755.610,40
26	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	8.947.452,80
27	Dinas Perikanan	105.681.958,00
28	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	1.305.501.963,20
29	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	383.173.436,60
30	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	72.471.584,40
31	Inspektorat	32.593.227,00
32	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	90.308.952,60
33	Dinas Lingkungan Hidup	967.674.433,60
34	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	184.069.704,80
35	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.560.247,20
36	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	150.722.166,00
37	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	21.954.303,00

No.	OPD	Nilai Akumulasi Penyusutan
38	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	89.031.458,00
39	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	65.245.903,60
40	Kecamatan Pangale	10.479.634,00
41	Kecamatan Topoyo	30.341.367,00
42	Kecamatan Budong-Budong	71.391.309,60
43	Kecamatan Tobadak	263.145.677,75
44	Kecamatan Karossa	30.107.884,00
	Jumlah	**111.155.062.424,87**

Dengan demikian, Jurnal Balik Penyesuaian Saldo Awal Penerapan Retrospektif sebesar Rp111.155.062.424,87 merupakan koreksi balik atas penyesuaian saldo awal akumulasi penyusutan yang sebelumnya dihitung dengan pendekatan retrospektif. Penyesuaian ini dilakukan agar dampak perubahan masa manfaat aset tetap tidak lagi dibebankan pada saldo awal, melainkan diterapkan secara prospektif pada periode berjalan dan periode selanjutnya sesuai dengan karakteristik perubahan estimasi akuntansi.

(g) Lebih Saji Beban Tahun Berjalan

Lebih Saji Beban Tahun Berjalan senilai Rp945.642.502,09 merupakan pengurangan akumulasi penyusutan aset tetap yang timbul dari hasil perhitungan ulang beban penyusutan Tahun 2025. Nilai tersebut merupakan selisih lebih atas beban penyusutan yang sebelumnya telah diakui pada tahap penyusunan LKPD Unaudited, namun setelah dilakukan penelaahan kembali dengan pendekatan prospektif, diketahui bahwa sebagian beban penyusutan tahun berjalan telah disajikan melebihi nilai yang seharusnya.

Pada tahap penyusunan LKPD Unaudited Tahun 2025, perhitungan penyusutan masih dipengaruhi oleh pendekatan retrospektif atas perubahan kebijakan akuntansi terkait masa manfaat aset tetap. Setelah dilakukan evaluasi dalam proses penyusunan LKPD Audited, perubahan masa manfaat aset tetap diperlakukan sebagai perubahan estimasi akuntansi yang diterapkan secara prospektif, yaitu menggunakan nilai buku dan sisa masa manfaat aset pada saat perubahan estimasi diberlakukan.

Dengan pendekatan prospektif tersebut, beban penyusutan Tahun 2025 dihitung kembali berdasarkan kondisi aset pada periode berjalan. Hasil perhitungan ulang menunjukkan adanya kelebihan pengakuan beban penyusutan pada beberapa OPD. Oleh karena itu, dilakukan pengurangan akumulasi penyusutan dan beban penyusutan Tahun 2025 agar nilai yang disajikan dalam laporan keuangan mencerminkan jumlah yang lebih wajar dan andal. Rincian Lebih Saji Beban Tahun Berjalan adalah sebagai berikut:

Tabel 7. 123
Rincian Lebih Saji Beban Tahun Berjalan

No.	OPD	Akumulasi Penyusutan
1	Sekretariat DPRD	3.987.399,69
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	833.235.861,84
3	Dinas Perhubungan	5.682.016,06
4	Puskesmas Tobadak	5.323.480,88
5	Puskesmas Saloadak	12.623.571,79
6	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	212.445,33
7	Dinas Perikanan	1.056.849,28
8	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	1.111.111,00
9	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.758.294,25
10	Inspektorat	659.583,33
11	Dinas Lingkungan Hidup	159.965,25
12	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	24.061.104,21
13	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	7.853.416,67
14	Kecamatan Pangale	3.936.916,67
15	Kecamatan Tobadak	38.210.735,85
16	Kecamatan Karossa	4.769.750,00
	Jumlah	**945.642.502,09**

Dengan demikian, pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap atas Lebih Saji Beban Tahun Berjalan sebesar Rp945.642.502,09 merupakan koreksi atas kelebihan pengakuan beban penyusutan Tahun 2025. Penyesuaian ini dilakukan agar beban

penyusutan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku aset tetap pada LKPD Audited Tahun 2025 telah sesuai dengan hasil perhitungan ulang berdasarkan pendekatan prospektif atas perubahan estimasi masa manfaat aset tetap.

(h) Koreksi Reklasifikasi aset intrakompetabel ke ekstrakompetabel

Jurnal koreksi reklasifikasi aset intra ke ekstra senilai Rp3.933.229.062,94 merupakan pengurangan akumulasi penyusutan aset tetap yang timbul akibat adanya penyesuaian klasifikasi aset dari kelompok intrakomptabel ke kelompok ekstrakomptabel. Reklasifikasi tersebut dilakukan karena berdasarkan hasil penelaahan kembali terdapat aset yang sebelumnya dicatat sebagai aset tetap intrakomptabel, namun tidak lagi memenuhi kriteria kapitalisasi aset tetap sesuai dengan kebijakan akuntansi dan batasan nilai kapitalisasi yang berlaku.

Sebagai konsekuensi atas reklasifikasi tersebut, aset yang sebelumnya tercatat dalam kelompok aset tetap intrakomptabel harus dikeluarkan dari penyajian aset tetap dan dipindahkan ke kelompok ekstrakomptabel. Oleh karena itu, akumulasi penyusutan yang telah melekat pada aset tersebut juga harus dikurangkan dari saldo akumulasi penyusutan aset tetap. Penyesuaian ini dilakukan agar penyajian aset tetap, akumulasi penyusutan, dan nilai buku aset tetap mencerminkan klasifikasi aset yang tepat sesuai dengan substansi dan kebijakan kapitalisasi barang milik daerah. Rincian Jurnal Koreksi Reklasifikasi Aset Intra ke Ekstra adalah sebagai berikut:

Tabel 7. 124
Rincian Koreksi Reklasifikasi aset intra ke ekstra

No.	OPD	Akumulasi Penyusutan
1	Sekretariat DPRD	26.860.000,00
2	Sekretariat Daerah	33.829.465,78
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	119.790.478,69
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	7.600.000,00
5	Dinas Perhubungan	14.600.818,18
6	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	10.000.000,00
7	Dinas Kesehatan	98.792.712,22
8	Puskesmas Pangale	231.510.928,45
9	Puskesmas Polocamba	156.617.715,57
10	Puskesmas Salugatta	268.133.182,10
11	Puskesmas Babana	149.487.601,53
12	Puskesmas Tobadak	218.131.998,28
13	Puskesmas Saloadak	142.267.955,42
14	Puskesmas Batuparigi	30.782.500,62
15	Puskesmas Topoyo	307.449.628,05
16	Puskesmas Salupangkang	281.445.035,75
17	Puskesmas Lara	265.760.182,83
18	Puskesmas Durikumba	208.782.327,66
19	Rumah Sakit Umum Daerah	47.608.199,83
20	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	10.419.689,67
21	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.144.129.632,42
22	Dinas Sosial	700.000,00
23	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	800.000,00
24	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	10.402.778,00
25	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.964.583,50
26	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	32.251.838,00
27	Dinas Perikanan	3.302.569,67
28	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	2.802.333,33
29	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	55.633.055,32
30	Inspektorat	2.400.000,00
31	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	13.294.480,00
32	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	13.945.000,00
33	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.050.000,00
34	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	775.000,00
35	Kecamatan Pangale	4.358.333,00
36	Kecamatan Budong-Budong	6.337.500,30
37	Kecamatan Tobadak	6.461.539,09
38	Kecamatan Karossa	750.000,00
	Jumlah	**3.933.229.063,26**

Dengan demikian, Jurnal Koreksi Reklasifikasi Aset Intra ke Ekstra sebesar Rp3.933.229.063,26 merupakan pengurangan akumulasi penyusutan atas aset yang mengalami perubahan klasifikasi dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel. Penyesuaian ini tidak berkaitan dengan hilangnya aset secara fisik, melainkan merupakan koreksi klasifikasi agar aset yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi tidak lagi disajikan dalam kelompok aset tetap intrakomptabel.

(i) Koreksi Kurang Volume

Jurnal koreksi kurang volume senilai Rp104.735.962,27 merupakan pengurangan akumulasi penyusutan aset tetap yang timbul sebagai tindak lanjut atas hasil pemeriksaan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tahun 2023/2024. Koreksi tersebut dilakukan karena terdapat aset tetap yang nilai perolehannya perlu disesuaikan akibat adanya temuan kurang volume atas pekerjaan/pengadaan barang modal.

Kurang volume tersebut berdampak pada pengurangan nilai aset tetap yang sebelumnya telah dicatat dalam pembukuan. Sebagai konsekuensinya, akumulasi penyusutan yang telah terbentuk atas bagian nilai aset yang dikoreksi juga perlu dikurangkan. Dengan demikian, pengurangan akumulasi penyusutan ini merupakan penyesuaian akuntansi agar nilai aset tetap, akumulasi penyusutan, dan nilai buku aset tetap yang disajikan dalam laporan keuangan mencerminkan nilai yang lebih wajar sesuai dengan hasil pemeriksaan.

Tabel 7. 125
Rincian Koreksi Kurang Volume

No.	OPD	Akumulasi Penyusutan
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	60.338.569,30
2	Dinas Kesehatan	4.026.643,25
3	Rumah Sakit Umum Daerah	1.690.856,26
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	38.679.893,46
	Jumlah	**104.735.962,27**

Dengan demikian, Jurnal Koreksi Kurang Volume sebesar Rp104.735.962,27 merupakan penyesuaian atas akumulasi penyusutan yang melekat pada nilai aset tetap yang dikoreksi berdasarkan LHP Tahun 2023/2024. Penyesuaian ini tidak menggambarkan pengurangan fisik aset secara keseluruhan, melainkan merupakan koreksi atas bagian nilai aset yang tidak memenuhi volume sebagaimana hasil pemeriksaan, sehingga penyajian aset tetap dan akumulasi penyusutan menjadi lebih wajar dan andal.

(j) Koreksi Reklasifikasi ke Barang dan Jasa

Jurnal koreksi reklasifikasi ke Barang dan Jasa senilai Rp19.901.060,00 merupakan pengurangan akumulasi penyusutan aset tetap pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Koreksi tersebut timbul karena terdapat pengeluaran yang sebelumnya telah dicatat sebagai aset tetap, namun berdasarkan hasil penelaahan kembali tidak memenuhi kriteria pengakuan sebagai aset tetap dan lebih tepat diklasifikasikan sebagai Belanja Barang dan Jasa.

Penambahan/pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset tetap

Saldo Akhir 2024	**Rp**	**829.107.439.372,65**
Penambahan :		
- Koreksi Penyesuaian Saldo Awal setelah migrasi	Rp	428.098.187.760,54
- Koreksi Penyesuaian Saldo Awal Perubahan Kebijakan Akuntansi	Rp	111.155.062.424,87
- Beban Penyusutan Tahun Berjalan	Rp	96.662.604.272,80
- Jurnal Balik Penyesuaian Saldo Awal setelah migrasi	Rp	831.351.289,00
- Jurnal Balik Penyesuaian Saldo Awal Penerapan Retrospektif	Rp	278.324.493,30
- Kurang Saji Beban Tahun Berjalan	Rp	219.043.684.957,40
- Aset Baru ditemukan	Rp	4.351.333.174,20
- Kelebihan Reklas Akumulasi Penyusutan ke Aset Lain-lain	Rp	27.156.479,00
- Koreksi Reklasifikasi Ekstra ke Intra	Rp	770.362.690,60

- Koreksi Reklasifikasi dari Barang dan Jasa	Rp	41.187.815,94
Sub. Total Penambahan	**Rp**	**861.259.255.357,65**
Pengurangan:		
- Koreksi Penyesuaian Saldo Awal setelah migrasi	Rp	831.351.289,00
- Koreksi Penyesuaian Saldo Awal Perubahan Kebijakan Akuntansi	Rp	278.324.493,30
- Reklas ke Aset lain-lain	Rp	8.176.707.276,88
- Penghapusan	Rp	1.129.989.749,00
- Jurnal Balik Penyesuaian Saldo Awal setelah migrasi	Rp	428.098.187.760,54
- Jurnal Balik Penyesuaian Saldo Awal Penerapan Retrospektif	Rp	111.155.062.424,87
- Lebih Saji Beban Tahun Berjalan	Rp	945.642.502,09
- Koreksi Reklasifikasi aset intra ke ekstra	Rp	3.933.229.063,26
- Koreksi Kurang Volume	Rp	104.735.962,27
- Koreksi Reklasifikasi ke Barang dan Jasa	Rp	19.901.060,00
Sub Total Pengurangan	Rp	**554.673.131.581,21**
Saldo Akhir 2025	**Rp**	**1.135.693.563.149,09**

4. Properti Investasi

Properti investasi adalah aset berupa tanah atau bangunan (atau bagian dari bangunan, atau keduanya) yang dimiliki dan berpotensi menghasilkan pendapatan sewa, kenaikan nilai, atau keduanya, dan bukan untuk digunakan dalam kegiatan operasional entitas sehari-hari. Properti investasi dicatat menggunakan model biaya sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Pada tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah telah mengidentifikasi sejumlah tanah yang berpotensi menghasilkan keuntungan jika disewakan atau dijual di masa mendatang. Tanah tersebut saat ini belum dimanfaatkan secara aktif, namun dipertahankan sebagai aset dengan prospek peningkatan nilai investasi. Penilaian atas tanah tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan lokasi strategis dan potensi pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Adapun rincian mutasi properti investasi selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 7. 126
Penambahan/Pengurangan Properti Investasi

Dalam Rupiah

No.	Uraian	Saldo Akhir 31 Desember 2024	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 31 Desember 2025
1	Properti Investasi -Tanah	5.447.999.112,00	0,00	0.00	5.447.999.112,00
	(Nilai Buku)	**5.447.999.112,00**	**0,00**	**0.00**	**5.447.999.112,00**

Tabel 7. 127
Rincian Properti Investasi

No	SKPD	Nama Barang	Luas	Tgl Perolehan	Alamat	Harga	Ket
1	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	5000	04/08/2017	Desa Tobadak Kec. Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah	149.600.000,00	Tanah Untuk Keperluan Pembangunan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
		Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	172600	28/08/2018	Dusun Benteng, Desa Tobadak, Kec Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah	2.516.171.012,00	Tanah Untuk Pembangunan Gedunng Kantor Gabungan Dinas
		Tanah Bangunan Gudang	17360	22/05/2019	Dusun Tallungallo, Desa Tobadak, Kec. Tobadak	561.360.000,00	Lokasi Pembangunan Gudang Tempat Sarana Peralatan Damkar
		Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	30001	06/12/2019	Desa Tobadak - Kec. Tobadak	692.522.500,00	Tanah Untuk Perluasan Kantor Gabungan Dinas
		Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	19912	01/10/2021		527.445.600,00	Tanah Pembangunan Kantor Badan

No	SKPD	Nama Barang	Luas	Tgl Perolehan	Alamat	Harga	Ket
							Kesatuan Bangsa dan Politik
		Tanah Tambak/Empang/Kolam Ikan/Akuarium	21127	28/08/2022	Dusun Benteng Desa Tobadak Kec. Tobadak	1.000.900.000,00	Kolam Retensi
	Total					**5.447.999.112,00**	

5. Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset Pemerintah Daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Aset Lainnya terdiri dari Tagihan Piutang Penjualan Angsuran, Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Tagihan Jangka Panjang, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tidak Berwujud, Aset Lain-lain (Aset Rusak Berat, Aset Tidak ditemukan, dan Aset hilang), Dana *Transfer Treasury Deposit* (TDF) dan Aset Lainya - Lainnya.

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2025 disajikan berdasarkan nilai buku sebesar Rp9.284.557.729,49, mengalami kenaikan sebesar Rp896.949.619,26 atau 10,69% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp8.387.608.110,24, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 7. 128
Rincian Aset Lainnya

Dalam Rupiah

No	Uraian	Saldo Akhir 31/12/2024 (Nilai Buku)	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 31/12/2025 (Nilai Buku)
1	Aset Lainnya	0,00	993.601.827,00	993.601.827,00	0,00
2	Tuntutan Ganti Rugi	3.052.198.564,18	1.720.422.068,50	988.430.368,35	3.784.190.264,33
3	Aset Tak berwujud	1.600.904.631,00	449.438.000,00	286.392.303,89	1.763.950.327,11
4	Aset Lain-lain	3.680.085.915,05	146.380.994,00	90.049.771,00	3.736.417.138,06
5	Aset Lainnya - TDF	54.419.000,00	0,00	54.419.000,00	0,00
Jumlah		**8.387.608.110,24**	**3.309.842.889,51**	**2.412.893.270,24**	**9.284.557.729,49**

Penambahan/pengurangan Aset lainnya

Saldo Akhir 2024 (Nilai Buku)	**Rp**	**8.387.608.110,24**
Penambahan:		
- Realisasi Aset Lainnya (PKM BLUD)	Rp	993.601.827,00
- Realisasi Aset Tidak Berwujud	Rp	334.775.000,00
- Reklas dari Barjas ke Aset Tidak Berwujud	Rp	114.663.000,00
- Reklas Aset Tetap ke aset lain-lain	Rp	8.323.088.270,88
- Akumulasi Penyusutan aset lain-lain yang direklas	Rp	(8.176.707.276,88)
- Koreksi Penyesuaian Amortisasi ATB Tahun sebelumnya	Rp	(23.153.283,10)
- Beban Amortisasi ATB Tahun Berjalan	Rp	(517.006.994,11)
- Jurnal Balik Penyesuaian Saldo Awal Perubahan Kebijakan Akuntansi	Rp	(1.008.815.949,00)
- TGR yag belum tercatat	Rp	1.720.422.068,51
Sub. Total Penambahan	**Rp**	**1.760.866.663,30**
Pengurangan:		
- Reklas Aset Lainnya Ke Aset Tetap (PKM BLUD)	Rp	993.601.827,00
- Penghapusan Aset lain-lain	Rp	4.718.190.174,00
- Aset Tidak berwujud reklas ke barang dan jasa	Rp	50.000.000,00
- TDF Tersalurkan	Rp	54.419.000,00
- Lebih Catat Amortisasi Aset Tidak Berwujud tahun sebelumnya	Rp	(1.008.815.949,00)
- Akumulasi Penyusutan aset lain-lain yang dihapus	Rp	(4.600.983.924,00)
- Akumulasi Penyusutan Pompa Air lain-lain	Rp	(27.156.479,00)

- Jurnal Balik Penyesuaian Amortisasi akibat migrasi	Rp	(23.153.283,10)
- Lebih Saji Beban Amortisasi	Rp	(280.614.690,21)
- Pengurangan TGR	Rp	988.430.368,35
Sub Total Pengurangan	**Rp**	**863.917.044,04**
Saldo Akhir 2025 (Nilai Buku)	**Rp**	**9.284.557.729,49**

a) Aset Lainnya-Tuntutan Ganti Rugi

Per 31 Desember 2025, Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah menyajikan saldo Aset Lainnya – Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp3.784.190.264,34. Saldo tersebut berasal dari nilai TGR awal sebesar Rp4.772.620.632,69, dikurangi penyetoran atau pelunasan sampai dengan Tahun 2025 sebesar Rp988.430.368,35, yang terdiri atas penyetoran Tahun 2024 sebesar Rp798.147.350,81 dan penyetoran Tahun 2025 sebesar Rp190.283.017,54.

Tuntutan Ganti Rugi tersebut berasal dari kelebihan pembayaran atas Belanja Modal kepada pihak ketiga/rekanan berdasarkan LHP Tahun 2023 dan LHP Tahun 2024. Nilai TGR berdasarkan LHP Tahun 2023 adalah sebesar Rp4.081.271.203,03 dengan sisa saldo sebesar Rp3.239.123.852,22, sedangkan nilai TGR berdasarkan LHP Tahun 2024 adalah sebesar Rp691.349.429,66 dengan sisa saldo sebesar Rp545.066.412,12.

Penyetoran yang diterima pada Tahun 2025 sebesar Rp190.283.017,54 merupakan penyelesaian sebagian tagihan kepada pihak ketiga/rekanan. Atas penyetoran tersebut, Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah perlu mengakui pengurangan saldo Aset Lainnya - Tuntutan Ganti Rugi dan melakukan pengakuan/reklasifikasi pada akun Pendapatan-LO yang sesuai, sehingga penyajian aset lainnya dan pendapatan dalam laporan keuangan mencerminkan substansi penyelesaian hak tagih Pemerintah Daerah. Dapat di jelaskan pada rincian sebagai berikut.

Tabel 7. 129
Rekapitulasi Pihak Ketiga/Rekanan yang Masih Memiliki Sisa TGR

No.	Pihak Ketiga/ Rekanan	Nilai TGR	Penyetoran 2024	Penyetoran 2025	Sisa TGR
1	CV RAR	826.378.172,42	30.000.000,00	-	796.378.172,42
2	PT BRE	806.921.894,60	-	24.000.000,00	782.921.894,60
3	CV KML	738.873.004,03	80.000.000,00	-	658.873.004,03
4	CV MAJ	500.584.770,91	130.000.000,00	-	370.584.770,91
5	Dikbud	403.458.958,57	75.167.837,48	-	328.291.121,09
6	PT ACP	270.212.041,18	135.000.000,00	10.702.442,34	124.509.598,84
7	CV RF	123.553.367,54	-	-	123.553.367,54
8	CV RAI	265.548.409,97	135.000.000,00	10.000.000,00	120.548.409,97
9	PT BMI	126.989.243,61	24.409.168,55	-	102.580.075,06
10	CV BCS	96.050.641,60	-	-	96.050.641,60
11	CV MWI	83.259.015,79	-	-	83.259.015,79
12	CV AD	49.311.809,58	-	-	49.311.809,58
13	CV MA	50.532.020,49	-	13.616.202,54	36.915.817,95
14	CV ERS	32.350.000,00	-	-	32.350.000,00
15	CV LC	28.734.628,78	-	8.000.000,00	20.734.628,78
16	CV DBS	26.244.234,30	-	7.608.227,71	18.636.006,59
17	CV SN	16.280.084,26	-	-	16.280.084,26
18	CV IN	31.078.336,45	-	19.495.336,00	11.583.000,45
19	CV MJK	65.042.830,94	-	56.043.683,76	8.999.147,18
20	CV RL	1.829.697,69	-	-	1.829.697,69
	Jumlah Sisa TGR	**4.543.233.162,72**	**609.577.006,03**	**149.465.892,35**	**3.784.190.264,33**

Secara lengkap rincian tuntutan ganti rugi terdapat pada *Lampiran. 16*

b) Aset Tak Berwujud

Aset Tidak Berwujud (ATB) didefinisikan sebagai aset *non keuangan* yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik. Serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset tidak berwujud merupakan bagian dari aset non lancar yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset tak berwujud Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah terdiri dari *License Office* dan *Windows*, Antivirus, *Software*, *Website.*

Amortisasi adalah pengurangan atau penurunan nilai Aset Tidak Berwujud secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi. Aset Tidak Berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas Aset Tidak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas.

1) Pengakuan Amortisasi
   Pengakuan amortisasi Aset Tidak Berwujud dilakukan pada saat akhir tahun saat akan dilakukan penyusunan Laporan Keuangan atau pada saat aset tersebut akan dipindahtangankan kepemilikannya.
2) Pengukuran Amortisasi
   Aset Tak Berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi. Perhitungan amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus dengan masa manfaat selama 10 (sepuluh) tahun.
3) Pengungkapan Amortisasi
   Amortisasi Aset Tidak Berwujud diungkapkan dalam Neraca dalam akun "Akumulasi Amortisasi" yang akan mengurangi Nilai Buku dari Aset Tidak Berwujud tersebut. Selain itu amortisasi juga akan diungkapkan dalam LO sebagai "Beban Amortisasi".
4) Penyajian amortisasi
   Penyajian Amortisasi disajikan dalam Neraca bagian dari "Aset Tidak Berwujud"

Nilai perolehan aset tak berwujud per tanggal 31 Desember 2025 senilai Rp5.901.059.941,00 dan amortisasi senilai Rp4.137.109.613,89 sehingga nilai buku neraca pada 31 Desember 2025 senilai Rp1.763.950.327,11 mengalami kenaikan senilai Rp399.438.000,00 atau 7,26% jika dibandingkan dengan Nilai perolehan aset tak berwujud 31 Desember 2024 senilai Rp5.501.621.941,00 dan amortisasi senilai Rp3.900.717.310,00 sehingga nilai buku neraca pada 31 Desember 2024 senilai Rp1.600.904.631,00. Rincian aset tak berwujud sebagai berikut:

Tabel 7. 130
Aset Tak Berwujud

Dalam Rupiah

Uraian	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	%
Aset Tak Berwujud	5.901.059.941,00	5.501.621.941,00	399.438.000,00	7,26
Amortisasi Aset Tak Berwujud	(4.137.109.613,89)	(3.900.717.310,00)	(236.392.303,89)	6,06
Aset Tak Berwujud Netto	**1.763.950.327,11**	**1.600.904.631,00**	**163.045.696,11**	**10,18**

Tabel 7. 131
Penambahan/Pengurangan Aset Tidak Berwujud

Dalam Rupiah

No	Uraian	Saldo Akhir 31 Desember 2024	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 31 Desember 2025
1	Aset Tidak Berwujud	5.501.621.941,00	449.438.000,00	50.000.000,00	5.901.059.941,00

1) Penambahan nilai aset tidak berwujud senilai Rp449.438.000,00 dapat dilihat pada rincian tabel berikut:

Tabel 7. 132
Rincian Penambahan Aset Tidak Berwujud

Dalam Rupiah

No	Nama SKPD	Mutasi Tambah
1	Sekretariat Daerah	209.850.000,00
2	Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah	50.000.000,00
3	Inspektorat	114.663.000,00
4	Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah	74.925.000,00
Jumlah		**449.438.000,00**

Adapun penjelasan penambahan aset tidak berwujud senilai Rp449.438.000,00 Tahun Anggaran 2025, yang berasal dari:

(a) Realisasi belanja modal

Realisasi belanja modal senilai Rp334.775.000,00 merupakan penambahan Aset Tidak Berwujud yang berasal dari pengeluaran belanja modal pada Tahun Anggaran 2025. Pengeluaran tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tidak Berwujud karena memenuhi kriteria pengakuan aset, yaitu dapat diidentifikasi, memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, serta digunakan untuk menunjang kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik.

Tabel 7. 133
Rincian Penambahan Aset Tidak Berwujud dari Belanja Modal

Dalam Rupiah

No.	OPD	Nilai
1	Sekretariat Daerah	209.850.000,00
2	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	50.000.000,00
3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	74.925.000,00
	Jumlah	**334.775.000,00**

(b) Reklas dari barjas

Reklasifikasi dari Barang dan Jasa senilai Rp114.663.000,00 merupakan penambahan Aset Tidak Berwujud pada Inspektorat. Penambahan tersebut berasal dari pengeluaran yang sebelumnya dicatat pada Belanja Barang dan Jasa, namun berdasarkan hasil penelaahan kembali memenuhi kriteria pengakuan sebagai Aset Tidak Berwujud.

2) Pengurangan nilai aset tidak berwujud senilai Rp50.000.000,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:
   (a) Pengurangan aset tidak berwujud pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah senilai Rp50.000.000.00, reklasifikasi ke barang dan jasa merupakan Pengembangan Software PBB.
3) Amortisasi Aset Tidak Berwujud senilai (Rp3.432.061.638,20) dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 7. 134
Rincian Penambahan/Pengurangan Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Dalam Rupiah

Uraian	Saldo Akhir 31 Desember 2024	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 31 Desember 2025
Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(3.900.717.310,00)	1.672.722.926,20	1.436.330.622,31	4.137.109.613,89

Penambahan/Pengurangan Aset Tidak Berwujud

Saldo Akhir 2024	**Rp**	**5.501.621.941,00**
Penambahan:		
- Realisasi belanja modal	Rp	334.775.000,00
- Reklas dari barjas	Rp	114.663.000,00
Sub. Total Penambahan	**Rp**	**449.438.000,00**
Pengurangan :		
- Reklas ke barjas	Rp	50.000.000,00
Sub. Total Pengurangan	**Rp**	**50.000.000,00**
Saldo Akhir 2025	**Rp**	**5.901.059.941,00**
Amortisasi	Rp	(4.137.109.613,89)
Nilai Buku (Neto)	**Rp**	**1.763.950.327,11**

c) Aset Lain-lain

Aset Lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah karena hilang atau rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi tetapi belum dihapuskan, atau aset tetap yang dipinjam pakai kepada unit pemerintah yang lain, atau aset yang telah diserahkan ke pihak lain tetapi belum ada dokumen hibah atau serah terima atau dokumen sejenisnya.

Pengakuan Aset lain-lain Aset tetap yang direklasifikasi menjadi aset lain-lain diakui/dicatat pada saat aset tetap tersebut dihentikan dari penggunaan aktif dan direklasifikasi ke aset lain-lain.

Saldo aset lain-lain per tanggal 31 Desember 2025 pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah senilai Rp24.021.007.135,63 dan mengalami kenaikan senilai Rp3.604.898.096,88 atau 17,66% dibandingkan dengan saldo aset lain-lain per 31 Desember 2024 senilai Rp20.416.109.038,75. Akumulasi penyusutan yang dihentikan pada aset lain-lain per 31 Desember 2025 senilai (Rp20.311.746.476,57) sehingga nilai buku pada tanggal pelaporan senilai Rp3.709.260.659,06 Adapun rincian penambahan/pengurangan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 7. 135
Aset lain-lain

Dalam Rupiah

No	Uraian	Saldo Akhir 31 Desember 2024	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 31 Desember 2025
1	Aset Lain-lain	20.416.109.038,75	8.323.088.270,88	4.718.190.174,00	24.021.007.135,63
2	Akumulasi Penyusutan	(16.736.023.123,69)	(8.176.707.276,88)	(4.600.983.924,00)	(20.311.746.476,57)
	(Nilai Buku)	**3.680.085.915,06**	**146.380.994,00**	**117.206.250,00**	**3.709.260.659,06**

Penambahan nilai Aset lain-lain senilai Rp8.323.088.270,88 dijelaskan sebagai berikut:

1) Penambahan Aset lain-lain senilai Rp8.323.088.270,88 dapat dilihat pada rincian tabel berikut:

Tabel 7. 136
Rincian Penambahan Aset lain-lain

Dalam Rupiah

No	Nama SKPD	Mutasi Tambah
1	Sekretariat Daerah	2.071.665.247,74
2	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	355.359.524,00
3	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan	117.348.100,00
4	Dinas Perhubungan	145.629.500,00
5	Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian	27.500.000,00
6	Puskesmas Babana	17.640.089,00
7	Puskesmas Saloadak	84.684.853,00
8	Puskesmas Topoyo	90.460.000,00
9	Puskesmas Durikumba	13.000.000,00
10	Rumah Sakit Umum Daerah	4.430.507.832,14
11	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	65.772.650,00
12	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	35.112.000,00
13	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	47.791.675,00
14	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Perindustrian Dan Perdagangan	32.887.000,00
15	Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah	47.556.000,00
16	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	34.300.000,00
17	Dinas Lingkungan Hidup	542.516.000,00
18	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	19.650.000,00
19	Kecamatan Topoyo	65.500.000,00
20	Kecamatan Tobadak	20.407.800,00
21	Kecamatan Karossa	57.800.000,00
Total		**8.323.088.270,88**

Adapun penjelasan penambahan Aset lain-lain senilai Rp8.323.088.270,88 sebagai berikut:

(a) Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin

Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lain-lain senilai Rp8.232.628.270,88 merupakan penambahan Aset Lain-lain yang berasal dari aset peralatan dan mesin pada beberapa OPD yang diusulkan untuk dilakukan pemindahtanganan melalui mekanisme lelang. Reklasifikasi ini dilakukan karena aset dimaksud tidak lagi digunakan secara aktif dalam menunjang kegiatan operasional perangkat daerah, sehingga secara substansi lebih tepat disajikan sebagai Aset Lain-lain sampai dengan proses pemindahtanganan atau penghapusan diselesaikan. Rincian reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin ke Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

Tabel 7. 137
Rincian Penambahan Aset lain-lain Dari Reklasifikasi

Dalam Rupiah

No.	OPD	Nilai
1	Sekretariat Daerah	2.071.665.247,74
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	355.359.524,00
3	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	117.348.100,00
4	Dinas Perhubungan	145.629.500,00
5	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	27.500.000,00
6	Puskesmas Babana	17.640.089,00
7	Puskesmas Saloadak	84.684.853,00
8	Puskesmas Durikumba	13.000.000,00
9	Rumah Sakit Umum Daerah	4.430.507.832,14
10	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	65.772.650,00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	35.112.000,00
12	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	47.791.675,00
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	32.887.000,00
14	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	47.556.000,00
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	34.300.000,00
16	Dinas Lingkungan Hidup	542.516.000,00
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	19.650.000,00
18	Kecamatan Topoyo	65.500.000,00
19	Kecamatan Tobadak	20.407.800,00
20	Kecamatan Karossa	57.800.000,00
	Jumlah	**8.232.628.270,88**

(b) Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan

Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Aset Lain-lain senilai Rp90.460.000,00 terdapat pada Puskesmas Topoyo. Reklasifikasi tersebut dilakukan atas aset gedung dan bangunan yang diusulkan untuk dilakukan pembongkaran atau rehabilitasi total.

Dengan demikian, penambahan Aset Lain-lain sebesar Rp8.323.088.270,88 merupakan reklasifikasi dari aset tetap yang status pemanfaatannya berubah, baik karena usulan pemindahtanganan melalui lelang maupun karena usulan pembongkaran/rehabilitasi total. Penyesuaian ini tidak menggambarkan perolehan aset baru, melainkan perubahan klasifikasi penyajian aset agar laporan keuangan mencerminkan kondisi, status penggunaan, dan rencana tindak lanjut pengelolaan barang milik daerah secara lebih wajar dan andal.

Sehubungan dengan reklasifikasi tersebut, akumulasi penyusutan yang melekat pada aset tetap pada prinsipnya ikut direklasifikasi ke Aset Lain-lain. Namun, berdasarkan hasil penelaahan kembali dan perhitungan ulang penyusutan dengan pendekatan prospektif, terdapat kelebihan akumulasi penyusutan yang sebelumnya ikut direklasifikasi ke Aset Lain-lain. Kelebihan tersebut berasal dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atas aset berupa pompa air sebesar Rp27.156.479,00, sehingga dilakukan penyesuaian dengan mereklasifikasi kembali nilai akumulasi penyusutan tersebut ke kelompok Aset Tetap Peralatan dan Mesin. Penyesuaian ini dilakukan agar nilai akumulasi penyusutan pada Aset Tetap dan Aset Lain-lain mencerminkan nilai yang lebih tepat sesuai hasil perhitungan ulang dan kebijakan akuntansi yang berlaku.

2) Pengurangan Aset lain-lain senilai Rp4.718.190.174,00 dapat dilihat pada rincian tabel berikut:

Tabel 7. 138
Rincian Pengurangan Aset lain-lain

Dalam Rupiah

No	Nama SKPD	Mutasi Kurang
1	Sekretariat Daerah	1.373.494.992,00
2	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	187.000.000,00
3	Dinas Perhubungan	851.079.500,00
4	Puskesmas Topoyo	336.340.000,00
5	Rumah Sakit Umum Daerah	1.040.000.000,00
6	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	98.040.000,00
7	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	197.356.000,00
8	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	161.513.000,00
9	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Perindustrian Dan Perdagangan	52.147.800,00
10	Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah	29.889.530,00
11	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	16.209.000,00
12	Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah	85.288.000,00
13	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	149.950.000,00
14	Kecamatan Topoyo	139.882.352,00
Jumlah		**4.718.190.174,00**

Adapun penjelasan pengurangan Aset lain-lain senilai Rp4.718.190.174,00 sebagai berikut:

(a) Penghapusan Barang Milik Daerah yang telah laku terjual pada lelang tahun 2022 dan lelang tahun 2023. Berdasarkan Keputusan Bupati Mamuju Tengah Nomor : 198.1 Tahun 2025 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Dari Daftar Barang Pengelola Barang tanggal 04 Juli 2025, terdiri dari :
   (1) Pada Sekretariat Daerah senilai Rp1.373.494.992,00;
   (2) Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang senilai Rp187.000.000,00;
   (3) Pada Dinas Perhubungan senilai Rp851.079.500,00;
   (4) Pada Puskesmas Topoyo senilai Rp336.340.000,00;
   (5) Pada Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp1.040.000.000,00;
   (6) Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan senilai Rp98.040.000,00;
   (7) Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil senilai Rp197.356.000,00;
   (8) Pada Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian senilai Rp161.513.000,00;
   (9) Pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Perindustrian Dan Perdagangan senilai Rp52.147.800,00
   (10) Pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah senilai Rp29.889.530,00;
   (11) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu senilai Rp16.209.000,00;
   (12) Pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah senilai Rp85.288.000,00;
   (13) Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia senilai Rp149.950.000,00;
   (14) Pada Kecamatan Topoyo senilai Rp139.882.352,00.

3) Akumulasi penyusutan yang direklasifikasi ke aset lain-lain senilai (Rp20.284.589.997,58).

Penambahan/Pengurangan Aset Lain-lain

Saldo Akhir 2024	***Rp***	**20.416.109.038,75**
Penambahan:		
- Peralatan dan Mesin	Rp	8.232.628.270,88
- Gedung dan Bangunan	Rp	90.460.000,00
Sub. Total Penambahan	***Rp***	**8.323.088.270,88**
Pengurangan:		
- Penghapusan	Rp	4.718.190.174,00
Sub Total Pengurangan	***Rp***	**4.718.190.174,00**

Saldo Akhir 2025	***Rp***	**24.021.007.135,63**
Akumulasi Penyusutan	*Rp*	*(20.284.589.997,58)*
Nilai Buku	***Rp***	**3.736.417.138,05**

d) Aset Lainnya – TDF

Sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pengelolaan DBH dan/atau DAU yang disalurkan secara Non tunai melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility* (TDF), perlu ditindaklanjuti dengan tata cara pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH) dan/atau Dana Alokasi Umum (DAU) melalui rekening *Treasury Deposit Facilities* (TDF) dalam APBD sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Dalam hal pokok DBH/DAU telah disalurkan dari RKUN ke Rekening TDF, Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah mempunyai saldo dan remunerasi pada rekening *Treasury Deposit Facility Transfer* ke Daerah (TDP-TKD) senilai Rp0,00 serta remunerasi senilai Rp0,00 mencatat sebagai Aset lainnya kedalam Neraca. Berkenaan dengan hal tersebut dan sambil menunggu kebijakan pengelolaan dan kebijakan akuntansi atas DBH/DAU yang disalurkan melalui fasilitas TDF pada APBD yang akan ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri, perlakuan akuntansi atas penyaluran remunerasi sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal BI telah memberikan remunerasi atas DBH/DAU yang dibayarkan melalui fasilitas TDF dengan skema transfer ke RKUN, namun belum ditarik dan ditransfer ke RKUD, maka Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah mencatat Piutang Lain-Lain PAD yang Sah (Akun Neraca) pada Pendapatan Bunga-Lain-Lain PAD yang Sah atau akun sejenisnya (Akun Laporan Operasional).
2. Dalam hal remunerasi atas DBH/DAU yang dibayarkan melalui fasilitas TDF telah disalurkan dari RKUN ke RKUD, Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah mencatat sebagai Kas di RKUD (Akun Neraca) dan Pendapatan Bunga - Lain-Lain PAD yang Sah atau akun sejenis pada LRA, dan di sisi lain mencatat pengurangan/pelunasan Piutang atas Piutang Lain-Lain PAD yang Sah.

b. Kewajiban

1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu. Jumlah Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah per 31 Desember 2025 senilai Rp4.607.636.404,93 mengalami penurunan senilai Rp2.832.025.520,78 atau 38,07% dari saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 senilai Rp7.439.661.925,71 deengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 7. 139
Rincian Kewajiban Jangka Pendek

Dalam Rupiah

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	64.655.496,00	209.206.419,00	(144.550.923,00)	(69,09)
2	Pendapatan Diterima Dimuka	59.970.807,71	0,00	59.970.807,71	100,00
3	Utang Belanja	4.483.010.101,22	7.230.455.506,71	(2.747.445.405,49)	(38,00)
Jumlah		**4.607.636.404,93**	**7.439.661.925,71**	**(2.832.025.520,78)**	**(38,07)**

a) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2025 senilai Rp64.655.496,00, mengalami penurunan senilai Rp144.550.923,00 atau 69,09% dari saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2024 senilai Rp209.206.419,00.

Utang PFK terdiri dari Utang PPh Pasal 21 sebesar Rp3.958.181,00, Utang PPh Pasal 23 sebesar Rp11.243.614,00, dan Utang PPN Pusat sebesar Rp49.453.701,00. Saldo utang PFK tersebut terdiri dari dua komponen utama yaitu:

Pertama, Utang PFK BLUD yang berasal dari Puskesmas Babana sebesar Rp1.926.481,00, yaitu potongan PPh Pasal 21 atas jasa pelayanan kesehatan tahun 2025 yang belum disetorkan

ke Kas Negara hingga berakhirnya tahun anggaran 2025. Namun, utang tersebut telah disetorkan sepenuhnya pada awal tahun 2026, sehingga tidak ada tunggakan lebih lanjut.

Kedua, Utang PFK BOSP sebesar Rp62.729.015,00 yang merupakan kewajiban perpajakan dari pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOSP) pada satuan pendidikan dasar dan menengah. Utang ini terdiri dari sisa utang tahun 2024 sebesar Rp24.861.513,00 (pajak yang telah dipotong oleh 8 sekolah pada tahun 2024 tetapi belum dilaporkan dan disetorkan) dan utang yang timbul di tahun 2025 sebesar Rp37.867.502,00 (terdiri dari PPN Rp30.264.528,00, PPh Pasal 21 Rp649.500,00, dan PPh Pasal 23 Rp6.953.474,00). Utang tahun 2025 telah disetorkan di tahun 2026, sedangkan sisa utang tahun 2024 akan ditindaklanjuti dengan pendampingan oleh pemerintah daerah kepada sekolah-sekolah terkait pada tahun 2026.

Secara lengkap rincian Utang PFK terdapat pada *Lampiran 17.*

b) Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp59.970.807,71 yang berasal dari Pajak Reklame. Saldo ini merupakan bagian dari pembayaran pajak reklame yang telah diterima kasnya pada tahun 2025, tetapi masih terdapat sisa atas masa pajaknya setelah 31 Desember 2025a pajaknya baru akan berlangsung pada periode setelah 31 Desember 2025. Sesuai dengan basis akrual, pendapatan tersebut belum dapat diakui sebagai pendapatan di tahun 2025, sehingga dicatat sebagai kewajiban (Pendapatan Diterima Dimuka) dan akan diakui sebagai pendapatan operasional pada tahun 2026 seiring dengan berlalunya masa pajak yang bersangkutan.

c) Utang Belanja

Utang Belanja per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp4.483.010.101,22 mengalami penurunan senilai Rp2.747.445.405,49 atau 38,00% dari Utang Belana per 31 Desember 2024 senilai Rp7.230.455.506,71. Rincian lengkap per SKPD, kreditur, nomor kontrak, nilai kontrak, serta BAST disajikan pada *Lampiran 18.* Berdasarkan pengelompokannya, utang ini terdiri atas Utang Pegawai (iuran BPJS Kesehatan), Utang Barang dan Jasa (terutama pengadaan obat dan bahan medis habis pakai), Utang Belanja Modal (pekerjaan konstruksi jalan, jembatan, irigasi, dan bangunan gedung), serta Utang Hibah.

Seluruh utang yang disajikan telah didukung oleh dokumen kontrak dan BAST yang sah. Terdapat beberapa kesalahan pencatatan utang tahun-tahun sebelumnya (misalnya pada kontrak CV. Makappa tahun 2022) yang mengakibatkan saldo negatif, namun telah dilakukan koreksi pada tahun 2025 sehingga tidak terdapat saldo utang negatif dalam neraca.

Utang Pajak Air Permukaan sebagai bagian dari kewajiban jangka pendek, Pemerintah Daerah juga memiliki utang pajak air permukaan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sebesar Rp66.960.682,00 yang timbul dari penggunaan air permukaan pada UPTD Pengelolaan Air Bersih. Utang tersebut telah dilunasi sepenuhnya pada tanggal 6 April 2026.

Rincian saldo tang Belanja per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 7. 140
Rincian Utang Belanja

Dalam Rupiah

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Utang Belanja Pegawai	139.838.899,00	1.401.915.700,00	(1.262.076.801,00)	(90,03)
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	1.455.729.847,91	1.153.779.184,00	301.950.663,91	26,17
3	Utang Belanja Hibah	12.102.000,31	434.378.850,31	(422.276.850,00)	(97,21)
4	Utang Belanja Modal	2.875.339.354,00	4.240.381.772,40	(1.365.042.418,40)	(32,19)
Jumlah		**4.483.010.101,22**	**7.230.455.506,71**	**(2.747.445.405,49)**	**(38,00)**

1) Utang Belanja Pegawai

Saldo Utang Belanja Pegawai per tanggal 31 Desember senilai Rp139.838.899,00 mengalami penurunan senilai Rp1.262.076.801,00 atau 90,03% dari saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp1.401.915.700,00. Penurunan ini menunjukkan bahwa hampir seluruh kewajiban gaji dan tunjangan pegawai periode sebelumnya telah diselesaikan pada tahun 2025. Utang yang tersisa seluruhnya berasal dari Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan

dan Aset Daerah (BPKPAD) berupa iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang belum disetorkan ke BPJS Kesehatan, terdiri atas iuran untuk PNS sebesar Rp136.225.610,00 dan iuran untuk PPPK sebesar Rp3.613.289,00.

2) Utang Belanja Barang dan Jasa

Saldo Utang Belanja Barang dan Jasa per tanggal 31 Desember 2025 senilai Rp1.455.729.847,91 mengalami kenaikan senilai Rp301.950.663,91 atau 26,17% dibandingkan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp1.153.779.184,00. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh tingginya volume pengadaan barang dan jasa di akhir tahun anggaran 2025, khususnya pengadaan obat-obatan dan bahan medis habis pakai (BMHP) pada Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah, serta pengadaan perlengkapan peserta didik pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Utang Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 7. 141
Rekapitulasi Utang Belanja Barang dan Jasa

Dalam Rupiah

No	SKPD	2025	2024	Kenaikan (Penurunan)	
				(Rp)	(%Rp)
1	Dinas Kesehatan	556.568.303,00	258.087.577,00	298.480.726,00	115,65
2	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	15.424.000,00	151.525.500,00	(136.101.500,00)	(89,82)
3	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	86.272.941,91	0,00	86.272.941,91	100,00
4	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	4.202.358,00	0,00	4.202.358,00	100,00
5	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	41.475.900,00	41.475.900,00	0,00	0,00
6	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	119.000,00	119.000,00	0,00	0,00
7	Rumah Sakit Umum Daerah	751.667.345,00	702.571.207,00	49.096.138,00	6,99
Jumlah		**1.455.729.847,91**	**1.153.779.184,00**	**301.950.663,91**	**26,17**

3) Utang Belanja Hibah

Saldo Utang Belanja Hibah per tanggal 31 Desember 2025 senilai Rp12.102.000,31 mengalami penurunan senilai Rp422.276.850,00 atau 97,21% dari Saldo Utang Belanja Hibah per tanggal 31 Desember 2024 senilai Rp434.378.850,31. Selama tahun 2025 tidak terdapat penambahan utang hibah baru. Sisa utang yang ada merupakan akumulasi dari kegiatan hibah pada tahun-tahun sebelumnya yang belum sepenuhnya diselesaikan pembayarannya.. Utang Belanja Hibah per 31 Desember 2025 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 7. 142
Rekapitulasi Utang Belanja Hibah

Dalam Rupiah

No	SKPD	2025	2024	Kenaikan (Penurunan)	
				(Rp)	(Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	5.420.000,00	109.673.000,00	(104.253.000,00)	(95,06)
2	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	6.682.000,00	324.705.850,00	(318.023.850,00)	(97,94)
3	Dinas Perikanan	0,31	0,31	0,00	0,00
Jumlah		**12.102.000,31**	**434.378.850,31**	**(422.276.850,00)**	**(97,21)**

4) Utang Belanja Modal

Saldo Utang Belanja Modal per tanggal 31 Desember 2025 senilai Rp2.875.339.354,00 mengalami penurunan senilai Rp1.365.042.418,40 atau 32,19% dari saldo Utang Belanja Modal per 31 Desember 2024 senilai Rp4.240.381.772,40. Penurunan ini menunjukkan adanya percepatan pembayaran kewajiban modal dari tahun-tahun sebelumnya. Utang Belanja Modal yang belum dibayarkan akan tetapi barangnya telah diterima yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Serah Terima Barang (BAST) atau dokumen lain yang dipersamakan dengan jumlah senilai Rp2.579.554.843,00. Utang Belanja Modal per 31 Desember 2025 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 7. 143
Rekapitulasi Utang Belanja Modal

Dalam Rupiah

No	SKPD	2025	2024	Kenaikan/ (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	DINAS KESEHATAN	46.168.769,00	3.669.029,00	42.499.740,00	1.158,34
2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2.595.315.878,00	2.881.213.234,00	(285.897.356,00)	(9,92)
3	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	19.068.000,00	998.645.502,40	(979.577.502,40)	(98,09)
4	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	51.210.000,00	51.210.000,00	0	0
5	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	42.879.007,00	292.754.007,00	(249.875.000,00)	(85,35)
6	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	12.890.000,00	12.890.000,00	0	0
7	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	107.807.700,00	0	107.807.700,00	100
Jumlah		**2.875.339.354,00**	**4.240.381.772,40**	**(1.365.042.418,40)**	**(32,19)**

c. Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah yang berasal dari total aset dikurangi dengan total kewajiban, Saldo Ekuitas per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp1.189.835.802.554,09 mengalami penurunan senilai Rp181.025.909.992,51 atau 13,21% dari saldo Ekuitas per 31 Desember 2024 senilai Rp1.370.861.712.546,60

7.5.4. Laporan Operasional

Laporan operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam Pendapatan-LO, Beban, *Surplus/(Defisit)* operasional dari satu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual *(full accrual accounting cycle)*, sehingga penyusunan laporan keuangan operasional, laporan perubahan ekuitas dan neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Laporan Operasional disusun dengan pendekatan basis akuntansi akrual yaitu seluruh transaksi atau kejadian ekonomi diakui pada saat terjadinya tanpa melihat kas diterima atau dibayarkan.

a. Pendapatan-LO

1. Pendapatan Asli Daerah-LO

Merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Pendapatan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2025 adalah senilai Rp79.712.886.720,48 mengalami kenaikan senilai Rp19.480.570.581,83 atau 32,34% dari Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2024 adalah senilai Rp60.232.316.138,65, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7. 144
Rincian Pendapatan Asli Daerah–LO

Dalam Rupiah

No	Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Pendapatan Pajak Daerah – LO	26.515.451.873,29	17.446.886.106,00	9.068.565.767,29	51,98
2	Pendapatan Retribusi Daerah – LO	45.686.344.604,00	14.101.109.594,00	31.585.235.010,00	223,99
3	Hasil Pengelolaan	1.162.498.116,00	729.061.014,00	433.437.102,00	59,45

	Kekayaan Daerah yang dipisahkan-LO				
4	Lain-lain PAD Yang Sah – LO	6.348.592.127,19	27.955.259.424,65	(21.606.667.297,46)	(77,29)
Jumlah		**79.712.886.7209,48**	**60.232.316.138,65**	19.480.570.581,83	32,34

a) Pendapatan Pajak Daerah-LO

Pendapatan Pajak Daerah - LO yang berbasis akrual mengakui pendapatan pajak daerah pada saat hal atas pajak telah timbul, tannpa menunggu penerimaan kas sehingga menggambarkan kinerja operasional dan potensi ekonomi rill daerah. Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2025 adalah senilai Rp26.515.451.873,29 mengalami kenaikan senilai Rp9.068.565.767,29 atau 51,98% dari Tahun Anggaran 2024 adalah senilai Rp17.446.886.106,00 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 7. 145
Rincian Pendapatan Pajak Daerah–LO

Dalam Rupiah

No	Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024
1	Pajak Hotel – LO	0	32.673.000,00
2	Pajak Restoran – LO	0	1.006.742.551,00
3	Pajak Hiburan-LO	0	500.000,00
4	Pajak Reklame – LO	443.163.178,29	302.845.126,00
5	Pajak Penerangan Jalan – LO	0,00	6.190.641.769,00
6	Pajak Air Tanah – LO	3.000.000,00	3.000.000,00
7	Pajak Sarang Burung Walet-LO	200.000,00	0,00
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – LO	658.011.971,00	658.879.733,00
9	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan – LO	3.780.758.118,00	8.592.077.002,00
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) – LO	214.761.375,00	659.526.925,00
11	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-LO	7.338.977.931,00	0,00
12	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO	6.343.939.900,00	0,00
13	*Opsen Bea Balik Nama Kendaraan* Bermotor (BBNKB)-LO	7.732.639.400,00	0,00
Jumlah		**26.515.451.873,29**	**17.446.886.106,00**

Terdapat perbedaan nilai penyajian antara Pendapatan pajak daerah pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebesar Rp26.153.179.463,00 dan Laporan Operasional (LO) sebesar Rp26.515.451.873,29 dengan selisih sebesar Rp362.272.410,29. Perbedaan tersebut disebabkan oleh perbedaan basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan kedua laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan beberapa faktor lainnya. Selisih tersebut terdapat pada 3 (tiga) sektor pendapatan pajak daerah yaitu sebagai berikut:

1. Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron
   Perbedaan nilai Pendapatan Pajak Reklame pada Laporan Operasional (LO) senilai Rp443.163.178,29 dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Pajak Reklame pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebesar Rp503.133.986,00 dengan selisih Rp59.970.807,71. Selisih tersebutdisebabkan adanya koreksi pengakuan pendapatan pada akhir tahun. Koreksi tersebut dilakukan atas sebagian penerimaan Pajak Reklame yang sampai dengan 31 Desember 2025 belum memenuhi kriteria sebagai pendapatan periode berjalan karena masa tayang atau masa manfaat reklame masih melampaui tanggal pelaporan.

   Sesuai dengan basis akrual pada penyusunan Laporan Operasional, bagian penerimaan tersebut seharusnya diakui sebagai Pendapatan Diterima di Muka dan akan diakui sebagai pendapatan pada periode berikutnya sesuai masa manfaatnya. Sementara itu, pada Laporan Realisasi Anggaran, seluruh penerimaan kas yang telah masuk ke Rekening Kas Umum Daerah selama Tahun Anggaran 2025 tetap diakui sebagai realisasi pendapatan daerah. Oleh karena itu, terdapat selisih antara nilai pendapatan pada LO dan LRA.

2. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Terdapat perbedaan nilai penyajian antara Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) senilai Rp3.434.749.355 dan Laporan Operasional (LO) senilai Rp3.780.758.118,00 dengan selisih senilai Rp346.008.763. Pendapatan PBB-P2 pada LRA dicatat menggunakan Basis Kas, yaitu hanya mengakui pendapatan atas ketetapan pajak yang uangnya telah benar-benar disetor dan masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) selama tahun anggaran berjalan. Pendapatan PBB-P2 pada LO dicatat menggunakan Basis Akrual, yaitu mengakui pendapatan pada saat timbulnya hak pemerintah daerah (penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang/SPPT PBB-P2), meskipun aliran kas masuknya belum diterima.

Selisih lebih tinggi pada LO menunjukkan adanya penerbitan ketetapan pajak (SPPT PBB-P2) pada tahun berjalan yang belum berhasil ditagih atau dilunasi oleh Wajib Pajak sampai dengan tanggal 31 Desember 2025. Nilai tunggakan tersebut diakui sebagai penambah Piutang Pajak PBB-P2 pada Neraca dan menambah Pendapatan PBB-P2 LO pada Laporan Operasional.

3. PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain

Terdapat perbedaan nilai penyajian antara Pendapatan PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebesar Rp6.202.638.409 dan Laporan Operasional (LO) sebesar Rp6.278.872.864 sehingga terdapat selisih sebesar Rp76.234.455. Selisih tersebut dipengaruhi oleh mutasi piutang pajak antar-tahun anggaran yaitu terdapat piutang PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp544.137.744 yang baru direalisasikan dan masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) pada Tahun Anggaran 2025. Aliran kas ini diakui sebagai penambah Pendapatan Pajak Penerangan Jalan pada LRA Tahun 2025. Namun, pada LO Tahun 2025 penerimaan ini tidak diakui lagi sebagai pendapatan melainkan sebagai pengurang saldo Piutang Pajak di Neraca, karena hak pendapatannya telah diakui pada LO Tahun Anggaran 2024.

Selisih tersebut juga dipengaruhi oleh pengakuan piutang baru Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp620.372.199 yang pemungutannya baru disetorkan/dilunasi pada Tahun Anggaran berikutnya. Sesuai dengan basis akrual, nilai ini telah diakui sebagai PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain pada LO Tahun 2025 dan dicatat sebagai saldo Piutang Pajak baru di Neraca, namun nilai ini belum tercatat pada LRA Tahun 2025 karena belum ada aliran kas masuk.

b) Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Pendapatan Retribusi Daerah – LO yang menggunkan basis akrual mengakui pendapatan retribus pada saat hak atas retribusi telah timbul yaitu ketika pelayanan jasa telah diberikan atau izin telah diterbitkan oleh pemerintah daerah kepada wajib retibusi tanpa harus menunggu pembayaran tunai. Pendapatan Retribusi-LO Tahun Anggaran 2025 adalah senilai Rp45.686.344.604,00 mengalami kenaikan senilai Rp31.585.235.010,00 atau 223,99% dari Tahun Anggaran 2024 adalah senilai Rp14.101.109.594,00 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 7. 146
Rincian Pendapatan Retribusi Daerah–LO

Dalam Rupiah

No	Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	38.482.267.400,00	7.340.281.324,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan-LO	0,00	221.640.000,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	100.000.000,00	187.700.000,00
4	Retribusi Pelayanan Pasar-LO	0,00	132.250.000,00
5	Retribusi Pelayanan Kebersihan-LO	202.115.000,00	0,00
6	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	6.341.734.000,00	5.708.319.000,00
7	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-LO	142.000.000,00	0,00
8	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO	75.060.000,00	41.105.000,00

No	Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024
9	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	343.168.204,00	469.814.270,00
Jumlah		**45.686.344.604,00**	**14.101.109.594,00**

Terdapat perbedaan nilai penyajian antara Retribusi daerah pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebesar Rp39.359.684.325,00 dan Laporan Operasional (LO) sebesar Rp45.686.344.604,00 dengan selisih sebesar Rp6.326.660.279,00. Perbedaan tersebut disebabkan oleh perbedaan basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan kedua laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan beberapa faktor lainnya. Selisih tersebut terdapat pada 3 (tiga) sektor retribusi daerah yaitu sebagai berikut:

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
   Terdapat perbedaan nilai penyajian yang signifikan antara Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebesar Rp7.165.518.497,00 dan Laporan Operasional (LO) sebesar Rp14.939.147.726,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp7.773.629.229,00.

   Selisih tersebut dipengaruhi oleh realisasi atas penerimaan piutang pelayanan kesehatan tahun 2024 dan pengakuan piutang pelayanan kesehatan baru tahun 2025 serta dipengaruhi oleh kebijakan reklasifikasi pengakuan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Dana Kapitasi JKN berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, khususnya Pasal 27 ayat (3), berbunyi "pendapatan yang bersumber dari Dana Kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemerintah Daerah diakui dan disajikan sebagai bagian dari Retribusi Pelayanan Kesehatan".

2. Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah

   Terdapat perbedaan nilai penyajian antara Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebesar Rp25.304.134.624,00 dan Laporan Operasional (LO) sebesar Rp23.543.119.674,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp1.761.014.950,00. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh mutasi piutang klaim pihak ketiga (BPJS Kesehatan dan PT Jasa Raharja) antar-tahun anggaran.

   Realisasi pembayaran/pelunasan atas klaim piutang BPJS Kesehatan Tahun Anggaran 2024 yang baru diterima kasnya oleh RSUD pada Tahun Anggaran 2025. Aliran kas masuk ini diakui sebagai penambah Pendapatan Retribusi pada LRA Tahun 2025. Namun, pada LO Tahun 2025 penerimaan kas ini tidak diakui lagi sebagai pendapatan melainkan sebagai pengurang saldo Piutang BPJS di Neraca, karena hak pendapatannya secara akrual telah diakui pada LO Tahun Buku 2024.

   Selain itu, terdapat klaim Jasa Pelayanan BLUD RSUD Mamuju Tengah kepada BPJS Kesehatan dan hak pendapatan atas pelayanan pasien kecelakaan yang dijamin oleh PT Jasa Raharja yang hingga tanggal 31 Desember 2025 belum di bayarkan oleh pihak ketiga PT Jasa Raharja. Sesuai dengan basis akrual, nilai ini telah diakui sebagai Pendapatan Retribusi pada LO Tahun 2025 dan dicatat sebagai saldo Piutang baru di Neraca, namun belum tercatat pada LRA Tahun 2025 karena belum ada aliran kas masuk.

3. Retribusi pemakaian alat (Retribusi air bersih)

   Terdapat perbedaan nilai penyajian antara Pendapatan Retribusi Pemakaian Alat pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebesar Rp6.027.688.000 dan Laporan Operasional (LO) sebesar Rp6.341.734.000 sehingga terdapat selisih sebesar Rp314.046.000. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh mutasi saldo piutang retribusi pemakaian alat yang validitas datanya didasarkan pada rincian *By Name By Address* (BNBA) wajib retribusi. Mutasi tersebut terdiri atas penambahan piutang tahun 2025 yang berasal dari penetapan retribusi berjalan pada tahun anggaran 2025, serta pengurangan piutang tahun 2024.

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO

Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO Tahun Anggaran 2025 adalah senilai Rp1.162.498.116,00 mengalami kenaikan senilai Rp433.437.102,00 atau 59,45% dari Tahun Anggaran 2024 senilai Rp729.061.014,00 . Ini merupakan pembagian laba bagi Pemerintah daerah dari Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

d) Lain-lain PAD yang Sah-LO

Lain-lain PAD yang Sah – LO berbasis akrual mengakui pendapatan tersebut pada saat atas pendapatan itu telah timbul misalnya ketika surat keputusan denda diterbitkan tanpa menunggu penerimaan kas. Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun Anggaran 2025 adalah senilai Rp6.348.592.127,19 mengalami penurunan senilai Rp21.606.667.297,46 atau 77,29% dari Tahun Anggaran 2024 senilai Rp27.955.259.424,65. dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 7. 147
Rincian Lain-lain PAD yang Sah–LO

Dalam Rupiah

No	Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024
1	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-LO	819.410.000,00	230.337.498,00
2	Hasil Sewa BMD-LO	24.865.000,00	57.025.000,00
3	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD-LO	20.000.000,00	0,00
4	Jasa Giro pada Kas Daerah-LO	1.124.482.266,00	1.197.050.360,00
5	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO	221.797.197,00	6.798.593,00
6	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	473.396.168,26	2.332.161.942,72
7	Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	59.529.871,00	0
8	Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO	126.650.000,00	0
9	Pendapatan dari Pengembalian-LO	2.661.453.820,00	0
7	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan-LO	0,00	23.464.585.254,00
8	Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah-LO	0	13.916.109,86
9	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO	817.007.804,93	653.384.667,07
Jumlah		**6.348.592.127,19**	**27.955.259.424,65**

Terdapat perbedaan penyajian angka antara Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebesar Rp6.415.225.144,73 dan Laporan Operasional (LO) sebesar Rp6.348.592.127,19, sehingga membentuk selisih rekonsiliasi nilai sebesar Rp66.633.017,54. Selisih tersebut terjadi karena adanya perbedaan basis akuntansi (basis kas pada LRA dan basis akrual pada LO) serta perbedaan perlakuan akuntansi atas transaksi-transaksi spesifik berikut:

1. Selisih ini disebabkan oleh adanya pengakuan Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Alat-LO pada tahun berjalan atas terbitnya surat ketetapan denda senilai Rp126.650.000. Berdasarkan basis akrual, hak atas denda tersebut sudah sah diakui sebagai Pendapatan-LO bersamaan dengan timbulnya akun Piutang Denda Retribusi di Neraca.
2. Adanya realisasi penerimaan kas di LRA dari penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) oleh Bendahara atas temuan kekurangan volume pekerjaan senilai Rp190.283.017,54 . Di dalam LO (Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan), Karena objek temuan kekurangan volume tersebut sebelumnya telah dicatat dan didebit ke dalam pos Aset Lainnya (TGR) di Neraca, maka pada saat terjadi pemulihan atau pembayaran ganti rugi, transaksi tersebut tidak diakui sebagai Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah-LO. Penerimaan tersebut secara akrual langsung dijurnal sebagai pengurang nilai (kredit) akun Aset Lainnya (TGR) di Neraca untuk memulihkan nilai aset.
3. Adanya penerimaan kas senilai Rp3.000.000,00 atas Retribusi Air Bersih. Uang tersebut merupakan pembayaran dari pelanggan untuk masa layanan Tahun Anggaran 2024, namun baru disetorkan secara riil ke Kas Daerah pada tahun anggaran 2025.

2. Pendapatan Transfer-LO

Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2025 adalah senilai Rp518.209.507.922,00 mengalami penurunan senilai Rp38.842.404.389,00 atau 6,97% dari Tahun Anggaran 2024 adalah senilai Rp557.051.912.311,00 dengan rincian pada tabel berikut :

Tabel 7. 148
Rincian Pendapatan Transfer-LO

Dalam Rupiah

No	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat –LO	496.805.039.284,00	531.765.771.129,00	(34.960.731.845,00)	(6,57)
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO	21.404.468.638,00	25.286.141.182,00	(3.881.672.544,00)	(15,35)
Jumlah		**518.209.507.922,00**	**557.051.912.311,00**	**(38.842.404.389,00)**	**(6,97)**

a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO Tahun Anggaran 2025 adalah senilai Rp496.805.039.284,00 mengalami penurunan senilai Rp34.960.731.845,00 atau 6,57% dari Tahun Anggaran 2024 adalah senilai Rp531.765.771.129,00 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 7. 149
Rincian Transfer Pemerintah Pusat-LO

Dalam Rupiah

No	Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024
1	DBH PBB-LO	1.696.515.700,00	1.265.542.436,00
2	DBH PPh Pasal 21-LO	1.943.564.100,00	1.293.737.000,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LO	47.997.800,00	24.049.000,00
4	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LO	273.643.000,00	84.000,00
5	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty-LO	0,00	54.418.000,00
6	DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO	95.504.000,00	257.597.564,00
7	DBH SDA Perikanan-LO	1.131.002.000,00	1.519.879.000,00
8	DBH Sawit-LO	2.332.581.000,00	7.519.477.000,00
9	DAU-LO	307.875.671.000,00	282.562.180.000,00
10	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja-LO	4.071.373.984,00	7.553.730.749,00
11	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan-LO	33.833.611.000,00	44.235.636.000,00
12	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan-LO	23.097.088.000,00	21.832.361.000,00
13	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum-LO	0,00	12.999.985.000,00
14	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD-LO	349.758.336,00	418.504.000,00
15	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD-LO	238.845.825,00	7.749.568.982,00
16	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP-LO	0,00	4.382.712.628,00
17	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting-LO	0,00	3.118.571.200,00
18	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan-LO	0,00	9.738.033.800,00
19	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler-LO	0,00	10.943.717.000,00
20	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan-LO	5.256.556.300,00	0,00
22	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler-LO	0,0	5.394.173.000,00
23	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan-LO	3.578.375.000,00	0,00
24	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana-LO	0,00	758.891.636,00
25	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan-LO	22.710.473.880,00	39.544.741.345,00
26	DAK Non Fisik-BOS Reguler-LO	18.565.799.600,00	18.385.482.700,00
27	DAK Non Fisik-BOS Kinerja-LO	1.112.250.000,00	1.040.000.000,00
28	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Profesi Guru-LO	43.721.462.000,00	29.578.776.000,00

No	Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024
29	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tambahan Penghasilan Guru-LO	358.000.000,00	1.678.350.000,00
30	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Khusus Guru-LO	1.860.778.800,00	1.635.428.000,00
31	DAK Non Fisik-BOP PAUD-LO		0,00
32	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan-LO	2.985.100.000,00	0,00
33	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK-LO	7.927.725.538,00	1.964.836.264,00
34	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan-LO	193.185.000,00	0,00
35	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal-LO	0,00	398.597.500,00
36	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB-LO	2.522.130.600,00	2.325.032.000,00
37	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian-LO	149.112.000,00	643.622.400,00
38	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler-LO	2.704.420.000,00	2.557.800.000,00
39	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja-LO	15.000.000,00	30.000.000,00
40	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler-LO	0,00	2.371.100.000,00
41	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja-LO	90.000.000,00	90.000.000,00
42	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas-LO	6.067.514.821,00	5.899.155.925,00
Total		**496.805.039.284,00**	**531.765.771.129,00**

Untuk Dana Transfer Umum- Dana Bagi hasil (DBH) terdapat perbedaaan nilai LO dan LRA. Dana Transfer Umum- Dana Bagi hasil (DBH)-LO senilai Rp7.520.807.600,00 sedangkan Dana Transfer Umum- Dana Bagi hasil (DBH)-LRA senilai Rp7.575.226.600,00. Perbedaan yang terjadi dikarenakan TDF Tahun 2024 senilai Rp54.419.000,00 merupakan dana yang telah diterima di Rekening Kas Umum Negara (RKUN) pada tahun 2024, namun baru disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) pada tahun 2025. Dalam basis kas (LRA), pengakuan dilakukan saat dana disalurkan ke RKUD, sedangkan dalam basis akrual (LO), pendapatan telah diakui saat hak diterima pada tahun 2024.

b) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO Tahun Anggaran 2025 dan Tahun 2025 Rp0,00. Terdapat perbedaan nilai pada Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya-LRA dengan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO senilai RpRp47.980.745.620,00. Hal tersebut dikarenakan adanya penyesuaian atas pendapatan Transfer Dana Desa yang dihapusbukukan pada Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO karena bukan merupakan pendapatan operasional Pemda berdasarkan bultek SAP 21 tentangg Akuntansi Transfer Berbasis Akrual.

c) Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO

Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO Tahun Anggaran 2025 senilai Rp18.963.115.442,00 atau mengalami penurunan senilai Rp6.323.025.740,00 atau 25,01% dari Tahun Anggaran 2024 senilai Rp25.286.141.182,00. Pendapatan tersebut merupakan Transfer Bagi Hasil Pajak Provinsi Sulawesi Barat selama Tahun 2025 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 7. 150
Rincian Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO

Dalam Rupiah

No	Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO	1.846.962.542,00	3.754.610.082,00
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO	1.629.713.687,00	5.352.561.968,00
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	8.820.371.351,00	8.357.499.019,00
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan- LO	25.859.447,00	17.334.878,00
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-LO	9.081.561.611,00	7.804.135.235,00
Jumlah		**21.404.468.638,00**	**25.286.141.182,00**

3. Lain- Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah kelompok pendapatan utama dimana biasanya berupa Hibah dari pemerintah pusat, daerah lain atau swasta, untuk perbedaan dasar terkait akun Lain-lain Pendapatan daerah yang Sah antara di LRA dan LO sama dengan Lain-lain PAD yang Sah, yaitu LRA mengakui pendapatan berdasarkan aliran aliran uang masuk atau kas dimana diakui saat kas benar-benar masuk ke RKUD, Sebaliknya LO berrbasis akrual diakui saat timbulnya hak atas pendapatan, meskipun kas belum diterima di RKUD.

1) Pendapatan Hibah – LO merupakan pendapatan yang telah diakui sebagai akibat dari diterimanya hibah baik dari pemerintah pusat, daerah lain, atau swasta, namun pengakuannya tidak semata-mata saat kas diterima melainkan saat hak atas hibah tersebut diperoleh misalnya perjanjian hibah ditandatangani dan syarat dipenuhi. Terdapat penambahan pada Pendapatan Hibah – LO senilai Rp39.721.810.965,77 akibat Penyesuaian aset tetap tahun 2025 meliputi reklasifikasi tambah atas tanah hibah dari Adnan Sahrir, reklasifikasi tanah hibah untuk balai penyuluhan KB, reklasifikasi mutasi tambah atas hibah KIB B dari Kementerian Kesehatan berdasarkan nomor KN.01.08/C.IV/2608/2025 tanggal 15 Agustus 2025, serta hibah KIB C dari kementerian yang direklasifikasi sebagai penerimaan hibah KIB B dan KIB C.
2) Pendapatan Lainnya – LO adalah pendapatan yang mencakup penerimaan pemerintah yang bukan berasal dari pendapatan utama yaitu PAD, hibah, atau trasfer, melainkan seperti hasil jasa Giro, denda, pengembalian atau pendapatan dari penjualan aset yang tidak signifikan akun ini berfungsi sebagai tempat penampungan pendapatan non-utama yang diakui secara akrual, namun pada tahun 2025 tidak terdapat penambahan.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2025 adalah senilai Rp39.721.810.965,77 mengalami kenaikan senilai Rp25.881.695.113,22 atau 187% dibandingkan dari Tahun 2024 senilai Rp13.840.115.852,55 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 7. 151
Rincian Lain- Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO

Dalam Rupiah

No	Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	36.765.497.005,77	467.050.299,55
2	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO	2.956.313.960,00	3.929.974.650,00
3	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO	0,00	1.750.562.000,00
4	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	0,00	7.692.528.903,00
Total		**39.721.810.965,77**	**13.840.115.852,55**

Pada Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdapat selisih antara Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan Laporan Operasional (LO). Perbedaan nilai antara Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional (LO) pada akun Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terjadi karena perbedaan dasar pengakuan dan jenis transaksi yang dicatat pada masing-masing laporan. Pada LRA nilai sebesar Rp8.339.182.911,00 merupakan realisasi Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP yang diakui berdasarkan basis kas, yaitu saat kas diterima di RKUD atau rekening fasilitas kesehatan sesuai ketentuan pengelolaan dana kapitasi. Pendapatan JKN tersebut telah direklas pendapatan Retribusi Pelayana Kesehatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Pasal 27 ayat (3) yang menyatakan seluruh pendapatan BLUD disajikan sebagai Retribusi Jasa Umum - Pelayanan Kesehatan. Pada LO nilai sebesar Rp39.721.810.965,77 merupakan Pendapatan Hibah yang diakui berdasarkan basis akrual dengan rincian sebagai berikut:

a) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan menerima Hibah Bangunan Rumah dari Kementerian senilai Rp21.399.509.664,00;

b) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menerima Hibah berupa Peralatan dan Bangunan dari Kementerian senilai Rp15.362.328.706,77;

c) Dinas Kesehatan terima Hibah alat pendingin (Freeze Free Cold Box FFCB 20L) dari Kementerian Kesehatan senilai Rp3.658.635,00;

d) Dinas Sosial terima Hibah tanah dari Bapak Adnan Sahrir senilai Rp2.700.000.000,00 yang di peruntukan untuk Sekolah Rakyat;

e) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menerima Hibah tanah untuk Balai Penyuluhan Keluarga Berencana senilai Rp256.313.960,00;

b. Beban- LO

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi. Klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban. Beban – LO Tahun Anggaran 2025 adalah senilai Rp807.127.308.813,17 mengalami kenaikan senilai Rp178.995.604.654,04 atau 28,50% dari total Beban Tahun Anggaran 2024 senilai Rp628.131.704.159,13 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 7. 152
Rincian Beban

Dalam Rupiah

No	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Beban Operasi	770.317.789.013,17	590.769.255.859,13	179.548.533.154,04	30,39
2	Beban Transfer	36.809.519.800,00	37.362.448.300,00	(552.928.500,00)	(1,48)
Jumlah Beban		**807.127.308.813,17**	**628.131.704.159,13**	**178.995.604.654,04**	**28,50**

1. Beban Operasi

Beban Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Beban operasi antara lain meliputi, Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Subsidi, Beban Hibah, dan Beban Bantuan Sosial.

Beban Operasi Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2025 adalah senilai Rp770.317.789.013,17 mengalami kenaikan Rp179.584.533.154,04 atau 30,39% dari Tahun Anggaran 2024 adalah senilai Rp590.769.255.859,13 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 7. 153
Rincian Beban Operasi

Dalam Rupiah

NO	Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan(Penurunan)	
				Rp	%
1	Beban Pegawai	252.975.978.731,00	225.500.671.076,00	27.475.307.655,00	12,18
2	Beban Barang dan Jasa	190.033.097.592,58	202.734.273.172,64	(12.701.175.580,06)	(6,26)
3	Beban Hibah	11.434.402.282,00	40.313.528.000,01	(28.879.125.718,01)	(71,64)
4	Beban Bantuan Sosial	22.000.000,00	18.500.000,00	3.500.000,00	18,92
5	Beban Penyisihan Piutang	1.705.690.436,07	5.685.179.894,90	(3.979.489.458,83)	(70,00)
6	Beban Penyusutan dan Amortisasi	314.146.619.971,52	116.517.103.715,58	697.629.516.255,94	169,61
Jumlah		**770.317.789.013,17**	**590.769.255.859,13**	**179.548.533.154,04**	**30,39**

a) Beban Pegawai

Beban Pegawai adalah pengeluaran anggaran untuk membiayai seluruh gaji, tunjangan dan seluruh pengeluaran-pengeluaran yang berhubungan dengan pegawai yang ada pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah.

Beban Pegawai Tahun Anggaran 2025 adalah senilai Rp252.975.978.731,00 mengalami kenaikan senilai Rp27.475.307.655,00 atau 12,74% dari Tahun Anggaran 2024 adalah senilai Rp225.500.671.076,00 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 7. 154
Rincian Beban Pegawai

Dalam Rupiah

No	Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	178.881.869.908,00	169.720.699.136,00
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	65.744.891.277,00	6.567.825.830,00

No	Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	40.775.046.744,00
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	7.631.654.372,00	7.843.288.208,00
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	207.083.174,00	172.171.158,00
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	510.480.000,00	421.640.000,00
Jumlah		**252.975.978.731,00**	**225.500.671.076,00**

Terdapat perbedaan nilai penyajian antara belanja pegawai pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebesar Rp254.238.055.532,00 dan Laporan Operasional (LO) sebesar Rp252.975.978.731,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp1.262.076.801,00. Perbedaan tersebut disebabkan oleh 2 (dua) faktor yaitu:

1. Iuran jaminan kesehatan

   Terdapat perbedaan nilai penyajian antara Iuran Jaminan Kesehatan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebesar Rp7.912.710.109,00 dan Laporan Operasional (LO) sebesar Rp8.052.549.008,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp139.838.899,00. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh adanya koreksi akrual atas kewajiban pemerintah daerah kepada BPJS Kesehatan pada tahun anggaran berjalan. Berdasarkan asas akrual, kewajiban iuran jaminan kesehatan periode berjalan tersebut disesuaikan melalui jurnal pengakuan Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan di Neraca dan diakui sebagai penambah beban iuran jaminan kesehatan pada LO, meskipun sisa kewajiban tersebut belum dibayarkan secara kas hingga akhir tahun anggaran.
2. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

   Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN terdiri dari Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD, Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD, dan Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD. Terdapat perbedaan nilai penyajian antara Realisasi Belanja Tambahan penghasilan guru pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebesar Rp56.921.693.300,00 dan Beban Tunjangan Guru pada Laporan Operasional (LO) sebesar Rp55.519.777.600,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp1.401.915.700,00. Selisih lebih tinggi pada LRA disebabkan karena adanya realisasi pembayaran atas utang/kewajiban belanja tambahan penghasilan guru dari tahun anggaran sebelumnya yang baru dicairkan kasnya pada tahun anggaran berjalan.

   Secara basis akrual (LO), pengeluaran kas untuk pelunasan utang ini tidak diakui lagi sebagai beban operasional tahun berjalan, melainkan dijurnal sebagai pengurang pos Utang Belanja Pegawai di Neraca. Hal ini dikarenakan hak dan beban atas tunjangan guru tersebut secara substansi telah diakui pada Laporan Operasional tahun lalu ketika kewajiban tersebut timbul.

b) Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025 adalah senilai Rp190.033.097.592,58 mengalami penurunan senilai Rp12.701.175.580,06 atau 6,26% dari Tahun Anggaran 2024 adalah senilai Rp202.734.273.172,64 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 7. 155
Rincian Beban Barang dan Jasa

Dalam Rupiah

No	Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024
1	Beban Barang	35.510.299.221,79	44.560.115.284,77
2	Beban Jasa	74.704.766.284,87	86.087.968.527,91
3	Beban Pemeliharaan	6.582.984.200,00	5.236.347.154,00
4	Beban Perjalanan Dinas	12.709.039.401,00	25.692.786.208,00
5	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.102.939.450,00	1.104.212.650,00
6	Beban Barang dan Jasa BOS	0	17.153.626.015,00
7	Beban Barang dan Jasa BOSP	17.526.414.542,00	0,00
8	Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	5.854.801.070,00	5.879.182.437,00
9	Beban Barang dan Jasa BLUD	36.041.853.422,92	17.020.034.895,96

No	Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024
Jumlah		190.033.097.592,58	202.734.273.172,64

Pada rincian tabel Beban Barang dan Jasa di atas, terbagi menjadi sembilan beban yang terdiri dari Beban Barang, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat, Beban Barang dan Jasa BOS, Beban Barang dan Jasa BOSP, Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas dan Beban Barang dan Jasa BLUD dengan rincian sebagai berikut:

1) Beban Barang
Beban Barang Tahun Anggaran 2025 senilai Rp35.510.299.221,79 mengalami penurunan Rp9.049.816.062,98 atau 20,31% dari Tahun Anggaran 2024 adalah senilai Rp44.560.115.284,77. Beban Barang merupakan beban untuk mencatat pemakaian/konsumsi atas barang-barang yang habis pakai dan barang tak habis pakai.

2) Beban Jasa
Beban Jasa pada Tahun Anggaran 2025 senilai Rp74.704.766.284,87 mengalami penurunan Rp11.383.202.243,04 atau 13,22% dari Tahun Anggaran 2024 adalah senilai Rp86.087.968.527,91. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

Realisasi Belanja Jasa Tahun Anggaran 2025 menurut Laporan Operasional senilai Rp74.704.766.284,87 sedangkan menurut Laporan Realisasi Anggaran senilai Rp75.757.549.306,00. Perbedaan tersebut disebabkan atas pengakuan penambahan utang jasa di Neraca, reklasifikasi aset tetap ke beban jasa, reklasifikasi beban jasa ke aset tetap serta koreksi beban dibayar dimuka Perbedaan tersebut senilai Rp1.052.783.021,13.

3) Beban Pemeliharaan
Beban Pemeliharaan pada Tahun Anggaran 2025 senilai Rp6.582.984.200,00 mengalami kenaikan senilai Rp 1.346.637.046,00 atau 25,72% dari Tahun Anggaran 2024 senilai Rp5.236.347.154,00. Beban Pemeliharaan adalah pengeluaran yang dilakukan untuk menjaga, merawat, dan mempertahankan fungsi serta kondisi aset agar tetap dapat digunakan sebagaimana mestinya tanpa menambah kapasitas, masa manfaat, maupun nilai ekonomis aset tersebut.

Terdapat perbedaan penyajian angka pada pos Beban Pemeliharaan antara Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebesar Rp4.785.059.272,00 dan Laporan Operasional (LO) sebesar Rp6.582.984.200,00 sehingga membentuk selisih rekonsiliasi nilai sebesar Rp1.797.924.928,00. Selisih tersebut di sebabkan karena adanya reklasifikasi dari aset ke beban pemeliharaan senilai Rp2.631.736.328,00. Selain itu, terdapat juga koreksi penganggaran senilai Rp833.811.400,00.

4) Beban Perjalanan Dinas
Beban Perjalanan Dinas pada Tahun Anggaran 2025 senilai Rp12.709.039.401,00 mengalami penurunan senilai Rp12.983.746.807,00 atau 50,53% darin Tahun Anggaran 2024 senilai Rp25.692.786.208,00. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2025 disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 7. 156
Rincian Beban Perjalanan Dinas

Dalam Rupiah

No	Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	8.939.215.351,00	18.665.119.273,00
2	Beban Perjalanan Dinas Tetap	409.386.800,00	747.292.125,00
3	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.103.957.250,00	5.607.549.810,00
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	244.340.000,00	375.635.000,00
5	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	12.140.000,00	297.190.000,00
6	Beban Perjalanan Dinas Biasa–Luar Negeri	0,00	0,00
Jumlah Beban		**12.709.039.401,00**	**25.692.786.208,00**

Nilai Beban Perjalanan Dinas dan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas-LRA menunjukkan angka yang sama senilai Rp12.709.039.401,00.

5) Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Jumlah Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun Anggaran 2025 senilai Rp1.102.939.450,00 mengalami penurunan Rp1.273.200,00 atau 0,12% dari pada Tahun Anggaran 2024 senilai Rp1.104.212.650,00 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 7. 157
Rincian Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Dalam Rupiah

No	Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024
1	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	309.740.000,00	154.700.000,00
2	Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi	116.750.000,00	131.400.000,00
3	Beban Beasiswa	150.000.000,00	513.250.000,00
4	Beban Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	311.000.000,00	46.077.500,00
5	Beban uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	0,00	125.685.000,00
6	Beban Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	215.449.450,00	133.100.150,00
Jumlah Beban		**1.102.939.450,00**	**1.104.212.650,00**

Terdapat perbedaan penyajian angka pada akun Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun antara Laporan Operasional (LO) senilai Rp1.102.939.450,00 dengan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) senilai Rp1.248.957.450,00 atau selisih senilai Rp146.018.000,00. Selisih tersebut disebabkan karena adanya reklasifikasi pada Laporan Operasional, dengan rincian sebagai berikut:

1. Reklasifikasi aset KIB B dan ATB ke menjadi Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat senilai Rp22.500.000; dan
2. Koreksi Kesalahan Penganggaran Pembayaran Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Biaya Ganti Rugi dan Santunan Tanaman Tumbuh serta benda-benda di atasnya pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan senilai Rp168.518.000.

6) Beban Barang dan Jasa BOS/BOSP

Jumlah Beban Barang dan Jasa BOS/BOSP Tahun Anggaran 2025 adalah senilai Rp17.526.414.542,00 mengalami kenaikan senilai Rp372.788.527,00 atau 2,17% dari Tahun Anggaran 2024 senilai Rp17.153.626.015,00 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 7. 158
Rincian Beban Barang dan Jasa BOS/BOSP

Dalam Rupiah

No	Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024
1	Beban Barang dan Jasa BOS/BOSP	17.526.414.542,00	17.153.626.015,00
Jumlah		**17.526.414.542,00**	**17.153.626.015,00**

Terdapat perbedaan penyajian angka pada akun Barang dan Jasa Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) antara Laporan Operasional (LO) senilai Rp17.526.414.542,00 dengan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebesar senilai Rp16.350.479.242,00 sehingga membentuk selisih senilai Rp1.175.935.300,00. Selisih tersebut disebabkan karena adanya reklasifikasi pada Laporan Operasional, dengan rincian sebagai berikut:

1. Reklasifikasi aset KIB B dan KIB E menjadi Beban Barang dan Jasa BOSP senilai Rp1.197.490.300, dan
2. Reklasifikasi Beban Barang dan Jasa BOSP menjadi Aset Tetap KIB B senilai Rp21.555.000.

7) Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas

Jumlah Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas pada Tahun Anggaran 2025 adalah senilai Rp5.854.801.070,00 mengalami penurunan senilai Rp24.381.367,00 atau 0,41% dari Tahun Anggaran 2024 senilai Rp5.879.182.437,00, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 7. 159
Rincian Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas

Dalam Rupiah

No	Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024
1	Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	5.854.801.070,00	5.879.182.437,00

No	Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024
Jumlah		5.854.801.070,00	5.879.182.437,00

Nilai Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas menunjukkan angka yang sama senilai Rp5.854.801.070,00.

8) Beban Barang dan Jasa BLUD

Jumlah Beban Barang dan Jasa BLUD pada Tahun Anggaran 2025 adalah senilai Rp36.041.853.422,92 mengalami kenaikan senilai Rp19.021.818.526,96 atau 111,76% dari Tahun Anggaran 2024 senilai Rp17.020.034.895,96 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 7. 160
Rincian Beban Barang dan Jasa BLUD

Dalam Rupiah

No	Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024
1	Beban Barang dan Jasa BLUD	36.041.853.422,92	17.020.034.895,96
Jumlah		36.041.853.422,92	17.020.034.895,96

Terdapat perbedaan penyajian angka pada pos Barang dan Jasa BLUD antara Laporan Realisasi Anggaran (LRA) LO senilai Rp36.041.853.422,92 dan LRA senilai Rp34.658.592.594,46, sehingga membentuk selisih rekonsiliasi nilai senilai Rp1.382.927480,46828,46. Selisih tersebut terjadi karena adanya perbedaan basis akuntansi (kas vs akrual), pengakuan utang-piutang belanja, serta koreksi internal akuntansi BLUD (RSUD) dengan rincian penjelasan sebagai berikut:

1. Pengurangan utang RSUD tahun 2024 senilai Rp702.571.207,00 yang dibayarkan tahun anggaran 2025;
2. Penambahan utang baru RSUD tahun anggaran 2025 senilai Rp745.247.345,00;
3. Reklasifikasi beban barang dan jasa BLUD ke Beban Obat-obatan senilai Rp1.780.956.502,41; dan
4. Koreksi lebih catat Persediaan yang seharusnya sudah menjadi Beban Barang dan Jasa BLUD senilai Rp3.121.207.844,87.

c) Beban Hibah

Beban Hibah adalah kewajiban atau pengeluaran pemerintah dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa kepada pihak lain yang bersifat tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus.

Beban Hibah Tahun Anggaran 2025 adalah senilai Rp11.434.402.282,00 mengalami penurunan senilai Rp28.879.125.718,01 atau 71,64% dari Tahun Anggaran 2024 adalah senilai Rp40.313.528.000,01 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 7. 161
Rincian Beban Hibah

Dalam Rupiah

No	Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024
1	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	0,00	250.000.000,00
2	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	2.636.889,01
3	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	5.505.641.682,00	34.769.819.111,00
4	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	373.070.000,00	308.495.000,00
5	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	274.470.600,00	346.977.000,00
6	Beban Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	2.239.420.000,00	2.235.900.000,00
7	Beban Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	3.041.800.000,00	2.399.700.000,00
Jumlah Beban		11.434.402.282,00	40.313.528.000,01

Terdapat perbedaan antara Beban Hibah senilai Rp11.434.402.282,00 dengan Belanja Hibah pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebesar senilai Rp11.772.269.132,00 atau selisih senilai Rp.337.366.850,00. Hal tersebut dikarenakan terdapat penyesuaian tahun 2025 sebagai pengurang dari Beban Hibah meliputi jurnal realisasi pembayaran utang Dinas Pendidikan serta koreksi atas kurang catat belanja hibah uang pada PKBM SIRUMUNG disebabkan karena terdapat pembayaran utang Hibah Tahun Anggaran 2024 yang dibayarkan pada Tahun Anggaran 2025. Pada LRA, pembayaran tersebut diakui sebagai realisasi belanja tahun berjalan karena terjadi pengeluaran kas dari RKUD, sedangkan pada LO tidak diakui sebagai beban tahun berjalan karena bebannya telah diakui pada Tahun Anggaran 2024 pada saat kewajiban timbul. Dengan demikian, terdapat selisih sebesar Rp337.866.850,00 antara LO dan LRA.

d) Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial untuk Tahun Anggaran 2025 adalah senilai Rp22.000.000,00 atau mengalami kenaikan senilai Rp3.500.000,00 atau 18,92% dari Tahun Anggaran 2024 senilai Rp18.500.000,00. Rincian beban bantuan sosial dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 7. 162
Rincian Beban Bantuan Sosial

Dalam Rupiah

No	Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024
1	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu	22.000.000,00	6.000.000,00
2	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat	0,00	12.500.000,00
Jumlah		**22.000.000,00**	**18.500.000,00**

e) Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang untuk Tahun Anggaran 2025 adalah senilai Rp1.705.690.436,07 mengalami penurunan senilai Rp3.979.489.458,83 atau 70,00% dari Tahun Anggaran 2024 senilai Rp5.685.179.894,90 . Beban penyisihan ini merupakan penambahan Penyisihan Piutang Pajak PBB-P2 dan penyisihan pokok dan denda Piutang Retribusi pemakaian kekayaan daerah (penyisihan piutang air bersih). Piutang yang lainnya tidak dilakukannya penyisihan piutang karena kurang dari satu tahun berdasarkan Kebijakan Akuntansi. Rincian beban penyisihan piutang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 7. 163
Rincian Beban Penyisihan Piutang

Dalam Rupiah

No	Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	1.705.690.436,07	5.685.179.894,90
Jumlah		**1.705.690.436,07**	**5.685.179.894,90**

f) Beban Penyusutan dan Amortisasi

Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah telah menetapkan Kebijakan Akuntansi dengan masa manfaat yang diatur dalam Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi yang berlaku untuk keseluruhan aset tetap sejak aset tetap diperoleh. Selain tanah, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*) berdasarkan tahun perolehan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.

Pada Tahun Anggaran 2025, Beban Penyusutan dan Amortisasi mengalami lonjakan yang sangat signifikan sebesar Rp197.629.516.255,94 atau meningkat sebesar 169,61% dibandingkan dengan tahun anggaran 2024. Nilai beban yang pada tahun anggaran 2024 tercatat sebesar Rp116.517.103.715,58 meningkat menjadi Rp314.146.619.971,52 pada tahun anggaran 2025 dengan tabel rincian sebagai berikut:

Tabel 7. 164
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

Dalam Rupiah

No	Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	53.728.501.668,78	33.223.781.126,41
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	33.125.135.890,46	29.113.968.332,17
3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	226.661.694.338,82	53.363.490.108,00
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	394.895.769,57	323.134.851,00
5	Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	236.392.303,89	492.729.298,00
Jumlah		**314.146.619.971,52**	**116.517.103.715,58**

Kenaikan yang berlipat ganda ini bukan disebabkan oleh penambahan volume aset secara masif, melainkan merupakan dampak langsung dari penerapan kebijakan akuntansi yang baru secara efektif per 1 Januari 2025. Terjadinya lonjakan ini dipicu oleh 2 (dua) faktor kebijakan utama sebagai berikut:

1. Penyesuaian dan Perubahan Masa Manfaat Aset
   Berdasarkan kebijakan baru, dilakukan peninjauan kembali terhadap estimasi masa manfaat untuk kelompok aset tetap dan aset takberwujud tertentu. Konsekuensi logis dari diperpendeknya masa manfaat ini adalah nilai sisa buku aset harus dialokasikan ke dalam porsi tahunan yang jauh lebih besar, sehingga mendongkrak nilai beban penyusutan dan amortisasi secara agre pada Tahun Aanggaran 2025.
2. Perubahan Basis Perhitungan Beban (Dari Bulanan Menjadi Tahunan Full)
   Kebijakan lama, perhitungan beban dihitung secara proporsional berdasarkan jumlah bulan (monthly basis) sejak aset tersebut mulai digunakan atau diperoleh sedangkan kebijakan baru, perhitungan beban beralih menggunakan basis tahunan penuh (full-year basis). Dengan kebijakan baru ini, aset-aset yang baru diperoleh maupun aset yang siap digunakan di pertengahan atau akhir tahun anggaran langsung dikenakan beban penyusutan/amortisasi untuk satu tahun penuh (12 bulan), tanpa diproporsikan lagi berdasarkan sisa bulan berjalan. Perubahan cut-off perhitungan ini secara akumulatif menghasilkan pengakuan beban yang jauh lebih besar pada Laporan Operasional tahun ini.

2. Beban Transfer

Beban Transfer untuk Tahun Anggaran 2025 adalah senilai Rp36.809.519.800,00 mengalami penurunan senilai Rp552.928.500,00 atau 1,48% dari Tahun Anggaran 2024 senilai Rp37.362.448.300,00 dengan tabel rincian sebagai berikut:

Tabel 7. 165
Rincian Beban Transfer

Dalam Rupiah

No	Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan/Penurunan	
				Rp	%
1	Beban Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	105.000.000,00	0,00	105.000.000,00	100,00
2	Beban Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa	36.704.519.800,00	36.927.448.300,00	(222.928.500,00)	(0,60)
3	Beban Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	0,00	435.000.000,00	(435.000.000,00)	(100,00)
	Jumlah	**36.809.519.800,00**	**37.362.448.300,0**	**(552.928.500,00)**	**(1,48)**

Terdapat perbedaan penyajian antara Laporan Operasional (LO) dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada akun Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa. Dalam LO, beban transfer yang diakui hanya senilai Rp36.809.519.800,00, sementara pada LRA, realisasi

Belanja Bantuan Keuangan Desa tercatat senilai Rp84.790.265.420,00, sehingga membentuk selisih rekonsiliasi senilai Rp47.980.745.620,00. Selisih tersebut merupakan penyaluran Dana Desa yang bersumber dari APBN. Berdasarkan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Nomor 21, Dana Desa memenuhi kriteria sebagai dana pass-through (dana perantara) karena pemerintah daerah hanya bertindak sebagai penyalur, bukan pemilik manfaat penuh atas dana tersebut sehingga tidak dapat mengakuinya sebagai beban operasional.

c. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional pada Tahun Anggaran 2025 senilai Rp0,00 dan pada Tahun Anggaran 2024 senilai Rp0,01 mengalami penurunan senilai Rp0,01 atau 100%.

d. Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa merupakan rekening yang menampung peristiwa atau kejadian Luar Biasa Tahun 2025 yang mempunyai karakteristik kejadiannya tidak normal dan jarang terjadi serta di luar kendali entitas Pemerintah Daerah.

1. Pendapatan Luar Biasa		
Pendapatan	Rp	0,00
Pendapatan	Rp	0,00+
Pendapatan Luar Biasa	Rp	0,00
2. Beban Luar Biasa		
Beban	Rp	0,00
Beban Tak Terduga	Rp696.208.433,00 +	
Beban Luar Biasa	Rp696.208.433,00	
Surplus/(Defisit) Pos Luar Biasa	(Rp696.208.433,00)	

Nilai Beban Luar Biasa dan Belanja Tak Terduga menunjukkan angka yang sama senilai Rp696.208.433,00.

e. Surplus/(Defisit)- LO

Surplus/(Defisit)-LO mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2024. Pada Tahun 2025 tercatat defisit sebesar Rp170.179.311.637,92 sedangkan pada Tahun 2024 tercatat surplus sebesar Rp2.517.534.643,08, sehingga terjadi penurunan sebesar Rp172.696.846.281,00 atau sebesar 6.859,76%. *Defisit* tersebut disebabkan oleh faktor peningkatan beban yang signifikan terutama pada Beban Penyusutan dan Amortisasi. Di sisi lain, pertumbuhan pendapatan relatif rendah serta adanya penurunan pendapatan transfer.

7.5.5. Laporan Arus Kas

Arus Kas (*cash flow statement*) dapat memberikan manfaat untuk menguji keakuratan perencanaan kas sekaligus menjadi indikator untuk mengestimasi arus kas di masa yang akan datang. dengan menyajikan informasi mengenai sumber penggunaan. perubahan kas dan setara kas dengan mengklasifikasi aktivitas dan tempat aktivitas diantaranya aktivitas operasi. aset non keuangan. pembiayaan. dan non-anggaran. Dari masing-masing aktivitas ini akan dihitung kas masuk dan kas keluar sehingga diperoleh kas bersih dari masing-masing aktivitas. Berikut ini deskripsi dari akun-akun yang disajikan pada Laporan Arus Kas:

a. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas dari Aktivitas Operasi menjelaskan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Kas untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi selama Tahun 2025 adalah senilai Rp106.049.204.032,27 atau mengalami penurunan senilai Rp5.347.677.608,06 atau 4,80% dibandingkan dengan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi selama Tahun 2024 senilai Rp111.396.881.640,33 dengan tabel rincian sebagai berikut:

Tabel 7. 166
Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi TA 2025 dan 2024

Dalam Rupiah

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
ARUS MASUK KAS AKTIVITAS OPERASI	**644.359.943.993,73**	**669.720.851.424,24**
Penerimaan Pajak Daerah	26.153.179.463,00	12.064.921.118,00
Penerimaan Retribusi Daerah	39.359.684.325,00	14.041.286.339,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.162.498.116,00	729.061.014,00
Penerimaan Lain - lain PAD yang sah	5.595.815.144,73	25.007.704.283,24
Penerimaan Dana Bagi Hasil	7.575.226.600,00	12.479.058.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	368.877.743.984,00	369.183.892.749,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus – Fisik	32.134.009.341,00	82.048.913.591,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	88.272.478.359,00	68.598.180.789,00
Penerimaan Dana Desa	47.980.745.620,00	51.461.215.000,00
Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi	18.963.115.442,00	26.414.089.638,00
Penerimaan dari Pendapatan Lainnya	8.285.447.599,00	7.692.528.903,00
ARUS KELUAR KAS AKTIVITAS OPERASI	**538.310.739.961,46**	**558.323.969.783,91**
Pembayaran Pegawai	254.238.055.532,00	224.098.755.376,00
Pembayaran Barang dan Jasa	186.791.941.444,46	203.336.294.992,91
Pembayaran Belanja Hibah	11.772.269.132,00	41.571.650.615,00
Pembayaran Belanja Bantuan Sosial	22.000.000,00	18.500.000,00
Pembayaran Tak Terduga	696.208.433,00	475.105.500,00
Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	105.000.000,00	0,00
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Desa	84.685.265.420,00	88.823.663.300,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	**106.049.204.032,27**	**111.396.881.640,33**

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi di dalamnya termasuk juga Belanja Barang dan Jasa dari semua sekolah yang bersumber dari Belanja Dana BOS yang dinaungi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Belanja Barang Jasa yang bersumber dari Belanja BLUD pada RSUD dan 11 Puskesmas yang dinaungi oleh Dinas Kesehatan.

b. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan selama Tahun 2025 adalah senilai (Rp87.477.739.410,00) atau mengalami kenaikan senilai Rp51.426.512.808,00 atau 37,02% dibandingkan dengan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi selama Tahun 2024 senilai (Rp138.904.252.218,00) dengan tabel rincian sebagai berikut:

Tabel 7. 167
Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan Tahun Anggaran 2025 dan 2024

Dalam Rupiah

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
ARUS KAS MASUK AKTIVITAS INVESTASI	**819.410.000,00**	**230.337.498,00**
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	819.410.000,00	230.337.498,00
ARUS KELUAR KAS AKTIFITAS INVESTASI	**88.297.149.410,00**	**139.134.589.716,00**
Perolehan Tanah	6.364.747.767,00	2.055.173.000,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	15.372.942.512,00	35.957.625.906,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	39.872.038.119,00	41.278.328.853,00
Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	19.849.155.028,00	57.979.234.714,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	1.509.889.157,00	1.267.128.002,00
Perolehan Aset Lainnya	1.328.376.827,00	597.099.241,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	4.000.000.000,00	0,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi	**(87.477.739.410,00)**	**(138.904.252.218,00)**

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi di dalamnya termasuk juga aset dari semua sekolah yang bersumber dari Belanja Dana BOS yang dinaungi oleh Dinas Pendidikan dan aset yang bersumber dari

Belanja yang bersumber dari Belanja BLUD pada RSUD dan 11 Puskesmas yang dinaungi oleh Dinas Kesehatan.

c. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan selama Tahun 2025 adalah senilai Rp0,00 dan penurunan 0,00% dibandingkan dengan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan selama Tahun 2024 senilai Rp0,00. dengan tabel rincian sebagai berikut:

Tabel 7. 168
Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Tahun Anggaran 2025 dan 2024

Dalam Rupiah

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
ARUS KAS MASUK AKTIVITAS PENDANAAN	**0,00**	**0,00**
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
ARUS KAS KELUAR AKTIVITAS PENDANAAN	**0,00**	**0,00**
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	0,00
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan	**0,00**	**0,00**

d. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran

Arus Kas Bersih dari Aktivitas *Transitoris/Non* Anggaran selama Tahun 2025 adalah senilai (Rp144.550.923,00) mengalami penurunan senilai Rp353.757.342,00 atau 169,09% dibandingkan dengan Tahun 2024 senilai Rp209.206.419,00 dengan tabel rincian sebagai berikut:

Tabel 7. 169
Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran Tahun Anggaran 2025 dan 2024

.Dalam Rupiah

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
ARUS KAS MASUK AKTIVITAS TRANSITORIS	**34.283.909.779,55**	**36.389.712.744,93**
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	34.283.909.779,55	36.389.712.744,93
Penerimaan Kembali Uang Persediaan dari Bend. Pengeluaran	0,00	0,00
Kiriman Uang Masuk	0,00	0,00
ARUS KAS KELUAR AKTIVITAS TRANSITORIS	**34.428.460.702,55**	**0,00**
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	34.428.460.702,55	36.180.506.325,93
Pemberian Kembali Uang Persediaan dari Bend. Pengeluaran	0,00	0,00
Kiriman Uang Keluar	0,00	0,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris	**(144.550.923,00)**	**209.206.419,00**

Arus Kas Masuk dari Aktivitas *Transitoris/Non* Anggaran terdiri dari penerimaan PFK Tahun 2025 senilai Rp34.283.909.779,55 sedangkan Arus Kas Keluar senilai Rp34.428.460.702,55 sehingga Arus Kas Bersih dari Aktivitas *Transitoris/Non* Anggaran Tahun 2025 adalah senilai (Rp144.550.923,00).

e. Saldo Akhir Kas

Saldo Akhir Kas merupakan saldo kas milik Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah per 31 Desember 2025 senilai Rp32.510.502.992,70 dengan rincian seperti terlihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 7. 170
Rincian Saldo Akhir Kas

Dalam Rupiah

No	Uraian	Saldo Akhir 2025
1	Kas di Kas Daerah	26.323.060.548,26
2	Kas di Bendahara Penerimaan	77.740.250,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	31.237.659,00
4	Kas di BLUD	5.210.389.594,40
5	Kas Lainnya	66.421.912,00
6	Kas Dana BOSP	33.980.124,04
7	Kas Dana BOK Puskesmas	767.672.905,00
Saldo Kas Akhir		**32.510.502.992,70**

7.5.6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun berkenaan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Ekuitas untuk periode yang berakhir Desember 2025 adalah sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal menggambarkan Ekuitas Neraca *Audited* per 31 Desember 2024 yang menjadi Ekuitas Awal Tahun 2025. Jumlah Ekuitas Awal Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah senilai Rp1.370.861.712.546,60.

b. *Surplus/Defisit* – LO

Surplus/Defisit LO selama satu Tahun Anggaran 2025 adalah senilai (Rp170.179.311.637,92) dibandingkan Tahun Anggaran 2024 adalah senilai Rp2.517.534.643,08 mengalami penurunan senilai Rp172.696.846.281,00. Jumlah ini berasal dari total pendapatan dikurangi dengan total beban selama satu Tahun Anggaran 2025. Rincian dari jumlah *surplus/defisit* LO dapat dilihat pada penjelasan Laporan Operasional.

c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar merupakan transaksi atau kejadian yang mempunyai pengaruh pada akun Ekuitas akibat transaksi masa lalu. Dampak kumulatif yang terjadi dalam Tahun Anggaran 2025 adalah senilai (Rp10.846.598.354,59) yang merupakan koreksi atas penambahan/pengurangan Ekuitas selama Tahun 2025 dapat dilihat pada rincian koreksi Ekuitas sebagai berikut:

Tabel 7. 171
Rincian Koreksi Ekuitas

Dalam Rupiah

No	Keterangan	2025	2024
1	Koreksi Ekuitas-Aset Lancar	(2.354.308.380,69)	6.141.200,00
2	Koreksi Ekuitas-Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00
3	Koreksi Ekuitas-Aset Tetap	(8.242.405.836,60)	(2.068.209.491,69)
4	Koreksi Ekuitas-Dana Cadangan	0,00	0,00
5	Koreksi Ekuitas-Aset Lainnya	(142.076.437,30)	59.399.999,99
6	Koreksi Ekuitas-Properti Investasi	0,00	0,00
7	Koreksi Ekuitas-Kewajiban Jangka Pendek	(107.807.700,00)	0,00
8	Koreksi Ekuitas-Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
JUMLAH		**(10.846.598.354,59)**	**(2.002.668.291,70)**

d. Ekuitas Akhir

Posisi Ekuitas Akhir per 31 Desember 2025 Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah adalah senilai Rp1.189.835.802.554,09. Jumlah ini berasal dari Ekuitas Awal senilai Rp1.370.861.712.546,60, ditambah dengan posisi *Surplus/Defisit* LO senilai (Rp170.179.311.637,92) dan penyesuaian yang terdapat dalam pos Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar adalah Koreksi Ekuitas senilai (Rp10.846.598.354,59).

7.6. Penutup

Laporan Keuangan ini merupakan rangkaian informasi terkini atas kondisi *riil* aspek keuangan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2025 yang penyusunannya didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Selain standar akuntansi akrual, pengelolaan anggaran daerah saat ini juga mempedomani Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 terkait klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Sebagai penutup penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2025 disampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dipengaruhi oleh Ekonomi Makro yang terdiri dari Laju Pertumbuhan Ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Inflasi. Sedangkan dalam pelaksanaan pembangunan juga dipengaruhi oleh Data Penduduk, Ketenagakerjaan, Kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia.
2. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah disajikan untuk menggambarkan kecukupan penerimaan periode berjalan dalam membiayai seluruh pengeluaran. Memperlihatkan kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasi dengan anggaran yang ditetapkan dengan peraturan perUndang-Undangan. Menyajikan jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pelaporan serta hasil-hasil yang dicapai. menunjukkan bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kebutuhan kasnya. Menjabarkan posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman serta membandingkan perubahan posisi keuangan entitas pelaporan. Apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
3. Secara keseluruhan pencapaian target penerimaan periode Tahun 2025 mengalami peningkatan dibandingkan dengan pencapaian Tahun 2024 dan untuk Realisasi belanja Tahun 2025 juga mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi belanja di Tahun 2024.

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025 ini diharapkan dapat memenuhu kewajiban Akuntanbilitas Pemerintah Kabupaten Mamuju tengah dalam penyampaian laporan keuangan. Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah telah mencoba memenuhi komitmen moral bahwa perbaikan kinerja yang telah dicapai akan menjadi pondasi yang proposional dalam penyelenggarann pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Mamuju Tengah dimasa yang akan datang serta sejalan dengan percepatan perubahan lingkungan strategis yang luar biasa. Berbagai perestasi dan kekurangan hasil kebijakan yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025 sesuai dengan kondisi obyektif dan tidak menutup kemungkinan akan menjadi umpan balik terhadap penetapan kebijakan umum pada periode berikutnya.

Laporan keuangan ini merupakan bentuk upaya dari Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan Laporan Keuangan belum sepenuhnya menyajikan informasi secara lengkap dan rinci seperti yang diharapkan. Di samping itu, keterbatasan sumber daya manusia yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan ini mengakibatkan penyajian laporan keuangan ini tidak terlepas dari kelemahan-kelemahan. Untuk itu kami mengharapkan masukan-masukan dari semua pihak demi kesempurnaan laporan ini. Sehingga manfaat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dapat kami wujudkan dengan baik.

Bupati Mamuju Tengah

H. ARSAL ARAS

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah
Nomor :
Tanggal : 2026

PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH
DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	SKPD	JENIS PIUTANG	SALDO AWAL PIUTANG	PENAMBAHAN PIUTANG	PENGURANGAN PIUTANG	SALDO AKHIR PIUTANG
1	2	3	4	5	6	7 = 4+5+6
1	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Piutang Pajak Daerah	22.259.634.950,00	1.947.940.921,00	(8.048.790.787,00)	16.158.785.084,00
		Piutang Retribusi Daerah	0,00	1.205.355.500,00	(1.392.555.500,00)	(187.200.000,00)
		Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0,00	7.091.458.748,00	0,00	7.091.458.748,00
		Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	2.441.353.196,00	0,00	2.441.353.196,00
2	DINAS KESEHATAN	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	38.681.900,00	600,00	(38.681.900,00)	600,00
		Piutang Retribusi Daerah	584.625.695,00	0,00	(584.625.695,00)	0,00
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Piutang Retribusi Daerah	830.141.250,00	1.392.555.500,00	(830.141.250,00)	1.392.555.500,00
		Piutang Lain-lain PAD yang Sah	62.635.488,00	70.349,00	(62.635.488,00)	70.349,00
4	PUSKESMAS BABANA	Piutang Retribusi Daerah	0,00	39.286.600,00	(38.726.600,00)	560.000,00
		Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0,00	3.876.400,00	(3.876.400,00)	0,00
5	PUSKESMAS BATUPARIGI	Piutang Retribusi Daerah	0,00	27.207.700,00	(16.378.150,00)	10.829.550,00
6	PUSKESMAS DURIKUMBA	Piutang Retribusi Daerah	0,00	40.589.800,00	(38.274.800,00)	2.315.000,00
		Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0,00	4.528.400,00	(4.528.400,00)	0,00
7	PUSKESMAS LARA	Piutang Retribusi Daerah	0,00	60.615.000,00	(59.025.000,00)	1.590.000,00
		Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0,00	4.286.300,00	(4.286.300,00)	0,00
8	PUSKESMAS PANGALE	Piutang Retribusi Daerah	0,00	106.532.820,00	(106.532.820,00)	0,00
9	PUSKESMAS POLO CAMBA	Piutang Retribusi Daerah	0,00	33.393.300,00	(12.025.925,00)	21.367.375,00
		Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0,00	4.726.300,00	(4.726.300,00)	0,00
10	PUSKESMAS SALUADAK	Piutang Retribusi Daerah	0,00	17.244.150,00	(15.135.150,00)	2.109.000,00
		Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0,00	1.744.200,00	(1.744.200,00)	0,00
11	PUSKESMAS SALUGATTA	Piutang Retribusi Daerah	0,00	103.809.550,00	(98.034.550,00)	5.775.000,00
		Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0,00	10.121.300,00	(10.121.300,00)	0,00
12	PUSKESMAS SALUPANGKANG	Piutang Retribusi Daerah	0,00	30.537.750,00	(28.407.750,00)	2.130.000,00
		Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0,00	4.152.400,00	(4.152.400,00)	0,00
13	PUSKESMAS TOBADAK	Piutang Retribusi Daerah	0,00	163.043.850,00	(100.409.550,00)	62.634.300,00
		Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0,00	1.842.200,00	(1.842.200,00)	0,00
14	PUSKESMAS TOPOYO	Piutang Retribusi Daerah	0,00	73.854.400,00	(71.675.400,00)	2.179.000,00
		Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0,00	3.404.400,00	(3.404.400,00)	0,00
15	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	Piutang Retribusi Daerah	0,00	1.689.737.957,00	0,00	1.689.737.957,00
		Piutang Lain-lain PAD yang Sah	3.450.752.907,00	0,00	(3.450.752.907,00)	0,00

MAMUJU TENGAH, 2026
BUPATI KAB. MAMUJU TENGAH

H. ARSAL ARAS

Lampiran IX : Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah

Nomor :

Tanggal : 2026

PEMERINTAHAN KAB. MAMUJU TENGAH

DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH

TAHUN ANGGARAN 2025

NO	JENIS PIUTANG	JUMLAH PIUTANG	JUMLAH PENYISIHAN	JUMLAH PIUTANG BERSIH
1	Piutang PBBP2	15.538.412.885,00	-12.755.147.668,21	2.783.265.216,79
2	Piutang PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	620.372.199,00	0,00	620.372.199,00
3	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	111.489.225,00	0,00	111.489.225,00
4	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	1.689.737.957,00	0,00	1.689.737.957,00
5	Piutang Retribusi Pemakaian Alat	1.205.355.500,00	-257.120.253,75	948.235.246,25
6	Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	0,00	0,00
7	Piutang Pendapatan Denda (PBBP2)-Pajak Bumi dan Bangunan,Pedesaan dan Perkotaan	6.904.258.748,00	-6.904.258.748,00	0,00
8	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Alat	187.200.000,00	-169.629.500,00	17.570.500,00
9	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	70.949,00	0,00	70.949,00
10	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan ke Rumah	0,00	0,00	0,00
11	Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	0,00	0,00	0,00
12	Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	73.355.286,00	0,00	73.355.286,00
13	Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	2.360.222.856,00	0,00	2.360.222.856,00
14	Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	7.775.054,00	0,00	7.775.054,00
15	Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	73.355.286,00	0,00	73.355.286,00
TOTAL		**28.771.605.945,00**	**-20.086.156.169,96**	**8.685.449.775,04**

MAMUJU TENGAH, 2026

BUPATI KAB. MAMUJU TENGAH

H. ARSAL ARAS

Lampiran X : Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah
Nomor :
Tanggal : 2026

PEMERINTAHAN KAB. MAMUJU TENGAH
DAFTAR REKAPITULASI DANA BERGULIR DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	SKPD	JUMLAH DANA BERGULIR	JUMLAH PENYISIHAN DANA BERGULIR	JUMLAH PIUTANG BERSIH
Tidak ada data.				

MAMUJU TENGAH, 2026
BUPATI KAB. MAMUJU TENGAH

H. ARSAL ARAS

Lampiran XI : Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah

Nomor :

Tanggal : 2026

PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/ Lembaga Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	Bentuk Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	Jumlah Modal yang telah disertakan sampai tahun anggaran lalu	Penyertaan Modal Tahun ini	Jumlah Modal yang telah disertakan sampai dengan tahun ini	Sisa modal yang belum disertakan	Hasil Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Tahun ini	Jumlah Modal (Investasi) yang akan diterima kembali tahun ini	Jumlah Sisa Modal (Investasi) yang disertakan sampai dengan tahun ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7 + 8	10 = 6 - 9	11	12	13 = 9 - 12
1	2025	BANK SULSELBAR	PERDA	SAHAM	10.000.000.000,00	6.000.000.000,00	4.000.000	10.000.000.000,00	0,00	1.162.498.116,00	0,00	10.000.000.000,00

MAMUJU TENGAH, 2026
BUPATI KAB. MAMUJU TENGAH

H. ARSAL ARAS

Lampiran XII : Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah
Nomor :
Tanggal : 2026

PEMERINTAHAN KAB. MAMUJU TENGAH
DAFTAR REKAPITULASI REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	SKPD	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	344.547.953.322,22	31.011.550.971,77	8.849.297.424,63	366.710.206.869,36
2	DINAS KESEHATAN	258.504.321.994,30	24.697.778.514,00	219.528.547.455,94	63.673.553.052,36
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	92.932.932.116,63	2.810.413.540,00	4.985.587.752,33	90.757.757.904,30
4	PUSKESMAS PANGALE	0,00	23.715.847.951,13	244.287.664,28	23.471.560.286,85
5	PUSKESMAS POLO CAMBA	0,00	10.163.723.444,88	160.316.948,08	10.003.406.496,80
6	PUSKESMAS SALUGATTA	0,00	23.749.405.695,30	282.971.981,10	23.466.433.714,20
7	PUSKESMAS BABANA	0,00	25.240.487.022,15	176.513.002,53	25.063.974.019,62
8	PUSKESMAS TOBADAK	0,00	27.945.939.903,13	237.324.785,61	27.708.615.117,52
9	PUSKESMAS SALUADAK	0,00	8.605.571.897,62	232.333.090,42	8.373.238.807,20
10	PUSKESMAS BATUPARIGI	0,00	12.522.241.289,96	40.850.373,95	12.481.390.916,01
11	PUSKESMAS TOPOYO	0,00	27.797.738.896,53	456.396.094,55	27.341.342.801,98
12	PUSKESMAS SALUPANGKANG	0,00	21.155.416.241,79	295.774.559,75	20.859.641.682,04
13	PUSKESMAS LARA	0,00	16.561.774.976,35	366.577.374,34	16.195.197.602,01
14	PUSKESMAS DURIKUMBA	0,00	21.603.001.305,80	246.303.993,66	21.356.697.312,14
15	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.181.714.599.751,75	21.489.780.054,00	12.078.854.077,27	1.191.125.525.728,48
16	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	16.199.186.709,00	27.519.006.634,00	253.629.280,00	43.464.564.063,00
17	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	3.677.996.860,00	13.500.000,00	13.945.000,00	3.677.551.860,00
18	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	20.484.380.534,00	756.062.875,00	722.469.370,00	20.517.974.039,00
19	DINAS SOSIAL	554.196.313,00	2.730.000.000,00	700.000,00	3.283.496.313,00
20	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	6.048.527.852,00	99.012.000,00	118.662.000,00	6.028.877.852,00
21	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	12.564.714.933,00	262.898.460,00	15.659.760,00	12.811.953.633,00
22	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	9.603.339.462,00	147.090.000,00	85.478.817,00	9.664.950.645,00
23	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	9.807.854.327,00	3.653.063.920,00	921.756.715,00	12.539.161.532,00
24	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1.983.412.227,99	37.182.000,00	42.812.000,00	1.977.782.227,99
25	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	722.464.197,00	20.525.129,00	14.000.000,00	728.989.326,00
26	DINAS PERHUBUNGAN	6.143.622.560,00	139.473.001,00	174.009.500,00	6.109.086.061,00
27	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN	1.743.170.000,00	689.271.450,00	132.102.000,00	2.300.339.450,00
28	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	30.118.272.815,73	516.382.500,00	39.293.000,00	30.595.362.315,73
29	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.739.111.814,00	82.690.000,00	34.300.000,00	2.787.501.814,00
30	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	7.088.563.569,00	11.930.890.552,00	11.777.878.985,00	7.241.575.136,00
31	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	2.204.982.464,20	9.902.988.387,51	187.047.774,90	11.920.923.076,81
32	DINAS PERIKANAN	4.182.366.000,00	82.459.000,00	6.240.000,00	4.258.585.000,00
33	SEKRETARIAT DAERAH	65.252.643.381,02	1.038.152.000,00	3.260.630.247,74	63.030.165.133,28
34	BAGIAN PEMERINTAHAN	549.994.264,00	0,00	0,00	549.994.264,00
35	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	13.103.200,00	16.750.000,00	0,00	29.853.200,00
36	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	198.000.000,00	0,00	0,00	198.000.000,00
37	BAGIAN UMUM	689.374.867,00	2.544.631.650,00	0,00	3.234.006.517,00
38	BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	14.570.000,00	0,00	0,00	14.570.000,00
39	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	28.217.000,00	0,00	0,00	28.217.000,00
40	SEKRETARIAT DPRD	10.469.355.323,34	1.681.903.001,00	99.865.000,00	12.051.393.324,34
41	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	2.852.084.808,00	61.785.000,00	13.294.480,00	2.900.575.328,00
42	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	6.490.811.895,27	98.965.958.559,89	98.790.461.706,88	6.666.308.748,28
43	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.028.643.438,00	24.446.250,00	1.050.000,00	1.052.039.688,00
44	INSPEKTORAT	898.804.865,02	2.883.419.320,00	2.287.288.725,00	1.494.935.460,02
45	KECAMATAN TOPOYO	1.177.645.850,00	274.153.500,00	65.500.000,00	1.386.299.350,00
46	KECAMATAN PANGALE	1.526.062.214,00	7.500.000,00	13.900.000,00	1.519.662.214,00
47	KECAMATAN TOBADAK	5.286.103.675,00	10.000.000,00	54.407.800,00	5.241.695.875,00
48	KECAMATAN KAROSSA	1.476.920.163,00	0,00	58.550.000,00	1.418.370.163,00
49	KECAMATAN BUDONG-BUDONG	1.934.579.811,00	9.000.000,00	10.800.000,00	1.932.779.811,00
50	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	343.031.606,00	1.500.000,00	0,00	344.531.606,00
TOTAL		**2.113.795.916.183,47**	**465.172.366.893,81**	**367.377.668.739,96**	**2.211.590.614.337,32**

MAMUJU TENGAH, 2026
BUPATI KAB. MAMUJU TENGAH

H. ARSAL ARAS

Lampiran XIII : Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah
Nomor :
Tanggal : 2026

PEMERINTAHAN KAB. MAMUJU TENGAH
DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Uraian	Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2024	Mutasi		Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2025
			Tambah	Kurang	
1	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	1.171.931.300,00	0,00	0,00	1.171.931.300,00
2	Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	1.836.660.177,63	0,00	0,00	1.836.660.177,63
3	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	47.435.219.147,37	10.191.638.930,00	4.054.481.680,00	53.572.376.397,37
4	Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah	91.120.000,00	0,00	0,00	91.120.000,00
5	Tanah Persil Lainnya	0,00	523.741.297,00	0,00	523.741.297,00
6	Tanah Basah	911.260.000,00	0,00	0,00	911.260.000,00
7	Tanah Kering	8.960.000,00	17.920.000,00	17.920.000,00	8.960.000,00
8	Tanah Perkebunan	107.400.000,00	0,00	0,00	107.400.000,00
9	Tanah Lapangan Olahraga	3.434.818.050,00	0,00	0,00	3.434.818.050,00
10	Tanah Lapangan Parkir	180.000.000,00	0,00	0,00	180.000.000,00
11	Tanah Lapangan Penimbunan Barang	1.131.961.000,00	2.378.974.315,00	2.254.112.000,00	1.256.823.315,00
12	Tanah untuk Jalan	9.766.834.000,00	0,00	0,00	9.766.834.000,00
13	Tanah untuk Bangunan Jaringan	57.600.000,00	0,00	0,00	57.600.000,00
14	Tanah untuk Bangunan Bersejarah	1.196.208.000,00	0,00	0,00	1.196.208.000,00
15	Tanah untuk Makam	110.969.500,00	0,00	0,00	110.969.500,00
16	Tanah untuk Taman	101.627.000,00	0,00	0,00	101.627.000,00
17	Tanah untuk Latihan	108.925.000,00	2.700.000.000,00	0,00	2.808.925.000,00
18	Tanah Kampung	39.180.000,00	0,00	0,00	39.180.000,00
19	Lapangan Lainnya	97.083.000,00	0,00	0,00	97.083.000,00
20	Tractor	1.814.106.047,00	0,00	0,00	1.814.106.047,00
21	Grader	2.191.750.000,00	0,00	0,00	2.191.750.000,00
22	Excavator	3.410.931.000,00	0,00	0,00	3.410.931.000,00
23	Hauler	1.284.300.000,00	0,00	850.000,00	1.283.450.000,00
24	Compacting Equipment	(1.800.000,00)	149.517.000,00	0,00	147.717.000,00
25	Loader	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
26	Alat Pengangkat	150.150.000,00	0,00	0,00	150.150.000,00
27	Mesin Proses	49.800.000,00	3.400.000,00	0,00	53.200.000,00
28	Mesin Proses Apung	25.000.000,00	58.354.000,00	50.000.000,00	33.354.000,00
29	Electric Generating Set	3.794.184.500,00	427.320.000,00	930.820.000,00	3.290.684.500,00
30	Pompa	505.482.500,00	10.050.000,00	95.065.000,00	420.467.500,00
31	Mesin Bor	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
32	Unit Pemeliharaan Lapangan	8.902.000,00	0,00	0,00	8.902.000,00
33	Alat Pengolahan Air Kotor	0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00
34	Alat Bantu Lainnya	20.885.000,00	6.063.000,00	600.000,00	26.348.000,00
35	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	19.907.787.472,50	2.022.088.485,00	2.302.154.611,00	19.627.721.346,50
36	Kendaraan Bermotor Penumpang	1.811.340.565,00	0,00	0,00	1.811.340.565,00
37	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	2.366.775.000,00	1.787.277.890,00	0,00	4.154.052.890,00
38	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	13.481.865.238,04	4.983.263.640,00	5.843.946.162,79	12.621.182.715,25
39	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	69.800.000,00	0,00	0,00	69.800.000,00
40	Kendaraan Bermotor Khusus	21.776.621.300,00	11.272.494.600,00	11.275.494.600,00	21.773.621.300,00
41	Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	410.990.000,00	0,00	192.190.000,00	218.800.000,00
42	Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	113.756.700,00	7.100.000,00	14.696.000,00	106.160.700,00
43	Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	38.500.000,00	7.000.000,00	0,00	45.500.000,00
44	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
45	Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang	1.405.651.500,00	0,00	0,00	1.405.651.500,00
46	Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	(3.200.000,00)	3.200.000,00	0,00	0,00
47	Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	0,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00
48	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang	149.799.000,00	99.600.000,00	99.600.000,00	149.799.000,00
49	Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	18.246.000,00	600.000,00	2.250.000,00	16.596.000,00
50	Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)	1.850.000,00	0,00	1.320.000,00	530.000,00
51	Perkakas Bengkel Listrik	14.926.350,00	0,00	5.030.000,00	9.896.350,00
52	Perkakas Bengkel Service	0,00	0,00	500.000,00	(500.000,00)
53	Perkakas Bengkel Kayu	26.999.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	26.999.000,00
54	Perkakas Pabrik Es	65.080.000,00	4.000.000,00	10.030.000,00	59.050.000,00
55	Perkakas Bengkel Konstruksi Logam	(70.000,00)	0,00	0,00	(70.000,00)
56	Perkakas Bengkel Listrik	945.846.000,00	0,00	0,00	945.846.000,00
57	Perkakas Bengkel Service	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
58	Perkakas Pengangkat	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
59	Perkakas Bengkel Kerja	27.800.000,00	0,00	800.000,00	27.000.000,00
60	Peralatan Tukang Besi	3.465.000,00	0,00	500.000,00	2.965.000,00
61	Peralatan Ukur, Gip dan Feeting	370.000,00	0,00	759.000,00	(389.000,00)
62	Peralatan Bengkel Khusus Peladam	55.204.340,00	34.300.000,00	67.786.340,00	21.718.000,00
63	Alat Ukur Universal	187.475.000,00	0,00	3.110.000,00	184.365.000,00
64	Alat Kalibrasi	28.105.000,00	44.000.000,00	44.000.000,00	28.105.000,00
65	Universal Tester	82.250.000,00	0,00	0,00	82.250.000,00

No	Uraian	Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2024	Mutasi		Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2025
			Tambah	Kurang	
66	Alat Ukur/Pembanding	79.090.860,00	576.452.799,29	23.506.800,00	632.036.859,29
67	Alat Ukur Lain-Lain	15.339.480,00	19.719.962,00	33.729.942,00	1.329.500,00
68	Alat Timbangan/Biara	11.383.000,00	2.066.000,00	5.199.000,00	8.250.000,00
69	Anak Timbangan/Biara	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
70	Specific Set	0,00	1.500.000,01	0,00	1.500.000,01
71	Alat Pengukur Penglihatan	10.425.707,27	17.749.414,56	28.175.121,83	0,00
72	Alat Ukur Lainnya	98.695.279,00	0,00	0,00	98.695.279,00
73	Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	292.437.100,00	29.604.000,00	0,00	322.041.100,00
74	Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	23.302.300,00	30.301.700,00	0,00	53.604.000,00
75	Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	256.379.100,00	614.019.273,00	5.500.000,00	864.898.373,00
76	Alat Laboratorium Pertanian	(2.150.000,00)	314.016.690,00	7.984.300,00	303.882.390,00
77	Alat Produksi Perikanan	(43.296.000,00)	9.430.000,00	0,00	(33.866.000,00)
78	Alat-Alat Peternakan	1.063.344.893,00	3.396.500,00	249.870.000,00	816.871.393,00
79	Mesin Ketik	23.140.000,00	9.680.000,00	9.680.000,00	23.140.000,00
80	Mesin Hitung/Mesin Jumlah	235.798.315,00	413.307.980,00	413.307.980,00	235.798.315,00
81	Alat Reproduksi (Penggandaan)	105.380.000,00	0,00	0,00	105.380.000,00
82	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	5.359.075.951,43	1.516.160.325,02	1.410.733.295,01	5.464.502.981,44
83	Alat Kantor Lainnya	13.508.176.531,98	2.046.189.629,00	1.344.460.614,00	14.209.905.546,98
84	Mebel	24.858.787.917,75	5.080.866.402,38	3.207.245.802,00	26.732.408.518,13
85	Alat Pengukur Waktu	32.412.000,00	0,00	0,00	32.412.000,00
86	Alat Pembersih	465.599.343,00	51.462.538,00	50.456.075,00	466.605.806,00
87	Alat Pendingin	6.287.951.191,75	2.308.736.684,00	1.917.172.280,38	6.679.515.595,37
88	Alat Dapur	511.054.615,00	316.540.000,00	298.515.000,00	529.079.615,00
89	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	8.290.584.505,99	1.420.220.154,00	606.765.455,00	9.104.039.204,99
90	Alat Pemadam Kebakaran	236.391.000,00	137.172.220,00	125.182.000,00	248.381.220,00
91	Meja Kerja Pejabat	1.225.262.905,16	143.693.348,00	91.994.600,00	1.276.961.653,16
92	Meja Rapat Pejabat	410.417.514,50	17.899.995,00	11.000.000,00	417.317.509,50
93	Kursi Kerja Pejabat	2.956.887.491,36	323.542.889,00	191.897.480,00	3.088.532.900,36
94	Kursi Rapat Pejabat	538.444.930,00	18.939.490,00	7.140.000,00	550.244.420,00
95	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	244.017.080,00	41.379.402,00	0,00	285.396.482,00
96	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	285.401.040,80	5.999.995,00	0,00	291.401.035,80
97	Lemari dan Arsip Pejabat	2.138.554.584,99	444.966.970,00	386.090.600,00	2.197.430.954,99
98	Peralatan Studio Audio	708.718.027,00	100.934.900,00	29.500.000,00	780.152.927,00
99	Peralatan Studio Video dan Film	2.540.765.696,00	105.332.000,00	15.750.000,00	2.630.347.696,00
100	Peralatan Studio Gambar	74.514.500,00	10.500.000,00	0,00	85.014.500,00
101	Peralatan Cetak	263.121.452,00	61.088.000,00	61.088.000,00	263.121.452,00
102	Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	21.647.731,00	450.000,00	0,00	22.097.731,00
103	Alat Studio Lainnya	157.532.296,00	0,00	0,00	157.532.296,00
104	Alat Komunikasi Telephone	456.709.300,00	20.574.000,00	16.204.000,00	461.079.300,00
105	Alat Komunikasi Radio SSB	119.460.000,00	0,00	0,00	119.460.000,00
106	Alat Komunikasi Radio HF/FM	20.200.000,00	600.000,00	0,00	20.800.000,00
107	Alat Komunikasi Radio VHF	15.980.000,00	0,00	0,00	15.980.000,00
108	Alat Komunikasi Sosial	281.065.000,00	9.570.000,00	9.570.000,00	281.065.000,00
109	Alat-Alat Sandi	4.200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.200.000,00
110	Alat Komunikasi Digital dan Konvensional	28.298.000,00	0,00	0,00	28.298.000,00
111	Alat Komunikasi Satelit	1.300.000,00	30.000.000,00	0,00	31.300.000,00
112	Alat Komunikasi Lainnya	4.662.000,00	0,00	0,00	4.662.000,00
113	Peralatan Pemancar SHF	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
114	Peralatan Antena MF/MW	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
115	Peralatan Antena VHF/FM	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
116	Peralatan Antena SHF/Parabola	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00
117	Switcher Antena	1.740.259,00	0,00	0,00	1.740.259,00
118	Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Tinggi	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
119	Peralatan Penerima dan Pengirim Gambar ke Permukaan	14.358.410,00	0,00	0,00	14.358.410,00
120	Sumber Tenaga	223.820.000,00	0,00	0,00	223.820.000,00
121	Alat Kedokteran Umum	41.064.908.289,95	18.098.367.716,08	20.726.745.918,42	38.436.530.087,61
122	Alat Kedokteran Gigi	2.663.095.484,00	4.635.408.615,98	4.641.685.738,98	2.656.818.361,00
123	Alat Kedokteran Keluarga Berencana	185.851.684,00	241.095.460,00	258.619.390,00	168.327.754,00
124	Alat Kedokteran Bedah	7.950.850.421,99	1.259.287.200,26	1.817.198.550,67	7.392.939.071,58
125	Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	10.131.819.019,70	8.528.377.335,98	9.138.781.433,91	9.521.414.921,77
126	Alat Kedokteran THT	765.710.078,00	1.221.652.187,23	972.687.914,33	1.014.674.350,90
127	Alat Kedokteran Mata	128.692.260,00	246.150.990,00	246.150.990,00	128.692.260,00
128	Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	6.253.852.387,23	1.678.543.349,36	1.273.665.414,82	6.658.730.321,77
129	Alat Kedokteran Kamar Jenazah/Mortuary	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00
130	Alat Kedokteran Anak	1.936.377.349,00	1.812.834.339,00	1.268.663.932,00	2.480.547.756,00
131	Alat Kedokteran Poliklinik	308.151.912,00	164.371.264,00	251.977.554,00	220.545.622,00
132	Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	201.072.905,00	41.847.000,00	21.098.000,00	221.821.905,00
133	Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)	162.928.550,00	0,00	0,00	162.928.550,00
134	Alat Kedokteran Jantung	313.170.054,00	361.262.204,00	65.040.800,00	609.391.458,00
135	Alat Kedokteran Radiodiagnostic	2.070.556.495,00	47.736.000,00	1.278.495.625,00	839.796.870,00
136	Alat Kedokteran Transfusi Darah	1.030.394.240,00	6.900.000,00	15.405.000,00	1.021.889.240,00
137	Alat Kedokteran Nuklir	1.214.490.597,00	83.995.244,00	97.157.744,00	1.201.328.097,00
138	Alat Kedokteran Gawat Darurat	495.897.788,00	527.230.410,00	428.666.328,00	594.461.870,00
139	Alat Kedokteran Bedah Ortopedi	4.618.000,00	9.236.000,00	13.854.000,00	0,00

No	Uraian	Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2024	Mutasi		Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2025
			Tambah	Kurang	
140	Alat Kedokteran ICCU	0,00	394.521.400,51	82.487.899,99	312.033.500,52
141	Alat Kedokteran Bedah Jantung	32.595.000,00	0,00	0,00	32.595.000,00
142	Alat Kedokteran Anestesi	603.832.703,00	0,00	0,00	603.832.703,00
143	Alat Kedokteran Lainnya	36.197.900,00	1.700.000,00	1.700.000,00	36.197.900,00
144	Alat Kesehatan Matra Laut	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
145	Alat Kesehatan Kepolisian	129.451.400,00	0,00	0,00	129.451.400,00
146	Alat Kesehatan Olahraga	215.554.000,00	0,00	0,00	215.554.000,00
147	Alat Kesehatan Umum Lainnya	11.588.472.678,94	2.803.062.181,57	5.348.268.472,25	9.043.266.388,26
148	Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan	6.125.000,00	12.250.000,00	18.375.000,00	0,00
149	Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan	868.180.000,00	0,00	0,00	868.180.000,00
150	Alat Laboratorium Hidrokimia	1.061.500,00	0,00	0,00	1.061.500,00
151	Alat Laboratorium Model Hidrolika	0,00	0,00	800.000,00	(800.000,00)
152	Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia	265.314.000,00	492.726.000,00	492.726.000,00	265.314.000,00
153	Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik	810.000,00	600.000,00	2.579.400,00	(1.169.400,00)
154	Alat Laboratorium Umum	3.216.854.465,05	508.634.512,00	689.181.396,00	3.036.307.581,05
155	Alat Laboratorium Mikrobiologi	2.537.520.400,00	2.416.670.284,00	2.418.900.284,00	2.535.290.400,00
156	Alat Laboratorium Kimia	488.360.264,00	463.835.085,00	132.659.817,00	819.535.532,00
157	Alat Laboratorium Patologi	463.267.952,00	707.474.774,00	328.204.539,00	842.538.187,00
158	Alat Laboratorium Immunologi	6.956.000,00	44.224.600,00	5.403.200,00	45.777.400,00
159	Alat Laboratorium Hematologi	350.000,00	700.000,00	1.050.000,00	0,00
160	Alat Laboratorium Film	132.118.900,00	0,00	3.300.000,00	128.818.900,00
161	Alat Laboratorium Makanan	248.121.000,00	77.201.500,00	41.250.000,00	284.072.500,00
162	Alat Laboratorium Farmasi	687.409.874,00	74.269.332,00	529.035.205,00	232.644.001,00
163	Alat Laboratorium Fisika	78.695.360,00	16.080.720,00	39.471.080,00	55.305.000,00
164	Alat Laboratorium Pembuatan Pola	5.500.000,00	0,00	4.850.000,00	650.000,00
165	Alat Laboratorium Pelapisan Logam	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00
166	Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas	10.516.400,00	0,00	10.516.400,00	0,00
167	Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil	58.490.000,00	0,00	0,00	58.490.000,00
168	Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik	0,00	0,00	900.000,00	(900.000,00)
169	Alat Laboratorium Pertanian	701.100.239,00	59.291.199,99	27.951.800,00	732.439.638,99
170	Alat Laboratorium Elektronika dan Daya	2.589.570,00	0,00	0,00	2.589.570,00
171	Alat Laboratorium Energi Surya	503.960.000,00	0,00	0,00	503.960.000,00
172	Alat Laboratorium Oseanografi	4.568.000,00	9.136.000,00	9.634.000,00	4.070.000,00
173	Alat Laboratorium Biologi Perairan	7.200.000,00	0,00	0,00	7.200.000,00
174	Alat Laboratorium Biologi	91.955.800,00	0,00	0,00	91.955.800,00
175	Alat Laboratorium Geofisika	3.409.570,00	2.100.000,00	3.350.000,00	2.159.570,00
176	Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia	42.780.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	42.780.000,00
177	Laboratorium Kearsipan	0,00	255.000,00	255.000,00	0,00
178	Laboratorium Hematologi dan Urinalisis	750.000,00	2.000.000,00	750.000,00	2.000.000,00
179	Alat Laboratorium Lain	229.847.000,00	33.054.570,00	173.728.920,22	89.172.649,78
180	Alat Laboratorium Populasi	16.060.000,00	8.140.000,00	9.595.000,00	14.605.000,00
181	Analytical Instrument	9.578.610,00	0,00	900.000,00	8.678.610,00
182	General Laboratory Tool	(450.000,00)	0,00	0,00	(450.000,00)
183	Laboratory Safety Equipment	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	0,00
184	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Bahasa Indonesia	81.166.400,00	400.000,00	27.800.000,00	53.766.400,00
185	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Matematika	361.911.520,00	0,00	65.347.258,00	296.564.262,00
186	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar	117.954.488,00	0,00	45.107.000,00	72.847.488,00
187	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan	202.059.650,00	13.379.000,00	19.591.000,00	195.847.650,00
188	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah	210.929.466,00	360.000,00	30.357.650,00	180.931.816,00
189	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Atas	136.413.850,00	0,00	0,00	136.413.850,00
190	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPS	70.601.174,00	0,00	35.740.286,00	34.860.888,00
191	Alat PeragaPraktik Sekolah Bidang Studi:Agama	30.150.000,00	0,00	11.190.000,00	18.960.000,00
192	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan	122.538.378,00	2.315.000,00	8.196.310,00	116.657.068,00
193	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian	446.932.265,00	31.709.000,00	10.706.900,00	467.934.365,00
194	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga	155.720.688,00	0,00	450.000,00	155.270.688,00
195	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:PKN	16.269.720,00	800.000,00	6.850.000,00	10.219.720,00
196	Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, dan Tuna Rungu)	0,00	0,00	569.250,00	(569.250,00)
197	Alat Peraga Kejuruan	3.050.000,00	0,00	350.000,00	2.700.000,00
198	Alat Peraga PAUD/TK	60.849.952,00	0,00	101.271.479,00	(40.421.527,00)
199	Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	0,00	450.000,00	10.394.720,00	(9.944.720,00)
200	Modular Counting and Scientific Electronic	70.289.500,00	0,00	475.000,00	69.814.500,00
201	Recorder Display	14.750.000,00	0,00	0,00	14.750.000,00
202	System/Power Supply	68.892.144,00	0,00	0,00	68.892.144,00
203	Measuring/Testing Device	(270.000,00)	0,00	0,00	(270.000,00)
204	Alat Kesehatan Kerja	8.480.000,00	0,00	2.480.000,00	6.000.000,00
205	Proteksi Lingkungan	46.350.000,00	0,00	0,00	46.350.000,00
206	Non Destructive Test (NDT) Device	21.065.000,00	42.130.000,00	56.980.000,00	6.215.000,00
207	Alat Laboratorium Kualitas Udara	104.500.000,00	74.800.000,00	78.600.000,00	100.700.000,00
208	Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran	25.100.000,00	46.200.000,00	46.900.000,00	24.400.000,00
209	Alat Laboratorium Penunjang	115.164.000,00	234.928.000,00	232.178.000,00	117.914.000,00
210	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
211	Peralatan Umum	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00
212	Pemesinan:Model Ship Workshop	20.178.125,00	0,00	0,00	20.178.125,00
213	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica Lainnya	2.255.000,00	4.510.000,00	6.765.000,00	0,00

No	Uraian	Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2024	Mutasi		Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2025
			Tambah	Kurang	
214	Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik	47.020.177,00	94.040.354,00	94.040.354,00	47.020.177,00
215	Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00
216	Senjata Lain-Lain	11.818.550,00	0,00	0,00	11.818.550,00
217	Alat Keamanan	59.450.000,00	0,00	2.400.000,00	57.050.000,00
218	Non Senjata Api	49.535.500,00	0,00	0,00	49.535.500,00
219	Alat Penjinak Bahan Peledak (Aljihandak)	9.600.000,00	0,00	0,00	9.600.000,00
220	Persenjataan Non Senjata Api Lainnya	198.128.000,00	41.716.000,00	41.716.000,00	198.128.000,00
221	Alsus Fotografi Kepolisian	900.000,00	0,00	610.000,00	290.000,00
222	Komputer Jaringan	326.624.192,00	92.352.000,00	800.000,00	418.176.192,00
223	Personal Computer	40.495.033.544,86	3.019.874.473,37	2.402.980.358,36	41.111.927.659,87
224	Komputer Unit Lainnya	3.164.934.486,00	3.726.018.275,00	115.950.808,00	6.775.001.953,00
225	Peralatan Mainframe	283.827.055,77	1.700.000,00	72.312.776,77	213.214.279,00
226	Peralatan Mini Computer	326.137.000,00	0,00	2.450.000,00	323.687.000,00
227	Peralatan Personal Computer	4.306.055.241,33	874.411.318,00	888.192.691,00	4.292.273.868,33
228	Peralatan Jaringan	4.145.130.632,00	102.452.449,00	231.163.891,99	4.016.419.189,01
229	Peralatan Komputer Lainnya	959.523.967,00	882.545.005,00	557.473.994,00	1.284.594.978,00
230	Alat Eksplorasi Topografi Lainnya	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
231	Sumur Pemboran	4.330.000,00	4.000.000,00	0,00	8.330.000,00
232	Alat Pengolahan Air	0,00	885.000.000,00	885.000.000,00	0,00
233	Elektrik	0,00	565.000.000,00	30.460.000,00	534.540.000,00
234	Baju Pengaman	0,00	0,00	0,00	0,00
235	Sepatu Lapangan	0,00	0,00	0,00	0,00
236	Alat Pelindung Lainnya	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
237	Alat Pendukung Pencarian	1.451.151.409,00	900.000,00	0,00	1.452.051.409,00
238	Alat Kerja Bawah Air	(1.200.000,00)	3.900.000,00	0,00	2.700.000,00
239	Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara	104.562.000,00	0,00	0,00	104.562.000,00
240	Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara	80.326.500,00	0,00	0,00	80.326.500,00
241	Alat Penga Percontohan	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
242	Centrifuge for Solid Liquid	35.096.000,00	0,00	0,00	35.096.000,00
243	Transport and Storage Equipment for Liquid	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
244	*Solid Material Handling Equipment*	16.740.000,00	21.480.000,00	38.220.000,00	0,00
245	Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya	139.969.000,00	0,00	0,00	139.969.000,00
246	Rambu Bersuar	59.658.362,00	0,00	0,00	59.658.362,00
247	Rambu Tidak Bersuar	1.015.389.638,00	110.023.001,00	0,00	1.125.412.639,00
248	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	99.161.850,00	0,00	0,00	99.161.850,00
249	Peralatan Permainan	336.836.747,00	256.966.908,00	154.678.193,00	439.125.462,00
250	Peralatan Senam	90.739.523,00	59.220.000,00	38.460.000,00	111.499.523,00
251	Peralatan Olahraga Lainnya	65.870.100,00	0,00	0,00	65.870.100,00
252	Bangunan Gedung Kantor	114.695.686.478,35	7.695.283.325,84	4.894.836.369,50	117.496.133.434,69
253	Bangunan Gudang	1.015.402.890,00	199.628.595,00	28.875.000,00	1.186.156.485,00
254	Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar	99.960.000,00	0,00	0,00	99.960.000,00
255	Bangunan Gedung Instalasi	5.761.987.000,00	299.850.000,00	249.875.000,00	5.811.962.000,00
256	Bangunan Gedung Laboratorium	8.670.008.507,60	1.780.596.740,07	497.604.259,45	9.953.000.988,22
257	Bangunan Kesehatan	164.184.780.552,19	217.057.083.356,71	194.433.465.225,42	186.808.398.683,48
258	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	3.298.878.612,33	0,00	369.894.919,34	2.928.983.692,99
259	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	2.649.468.600,00	0,00	0,00	2.649.468.600,00
260	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	179.463.988.329,36	9.874.070.906,50	3.660.244.121,57	185.677.815.114,29
261	Bangunan Gedung Tempat Olahraga	1.418.825.934,00	11.648.778.985,00	11.668.778.985,00	1.398.825.934,00
262	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	27.554.736.898,00	502.741.500,00	220.551.390,00	27.836.927.008,00
263	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	684.482.817,00	809.908.000,00	473.138.346,00	1.021.252.471,00
264	Bangunan Gedung Garasi/Pool	687.410.107,00	0,00	32.241.707,00	655.168.400,00
265	Bangunan Gedung Pemotong Hewan	478.140.000,00	0,00	0,00	478.140.000,00
266	Bangunan Gedung Perpustakaan	15.063.983.017,14	11.013.681.794,51	701.031.477,14	25.376.633.334,51
267	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	3.526.565.000,00	15.086.500,00	0,00	3.541.651.500,00
268	Bangunan Terbuka	695.415.977,00	0,00	0,00	695.415.977,00
269	Bangunan Industri	178.145.000,00	0,00	0,00	178.145.000,00
270	Bangunan Peternakan/Perikanan	180.456.142,00	0,00	15.637.142,00	164.819.000,00
271	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	7.429.641.548,54	5.352.993.750,00	2.435.518.875,00	10.347.116.423,54
272	Bangunan Fasilitas Umum	8.752.628.318,20	3.730.381.166,59	5.215.702,73	12.477.793.782,06
273	Bangunan Parkir	0,00	645.211.358,00	0,00	645.211.358,00
274	Bangunan Gedung Pabrik	486.086.000,00	0,00	0,00	486.086.000,00
275	Bangunan Stasiun Bus	144.910.000,00	0,00	0,00	144.910.000,00
276	Taman	1.639.849.500,00	152.721.000,00	54.646.414,87	1.737.924.085,13
277	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	13.414.602.883,00	0,00	82.455.700,00	13.332.147.183,00
278	Rumah Negara Golongan I	5.234.734.316,00	4.601.020.153,00	4.518.261.153,00	5.317.493.316,00
279	Rumah Negara Golongan II	3.051.049.000,00	889.707.000,00	0,00	3.940.756.000,00
280	Rumah Negara Golongan III	8.355.285.123,00	9.823.832.000,00	9.862.987.551,47	8.316.129.571,53
281	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	643.988.000,00	0,00	0,00	643.988.000,00
282	Rumah Tidak Bersusun	2.270.219.506,00	21.577.127.934,00	0,00	23.847.347.440,00
283	Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	7.847.240.988,00	0,00	0,00	7.847.240.988,00
284	Tugu	8.189.419.892,00	0,00	0,00	8.189.419.892,00
285	Bangunan Peninggalan	994.327.484,00	0,00	26.709.814,44	967.617.669,56
286	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
287	Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00

No	Uraian	Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2024	Mutasi		Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2025
			Tambah	Kurang	
288	Bangunan Menara Perambuan Lainnya	0,00	0,00	30.000.000,00	(30.000.000,00)
289	Tugu/Tanda Batas Administrasi	2.051.713.933,06	0,00	19.300.000,00	2.032.413.933,06
290	Pagar	9.783.165.074,00	6.324.803.620,00	5.791.728.266,00	10.316.240.428,00
291	Jalan Kabupaten	497.391.482.673,57	8.534.025.998,00	5.019.439.501,45	500.906.069.170,12
292	Jalan Kota	0,00	0,00	83.259.015,79	(83.259.015,79)
293	Jalan Desa	157.583.709.840,95	0,00	15.000.000,00	157.568.709.840,95
294	Jalan Khusus	2.565.211.164,82	278.081.000,00	278.081.000,00	2.565.211.164,82
295	Jembatan pada Jalan Nasional	4.350.600.000,00	0,00	0,00	4.350.600.000,00
296	Jembatan pada Jalan Provinsi	16.215.682.450,08	0,00	11.583.748,00	16.204.098.702,08
297	Jembatan pada Jalan Kabupaten	46.800.591.277,89	1.436.975.000,00	990.479.000,00	47.247.087.277,89
298	Jembatan pada Jalan Desa	31.843.694.747,00	293.004.470,00	372.138.742,94	31.764.560.474,06
299	Jembatan Penyeberangan	1.515.935.432,00	0,00	0,00	1.515.935.432,00
300	Bangunan Waduk Irigasi	14.432.115.322,00	224.783.800,00	0,00	14.656.899.122,00
301	Bangunan Pengambilan Irigasi	48.282.953.518,00	0,00	0,00	48.282.953.518,00
302	Bangunan Pembawa Irigasi	30.117.649.068,00	0,00	72.746.814,00	30.044.902.254,00
303	Bangunan Pembuang Irigasi	62.627.234.406,00	5.328.000,00	210.978.600,00	62.421.583.806,00
304	Bangunan Pengaman Irigasi	5.175.428.767,71	0,00	0,00	5.175.428.767,71
305	Bangunan Pelengkap Irigasi	9.959.756.102,96	0,00	10.487.938,00	9.949.268.164,96
306	Bangunan Air Irigasi Lainnya	142.636.000,00	93.234.000,00	93.234.000,00	142.636.000,00
307	Bangunan Waduk Pasang Surut	269.142.857,00	0,00	0,00	269.142.857,00
308	Saluran Pembuang Pasang Surut	8.906.356.211,00	3.119.590.100,00	156.964.800,00	11.868.981.511,00
309	Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa	149.875.000,00	0,00	0,00	149.875.000,00
310	Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa	216.960.000,00	0,00	0,00	216.960.000,00
311	Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa	251.109.544,00	0,00	0,00	251.109.544,00
312	Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa	2.663.939.025,00	0,00	0,00	2.663.939.025,00
313	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	485.190.000,00	714.511.100,00	614.792.900,00	584.908.200,00
314	Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai	715.918.000,00	0,00	0,00	715.918.000,00
315	Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	33.392.982.609,00	20.000.000,00	20.000.000,00	33.392.982.609,00
316	Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	35.050.829.011,48	0,00	32.793.697,70	35.018.035.313,78
317	Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai	3.198.937.000,00	0,00	0,00	3.198.937.000,00
318	Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	299.475.904,00	0,00	0,00	299.475.904,00
319	Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air	1.588.883.839,00	0,00	0,00	1.588.883.839,00
320	Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku	9.963.781.056,00	0,00	0,00	9.963.781.056,00
323	Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku	2.353.035.874,00	0,00	13.973.268,89	2.339.062.605,11
324	Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	4.330.747.644,56	0,00	0,00	4.330.747.644,56
325	Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	6.329.289.302,00	0,00	0,00	6.329.289.302,00
326	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	1.329.601.800,00	5.068.949.200,00	2.755.504.348,00	3.643.046.652,00
327	Bangunan Pembawa Air Kotor	431.563.800,00	0,00	0,00	431.563.800,00
328	Bangunan Waduk Air Kotor	7.536.582.507,00	0,00	0,00	7.536.582.507,00
329	Bangunan Pembuang Air Kotor	553.346.566,50	0,00	0,00	553.346.566,50
330	Bangunan Pelengkap Air Kotor	1.605.112.052,00	0,00	0,00	1.605.112.052,00
331	Bangunan Air Kotor Lainnya	635.657.000,00	635.657.000,00	635.657.000,00	635.657.000,00
332	Instalasi Air Permukaan	(75.662.000,00)	0,00	0,00	(75.662.000,00)
333	Instalasi Air Tanah Dalam	213.771.000,00	213.771.000,00	213.771.000,00	213.771.000,00
334	Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	40.239.691.915,99	2.424.351.350,00	1.755.134.486,46	40.908.908.779,53
335	Instalasi Air Buangan Domestik	1.217.580.000,00	0,00	0,00	1.217.580.000,00
336	Instalasi Air Kotor Lainnya	1.066.912.502,94	3.088.894.000,00	2.496.393.147,18	1.659.413.355,76
337	Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	494.393.000,00	0,00	0,00	494.393.000,00
338	Bangunan Penampung Sampah	119.880.000,00	573.619.310,00	573.619.310,00	119.880.000,00
339	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis	0,00	0,00	0,00	0,00
340	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)	327.925.000,00	0,00	0,00	327.925.000,00
341	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	9.325.470.938,00	7.447.920.000,00	7.387.560.000,00	9.385.830.938,00
342	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	0,00	115.000.000,00	175.360.000,00	(60.360.000,00)
344	Instalasi Pusat Pengatur Listrik	0,00	0,00	0,00	0,00
345	Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif	4.740.840.000,00	3.232.680.000,00	3.232.680.000,00	4.740.840.000,00
346	Instalasi Lain	0,00	0,00	0,00	0,00
347	Jaringan Pembawa	114.900.000,00	0,00	0,00	114.900.000,00
348	Jaringan Cabang Distribusi	3.382.533.850,00	0,00	0,00	3.382.533.850,00
349	Jaringan Air Minum Lainnya	753.315.636,00	72.767.048,00	0,00	826.082.684,00
350	Jaringan Transmisi	41.485.360,00	92.352.000,00	120.075.360,00	13.762.000,00
351	Jaringan Distribusi	765.912.480,00	45.756.000,00	86.012.000,00	725.656.480,00
352	Jaringan Listrik Lainnya	178.856.000,00	0,00	0,00	178.856.000,00
353	Jaringan Telepon di atas Tanah	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
354	Jaringan Pipa Gas Transmisi	198.640.000,00	0,00	0,00	198.640.000,00
355	Jaringan Pipa Distribusi	487.286.000,00	0,00	0,00	487.286.000,00
356	Buku Umum	2.317.363.548,83	1.422.522.907,00	1.756.623.192,90	1.983.263.262,93
357	Buku Filsafat	16.400.000,00	0,00	800.000,00	15.600.000,00
358	Buku Agama	35.082.900,00	0,00	45.867.700,00	(10.784.800,00)
359	Buku Ilmu Sosial	3.044.765.206,08	0,00	27.927.175,00	3.016.838.031,08
360	Buku Ilmu Bahasa	17.829.531,00	0,00	61.417.500,00	(43.587.969,00)
361	Buku Matematika dan Pengetahuan Alam	46.020.690,00	0,00	65.162.703,00	(19.142.013,00)

No	Uraian	Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2024	Mutasi		Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2025
			Tambah	Kurang	
362	Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	28.838.700,00	0,00	5.678.900,00	23.159.800,00
363	Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	79.113.600,00	0,00	17.551.700,00	61.561.900,00
364	Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah	9.317.934,00	0,00	3.400.414,00	5.917.520,00
365	Serial	1.110.000,00	0,00	300.000,00	810.000,00
366	Buku Laporan	2.585.400,00	0,00	105.400,00	2.480.000,00
367	Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	(10.450.000,00)	0,00	7.087.500,00	(17.537.500,00)
368	Audio Visual	436.041.000,00	0,00	1.000.000,00	435.041.000,00
369	Bahan Kartografi	104.765.212,00	0,00	647.000,00	104.118.212,00
370	Karya Grafika (Graphic Material)	18.904.800,00	0,00	3.880.800,00	15.024.000,00
371	Three Dimensional Artifacts and Realita	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
372	Alat Musik	1.183.311.350,00	0,00	0,00	1.183.311.350,00
373	Lukisan	105.430.000,00	0,00	0,00	105.430.000,00
374	Barang Bercorak Kesenian Lainnya	35.493.600,00	0,00	0,00	35.493.600,00
375	Pahatan	160.975.000,00	0,00	0,00	160.975.000,00
376	Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah	109.400.000,00	0,00	0,00	109.400.000,00
377	Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	358.516,00	0,00	0,00	358.516,00
378	Tanaman	556.107.000,00	0,00	0,00	556.107.000,00
379	Aset Tetap Dalam Renovasi	1.314.476.830,00	87.366.250,00	179.191.250,00	1.222.651.830,00
380	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	6.744.969.190,00	99.611.400,00	0,00	6.844.580.590,00
381	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	100.700.000,00	0,00	0,00	100.700.000,00
382	Konstruksi Dalam Pengerjaan Lapangan-Tanah untuk Bangunan Air	2.303.000,00	0,00	0,00	2.303.000,00
383	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Bantu-Pompa	0,00	0,00	0,00	0,00
384	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0,00	2.277.323.700,00	0,00	2.277.323.700,00
385	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi	1.008.317.700,00	0,00	1.008.317.700,00	0,00
386	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	4.092.386.047,91	241.341.464,49	4.322.727.512,40	11.000.000,00
387	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Olahraga	6.899.758.500,00	11.510.317.418,00	0,00	18.410.075.918,00
388	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan	9.245.745.852,00	0,00	9.245.745.852,00	0,00
389	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan-Jalan Kabupaten	287.741.000,00	797.659.000,00	0,00	1.085.400.000,00
390	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan-Jalan Desa	19.807.000,00	0,00	0,00	19.807.000,00
391	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	0,00	834.259.000,00	0,00	834.259.000,00
392	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jembatan-Jembatan pada Jalan Desa	0,00	293.004.470,00	0,00	293.004.470,00
393	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	51.215.000,00	428.664.900,00	0,00	479.879.900,00
394	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	254.770.000,00	0,00	0,00	254.770.000,00
395	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	0,00	2.672.400.700,00	0,00	2.672.400.700,00
396	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Air Kotor-Bangunan Waduk Air Kotor	0,00	0,00	0,00	0,00
397	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan	290.162.000,00	0,00	0,00	290.162.000,00
398	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Air Bersih/Air Baku- Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	4.982.114.465,00	678.432.335,00	150.765.000,00	5.509.781.800,00
399	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan ke Rumah	2.865.068.014,76	0,00	0,00	2.865.068.014,76
400	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Tractor	(1.452.005.833,00)	(290.401.167,00)	0,00	(1.742.407.000,00)
401	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Grader	(2.191.750.000,00)	0,00	0,00	(2.191.750.000,00)
402	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Excavator	(1.668.524.000,00)	0,00	0,00	(1.668.524.000,00)
403	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Hauler	(930.755.208,00)	(1.027.394.151,00)	(643.945.959,00)	(1.314.203.400,00)
404	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Loader	0,00	(5.500.000,00)	0,00	(5.500.000,00)
405	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Alat Pengangkat	(150.150.000,00)	0,00	0,00	(150.150.000,00)
406	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Mesin Proses	(6.225.000,00)	(3.000.000,00)	0,00	(9.225.000,00)
407	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Apung-Mesin Proses Apung	(18.335.416,00)	(59.745.577,00)	(43.229.166,00)	(34.851.827,00)
408	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Electric Generating Set	(2.342.209.468,00)	(1.170.290.567,00)	(1.152.671.497,00)	(2.359.828.538,00)
409	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Pompa	(148.404.695,00)	(290.469.791,15)	(172.951.699,00)	(265.922.787,15)
410	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Mesin Bor	(6.041.667,00)	(9.222.916,00)	(5.264.583,00)	(10.000.000,00)
411	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan	(7.012.333,00)	(2.473.084,00)	(583.417,00)	(8.902.000,00)
412	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Air Port Maintenance Equipment/Alat Bantu Penerbangan	(10.834,00)	0,00	0,00	(10.834,00)
413	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	(375.000,00)	(119.792,00)	(119.792,00)	(375.000,00)
414	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	(15.116.261.500,00)	(4.778.503.322,90)	(3.584.567.609,60)	(16.310.197.213,30)
415	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	(1.394.409.930,00)	(2.527.731.767,00)	(1.088.124.132,00)	(2.834.017.565,00)
416	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	(1.715.305.889,00)	(2.023.325.828,33)	(689.621.659,00)	(3.049.010.058,33)
417	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	(12.454.940.809,13)	(8.348.433.355,60)	(6.878.782.902,19)	(13.924.591.262,54)
418	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	(34.900.000,00)	0,00	0,00	(34.900.000,00)
419	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	(11.345.696.494,00)	(15.602.407.807,33)	(12.277.805.067,00)	(14.670.299.234,33)
420	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	(410.990.000,00)	0,00	(192.190.000,00)	(218.800.000,00)
421	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	(35.933.255,00)	(195.170.283,00)	(69.782.379,00)	(161.321.159,00)
422	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	(72.082.397,00)	(213.481.240,34)	(56.049.674,00)	(229.513.963,34)
423	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya	(5.562.500,00)	(22.709.375,00)	(12.671.875,00)	(15.600.000,00)
424	Akumulasi Penyusutan Alat Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang	(1.259.229.469,00)	(292.844.062,00)	(146.422.031,00)	(1.405.651.500,00)
425	Akumulasi Penyusutan Alat Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	106.250,00	(9.560.000,00)	0,00	(9.453.750,00)
426	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang	(110.478.520,00)	(151.265.960,00)	(111.945.480,00)	(149.799.000,00)
427	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	(18.980.916,00)	(61.324.251,00)	(19.459.167,00)	(60.846.000,00)
428	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)	(886.458,00)	(3.477.291,00)	(2.353.749,00)	(2.010.000,00)
429	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik	(638.791.040,00)	(330.447.175,33)	(169.152.581,00)	(800.085.634,33)
430	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Service	119.792,00	(119.792,00)	(500.000,00)	500.000,00

No	Uraian	Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2024	Mutasi		Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2025
			Tambah	Kurang	
431	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pengangkat Bermesin	(87.500,00)	0,00	0,00	(87.500,00)
432	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu	(33.436.708,00)	(16.522.880,33)	(10.076.751,00)	(39.882.837,33)
433	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pabrik Es	(47.368.960,00)	(64.238.079,50)	(32.257.456,00)	(79.349.583,50)
434	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik	(156.350.355,00)	0,00	0,00	(156.350.355,00)
435	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Service	(500.000,00)	0,00	0,00	(500.000,00)
436	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Pengangkat	(571.875,00)	(2.911.250,00)	(1.645.625,00)	(1.837.500,00)
437	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Kerja	(27.541.667,00)	(516.666,00)	(1.058.333,00)	(27.000.000,00)
438	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Besi	(2.149.688,00)	(3.230.624,00)	(2.015.312,00)	(3.365.000,00)
439	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Ukur, Gip, dan Feeting	(378.104,00)	(196.661,33)	(574.765,33)	0,00
440	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Bengkel Khusus Peladam	(85.853.295,00)	(88.203.181,66)	(80.604.111,83)	(93.452.364,83)
441	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Universal	(180.642.915,00)	(76.816.576,70)	(34.954.014,40)	(222.505.477,30)
442	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Kalibrasi	(9.580.887,00)	(43.854.421,50)	(27.969.449,00)	(25.465.859,50)
443	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Universal Tester	(79.319.166,00)	(8.204.168,00)	(4.233.334,00)	(83.290.000,00)
444	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur/Pembanding	(91.684.698,00)	(874.825.430,03)	(522.514.800,99)	(443.995.327,04)
445	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Lain-Lain	(14.701.147,00)	(36.408.750,30)	(35.382.108,00)	(15.727.789,30)
446	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Timbangan/Biasa	(6.175.095,00)	(7.927.769,66)	(5.102.864,67)	(8.999.999,99)
447	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Anak Timbangan/Biasa	(2.687.500,00)	(312.500,00)	0,00	(3.000.000,00)
448	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Specific Set	0,00	(135.416,67)	0,00	(135.416,67)
449	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Pengukur Penglihatan	(7.648.732,00)	(16.116.303,28)	(24.152.785,28)	387.750,00
450	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya	(7.119.747,00)	(15.994.914,80)	(4.765.313,40)	(18.349.348,40)
451	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	(293.257.750,00)	(29.604.000,00)	0,00	(322.861.750,00)
452	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	(8.116.875,00)	(32.662.980,00)	(3.871.125,00)	(36.908.730,00)
453	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	(420.990.916,00)	(539.857.772,33)	(8.104.033,00)	(952.744.655,33)
454	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Laboratorium Pertanian	(206.490.907,00)	(282.304.131,52)	(149.487.708,83)	(339.307.329,69)
455	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Produksi Perikanan	(139.700.000,00)	(2.518.000,00)	0,00	(142.218.000,00)
456	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan	(1.066.678.226,00)	(7.781.125,53)	(251.124.167,00)	(823.335.184,53)
457	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Ketik	(23.140.000,00)	(9.680.000,00)	(9.680.000,00)	(23.140.000,00)
458	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah	(239.442.641,00)	(415.894.620,33)	(415.715.969,00)	(239.621.292,33)
459	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	(111.588.333,00)	(3.941.666,50)	(1.608.333,00)	(113.921.666,50)
460	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	(6.622.213.546,44)	(2.044.208.104,18)	(1.410.148.144,68)	(7.256.273.505,94)
461	*Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya*	(7.690.446.587,97)	(2.173.042.174,63)	(1.280.382.473,87)	(8.583.106.288,73)
462	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	(19.087.712.450,85)	(6.427.261.215,64)	(3.601.105.318,91)	(21.913.868.347,58)
463	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu	(33.456.250,00)	(206.250,00)	(32.812,50)	(33.629.687,50)
464	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	(603.506.778,00)	(118.930.359,35)	(89.938.358,10)	(632.498.779,25)
465	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	(5.554.545.281,75)	(1.794.700.097,72)	(1.472.601.093,67)	(5.876.644.285,80)
466	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	(500.819.643,00)	(327.744.496,08)	(307.275.939,33)	(521.288.199,75)
467	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	(7.379.093.455,00)	(1.410.933.169,51)	(569.634.972,70)	(8.220.391.651,81)
468	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	(173.595.682,00)	(119.580.334,25)	(113.560.017,00)	(179.615.999,25)
469	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	(949.373.966,81)	(254.372.180,47)	(115.995.598,40)	(1.087.750.548,88)
470	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat	(270.272.459,00)	(16.049.133,08)	(7.499.306,00)	(278.822.286,08)
471	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	(2.235.309.047,94)	(606.475.964,61)	(295.773.128,60)	(2.546.011.883,95)
472	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat	(318.027.664,00)	(13.682.201,00)	(8.279.477,00)	(323.430.388,00)
473	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	(124.389.382,00)	(11.980.405,50)	(1.827.705,00)	(134.542.082,50)
474	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	(78.373.541,00)	(1.355.000,00)	(346.500,00)	(79.382.041,00)
475	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	(1.755.704.199,99)	(542.577.343,23)	(391.070.585,00)	(1.907.210.958,22)
476	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	(556.238.855,00)	(113.446.847,11)	(33.442.659,20)	(636.243.042,91)
477	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	(1.128.126.978,00)	(668.888.260,70)	(255.731.491,80)	(1.541.283.746,90)
478	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Cetak	(97.758.158,00)	(93.392.965,88)	(59.862.362,00)	(131.288.761,88)
479	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	(750.000,00)	(1.150.000,00)	0,00	(1.900.000,00)
480	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Alat Studio Lainnya	(12.035.217,00)	(25.791.053,67)	(6.488.933,00)	(31.337.337,67)
481	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	(281.622.691,00)	(307.444.917,50)	(148.125.060,00)	(440.942.548,50)
482	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB	(87.106.248,00)	(67.003.504,00)	(32.353.752,00)	(121.756.000,00)
483	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM	(18.815.625,00)	0,00	0,00	(18.815.625,00)
484	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio VHF	(12.187.084,00)	(2.660.554,00)	(1.408.916,00)	(13.438.722,00)
485	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio UHF	(582.750,00)	(3.263.400,00)	(699.300,00)	(3.146.850,00)
486	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Sosial	(278.491.509,00)	(15.214.999,00)	(9.621.508,00)	(284.085.000,00)
487	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat-Alat Sandi	(1.714.063,00)	(3.390.104,00)	(1.354.167,00)	(3.750.000,00)
488	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Satelit	(1.577.083,00)	(6.923.438,00)	(3.003.542,00)	(5.496.979,00)
489	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya	(582.750,00)	(10.072.405,00)	(9.622.405,00)	(1.032.750,00)
490	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar VHF/FM	(375.000,00)	0,00	0,00	(375.000,00)
491	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar SHF	(1.500.000,00)	0,00	0,00	(1.500.000,00)
492	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena MF/MW	(1.152.500,00)	0,00	0,00	(1.152.500,00)
493	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena VHF/FM	(2.437.500,00)	(375.000,00)	(187.500,00)	(2.625.000,00)
494	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena SHF/Parabola	(10.015.417,00)	(80.290.610,66)	(1.994.083,00)	(88.311.944,66)
495	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Switcher Antena	(924.511,00)	(1.631.496,00)	(815.748,00)	(1.740.259,00)
496	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Tinggi	(312.500,00)	(2.033.333,33)	(287.500,00)	(2.058.333,33)
497	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima dan Pengirim Gambar ke Permukaan	(5.533.972,00)	(14.777.194,00)	(5.952.756,00)	(14.358.410,00)
498	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga	(81.138.437,00)	(214.119.126,00)	(86.437.563,00)	(208.820.000,00)
499	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komunikasi Navigasi-Very High Frequence Omni Range (VOR)	(750.000,00)	0,00	0,00	(750.000,00)
500	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	(22.305.848.593,00)	(27.122.312.462,18)	(20.040.286.516,27)	(29.387.874.538,91)
501	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi	(3.706.713.634,00)	(5.315.268.407,83)	(4.581.029.215,50)	(4.440.952.826,33)
502	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Keluarga Berencana	(136.755.030,00)	(237.490.639,00)	(205.917.915,00)	(168.327.754,00)
503	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah	(7.235.719.762,00)	(7.513.355.084,62)	(7.439.465.532,82)	(7.309.609.313,80)

No	Uraian	Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2024	Mutasi		Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2025
			Tambah	Kurang	
504	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	(9.396.490.622,00)	(10.316.474.422,70)	(9.219.099.616,17)	(10.493.865.428,53)
505	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran THT	(733.034.707,00)	(1.374.157.991,20)	(1.161.560.604,21)	(945.632.093,99)
506	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Mata	(107.640.048,00)	(239.883.990,00)	(218.831.778,00)	(128.692.260,00)
507	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	(5.040.907.387,91)	(3.842.851.820,41)	(1.907.064.963,62)	(6.976.694.244,70)
508	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kamar Jenazah/Mortuary	(770.312,00)	(437.108,00)	(1.207.420,00)	0,00
509	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anak	(1.697.196.323,00)	(2.527.369.820,50)	(1.637.444.168,67)	(2.587.121.974,83)
510	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Poliklinik	(302.324.861,00)	(165.676.600,00)	(247.055.839,00)	(220.945.622,00)
511	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	(195.504.854,00)	(92.497.997,50)	(69.546.556,00)	(218.456.295,50)
512	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)	(199.291.600,00)	(742.054.990,67)	(356.619.322,00)	(584.727.268,67)
513	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jantung	(237.457.120,00)	(618.555.715,33)	(313.383.551,00)	(542.629.284,33)
514	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radiodiagnostic	(2.051.372.717,00)	(5.983.778,00)	(1.278.495.625,00)	(778.860.870,00)
515	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Transfusi Darah	(38.768.644,00)	(78.637.672,67)	(38.892.080,00)	(78.514.236,67)
516	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Nuklir	(877.401.529,00)	(439.804.991,67)	(87.862.555,67)	(1.229.343.965,00)
517	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin	(5.955.468,00)	(30.174.376,00)	(16.913.532,00)	(19.216.312,00)
518	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gawat Darurat	(397.416.125,00)	(619.499.918,17)	(441.326.592,00)	(575.589.451,17)
519	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Ortopedi	(1.779.850,00)	(8.312.400,00)	(10.092.250,00)	0,00
520	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICU	(11.618.531,00)	(25.818.958,67)	(13.167.669,00)	(24.269.820,67)
521	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICCU	0,00	(660.854.381,27)	(452.878.016,97)	(207.976.364,30)
522	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Jantung	(14.420.593,00)	0,00	0,00	(14.420.593,00)
523	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anestesi	(327.076.048,00)	(276.756.655,00)	0,00	(603.832.703,00)
524	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya	(55.818.317,00)	0,00	0,00	(55.818.317,00)
525	Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Laut	(6.875.000,00)	(3.125.000,00)	0,00	(10.000.000,00)
526	Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Kepolisian	(44.310.101,00)	0,00	0,00	(44.310.101,00)
527	Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Olahraga	(203.532.093,00)	(31.692.772,00)	(18.197.948,00)	(217.026.917,00)
528	Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	(3.606.785.268,00)	(5.939.552.817,56)	(3.694.668.261,52)	(5.851.669.824,04)
529	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan	(2.415.105,00)	(10.713.792,00)	(13.488.272,00)	359.375,00
530	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan	(660.641.896,00)	(582.688.837,33)	(294.825.643,00)	(948.505.090,33)
531	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrokimia	(552.867,00)	(508.633,00)	0,00	(1.061.500,00)
532	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia	(266.241.083,00)	(506.323.222,67)	(500.698.917,00)	(271.865.388,67)
533	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik	(989.676,00)	(899.606,66)	(2.075.162,67)	185.880,01
534	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	(2.997.664.386,00)	(807.420.238,50)	(471.444.508,00)	(3.333.640.116,50)
535	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikrobiologi	(2.300.504.364,00)	(2.836.940.863,67)	(2.547.841.228,00)	(2.589.603.999,67)
536	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia	(483.476.069,00)	(692.321.361,99)	(389.039.447,00)	(786.757.983,99)
537	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Patologi	(553.550.506,00)	(977.567.471,67)	(720.151.658,00)	(810.966.319,67)
538	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Imunologi	(7.689.950,00)	(74.816.686,00)	(43.955.511,00)	(38.551.125,00)
539	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hematologi	(335.417,00)	(700.000,00)	(1.035.417,00)	0,00
540	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Film	(114.838.464,00)	(41.299.707,00)	(25.576.151,00)	(130.562.020,00)
541	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Makanan	(237.023.853,00)	(70.930.359,67)	(43.989.840,00)	(263.964.372,67)
542	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Farmasi	(562.751.631,00)	(485.203.995,04)	(332.730.752,04)	(715.224.874,00)
543	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika	(45.172.751,00)	(44.308.029,00)	(34.175.780,00)	(55.305.000,00)
544	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrodinamika	0,00	(822.135,00)	0,00	(822.135,00)
545	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pembuatan Pola	(4.833.332,00)	(920.487,33)	(4.423.819,33)	(1.330.000,00)
546	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pelapisan Logam	(450.000,00)	0,00	(450.000,00)	0,00
547	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas	(7.202.053,00)	(6.761.736,00)	(13.763.789,00)	(200.000,00)
548	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil	(45.633.228,00)	(12.856.772,00)	0,00	(58.490.000,00)
549	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian	(287.405.618,00)	(319.624.950,33)	(35.692.865,00)	(571.337.703,33)
550	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Elektronika dan Daya	(1.321.759,00)	(1.267.811,00)	0,00	(2.589.570,00)
551	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Energi Surya	(504.251.667,00)	(104.166,00)	(52.083,00)	(504.303.750,00)
552	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Oseanografi	(2.498.480,00)	(7.185.792,00)	(5.614.272,00)	(4.070.000,00)
553	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi Perairan	(5.237.500,00)	(9.020.313,00)	(1.437.500,00)	(12.820.313,00)
554	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi	(91.955.800,00)	0,00	0,00	(91.955.800,00)
555	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Geofisika	(1.769.844,00)	(2.928.164,00)	(2.538.438,00)	(2.159.570,00)
556	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia	(21.701.474,00)	(30.545.885,66)	(8.943.749,00)	(43.303.610,66)
557	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Hematologi dan Urinalisis	(15.673.438,00)	(59.546.639,50)	(32.007.864,00)	(43.212.213,50)
558	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain	(91.736.331,00)	(293.608.607,53)	(221.441.394,39)	(163.903.544,14)
559	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Populasi	(8.489.479,00)	(8.140.000,00)	(6.189.792,00)	(10.439.687,00)
560	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Analytical Instrument	(6.540.024,00)	(10.968.272,00)	(4.688.586,00)	(12.819.710,00)
561	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Laboratory Safety Equipment	(10.508.333,00)	0,00	(10.508.333,00)	0,00
562	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Bahasa Indonesia	(69.531.634,00)	(9.447.620,00)	(30.469.078,00)	(48.510.176,00)
563	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Matematika	(360.657.028,00)	(20.002.240,33)	(70.578.478,00)	(310.080.790,33)
564	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar	(113.250.153,00)	(6.984.894,00)	(48.524.447,00)	(71.710.600,00)
565	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan	(204.853.414,00)	(16.114.661,16)	(17.906.410,50)	(203.061.664,66)
566	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah	(210.753.324,00)	(3.742.748,00)	(31.323.983,00)	(183.172.089,00)
567	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Atas	(140.468.329,00)	0,00	0,00	(140.468.329,00)
568	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPS	(70.601.174,00)	0,00	(35.740.286,00)	(34.860.888,00)
569	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Agama	(22.506.352,00)	(14.866.466,66)	(16.140.941,67)	(21.231.876,99)
570	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan	(126.684.879,00)	(343.750,00)	(6.153.185,00)	(121.075.444,00)
571	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian	(278.384.217,00)	(345.551.836,00)	(176.327.050,00)	(447.609.003,00)
572	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga	(140.801.438,99)	0,00	0,00	(140.801.438,99)

No	Uraian	Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2024	Mutasi		Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2025
			Tambah	Kurang	
573	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:PKN	(19.088.469,00)	(2.862.502,00)	(4.881.251,00)	(17.069.720,00)
574	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, dan Tuna Rungu)	(94.875,00)	(164.450,00)	(354.200,00)	94.875,00
575	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Kejuruan	(2.389.584,00)	(1.320.832,00)	(1.010.416,00)	(2.700.000,00)
576	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga PAUD/TK	(120.774.306,00)	(58.804.907,15)	(90.719.405,15)	(88.859.808,00)
577	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	0,00	0,00	(9.944.720,00)	9.944.720,00
578	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Modular Counting and Scientific Electronic	(36.727.712,00)	(106.631.206,00)	(40.810.538,50)	(102.548.379,50)
579	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Recorder Display	(12.745.833,00)	(3.941.668,00)	(1.970.834,00)	(14.716.667,00)
580	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-System/Power Supply	(44.387.654,00)	(59.086.438,50)	(28.040.490,00)	(75.433.602,50)
581	Akumulasi Penyusutan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Kesehatan Kerja	(7.367.499,00)	(2.225.002,00)	(3.592.501,00)	(6.000.000,00)
582	Akumulasi Penyusutan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Proteksi Lingkungan	(34.177.604,00)	(24.344.792,00)	(12.172.396,00)	(46.350.000,00)
583	Akumulasi Penyusutan Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory-Non Destructive Test (NDT) Device	(8.338.230,00)	(37.917.000,00)	(40.040.230,00)	(6.215.000,00)
584	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Udara	(50.528.957,00)	(130.226.250,00)	(76.255.207,00)	(104.500.000,00)
585	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran	(10.816.875,00)	(42.330.000,00)	(28.046.875,00)	(25.100.000,00)
586	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Penunjang	(45.211.125,00)	(210.642.422,67)	(139.888.159,00)	(115.965.388,67)
587	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Pemesinan:Model Ship Workshop	(20.178.125,00)	0,00	0,00	(20.178.125,00)
588	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-MOB	(625.000,00)	(3.015.625,50)	(1.010.417,00)	(2.630.208,50)
589	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Peralatan Laboratorium Hydrodinamica Lainnya	(887.907,00)	(3.236.865,00)	(4.946.907,00)	822.135,00
590	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik	(52.740.088,00)	(229.730.920,93)	(110.472.679,60)	(171.998.329,33)
591	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu	(379.688,00)	(770.624,00)	(1.150.312,00)	0,00
592	Akumulasi Penyusutan Senjata Api-Senjata Lain-Lain	(2.766.050,00)	(3.632.944,80)	0,00	(6.398.994,80)
593	Akumulasi Penyusutan Persenjataan Non Senjata Api-Alat Keamanan	(62.489.582,00)	(79.664.584,00)	(25.779.167,00)	(116.374.999,00)
594	Akumulasi Penyusutan Persenjataan Non Senjata Api-Non Senjata Api	(6.818.201,00)	0,00	0,00	(6.818.201,00)
595	Akumulasi Penyusutan Persenjataan Non Senjata Api-Alat Penjinak Bahan Peledak (Aljihandak)	(5.700.000,00)	(7.800.000,00)	(3.900.000,00)	(9.600.000,00)
596	Akumulasi Penyusutan Persenjataan Non Senjata Api-Persenjataan Non Senjata Api Lainnya	(153.333.566,00)	(111.803.780,00)	(71.762.661,00)	(193.374.685,00)
597	Akumulasi Penyusutan Alat Khusus Kepolisian-Alat Khusus Kepolisian	0,00	(1.039.563,00)	0,00	(1.039.563,00)
598	Akumulasi Penyusutan Alat Khusus Kepolisian-Alat Dalmas/Alat Dalkhura	(21.404.519,00)	0,00	0,00	(21.404.519,00)
599	Akumulasi Penyusutan Alat Khusus Kepolisian-Alat Wanteror (Perlawanan Teror)	(5.529.680,00)	0,00	0,00	(5.529.680,00)
600	Akumulasi Penyusutan Alat Khusus Kepolisian-Alsus Fotografi Kepolisian	(82.896.449,00)	(2.944.000,00)	0,00	(85.840.449,00)
601	Akumulasi Penyusutan Alat Khusus Kepolisian-Alsus Daktiloskopi	(277.500,00)	(790.875,00)	(379.250,00)	(689.125,00)
602	Akumulasi Penyusutan Alat Khusus Kepolisian-Instrumen Analisis Laboratorium Forensik	(750.000,00)	(4.875.000,00)	(2.437.500,00)	(3.187.500,00)
603	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Komputer Jaringan	(73.267.806,00)	(150.466.047,70)	(127.439.343,20)	(96.294.510,50)
604	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	(32.661.131.781,65)	(12.462.800.077,45)	(5.157.818.692,75)	(39.966.113.166,35)
605	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	(1.252.982.540,00)	(399.165.848,03)	(204.102.716,00)	(1.448.045.672,03)
606	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	(279.459.766,77)	(24.354.499,18)	(87.684.301,95)	(216.129.964,00)
607	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	(324.308.611,00)	(288.889,00)	(2.450.000,00)	(322.147.500,00)
608	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	(4.689.445.399,32)	(1.306.751.749,91)	(1.089.323.416,11)	(4.906.873.733,12)
609	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	(3.919.075.073,00)	(434.743.443,79)	(338.183.296,54)	(4.015.635.220,25)
610	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	(329.912.339,00)	(489.261.826,31)	(461.852.452,90)	(357.321.712,41)
611	Akumulasi Penyusutan Alat Pengeboran Non Mesin-Pantek	(4.415.223,00)	(52.066.928,00)	(9.549.964,00)	(46.932.187,00)
612	Akumulasi Penyusutan Sumur-Sumur Pemboran	(1.536.750,00)	(13.886.500,00)	(5.293.250,00)	(10.130.000,00)
613	Akumulasi Penyusutan Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya	(950.000,00)	(10.750.000,00)	(100.000,00)	(11.600.000,00)
614	Akumulasi Penyusutan Alat SAR-Alat Penolong	(47.750,00)	(841.280,00)	0,00	(889.030,00)
615	Akumulasi Penyusutan Alat SAR-Alat Pendukung Pencarian	(1.461.962.239,00)	(10.267.800,00)	(1.843.600,00)	(1.470.386.439,00)
616	Akumulasi Penyusutan Alat SAR-Alat Kerja Bawah Air	(3.940.625,00)	(8.163.889,00)	(3.080.000,00)	(9.024.514,00)
617	Akumulasi Penyusutan Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara	(80.306.166,00)	0,00	0,00	(80.306.166,00)
618	Akumulasi Penyusutan Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara	(181.006.886,00)	0,00	0,00	(181.006.886,00)
619	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan	(444.440,00)	(1.311.120,00)	(255.560,00)	(1.500.000,00)
620	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Percontohan	(5.969.511,00)	(1.597.224,00)	(798.612,00)	(6.768.123,00)
621	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-Centrifuge for Solid Liquid	(13.526.584,00)	0,00	0,00	(13.526.584,00)
622	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-Solid Material Handling Equipment	(8.049.374,00)	(30.742.284,67)	(32.561.658,67)	(6.230.000,00)
623	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar	(814.550.267,00)	(542.010.631,60)	(235.706.067,00)	(1.120.854.831,60)
624	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan	(200.798.672,00)	(47.710.144,20)	(30.783.325,37)	(217.725.490,83)
625	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Senam	(83.819.830,00)	(92.106.269,60)	(55.264.243,60)	(120.661.856,00)
626	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya	(62.390.544,00)	(9.168.861,50)	(894.755,00)	(70.664.650,50)
627	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	(39.444.814.207,53)	(14.410.346.903,45)	(9.567.703.025,72)	(44.287.458.085,26)
628	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	(563.175.160,00)	(140.528.074,50)	(111.232.434,29)	(592.470.800,21)
629	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Untuk Bengkel/Hanggar	(54.872.525,00)	(9.579.500,00)	(4.623.150,00)	(59.828.875,00)
630	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi	(1.742.919.446,00)	(1.107.582.682,33)	(772.660.386,17)	(2.077.841.742,16)
631	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium	(3.302.788.422,00)	(1.697.431.796,88)	(1.156.792.852,86)	(3.843.427.366,02)
632	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	(52.180.965.441,00)	(85.767.092.242,07)	(76.689.006.809,33)	(61.259.050.873,74)
633	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	(1.090.300.681,00)	(292.663.043,71)	(256.545.407,60)	(1.126.418.317,11)
634	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	(937.895.450,00)	(450.564.420,50)	(311.980.095,78)	(1.076.479.774,72)
635	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	(68.312.331.936,28)	(22.751.083.336,90)	(15.081.533.947,03)	(75.981.881.326,15)
636	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	(364.042.553,00)	(423.093.895,60)	(365.683.536,44)	(421.452.912,16)
637	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	(11.132.614.543,00)	(2.366.972.057,70)	(1.012.502.529,93)	(12.487.084.070,77)
638	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	(227.079.087,00)	(96.164.637,44)	(54.607.665,99)	(268.636.058,45)
639	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/Pool	(241.476.760,00)	(60.402.127,37)	(38.420.760,67)	(263.458.126,70)
640	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pemotong Hewan	(209.907.486,00)	(53.547.288,00)	(29.162.514,00)	(234.292.260,00)
641	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan	(6.532.048.894,00)	(2.279.411.523,21)	(1.226.943.164,78)	(7.584.517.252,43)
642	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	(1.316.088.604,00)	(284.843.695,32)	(106.767.599,15)	(1.494.164.700,17)

No	Uraian	Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2024	Mutasi		Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2025
			Tambah	Kurang	
643	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka	(119.067.505,00)	0,00	(559.202,96)	(118.508.302,04)
644	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Industri	(11.838.375,00)	(49.981.429,75)	(10.616.881,05)	(51.202.923,70)
645	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan	(37.840.964,00)	(15.544.099,70)	(19.239.649,94)	(34.145.413,76)
646	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	(8.727.441.991,00)	(5.814.544.733,35)	(4.189.953.579,48)	(10.352.033.144,87)
647	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	(1.790.522.927,00)	(1.163.534.694,01)	(399.757.848,81)	(2.554.299.772,20)
648	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pabrik	(220.764.058,00)	(46.583.242,00)	(22.463.065,45)	(244.884.234,55)
649	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Stasiun Bus	(58.567.792,00)	0,00	(50.316,00)	(58.517.476,00)
650	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Taman	(413.126.045,00)	(250.354.483,15)	(157.171.190,79)	(506.309.337,36)
651	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	(1.947.070.212,00)	(16.590.833,00)	(44.908.054,00)	(1.918.752.991,00)
652	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	(2.182.014.099,00)	(1.274.083.526,40)	(883.333.221,86)	(2.572.764.403,54)
653	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	(1.458.661.908,00)	(319.239.502,01)	(136.395.615,26)	(1.641.505.794,75)
654	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III	(2.359.947.674,00)	(3.183.857.118,89)	(2.597.799.839,96)	(2.946.004.952,93)
655	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/ Tempat Peristirahatan	(246.279.684,00)	(61.715.516,00)	(29.745.279,14)	(278.249.920,86)
656	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Tidak Bersusun	0,00	(4.360.214.087,70)	0,00	(4.360.214.087,70)
657	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	(2.308.809.214,00)	(5.851.019.456,29)	(4.386.213.845,40)	(3.773.614.824,89)
658	Akumulasi Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi	(9.500.000,00)	0,00	0,00	(9.500.000,00)
659	Akumulasi Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu	(1.992.784.231,00)	(963.316.953,97)	(592.141.577,62)	(2.363.959.607,35)
660	Akumulasi Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Bangunan Peninggalan	(163.685.742,00)	(103.273.518,60)	(46.137.211,36)	(220.822.049,24)
661	Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai	(9.125.000,00)	(1.437.500,00)	(10.562.500,00)	0,00
662	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Administrasi	(135.071.257,00)	(83.473.005,81)	(24.610.879,16)	(193.933.383,65)
663	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Pagar	(1.276.589.328,00)	(2.230.438.773,30)	(1.695.277.528,94)	(1.811.750.572,36)
664	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Kabupaten	(129.641.807.641,48)	(401.461.861.374,70)	(277.378.870.664,51)	(253.724.798.351,67)
665	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Kota	(38.755.112,00)	(148.717.862,40)	(118.591.420,15)	(68.881.554,25)
666	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Desa	(84.392.959.720,84)	(71.241.242.630,91)	(58.840.177.645,32)	(96.794.024.706,43)
667	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Khusus	(1.434.335.033,00)	(1.232.454.901,42)	(1.065.657.831,82)	(1.601.132.102,60)
668	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Lainnya	(6.776.350,00)	(34.223.112,20)	(34.223.112,20)	(6.776.350,00)
669	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Nasional	(2.744.458.998,00)	(1.388.611.002,00)	(1.171.081.002,00)	(2.961.988.998,00)
670	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Provinsi	(11.390.818.777,00)	(1.998.904.350,75)	(1.228.118.116,85)	(12.161.605.010,90)
671	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	(11.162.186.709,00)	(9.985.607.610,50)	(2.572.728.153,23)	(18.575.066.166,27)
672	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Kota	(2.973.850,00)	(1.413.965.192,20)	(1.413.965.192,20)	(2.973.850,00)
673	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Desa	(22.340.852.016,00)	(11.687.308.672,60)	(9.494.933.398,44)	(24.533.227.290,16)
674	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan Penyeberangan	(450.046.371,00)	(78.801.962,40)	(52.861.579,40)	(475.986.754,00)
675	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	(4.995.797.038,00)	(154.662.236,80)	0,00	(5.150.459.274,80)
676	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengambilan Irigasi	(19.404.686.028,00)	(53.942.363.573,65)	(23.993.336.146,00)	(49.353.713.455,65)
677	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	(13.429.523.935,00)	(15.660.698.525,40)	(15.655.036.088,60)	(13.435.186.371,80)
678	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi	(20.793.226.451,00)	(30.913.423.468,63)	(25.151.900.446,32)	(26.554.749.473,31)
679	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengaman Irigasi	(1.464.718.025,00)	(2.376.219.725,24)	(1.825.121.091,79)	(2.015.816.658,45)
680	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi	(3.659.690.145,00)	(5.357.631.170,84)	(4.636.273.989,21)	(4.381.047.326,63)
681	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Waduk Pasang Surut	(216.435.714,00)	(57.667.443,00)	(52.707.143,00)	(221.396.014,00)
682	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	(136.173.522,00)	(306.348.600,00)	(159.746.125,60)	(282.775.996,40)
683	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Waduk Pengembangan Rawa	0,00	(6.572.851.819,60)	(6.572.851.819,60)	0,00
684	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa	(60.574.479,00)	(1.876.966.687,60)	(74.313.021,00)	(1.863.228.145,60)
685	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa	(74.128.000,00)	(1.575.414.686,60)	(77.744.000,00)	(1.571.798.686,60)
686	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa	(38.712.718,00)	(61.731.099,60)	(61.731.099,60)	(38.712.718,00)
687	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa	(866.389.082,00)	(998.368.235,50)	(998.368.235,50)	(866.389.082,00)
688	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai	(354.694.742,00)	(17.538.819.527,80)	(361.223.258,00)	(17.532.291.011,80)
689	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	(13.858.334.048,00)	(16.882.028.151,30)	(16.464.856.189,30)	(14.275.506.010,00)
690	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	(14.105.851.350,00)	(17.503.619.668,85)	(13.133.672.341,18)	(18.475.798.677,67)
691	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai	(1.452.850.554,00)	(1.746.086.446,00)	(1.746.086.446,00)	(1.452.850.554,00)
692	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	(39.757.866,00)	(296.086.759,97)	(59.722.922,40)	(276.121.703,57)
693	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air	0,00	(11.920.579,40)	(11.920.579,40)	0,00
694	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air	(648.767.994,00)	(867.894.848,41)	(642.229.004,00)	(874.433.838,41)
695	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air	0,00	0,00	0,00	0,00
696	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air	0,00	0,00	0,00	0,00
697	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku	(3.609.740.198,00)	(133.250.034,65)	0,00	(3.742.990.232,65)
698	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku	(1.429.802.286,00)	(7.004.073.599,41)	(1.491.038.314,64)	(6.942.837.570,77)
699	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	(2.575.277.140,00)	(968.552.485,00)	(968.552.485,00)	(2.575.277.140,00)
700	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	(4.753.673.046,00)	(4.633.643.043,60)	(4.633.643.043,60)	(4.753.673.046,00)
701	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	(18.849.680,00)	(2.791.769.183,16)	(2.069.474.090,56)	(741.144.772,60)
702	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor	(280.695.458,00)	(718.685.190,17)	(258.297.995,00)	(741.082.653,17)
703	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor-Bangunan Waduk Air Kotor	0,00	(369.020.109,20)	0,00	(369.020.109,20)
704	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor	(214.347.882,00)	(213.636.731,50)	(213.636.731,50)	(214.347.882,00)
705	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor-Bangunan Pelengkap Air Kotor	(390.965.358,00)	(693.131.991,27)	(693.131.991,27)	(390.965.358,00)
706	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya	(132.428.542,00)	(566.794.158,00)	(503.228.458,00)	(195.994.242,00)
707	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Perpipaan	(57.928.750,00)	(325.928.845,17)	(321.568.873,00)	(62.288.722,17)
708	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dalam	(24.049.238,00)	(125.590.462,00)	(104.213.362,00)	(45.426.338,00)

No	Uraian	Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2024	Mutasi		Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2025
			Tambah	Kurang	
709	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	(7.066.303.722,00)	(17.143.452.299,82)	(10.926.835.937,52)	(13.282.920.084,30)
710	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik	(309.468.250,00)	0,00	0,00	(309.468.250,00)
711	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya	(537.726.221,00)	(3.778.141.900,32)	(2.654.561.080,21)	(1.661.307.041,11)
712	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	(224.536.821,00)	(539.712.358,00)	(269.856.179,00)	(494.393.000,00)
713	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis	0,00	0,00	0,00	0,00
714	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)	(165.328.854,00)	(33.096.134,44)	(15.029.896,00)	(183.395.092,44)
715	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	(820.376.101,00)	(1.654.605.094,81)	(1.171.456.034,80)	(1.303.525.161,01)
716	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)	0,00	0,00	0,00	0,00
717	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	(13.465.033,00)	(56.357.438,08)	(39.954.167,00)	(29.868.304,08)
718	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Pusat Pengatur Listrik	0,00	0,00	0,00	0,00
719	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengaman-Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif	(380.767.750,00)	(930.176.061,51)	(684.035.750,00)	(626.908.061,51)
720	Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum-Jaringan Pembawa	(57.928.750,00)	(11.596.388,89)	(5.266.250,00)	(64.258.888,89)
721	Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum-Jaringan Cabang Distribusi	(930.196.806,00)	(259.504.188,03)	(84.563.349,00)	(1.105.137.645,03)
722	Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya	(223.068.516,00)	(58.793.811,40)	(2.756.090,90)	(279.106.236,50)
723	Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi	(15.648.999,00)	(200.153.024,67)	(30.626.927,00)	(185.175.096,67)
724	Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	(335.955.708,00)	(495.846.986,63)	(429.288.497,00)	(402.514.197,63)
725	Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	(175.000,00)	0,00	0,00	(175.000,00)
726	Akumulasi Penyusutan Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di atas Tanah	(93.750,00)	(406.250,00)	(500.000,00)	0,00
727	Akumulasi Penyusutan Jaringan Gas-Jaringan Pipa Gas Transmisi	(59.842.266,00)	(160.053.469,95)	(96.369.834,00)	(123.525.901,95)
728	Akumulasi Penyusutan Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik	(1.057.720.956,00)	(1.103.304.285,07)	(831.559.622,00)	(1.329.465.619,07)
729	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi-Aset Tetap Dalam Renovasi	(1.053.915.046,00)	(236.358.273,33)	(180.571.645,83)	(1.109.701.673,50)
TOTAL		**1.322.010.125.591,49**	**(544.809.367.315,15)**	**(341.123.400.015,65)**	**1.118.324.158.291,99**

MAMUJU TENGAH, 2026
BUPATI KAB. MAMUJU TENGAH

H. ARSAL ARAS

Lampiran XIV : Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah
Nomor :
Tanggal : 2026

PEMERINTAHAN KAB. MAMUJU TENGAH
DAFTAR REKAPITULASI KONSTRUKSI DALAM PEKERJAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	SKPD	SALDO AWAL	MUTASI								REKLASIFIKASI / PENGHAPUSAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2025
			BERTAMBAH				BERKURANG					
			ASET TETAP LAINNYA	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	PERALATAN DAN MESIN	ASET TETAP LAINNYA	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	PERALATAN DAN MESIN		
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	4.333.727.512,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.322.727.512,40	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00
2	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	1.106.317.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008.317.700,00	0,00	0,00	0,00	98.000.000,00
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	14.339.645.669,76	0,00	0,00	4.883.739.035,00	0,00	0,00	0,00	150.765.000,00	0,00	0,00	19.072.619.704,76
4	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00
5	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	51.215.000,00	0,00	0,00	721.669.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.884.370,00
6	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	0,00	0,00	0,00	99.012.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.012.000,00
7	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	DINAS PERHUBUNGAN	254.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.770.000,00
9	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	6.899.758.500,00	0,00	11.510.317.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.410.075.918,00
10	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	9.004.404.387,51	0,00	241.341.464,49	0,00	0,00	0,00	9.245.745.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	SEKRETARIAT DAERAH	13.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.370.000,00
12	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	839.149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839.149.000,00
13	INSPEKTORAT	0,00	0,00	2.277.323.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.277.323.700,00
TOTAL		**36.845.057.769,67**	**0,00**	**14.028.982.582,49**	**5.704.420.405,00**	**0,00**	**0,00**	**14.576.791.064,40**	**150.765.000,00**	**0,00**	**0,00**	**41.850.904.692,76**

MAMUJU TENGAH, 2026
BUPATI KAB. MAMUJU TENGAH

H. ARSAL ARAS

Lampiran XV : Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah
Nomor :
Tanggal : 2026

PEMERINTAHAN KAB. MAMUJU TENGAH
DAFTAR REKAPITULASI ASET LAINNYA TAHUN ANGGARAN 2025

NO	SKPD	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	3.325.878.190,90	1.422.522.907,00	1.784.046.438,00	2.964.354.659,90
2	DINAS KESEHATAN	2.747.110,00	0,00	132.000,00	2.615.110,00
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	364.426.000,00	0,00	0,00	364.426.000,00
4	PUSKESMAS LARA	0,00	87.366.250,00	87.366.250,00	0,00
5	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	697.795.000,00	0,00	0,00	697.795.000,00
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	15.345.000,00	0,00	13.945.000,00	1.400.000,00
7	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	50.226.000,00	0,00	0,00	50.226.000,00
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	139.400.000,00	0,00	0,00	139.400.000,00
9	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	65.500.000,00	0,00	14.000.000,00	51.500.000,00
10	DINAS PERHUBUNGAN	11.880.000,00	0,00	11.880.000,00	0,00
11	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN	331.490.000,00	0,00	10.000.000,00	321.490.000,00
12	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	39.400.000,00	0,00	0,00	39.400.000,00
13	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	43.540.000,00	0,00	0,00	43.540.000,00
14	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	414.231.930,93	0,00	186.272.774,90	227.959.156,03
15	DINAS PERIKANAN	0,00	0,00	0,00	0,00
16	SEKRETARIAT DAERAH	2.389.107.530,00	0,00	2.300.000,00	2.386.807.530,00
17	SEKRETARIAT DPRD	974.830.231,06	0,00	0,00	974.830.231,06
18	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	565.136.500,00	0,00	10.000.000,00	555.136.500,00
19	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	50.576.820,00	0,00	33.776.147,00	16.800.673,00
20	INSPEKTORAT	116.730.505,02	0,00	4.922.625,00	111.807.880,02
21	KECAMATAN TOBADAK	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	0,00
TOTAL		**9.616.240.817,91**	**1.509.889.157,00**	**2.176.641.234,90**	**8.949.488.740,01**

MAMUJU TENGAH, 2026
BUPATI KAB. MAMUJU TENGAH

H. ARSAL ARAS

Lampiran XVI : Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah
Nomor : -
Tanggal : 17 Juli 2026

PEMERINTAHAN KAB. MAMUJU TENGAH
DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	TUJUAN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DIRENCANAKAN	SALDO AWAL	TRANSFER DARI KAS DAERAH	TRANSFER KE KAS DAERAH	SALDO AKHIR	SISA DANA YANG BELUM DICADANGKAN
Tidak ada data								

MAMUJU TENGAH, 2026
BUPATI KAB. MAMUJU TENGAH

H. ARSAL ARAS

Lampiran XVII : Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah
Nomor :
Tanggal : 2026

PEMERINTAHAN KAB. MAMUJU TENGAH
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	Utang PPh 21	47.762.786,00	3.958.181,00	23.881.393,00	27.839.574,00
2	Utang PPh 22	4.116.650,00	0,00	2.058.325,00	2.058.325,00
3	Utang PPh 23	67.901.646,00	11.243.614,00	33.950.823,00	45.194.437,00
4	Utang PPh Pasal 4 ayat (2)	14.128.750,00	0,00	7.064.375,00	7.064.375,00
5	Utang PPN Pusat	284.503.006,00	49.453.701,00	142.251.503,00	191.705.204,00
6	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron	0,00	59.970.807,71	0,00	59.970.807,71
8	Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PNS	0,00	136.225.610,00	0,00	136.225.610,00
9	Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	0,00	3.613.289,00	0,00	3.613.289,00
10	Utang Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD- Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	106.135.200,00	0,00	106.135.200,00	0,00
11	Utang Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD-Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.295.780.500,00	0,00	1.295.780.500,00	0,00
12	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	41.475.900,00	0,00	0,00	41.475.900,00
13	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Kimia	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Utang Belanja Barang Pakai Habis- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,00	9.920.000,00	9.920.000,00	0,00
16	Utang Belanja Barang Pakai Habis- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	0,00	10.650.000,00	10.650.000,00	0,00
17	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	0,00	1.510.000,00	1.510.000,00	0,00
18	Utang Belanja barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,00	45.027.560,00	45.027.560,00	0,00
19	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan-Obat-Obatan	118.633.607,00	294.905.400,00	118.633.607,00	294.905.400,00
20	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	15.873.000,00	0,00	15.873.000,00	0,00
21	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	86.272.941,91	0,00	86.272.941,91
22	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	14.954.000,00	0,00	0,00	14.954.000,00
23	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	0,00	239.109.561,00	239.109.561,00	0,00
24	Utang Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi-Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	42.601.500,00	0,00	42.540.500,00	61.000,00
25	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan	826.152.177,00	3.575.326,00	568.064.600,00	261.662.903,00
26	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Ahli	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	0,00	60.535.935,00	56.333.577,00	4.202.358,00
28	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	119.000,00	0,00	0,00	119.000,00
31	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Survei Permukaan Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Utang Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	0,00	6.420.000,00	0,00	6.420.000,00
33	Utang Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	150.414.339,00	150.414.339,00	0,00
35	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor Lainnya	0,00	94.840.000,00	94.840.000,00	0,00
36	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	34.449.000,00	34.449.000,00	0,00
40	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Saluran Pembuang Pasang Surut	93.561.000,00	0,00	93.561.000,00	0,00
41	Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeriâ€" Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0,00	26.258.388,00	26.258.388,00	0,00
42	Utang Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	409.000,00	0,00	0,00	409.000,00
43	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	0,00	745.247.345,00	0,00	745.247.345,00
44	Utang Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Utang Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	434.378.850,00	0,00	422.276.850,00	12.102.000,00
46	Utang Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Utang Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Utang Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	0,31	0,00	0,00	0,31
49	Utang Belanja Modal Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Utang Belanja Modal Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	55.507.650,00	0,00	55.507.650,00	0,00
51	Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah untuk Taman	12.890.000,00	0,00	0,00	12.890.000,00
52	Utang Belanja Modal Alat Bantu-Electric Generating Set	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Utang Belanja Modal Alat Bantu-Pompa	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Utang Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	12.440.000,00	0,00	0,00	12.440.000,00
55	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin- Peralatan Bengkel Khusus Peladam	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Utang Belanja Modal Alat Ukur-Alat Kalibrasi	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Utang Belanja Modal Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	0,00	0,00	0,00	0,00

NO	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
59	Utang Belanja Modal Alat Pengolahan-Alat Produksi Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Utang Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	0,00	16.317.000,00	16.317.000,00	0,00
61	Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Mebel	0,00	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00
62	Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Utang Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Utang Belanja Modal Alat Studio-Peralatan Studio Audio	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Utang Belanja Modal Alat Studio-Peralatan Cetak	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Transfusi Darah	5.883.507,00	0,00	0,00	5.883.507,00
69	Utang Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	3.669.029,00	0,00	0,00	3.669.029,00
70	Utang Belanja Modal Komputer Unit-Personal Computer	0,00	106.296.250,00	106.296.250,00	0,00
71	Utang Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	0,00	127.861.000,00	127.861.000,00	0,00
72	Utang Belanja Modal Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
73	Utang Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	0,00	29.292.500,00	29.292.500,00	0,00
74	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	13.146.000,00	0,00	13.146.000,00	0,00
75	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi	258.870.500,00	0,00	249.875.000,00	8.995.500,00
76	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	0,00	42.499.740,00	0,00	42.499.740,00
77	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	589.730.562,40	0,00	583.102.562,40	6.628.000,00
79	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	10.827.000,00	0,00	10.827.000,00	0,00
80	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	0,00	5.435.000,00	0,00	5.435.000,00
82	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	28.000.000,00	0,00	0,00	28.000.000,00
83	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	0,00	8.118.000,00	0,00	8.118.000,00
84	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	128.395.393,00	200,00	0,00	128.395.593,00
85	Utang Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda-Pagar	316.745.290,00	0,00	316.745.290,00	0,00
86	Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Kabupaten	594.665.250,00	259.846.850,00	140.205.450,00	714.306.650,00
87	Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Desa	361.120.000,00	0,00	361.120.000,00	0,00
88	Utang Belanja Modal Jalan Lainnya	51.210.000,00	0,00	0,00	51.210.000,00
89	Utang Belanja Modal Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	15.000.000,00	399.602.999,00	0,00	414.602.999,00
90	Utang Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa	139.727.000,00	0,00	139.727.000,00	0,00
91	Utang Belanja Modal Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	0,00	224.783.800,00	0,00	224.783.800,00
92	Utang Belanja Modal Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi	0,00	5.328.000,00	0,00	5.328.000,00
93	Utang Belanja Modal Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Utang Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	1.027.881.271,00	0,00	93.234.000,00	934.647.271,00
95	Utang Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	21.052.000,00	0,00	20.863.300,00	188.700,00
96	Utang Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	195.511.000,00	1.000,00	195.445.000,00	67.000,00
97	Utang Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	1.334.538,00	0,00	1.334.538,00	0,00
98	Utang Belanja Modal Bangunan Air Kotor-Bangunan Waduk Air Kotor	21.673.055,00	0,00	15.096.000,00	6.577.055,00
99	Utang Belanja Modal Bangunan Air Kotor-Bangunan Pelengkap Air Kotor	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Utang Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	375.102.727,00	187.906.462,00	375.102.727,00	187.906.462,00
101	Utang Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	0,00	72.767.048,00	0,00	72.767.048,00
102	Utang Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Audio Visual	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Utang Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Utang Belanja Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa	0,00	47.980.745.620,00	47.980.745.620,00	0,00
105	Utang Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**7.648.868.344,71**	**51.567.102.467,62**	**54.399.127.988,40**	**4.816.842.823,93**

MAMUJU TENGAH, 2026
BUPATI KAB. MAMUJU TENGAH

H. ARSAL ARAS

Lampiran XVIII : Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah
Nomor :
Tanggal : 2026

PEMERINTAHAN KAB. MAMUJU TENGAH
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MAMUJU TENGAH, 2026
BUPATI KAB. MAMUJU TENGAH

H. ARSAL ARAS

Lampiran XIX : Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah
Nomor :
Tanggal : 2026

PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH
DAFTAR SUB KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TA 2025
DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA

NO	NAMA SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH				JUMLAH YANG MASIH HARUS DIANGGARKAN KEMBALI PADA APBD BERIKUTNYA	DASAR HUKUM
			ANGGARAN	REALISASI	TAMBAH/KURANG	%		
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	37.381.963,00	35.863.718,00	(1.518.245,00)	95,94	1.518.245,00	
2	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12.235.126,00	12.235.126,00	0,00	100,00	0,00	
3	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	9.188.527,00	9.188.527,00	0,00	100,00	0,00	
4	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.234.352,00	10.234.352,00	0,00	100,00	0,00	
5	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	8.278.527,00	8.278.527,00	0,00	100,00	0,00	
6	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17.485.544,00	16.677.879,00	(807.665,00)	95,38	807.665,00	
7	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	147.425.815.707,11	150.932.408.758,00	3.506.593.050,89	102,38	(3.506.593.050,89)	
8	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.062.260,00	7.992.260,00	(70.000,00)	99,13	70.000,00	
9	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	11.596.308,00	11.472.308,00	(124.000,00)	98,93	124.000,00	
10	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	27.276.208,00	27.276.208,00	0,00	100,00	0,00	
11	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	23.541.322,00	23.541.322,00	0,00	100,00	0,00	
12	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	68.174.912,00	68.174.912,00	0,00	100,00	0,00	
13	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	23.197.818,00	23.179.000,00	(18.818,00)	99,92	18.818,00	
14	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	22.017.352,00	21.967.352,00	(50.000,00)	99,77	50.000,00	
15	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	27.068.000,00	26.169.667,00	(898.333,00)	96,68	898.333,00	
16	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.045.000,00	445.000,00	(1.600.000,00)	21,76	1.600.000,00	
17	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	28.090.626,00	28.089.000,00	(1.626,00)	99,99	1.626,00	
18	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Fasilitasi Kunjungan Tamu	23.085.000,00	23.048.920,00	(36.080,00)	99,84	36.080,00	
19	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	133.319.750,00	132.280.282,00	(1.039.468,00)	99,22	1.039.468,00	
20	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	100,00	0,00	
21	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	100,00	0,00	
22	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengadaan Mebel	46.350.000,00	45.990.000,00	(360.000,00)	99,22	360.000,00	
23	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	71.545.500,00	71.545.000,00	(500,00)	100,00	500,00	
24	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	134.430.000,00	134.430.000,00	0,00	100,00	0,00	
25	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	34.330.956,00	32.850.647,00	(1.480.309,00)	95,69	1.480.309,00	
26	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	58.892.891,00	58.875.000,00	(17.891,00)	99,97	17.891,00	
27	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	100,00	0,00	
28	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41.371.048,00	34.787.300,00	(6.583.748,00)	84,09	6.583.748,00	
29	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.698.750,00	8.080.000,00	(618.750,00)	92,89	618.750,00	
30	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.395.755,00	15.395.000,00	(755,00)	100,00	755,00	
31	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	126.256.900,00	126.256.900,00	0,00	100,00	0,00	
32	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	65.917.650,00	65.917.650,00	0,00	100,00	0,00	
33	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	324.369.682,00	320.269.414,00	(4.100.268,00)	98,74	4.100.268,00	
34	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	179.999.727,00	177.618.270,00	(2.381.457,00)	98,68	2.381.457,00	
35	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	70.162.650,00	70.162.650,00	0,00	100,00	0,00	
36	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengadaan Mebel Sekolah	781.190.103,00	780.909.416,00	(280.687,00)	99,96	280.687,00	
37	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	417.768.620,00	414.095.500,00	(3.673.120,00)	99,12	3.673.120,00	
38	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.042.000.000,00	1.037.400.000,00	(4.600.000,00)	99,56	4.600.000,00	
39	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	117.716.265,00	117.704.000,00	(12.265,00)	99,99	12.265,00	

NO	NAMA SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH				JUMLAH YANG MASIH HARUS DIANGGARKAN KEMBALI PADA APBD BERIKUTNYA	DASAR HUKUM
			ANGGARAN	REALISASI	TAMBAH/KURANG	%		
40	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	135.524.038,00	135.514.500,00	(9.538,00)	99,99	9.538,00	
41	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	13.929.199.924,04	13.888.998.300,00	(40.201.624,04)	99,71	40.201.624,04	
42	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	185.014.210,00	185.010.500,00	(3.710,00)	100,00	3.710,00	
43	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	115.360.250,00	115.360.250,00	0,00	100,00	0,00	
44	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	150.604.449,00	150.604.449,00	0,00	100,00	0,00	
45	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	145.043.198,00	140.593.198,00	(4.450.000,00)	96,93	4.450.000,00	
46	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	96.004.195,00	94.803.000,00	(1.201.195,00)	98,75	1.201.195,00	
47	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	32.407.000,00	32.342.553,00	(64.447,00)	99,80	64.447,00	
48	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	100.015.203,00	100.002.000,00	(13.203,00)	99,99	13.203,00	
49	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	0,00	
50	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	23.579.081,00	22.489.081,00	(1.090.000,00)	95,38	1.090.000,00	
51	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	208.656.000,00	207.470.017,00	(1.185.983,00)	99,43	1.185.983,00	
52	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	191.621.329,00	113.926.253,00	(77.695.076,00)	59,45	77.695.076,00	
53	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.532.110.130,00	1.530.190.144,00	(1.919.986,00)	99,87	1.919.986,00	
54	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	64.413.350,00	62.120.000,00	(2.293.350,00)	96,44	2.293.350,00	
55	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	146.828.515,00	142.680.015,00	(4.148.500,00)	97,17	4.148.500,00	
56	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	647.560.900,00	647.560.900,00	0,00	100,00	0,00	
57	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	320.870.281,00	320.710.281,00	(160.000,00)	99,95	160.000,00	
58	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	244.605.500,00	240.706.308,00	(3.899.192,00)	98,41	3.899.192,00	
59	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.125.242.493,00	1.094.688.877,00	(30.553.616,00)	97,28	30.553.616,00	
60	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	149.512.158,00	149.199.705,00	(312.453,00)	99,79	312.453,00	
61	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengadaan Mebel Sekolah	89.008.517,00	88.460.849,00	(547.668,00)	99,38	547.668,00	
62	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	320.970.281,00	320.503.781,00	(466.500,00)	99,85	466.500,00	
63	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	139.390.905,00	139.385.000,00	(5.905,00)	100,00	5.905,00	
64	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	67.588.000,00	65.880.000,00	(1.708.000,00)	97,47	1.708.000,00	
65	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	200.112.493,00	200.112.493,00	0,00	100,00	0,00	
66	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	123.162.015,00	122.462.015,00	(700.000,00)	99,43	700.000,00	
67	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	5.772.446.000,00	5.766.002.100,00	(6.443.900,00)	99,89	6.443.900,00	
68	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	165.000.893,00	164.986.000,00	(14.893,00)	99,99	14.893,00	
69	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	109.467.150,00	92.077.650,00	(17.389.500,00)	84,11	17.389.500,00	
70	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	107.479.607,00	107.379.607,00	(100.000,00)	99,91	100.000,00	
71	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	0,00	
72	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	79.278.262,00	79.278.262,00	0,00	100,00	0,00	
73	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	5.655.000,00	5.655.000,00	0,00	100,00	0,00	
74	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00	0,00	
75	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pembangunan Ruang Kelas Baru	901.635.838,00	899.884.900,00	(1.750.938,00)	99,81	1.750.938,00	
76	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	67.955.819,00	67.955.819,00	0,00	100,00	0,00	
77	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	175.025.000,00	173.586.000,00	(1.439.000,00)	99,18	1.439.000,00	
78	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	190.000.000,00	0,00	(190.000.000,00)	0,00	190.000.000,00	
79	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	16.660.195,00	16.660.195,00	0,00	100,00	0,00	
80	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	280.758.742,00	280.134.754,00	(623.988,00)	99,78	623.988,00	
81	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengadaan Perlengkapan PAUD	349.969.998,00	349.758.336,00	(211.662,00)	99,94	211.662,00	
82	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	234.068.984,00	234.068.984,00	0,00	100,00	0,00	
83	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	237.654.101,00	237.654.101,00	0,00	100,00	0,00	
84	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Dana BOP PAUD	2.749.420.000,00	2.749.420.000,00	0,00	100,00	0,00	
85	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	69.751.153,00	69.751.153,00	0,00	100,00	0,00	

NO	NAMA SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH				JUMLAH YANG MASIH HARUS DIANGGARKAN KEMBALI PADA APBD BERIKUTNYA	DASAR HUKUM
			ANGGARAN	REALISASI	TAMBAH/KURANG	%		
86	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	80.698.324,00	80.698.324,00	0,00	100,00	0,00	
87	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	149.999.154,00	149.999.154,00	0,00	100,00	0,00	
88	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	149.997.789,00	149.997.789,00	0,00	100,00	0,00	
89	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pembangunan Ruang Kelas Baru	345.173.770,00	344.452.862,00	(720.908,00)	99,79	720.908,00	
90	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pemberian layanan pendanpingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	100.000.002,00	100.000.002,00	0,00	100,00	0,00	
91	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	99.999.502,00	99.999.502,00	0,00	100,00	0,00	
92	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	0,00	
93	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	265.722.086,00	135.163.086,00	(130.559.000,00)	50,87	130.559.000,00	
94	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	82.162.825,00	82.162.825,00	0,00	100,00	0,00	
95	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	3.075.100.000,00	3.075.100.000,00	0,00	100,00	0,00	
96	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	162.949.710,00	162.949.710,00	0,00	100,00	0,00	
97	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	60.670.081,00	55.509.081,00	(5.161.000,00)	91,49	5.161.000,00	
98	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	149.250.450,00	149.250.450,00	0,00	100,00	0,00	
99	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	100,00	0,00	
100	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	108.718.714,00	108.708.500,00	(10.214,00)	99,99	10.214,00	
101	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	88.313.432,00	88.313.432,00	0,00	100,00	0,00	
102	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Perhitungan dan Pemetnan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	43.200.000,00	43.200.000,00	0,00	100,00	0,00	
103	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	32.543.276,00	32.527.276,00	(16.000,00)	99,95	16.000,00	
104	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	130.380.669,00	130.354.000,00	(26.669,00)	99,98	26.669,00	
105	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	13.146.000,00	13.146.000,00	0,00	100,00	0,00	
106	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	104.001.254,00	103.993.000,00	(8.254,00)	99,99	8.254,00	
107	DINAS KESEHATAN	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	66.037.498,00	64.226.000,00	(1.811.498,00)	97,26	1.811.498,00	
108	DINAS KESEHATAN	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.699.119,00	5.492.000,00	(2.207.119,00)	71,33	2.207.119,00	
109	DINAS KESEHATAN	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	11.340.936,00	10.416.500,00	(924.436,00)	91,85	924.436,00	
110	DINAS KESEHATAN	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	79.838.812,00	69.400.000,00	(10.438.812,00)	86,93	10.438.812,00	
111	DINAS KESEHATAN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	33.422.260.197,00	32.324.206.145,00	(1.098.054.052,00)	96,71	1.098.054.052,00	
112	DINAS KESEHATAN	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.707.205,00	10.140.000,00	(567.205,00)	94,70	567.205,00	
113	DINAS KESEHATAN	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	69.384.232,00	69.095.000,00	(289.232,00)	99,58	289.232,00	
114	DINAS KESEHATAN	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15.044.998,00	15.023.000,00	(21.998,00)	99,85	21.998,00	
115	DINAS KESEHATAN	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	62.800.000,00	62.800.000,00	0,00	100,00	0,00	
116	DINAS KESEHATAN	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	0,00	
117	DINAS KESEHATAN	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	6.742.662,00	5.954.000,00	(788.662,00)	88,30	788.662,00	
118	DINAS KESEHATAN	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	27.800.000,00	11.900.000,00	(15.900.000,00)	42,81	15.900.000,00	
119	DINAS KESEHATAN	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	332.096.570,00	328.477.601,00	(3.618.969,00)	98,91	3.618.969,00	
120	DINAS KESEHATAN	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.337.400,00	12.969.500,00	(367.900,00)	97,24	367.900,00	
121	DINAS KESEHATAN	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16.580.000,00	16.580.000,00	0,00	100,00	0,00	
122	DINAS KESEHATAN	Fasilitasi Kunjungan Tamu	33.900.000,00	30.300.000,00	(3.600.000,00)	89,38	3.600.000,00	
123	DINAS KESEHATAN	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	159.300.100,00	157.995.600,00	(1.304.500,00)	99,18	1.304.500,00	
124	DINAS KESEHATAN	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	164.829.450,00	154.473.765,00	(10.355.685,00)	93,72	10.355.685,00	
125	DINAS KESEHATAN	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	50.400.000,00	50.400.000,00	0,00	100,00	0,00	
126	DINAS KESEHATAN	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	512.668.200,00	460.259.990,00	(52.408.210,00)	89,78	52.408.210,00	
127	DINAS KESEHATAN	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	66.755.600,00	61.160.874,00	(5.594.726,00)	91,62	5.594.726,00	
128	DINAS KESEHATAN	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.690.000,00	21.579.000,00	(8.111.000,00)	72,68	8.111.000,00	
129	DINAS KESEHATAN	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	40.471.912,00	38.336.000,00	(2.135.912,00)	94,72	2.135.912,00	
130	DINAS KESEHATAN	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	19.389.705.162,67	19.302.223.895,00	(87.481.267,67)	99,55	87.481.267,67	
131	DINAS KESEHATAN	Pengembangan Puskesmas	1.990.293.736,75	1.983.686.980,00	(6.606.756,75)	99,67	6.606.756,75	
132	DINAS KESEHATAN	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	91.136.000,00	0,00	(91.136.000,00)	0,00	91.136.000,00	
133	DINAS KESEHATAN	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.733.141.304,00	1.698.480.664,00	(34.660.640,00)	98,00	34.660.640,00	
134	DINAS KESEHATAN	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3.669.029,00	0,00	(3.669.029,00)	0,00	3.669.029,00	
135	DINAS KESEHATAN	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	182.991.300,00	174.310.630,00	(8.680.670,00)	95,26	8.680.670,00	
136	DINAS KESEHATAN	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	7.004.638.693,00	6.083.687.215,00	(920.951.478,00)	86,85	920.951.478,00	

NO	NAMA SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH				JUMLAH YANG MASIH HARUS DIANGGARKAN KEMBALI PADA APBD BERIKUTNYA	DASAR HUKUM
			ANGGARAN	REALISASI	TAMBAH/KURANG	%		
137	DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	107.911.250,00	98.000.000,00	(9.911.250,00)	90,82	9.911.250,00	
138	DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	70.210.000,00	47.545.530,00	(22.664.470,00)	67,72	22.664.470,00	
139	DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	64.008.094,00	63.370.400,00	(637.694,00)	99,00	637.694,00	
140	DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	99.999.791,00	95.658.000,00	(4.341.791,00)	95,66	4.341.791,00	
141	DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	7.040.000,00	7.040.000,00	0,00	100,00	0,00	
142	DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	14.080.000,00	13.760.000,00	(320.000,00)	97,73	320.000,00	
143	DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	3.874.990,00	3.840.000,00	(34.990,00)	99,10	34.990,00	
144	DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	3.874.990,00	3.874.990,00	0,00	100,00	0,00	
145	DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	3.520.000,00	3.520.000,00	0,00	100,00	0,00	
146	DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	154.960.703,00	154.850.000,00	(110.703,00)	99,93	110.703,00	
147	DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	10.249.980,00	10.180.000,00	(69.980,00)	99,32	69.980,00	
148	DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	146.103.935,00	115.072.932,00	(31.031.003,00)	78,76	31.031.003,00	
149	DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	24.500.000,00	21.550.000,00	(2.950.000,00)	87,96	2.950.000,00	
150	DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	54.959.130,00	54.869.450,00	(89.680,00)	99,84	89.680,00	
151	DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	357.524.000,00	329.255.000,00	(28.269.000,00)	92,09	28.269.000,00	
152	DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	284.645.193,00	190.040.000,00	(94.605.193,00)	66,76	94.605.193,00	
153	DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	42.613.757,00	42.275.370,00	(338.387,00)	99,21	338.387,00	
154	DINAS KESEHATAN	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	244.580.543,00	244.238.665,00	(341.878,00)	99,86	341.878,00	
155	DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	17.613.127.315,00	16.954.592.910,00	(658.534.405,00)	96,26	658.534.405,00	
156	DINAS KESEHATAN	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	105.271.000,00	9.250.000,00	(96.021.000,00)	8,79	96.021.000,00	
157	DINAS KESEHATAN	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	8.249.990,00	8.200.000,00	(49.990,00)	99,39	49.990,00	
158	DINAS KESEHATAN	Operasional Pelayanan Puskesmas	539.481.977,00	536.548.960,00	(2.933.017,00)	99,46	2.933.017,00	
159	DINAS KESEHATAN	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	3.057.442.161,00	2.850.722.908,00	(206.719.253,00)	93,24	206.719.253,00	
160	DINAS KESEHATAN	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	5.094.990,00	5.060.000,00	(34.990,00)	99,31	34.990,00	
161	DINAS KESEHATAN	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	10.295.457,00	10.165.000,00	(130.457,00)	98,73	130.457,00	
162	DINAS KESEHATAN	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	3.874.990,00	3.840.000,00	(34.990,00)	99,10	34.990,00	
163	DINAS KESEHATAN	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	159.145.000,00	143.310.000,00	(15.835.000,00)	90,05	15.835.000,00	
164	DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	17.012.509,00	15.092.238,00	(1.920.271,00)	88,71	1.920.271,00	
165	DINAS KESEHATAN	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	4.327.735,00	4.255.000,00	(72.735,00)	98,32	72.735,00	
166	DINAS KESEHATAN	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	6.320.933,00	4.895.000,00	(1.425.933,00)	77,44	1.425.933,00	
167	DINAS KESEHATAN	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	846.839.770,00	762.190.700,00	(84.649.070,00)	90,00	84.649.070,00	
168	DINAS KESEHATAN	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	48.845.000,00	47.524.000,00	(1.321.000,00)	97,30	1.321.000,00	
169	DINAS KESEHATAN	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	92.740.000,00	80.588.000,00	(12.152.000,00)	86,90	12.152.000,00	
170	DINAS KESEHATAN	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	3.874.990,00	3.840.000,00	(34.990,00)	99,10	34.990,00	
171	DINAS KESEHATAN	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	51.600.000,00	51.154.000,00	(446.000,00)	99,14	446.000,00	
172	DINAS KESEHATAN	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	17.040.000,00	17.040.000,00	0,00	100,00	0,00	
173	DINAS KESEHATAN	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	24.225.000,00	16.570.000,00	(7.655.000,00)	68,40	7.655.000,00	
174	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.267.960.042,71	11.940.526.822,00	(327.433.220,71)	97,33	327.433.220,71	
175	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	22.222.374.871,00	23.027.987.595,00	805.612.724,00	103,63	(805.612.724,00)	
176	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	Pengembangan Rumah Sakit	1.209.684.604,00	1.167.461.569,00	(42.223.035,00)	96,51	42.223.035,00	
177	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	4.415.625.000,00	4.414.818.632,00	(806.368,00)	99,98	806.368,00	
178	PUSKESMAS PANGALE	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.913.252.303,00	1.750.477.532,00	(162.774.771,00)	91,49	162.774.771,00	
179	PUSKESMAS POLO CAMBA	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.041.772.284,00	952.134.394,00	(89.637.890,00)	91,40	89.637.890,00	
180	PUSKESMAS SALUGATTA	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.646.140.770,00	2.329.977.524,00	(316.163.246,00)	88,05	316.163.246,00	
181	PUSKESMAS BABANA	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.001.851.318,00	1.844.825.341,00	(157.025.977,00)	92,16	157.025.977,00	
182	PUSKESMAS TOBADAK	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.629.133.532,00	2.412.763.867,00	(216.369.665,00)	91,77	216.369.665,00	
183	PUSKESMAS SALUADAK	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	834.866.864,00	659.295.072,00	(175.571.792,00)	78,97	175.571.792,00	
184	PUSKESMAS BATUPARIGI	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	903.989.386,00	803.766.715,00	(100.222.671,00)	88,91	100.222.671,00	
185	PUSKESMAS TOPOYO	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	3.849.697.052,00	3.652.211.643,00	(197.485.409,00)	94,87	197.485.409,00	
186	PUSKESMAS SALUPANGKANG	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.819.698.915,00	1.662.425.747,82	(157.273.167,18)	91,36	157.273.167,18	
187	PUSKESMAS LARA	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.320.344.005,00	2.022.940.575,82	(297.403.429,18)	87,18	297.403.429,18	
188	PUSKESMAS DURIKUMBA	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.159.466.661,00	1.921.915.314,82	(237.551.346,18)	89,00	237.551.346,18	
189	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.492.330,00	1.492.000,00	(330,00)	99,98	330,00	
190	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.969.003,00	1.969.000,00	(3,00)	100,00	3,00	

NO	NAMA SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH				JUMLAH YANG MASIH HARUS DIANGGARKAN KEMBALI PADA APBD BERIKUTNYA	DASAR HUKUM
			ANGGARAN	REALISASI	TAMBAH/KURANG	%		
191	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	12.711.244,00	11.198.768,00	(1.512.476,00)	88,10	1.512.476,00	
192	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.940.032,00	1.940.000,00	(32,00)	100,00	32,00	
193	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	4.266.681,00	2.669.000,00	(1.597.681,00)	62,55	1.597.681,00	
194	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	27.849.962,00	27.849.500,00	(462,00)	100,00	462,00	
195	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.257.733.731,74	2.817.311.249,00	(440.422.482,74)	86,48	440.422.482,74	
196	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.830.684,00	7.830.000,00	(684,00)	99,99	684,00	
197	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.684.640,00	3.684.000,00	(640,00)	99,98	640,00	
198	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	51.505.799,00	49.003.799,00	(2.502.000,00)	95,14	2.502.000,00	
199	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	33.600.000,00	17.591.200,00	(16.008.800,00)	52,35	16.008.800,00	
200	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Penyediaan Perulatan dan Perlengkapan Kantor	132.386.500,00	128.371.500,00	(4.015.000,00)	96,97	4.015.000,00	
201	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	0,00	
202	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.125.000,00	3.115.000,00	(10.000,00)	99,68	10.000,00	
203	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	67.908.100,00	66.972.741,00	(935.359,00)	98,62	935.359,00	
204	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	138.890.100,00	106.579.647,00	(32.310.453,00)	76,74	32.310.453,00	
205	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	100,00	0,00	
206	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	93.910.000,00	55.459.900,00	(38.450.100,00)	59,06	38.450.100,00	
207	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.000.000,00	6.966.500,00	(33.500,00)	99,52	33.500,00	
208	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan Tanggul Sungai	309.560.538,46	296.563.200,00	(12.997.338,46)	95,80	12.997.338,46	
209	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	18.526.200,00	10.146.300,00	(8.379.900,00)	54,77	8.379.900,00	
210	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Rehabilitasi Kanal Banjir	319.186.717,30	236.223.100,00	(82.963.617,30)	74,01	82.963.617,30	
211	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	30.320.000,00	30.320.000,00	0,00	100,00	0,00	
212	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	401.543.998,43	389.468.000,00	(12.075.998,43)	96,99	12.075.998,43	
213	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	2.699.925.172,97	2.472.708.700,00	(227.216.472,97)	91,58	227.216.472,97	
214	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	421.749.496,00	396.449.000,00	(25.300.496,00)	94,00	25.300.496,00	
215	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	5.791.959.363,00	5.120.032.902,00	(671.926.461,00)	88,40	671.926.461,00	
216	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	4.154.616.462,00	3.030.298.614,00	(1.124.317.848,00)	72,94	1.124.317.848,00	
217	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	3.769.345.000,00	3.769.275.000,00	(70.000,00)	100,00	70.000,00	
218	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	74.351.059,00	0,00	(74.351.059,00)	0,00	74.351.059,00	
219	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Optimalisasai Sistem Drainase Lingkungan	120.027.000,00	93.561.000,00	(26.466.000,00)	77,95	26.466.000,00	
220	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	35.980.000,00	0,00	(35.980.000,00)	0,00	35.980.000,00	
221	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1.758.169.033,35	1.214.826.000,00	(543.343.033,35)	69,10	543.343.033,35	
222	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	52.800.000,00	38.300.000,00	(14.500.000,00)	72,54	14.500.000,00	
223	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	289.930.919,00	267.345.000,00	(22.585.919,00)	92,21	22.585.919,00	
224	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	99.999.048,00	0,00	(99.999.048,00)	0,00	99.999.048,00	
225	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Rekonstruksi Jalan	6.730.621.260,71	5.804.795.998,00	(925.825.262,71)	86,24	925.825.262,71	
226	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pemeliharaan Berkala Jalan	2.554.462.499,99	2.499.990.000,00	(54.472.499,99)	97,87	54.472.499,99	
227	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Rehabilitasi Jembatan	139.727.000,00	4.029.000,00	(135.698.000,00)	2,88	135.698.000,00	
228	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan Jembatan	1.302.633.224,47	846.721.000,00	(455.912.224,47)	65,00	455.912.224,47	
229	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	544.231.000,00	542.531.000,00	(1.700.000,00)	99,69	1.700.000,00	
230	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Rehabilitasi Jalan	199.999.649,80	186.623.000,00	(13.376.649,80)	93,31	13.376.649,80	
231	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	31.680.000,00	25.680.000,00	(6.000.000,00)	81,06	6.000.000,00	
232	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23.571.133,00	23.571.133,00	0,00	100,00	0,00	
233	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.189.805,00	14.189.805,00	0,00	100,00	0,00	

NO	NAMA SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH				JUMLAH YANG MASIH HARUS DIANGGARKAN KEMBALI PADA APBD BERIKUTNYA	DASAR HUKUM
			ANGGARAN	REALISASI	TAMBAH/KURANG	%		
234	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.489.642.141,50	1.421.163.658,00	(68.478.483,50)	95,40	68.478.483,50	
235	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	11.532.444,00	11.532.444,00	0,00	100,00	0,00	
236	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	67.536.200,00	67.133.700,00	(402.500,00)	99,40	402.500,00	
237	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	19.008.000,00	19.008.000,00	0,00	100,00	0,00	
238	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	Fasilitasi Kunjungan Tamu	32.165.000,00	32.165.000,00	0,00	100,00	0,00	
239	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	58.137.750,00	58.099.000,00	(38.750,00)	99,93	38.750,00	
240	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	31.753.269,00	31.750.269,00	(3.000,00)	99,99	3.000,00	
241	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	89.184.000,00	89.184.000,00	0,00	100,00	0,00	
242	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	100,00	0,00	
243	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	38.004.840,00	35.296.548,00	(2.708.292,00)	92,87	2.708.292,00	
244	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	78.000.000,00	73.700.000,00	(4.300.000,00)	94,49	4.300.000,00	
245	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	98.430.586,00	89.928.100,00	(8.502.486,00)	91,36	8.502.486,00	
246	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	118.515.535,00	113.948.900,00	(4.566.635,00)	96,15	4.566.635,00	
247	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	9.076.634.801,00	6.545.769.870,00	(2.530.864.931,00)	72,12	2.530.864.931,00	
248	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.837.763,00	2.837.700,00	(63,00)	100,00	63,00	
249	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.492.445,00	2.492.400,00	(45,00)	100,00	45,00	
250	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.703.136.445,10	2.536.558.419,00	(166.578.026,10)	93,84	166.578.026,10	
251	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.555.777,00	2.555.700,00	(77,00)	100,00	77,00	
252	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.611.437,00	3.611.400,00	(37,00)	100,00	37,00	
253	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	0,00	
254	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	100,00	0,00	
255	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	0,00	
256	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	82.982.000,00	82.979.000,00	(3.000,00)	100,00	3.000,00	
257	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	256.385.000,00	196.380.000,00	(60.005.000,00)	76,60	60.005.000,00	
258	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	32.807.000,00	32.799.600,00	(7.400,00)	99,98	7.400,00	
259	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	3.700.000,00	3.681.800,00	(18.200,00)	99,51	18.200,00	
260	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	2.625.930.210,00	2.461.528.000,00	(164.402.210,00)	93,74	164.402.210,00	
261	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	80.420.355,00	80.412.500,00	(7.855,00)	99,99	7.855,00	
262	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	35.436.912,00	35.263.000,00	(173.912,00)	99,51	173.912,00	
263	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	19.575.000,00	19.575.000,00	0,00	100,00	0,00	
264	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.456.200.000,00	1.277.920.000,00	(178.280.000,00)	87,76	178.280.000,00	
265	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19.352.664,00	19.352.000,00	(664,00)	100,00	664,00	
266	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	404.041,00	403.500,00	(541,00)	99,87	541,00	
267	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	366.268,00	366.000,00	(268,00)	99,93	268,00	
268	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	404.041,00	403.500,00	(541,00)	99,87	541,00	
269	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	366.268,00	366.000,00	(268,00)	99,93	268,00	
270	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.176.268,00	1.176.000,00	(268,00)	99,98	268,00	
271	BADAN PENANGGULANGAN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.371.346.697,00	1.311.339.756,00	(60.006.941,00)	95,62	60.006.941,00	

NO	NAMA SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH				JUMLAH YANG MASIH HARUS DIANGGARKAN KEMBALI PADA APBD BERIKUTNYA	DASAR HUKUM
			ANGGARAN	REALISASI	TAMBAH/KURANG	%		
	BENCANA DAERAH							
272	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	996.268,00	996.000,00	(268,00)	99,97	268,00	
273	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	36.317.055,00	36.307.500,00	(9.555,00)	99,97	9.555,00	
274	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	15.386.268,00	15.386.000,00	(268,00)	100,00	268,00	
275	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7.110.000,00	7.100.000,00	(10.000,00)	99,86	10.000,00	
276	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.795.000,00	1.795.000,00	0,00	100,00	0,00	
277	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.945.505,00	3.945.505,00	0,00	100,00	0,00	
278	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.208.000,00	2.208.000,00	0,00	100,00	0,00	
279	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	560.000,00	560.000,00	0,00	100,00	0,00	
280	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.370.000,00	9.370.000,00	0,00	100,00	0,00	
281	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26.278.700,00	26.242.600,00	(36.100,00)	99,86	36.100,00	
282	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	109.324.431,00	109.324.431,00	0,00	100,00	0,00	
283	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	0,00	
284	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27.053.000,00	26.501.250,00	(551.750,00)	97,96	551.750,00	
285	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	100,00	0,00	
286	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	24.966.440,00	24.438.230,00	(528.210,00)	97,88	528.210,00	
287	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	98.389.438,00	98.302.400,00	(87.038,00)	99,91	87.038,00	
288	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00	0,00	
289	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	23.096.857,00	23.091.000,00	(5.857,00)	99,97	5.857,00	
290	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	275.625.000,00	275.625.000,00	0,00	100,00	0,00	
291	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	15.103.000,00	15.097.050,00	(5.950,00)	99,96	5.950,00	
292	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	4.486.268,00	4.486.000,00	(268,00)	99,99	268,00	
293	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	8.170.000,00	8.170.000,00	0,00	100,00	0,00	
294	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	100,00	0,00	
295	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	43.329.268,00	41.329.000,00	(2.000.268,00)	95,38	2.000.268,00	
296	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	765.636.272,00	735.634.500,00	(30.001.772,00)	96,08	30.001.772,00	
297	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	29.280.000,00	29.068.000,00	(212.000,00)	99,28	212.000,00	
298	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	28.035.618,00	28.014.800,00	(20.818,00)	99,93	20.818,00	
299	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	25.231.855,00	24.801.000,00	(430.855,00)	98,29	430.855,00	
300	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	1.409.206.351,00	782.097.870,00	(627.108.481,00)	55,50	627.108.481,00	
301	DINAS SOSIAL	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	37.700.872,00	37.680.864,00	(20.008,00)	99,95	20.008,00	
302	DINAS SOSIAL	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	11.468.500,00	11.468.500,00	0,00	100,00	0,00	
303	DINAS SOSIAL	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	984.673.529,06	945.670.396,00	(39.003.133,06)	96,04	39.003.133,06	
304	DINAS SOSIAL	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00	0,00	
305	DINAS SOSIAL	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	0,00	
306	DINAS SOSIAL	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	151.150.378,00	151.150.378,00	0,00	100,00	0,00	
307	DINAS SOSIAL	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48.426.850,00	48.331.850,00	(95.000,00)	99,80	95.000,00	
308	DINAS SOSIAL	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	0,00	
309	DINAS SOSIAL	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	38.745.685,00	29.939.000,00	(8.806.685,00)	77,27	8.806.685,00	
310	DINAS SOSIAL	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	97.800.000,00	97.800.000,00	0,00	100,00	0,00	
311	DINAS SOSIAL	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	47.966.900,00	47.289.500,00	(677.400,00)	98,59	677.400,00	

NO	NAMA SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH				JUMLAH YANG MASIH HARUS DIANGGARKAN KEMBALI PADA APBD BERIKUTNYA	DASAR HUKUM
			ANGGARAN	REALISASI	TAMBAH/KURANG	%		
312	DINAS SOSIAL	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	122.606.450,00	122.606.450,00	0,00	100,00	0,00	
313	DINAS SOSIAL	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	49.627.033,00	43.627.033,00	(6.000.000,00)	87,91	6.000.000,00	
314	DINAS SOSIAL	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	84.276.632,00	79.699.323,00	(4.577.309,00)	94,57	4.577.309,00	
315	DINAS SOSIAL	Pemberian Layanan Kedaruratan	18.517.439,00	18.447.939,00	(69.500,00)	99,62	69.500,00	
316	DINAS SOSIAL	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	84.268.040,00	80.268.040,00	(4.000.000,00)	95,25	4.000.000,00	
317	DINAS SOSIAL	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	26.178.097,00	26.118.497,00	(59.600,00)	99,77	59.600,00	
318	DINAS SOSIAL	Penyediaan Makanan	17.700.000,00	17.700.000,00	0,00	100,00	0,00	
319	DINAS SOSIAL	Pelayanan Dukungan Psikososial	28.450.000,00	22.750.000,00	(5.700.000,00)	79,96	5.700.000,00	
320	DINAS SOSIAL	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	465.500.000,00	465.500.000,00	0,00	100,00	0,00	
321	DINAS SOSIAL	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	41.790.520,00	41.790.520,00	0,00	100,00	0,00	
322	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	16.255.944,00	16.255.944,00	0,00	100,00	0,00	
323	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Pelayanan antar Kerja	31.020.000,00	31.020.000,00	0,00	100,00	0,00	
324	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.880.695,00	2.834.695,00	(46.000,00)	98,40	46.000,00	
325	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	1.615.682.400,00	1.615.682.400,00	0,00	100,00	0,00	
326	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28.417.067,00	28.417.067,00	0,00	100,00	0,00	
327	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	952.725,00	952.725,00	0,00	100,00	0,00	
328	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.741.653,00	1.741.653,00	0,00	100,00	0,00	
329	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	958.777,00	958.777,00	0,00	100,00	0,00	
330	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.233.946,00	1.231.846,00	(2.100,00)	99,83	2.100,00	
331	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.275.110.773,10	1.216.461.895,00	(58.648.878,10)	95,40	58.648.878,10	
332	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.110.146,00	1.110.146,00	0,00	100,00	0,00	
333	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	32.255.125,00	29.755.125,00	(2.500.000,00)	92,25	2.500.000,00	
334	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	9.220.000,00	9.220.000,00	0,00	100,00	0,00	
335	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	0,00	
336	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	29.277.750,00	29.277.500,00	(250,00)	100,00	250,00	
337	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	95.997.240,00	95.997.240,00	0,00	100,00	0,00	
338	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27.452.824,00	22.253.074,00	(5.199.750,00)	81,06	5.199.750,00	
339	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	100,00	0,00	
340	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35.922.200,00	33.044.100,00	(2.878.100,00)	91,99	2.878.100,00	
341	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00	0,00	
342	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	99.620.150,00	99.381.897,00	(238.253,00)	99,76	238.253,00	
343	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	47.952.852,00	46.313.852,00	(1.639.000,00)	96,58	1.639.000,00	
344	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	20.000.266,00	20.000.266,00	0,00	100,00	0,00	
345	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	168.335.461,00	164.757.750,00	(3.577.711,00)	97,87	3.577.711,00	
346	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	84.019.615,00	84.010.500,00	(9.115,00)	99,99	9.115,00	
347	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	28.612.666,00	28.610.000,00	(2.666,00)	99,99	2.666,00	
348	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.473.466,00	4.472.000,00	(1.466,00)	99,97	1.466,00	
349	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.275.820,00	3.274.500,00	(1.320,00)	99,96	1.320,00	
350	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.995.105,00	2.994.000,00	(1.105,00)	99,96	1.105,00	
351	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.240.642,00	4.990.000,00	(250.642,00)	95,22	250.642,00	

NO	NAMA SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH				JUMLAH YANG MASIH HARUS DIANGGARKAN KEMBALI PADA APBD BERIKUTNYA	DASAR HUKUM
			ANGGARAN	REALISASI	TAMBAH/KURANG	%		
352	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.235.764.064,00	2.141.640.222,00	(94.123.842,00)	95,79	94.123.842,00	
353	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	39.309.049,00	39.289.000,00	(20.049,00)	99,95	20.049,00	
354	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	32.236.959,00	32.236.000,00	(959,00)	100,00	959,00	
355	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	13.750.000,00	8.750.000,00	(5.000.000,00)	63,64	5.000.000,00	
356	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	0,00	
357	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	33.241.750,00	31.872.000,00	(1.369.750,00)	95,88	1.369.750,00	
358	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	100,00	0,00	
359	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	88.590.170,00	88.590.100,00	(70,00)	100,00	70,00	
360	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.999.311,98	18.971.500,00	(27.811,98)	99,85	27.811,98	
361	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	100,00	0,00	
362	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60.000.000,00	59.988.034,00	(11.966,00)	99,98	11.966,00	
363	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	99.999.487,00	99.982.000,00	(17.487,00)	99,98	17.487,00	
364	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	71.599.586,00	71.586.000,00	(13.586,00)	99,98	13.586,00	
365	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	150.655.446,00	148.842.495,00	(1.812.951,00)	98,80	1.812.951,00	
366	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	49.762.025,00	49.531.000,00	(231.025,00)	99,54	231.025,00	
367	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	77.269.633,00	74.324.900,00	(2.944.733,00)	96,19	2.944.733,00	
368	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	56.043.082,00	55.997.000,00	(46.082,00)	99,92	46.082,00	
369	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	97.200.000,00	97.200.000,00	0,00	100,00	0,00	
370	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	60.000.000,00	59.875.000,00	(125.000,00)	99,79	125.000,00	
371	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Pengendalian Program KKBPK	218.490.397,00	218.282.500,00	(207.897,00)	99,90	207.897,00	
372	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	100,00	0,00	
373	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	77.500.000,00	77.500.000,00	0,00	100,00	0,00	

NO	NAMA SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH				JUMLAH YANG MASIH HARUS DIANGGARKAN KEMBALI PADA APBD BERIKUTNYA	DASAR HUKUM
			ANGGARAN	REALISASI	TAMBAH/KURANG	%		
374	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	100,00	0,00	
375	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	243.962.272,00	240.090.000,00	(3.872.272,00)	98,41	3.872.272,00	
376	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	420.000.000,00	420.000.000,00	0,00	100,00	0,00	
377	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	321.115.992,00	284.148.000,00	(36.967.992,00)	88,49	36.967.992,00	
378	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	100,00	0,00	
379	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	270.000.000,00	270.000.000,00	0,00	100,00	0,00	
380	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	296.800.000,00	296.800.000,00	0,00	100,00	0,00	
381	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	14.997.268,00	14.997.000,00	(268,00)	100,00	268,00	
382	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	100,00	0,00	
383	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	240.000.178,00	239.963.000,00	(37.178,00)	99,98	37.178,00	
384	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	288.000.000,00	288.000.000,00	0,00	100,00	0,00	
385	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	36.840.242,00	36.823.000,00	(17.242,00)	99,95	17.242,00	
386	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	47.544.933,00	47.352.500,00	(192.433,00)	99,60	192.433,00	
387	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	25.615.237,00	25.613.000,00	(2.237,00)	99,99	2.237,00	
388	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	20.399.742,00	20.386.500,00	(13.242,00)	99,94	13.242,00	
389	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	81.271.759,00	81.253.200,00	(18.559,00)	99,98	18.559,00	
390	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	48.834.799,00	48.830.600,00	(4.199,00)	99,99	4.199,00	
391	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	25.728.481,00	25.720.500,00	(7.981,00)	99,97	7.981,00	
392	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	65.312.495,00	64.297.500,00	(1.014.995,00)	98,45	1.014.995,00	
393	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	704.907,00	703.500,00	(1.407,00)	99,80	1.407,00	
394	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	704.907,00	703.500,00	(1.407,00)	99,80	1.407,00	
395	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.004.907,00	1.003.500,00	(1.407,00)	99,86	1.407,00	
396	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.004.907,00	1.003.500,00	(1.407,00)	99,86	1.407,00	
397	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.136.972.288,00	4.827.506.802,00	(309.465.486,00)	93,98	309.465.486,00	
398	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	42.226.997,00	39.548.700,00	(2.678.297,00)	93,66	2.678.297,00	
399	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	24.488.257,00	24.487.000,00	(1.257,00)	99,99	1.257,00	
400	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	38.958.976,00	38.860.500,00	(98.476,00)	99,75	98.476,00	
401	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	29.140.000,00	23.150.000,00	(5.990.000,00)	79,44	5.990.000,00	
402	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Penyediaan Perulatan dan Perlengkapan Kantor	49.744.723,50	49.635.000,00	(109.723,50)	99,78	109.723,50	
403	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Penyediaan Perulatan Rumah Tangga	2.540.170,00	2.540.000,00	(170,00)	99,99	170,00	
404	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.924.000,00	2.944.000,00	(980.000,00)	75,03	980.000,00	
405	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Fasilitasi Kunjungan Tamu	32.290.000,00	32.290.000,00	0,00	100,00	0,00	
406	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	61.732.226,00	61.601.483,00	(130.743,00)	99,79	130.743,00	
407	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	130.997.240,00	95.997.240,00	(35.000.000,00)	73,28	35.000.000,00	

NO	NAMA SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH				JUMLAH YANG MASIH HARUS DIANGGARKAN KEMBALI PADA APBD BERIKUTNYA	DASAR HUKUM
			ANGGARAN	REALISASI	TAMBAH/KURANG	%		
408	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.391.504,00	50.361.250,00	(30.254,00)	99,94	30.254,00	
409	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	100,00	0,00	
410	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.033.760,00	32.597.000,00	(2.436.760,00)	93,04	2.436.760,00	
411	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	320.989.469,00	317.197.118,00	(3.792.351,00)	98,82	3.792.351,00	
412	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	283.635.762,00	137.996.000,00	(145.639.762,00)	48,65	145.639.762,00	
413	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	166.764.956,00	161.318.860,00	(5.446.096,00)	96,73	5.446.096,00	
414	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	51.210.000,00	0,00	(51.210.000,00)	0,00	51.210.000,00	
415	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	179.599.409,00	179.595.000,00	(4.409,00)	100,00	4.409,00	
416	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	66.404.981,00	66.400.000,00	(4.981,00)	99,99	4.981,00	
417	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	0,00	50.000.000,00	
418	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	435.295.218,00	399.325.300,00	(35.969.918,00)	91,74	35.969.918,00	
419	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17.699.714,00	17.087.200,00	(612.514,00)	96,54	612.514,00	
420	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.225.884,00	1.173.000,00	(52.884,00)	95,69	52.884,00	
421	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.342.191,00	1.280.000,00	(62.191,00)	95,37	62.191,00	
422	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	987.575,00	978.000,00	(9.575,00)	99,03	9.575,00	
423	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.405.441,00	1.385.000,00	(20.441,00)	98,55	20.441,00	
424	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.174.111,00	1.118.000,00	(56.111,00)	95,22	56.111,00	
425	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.171.827.380,15	1.138.790.987,00	(33.036.393,15)	97,18	33.036.393,15	
426	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	79.800.000,00	73.300.000,00	(6.500.000,00)	91,85	6.500.000,00	
427	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	13.287.273,00	13.074.000,00	(213.273,00)	98,39	213.273,00	
428	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	7.177.286,00	6.748.000,00	(429.286,00)	94,02	429.286,00	
429	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	0,00	
430	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.025.000,00	1.025.000,00	0,00	100,00	0,00	
431	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.945.000,00	1.720.000,00	(225.000,00)	88,43	225.000,00	
432	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.015.000,00	2.071.600,00	(1.943.400,00)	51,60	1.943.400,00	
433	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.680.000,00	3.505.000,00	(175.000,00)	95,24	175.000,00	
434	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	43.137.750,00	42.643.240,00	(494.510,00)	98,85	494.510,00	
435	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	100,00	0,00	
436	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.326.294,00	16.344.650,00	(1.981.644,00)	89,19	1.981.644,00	
437	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	24.600.000,00	24.600.000,00	0,00	100,00	0,00	
438	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.647.500,00	39.080.000,00	(567.500,00)	98,57	567.500,00	
439	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	416.814.360,00	416.522.351,00	(292.009,00)	99,93	292.009,00	
440	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	53.810.000,00	53.760.000,00	(50.000,00)	99,91	50.000,00	
441	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	100,00	0,00	
442	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	33.349.684,00	29.711.000,00	(3.638.684,00)	89,09	3.638.684,00	
443	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	13.205.242,00	10.716.000,00	(2.489.242,00)	81,15	2.489.242,00	
444	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	363.999.135,00	343.875.500,00	(20.123.635,00)	94,47	20.123.635,00	
445	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	18.272.507,00	15.718.000,00	(2.554.507,00)	86,02	2.554.507,00	
446	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	4.237.478,00	4.044.000,00	(193.478,00)	95,43	193.478,00	
447	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	22.253.221,00	21.897.000,00	(356.221,00)	98,40	356.221,00	
448	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	17.111.097,00	16.821.000,00	(290.097,00)	98,30	290.097,00	
449	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	10.541.875,00	10.336.000,00	(205.875,00)	98,05	205.875,00	
450	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	2.579.498.230,00	2.517.277.155,00	(62.221.075,00)	97,59	62.221.075,00	
451	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	9.610.888,00	9.430.000,00	(180.888,00)	98,12	180.888,00	
452	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	1.570.800.000,00	1.567.900.000,00	(2.900.000,00)	99,82	2.900.000,00	

NO	NAMA SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH				JUMLAH YANG MASIH HARUS DIANGGARKAN KEMBALI PADA APBD BERIKUTNYA	DASAR HUKUM
			ANGGARAN	REALISASI	TAMBAH/KURANG	%		
453	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.568.786,00	14.508.786,00	(60.000,00)	99,59	60.000,00	
454	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.828.380,00	13.743.380,00	(85.000,00)	99,39	85.000,00	
455	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.265.666.620,87	1.235.114.256,00	(30.552.364,87)	97,59	30.552.364,87	
456	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.329.500,00	15.313.500,00	(16.000,00)	99,90	16.000,00	
457	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Fasilitasi Kunjungan Tamu	24.000.000,00	23.995.000,00	(5.000,00)	99,98	5.000,00	
458	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.501.683,00	50.501.683,00	0,00	100,00	0,00	
459	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	103.101.746,00	90.597.357,00	(12.504.389,00)	87,87	12.504.389,00	
460	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	132.600.000,00	129.000.000,00	(3.600.000,00)	97,29	3.600.000,00	
461	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	53.979.550,00	53.951.550,00	(28.000,00)	99,95	28.000,00	
462	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	18.925.000,00	18.640.000,00	(285.000,00)	98,49	285.000,00	
463	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	40.090.200,00	40.090.200,00	0,00	100,00	0,00	
464	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	160.800.000,00	156.800.000,00	(4.000.000,00)	97,51	4.000.000,00	
465	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	187.845.288,00	187.678.000,00	(167.288,00)	99,91	167.288,00	
466	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	20.525.000,00	20.445.000,00	(80.000,00)	99,61	80.000,00	
467	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	61.930.875,00	61.930.875,00	0,00	100,00	0,00	
468	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	114.000.000,00	114.000.000,00	0,00	100,00	0,00	
469	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	235.770.581,00	235.625.573,00	(145.008,00)	99,94	145.008,00	
470	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	15.999.325,00	15.999.325,00	0,00	100,00	0,00	
471	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	70.407.000,00	70.366.800,00	(40.200,00)	99,94	40.200,00	
472	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	71.182.000,00	71.182.000,00	0,00	100,00	0,00	
473	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	24.940.000,00	24.940.000,00	0,00	100,00	0,00	
474	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	100.800.000,00	100.800.000,00	0,00	100,00	0,00	
475	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	0,00	
476	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21.018.338,00	18.518.338,00	(2.500.000,00)	88,11	2.500.000,00	
477	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	25.244.193,00	25.243.979,00	(214,00)	100,00	214,00	
478	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	24.335.600,00	24.335.600,00	0,00	100,00	0,00	
479	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.439.601,00	12.439.601,00	0,00	100,00	0,00	
480	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.036.449.893,00	967.957.781,00	(68.492.112,00)	93,39	68.492.112,00	
481	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50.349.723,00	50.049.723,00	(300.000,00)	99,40	300.000,00	
482	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.174.327,00	6.174.327,00	0,00	100,00	0,00	
483	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	42.983.271,00	39.679.374,00	(3.303.897,00)	92,31	3.303.897,00	
484	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	0,00	
485	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	747.000,00	747.000,00	0,00	100,00	0,00	
486	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	0,00	
487	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.860.000,00	7.855.000,00	(5.000,00)	99,94	5.000,00	
488	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48.503.350,00	47.955.000,00	(548.350,00)	98,87	548.350,00	
489	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	8.637.144,00	8.637.144,00	0,00	100,00	0,00	
490	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	15.125.129,85	15.125.129,00	(0,85)	100,00	0,85	
491	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	120.000.000,00	92.927.206,00	(27.072.794,00)	77,44	27.072.794,00	
492	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.573.339,60	15.243.591,00	(1.329.748,60)	91,98	1.329.748,60	
493	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	49.730.145,93	49.716.250,00	(13.895,93)	99,97	13.895,93	
494	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00	0,00	
495	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1.367.679.134,00	1.329.614.655,00	(38.064.479,00)	97,22	38.064.479,00	

NO	NAMA SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH				JUMLAH YANG MASIH HARUS DIANGGARKAN KEMBALI PADA APBD BERIKUTNYA	DASAR HUKUM
			ANGGARAN	REALISASI	TAMBAH/KURANG	%		
496	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	15.481.624,00	15.481.624,00	0,00	100,00	0,00	
497	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	13.310.425,00	13.310.425,00	0,00	100,00	0,00	
498	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	245.940.413,50	245.939.986,00	(427,50)	100,00	427,50	
499	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	15.099.930,00	15.099.930,00	0,00	100,00	0,00	
500	DINAS PERHUBUNGAN	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	33.077.731,00	33.077.383,00	(348,00)	100,00	348,00	
501	DINAS PERHUBUNGAN	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.050.344,00	10.050.344,00	0,00	100,00	0,00	
502	DINAS PERHUBUNGAN	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	24.119.949,00	21.719.949,00	(2.400.000,00)	90,05	2.400.000,00	
503	DINAS PERHUBUNGAN	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	19.313.536,00	15.713.536,00	(3.600.000,00)	81,36	3.600.000,00	
504	DINAS PERHUBUNGAN	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	72.545.519,00	69.470.519,00	(3.075.000,00)	95,76	3.075.000,00	
505	DINAS PERHUBUNGAN	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24.438.724,00	24.368.956,00	(69.768,00)	99,71	69.768,00	
506	DINAS PERHUBUNGAN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.066.512.422,20	1.032.523.433,00	(33.988.989,20)	96,81	33.988.989,20	
507	DINAS PERHUBUNGAN	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	39.574.936,44	36.954.505,00	(2.620.431,44)	93,38	2.620.431,44	
508	DINAS PERHUBUNGAN	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	41.248.078,36	41.240.676,00	(7.402,36)	99,98	7.402,36	
509	DINAS PERHUBUNGAN	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	0,00	
510	DINAS PERHUBUNGAN	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	0,00	
511	DINAS PERHUBUNGAN	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.928.120,00	5.925.500,00	(2.620,00)	99,96	2.620,00	
512	DINAS PERHUBUNGAN	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	100,00	0,00	
513	DINAS PERHUBUNGAN	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45.409.850,00	45.344.800,00	(65.050,00)	99,86	65.050,00	
514	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	138.497.240,00	137.947.240,00	(550.000,00)	99,60	550.000,00	
515	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	106.928.430,00	80.000.000,00	(26.928.430,00)	74,82	26.928.430,00	
516	DINAS PERHUBUNGAN	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.251.760,00	8.572.500,00	(1.679.260,00)	83,62	1.679.260,00	
517	DINAS PERHUBUNGAN	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	100,00	0,00	
518	DINAS PERHUBUNGAN	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12.406.500,00	10.836.000,00	(1.570.500,00)	87,34	1.570.500,00	
519	DINAS PERHUBUNGAN	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.393.000,00	8.393.000,00	0,00	100,00	0,00	
520	DINAS PERHUBUNGAN	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	717.680.241,00	684.268.915,00	(33.411.326,00)	95,34	33.411.326,00	
521	DINAS PERHUBUNGAN	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	146.125.000,00	143.850.000,00	(2.275.000,00)	98,44	2.275.000,00	
522	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19.956.593,00	19.840.000,00	(116.593,00)	99,42	116.593,00	
523	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.469.467,00	1.287.000,00	(182.467,00)	87,58	182.467,00	
524	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.680.650,00	2.678.000,00	(2.650,00)	99,90	2.650,00	
525	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	588.604,00	585.000,00	(3.604,00)	99,39	3.604,00	
526	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.464.563,00	23.462.500,00	(2.063,00)	99,99	2.063,00	
527	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.190.368.087,34	1.158.135.270,00	(32.232.817,34)	97,29	32.232.817,34	
528	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10.818.460,00	10.793.000,00	(25.460,00)	99,76	25.460,00	
529	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	19.953.459,00	19.952.000,00	(1.459,00)	99,99	1.459,00	
530	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	343.013,00	341.000,00	(2.013,00)	99,41	2.013,00	
531	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.323.923,00	3.323.000,00	(923,00)	99,97	923,00	
532	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	16.515.673,00	11.700.000,00	(4.815.673,00)	70,84	4.815.673,00	
533	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	10.069.923,00	10.069.000,00	(923,00)	99,99	923,00	
534	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	47.805.000,00	30.005.000,00	(17.800.000,00)	62,77	17.800.000,00	
535	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN	Penyediaan Perlatan Rumah Tangga	2.905.000,00	2.905.000,00	0,00	100,00	0,00	
536	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.824.804,00	17.751.000,00	(73.804,00)	99,59	73.804,00	
537	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15.924.000,00	15.924.000,00	0,00	100,00	0,00	

NO	NAMA SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH				JUMLAH YANG MASIH HARUS DIANGGARKAN KEMBALI PADA APBD BERIKUTNYA	DASAR HUKUM
			ANGGARAN	REALISASI	TAMBAH/KURANG	%		
538	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	95.997.240,00	95.997.240,00	0,00	100,00	0,00	
539	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	118.690.557,30	77.297.970,00	(41.392.587,30)	65,13	41.392.587,30	
540	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	0,00	
541	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29.539.960,00	29.397.000,00	(142.960,00)	99,52	142.960,00	
542	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	100,00	0,00	
543	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	495.000,00	0,00	(495.000,00)	0,00	495.000,00	
544	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	720.000,00	720.000,00	0,00	100,00	0,00	
545	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN	Relasi Media	296.801.007,00	296.676.180,00	(124.827,00)	99,96	124.827,00	
546	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	8.415.820,00	8.414.934,00	(886,00)	99,99	886,00	
547	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN	Pelayanan Informasi Publik	45.551.426,00	44.865.606,00	(685.820,00)	98,49	685.820,00	
548	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	33.812.500,00	23.562.500,00	(10.250.000,00)	69,69	10.250.000,00	
549	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	170.220.000,00	170.220.000,00	0,00	100,00	0,00	
550	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	7.006.328,00	7.006.000,00	(328,00)	100,00	328,00	
551	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	33.158.503,00	24.535.800,00	(8.622.703,00)	74,00	8.622.703,00	
552	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	1.474.149.992,00	1.383.934.680,00	(90.215.312,00)	93,88	90.215.312,00	
553	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	34.928.818,00	33.091.300,00	(1.837.518,00)	94,74	1.837.518,00	
554	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	27.731.389,00	25.848.000,00	(1.883.389,00)	93,21	1.883.389,00	
555	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	31.947.440,00	29.539.400,00	(2.408.040,00)	92,46	2.408.040,00	
556	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	10.906.000,00	10.878.002,00	(27.998,00)	99,74	27.998,00	
557	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	54.633.413,00	54.618.838,00	(14.575,00)	99,97	14.575,00	
558	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	31.696.977,00	31.696.977,00	0,00	100,00	0,00	
559	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	44.574.498,00	25.374.498,00	(19.200.000,00)	56,93	19.200.000,00	
560	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	16.182.230,00	16.182.230,00	0,00	100,00	0,00	
561	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.190.559.282,46	2.127.547.218,00	(63.012.064,46)	97,12	63.012.064,46	
562	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	18.292.358,00	18.292.358,00	0,00	100,00	0,00	
563	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7.110.000,00	7.110.000,00	0,00	100,00	0,00	
564	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.654.731,00	27.468.000,00	(1.186.731,00)	95,86	1.186.731,00	
565	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.400.000,00	1.350.000,00	(50.000,00)	96,43	50.000,00	
566	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	58.334.850,00	57.985.800,00	(349.050,00)	99,40	349.050,00	
567	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	6.721.978,00	6.721.978,00	0,00	100,00	0,00	
568	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	164.829.828,00	164.208.828,00	(621.000,00)	99,62	621.000,00	

NO	NAMA SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH				JUMLAH YANG MASIH HARUS DIANGGARKAN KEMBALI PADA APBD BERIKUTNYA	DASAR HUKUM
			ANGGARAN	REALISASI	TAMBAH/KURANG	%		
569	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.192.990,00	23.802.914,00	(1.390.076,00)	94,48	1.390.076,00	
570	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.100.000,00	8.565.000,00	(3.535.000,00)	70,79	3.535.000,00	
571	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19.870.000,00	19.861.500,00	(8.500,00)	99,96	8.500,00	
572	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.099.657,00	9.596.550,00	(503.107,00)	95,02	503.107,00	
573	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	100,00	0,00	
574	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36.727.000,00	32.788.000,00	(3.939.000,00)	89,27	3.939.000,00	
575	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	14.060.000,00	14.060.000,00	0,00	100,00	0,00	
576	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	410.220.876,00	394.164.018,00	(16.056.858,00)	96,09	16.056.858,00	
577	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	178.890.552,00	159.490.552,00	(19.400.000,00)	89,16	19.400.000,00	
578	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	42.355.910,00	42.355.910,00	0,00	100,00	0,00	
579	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	2.804.450,00	2.804.450,00	0,00	100,00	0,00	
580	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	9.334.630,00	9.334.630,00	0,00	100,00	0,00	
581	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	8.521.749,00	8.521.749,00	0,00	100,00	0,00	
582	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	455.230,00	442.230,00	(13.000,00)	97,14	13.000,00	
583	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	455.230,00	453.230,00	(2.000,00)	99,56	2.000,00	
584	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	59.340.694,00	52.140.694,00	(7.200.000,00)	87,87	7.200.000,00	
585	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	46.088.408,00	43.578.408,00	(2.510.000,00)	94,55	2.510.000,00	
586	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	452.536,00	452.536,00	0,00	100,00	0,00	
587	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	576.536,00	576.536,00	0,00	100,00	0,00	
588	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	493.932,00	493.932,00	0,00	100,00	0,00	
589	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.132.061.058,00	1.099.250.828,00	(32.810.230,00)	97,10	32.810.230,00	
590	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	46.624.081,00	46.624.081,00	0,00	100,00	0,00	
591	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.161.144,00	2.161.143,00	(1,00)	100,00	1,00	
592	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.269.924,00	3.269.924,00	0,00	100,00	0,00	
593	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15.310.000,00	15.230.000,00	(80.000,00)	99,48	80.000,00	
594	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.210.000,00	4.210.000,00	0,00	100,00	0,00	
595	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	33.207.350,00	33.107.020,00	(100.330,00)	99,70	100.330,00	
596	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	95.997.240,00	95.997.240,00	0,00	100,00	0,00	

NO	NAMA SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH				JUMLAH YANG MASIH HARUS DIANGGARKAN KEMBALI PADA APBD BERIKUTNYA	DASAR HUKUM
			ANGGARAN	REALISASI	TAMBAH/KURANG	%		
	SATU PINTU							
597	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	244.270.717,30	126.961.447,00	(117.309.270,30)	51,98	117.309.270,30	
598	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	81.202.463,00	81.162.372,00	(40.091,00)	99,95	40.091,00	
599	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.818.420,00	24.638.000,00	(1.180.420,00)	95,43	1.180.420,00	
600	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	27.600.000,00	27.600.000,00	0,00	100,00	0,00	
601	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12.928.800,00	12.055.200,00	(873.600,00)	93,24	873.600,00	
602	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	100,00	0,00	
603	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	11.428.236,00	11.313.472,00	(114.764,00)	99,00	114.764,00	
604	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	94.084.769,00	92.583.897,00	(1.500.872,00)	98,40	1.500.872,00	
605	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Pengawasan Penanaman Modal	56.508.561,00	50.468.261,00	(6.040.300,00)	89,31	6.040.300,00	
606	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	39.527.281,00	39.526.000,00	(1.281,00)	100,00	1.281,00	
607	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	100,00	0,00	
608	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	986.947.354,66	919.520.255,00	(67.427.099,66)	93,17	67.427.099,66	
609	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	67.680.000,00	65.180.000,00	(2.500.000,00)	96,31	2.500.000,00	
610	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	100,00	0,00	
611	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.550.000,00	14.550.000,00	0,00	100,00	0,00	
612	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.380.000,00	6.380.000,00	0,00	100,00	0,00	
613	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24.433.750,00	24.253.800,00	(179.950,00)	99,26	179.950,00	
614	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	92.120.179,00	92.120.179,00	0,00	100,00	0,00	
615	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.590.949,00	11.588.000,00	(2.949,00)	99,97	2.949,00	
616	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.986.244,00	26.670.000,00	(316.244,00)	98,83	316.244,00	
617	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	100,00	0,00	
618	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	34.770.220,00	31.805.000,00	(2.965.220,00)	91,47	2.965.220,00	
619	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	47.382.692,00	47.366.000,00	(16.692,00)	99,96	16.692,00	
620	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	31.200.000,00	29.700.000,00	(1.500.000,00)	95,19	1.500.000,00	
621	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	11.876.193,00	11.869.000,00	(7.193,00)	99,94	7.193,00	
622	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis penguatan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	100,00	0,00	
623	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	11.659.066.412,00	11.648.778.985,00	(10.287.427,00)	99,91	10.287.427,00	
624	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	78.970.750,00	75.492.800,00	(3.477.950,00)	95,60	3.477.950,00	
625	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	1.850.000.000,00	1.850.000.000,00	0,00	100,00	0,00	
626	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	0,00	
627	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	50.856.059,00	48.349.500,00	(2.506.559,00)	95,07	2.506.559,00	
628	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	235.668.289,00	235.652.000,00	(16.289,00)	99,99	16.289,00	
629	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan	43.780.337,00	41.768.000,00	(2.012.337,00)	95,40	2.012.337,00	
630	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	81.352.124,00	81.280.924,00	(71.200,00)	99,91	71.200,00	
631	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.979.873,00	3.947.629,00	(32.244,00)	99,19	32.244,00	
632	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.230.868,00	4.230.868,00	0,00	100,00	0,00	
633	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.421.924,00	4.304.877,00	(117.047,00)	97,35	117.047,00	

NO	NAMA SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH				JUMLAH YANG MASIH HARUS DIANGGARKAN KEMBALI PADA APBD BERIKUTNYA	DASAR HUKUM
			ANGGARAN	REALISASI	TAMBAH/KURANG	%		
634	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.933.245,00	3.873.413,00	(59.832,00)	98,48	59.832,00	
635	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	26.434.576,00	26.434.576,00	0,00	100,00	0,00	
636	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	736.883.034,20	709.917.926,00	(26.965.108,20)	96,34	26.965.108,20	
637	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7.180.000,00	6.500.000,00	(680.000,00)	90,53	680.000,00	
638	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	57.204.415,00	50.402.267,00	(6.802.148,00)	88,11	6.802.148,00	
639	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	25.306.000,00	25.306.000,00	0,00	100,00	0,00	
640	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.947.500,00	3.947.500,00	0,00	100,00	0,00	
641	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.225.000,00	7.980.000,00	(245.000,00)	97,02	245.000,00	
642	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24.252.000,00	24.210.650,00	(41.350,00)	99,83	41.350,00	
643	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	100,00	0,00	
644	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	0,00	
645	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	46.725.500,00	46.089.200,00	(636.300,00)	98,64	636.300,00	
646	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	0,00	
647	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	18.810.618,00	18.489.600,00	(321.018,00)	98,29	321.018,00	
648	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	19.525.275,00	18.906.500,00	(618.775,00)	96,83	618.775,00	
649	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	48.318.206,00	48.249.406,00	(68.800,00)	99,86	68.800,00	
650	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	29.872.631,00	29.329.831,00	(542.800,00)	98,18	542.800,00	
651	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi *Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota*	892.896.648,00	890.284.000,00	(2.612.648,00)	99,71	2.612.648,00	
652	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	109.478.001,00	109.478.001,00	0,00	100,00	0,00	
653	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	47.145.581,00	47.016.380,00	(129.201,00)	99,73	129.201,00	
654	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	38.612.350,00	38.498.550,00	(113.800,00)	99,71	113.800,00	
655	DINAS PERIKANAN	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.103.124,00	20.095.000,00	(8.124,00)	99,96	8.124,00	
656	DINAS PERIKANAN	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.168.289,00	1.164.000,00	(4.289,00)	99,63	4.289,00	
657	DINAS PERIKANAN	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.091.829,00	1.088.000,00	(3.829,00)	99,65	3.829,00	
658	DINAS PERIKANAN	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.338.354,00	1.329.000,00	(9.354,00)	99,30	9.354,00	
659	DINAS PERIKANAN	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.139.737,00	1.133.000,00	(6.737,00)	99,41	6.737,00	
660	DINAS PERIKANAN	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.616.349,00	4.598.000,00	(18.349,00)	99,60	18.349,00	
661	DINAS PERIKANAN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.783.715.735,17	1.737.726.112,00	(45.989.623,17)	97,42	45.989.623,17	
662	DINAS PERIKANAN	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.357.267,00	1.356.000,00	(1.267,00)	99,91	1.267,00	
663	DINAS PERIKANAN	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	31.747.804,00	31.738.000,00	(9.804,00)	99,97	9.804,00	
664	DINAS PERIKANAN	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.008.725,00	4.006.000,00	(2.725,00)	99,93	2.725,00	
665	DINAS PERIKANAN	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5.699.743,00	5.531.500,00	(168.243,00)	97,05	168.243,00	
666	DINAS PERIKANAN	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	13.790.000,00	13.730.000,00	(60.000,00)	99,56	60.000,00	
667	DINAS PERIKANAN	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.545.500,00	45.545.000,00	(500,00)	100,00	500,00	
668	DINAS PERIKANAN	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.797.500,00	6.797.500,00	0,00	100,00	0,00	
669	DINAS PERIKANAN	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.089.828,00	6.087.000,00	(2.828,00)	99,95	2.828,00	
670	DINAS PERIKANAN	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	57.557.403,00	57.263.944,00	(293.459,00)	99,49	293.459,00	
671	DINAS PERIKANAN	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	100,00	0,00	
672	DINAS PERIKANAN	Pengadaan Mebel	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	0,00	
673	DINAS PERIKANAN	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	82.143.049,00	79.155.169,00	(2.987.880,00)	96,36	2.987.880,00	
674	DINAS PERIKANAN	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	701.804,00	701.000,00	(804,00)	99,89	804,00	
675	DINAS PERIKANAN	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.600.152,00	21.520.000,00	(80.152,00)	99,63	80.152,00	
676	DINAS PERIKANAN	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	79.200.000,00	77.900.000,00	(1.300.000,00)	98,36	1.300.000,00	
677	DINAS PERIKANAN	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.700.000,00	1.696.000,00	(4.000,00)	99,76	4.000,00	
678	DINAS PERIKANAN	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	29.231.674,00	28.328.000,00	(903.674,00)	96,91	903.674,00	
679	DINAS PERIKANAN	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	197.706.500,00	196.338.710,00	(1.367.790,00)	99,31	1.367.790,00	
680	DINAS PERIKANAN	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	195.836.344,00	193.410.000,00	(2.426.344,00)	98,76	2.426.344,00	
681	DINAS PERIKANAN	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	744.172.410,00	742.400.484,00	(1.771.926,00)	99,76	1.771.926,00	
682	DINAS PERIKANAN	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	125.995.762,00	122.302.390,00	(3.693.372,00)	97,07	3.693.372,00	
683	DINAS PERIKANAN	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	36.554.900,00	35.463.500,00	(1.091.400,00)	97,01	1.091.400,00	

NO	NAMA SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH				JUMLAH YANG MASIH HARUS DIANGGARKAN KEMBALI PADA APBD BERIKUTNYA	DASAR HUKUM
			ANGGARAN	REALISASI	TAMBAH/KURANG	%		
684	DINAS PERIKANAN	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	48.509.987,00	47.739.000,00	(770.987,00)	98,41	770.987,00	
685	DINAS PERIKANAN	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00	0,00	
686	BAGIAN PEMERINTAHAN	Penataan Administrasi Pemerintahan	201.694.194,00	199.694.117,00	(2.000.077,00)	99,01	2.000.077,00	
687	BAGIAN PEMERINTAHAN	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	60.225.708,00	58.977.634,00	(1.248.074,00)	97,93	1.248.074,00	
688	BAGIAN PEMERINTAHAN	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	209.879.533,00	206.668.061,00	(3.211.472,00)	98,47	3.211.472,00	
689	BAGIAN PEMERINTAHAN	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	24.264.462,00	24.055.705,00	(208.757,00)	99,14	208.757,00	
690	BAGIAN PEMERINTAHAN	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	800.670,00	800.000,00	(670,00)	99,92	670,00	
691	BAGIAN HUKUM DAN HAM	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	161.161.268,00	148.699.200,00	(12.462.068,00)	92,27	12.462.068,00	
692	BAGIAN HUKUM DAN HAM	Fasilitasi Bantuan Hukum	55.092.654,00	54.982.300,00	(110.354,00)	99,80	110.354,00	
693	BAGIAN HUKUM DAN HAM	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	96.978.057,00	86.952.300,00	(10.025.757,00)	89,66	10.025.757,00	
694	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	2.659.432.954,00	2.031.932.954,00	(627.500.000,00)	76,40	627.500.000,00	
695	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	235.581.280,00	234.994.780,00	(586.500,00)	99,75	586.500,00	
696	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	84.888.382,00	74.491.371,00	(10.397.011,00)	87,75	10.397.011,00	
697	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	0,00	
698	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	237.930.284,00	237.388.040,00	(542.244,00)	99,77	542.244,00	
699	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	65.122.978,00	60.685.900,00	(4.437.078,00)	93,19	4.437.078,00	
700	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	42.509.504,00	40.672.000,00	(1.837.504,00)	95,68	1.837.504,00	
701	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	173.213.616,00	172.779.672,00	(433.944,00)	99,75	433.944,00	
702	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	58.298.500,00	58.059.851,00	(238.649,00)	99,59	238.649,00	
703	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	23.537.238,00	23.334.484,00	(202.754,00)	99,14	202.754,00	
704	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	317.275.458,00	301.259.000,00	(16.016.458,00)	94,95	16.016.458,00	
705	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	375.681.493,00	374.942.487,00	(739.006,00)	99,80	739.006,00	
706	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	122.458.629,00	115.174.400,00	(7.284.229,00)	94,05	7.284.229,00	
707	BAGIAN UMUM	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.221.960,00	10.221.000,00	(960,00)	99,99	960,00	
708	BAGIAN UMUM	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.371.960,00	6.371.000,00	(960,00)	99,98	960,00	
709	BAGIAN UMUM	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.844.540,00	7.844.000,00	(540,00)	99,99	540,00	
710	BAGIAN UMUM	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.722.257.179,60	4.646.528.782,00	(75.728.397,60)	98,40	75.728.397,60	
711	BAGIAN UMUM	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	223.001.669,00	223.001.000,00	(669,00)	100,00	669,00	
712	BAGIAN UMUM	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	369.050.000,00	369.034.350,00	(15.650,00)	100,00	15.650,00	
713	BAGIAN UMUM	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	91.748.145,00	91.748.000,00	(145,00)	100,00	145,00	
714	BAGIAN UMUM	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	943.120.000,00	943.120.000,00	0,00	100,00	0,00	
715	BAGIAN UMUM	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	346.045.695,00	346.045.000,00	(695,00)	100,00	695,00	
716	BAGIAN UMUM	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.133.758.000,00	1.132.999.600,00	(758.400,00)	99,93	758.400,00	
717	BAGIAN UMUM	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	298.185.000,00	298.185.000,00	0,00	100,00	0,00	
718	BAGIAN UMUM	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.498.550.000,00	1.498.532.481,00	(17.519,00)	100,00	17.519,00	
719	BAGIAN UMUM	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.805.449.170,00	2.805.328.397,00	(120.773,00)	100,00	120.773,00	
720	BAGIAN UMUM	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.487.085.000,00	1.477.955.000,00	(9.130.000,00)	99,39	9.130.000,00	
721	BAGIAN UMUM	Pengadaan Mebel	201.550.000,00	201.400.000,00	(150.000,00)	99,93	150.000,00	
722	BAGIAN UMUM	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	563.312.350,00	562.102.500,00	(1.209.850,00)	99,79	1.209.850,00	
723	BAGIAN UMUM	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	43.876.612,00	42.873.000,00	(1.003.612,00)	97,71	1.003.612,00	
724	BAGIAN UMUM	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	888.697.000,00	816.956.692,00	(71.740.308,00)	91,93	71.740.308,00	
725	BAGIAN UMUM	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.655.615.400,00	1.655.610.400,00	(5.000,00)	100,00	5.000,00	
726	BAGIAN UMUM	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	721.371.125,00	721.348.960,00	(22.165,00)	100,00	22.165,00	
727	BAGIAN UMUM	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.112.975.000,00	1.109.222.226,00	(3.752.774,00)	99,66	3.752.774,00	
728	BAGIAN UMUM	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	705.195.000,00	704.333.500,00	(861.500,00)	99,88	861.500,00	
729	BAGIAN UMUM	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.402.032.000,00	1.394.096.000,00	(7.936.000,00)	99,43	7.936.000,00	
730	BAGIAN UMUM	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	219.973.314,00	207.083.174,00	(12.890.140,00)	94,14	12.890.140,00	
731	BAGIAN UMUM	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	232.770.000,00	231.687.000,00	(1.083.000,00)	99,53	1.083.000,00	
732	BAGIAN UMUM	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	130.000.000,00	129.984.500,00	(15.500,00)	99,99	15.500,00	
733	BAGIAN UMUM	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	400.000.000,00	399.600.000,00	(400.000,00)	99,90	400.000,00	
734	BAGIAN UMUM	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	1.968.150.000,00	1.966.231.150,00	(1.918.850,00)	99,90	1.918.850,00	
735	BAGIAN UMUM	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	1.450.010.000,00	1.448.766.000,00	(1.244.000,00)	99,91	1.244.000,00	

NO	NAMA SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH				JUMLAH YANG MASIH HARUS DIANGGARKAN KEMBALI PADA APBD BERIKUTNYA	DASAR HUKUM
			ANGGARAN	REALISASI	TAMBAH/KURANG	%		
736	BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	102.838.344,00	102.837.818,00	(526,00)	100,00	526,00	
737	BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	111.367.950,00	111.367.878,00	(72,00)	100,00	72,00	
738	BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	109.088.424,00	103.588.000,00	(5.500.424,00)	94,96	5.500.424,00	
739	BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	659.290.166,00	659.105.000,00	(185.166,00)	99,97	185.166,00	
740	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	Fasilitasi Keprotokolan	242.985.488,00	237.828.196,00	(5.157.292,00)	97,88	5.157.292,00	
741	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	80.280.000,00	80.275.000,00	(5.000,00)	99,99	5.000,00	
742	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	110.617.593,00	110.557.000,00	(60.593,00)	99,95	60.593,00	
743	SEKRETARIAT DPRD	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.767.799,00	2.751.000,00	(16.799,00)	99,39	16.799,00	
744	SEKRETARIAT DPRD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.506.253,00	7.506.253,00	0,00	100,00	0,00	
745	SEKRETARIAT DPRD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.612.473,00	7.612.473,00	0,00	100,00	0,00	
746	SEKRETARIAT DPRD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7.631.253,00	7.619.000,00	(12.253,00)	99,84	12.253,00	
747	SEKRETARIAT DPRD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	7.000.010,00	7.000.010,00	0,00	100,00	0,00	
748	SEKRETARIAT DPRD	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.132.171,00	6.132.171,00	0,00	100,00	0,00	
749	SEKRETARIAT DPRD	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.764.143.045,68	1.632.795.166,00	(131.347.879,68)	92,55	131.347.879,68	
750	SEKRETARIAT DPRD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.231.253,00	7.231.253,00	0,00	100,00	0,00	
751	SEKRETARIAT DPRD	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	234.600.000,00	232.000.000,00	(2.600.000,00)	98,89	2.600.000,00	
752	SEKRETARIAT DPRD	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	236.000.000,00	233.000.000,00	(3.000.000,00)	98,73	3.000.000,00	
753	SEKRETARIAT DPRD	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	335.143.000,00	326.455.300,00	(8.687.700,00)	97,41	8.687.700,00	
754	SEKRETARIAT DPRD	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.810.990,00	9.809.990,00	(1.000,00)	99,99	1.000,00	
755	SEKRETARIAT DPRD	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	576.465.000,00	535.075.001,00	(41.389.999,00)	92,82	41.389.999,00	
756	SEKRETARIAT DPRD	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.399.000,00	3.399.000,00	0,00	100,00	0,00	
757	SEKRETARIAT DPRD	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	85.998.240,32	85.996.345,00	(1.895,32)	100,00	1.895,32	
758	SEKRETARIAT DPRD	Fasilitasi Kunjungan Tamu	591.485.000,00	590.139.000,00	(1.346.000,00)	99,77	1.346.000,00	
759	SEKRETARIAT DPRD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.389.350,00	100.192.848,00	(196.502,00)	99,80	196.502,00	
760	SEKRETARIAT DPRD	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.538.852,00	7.538.852,00	0,00	100,00	0,00	
761	SEKRETARIAT DPRD	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	254.195.904,00	254.195.283,00	(621,00)	100,00	621,00	
762	SEKRETARIAT DPRD	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	532.220.000,00	529.340.000,00	(2.880.000,00)	99,46	2.880.000,00	
763	SEKRETARIAT DPRD	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	228.325.900,00	228.124.600,00	(201.300,00)	99,91	201.300,00	
764	SEKRETARIAT DPRD	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	104.105.990,00	104.050.000,00	(55.990,00)	99,95	55.990,00	
765	SEKRETARIAT DPRD	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	7.853.967.993,00	7.742.534.372,00	(111.433.621,00)	98,58	111.433.621,00	
766	SEKRETARIAT DPRD	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	203.359.425,00	199.799.425,00	(3.560.000,00)	98,25	3.560.000,00	
767	SEKRETARIAT DPRD	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	1.188.501.590,00	1.172.841.400,00	(15.660.190,00)	98,68	15.660.190,00	
768	SEKRETARIAT DPRD	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	251.698.892,00	251.599.780,00	(99.112,00)	99,96	99.112,00	
769	SEKRETARIAT DPRD	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	8.965.450,00	8.964.750,00	(700,00)	99,99	700,00	
770	SEKRETARIAT DPRD	Pembahasan KUA dan PPAS	32.379.662,00	32.379.662,00	0,00	100,00	0,00	
771	SEKRETARIAT DPRD	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	31.990.506,00	31.990.506,00	0,00	100,00	0,00	
772	SEKRETARIAT DPRD	Pembahasan APBD	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00	100,00	0,00	
773	SEKRETARIAT DPRD	Pembahasan APBD Perubahan	31.877.890,00	31.877.890,00	0,00	100,00	0,00	
774	SEKRETARIAT DPRD	Pembahasan Laporan Semester	16.160.294,00	16.160.294,00	0,00	100,00	0,00	
775	SEKRETARIAT DPRD	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	100,00	0,00	
776	SEKRETARIAT DPRD	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	443.400.000,00	443.400.000,00	0,00	100,00	0,00	
777	SEKRETARIAT DPRD	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	132.000.000,00	132.000.000,00	0,00	100,00	0,00	
778	SEKRETARIAT DPRD	Kunjungan Kerja dalam Daerah	33.594.750,00	19.151.500,00	(14.443.250,00)	57,01	14.443.250,00	
779	SEKRETARIAT DPRD	Pelaksanaan Reses	899.454.000,00	899.454.000,00	0,00	100,00	0,00	
780	SEKRETARIAT DPRD	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1.935.808.600,00	1.935.472.607,00	(335.993,00)	99,98	335.993,00	
781	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.618.778,00	50.206.000,00	(412.778,00)	99,18	412.778,00	
782	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9.587.421,00	9.135.400,00	(452.021,00)	95,29	452.021,00	
783	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.969.914,00	6.787.600,00	(182.314,00)	97,38	182.314,00	
784	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.765.322,00	2.764.400,00	(922,00)	99,97	922,00	
785	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	4.441.031,00	4.440.000,00	(1.031,00)	99,98	1.031,00	
786	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	64.538.969,00	61.851.400,00	(2.687.569,00)	95,84	2.687.569,00	
787	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.687.804.612,00	1.572.978.848,00	(114.825.764,00)	93,20	114.825.764,00	
788	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	36.439.974,00	36.216.400,00	(223.574,00)	99,39	223.574,00	
789	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	55.401.683,00	46.938.648,00	(8.463.035,00)	84,72	8.463.035,00	

NO	NAMA SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH				JUMLAH YANG MASIH HARUS DIANGGARKAN KEMBALI PADA APBD BERIKUTNYA	DASAR HUKUM
			ANGGARAN	REALISASI	TAMBAH/KURANG	%		
790	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	26.049.943,00	25.826.400,00	(223.543,00)	99,14	223.543,00	
791	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	7.120.000,00	7.090.000,00	(30.000,00)	99,58	30.000,00	
792	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.629.950,00	1.625.000,00	(4.950,00)	99,70	4.950,00	
793	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	46.766.800,00	45.940.000,00	(826.800,00)	98,23	826.800,00	
794	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	35.650.000,00	35.620.000,00	(30.000,00)	99,92	30.000,00	
795	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	Fasilitasi Kunjungan Tamu	49.250.000,00	48.050.000,00	(1.200.000,00)	97,56	1.200.000,00	
796	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	84.613.350,00	82.453.207,00	(2.160.143,00)	97,45	2.160.143,00	
797	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00	0,00	
798	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	75.134.124,00	61.237.800,00	(13.896.324,00)	81,50	13.896.324,00	
799	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.724.200,00	19.443.092,00	(1.281.108,00)	93,82	1.281.108,00	
800	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	83.400.000,00	82.400.000,00	(1.000.000,00)	98,80	1.000.000,00	
801	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20.115.000,00	18.319.200,00	(1.795.800,00)	91,07	1.795.800,00	
802	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.598.750,00	20.508.000,00	(90.750,00)	99,56	90.750,00	
803	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	358.860.000,00	320.945.000,00	(37.915.000,00)	89,43	37.915.000,00	
804	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	31.014.005,00	27.325.900,00	(3.688.105,00)	88,11	3.688.105,00	
805	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	Pelaksanaan Konsultasi Publik	11.000.616,00	10.998.100,00	(2.516,00)	99,98	2.516,00	
806	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	13.125.571,00	13.065.300,00	(60.271,00)	99,54	60.271,00	
807	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	13.851.093,00	13.130.822,00	(720.271,00)	94,80	720.271,00	
808	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	9.352.268,00	7.267.200,00	(2.085.068,00)	77,71	2.085.068,00	
809	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	10.944.724,00	10.128.100,00	(816.624,00)	92,54	816.624,00	
810	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	36.367.487,00	33.241.200,00	(3.126.287,00)	91,40	3.126.287,00	
811	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	105.213.757,00	103.650.300,00	(1.563.457,00)	98,51	1.563.457,00	
812	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5.023.300,00	4.937.100,00	(86.200,00)	98,28	86.200,00	
813	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	4.689.078,00	4.673.600,00	(15.478,00)	99,67	15.478,00	
814	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	5.384.617,00	4.258.300,00	(1.126.317,00)	79,08	1.126.317,00	
815	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	7.848.074,00	7.738.400,00	(109.674,00)	98,60	109.674,00	
816	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	23.998.067,00	19.800.600,00	(4.197.467,00)	82,51	4.197.467,00	
817	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	4.085.574,00	2.060.000,00	(2.025.574,00)	50,42	2.025.574,00	
818	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	9.780.005,00	7.529.300,00	(2.250.705,00)	76,99	2.250.705,00	
819	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	129.300.746,00	113.576.300,00	(15.724.446,00)	87,84	15.724.446,00	
820	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	50.902.601,00	43.522.600,00	(7.380.001,00)	85,50	7.380.001,00	
821	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	9.674.773,00	5.680.900,00	(3.993.873,00)	58,72	3.993.873,00	
822	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	17.693.397,00	16.271.000,00	(1.422.397,00)	91,96	1.422.397,00	

NO	NAMA SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH				JUMLAH YANG MASIH HARUS DIANGGARKAN KEMBALI PADA APBD BERIKUTNYA	DASAR HUKUM
			ANGGARAN	REALISASI	TAMBAH/KURANG	%		
823	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	13.459.555,00	11.096.900,00	(2.362.655,00)	82,45	2.362.655,00	
824	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	18.174.144,00	14.431.480,00	(3.742.664,00)	79,41	3.742.664,00	
825	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	10.479.000,00	9.233.700,00	(1.245.300,00)	88,12	1.245.300,00	
826	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	16.838.936,00	13.854.418,00	(2.984.518,00)	82,28	2.984.518,00	
827	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	65.704.405,00	61.060.100,00	(4.644.305,00)	92,93	4.644.305,00	
828	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	779.489.123,00	627.965.700,00	(151.523.423,00)	80,56	151.523.423,00	
829	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00	0,00	
830	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	135.884.855,00	135.557.500,00	(327.355,00)	99,76	327.355,00	
831	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	31.216.335,00	30.566.533,00	(649.802,00)	97,92	649.802,00	
832	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.864.218,00	5.678.696,00	(185.522,00)	96,84	185.522,00	
833	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.032.698,00	3.029.198,00	(2.003.500,00)	60,19	2.003.500,00	
834	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.956.757,00	5.456.757,00	(500.000,00)	91,61	500.000,00	
835	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	5.875.306,00	4.550.000,00	(1.325.306,00)	77,44	1.325.306,00	
836	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.943.381,00	12.943.318,00	(63,00)	100,00	63,00	
837	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.595.917,00	21.241.000,00	(1.354.917,00)	94,00	1.354.917,00	
838	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.408.880.527,80	2.826.826.552,00	(1.582.053.975,80)	64,12	1.582.053.975,80	
839	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	45.380.578,00	45.379.555,00	(1.023,00)	100,00	1.023,00	
840	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	12.765.393,00	12.750.000,00	(15.393,00)	99,88	15.393,00	
841	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	24.709.319,00	24.209.000,00	(500.319,00)	97,98	500.319,00	
842	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	114.265.425,00	111.865.000,00	(2.400.425,00)	97,90	2.400.425,00	
843	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	60.858.918,00	60.745.500,00	(113.418,00)	99,81	113.418,00	
844	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Monitoring, Evalnasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	45.322.915,00	45.312.771,00	(10.144,00)	99,98	10.144,00	
845	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	195.000.000,00	195.000.000,00	0,00	100,00	0,00	
846	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.018.250,00	26.018.250,00	0,00	100,00	0,00	
847	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	28.260.000,00	28.260.000,00	0,00	100,00	0,00	
848	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	0,00	
849	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	159.781.450,00	157.921.450,00	(1.860.000,00)	98,84	1.860.000,00	
850	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	186.000.000,00	180.000.000,00	(6.000.000,00)	96,77	6.000.000,00	
851	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Pengadaan Mebel	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	0,00	
852	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	81.450.000,00	79.118.000,00	(2.332.000,00)	97,14	2.332.000,00	
853	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	38.684.460,00	33.063.192,00	(5.621.268,00)	85,47	5.621.268,00	
854	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	168.917.195,00	166.185.162,00	(2.732.033,00)	98,38	2.732.033,00	
855	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	423.318.200,00	131.277.915,00	(292.040.285,00)	31,01	292.040.285,00	

NO	NAMA SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH				JUMLAH YANG MASIH HARUS DIANGGARKAN KEMBALI PADA APBD BERIKUTNYA	DASAR HUKUM
			ANGGARAN	REALISASI	TAMBAH/KURANG	%		
856	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.700.000,00	7.255.000,00	(9.445.000,00)	43,44	9.445.000,00	
857	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	130.000.000,00	118.156.678,00	(11.843.322,00)	90,89	11.843.322,00	
858	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	34.166.622,00	32.810.000,00	(1.356.622,00)	96,03	1.356.622,00	
859	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	34.393.159,00	33.690.000,00	(703.159,00)	97,96	703.159,00	
860	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	44.227.514,00	42.200.000,00	(2.027.514,00)	95,42	2.027.514,00	
861	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	45.649.076,00	44.600.000,00	(1.049.076,00)	97,70	1.049.076,00	
862	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	20.984.133,00	20.470.000,00	(514.133,00)	97,55	514.133,00	
863	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	54.949.003,00	49.000.000,00	(5.949.003,00)	89,17	5.949.003,00	
864	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	648.893.582,00	592.951.000,00	(55.942.582,00)	91,38	55.942.582,00	
865	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	319.589.354,00	313.070.753,00	(6.518.601,00)	97,96	6.518.601,00	
866	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	190.057.168,00	188.077.191,00	(1.979.977,00)	98,96	1.979.977,00	
867	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	12.479.867,00	12.354.700,00	(125.167,00)	99,00	125.167,00	
868	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	46.714.267,00	46.551.918,00	(162.349,00)	99,65	162.349,00	
869	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	112.493.383,00	95.495.044,00	(16.998.339,00)	84,89	16.998.339,00	
870	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	25.990.930,00	25.975.000,00	(15.930,00)	99,94	15.930,00	
871	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	39.970.587,00	39.955.587,00	(15.000,00)	99,96	15.000,00	
872	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	20.479.111,00	20.478.000,00	(1.111,00)	99,99	1.111,00	
873	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	26.040.241,00	25.955.000,00	(85.241,00)	99,67	85.241,00	
874	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	25.219.791,00	25.219.000,00	(791,00)	100,00	791,00	
875	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	145.291.297,00	145.045.600,00	(245.697,00)	99,83	245.697,00	
876	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	146.521.048,00	136.504.806,00	(10.016.242,00)	93,16	10.016.242,00	
877	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	6.839.496,00	0,00	(6.839.496,00)	0,00	6.839.496,00	
878	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	14.389.379,00	14.375.000,00	(14.379,00)	99,90	14.379,00	
879	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	41.731.091,00	41.646.000,00	(85.091,00)	99,80	85.091,00	
880	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	87.616.788.800,00	84.790.265.420,00	(2.826.523.380,00)	96,77	2.826.523.380,00	
881	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	895.000.000,00	696.208.433,00	(198.791.567,00)	77,79	198.791.567,00	
882	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	63.916.855,00	52.475.000,00	(11.441.855,00)	82,10	11.441.855,00	
883	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	127.722.000,00	107.404.921,00	(20.317.079,00)	84,09	20.317.079,00	
884	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	98.131.364,00	97.880.000,00	(251.364,00)	99,74	251.364,00	
885	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Penyusunan Standar Harga	22.807.684,00	22.780.000,00	(27.684,00)	99,88	27.684,00	
886	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	22.051.695,00	22.048.000,00	(3.695,00)	99,98	3.695,00	
887	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	100,00	0,00	
888	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Penatausahaan Barang Milik Daerah	270.117.732,00	270.071.540,00	(46.192,00)	99,98	46.192,00	

NO	NAMA SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH				JUMLAH YANG MASIH HARUS DIANGGARKAN KEMBALI PADA APBD BERIKUTNYA	DASAR HUKUM
			ANGGARAN	REALISASI	TAMBAH/KURANG	%		
889	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Pengamanan Barang Milik Daerah	100.360.000,00	83.628.390,00	(16.731.610,00)	83,33	16.731.610,00	
890	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Penilaian Barang Milik Daerah	38.056.015,00	25.874.000,00	(12.182.015,00)	67,99	12.182.015,00	
891	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	93.856.558,00	78.173.000,00	(15.683.558,00)	83,29	15.683.558,00	
892	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	11.917.514,00	11.913.000,00	(4.514,00)	99,96	4.514,00	
893	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	114.290.905,00	110.383.000,00	(3.907.905,00)	96,58	3.907.905,00	
894	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	32.290.000,00	32.290.000,00	0,00	100,00	0,00	
895	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	54.846.664,00	54.721.669,00	(124.995,00)	99,77	124.995,00	
896	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	83.080.808,00	83.080.808,00	0,00	100,00	0,00	
897	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	241.286.000,00	241.101.000,00	(185.000,00)	99,92	185.000,00	
898	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	50.365.438,00	46.365.438,00	(4.000.000,00)	92,06	4.000.000,00	
899	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	169.478.121,00	169.345.571,00	(132.550,00)	99,92	132.550,00	
900	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	136.391.572,00	118.259.210,00	(18.132.362,00)	86,71	18.132.362,00	
901	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Penetapan Wajib Pajak Daerah	30.921.564,00	30.891.000,00	(30.564,00)	99,90	30.564,00	
902	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	82.602.494,00	82.602.494,00	0,00	100,00	0,00	
903	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	23.065.847,00	23.065.847,00	0,00	100,00	0,00	
904	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Penagihan Pajak Daerah	479.460.920,00	471.981.458,00	(7.479.462,00)	98,44	7.479.462,00	
905	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	100.239.444,00	98.893.040,00	(1.346.404,00)	98,66	1.346.404,00	
906	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	96.925.315,00	96.059.531,00	(865.784,00)	99,11	865.784,00	
907	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	45.947.444,00	45.692.935,00	(254.509,00)	99,45	254.509,00	
908	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29.314.563,00	26.780.000,00	(2.534.563,00)	91,35	2.534.563,00	
909	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.103.388,00	5.101.000,00	(2.388,00)	99,95	2.388,00	
910	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	5.103.388,00	5.101.000,00	(2.388,00)	99,95	2.388,00	
911	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.844.732.441,06	1.710.088.244,00	(134.644.197,06)	92,70	134.644.197,06	
912	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	39.690.563,00	37.090.000,00	(2.600.563,00)	93,45	2.600.563,00	
913	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	13.782.953,00	13.780.000,00	(2.953,00)	99,98	2.953,00	
914	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	0,00	
915	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Fasilitasi Kunjungan Tamu	17.685.000,00	7.798.000,00	(9.887.000,00)	44,09	9.887.000,00	
916	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	46.681.700,00	46.681.700,00	0,00	100,00	0,00	
917	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.000.000,00	24.446.250,00	(553.750,00)	97,79	553.750,00	
918	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	33.468.688,00	27.429.500,00	(6.039.188,00)	81,96	6.039.188,00	
919	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	49.825.750,00	49.595.000,00	(230.750,00)	99,54	230.750,00	
920	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	29.386.195,00	26.880.363,00	(2.505.832,00)	91,47	2.505.832,00	
921	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	146.654.142,00	142.143.868,00	(4.510.274,00)	96,92	4.510.274,00	
922	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	31.252.480,00	25.248.124,00	(6.004.356,00)	80,79	6.004.356,00	

NO	NAMA SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH				JUMLAH YANG MASIH HARUS DIANGGARKAN KEMBALI PADA APBD BERIKUTNYA	DASAR HUKUM
			ANGGARAN	REALISASI	TAMBAH/KURANG	%		
923	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Pengelolaan Mutasi ASN	15.513.192,00	15.506.140,00	(7.052,00)	99,95	7.052,00	
924	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	46.587.901,00	42.548.852,00	(4.039.049,00)	91,33	4.039.049,00	
925	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Pengelolaan Promosi ASN	467.523.940,00	229.074.034,00	(238.449.906,00)	49,00	238.449.906,00	
926	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	306.544.932,00	302.774.307,00	(3.770.625,00)	98,77	3.770.625,00	
927	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	375.954.215,00	231.029.215,00	(144.925.000,00)	61,45	144.925.000,00	
928	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	972.981.974,00	951.397.347,00	(21.584.627,00)	97,78	21.584.627,00	
929	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	13.311.136,00	13.275.363,00	(35.773,00)	99,73	35.773,00	
930	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	21.148.197,00	21.136.900,00	(11.297,00)	99,95	11.297,00	
931	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Pembinaan Disiplin ASN	19.889.669,00	19.883.184,00	(6.485,00)	99,97	6.485,00	
932	INSPEKTORAT	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	57.081.498,00	57.045.000,00	(36.498,00)	99,94	36.498,00	
933	INSPEKTORAT	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.978.576,00	4.960.000,00	(18.576,00)	99,63	18.576,00	
934	INSPEKTORAT	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	19.145.457,00	19.135.000,00	(10.457,00)	99,95	10.457,00	
935	INSPEKTORAT	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.268.288,00	4.254.000,00	(14.288,00)	99,67	14.288,00	
936	INSPEKTORAT	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	13.846.580,00	13.790.000,00	(56.580,00)	99,59	56.580,00	
937	INSPEKTORAT	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.039.632,00	4.990.000,00	(49.632,00)	99,02	49.632,00	
938	INSPEKTORAT	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.742.836.788,00	2.660.958.720,00	(81.878.068,00)	97,01	81.878.068,00	
939	INSPEKTORAT	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	34.682.900,00	34.134.500,00	(548.400,00)	98,42	548.400,00	
940	INSPEKTORAT	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.867.900,00	5.819.500,00	(48.400,00)	99,18	48.400,00	
941	INSPEKTORAT	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	589.061.350,00	584.884.862,00	(4.176.488,00)	99,29	4.176.488,00	
942	INSPEKTORAT	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.868.391,00	1.800.000,00	(68.391,00)	96,34	68.391,00	
943	INSPEKTORAT	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	181.714.557,00	181.658.557,00	(56.000,00)	99,97	56.000,00	
944	INSPEKTORAT	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.776.000,00	721.000,00	(1.055.000,00)	40,60	1.055.000,00	
945	INSPEKTORAT	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16.798.000,00	16.798.000,00	0,00	100,00	0,00	
946	INSPEKTORAT	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	298.833.100,00	298.753.100,00	(80.000,00)	99,97	80.000,00	
947	INSPEKTORAT	Pengadaan Mebel	45.676.500,00	45.676.500,00	0,00	100,00	0,00	
948	INSPEKTORAT	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.987.586.259,00	2.985.113.420,00	(2.472.839,00)	99,92	2.472.839,00	
949	INSPEKTORAT	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	0,00	
950	INSPEKTORAT	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	41.212.824,00	40.851.324,00	(361.500,00)	99,12	361.500,00	
951	INSPEKTORAT	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	106.600.000,00	97.600.000,00	(9.000.000,00)	91,56	9.000.000,00	
952	INSPEKTORAT	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	47.045.800,00	47.010.000,00	(35.800,00)	99,92	35.800,00	
953	INSPEKTORAT	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	31.346.000,00	30.395.700,00	(950.300,00)	96,97	950.300,00	
954	INSPEKTORAT	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.200.000,00	22.050.000,00	(150.000,00)	99,32	150.000,00	
955	INSPEKTORAT	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	188.720.000,00	188.610.000,00	(110.000,00)	99,94	110.000,00	
956	INSPEKTORAT	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	256.560.000,00	256.560.000,00	0,00	100,00	0,00	
957	INSPEKTORAT	Reviu Laporan Kinerja	433.424.000,00	433.415.600,00	(8.400,00)	100,00	8.400,00	
958	INSPEKTORAT	Reviu Laporan Keuangan	154.368.000,00	154.368.000,00	0,00	100,00	0,00	
959	INSPEKTORAT	Pengawasan Desa	82.400.000,00	82.400.000,00	0,00	100,00	0,00	
960	INSPEKTORAT	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	109.856.000,00	109.813.200,00	(42.800,00)	99,96	42.800,00	
961	INSPEKTORAT	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	30.728.000,00	30.713.400,00	(14.600,00)	99,95	14.600,00	
962	INSPEKTORAT	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	289.416.000,00	289.151.714,00	(264.286,00)	99,91	264.286,00	
963	INSPEKTORAT	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	523.684.576,00	522.488.080,00	(1.196.496,00)	99,77	1.196.496,00	
964	INSPEKTORAT	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	15.200.000,00	15.200.000,00	0,00	100,00	0,00	
965	KECAMATAN TOPOYO	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.043.839,00	1.043.839,00	0,00	100,00	0,00	
966	KECAMATAN TOPOYO	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.071.094,00	2.071.094,00	0,00	100,00	0,00	
967	KECAMATAN TOPOYO	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.094.282,00	3.094.282,00	0,00	100,00	0,00	
968	KECAMATAN TOPOYO	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.670.908,00	1.670.908,00	0,00	100,00	0,00	
969	KECAMATAN TOPOYO	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.332.258,00	2.332.258,00	0,00	100,00	0,00	
970	KECAMATAN TOPOYO	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	64.252.443,00	64.252.443,00	0,00	100,00	0,00	
971	KECAMATAN TOPOYO	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.313.315,00	2.313.315,00	0,00	100,00	0,00	
972	KECAMATAN TOPOYO	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.063.897.087,19	982.097.565,00	(81.799.522,19)	92,31	81.799.522,19	
973	KECAMATAN TOPOYO	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.954.131,00	1.954.131,00	0,00	100,00	0,00	
974	KECAMATAN TOPOYO	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1.696.443,00	1.696.443,00	0,00	100,00	0,00	
975	KECAMATAN TOPOYO	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8.180.000,00	7.500.000,00	(680.000,00)	91,69	680.000,00	

NO	NAMA SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH				JUMLAH YANG MASIH HARUS DIANGGARKAN KEMBALI PADA APBD BERIKUTNYA	DASAR HUKUM
			ANGGARAN	REALISASI	TAMBAH/KURANG	%		
976	KECAMATAN TOPOYO	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.155.390,00	15.155.390,00	0,00	100,00	0,00	
977	KECAMATAN TOPOYO	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	424.559,00	424.559,00	0,00	100,00	0,00	
978	KECAMATAN TOPOYO	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	795.956,00	795.956,00	0,00	100,00	0,00	
979	KECAMATAN TOPOYO	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	100,00	0,00	
980	KECAMATAN TOPOYO	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.868.000,00	10.849.900,00	(18.100,00)	99,83	18.100,00	
981	KECAMATAN TOPOYO	Pengadaan Mebel	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	100,00	0,00	
982	KECAMATAN TOPOYO	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	948.500,00	948.500,00	0,00	100,00	0,00	
983	KECAMATAN TOPOYO	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	34.201.111,00	34.201.111,00	0,00	100,00	0,00	
984	KECAMATAN TOPOYO	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.098.044,00	13.485.144,00	(1.612.900,00)	89,32	1.612.900,00	
985	KECAMATAN TOPOYO	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	44.100.000,00	44.100.000,00	0,00	100,00	0,00	
986	KECAMATAN TOPOYO	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	85.575.000,00	84.152.000,00	(1.423.000,00)	98,34	1.423.000,00	
987	KECAMATAN TOPOYO	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2.203.711,00	2.203.711,00	0,00	100,00	0,00	
988	KECAMATAN TOPOYO	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	33.028.315,00	30.528.315,00	(2.500.000,00)	92,43	2.500.000,00	
989	KECAMATAN TOPOYO	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	26.059.550,00	26.059.550,00	0,00	100,00	0,00	
990	KECAMATAN TOPOYO	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	19.249.376,00	17.749.376,00	(1.500.000,00)	92,21	1.500.000,00	
991	KECAMATAN TOPOYO	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	741.443,00	741.443,00	0,00	100,00	0,00	
992	KECAMATAN TOPOYO	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1.285.000,00	1.285.000,00	0,00	100,00	0,00	
993	KECAMATAN TOPOYO	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	2.198.140,00	2.198.140,00	0,00	100,00	0,00	
994	KECAMATAN TOPOYO	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	29.241.678,00	26.741.678,00	(2.500.000,00)	91,45	2.500.000,00	
995	KECAMATAN PANGALE	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.677.773,00	1.674.000,00	(3.773,00)	99,78	3.773,00	
996	KECAMATAN PANGALE	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.677.773,00	1.674.000,00	(3.773,00)	99,78	3.773,00	
997	KECAMATAN PANGALE	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.677.773,00	1.676.600,00	(1.173,00)	99,93	1.173,00	
998	KECAMATAN PANGALE	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.677.773,00	1.674.000,00	(3.773,00)	99,78	3.773,00	
999	KECAMATAN PANGALE	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	34.454.490,00	34.453.800,00	(690,00)	100,00	690,00	
1000	KECAMATAN PANGALE	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.126.402.351,92	1.085.432.069,00	(40.970.282,92)	96,36	40.970.282,92	
1001	KECAMATAN PANGALE	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9.402.924,00	9.398.600,00	(4.324,00)	99,95	4.324,00	
1002	KECAMATAN PANGALE	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	41.030.088,00	41.029.680,00	(408,00)	100,00	408,00	
1003	KECAMATAN PANGALE	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	7.550.075,00	3.949.200,00	(3.600.875,00)	52,31	3.600.875,00	
1004	KECAMATAN PANGALE	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6.360.000,00	6.360.000,00	0,00	100,00	0,00	
1005	KECAMATAN PANGALE	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	0,00	
1006	KECAMATAN PANGALE	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	0,00	
1007	KECAMATAN PANGALE	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.375.000,00	5.375.000,00	0,00	100,00	0,00	
1008	KECAMATAN PANGALE	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9.528.000,00	9.458.000,00	(70.000,00)	99,27	70.000,00	
1009	KECAMATAN PANGALE	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	46.543.922,00	39.039.600,00	(7.504.322,00)	83,88	7.504.322,00	
1010	KECAMATAN PANGALE	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.541.116,00	6.726.879,00	(814.237,00)	89,20	814.237,00	
1011	KECAMATAN PANGALE	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	81.990.000,00	81.660.800,00	(329.200,00)	99,60	329.200,00	
1012	KECAMATAN PANGALE	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00	0,00	
1013	KECAMATAN PANGALE	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4.499.536,00	4.499.400,00	(136,00)	100,00	136,00	
1014	KECAMATAN PANGALE	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	22.627.268,00	22.627.200,00	(68,00)	100,00	68,00	
1015	KECAMATAN PANGALE	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	13.204.536,00	10.204.000,00	(3.000.536,00)	77,28	3.000.536,00	
1016	KECAMATAN PANGALE	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	15.652.632,00	15.652.300,00	(332,00)	100,00	332,00	
1017	KECAMATAN PANGALE	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	19.213.140,00	16.713.000,00	(2.500.140,00)	86,99	2.500.140,00	
1018	KECAMATAN TOBADAK	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.019.084,00	28.519.084,00	(1.500.000,00)	95,00	1.500.000,00	
1019	KECAMATAN TOBADAK	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	19.952.087,00	18.452.087,00	(1.500.000,00)	92,48	1.500.000,00	
1020	KECAMATAN TOBADAK	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	18.288.672,00	18.288.672,00	0,00	100,00	0,00	
1021	KECAMATAN TOBADAK	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	963.680.312,00	920.617.287,00	(43.063.025,00)	95,53	43.063.025,00	
1022	KECAMATAN TOBADAK	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	13.317.225,00	13.317.225,00	0,00	100,00	0,00	
1023	KECAMATAN TOBADAK	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	19.930.626,00	19.930.626,00	0,00	100,00	0,00	
1024	KECAMATAN TOBADAK	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	9.600.455,00	9.600.455,00	0,00	100,00	0,00	
1025	KECAMATAN TOBADAK	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00	10.000.000,00	
1026	KECAMATAN TOBADAK	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	650.000,00	650.000,00	0,00	100,00	0,00	
1027	KECAMATAN TOBADAK	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	0,00	
1028	KECAMATAN TOBADAK	Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.373.278,00	8.373.278,00	0,00	100,00	0,00	
1029	KECAMATAN TOBADAK	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	22.356.000,00	22.356.000,00	0,00	100,00	0,00	
1030	KECAMATAN TOBADAK	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	100,00	0,00	

NO	NAMA SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH				JUMLAH YANG MASIH HARUS DIANGGARKAN KEMBALI PADA APBD BERIKUTNYA	DASAR HUKUM
			ANGGARAN	REALISASI	TAMBAH/KURANG	%		
1031	KECAMATAN TOBADAK	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	0,00	
1032	KECAMATAN TOBADAK	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.084.085,00	12.084.085,00	0,00	100,00	0,00	
1033	KECAMATAN TOBADAK	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.277.604,00	1.260.000,00	(17.604,00)	98,62	17.604,00	
1034	KECAMATAN TOBADAK	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	8.525.000,00	8.525.000,00	0,00	100,00	0,00	
1035	KECAMATAN TOBADAK	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.961.865,00	6.961.865,00	0,00	100,00	0,00	
1036	KECAMATAN TOBADAK	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	21.053.559,00	21.053.559,00	0,00	100,00	0,00	
1037	KECAMATAN TOBADAK	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	32.607.600,00	32.607.600,00	0,00	100,00	0,00	
1038	KECAMATAN TOBADAK	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	18.383.388,00	18.383.388,00	0,00	100,00	0,00	
1039	KECAMATAN KAROSSA	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.185.790,00	13.183.000,00	(2.790,00)	99,98	2.790,00	
1040	KECAMATAN KAROSSA	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	20.027.597,00	12.826.500,00	(7.201.097,00)	64,04	7.201.097,00	
1041	KECAMATAN KAROSSA	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.401.289,00	4.375.500,00	(25.789,00)	99,41	25.789,00	
1042	KECAMATAN KAROSSA	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.245.760,00	3.233.000,00	(12.760,00)	99,61	12.760,00	
1043	KECAMATAN KAROSSA	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.271.227.934,00	1.233.853.058,00	(37.374.876,00)	97,06	37.374.876,00	
1044	KECAMATAN KAROSSA	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	51.407.960,00	40.904.000,00	(10.503.960,00)	79,57	10.503.960,00	
1045	KECAMATAN KAROSSA	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.384.085,00	3.346.000,00	(38.085,00)	98,87	38.085,00	
1046	KECAMATAN KAROSSA	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	100,00	0,00	
1047	KECAMATAN KAROSSA	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.840.000,00	1.820.000,00	(20.000,00)	98,91	20.000,00	
1048	KECAMATAN KAROSSA	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.991.000,00	1.955.000,00	(36.000,00)	98,19	36.000,00	
1049	KECAMATAN KAROSSA	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.000.000,00	1.985.000,00	(15.000,00)	99,25	15.000,00	
1050	KECAMATAN KAROSSA	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	0,00	
1051	KECAMATAN KAROSSA	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	100,00	0,00	
1052	KECAMATAN KAROSSA	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.151.000,00	12.131.200,00	(19.800,00)	99,84	19.800,00	
1053	KECAMATAN KAROSSA	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	100,00	0,00	
1054	KECAMATAN KAROSSA	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	40.064.288,00	37.064.000,00	(3.000.288,00)	92,51	3.000.288,00	
1055	KECAMATAN KAROSSA	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.817.508,00	14.128.000,00	(1.689.508,00)	89,32	1.689.508,00	
1056	KECAMATAN KAROSSA	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	0,00	
1057	KECAMATAN KAROSSA	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4.995.000,00	4.640.000,00	(355.000,00)	92,89	355.000,00	
1058	KECAMATAN KAROSSA	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.679.280,00	4.647.000,00	(32.280,00)	99,31	32.280,00	
1059	KECAMATAN KAROSSA	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3.478.195,00	3.468.000,00	(10.195,00)	99,71	10.195,00	
1060	KECAMATAN KAROSSA	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10.492.636,00	9.940.000,00	(552.636,00)	94,73	552.636,00	
1061	KECAMATAN KAROSSA	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	22.990.465,00	22.941.000,00	(49.465,00)	99,78	49.465,00	
1062	KECAMATAN KAROSSA	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	5.777.206,00	5.775.250,00	(1.956,00)	99,97	1.956,00	
1063	KECAMATAN BUDONG-BUDONG	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	27.458.453,00	27.200.000,00	(258.453,00)	99,06	258.453,00	
1064	KECAMATAN BUDONG-BUDONG	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.158.651,00	970.000,00	(1.188.651,00)	44,94	1.188.651,00	
1065	KECAMATAN BUDONG-BUDONG	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.729.216,00	955.000,00	(774.216,00)	55,23	774.216,00	
1066	KECAMATAN BUDONG-BUDONG	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.276.825,00	2.275.000,00	(1.825,00)	99,92	1.825,00	
1067	KECAMATAN BUDONG-BUDONG	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	886.585.089,92	854.055.922,00	(32.529.167,92)	96,33	32.529.167,92	
1068	KECAMATAN BUDONG-BUDONG	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.755.501,00	10.755.000,00	(501,00)	100,00	501,00	
1069	KECAMATAN BUDONG-BUDONG	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3.165.093,00	3.160.000,00	(5.093,00)	99,84	5.093,00	
1070	KECAMATAN BUDONG-BUDONG	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.405.000,00	1.400.000,00	(5.000,00)	99,64	5.000,00	
1071	KECAMATAN BUDONG-BUDONG	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	0,00	
1072	KECAMATAN BUDONG-BUDONG	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.255.000,00	1.100.000,00	(155.000,00)	87,65	155.000,00	
1073	KECAMATAN BUDONG-BUDONG	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	0,00	
1074	KECAMATAN BUDONG-BUDONG	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.055.000,00	7.030.000,00	(25.000,00)	99,65	25.000,00	
1075	KECAMATAN BUDONG-BUDONG	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.980.000,00	5.950.000,00	(30.000,00)	99,50	30.000,00	
1076	KECAMATAN BUDONG-BUDONG	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	100,00	0,00	
1077	KECAMATAN BUDONG-BUDONG	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	29.981.540,00	28.480.000,00	(1.501.540,00)	94,99	1.501.540,00	
1078	KECAMATAN BUDONG-BUDONG	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.809.264,00	10.471.000,00	(2.338.264,00)	81,75	2.338.264,00	
1079	KECAMATAN BUDONG-BUDONG	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	0,00	
1080	KECAMATAN BUDONG-BUDONG	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5.160.000,00	4.100.000,00	(1.060.000,00)	79,46	1.060.000,00	
1081	KECAMATAN BUDONG-BUDONG	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.345.026,00	5.340.000,00	(5.026,00)	99,91	5.026,00	
1082	KECAMATAN BUDONG-BUDONG	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	30.026.925,00	30.000.000,00	(26.925,00)	99,91	26.925,00	
1083	KECAMATAN BUDONG-BUDONG	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	34.441.446,00	32.640.000,00	(1.801.446,00)	94,77	1.801.446,00	
1084	KECAMATAN BUDONG-BUDONG	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	33.751.099,00	31.945.000,00	(1.806.099,00)	94,65	1.806.099,00	

NO	NAMA SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH				JUMLAH YANG MASIH HARUS DIANGGARKAN KEMBALI PADA APBD BERIKUTNYA	DASAR HUKUM
			ANGGARAN	REALISASI	TAMBAH/KURANG	%		
1085	KECAMATAN BUDONG-BUDONG	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9.246.411,00	8.440.000,00	(806.411,00)	91,28	806.411,00	
1086	KECAMATAN BUDONG-BUDONG	*Harmonisasi Hubungan* dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	5.189.307,00	5.085.000,00	(104.307,00)	97,99	104.307,00	
1087	KECAMATAN BUDONG-BUDONG	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	7.012.971,00	7.010.000,00	(2.971,00)	99,96	2.971,00	
1088	KECAMATAN BUDONG-BUDONG	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	3.022.295,00	3.020.000,00	(2.295,00)	99,92	2.295,00	
1089	KECAMATAN BUDONG-BUDONG	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	4.213.878,00	4.210.000,00	(3.878,00)	99,91	3.878,00	
1090	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.738.070,00	12.886.000,00	(852.070,00)	93,80	852.070,00	
1091	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	31.275.000,00	31.157.000,00	(118.000,00)	99,62	118.000,00	
1092	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.475.000,00	11.903.000,00	(572.000,00)	95,41	572.000,00	
1093	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	934.372.390,92	879.990.064,00	(54.382.326,92)	94,18	54.382.326,92	
1094	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pendstaan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	37.500.000,00	28.000.000,00	(9.500.000,00)	74,67	9.500.000,00	
1095	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Penyediaan Perlatan Rumah Tangga	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	0,00	
1096	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.088.000,00	3.427.285,00	(660.715,00)	83,84	660.715,00	
1097	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	95.997.240,00	86.484.000,00	(9.513.240,00)	90,09	9.513.240,00	
1098	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	45.859.685,00	32.461.000,00	(13.398.685,00)	70,78	13.398.685,00	
1099	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.559.080,00	3.553.000,00	(6.080,00)	99,83	6.080,00	
1100	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	65.400.000,00	58.200.000,00	(7.200.000,00)	88,99	7.200.000,00	
1101	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.550.000,00	5.550.000,00	0,00	100,00	0,00	
1102	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	24.953.000,00	24.953.000,00	0,00	100,00	0,00	
1103	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	8.989.993,00	8.989.993,00	0,00	100,00	0,00	
1104	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pembentukan Paskibraka	410.821.998,00	410.780.648,00	(41.350,00)	99,99	41.350,00	
1105	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	303.500.000,00	303.500.000,00	0,00	100,00	0,00	
1106	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	373.070.000,00	373.070.000,00	0,00	100,00	0,00	
1107	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	15.758.370,00	15.704.066,00	(54.304,00)	99,66	54.304,00	
1108	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	0,00	
1109	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	32.897.953,00	23.043.200,00	(9.854.753,00)	70,04	9.854.753,00	
1110	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	25.012.974,00	25.012.000,00	(974,00)	100,00	974,00	
TOTAL			644.027.253.010,48	622.607.889.371,46	(21.419.363.639,02)	96,67	21.419.363.639,02	

MAMUJU TENGAH, 2026
BUPATI KAB. MAMUJU TENGAH

H. ARSAL ARAS

Lampiran XX.1 : Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah

Nomor :
Tanggal : 2026

PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (NERACA) BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

No	BUMD/ Perusahaan Daerah	Sumber	Status	Aset Lancar	Aset Tidak Lancar	Aset Lainnya	Total Aset	Kewajiban Jangka Pendek	Kewajiban Jangka Panjang	Total Kewajiban	Modal Saham	Tambahan Modal Disetor	BPYDS	Ekuitas Lainnya	Laba Ditahan	Total Ekuitas	% Saham Daerah	Kepemilikan Daerah
Total Seluruh Bidang industri				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAMUJU TENGAH, 2026
BUPATI KAB. MAMUJU TENGAH

H. ARSAL ARAS

Lampiran XX.2 : Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah

Nomor :
Tanggal : 2026

PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (LAPORAN LABA/RUGI) BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

No	BUMD/ Perusahaan Daerah	Sumber	Status	Pendapatan	Beban	Laba (Rugi) Kotor	Pendapatan di luar usaha	Beban di luar usaha	Laba (Rugi) Sebelum Pajak
Total Seluruh Bidang industri				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAMUJU TENGAH, 2026
BUPATI KAB. MAMUJU TENGAH

H. ARSAL ARAS